

Chapter 3

Methods and Approaches to Strengthen University-Community Engagement

Sharia Micro Financing Management on Women Moslem Community In Tulungagung

BINTI NUR ASIYAH

IAIN Tulungagung, Indonesia
binti.advan@gmail.com

Abstract: This paper aims to empower women to management of Islamic micro financing so that the living standards of the members of the congregation more increases. The focus of this paper are, first, what is the problem of women moslem congregation in Tulungagung? Second, how to strengthen the management of Islamic micro finance congregation? Third, How to increase household economic management in the group women moslem congregation in Tulungagung? Fourth, how women's access to finance? Fifth, How to increase women entrepreneurship in the congregation women Moslem congregation in Tulungagung? Sixth, how the implementation of sharia economic socialization of women moslem congregation in Tulungagung? The method used in this devotion to community empowerment semi technical community based research (CBR) are realized in the form of training and mentoring to the needs of the proposed and implemented by congregation. The first result of this devotion, women moslem congregation problem is the need to strengthen the management of savings, training and venture capital to increase revenue. second, strengthening the management of Islamic microfinance services performed by the savings management training, financing. Thirdly, the management of the household economy with FGD economic management to plan household budgets and spending family. Fourth, access to financing for the congregation performed by allocating funds for Rp.12.150.000 empowerment, - for financing activities, Fifth, increase entrepreneurial skills training conducted with instant ginger, Sixth, socialization of Islamic economics is done with FGD Islamic economics, solidified use saving deposits, murabaha financing and qardh. At the end of the devotion shown an increase in savings, increase saving congregation.

Keywords: Management, Islamic micro finance, women moslem

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami tahun kenaikan. Pada tri wulan pertama 2015, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,71 persen.¹ Sedang pada 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen.² Artinya selama *year on year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 0,2 persen atau tumbuh sebesar 4.79 persen pada *year on year* melambat jika dibandingkan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Menurut Kepala BPS, Suryamin, penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia atau kurang memenuhi target pada kuartal I disebabkan oleh *faktor produksi* dan *faktor konsumsi*. Faktor produksi disebabkan oleh produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam, Produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak tumbuh negatif, Distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor (barang dan modal maupun bahan baku), serta kinerja konstruksi mengalami keterlambatan realisasi belanja infrastruktur. Sementara dalam hal konsumsi, semua komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) melambat, pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlamat.³ Hal tersebut banyak dikendalikan oleh kurs mata uang, dan pencabutan subsidi (listrik, BBM). Mata uang rupiah terdepresiasi terhadap dollar Amerika Serikat. Dampak dari terdepresiasinya rupiah sangat dirasakan oleh masyarakat berupa naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya harga kebutuhan pokok yang naik, semua sendi kehidupan mulai upah buruh juga menuntut untuk dinaikkan. Wal hasil, perusahaan-perusahaan, industri rumah tangga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional, persediaan dan lemahnya daya beli masyarakat. Hal demikian perlu adanya penguatan kepada masyarakat, bagaimana penguatan ekonomi dapat dilakukan.

Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga tarif listrik artinya mencabut subsidi listrik 1300VA sd 2200 VA untuk rumah tangga kecil

¹ Bappenas nilai pertumbuhan ekonomi 5,1% cukup kredibel, diakses melalui <http://m-okezone.com> pada 10 Juni 2016

² Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014, diakses melalui <http://www.bps.go.id> pada 14 Juni 2015

³ Estu Suryowati, Pertumbuhan Ekonomi kuartal I-2015 melambat, ini penyebabnya, diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com>

dengan tegangan rendah dan.⁴ Pencabutan subsidi listrik tersebut sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena dengan dicabutnya subsidi listrik akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional usaha. Dengan meningkatnya biaya operasional, maka pelaku UMKM akan menjual produknya dengan harga yang lebih mahal. Hal ini menyebabkan konsumen menurun kemampuan membelinya. Tidak hanya produsen dan konsumen yang berdampak oleh pencabutan subsidi listrik, melainkan semua barang dan jasa akan mengalami penyesuaian.

Penyesuaian (kenaikan atau penurunan) tarif listrik tersebut lebih disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik diantaranya adalah nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, *Indonesian Crude Price (ICP)* dan Inflasi.⁵ Kondisi tersebut tak ayal membuat tarif listrik setiap bulannya mengalami perubahan, baik harga naik atau sekalipun turun. Namun pada realitasnya sering mengalami kenaikan dari pada penurunan. Kondisi tersebut berdampak secara langsung terhadap penyediaan barang dan jasa di masyarakat.

Upaya penguatan ekonomi di atas diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Penguatan perekonomian di masyarakat sangat tergantung oleh peran intermediasi perbankan, terutama adalah peran bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah. Sebagaimana pengalaman bank syariah, bank syariah aman terhadap kondisi krisis pada tahun 2008. Sebagaimana yang dipublikasikan Bank Mu'amalat Indonesia:

Pada tahun 2008 di saat krisis global melanda seluruh dunia, Bank Muamalat telah menunjukkan kinerja positif, bahkan hingga Juni tahun 2009. Pertumbuhan Aset Bank Muamalat sendiri meningkat 31,9% dari Rp.11,2 Triliun pada Juni 2008 menjadi Rp.14,8 Triliun pada Juni 2009 ini. Selain itu, Muamalat juga menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 32,5% dari Rp.9,34 Triliun pada Juni 2008 menjadi Rp. 12,38 Triliun pada Juni 2009. Pertumbuhan tersebut juga dialami oleh pertumbuhan penyaluran

⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 301 tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara, pasal 5 ayat 1 a dan b.

⁵ Ibid pasal 5 ayat 2

pembiayaan sebesar 15,8% dari Rp.9,61 Triliun pada Juni 2008 menjadi Rp.11,13 Triliun pada Juni 2009.⁶

Hal demikian menjadi harapan bahwa hadirnya bank syariah mampu berperan di tengah pelemahan rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelesuan. Namun demikian bukan tanpa masalah, mengingat bank syariah masih terbatas keberadaannya, masih terkonsentrasi di pusat kota, maka diperlukan lembaga sejenis yang mampu menjembatani kebutuhan modal, penyimpanan uang untuk menyisihkan pendapatan keluarga. Hal itu mampu dijawab oleh lembaga keuangan mikro syariah dimana akses lembaga tersebut mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan keberadaan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah yang telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan kalangan akademisi di tingkat perguruan Tinggi. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta yang berlomba-lomba membuka prodi Ekonomi Syariah / Perbankan Syariah. Banyaknya lembaga keuangan syariah diperlukan peningkatan pemahaman ekonomi Islam di masyarakat. Sehingga hadirnya lembaga keuangan syariah diterima dan menjadi pilihan oleh masyarakat dirasakan semakin mendesak.

Salah satu implementasi yang telah diterapkan oleh masyarakat dari system dan pengelolaan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya Lembaga Keuangan Syariah / LKS baik makro (Bank Syariah, BPRS, dll) ataupun mikro (BMT, Kopsyah, dll) dan lembaga keuangan syariah non bank syariah lainnya. Lembaga yang disebut terakhir ini selama ini telah diterapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini juga berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk menabung kian meningkat dalam menyiapkan kebutuhan masa depan.

Masyarakat yang tanggap akan fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah bersinggungan erat dengan keberadaan perempuan. Perempuan dalam hidup bermasyarakat seringkali fokus untuk menyiapkan ekonomi keluarga dalam membantu peran suami untuk mencari nafkah. Keadaan ini disebabkan karena faktor keadaan dalam keluarga, bahwa tidak semua suami mendapatkan pekerjaan semestinya yang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Peran perempuan muncul dalam posisi sebagai seorang perencana dan sekaligus pelaksana dalam pemenuhan segenap aspek

⁶ <http://www.bankmuamalat.co.id/berita/detail/terima-alpha-south-east-asia-award-bank-muamalat-hadirkan-direksi-baru#.VnpWi> BSPIU diakses pada 30 Nopember 2015

kebutuhan sebuah rumah tangga. Perempuan mewajibkan dirinya berfikir akan masa depan dengan berbagai cara, di mana salah satu solusinya adalah dengan membiasakan diri dengan cara menabung. Menabung adalah kegiatan dengan tujuan berjaga-jaga untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Berangkat dari isu di atas, sebagaimana kebiasaan masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, profesi dan pekerjaan ibu rumah tangga di Kabupaten Tulungagung juga tidak luput dari pekerjaan di sektor informal. Badan Pusat Statistik Tulungagung menyebutkan bahwa sekitar 77 persen penduduk di Kabupaten Tulungagung menekuni pekerjaan sebagai petani, Industri dan Perdagangan.⁷ Data BPS Tulungagung juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin berjumlah 91.300 jiwa.⁸ Kondisi tersebut representasi dari kelompok jama'ah yasin tahlil dimana mereka termasuk juga yang melekat pada kelompok masyarakat yang aktif seperti buruh tani, pedagang kaki lima, penjaja makanan di sekolah-sekolah, dll.

Dinamika yang demikian menjadi fokus menarik untuk dilakukan wahana pengabdian masyarakat pada kluster pengabdian masyarakat berbasis Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Kegiatan Pemberdayaan Jasa Keuangan Mikro Syariah pada perempuan Jama'ah Yasin Tahlil di Kabupaten Tulungagung. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan para jama'ah ibu-ibu Yasin Tahlil, sekaligus untuk mengenalkan umat Islam pada Ekonomi Syariah.

Jama'ah Yasin Tahlil desa Panjerejo memiliki kebiasaan menabung yang telah dilakukan di sela-sela kegiatan jama'ah. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat, utamanya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, kebiasaan ini bagi mereka dalam relasi sosial menjadi sangat penting karena telah terbukti mampu berperan membantu anggotanya dan masyarakat sekitarnya dalam menyiapkan kebutuhan masa depan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meskipun dalam bentuk dan nilai manfaat yang masih sangat sederhana.

Pendampingan ini merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan (*sustainability*) mengingat tetap survivalnya keberadaan jama'ah ibu-ibu yasin tahlil dan kegiatan tabungan yang terus berjalan serta usaha yang

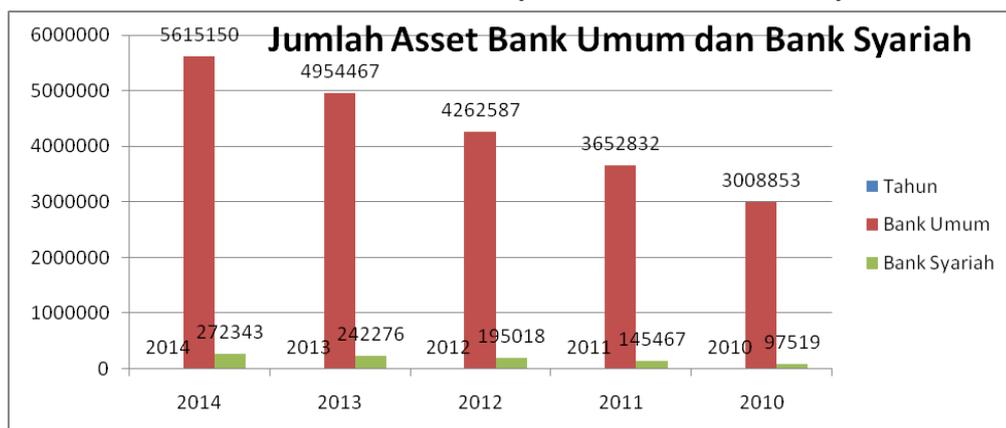
⁷ Persentase [Penduduk](#) berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2012 diakses melalui <http://tulungagungkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/792> pada 30 Nopember 2015

⁸ Ibid Jumlah dan penduduk miskin tahun 2010 - 2013

dilakukan oleh para ibu-ibu anggota jamaah di sektor informal juga berjalan secara kontinyu tentu bisa dijadikan pintu masuk untuk mengenalkan konsep aqad-aqad ekonomi syariah dan mendorong terbentuknya lembaga keuangan syariah yang bersifat non formal di jamaah yasin tahlil di Tulungagung. Hal inilah yang diyakini bisa terwujudnya kegiatan dan keberlanjutan pendampingan ini bisa dilaksanakan.

Selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (khususnya anggota jamaah ibu-ibu yasin tahlil), maka dengan pengabdian pemberdayaan jasa keuangan mikro syariah ini, faktor perkembangan perbankan syariah yang belum maksimal karena belum sesuai target Bank Indonesia selaku pengendali moneter akan terbantu. Dalam outlook Perbankan Syariah 2014, bahwa pada tahun 2013 Bank Indonesia menargetkan aset bank syariah pada posisi Pesimis (Rp.255.21 Trilyun), Moderat (Rp. 283.87 Trilyun) dan Optimis (Rp. 311.92 Trilyun).⁹ Sebagaimana dalam statistik perbankan syariah (edisi Desember 2014) target tersebut pada kenyataannya hanya tercapai Rp. 272.34 Trilyun. Artinya bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah masih pada posisi mendekati moderat. Hal ini memerlukan strategi lebih lanjut untuk terus menggenjot pertumbuhan aset di bank syariah. Jika dibandingkan dengan data bank konvensional, maka besarnya aset bank syariah pada Desember 2014 hanya sebesar 4.85% dibandingkan total aset bank konvensional. Berikut grafik perbandingan jumlah aset bank syariah dan bank konvensional:

Grafik 1. Jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia & Statistik Perbankan Syariah edisi desember 2014

⁹ Outlook Perbankan Syariah 2014 diakses dari www.bi.go.id/id/ruang-media/.../-/BIOutlookPerbankanSyariah2014.pdf

Jika dilihat dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan aset bank syariah dibandingkan bank umum masih jauh tertinggal, meskipun jika dilihat dari perkembangan aset yang dikelola bank syariah terus meningkat pada tiap tahunnya. Pertumbuhan aset bank syariah yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 49% di banding tahun 2010. Dan pertumbuhan melambat sampai dengan tahun 2014, dimana pertumbuhannya hanya sebesar 12% di banding tahun 2013. Pertumbuhan yang lambat tersebut harus dicari solusinya agar masa depan bank syariah dapat tumbuh dengan baik.

Jika melihat kondisi perbankan syariah yang masih tumbuh lambat baik aset ataupun jumlah lembaga keuangannya, maka diperlukan upaya untuk mempercepat dan memperluas pemahaman dan mengenalkan model dan sistem pengelolaan ekonomi Islam dan perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat. Upaya tersebut sangat relevan dengan dilakukannya pengabdian pemberdayaan jasa keuangan mikro syariah pada kegiatan jama'ah ibu-ibu yasin tahlil dalam nuansa ibadah dan mu'amalah.

Dengan dilakukannya pemberdayaan jasa keuangan mikro syariah bagi ibu-ibu jama'ah yasin Tahlil di Tulungagung, maka diharapkan mereka bisa berdaya. Berdaya dalam hal ekonomi, *personality*, sosial kemasyarakatan dan mental spiritual.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Dalam organisasi yang telah diberdayakan akan tercipta hubungan di antara orang-orangnya yang saling berbagi kewenangan, tanggung-jawab, komunikasi, harapan-harapan, dan pengakuan serta penghargaan. Hubungan kerja semacam itu sangat berbeda dengan hubungan kerja yang secara tradisional didasari oleh hubungan hirarkhi dalam organisasi. Aset yang paling berharga dari suatu perguruan tinggi adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya yang ditunjukkan oleh pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, kreatifitas, motivasi dan kemampuan bekerjasama yang mereka miliki. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan

bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan¹⁰

Secara konseptual, Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”.¹¹ Karenanya, ide utama pemberdayaan beesentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai *berikut* : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹²

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tra-

¹⁰ Sutoro Eko, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002

¹¹ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan; Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat, (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2007) hal 1.

¹² Priyono dan Pranarka, , Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, (Jakarta, CSIS, 1996)

disional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.¹³

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.¹⁴

Menurut Suharto Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), terutama kebebasan dalam mengemukakan pendapat, (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁵

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.¹⁶ Mubyarto menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.¹⁷ Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat

¹³ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)

¹⁴ Ibid. Priyono dan Pranarka.

¹⁵ Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), hal 58

¹⁶ Sumodiningrat, G, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997)

¹⁷ Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, (Yogyakarta: BPEE, 1998)

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Suharto dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro.¹⁸

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk mamahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

¹⁸ Suharto, Edi, Membangun...hal 66

Konsep dasar Lembaga Keuangan Syariah

Banyaknya sektor informal disebabkan akumulasi penduduk di suatu wilayah yang tidak diikuti penyediaan kesempatan kerja formal luas. Penduduk dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah, cenderung masuk ke sektor informal. Mereka bekerja seadanya, lapangan usaha apa saja, jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan dan pendidikan yang tinggi (Sethuraman 1981, Mazumdar 1984, Adams 1995, Pitoyo, 1999). Menurut Departemen Perindustrian (1990) dalam Pitoyo, batasan sektor informal adalah sifat usaha yang tidak terorganisir, teknologi sederhana, lokasi usaha yang tidak tetap, jam kerja yang tidak pasti, modal kecil, tidak membutuhkan pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, penghasilan rendah, relative menyerap tenaga kerja (padat karya). Dari teori di atas maka mayoritas pekerjaan/profesi yang dilakukan oleh para ibu-ibu jama'ah perempuan Yasin Tahlil di Kabupaten Tulungagung ini bisa digolongkan ke dalam sektor informal. Mereka pada umumnya adalah ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya menggeluti sektor yang seadanya.

Aktifitas ekonomi berskala kecil atau usaha-usaha sektor informal merupakan kegiatan usaha yang adaptif terhadap kondisi ekonomi bergulir syariah, yang akan meningkatkan usaha ekonomi dan kebutuhan seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah dan sederhana, serta jasa. Kondisi krisis memperlihatkan kemampuan sektor informal mampu bertahan ditengah tekanan kondisi ekonomi dan politik. Saat krisis ekonomi berkepanjangan, bencana bertubi-tubi, kelompok usaha informal mampu mempertahankan kelangsungan hidup mereka (*subsistensi*). Segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki mengharuskan pelaku sektor informal melakukan aktifitas apa saja, terutama status pekerjaan usaha sendiri seperti buruh tani, peternak, pedagang kelontong, pedagang kaki lima agar kehidupan mereka dapat bertahan. Seperti kondisi para jama'ah perempuan, mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga, buruh tani, peternak kambing, peternak sapi, petani dengan lahan yang kecil. Mereka banting tulang dalam kesehariannya menyempatkan di sela waktu sibuknya untuk mengikuti jama'ah yasin tahlil yang diselingi kegiatan ekonomi yang masih seadanya. Kegiatan seadanya yang dilakukan dengan menghimpun dana tabungan dengan skala kecil mingguan dan dicatat seadanya pula.

Menurut Boserup dalam *Womens Role in Economic Development* dinyatakan bahwa Perempuan sebagai bagian anggota masyarakat diharapkan juga turut berperan dalam pembangunan ekonomi (*Women In*

Development (WID) memberikan inspirasi atas berkembangnya konsep WID.¹⁹ Upaya tersebut hendaknya diintegrasikan ke dalam perekonomian pasar yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang akan menjamin pendapatan bagi perempuan dan memberi kontribusi pada proses pembangunan melalui GNP.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Johan Kristanto²⁰, yang meneliti tentang efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa efektifitas pelaksanaan ekonomi bergulir bagi pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga penyalur dana bergulir dan mensosialisasikan bahwa dana tersebut bukan hadiah dari pemerintah. Penelitian terdahulu meyakinkan bahwa dana bergulir di masyarakat bisa berjalan efektif, maka dalam penelitian dalam penelitian ini meyakinkan kepada penulis untuk menindaklanjuti lebih mendalam pelaksanaan jasa keuangan mikro syariah para perempuan yang sudah memulai potensi mu'amalat dengan melaksanakan tabungan.

Penelitian Kaspini²¹ yang meneliti tentang Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif, dengan metode analisis regresi berganda menghasilkan kesimpulan bahwa secara bersama-sama pinjaman dana bergulir dan pendampingan berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif sebesar 54,3% sedangkan secara parsial pinjaman dana bergulir berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha produktif, sementara pemberdayaan tidak signifikan secara statistik berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif.

¹⁹ Boserup, Esther, *Women Role in Economic Development*, dalam Mosse, Julia C. *Gender dan Pembangunan*, (terj.), (Jogjakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996)

²⁰ Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, *Journal Publika*, volume 1 no 2 (2013).

²¹ Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, (Thesis; Universitas Negeri Semarang, 2009) diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/4819/>

Kedua penelitian terdahulu ini membuktikan pinjaman dana bergulir sangat membantu kegiatan usaha produktif di masyarakat, maka selanjutnya ditindaklanjuti untuk memberikan program pemberdayaan berupa kegiatan usaha jasa keuangan mikro syariah. Dengan penelitian tersebut dalam pengabdian ini berupaya membuktikan dalam sebuah praktik pemberian pembiayaan, sekaligus pengelolaannya sehingga akan bisa meningkatkan kemampuan dan manfaat adanya lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu dengan pengabdian ini berupayakan membuktikan bahwa masyarakat akan terbiasa dengan lingkungan yang menerapkan ekonomi syariah.

Metode Pengabdian

Pengabdian ini termasuk pengabdian berbasis semi *community base research*. *Community base research is a transformative model of research grounded on principles of community empowerment, collaboration, and social change in which the community of interest participates not as 'research subjects' but as research collaborators and agents of change*²². Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penelitian ini mengedepankan model transformatif, dimana mendasarkan pada pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dan perubahan sosial. Masyarakat bukan merupakan subjek maupun objek penelitian melainkan sebagai kolaborator. Dilakukan dengan senantiasa menggerakkan informasi dan kebutuhan dari komunitas dampingan yaitu ibu jama'ah yasin tahlil di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan pengabdian digali dari jama'ah dimana pengelolaan tabungan sudah berjalan di jama'ah, dan adanya jama'ah menaruh harapan untuk meningkatkan tabungan yang dikelola, peningkatan pendapatan di kalangan jama'ah.

Langkah yang dilakukan dalam proses pengabdian dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

²² *Access Alliance Multicultural Health and Community Services, Community Based research toolkit*, 500-340 College Street, (Toronto, ON, Canada M5S 3G3; 2012) Hal 3

Bagan 2. Metode pengabdian



Jama'ah Yasin tahlil secara berkelompok mendiskusikan apa yang sudah dilakukan dalam jama'ah. Hasil yang bisa disimpulkan adalah perlunya pendampingan di dalam pengelolaan tabungan ke arah yang lebih bagus. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat atas tabungan yang dikelola. Kesempatan menabung jama'ah meningkat.

Ketika masalah sudah ditemukan, bahwa jama'ah menganggap penting dilakukan pendampingan, maka tim pendampingan mengurus perizinan kepada yang berwenang.

Hasil dan Pembahasan Pengabdian

Program Pra Kegiatan; Kegiatan Penyempurnaan Proposal

Pengabdian ini dilakukan dengan menggali langsung atas kebutuhan yang ada pada komunitas muslim di Tulungagung. Komunitas muslim yang menjadi mitra pengabdian adalah jama'ah Yasin Tahlil di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan. Penggalan masalah dilakukan dengan metode focus group discussion (FGD). Focus group discussion dilaksanakan di rumah ibu Surati selaku pimpinan jama'ah pada hari Minggu, 28 Juni 2015. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 6 orang peserta dari jama'ah dan 3 orang tim pengabdian serta 2 orang tim mahasiswa (untuk lapangan).

Hasil dari kegiatan focus group discussion penyempurnaan proposal adalah permasalahan yang harus diselesaikan di masyarakat adalah: *pertama*, Meskipun ikatan keagamaan yang kuat, namun pemahaman

terhadap pengelolaan pembiayaan berbasis mikro syariah masih kurang dimiliki, oleh karenanya diperlukan Focus group discussion ekonomi syariah. *Kedua*, Pengelolaan pembiayaan berbasis syariah, selesai 1 tahapan periode 6 bulan, oleh karenanya perlu adanya pendampingan terhadap pengelolaan pembiayaan mikro syariah. Artinya pembiayaan yang berhasil dilaksanakan belum mengakar, dan sepenuhnya dipahami oleh jama'ah maupun pengelola, maka rentan aktivitas tersebut tidak berbasis syariah lagi. *Ketiga*, Kemampuan jama'ah mengelola hasil keuntungan pembiayaan belum maksimal, apakah untuk penguatan modal atau peningkatan kapasitas usaha maka perlu adanya Focus group discussion pengelolaan usaha, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan yang lebih.

Kegiatan Sosialisasi Dan Koordinasi Program

Pengabdian akan berjalan lancar jika semua pihak memahami maksud dan tujuan dari pengabdian. Hal tersebut dilakukan sosialisasi dan koordinasi program kepada pihak terkait. Pihak terkait diantaranya adalah LP2M IAIN Tulungagung, pimpinan Jama'ah Yasin Tahlil.

Sosialisasi dan koordinasi dilakukan berupa: *pertama*, Permohonan pengantar izin pengabdian masyarakat dari LP2M IAIN Tulungagung yang dilaksanakan oleh Binti Nur Asiyah pada tanggal Rabu, 16 September 2015. Rekomendasi izin pengabdian dikoordinasikan kepada jama'ah yang dilakukan oleh Binti Nur Asiyah pada hari Minggu, 27 September 2015. Jama'ah Yasin Tahlil memberikan izin tim untuk menyelenggarakan pengabdian di jama'ah tersebut. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan menggali masalah yang ada di dalam jama'ah secara bersama-sama antara tim dan jama'ah.

Pelatihan Pengelolaan Pembiayaan Mikro Syariah

Masalah yang ada dalam jama'ah adalah adanya pengelolaan tabungan yang dikelola ala kadarnya. Masalah demikian direspon dengan diadakannya Pelatihan pengelolaan pembiayaan mikro syariah dilaksanakan di Lesehan Nirwana Bambu desa Kalangan Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada hari Senin, 26 Oktober 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang diantaranya terdiri dari 1 orang nara sumber dari stakeholders (Bapak Misni, SE dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung), 1 orang nara sumber dari unsur tim (M. Aqim Adlan, M.E.I), 1 orang moderator (Binti Nur Asiyah, M.Si.), 1 orang dari kepala desa (ibu Minowati), 2 Orang Tokoh Agama (KH. Mansur Ghozali dan Drs. Maulana Malik) , 3 orang dari tim

serta 11 orang dari unsur jama'ah sekaligus menjadi pengelola KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah).

Hasil dari kegiatan tersebut adalah: *pertama*, Pengelola KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah) dari unsur jama'ah memiliki pemahaman terkait pengelolaan pembiayaan mikro syariah. *Kedua*, Pengelola KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah) memiliki keahlian dalam mengelola pembiayaan pada KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah). *Ketiga*, Kelembagaan Koperasi Syariah didirikan atas adanya rapat pembentukan koperasi yang diikuti oleh anggota minimal 20 orang dan dihadiri oleh pejabat dari dinas Koperasi dan UMKM serta memiliki modal minimal Rp.15.000.000,-.

Hasil pelatihan di atas ditindaklanjuti oleh jama'ah dengan meningkatkan kepemilikan modal. Jika modal sudah terpenuhi, langkah selanjutnya menyamakan persepsi dengan menghadirkan dinas koperasi untuk melembagakan kelompok jasa keuangan mikro syariah al-Barakah menjadi Koperasi Syariah. Pihak dinas koperasi juga merekomendasikan agar pengelolaan pembiayaan ini dikelola secara legal. Pihak dinas koperasi juga memberikan gambaran jika namanya lembaga, maka izin legalitas ke Otoritas Jasa Keuangan, namun jika kelembagaan berupa koperasi, maka izinnya dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung.

FGD Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga

Kesempatan menabung jama'ah yang masih ala kadarnya disebabkan oleh rendahnya kemampuan menyisihkan keuangan setiap harinya, bahkan jarang yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Kondisi demikian direspon dengan melaksanakan kegiatan FGD pengelolaan ekonomi rumah tangga dilaksanakan di rumah bapak Sarni ibu Rohmah dsn. Panjerejo Kidul RT 01 RW XI Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada Minggu 13 September 2015.

FGD pengelolaan Ekonomi rumah tangga diikuti oleh para jama'ah yang berjumlah 52 orang yang terdiri dari 47 orang peserta, 1 orang nara sumber (Ibu Binti Nur Asiyah, M.Si.), 1 orang moderator (M.Aqim Adlan, M.E.I), dan 3 orang dari tim. Hasil dari kegiatan tersebut adalah: *pertama*, Adanya pemahaman arti pentingnya pengelolaan ekonomi di dalam rumah tangga, *kedua*, Munculnya kesadaran merencanakan setiap pengeluaran di dalam rumah tangga, *ketiga*, Kesadaran dan trampil di dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, *keempat*, Kesadaran memanfaatkan potensi keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Setelah mengikuti FGD pengelolaan ekonomi rumah tangga, semangat para jama'ah untuk memanfaatkan potensi keluarga sangat tinggi, mulai merencanakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam hal pencatataan, meskipun masih adanya kelemahan berupa kurangnya kebiasaan catat-mencatat, namun usaha untuk memulai mencatat patut dihargai menuju pencatatan yang sempurna.

Pencairan Modal Bergulir Kepada Jama'ah

Rendahnya tabungan yang bisa dikelola jama'ah tidak seberapa. Hal itu disebabkan karena minimnya pendapatan jama'ah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan jama'ah, maka jama'ah diberi kesempatan untuk tambahan modal bergulir untuk membuat usaha baru atau untuk meningkatkan usaha yang sudah ada. Kegiatan pencairan modal bergulir periode kedua kepada jama'ah dilaksanakan di rumah ibu Nur Sarifah pada hari Minggu, 8 Mei 2016.

Keadaan Dana bergulir yang sudah berhasil diterimakan pada periode kedua sebanyak Rp.7.200.000,- untuk 16 orang. Sedangkan 4.950.000,- masih dalam proses pembiayaan dan akan dibayar lunas pada akhir bulan Syawal. Sejumlah dana tersebut diberikan kepada jama'ah secara bergulir, atau bergantian. Jangka waktu yang diberikan adalah 6 bulan. Setelah 6 bulan, sejumlah dana tersebut di kembalikan kepada jama'ah dan dipinjamkan kembali kepada jama'ah yang belum pernah mendapat dan yang sudah mendapat dalam kerangka meningkatkan usaha.

Perguliran yang dilaksanakan dengan menggunakan akad qardh dan akad murabahah. Akad ini yang dipilih oleh jama'ah diantara akad-akad yang dikenalkan oleh tim pengabdian diantaranya akad jual beli, bagi hasil dan jasa. Akad qardh hanya diberikan kepada jama'ah yang memerlukan dana untuk biaya anak sekolah. Sedangkan akad murabahah diberikan kepada jama'ah yang membutuhkan peningkatan kebutuhan untuk produktifitas.

Pelatihan Kewirausahaan Jahe Instant

Masalah mendasar jama'ah adalah rendahnya kesempatan menabung yang disebabkan oleh pendapatan rendah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, maka jama'ah perlu untuk diberikan skill (keahlian) tertentu. Pelatihan kewirausahaan jahe instant dilaksanakan di rumah bapak Kamianto ibu Sulikah desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu, 28 Nopember 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1 orang nara sumber (Ibu Rohmawati, MA.) dan moderator Binti Nur

Asiyah, M.Si., tiga orang dari tim pengabdian (inti dan mahasiswa) dan 47 peserta dari jama'ah Yasin Tahlil.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah *pertama*, Jama'ah memiliki pemahaman terkait dengan upaya untuk menambah pendapatan keluarga dengan memanfaatkan tanaman jahe untuk dibuat jahe instant dan sirup jahe. *Kedua*, Jama'ah memiliki keahlian tentang pembuatan jahe instant dan sirup jahe. *Ketiga*, Jama'ah mendapatkan pemahaman tentang pengemasan dan pemasaran jahe instant dan sirup jahe.

FGD Ekonomi Syariah

Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan jasa keuangan mikro syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah kepada jama'ah dan pengelola. Hal tersebut direspon dengan melaksanakan FGD Ekonomi syariah yang dilaksanakan di rumah Bapak Jumali ibu Kartini desa Panjerejo RT 01 RW XI Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada hari Minggu 16 Agustus 2015. FGD Ekonomi syariah diikuti oleh para jama'ah yang berjumlah 52 orang yang terdiri dari 47 orang peserta, 1 orang nara sumber (Rohmawati, MA.), 1 orang moderator (Binti Nur Asiyah), dan 3 orang dari tim.

Hasil dari FGD Ekonomi syariah adalah adanya pemahaman terhadap ekonomi syariah, diantaranya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam ekonomi syariah meliputi keadilan, keseimbangan, kepemilikan yang harus termanifestasikan di dalam kegiatan mu'amalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu dalam kegiatan mu'amalah juga terdapat hal yang harus di jauhi dan dihindari yaitu riba, gharar, maysir, ikhtikar dan khanz. Nilai sosial juga harus berkembang di dalam bermu'amalah diantaranya zakat, infaq dan shodaqoh.

Laporan Focus Group Discussion Hasil Pengabdian

Bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengabdian direspon dengan diadakannya dengan Focus Group discussion. Focus Group Discussion pengelolaan jasa keuangan mikro syariah dilaksanakan di Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung pada hari Senin, 07 Desember 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1 orang nara sumber (Moh. Arif, M.Pd.) selaku ketua Pengabdian LP2M IAIN Tulungagung, periode 2014-2018 sekaligus penyaji laporan lima orang dari tim pengabdian (inti dan mahasiswa) dan 47 peserta dari unsur dosen dan mahasiswa.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) pengabdian antara lain: *pertama*, Semangat Pengelolaan KJKMS sangat tinggi, terlihat dari angsuran yang sudah mulai masuk. *Kedua*, Proses menabung jama'ah terus meningkat, oleh karenanya proses akuntabilitas dalam pengelolaan diperlukan. *Ketiga*, Rekomendasi kepada jama'ah, meskipun proses pengabdian sudah selesai, namun tetap dilakukan pendampingan, agar pengelolaan KJKMS terus berjalan, dan modal dan manfaat KJKMS terus meningkat. *Keempat*, Upaya legalitas untuk terus diupayakan sampai permodalan sebagai syarat berdirinya koperasi tercapai.

Pendampingan Pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah

Pendampingan pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah dilaksanakan dalam rangka menajamkan terhadap pengelolaan keuangan jama'ah. Pendampingan pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah dilaksanakan pada setiap hari minggu selama 8 minggu yakni sejak Minggu, 8 Nopember sampai dengan 27 Desember 2015 bertempat di sela-sela yasinan sedang berlangsung. Pendampingan pengelolaan KJKMS dilakukan oleh 3 orang tim inti pengabdian (Binti Nur Asiyah, M.Si., Rohmawati, M.A. M. Aqim Adlan, M.E.I) dan 2 orang tim dari mahasiswa (M. Fatkhur Rohman al Banjari, Aprilia Dwi Anggraini) dan dua orang dari jama'ah (Ibu surati (pimpinan jama'ah), Ibu Nur Sarifah (Ketua KJKMS)).

Hasil pendampingan pengelolaan jasa keuangan mikro syariah adalah *pertama*, Terbentuknya struktur KJKMS. *Kedua*, Terbentuknya Tupoksi pengurus KJKMS. *Ketiga*, Meningkatnya kemampuan pengelolaan KJKMS terkait pembukuan Kas. *Keempat*, Meningkatkan kemampuan pengelolaan KJKMS terkait Pembukuan Neraca. *Kelima*, Meningkatkan kemampuan pengelolaan KJKMS terkait Pembukuan Laba-Rugi. *Keenam*, Meningkatkan kemampuan divisi pembiayaan. *Ketujuh*, Meningkatkan kemampuan divisi funding. *Kedelapan*, Meningkatkan kemampuan kerjasama.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah *pertama*, hasil penggalan masalah oleh jamaah adalah perlunya dilaksanakan pengabdian pengelolaan jasa keuangan mikro syariah, *Kedua*, penguatan pengelolaan jasa keuangan mikro syariah dilakukan dengan melatih dalam pengelolaan tabungan, pembiayaan dan terbentuknya Kelompok Jasa keuangan mikro syariah (KJKMS) Al-Barakah. *Ketiga*, pengelolaan ekonomi rumah tangga

dilakukan dengan FGD pengelolaan ekonomi rumah tangga yang terkait perencanaan menggunakan dan mendapatkan dana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. *Keempat*, akses pembiayaan bagi jama'ah dilakukan dengan memberikan alokasi dana pemberdayaan sebesar Rp.12.150.000,- untuk kegiatan pembiayaan, *Kelima*, peningkatan kewirausahaan dilakukan dengan memberikan ketrampilan tambahan berupa pelatihan kewirausahaan jahe instant, *Keenam*, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan dengan FGD ekonomi syariah dan memantapkan pengenalan ekonomi syariah pada setiap pada tabungan wadiah, pembiayaan murabahah dan qardh. Dari kegiatan pengabdian yang dilangsungkan di akhir periode pendampingan terlihat adanya peningkatan tabungan, peningkatan jama'ah yang mulai menabung.

Daftar Pustaka

Access Alliance Multicultural Health and Community Services, Community Based research toolkit, 500-340 College Street, (Toronto, ON, Canada M5S 3G3; 2012)

Alexander, Jenifer, *Wanita Pengusaha di Pasar-Pasar Jawa*, dalam Robert Hefner, *Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalis Asia Baru*, LP3ES, Jakarta, 2000, h. 285-314.

Boserup, Esther, *Women Role in Economic Development*, dalam Mosse, Julia C. *Gender dan Pembangunan*, (terj.), Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1996.

Hart, Keith, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, *Journal of Modern African Studies*, Vol. 11, No. 1, 1973, h.61-69, dalam A.J. Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*, *Populasi*, Vol.10 No..2 , 1999.

Johan Kristanto, *Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya*, *Journal Publika*, volume 1 no 2 (2013).

Kaspini, *Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas*, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009 diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/4819/>

Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPEE, Yogyakarta, 1998

- Outlook Perbankan Syariah 2014 diakses pada [www. bi.go.id](http://www.bi.go.id) online
- Purnamadewi, Yeti L., *Wanitadan Industri Rumah Tangga Anyaman Bambu di Desa Nagrog, Kec.Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat*, PSP-IPB, ISS, PPLH-ITB, Bandung, 1990.
- Prijono dan Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2007
- Saleh, IrsanAzhary, *Industri Kecil, sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, Jakarta,1986.
- Schiller, Barbara M., *Women, Work and Status in Rural Java*, Ohio University, Ohio, 1978.
- Scoot; James C, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara* , 1976, Terjmh., Hasan Basri, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Sethuraman, 1981; Mazumdar,1984; Adams, 1995 ; A.J. Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*, Populasi Vol.10 ,No. 2, Buletin PSKK-UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sihite,R.R.,*Pola Kegiatan Wanita di sektor Informal, Khususnya Pedagang Sayur Di Pasar*, Dalam T.O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Statistik perbankan Syariah edisi Desember 2014 diakses melalui www.bi.go.id
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Sumodiningrat, G, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1997.

The Reconstruction of the Islamic Inclusive Paradigm in Society: The Role of Civitas Academica UIN ar-Raniry in Internal Conflict Areas in Aceh Province.

SAFRILSYAH, SAMSUL BAHRI, JARZANI

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
safrilsyah@gmail.com

Abstract: The purpose of this program to spreading Islamic inclusive paradigm in the people of Aceh. Its important because the phenomenon of intolerance conflict between muslim in Aceh today. Khatib Jumat decline tragedy and pulpits of mosques brought a run that occurred in the Arongan Gampong, Simpang Mamplang, the killing Teungku Aiyub accused of aliran sesat in Bireun, the debate of opinion (*khilafiah*) of use a cane when Friday preaching at the Baiturrahman mosque and grand parade anti wahabi in Banda Aceh, making the atmosphere of worship tolerance in Aceh increasingly complex. One of the reasons because each group of schools recognized the truest among others. It need not happen if Muslims understand the variety of sects, because Islam is a elegant religion, moderate, and it loved all human beings Muslims and non Muslims. This paradigm was important to be understood by muslim Aceh community. because Aceh is the province that is implementating the Islamic law. Aceh is a mirror of Islamic area for other provinces in Indonesia even the world. This program was conducted from May until September 2015. It carried out by The publishing and public service institute (LP2M) of UIN Ar-Raniry. It involved around 200 lecturers, 1800 students. they are placed in different areas on a regular interval with a different activity. however, the program also involves the local Government, Dinas syariat Islam, Police, Department of agriculture, Kemenag, banking and Assembly of Ulama. It Implemented in 5 cities/kaupaten that are considered potential occurrence of conflicts of intolerance between Muslims. Between the stages of the process are Logging potential conflict, determine the religious figures, community liaison, small traning and preparation for the officer and volunteers involved in this program, the implementation of program with expert lecturers in Fiqh modern, Muqaranatul Mazāhib, sosioreligius conflict resolution and community development. The program concludes with a report and evaluation. From the results of this program made recommendations to the local Government to make the program sustainable in communities that are more comprehensive and integrative program. The program is expected to be followed by ongoing cooperation program between the UIN Ar-raniry, religious figures, community leaders and local government related.

Keywords: Islamic Pradigma inclusive, internal Conflict, religious intolerance

Pendahuluan

Aceh merupakan provinsi yang mayoritas berpenduduk muslim, dengan kewenangan menjalankan syariat islam dilindungi oleh UU no 12 tahun 2001. Namun demikian kondisi kehidupan beragama yang nyaman dalam bingkai syariat islam di Aceh mulai terganggu dengan adanya tindakan Intoleransi kerukunan intern umat muslim di Aceh akhir-akhir ini. *Isu aliran sesat, kilafiyah fiqiyah ibadah dan siasyah* sering menjadi pemicu konflik intren umat beragama. Oleh sebab itu penglebelan aliran sesat di daerah Aceh tidak selamanya bermakna menyimpang dari syariat yang sah, tetapi juga berlawanan dengan aliran (mazhab) yang berkembang selama yang lebih bernuansa *intolerable* terhadap pemahaman pemikiran Islam yang dinamis dan fleksibel. Sering sekali tindakan ini dilakukan secara terburu-buru, bebas dari filterisasi yang selektif dan objektif. Karena itu, aliran sesat atau mazhab yang berbeda, tidak boleh dijadikan legitimasi untuk ‘menyerang’ pemahaman lain yang berbasis metodologi argumentatif meskipun berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat selama ini.

Saling memahami dan menghargai pemahaman dan pengamalan beragama terutama dalam masalah *furu'iyah* merupakan dua hal yang penting dalam alam keterbukaan dan era reformasi sekarang ini. Dalam konteks ke-Acehan, mengutip pendapat Alyasa Abubakar, kehadiran era reformasi, yang salah satu cirinya adalah membuka kembali peluang adanya keragaman yang lebih luas termasuk adat dan budaya serta keragaman pemerintahan lokal di Indonesia, seraya menghentikan kecenderungan penyeragaman yang amat kuat dan kaku pada hampir semua bidang di era Orde baru, serta dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (dan beberapa undang-undang lain sebelumnya), menjadikan peluang untuk menjalankan Islam dalam semua sendi kehidupan dan dengan keterlibatan pemerintah di Aceh menjadi terbuka lebar dan mempunyai landasan hukum yang sah dan memadai.¹

Namun akhir akhir ini harmonisasi kehidupan beragama di nesgeri syariat sedang di uji. Berbagai tragedi konflik intoleransi intren umat beragama di Aceh sudah sering di jumpai di masyarakat. Tragedi penurunan khatib saat jumatlan berlangsung dan mimbar mesjid dibawa lari yang terjadi

¹ Al Yasa` Abubakar, “Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh Tajdid Syari`at Dalam Negara Bangsa”, *makalah*, disampaikan pada First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, 24 – 27 February 2007

di Gampong Arongan, Bireun², Kerusuhan massal jamaah Tgk. Aiyub Desa Jambo Dalam, Aceh Utara³ dan beberapa aliran yang berkembang di Aceh dan dianggap menggoyang kenyamanan dan ketenteraman masyarakat selama ini sebagaimana dirilis Muspida dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh⁴, telah menjadikan suasana atmorfir toleransi beribadah di Aceh semakin tak menentu. Ditambah dengan kirsuh *khilafiah* penggunaan tongkat saat khatib berkhotbah jumat di Masjid Raya Baiturrahman dan *pawai akbar* anti wahabi di Banda Aceh, melahirkan suasana intoleransi intern umat muslim semakin memanas.⁵ Salah satu penyebabnya karena masing-masing kelompok mazhab menganggap mereka paling benar. Hal ini tidak perlu terjadi kalau simpul masyarakat muslim memahami keberagaman mazhab, karena Islam adalah agama yang elegan, inklusif, moderat, dan ramatan lil muslim dan juga selain muslim.

Berdasarkan uraian diatas maka UIN Ar-Raniry melalui Lembaga P2M, membuat sebuah program pengabdian pada Masyarakat yang bertema revitalisasi paradiqma islam inklusif di tengah masyarakat Aceh. Program ini bertujuan untuk menebar *paradigma Islam inklusif - rahmatan lil alamin*-di masyarakat Aceh. Paradigma memahami keberagaman mazhab, karena Islam adalah agama yang elegan, inklusif, moderat, dan ramatan lil muslim dan juga selain muslim, penting dipahami kepada masyarakat, karena Aceh adalah Provinsi yang sedang melaksanakan Syariat Islam. Cermin daerah Islam bagi provinsi lain di Indonesia bahkan dunia.

Program Pengabdian Masyarakat

Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Dalam memenuhi peran Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu kuliah pengabdian kepada masyarakat, maka UIN Ar-Raniry melakukan beberapa kegiatan rutin diantaranya adalah kegiatan Bakti sosial dan pelaksanaan program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). Kegiatan bakti sosial lebih kepada pengabdian kepada

² Liputan, Mimbar Mesjid dibawa Lari Warga”, dalam *Jejak Post* dalam <http://www.jepakpost/2013/04> diakses tanggal 3 Januari 2015

³ Desi Safnita Saifan, “Tidak Hanya Dibacok, Aiyub Pun Sempat Dibakar” *Harian Kompas*”,

⁴ <http://www.lintasgayo.com/3914/daftar-aliran-sesat-yang-dilarang-di-aceh.html#comments>

⁵ *Serambi Indonesia*, Rabu, 21 Februari 2016

masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa yang melibatkan stakeholder tempatan lebih dominan. Sedangkan program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) sering dilakukan baik secara reluger, mandiri ataupun participation action reseacrh (PAR).⁶

Pengabdian pada Masyarakat ini sekaligus sebagai sarana praktek penerapan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, selanjutnya bagi kepentingan akademik, program ini telah dikembangkan oleh seluruh fakultas/jurusan di lingkungan UIN Ar-Raniry sebagai satu bagian dari program pendidikan Perguruan Tinggi Islam secara keseluruhan.

Program Pengabdian Pada Masyarakat ini diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti Pembangunan masyarakat muslim mandiri melalui proses penyadaran dan partisipasi bersama masyarakat dalam menjaga lingkungan desa yang bersyariat Islam. Pengembangan kehidupan beragama yang lebih damai dan kondusif di lingkungan masyarakat setempat melalui ketetapan dan kecermatan observasi tentang situasi sosial keagamaan, proses dan dinamika sosial, latar belakang struktural dan kultur masyarakat setempat. Inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan bidang sosial keagamaan. Serta memotivasi masyarakat dalam upaya pencarian jalan pemecahan masalah yang dihadapi mereka khususnya dibidang keagamaan.

Program pengabdian ini juga untuk melaksanakan visi tridarma perguruan tinggi UIN Ar-Raniry dibidang Pengabdian Pada Masyarakat, yaitu terwujudnya civitas akademika (dosen dan mahasiswa) yang peduli, pemerhati dan pemecah masalah yang ada ditengah masyarakat dalam bidang keislaman dan sosial dengan cara membaur dan tinggal di tengah masyarakat. Selanjutnya program ini juga untuk menjalankan misi Misi Akademik; memadukan berbagai disiplin ilmu secara multiinterdisipliner yang dikembangkan di UIN Ar-Raniry. Misi Sosial; pemberdayaan potensi masyarakat ke arah perubahan sosial, kemandirian dan pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Dan misi Syariat Islam; mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Islam Inklusif dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

⁶ Muhibbuthabary (2016), *Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat dan Participatory Action Research bagi Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, hal 6.

Adapun mengenai penentuan daerah yang ditetapkan sebagai lokasi pengabdian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan informasi dari pemerintah daerah dan instansi yang terkait seperti, Dinas Syariat Islam, Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian dan Kantor Kementerian Agama republik Indonesia. Program pengabdian ini lebih ditujukan di daerah rawan konflik internal umat islam, yang banyak terdapat dayah (pondok salafiyah) dan tokoh agama kharismatik lulusan dayah tradisional Aceh, Aceh Jaya dan problem pendangkalan aqidah di daerah perbatasan Aceh Tamiang.

Program ini dilakukan dari Mei 2015 sampai september 2015. Lembaga Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry telah membentuk tim safari ramadhan yang tinggal bersama masyarakat selama seminggu di Daerah Aceh Tamiang dan Aceh Jaya. Kemudian dilanjutkan kedaerah yang sama dngan mengirimkan mahasiswa dan dosen pembimbing dalam program Kuliah Pengabdian Masyarakat selama 40 hari. Selama setahun program ini telah melibatkan 200 orang Dosen dan 1800 mahasiswa yang tempatkan secara berkala dengan penekanaan aktivitas yang berbeda. Disamping itu program ini juga melibatkan Pemda setempat, Dinas syariat Islam, Kepolisian, kejaksaan, Dinas pertanian, Kemenag, Perbankan dan majelis ulama.

Dua daerah tersebut dipilih setelah mempertimbangkan berbagai hal. Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah di perbatasan timur Aceh berbatasan dengan Sumatera Utara. Daerah ini sering ditemukan kelompok yang diindikasi aliran sesat dan isu penangkalan aqidah. Sehingga claim aliran sesat dan menuduh kelompok lain salah mudah sekali terjadi diantara masyarakat. Begitu juga dengan Aceh Jaya. Daerah bekas tsunami ini merupakan daerah yang banyak di tempati oleh masyarakat pendatang dari daerah lain pasca rekrontruksi tsunami. Munculnya balai balai pengajian kecil dan dayah sebagian besar di pimpin oleh tengku (kyia, guru ngaji) dari pasanten salafiyah yang ada di Aceh Utara dan Aceh selatan. Keberadaan balai dan dayah pengajian ini terkadang menimbulkan cara paham keislaman yang masih sempit, hanya mempelajari dan memahami satu mazhab dalam islam. Selain yang dipahami dan diyakini adalah aliran salah, sesat. Pemahaman ini sangat mudah menyalah orang kelompok lain, menbkklam salah, sesat bahkan menkafirkan.

Hadirnya peserta program pengabdian pada masyarakat dari civitas Akademika UIN menjadi salah satu solusi unutm kembali menata cara pikir Islam yang lebih terbuka, arif dan bijak sana. Kebenaran dalam memahami

teologi dan ibadah dalam islam dapat dimiliki oleh berbagai kelompok mazhab, sekalipun berbeda dengan apa yang kita pahami dan kerjakan saat ini. Paradigma islam inklusif mencari salah satu andalan yang coba ditawarkan oleh UIN dalam bentuk kegiatan yang beragam; seperti pengajian majelis taklim, safari ramadhan, pembentukan dan pembinaan TPA, melakukan perlombaan kajian keislaman dan lain sebagainya. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dari kepala daerah, instansi pemerintahan, sekolah, ulama sampai ustadz dan santri dayah setempat.

Pengabdian Pada Masyarakat: Islam Inklusif

Diantara tahapan proses yang dilakukan adalah Pendataan potensi konflik dimasyarakat, Menentukan penghubung tokoh agama, masyarakat, aparat desa, Pembekalan bagi pada petugas dan relawan yang terlibat program ini. Selain pembekalan administrasi desa dan manajemen para dosen dan mahasiswa juga dijelaskan pemahaman paradigma keislaman *inklusif yang ramatan lil alamin* yang akan dilakukan pada masyarakat dengan tidak mengabaikan kearifan pemahaman keislaman masyarakat setempat.

Diantara point pemahaman islam inklusif yang digaris bawahi dalam pembekalan peserta Program Pengabdian pada Masyarakat adalah:

1. Ide utama dari islam inklusif adalah pemahamannya untuk memahami pesan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Semua mazhab fiqiyah seperti; hambali, maliki, syafie dan hanafi dan mazhab ideologi, seperti al'asyariyah, mu'tazilah, wahabi, ahlisunnah waljamaah, syiah; senantiasa memiliki tujuan yang sama menyampaikan ajaran islam tentang ibadah, aqidah, dan ketaqwaan dalam arti yang luas yang saling menjadikan muslim shaleh pribadi dan shaleh sosial.⁷
2. Istilah Islam inklusif sepadan dengan istilah *rahmatan lil alamin*, dalam al-Quran yakni istilah selalunya islam dapat menyampaikan rahmat perdamaian dan pesan sejuk bagi umat manusia, baik sesama muslim ataupun antar umat beragama lainnya.
3. Islam yang bermakna setiap pemeluknya berserah diri kepada Allah. Hal tersebut sejalan pula dengan ibnu taemiyah yang menyatakan bahwa Al-Islam adalah Al-Din (tunduk, patuh). sesungguhnya ikatan Al-din disisi Allah adalah sikap pasrah. Sikap pasrah tersebut merupakan inti dasar

⁷ Zainuddin, M, *Kesalehan Normatif dan Kesalehan Sosial*, Malang: UIN-Malang Press, 2007

teologi inklusif dari pandangan: kesatuan kemanusiaan yang berangkat dari konsep ke-tuhanan yang maha esa. dimana akhirnya sikap pasrah merupakan titik temu semua mazhab dalam islam sebagai agama yang benar, berupaya menuju keridhaan Allah yang maha esa. Dimana kepasrahan ini menjadi karakteristik pokok ajaran islam, yakni bersikap berserah diri kepada tuhan dengan menebarkan rahmat bagi segenap makhluk Allah.

4. Beberapa ciri Islam Inklusif, yaitu Kebebasan berfikir,⁸ Islam memerlukan pembaharuan dalam memahami masing-masing mazhab yang mashur dan berbagai aliran dalam islam, baik mazhab teologi maupun mazhab fiqh. Oleh sebab itu. Pemahaman inklusif dalam bermazhab dapat diartikan kemauan untk memahami persamaan antar pemahaman teologi dan ibadah dalam islam.
5. Meyakini bahwa Setiap Golongan dalam islam memiliki pendapat bahwa mazhabnya bukan satu-satunya cara memahami agama yang mutlak benar. bahkan semua mazhab yang ada di dunia islam adalah sama dan benar kepada konsep umum, Yaitu semua mazhab memiliki kecintaan untuk memurnikan aqidah yang selamat dari kesyiriakn dan ibadah yang benar seperti yang di contohkan oleh Rasulullah dan para shalafusshaleh.
6. Memahami bahwa mazhab teologi dan fiqh merupakan susunan pemahaman para ulama yang merupakan kayaannya khazanah keilmuan islam. Setiap pendapat dan pemahana manusia memiliki dua potensi kemungkinan, poteni benar dan potensi salah. Jadi tidak mesti senua benar atau semua salah. Berbeda hal nya denga teks Al-Qur'an dan hadist, yang telah disepakati tidak ada keraguan didalamnya.
7. Ulama mazhab hanyalah menggambarkan kemampuan seseorang manusia yang memimpin kelompok mazhab tertentu saja. Disamping itu ulama mazhab sebagai manusia yang biasa yang tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Maka para penganut mazhab mesti selktif dalam memilih dan mengikuti pemahama yang ada.

Dengan kata lain Islam inklusif adalah Islam yang lebih mengedepankan tentang keterbukaan, namun demikian perlu di perhatikan juga bahwa islam inklusif telah banyak mendapatkan tempat yang terkadang bertentangan dengan cara berpikir sebagian muslim lainnya yang masih

⁸ Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998

berpikir sempit, belum berpikir secara terbuka. Islam inklusif memiliki keterbukaan dengan berbagai macam pemahaman dan tata cara beribadah pada masing-masing golongan mazhab, sehingga terkadang ia bertentangan dengan cara berpikir orang islam eksklusif yang tidak melakukan keterbukaan dalam ajaran dan mazhab yang diyakininya.⁹

Implementasi Program

Terdapat beberapa implementasi yang penting dari program pengabdian ini, diantaranya adalah

a. Bagi Masyarakat

Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka memperoleh sumbangan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan cara berpikir, pengetahuan dan keterampilannya, khususnya dibidang keagamaan, sehingga dapat menumbuhkan potensi sumber daya pikir yang arif dan bijaksana dalam melihat dinamika perkembangan pemahaman islam yang ada dan selanjutnya dapat memotivasi mereka unutm mengenal islam lebih luas.

Terbentuknya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga upaya kelanjutan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang agama dapat terjamin. Dan program ini dapat merupakan alternatif unutm terciptanya budaya damai di dalam kehidupan beragama di masyarakat muslim.

b. Bagi Pemerintah

Program ini sangat bermanfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain dalam mewujudkan msyarakat yang cinta damai, menjaga harmonis dalam kehidupan beragama.. tidak mudah terprovolski oleh isu yang tidak mendasar meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya program ini telah membuka akses kemitraan dan komunikasi timbal balik yang baik dan harmonis antara perguruan tinggi dan pemerintah.

c. Bagi Civitas akademika

Program ini juga sangat bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa, khususnya mahasiswa dapat mendewasakan cara berpikir, bersikap dan

⁹ Rosyidi, Imron, *Pendidikan Berparadigma Inklusif: Upaya Memadukan Pengokohan Aqidah Dengan Mengembangkan Sikap Toleransi Dan Kerukunan*, Malang, UIN-Malang Press, 2009.

bertindak serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan pengkajian, perumusan dan pemecahan masalah secara praktis dan terpadu ditengah masyarakat. Selanjutnya program ini dapat melatih dan mengimplementasikan ilmu membiasakan mahasiswa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan melalui kerja sama antar bidang keahlian. Serta program ini dapat mendalami penghayatan dan pengetahuan mahasiswa terhadap berbagai masalah dalam yang dimiliki ditengah masyarakat khususnya di bidang agama. Hal tersebut dapat menambah rasa percaya diri menjadi insan yang berguna bagi orang lain (*anfauhum linnas*).

d. Bagi UIN Ar-Raniry

Program ini juga bermanfaat bagi universitas UIN Ar-Raniry guna mendapatkan masukan bagi penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta meningkatkan partisipasi dan peranan UIN dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama. Selanjutnya berdasarkan analisis situasi dan kondisi di masyarakat maka dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan dan pembentukan beragam program pengabdian yang realistis, pragmatis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya dibidang keagamaan, sosial dan budaya.

Penutup

Program pengabdian pada masyarakat ini perlu ditingkatkan dan diabadikan, karena ia merupakan ajang mendemonstrasikan dan mengaplikasikan konsep ilmu pengetahuan tertentu yang menunjang pembangunan masyarakat. Selain itu juga merupakan upaya pengenalan UIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan yang berusaha bekerjasama dengan pemerintah, instansi terkait dan masyarakat, serta mengusahakan penyesuaian program-program yang efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dari hasil program ini dapat direkomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk menjadikan program berkelanjutan di daerah tersebut yang lebih komprehensif dan integratif. Program ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan program kerjasama yang berkelanjutan diantara UIN Ar-raniry, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah terkait.[]

Daftar Pustaka

- Muhibbuthabary, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat dan Participatory Action Research bagi Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2016
- Rahmad, Jalaludin, *Islam dan Pluralisme*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Rachman, Buddy Munawar, *Islam Pluralis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rosyidi, Imron, *Pendidikan Berparadigma Inklusif: Upaya Memadukan Pengokohan Aqidah Dengan Mengembangkan Sikap Toleransi Dan Kerukunan*, Malang, UIN-Malang Press, 2009.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung, Penerbit Mizan, 1998
- Sugiharto, Islam Inklusif: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Zainuddin, M, *Kesalehan Normatif dan Kesalehan Sosial*, Malang: UIN-Malang Press, 2007

Meredam Konflik dengan Pola Kemitraan; Studi Kasus Pemberdayaan Petani Penggarap HGU Melalui Jamaah Sholawatan di Situbondo

SAMSUL ARIFIN, SYARIFUDDIN, AKHMAD ZAINI AHSIN

IAI Ibrahimy Situbondo, Indonesia
konseling.dakwah.iaii@gmail.com

Abstrak: Kawasan perkebunan Banongan Dusun Bugeman termasuk wilayah sengketa Hak Guna Usahan (HGU) bekas hak *ertpacht* antara masyarakat pembuka lahan dengan PTPN Perkebunan Kapas Asembagus dan Perusda Banongan. Karena statusnya yang masih dalam sengketa itulah masyarakat hidupnya termarginalkan. Mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Tulisan ini ingin menjelaskan tentang penguatan masyarakat untuk memperoleh kembali kuasa kelola (*power of management system*), kuasa milik (*power of ownership system*), dan kuasa manfaat (*power of unility system*) yang hilang. Fokus pemberdayaan terutama yang terkait dalam bidang hukum dan advokasi serta dalam bidang keagamaan. Metode yang digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Strategi ini diharapkan data problematika masyarakat dapat ditelaah kembali, didalami bersama-sama untuk kemudian direncanakan alternatif problem solvingnya bersama masyarakat. Hasilnya secara garis besar, pada tahapan advokasi ini, kami melakukan beberapa tahapan, antara lain: pertemuan dengan masyarakat, identifikasi dan strategi advokasi, pengorganisasian petani dan penggalangan sekutu, tekanan dan lobi; serta penyelesaian konflik. Aksi bersama masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat memperoleh kembali *power of management*, *power of ownership* dan *power of unility system* berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Cara penyelesaian sengketa dalam pengabdian masyarakat ini diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, serta masing-masing pihak tidak perlu berambisi untuk mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan (*anti violence*).

Kata kunci: pemberdayaan, advokasi, HGU, PRA, power management

Pendahuluan

Kawasan Banongan Dusun Bugeman termasuk wilayah sengketa Hak Guna Usahan (HGU) bekas hak *ertpacht* antara masyarakat pembuka lahan dengan PTPN Perkebunan Kapas Asembagus dan Perusda Banongan. Karena statusnya yang masih dalam sengketa itulah masyarakat hidupnya termarginalkan. Mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Setelah kami mengadakan *preliminary research*, kami menjumpai beberapa isu yang menjadi problematika masyarakat Dusun Bugeman, yaitu sengketa lahan HGU Banongan antara masyarakat dengan PTPN XXVI Perkebunan Kapas dan PG Asembagus. Menurut masyarakat, tanah Banongan tersebut dibabat pada tahun 1912. Pembukaan lahan tersebut untuk tanaman tebu sebagai pemasok Pabrik Gula (PG) milik orang Belanda. Orang Belanda tersebut berjanji nantinya tanah tersebut sebagai hak milik orang yang membabat hutan; asalkan ditanami tebu selama satu musim. Tapi pada tahun 1937, orang-orang Belanda memerintah mandor tebu untuk mengambil alih secara paksa beberapa lahan. Setelah Indonesia merdeka, lahan tersebut dikuasai PG Asembagus. Tapi masyarakat terus berjuang agar tanah tersebut menjadi miliknya.

Adapun riwayat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut di muka adalah:

1. Recht Van Erfpacht. Verp. 170. Akte tanggal 16 Juli 1889 nomor 149, luasnya 386.3473 Ha; atas nama Guevernement Van NI (Banongan Wringin Anom I);
2. Recht Van Erfpacht. Verp. 171. Akte tanggal 16 Juli 1889 nomor 150 luasnya 289,9720 Ha; atas nama Guevernement Van NI (Banongan Wringin Anom II);
3. Recht Van Erfpacht. Verp. 171. Akte tanggal 16 Juli 1889 nomor 151 luasnya 357,6353 Ha; atas nama Guevernement Van NI (Banongan Wringin Anom III);
4. Recht Van Erfpacht. Verp. 171. Akte tanggal 16 Juli 1889 nomor 152 luasnya 281,6175 Ha; atas nama Guevernement Van NI (Banongan Wringin Anom IV);

Pada awalnya, masyarakat tidak mengetahui status tanah yang dibabatnya tersebut. Pada tahun 1992 BPN menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak *ertpacht*; berdasarkan UU No 86 tahun 1958 terkena nasionalisasi dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tgl 3 Desember 1957. Tanah-tanah bekas Erfacht Banongan Verp. Nomor 170 sampai dengan 173 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 86

Tahun 1958 terkena nasionalisasi dan menjadi tanah yang haknya dikuasai oleh negara (HMN) sejak tanggal 5 Desember 1957, dan selanjutnya tanah tersebut diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk dikelola dengan status Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing sebagai berikut:

1. HGU Nomor 1 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Maret 1968 Nomor : SK.12/HGU/68 atas nama PTPN XXVI (persero) perkebunan kapas, seluas 85,7170 Ha yang akan berakhir tanggal 31 Desember 1998.
2. HGU Nomor 2 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Maret 1968 Nomor : SK.12/HGU/68 atas nama PTPN XXVI (persero) perkebunan kapas, seluas 64,6570 Ha yang akan berakhir tanggal 31 Desember 1998.
3. HGU Nomor 3 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 1971 Nomor : SK.10/HGU/DA/68 atas nama Perusahaan Daerah Situbondo, seluas 330,0480 Ha yang akan berakhir tanggal 31 Desember 1998.
4. HGU Nomor 4 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Juli 1972 Nomor : SK.8/HGU/DA/68 atas nama PTP XXIV-XXV Pabrik Gula Asembagus, seluas 808,7900 Ha yang akan berakhir tanggal 31 Desember 1997.
5. HGU Nomor 5 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 14 Agustus 1971 Nomor: SK.10/HGU/DA/68 atas nama Perusahaan Daerah Situbondo, seluas 37,9770 Ha yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2011.

Mengenai lahan-lahan HGU yang diterlantarkan maka hal ini bertentangan dengan pasal 34 UUPA tentang hapusnya Hak Guna Usaha. Termasuk juga sesuai dengan SK Mendagri No. 96/1971 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah, pasal 7

Bagi negara-negara agraris, masalah tanah pada hakekatnya adalah masalah fundamental, seperti halnya kepemilikan tanah yang merupakan syarat mutlak bagi seorang petani. Sepanjang sejarah, sejak manusia berburu di hutan atau mengumpulkan hasil hutan, kemudian bertani mengembara sampai kepada bercocok tanam secara menetap, penguasaan dan pemanfaatan tanah seringkali menimbulkan sengketa. Kalau kita melihat kembali pada sejarah, maka tampak bahwa sengketa-sengketa itu terjadi karena tanah-tanah yang subur semakin dikuasai oleh segolongan kecil pemilik-pemilik tanah yang biasanya memiliki kekuatan politik, atau kaum

“raja uang” yang merampas tanah-tanah petani bagi pengembangan industrinya (Wiradi, 2000: 21-22).

Sengketa agraria mampu menjadi isu sentral terutama di daerah pedesaan yang menjadi sebuah fenomena yang menarik tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi hampir tersebar banyak wilayah di negeri ini yang salah satunya adalah sengketa tanah perkebunan. Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan masalah yang sangat kritis di Indonesia. Desakan liberalisasi perdagangan dengan menempatkan “tanah sebagai komoditi” membuat wilayah masalah ini semakin kompleks, di mana rakyat, terutama petani kecil diposisikan sebagai “korban” (*victim*) arus kapitalisme global yang nyaris tanpa jalan keluar. Persoalan sengketa tanah merupakan masalah yang rawan dan sensitif bagi rakyat, karena tanah merupakan faktor penting dalam menopang *survival* setiap manusia sebagai sebuah entitas. Karena itu persoalan yang menyangkut masalah tanah perlu ditangani secara serius dan bijaksana.

Sebenarnya pendiri negara ini menyadari pentingnya masalah tanah dalam pembangunan dan potensi sengketa yang ada di dalamnya, sehingga diletakkan dasar pengaturan masalah pertanahan dalam dasar negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan tersebut, secara implisit terlihat bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, dengan tujuan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat..

Kita semua mengetahui bahwa masalah penguasaan tanah bukanlah hal yang sederhana, karena itu menyangkut bukan hanya saja hubungan manusia dengan tanah, melainkan juga (dan justru terutama) hubungan manusia dengan manusia. Seyogyanyalah kebijaksanaan agraria perlu dilandasi dengan pemahaman terhadap aspek sosial ini agar penataan kembali masalah agraria dapat dilaksanakan tanpa gejolak sosial yang destruktif (Wiradi, 2000: 23).

Sengketa pertanahan merupakan sengketa yang memiliki karakteristik yang khas, yang ditandai dengan adanya penghadapan secara vertikal pihak yang memiliki akses sumberdaya lebih lemah dengan pihak yang memiliki akses sumberdaya lebih besar atau dengan kebijaksanaan negara yang cenderung eksklusif, tidak partisipatif dan bersifat dominan terhadap kontrol pendayagunaan sumberdaya.

Kebijakan perkebunan di Indonesia tidak saja melahirkan dan memperluas kantong-kantong kemiskimam (*poverty enclave*) dibasis perkebunan namun juga menghilangnya penguasaan dan pemilikan lahan oleh petani karena adanya berbagai bentuk perampasan tanah direjim Soeharto. Sedangkan kian besarnya angka terhadap petani dalam upaya untuk menyelamatkan aset-aset perkebunan pada era pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa politik agraria pemerintah tidak banyak berubah dengan rejim berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa meluasnya kemiskinan struktural tidak sekedar sebuah fakta dengan adanya pola sejarah penindasan kolonial yang mempengaruhi relasi struktur sosial ketergantungan terhadap sumber pemiskinan, mempengaruhi tingkat pendidikan petani, buruh, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Namun juga diakibatkan tidak adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah saat ini (*political will*) dalam perlindungan petani dan buruh perkebunan. Masyarakat sangat kesulitan memperoleh akses pangan yang layak, pemenuhan hak kesehatan, serta tidak adanya jaminan sosial hidup petani. Penggusuran nilai-nilai kearifan lokal dengan menggantikannya dengan nilai-nilai yang mendorong konsumtifistik-kapitalistik, dari tradisi komunalistik ke individualistik. (Wijardjo 2001: 16).

Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis tentang persoalan sengketa tanah perkebunan yang kompleks maka munculah radikalisme petani diberbagai kelompok sektoral dikantong-kantong konflik sengketa tanah perkebunan. Salah satu permasalahan yang kini timbul adalah maraknya perebutan tanah-tanah negara oleh masyarakat atau sering disebut *reclaiming* (Al Araf, 2002: 77).

Gerakan radikal inilah yang dinamakan *reclaiming movement* yaitu, sebuah tindakan perlawanan rakyat tertindas untuk memperoleh hak-haknya seperti tanah, air dan sumberdaya alam serta alat-alat produksi lainnya secara adil demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta. Gerakan *reclaiming* memiliki prinsip anti kekerasan serta menjaga nilai demokrasi dan HAM, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menjadikan kaum tani menjadi tirani baru. Oleh sebab itu, gerakan *reclaiming* lebih mendekati pada proses keyakinan kaum tani atau komonitas kaun tertindas lainnya untuk mengembalikan atau paling tidak memulihkan ketimpangan agraria yang menyebabkan kemelaratan dan kemiskinan di pedesaan (Perdana, 2011).

Sengketa penguasaan hak atas tanah yang terjadi di Banongan Asembagus Situbondo antara petani dengan PTPN XI, PTPN XII dan

Perusahaan Daerah Banongan terjadi disebabkan salah satu faktor dari unsur kesejarahan tanah sengketa tersebut. Dimana masyarakat petani Banongan menganggap bahwa tanah tersebut sebagai hak miliknya sebagai warisan dari nenek moyang mereka dengan cara membuka (*membabat*) hutan.

Fenomena radikalisme petani sengketa kasus tanah perkebunan seperti yang terdiskripsikan di muka, merupakan bagian potret kasus pertanahan yang terjadi di perkebunan Banongan Asembagus Situbondo Jawa timur, yang membutuhkan perhatian serius oleh semua pihak terutama pemerintah dalam mencari solusi penyelesaian sengketa dan penanganannya secara tuntas.

Sebenarnya telah ada produk-produk hukum yang mengatur tentang tanah perkebunan antara lain, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Pemilik atau Kuasanya yang Sah, Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha Swasta Nasional, Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemberian Hak Baru Atas Tanah-Tanah Bekas Hak Guna Usaha yang Diduduki Atau Digarap Pihak lain, serta PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Produk hukum yang berkaitan dengan masalah tanah perkebunan telah ada, akan tetapi sengketa masih saja muncul bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan. Fenomina meningkatnya eskalasi sengketa agraria ini terjadi dengan mengikuti pola kebijakan agraria dalam penyelesaian sengketa yang tersedia.

Penyelesaian sengketa tanah perkebunan menjadi semakin sulit apabila hanya mengandalkan formalitas pelebagaan penyelesaian sengketa yang tersedia selama ini. Ketidaksiapan perangkat hukum dan kebijakan publik, yang diharapkan menjadi benteng terakhir perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat, menjadi permasalahan tersendiri yang memperkuat ketidak berdayaan rakyat.

Secara teoritis sengketa muncul ketika seseorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diminta itu. Karena prinsipnya tidak akan ada gugatan jika tidak ada kepentingan (*geen actie geen belang*), dengan adanya kepentingan diantara para pihak maka salah satu pihak yang merasa telah

dilanggar haknya dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada cenderung mengedepankan kebenaran formal, dan sering kali tidak menangkap kebenaran materiil (Sugianto, 1996: 2). Di sisi yang lain lembaga peradilan dianggap tidak efektif dan efisien menyelesaikan sengketa yang banyak timbul dimasyarakat.

Prosedur yang biasa, yang dikenal dengan jalur litigasi, dalam penyelesaian sengketa sering kali membutuhkan waktu yang lama, biaya yang mahal, dan jaminan bahwa akan menghasilkan penyelesaian yang adil dan memuaskan para pihak yang bersengketa belum tentu dapat dicapainya. Begitu pula adanya penilaian bahwa pengadilan sulit bersikap obyektif, ketika institusi tersebut lebih berpihak pada eksekutif, sehingga kemandirian pengambilan keputusannya dipertanyakan. (Mulyo, 1996: 6).

Terlepas dari sengketa tanah yang masih berlangsung tersebut, bagaimana pun kondisi masyarakat Bugeman harus diperhatikan. Berdasarkan pemikiran inilah kalangan perguruan tinggi perlu mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk dakwah pemberdayaan.

Sedangkan menurut Sarah Hlupelkile Longwe (1991) konsep pemberdayaan memiliki lima dimensi. Pertama, kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material rakyat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar; seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan. Kedua, akses. Pemberdayaan dalam hal ini berarti dipahaminya untuk mendorong rakyat melakukan tindakan untuk mengubahnya dengan cara memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya atau bahkan mampu menguasai akses tersebut.

Ketiga, kesadaran kritis. Pemberdayaan di tingkat ini, berarti penumbuhan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah tetapi merupakan hasil dari sistem diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keempat, partisipasi. Pemberdayaan pada level ini adalah upaya pengorganisasian rakyat, sehingga mereka dapat berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka tidak terabaikan. Kelima, kuasa. Pemberdayaan dalam tingkatan ini, merupakan upaya untuk menguatkan organisasi rakyat sehingga mereka mampu mengimbangi kekuasaan kelas atas dan mampu mewujudkan aspirasi mereka karena mereka ikut memegang kendali atas sumber daya yang ada (Wardah Hafidz dan Wiladi, 1999: 17-19).

Fokus pemberdayaan dalam program ini adalah penguatan masyarakat untuk memperoleh kembali kuasa kelola (*power of management system*), kuasa milik (*power of ownership system*), dan kuasa manfaat (*power of unility system*) yang hilang. Ada dua bidang yang akan kami lakukan, yang saling berkaitan. Pertama, dalam bidang hukum. Kami akan melakukan penyadaran kepada masyarakat, agar mereka mendapatkan kembali hak-haknya. Hak-hak tersebut pada ujungnya, akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Kedua, dalam bidang spiritual. Kami akan melakukan pendekatan dengan pendekatan keagamaan. Sebab pendekatan keagamaan ini akan lebih diterima masyarakat Dusun Bugeman.

Metode

Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pemberdayaan ini adalah dengan menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat berbasis *Participatory Rural Appraisal* (Daniel, 2006: 37-47; Sukardi, 2005: 241-247). Strategi ini diharapkan data problematika masyarakat yang dijelaskan di atas (hasil studi pendahuluan) dapat ditelaah kembali, didalami bersama-sama untuk kemudian direncanakan alternatif problem solvingnya bersama masyarakat. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama karena mereka terlibat di dalamnya, dan tim berperan hanya sebagai fasilitator.

Adapun dalam implementasinya, program ini akan dilakukan melalui beberapa cara atau metode-metode sebagai berikut: Pertama, pengenalan situasi dan membangun restu masyarakat. Kedua, melakukan pengkajian keadaan wilayah (secara umum dan topikal), yaitu melakukan pengkajian terhadap peta wilayah, keadaan sosial-ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan rekonstruksi sejarah masyarakat Bugeman secara umum. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan kajian wilayah secara mendalam tentang problem sosial keagamaan masyarakat Bugeman dengan cara mengkaitkan problematika dan potensi wilayah di daerah tersebut.

Ketiga, menyusun rencana aksi secara partisipatif bersama warga, yaitu merancang kegiatan sesuai dengan problem yang ditemukan dari hasil kajian wilayah bersama-sama dengan warga yang didasarkan atas kebutuhan mereka. Keempat, melaksanakan aksi, yaitu melakukan kegiatan atau upaya-upaya untuk memecahkan problem yang telah dikaji bersama-sama dengan warga dan dilakukan bersama-sama dengan warga pula.

Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan pada aktivitas sebelumnya untuk melihat sejauhmana efektivitas dan efesiansinya. Dan

bagaimana melakukan perbaikan ulang (menyusun siklus berikutnya selama masih mungkin)

Pembahasan

Pengenalan Situasi

Kabupaten Situbondo terletak di pantai utara Jawa Timur bagian timur, kurang lebih 7-35 dan 7-44 di sebelah selatan khatulistiwa di antara 113-30 dan 114-42 Bujur Timur. Daerah ini terletak di jalur lintasan Surabaya-Banyuangi-Bali. Luas wilayah Situbondo yang 1.638,50 Km² itu hampir keseluruhan terletak di pesisir dengan panjang pantai sekitar 140 Km. sebelah barat Situbondo berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Batas sebelah utara berbatasan Selat Madura, batas sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan pada ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuangi (BPS, 2014).

Sengketa tanah di perkebunan Banongan ini meliputi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Jangkar, Asembagus, dan Banyuputih. Kecamatan Jangkar memiliki luas wilayah 67,00 Km, yang terdiri dari 8 Desa dan 44 Dusun. Kecamatan Jangkar ini berpenduduk sebanyak 32. 876 jiwa.

Kecamatan Asembagus mempunyai luas wilayah 118,74 Km, yang terbagi dalam 10 Desa dan 36 Dusun dengan kepadatan jumlah penduduk 45.751. Sedangkan Kecamatan Banyuputih luasnya 481,67 Km yang terdiri dari 5 desa (desa Banyuputih, Sumberejo, Sumberanyar, Sumberwaru dan Wonorejo) dengan terdiri dari 27 Dusun dengan jumlah penduduk 48.839 jiwa.

Dari latar geografis di depan, wilayah Banongan didominasi oleh penggunaan tanah pertanian untuk tiga komoditi, yaitu sawah, tebu dan kelapa. Dengan penggunaan sekitar 500 KK, hampir seluruh penduduknya terbawa ke arus pengerjaan tanah perkebunan. Di luar itu mereka, bekerja sebagai buruh tani dan nelayan. Diskripsi ini menunjukkan kenyataan pola penguasaan tanah dan juga penggunaannya.

Kondisi umum perkebunan di Situbondo berdasarkan data statistik diketahui areal perkebunan di Situbondo cukup luas dan terbesar dan tersebar di seluruh daerah serta terdiri dari berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan, yang dikelola oleh perkebunan besar negara, perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.

Menurut data yang ada di kantor cabang perkebunan Situbondo luas perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Situbondo adalah 17.150 Ha, yang

ditanami beberapa komoditi. Sedangkan luas areal perkebunan negara tercatat 4.340 Ha, yang ditanami tebu, dan kapas. Areal perkebunan besar swasta tercatat seluas 586 Ha yang ditanami tebu, kelapa dan kapuk randu.

Tahapan pengenalan situasi atau persiapan sosial dilakukan di Dusun Bugeman Banyuputih, merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi atau penjajagan awal. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai pertemuan untuk memperoleh persepsi yang sama. Langkah ini penting untuk mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang perlu dilakukan, dana yang dibutuhkan dan siapa melakukan apa dan lain sebagainya.

Kajian Keadaan Wilayah

Dalam tahapan kajian wilayah yang paling penting tahap identifikasi. Tahap identifikasi merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan dakwah pemberdayaan. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang, yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya. Kegiatan identifikasi pengabdian masyarakat bukanlah suatu kegiatan diskret (terpisah) melainkan kegiatan yang berlangsung terus menerus (kontinyu), bukan peristiwa satu kali jadi, melainkan suatu perkembangan adaptif untuk menemukan apa-apa yang baik dikerjakan pada tiap tahapan. Pada tahapan ini, kami melakukan:

Pertama, *analisis sosial, ekonomis, teknis, kelembagaan dan analisis lainnya sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan secara partisipatif* yang melibatkan berbagai pihak yang terkena pengaruh maupun yang berpengaruh (stakeholder) baik untuk mengetahui kebutuhan, potensi dan peluang yang ada maupun permasalahan yang ada. Kami melakukan tahapan ini di masjid bersama Jamaah Sholawatan Dusun Bugeman Banyuputih.

Kedua, *analisis pihak terkait (stakeholder analysis)* untuk menjajagi kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi pihak terkait (*stakeholder*) ini yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi jalannya kegiatan pengabdian masyarakat.

Ketiga, *analisis keunggulan komparatif (comparative advantages analysis)* untuk menjajagi tingkat kelebihan dan keunggulan suatu program tertentu dibandingkan dengan program yang lain sehingga mudah dan laku di pasaran, terutama bagi masyarakat di Dusun Bugeman Banyuputih. Hal ini juga untuk menghindari adanya program yang serupa dan sejenis.

Keempat, *appraisal (penilaian)*. Berdasarkan kegiatan-kegiatan spesifik tersebut di atas langkah selanjutnya adalah melakukan analisis semua hasil yang diperoleh dan melakukan appraisal (kajian mendalam) sehingga diperoleh suatu rumusan yang komprehensif.

Pemilihan Dusun Bugeman Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, atas beberapa pertimbangan; antara lain: Pertama, masyarakat Bugeman termasuk masyarakat pesisir yang termarginalkan. Mereka jauh dari akses. Pemukiman penduduk harus melewati hutan belantara dan lahan tebu.

Kedua, penduduk Dusun Bugeman tergolong miskin dan termasuk daerah “rawan”. Menurut keterangan dari beberapa masyarakat, pada musim panen atau musim tanam banyak orang luar Dusun Bugeman yang mencari kerja di dusun tersebut. Mereka bekerja selama beberapa bulan di Dusun Bugeman. Tak menutup kemungkinan para pekerja tersebut orang pelarian atau maling.

Ketiga, Dusun Bugeman termasuk Desa Binaan Institut Agama Islam Ibrahimy. Dusun Bugeman termasuk lokasi pengabdian masyarakat para dosen dan mahasiswa IAI Ibrahimy. Dengan demikian, antara kami dengan masyarakat Bugeman sudah terjalin komunikasi yang baik.

Menyusun Rencana Aksi Partisipatif

Pada tahapan ini tim merancang kegiatan sesuai dengan problem yang ditemukan dari hasil kajian wilayah bersama-sama dengan warga yang didasarkan atas kebutuhan mereka. Mekanisme ini diterapkan untuk mendorong pembelajaran bersama di antara anggota kelompok yang berkepentingan (*multi-stakeholder*) dalam program ini. Adapun teknik pelaksanaan langkah kedua ini adalah:

Pertemuan kelompok, sebagai mekanisme untuk merenung, membangun kelompok dan perencanaan bersama. Melalui forum ini, masing-masing pihak didorong untuk mengenali problem yang mereka hadapi dan difasilitasi untuk merumuskan sebuah formula solusi secara bersama-sama. Forum kelompok ini dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan penting kemudian mencari solusi untuk memecahkan masalah. *Benchmarking*; juga bagian dari mekanisme perenungan, membangun kelompok dan perencanaan bersama terhadap beberapa tantangan dan kendala yang ingin dipecahkan secara kolektif. Tentu saja dalam langkah sistem pembelajaran bersama, anggota

tim peneliti memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam forum kegiatan.

Melaksanakan Aksi

Bentuk kegiatan aksi yang kami lakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pemberdayaan dalam bidang hukum dan sosial keagamaan. Melaksanakan aksi dalam bidang dalam bidang hukum. Kami melakukan penyadaran kepada masyarakat, agar mereka mendapatkan kembali hak-haknya. Hak-hak tersebut pada ujungnya, akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Adapun programnya, antara lain:

Pertama, pertemuan dengan masyarakat. Tujuan kegiatan ini, untuk mendorong terjadinya perubahan terhadap kondisi masyarakat Bugeman, terutama jamaah shalawatan yang lebih baik. Di samping itu untuk melakukan refleksi dan evaluasi tahapan tahun kemarin, tahun sekarang, dan impian tahun depan.

Kedua, identifikasi kasus dan strategi advokasi. Tujuan program ini yaitu untuk mengidentifikasi kasus dan menyusun strategi advokasi selama lima bulan mendatang. Temuan identifikasi, terdapat sebagian petani mulai hampir jenuh terhadap permasalahan tanah HGU, karena advokasi yang dilakukan bertahun-tahun belum sesuai dengan harapan mereka. Adapun hasil dalam program identifikasi kasus, mereview kembali kronologis kasus HGU Bugemen, melakukan pemetaan ulang beberapa kasus dan pemetaan stakeholder. Strateginya, membangun jaringan dengan akar rumput (grassroots), mempererat komunikasi dan lobi-lobi dengan pejabat, DPRD, akademisi & tokoh masyarakat untuk mengubah kebijakan yang berpihak pada masyarakat, serta membangun opini dan publikasi di media massa.

Ketiga, pengorganisasian petani dan penggalangan sekutu. Tujuan pengorganisasian petani yaitu untuk memperkuat basis dan networking. Sedangkan tujuan penggalangan sekutu untuk melakukan penyamaan persepsi tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat petani penggarap HGU dan memperkuat jaringan agar mendapat dukungan dari beberapa pihak. Hasil pengorganisasian adalah memperkuat basis, terutama dalam jamaah shalawatan dengan melakukan pendidikan politik, pertemuan dilakukan secara intens melalui arisan mingguan, serta penguatan koperasi. Sedangkan hasil penggalangan sekutu adalah menghormati keinginan masyarakat, pentingnya pemberdayaan masyarakat, dan pola kemitraan dengan PTPN yang saling menguntungkan.

Keempat, yaitu kami melakukan tekanan dan lobi. Pola kerja dalam proses advokasi pada tahapan melakukan tekanan dan lobi. Dan kelima, penyelesaian konflik dengan pembaharuan MoU Berbagai upaya terus dilakukan oleh petani Bugeman untuk memperjuangkan haknya dalam memperoleh hak atas tanah/sertifikat. Akan tetapi usaha tersebut nampaknya tidak menunjukkan hasil yang memuaskan dari targetan yang cita-citakan. Petani kembali harus berpikir realistis atas ketidak mampuan dan kelemahannya dari sumber daya ekonomi dan politik dalam mendukung upaya perjuangannya. Akhirnya petani menjalin kerjasama pola “kemitraan” dengan PTPN XII dengan cara menyewa tanah HGU milik PTPN tersebut untuk dikelola petani.

Adapun aksi dalam bidang spiritual keagamaan, kami melakukan pendekatan dengan pendekatan keagamaan. Sebab pendekatan keagamaan ini akan lebih diterima masyarakat Dusun *Bugeman*. Tujuan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan ini agar jamaah shalawatan memiliki pemahaman dan keahlian dalam tajhizul mayyit. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan tajhizul mayyit, yaitu: tatacara merawat dan memandikan jenazah, tatacara menyolati jenazah, dan tatacara mengubur jenazah

Pada kegiatan program pengabdian ini, kami melakukan evaluasi partisipatif yaitu memberi kesempatan bagi tim dan petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman untuk berhenti sejenak dan merefleksikan kegiatan yang telah lalu dengan tujuan untuk membuat keputusan langkah berikutnya. Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman didorong dan didukung oleh tim untuk memikul tanggung jawab dan kontrol tentang: merencanakan apa yang akan dievaluasi (sasaran dan topik); bagaimana evaluasi akan dilakukan (teknik evaluasi); melaksanakan evaluasi; menganalisis informasi dan menyajikan hasil-hasil evaluasi.

Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman secara intuitif dan informal mengevaluasi menurut objektif mereka sendiri dan/atau objektif kelompok, karena: kegiatan Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman sering membutuhkan keterlibatan dan input dari anggota Jamaah Sholawatan. Pada akhirnya merekalah yang memperoleh manfaatnya dan menanggung banyak biaya program. Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman memilih apakah akan melanjutkan (atau tidak) kegiatan setelah kepergian tim. Jadi, tepat bila tim membantu Petani Jamaah Sholawatan Penggarap HGU Dusun Bugeman untuk melakukan evaluasi yang efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, Jamaah

Sholawatan dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan, memodifikasi, mengubah strategi, mengubah objektif, atau menghentikan kegiatan.

Sengketa tanah perkebunan Banongan Situbondo Jawa Timur merupakan sengketa Hak Guna Usaha. Dimana wilayah sengketa tersebut pada jaman Belanda bernama Banongan, maka sengketa ini disebut sebagai sengketa Hak Guna Usaha Banongan. Dalam sengketa ini berhadapan antara petani dan PEMDA Situbondo, serta pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu PTPN XI dan PTPN XII dan PEMDA Situbondo. PD Banongan mewakili kepentingan pemegang Hak Guna Usahanya sebagian kepada TNI AL yang dijadikan sebagai areal latihan tempur. PEMDA melindungi aset daerahnya karena Perusahaan Daerah merupakan aset bagi pendapatan daerahnya, yang pengelolaannya didasarkan pada pemberian HGU. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa HGU yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah Banongan, PTPN XI dan PTPN XII banyak terjadi pelanggaran dan pengingkaran hukum karena itu sudah selayaknya tanah tersebut dikembalikan pada rakyat sesuai dengan amanat UUPA 1960.

Konflik agraria yang terjadi di Banongan hanya bagian dari potret sengketa agraria yang terjadi. Kasus ini bisa dilihat bahwa konflik antara rakyat tani dengan pihak lain yang dalam hal ini bukan bagian dari kelas petani khususnya dalam memperebutkan tanah untuk kegiatan mereka masing-masing terjadi dengan sangat keras. Rakyat membutuhkan tanah-tanah untuk sumber kehidupan dan kelanjutan hidup mereka. Sedang pihak lain pada umumnya memerlukan tanah tersebut untuk kegiatan usaha ekonomi mereka dengan skala besar. Meskipun demikian persengketaan yang terjadi diantara kedua pihak ini tidak bisa dikatakan diakibatkan oleh langkanya sumber agraria (termasuk tanah), tetapi lebih diakibatkan oleh ekspansi modal secara besar-besaran yang kemudian berhadapan dengan kepentingan ekonomi (*subsisten*) maupun kultural rakyat kebanyakan. Dalam kontek pengembangan usaha ekonomi skala besar itu dan kemudian tanah-tanah garapan petani atau tanah-tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pengusaha melalui fasilitas-fasilitas pengalihan hak atas sumber-sumber agraria yang disediakan oleh negara.

Pendekatan (*approaches*) yang digunakan dalam suatu upaya penyelesaian sengketa sangatlah penting, sebab upaya ini yang nantinya yang akan menentukan hasil seperti apa yang akan diperoleh dari suatu pendekatan. Pendekatan dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi ke dalam tiga pendekatan, yaitu; Pendekatan dengan cara penggunaan kekuatan (*power based*). Pendekatan dengan cara “benar-salah” (pendekatan

hukum/*right based*), dan pendekatan dengan cara penggalian kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa (*inters based*). Pendekatan berdasarkan kepentingan adalah pendekatan penyelesaian sengketa dimana kepentingan serta kebutuhan para pihak digali secara bersama untuk kemudian dibangaun kesepakatan (solusi) yang mampu mencerminkan kebutuhan serta kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara seimbang (*mutually shared interest*). Pendekatan penyelesaian sengketa ini ditujukan untuk mencapai suatu solusi/kesepakatan yang sifatnya “menang-menang”. Pendekatan penyelesaian sengketa ini berdasarkan kepentingan yang dapat dilakukan melalui mekanisme perundingan (negosiasi) maupun penengahan (mediasi).

Penguatan kelembagaan organisasi petani (OT) merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan untuk dapat mengimbangi kekutan yang dimiliki oleh pihak lawan dalam suatu proses penyelesaian sengketa. serta perlunya peran lembaga-lembaga pemerintahan (terutama DPR dan BPN) dalam mendukung terjadinya proses *landreform* di desa, seperti yang terjadi pada sengketa tanah perkebunan di Blitar. Pihak-pihak terkait kemudian mendorong ke dalam kerangka srategi *landreform* yang berpijak pada Reforma Tata Kuasa, Tata Guna dan Tata Produksi.

Refleksi tentang pelatihan tajhizul mayyit, antara lain: Pertama, masyarakat berharap agar materi tajhizul mayyit dengan materi yang lain, disampaikan pada kegiatan Jamaah Shalawatan. Kedua, beberapa penonton film tersebut mendapatkan informasi baru dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tajhiz al-mayyit. Sebab kalau melalui media film mereka langsung tahu praktiknya dan bisa dipahami, lain kalau hanya membaca di kitab-kitab. Ketiga, film drama tajhiz al-mayyit ini amat membantu para Jamaah Sholawatan yang mengajar bidang studi fiqh. Film ini sebagai media pembelajaran yang amat membantu mereka dalam mengajar fiqh, terutama bab jenazah. Ketiga, film tersebut mendapat respon yang amat positif dari penonton. Mereka berharap agar Fakultas Dakwah mengembangkan media pembelajaran tersebut sebagai media dakwah yang amat efektif.

Penutup

Fokus pemberdayaan dalam program ini adalah penguatan masyarakat untuk memperoleh kembali kuasa kelola (*power of management system*), kuasa milik (*power of ownership system*), dan kuasa manfaat (*power of unility system*) yang hilang. Ada dua bidang yang kami lakukan,

yang saling berkaitan. Pertama, dalam bidang hukum. Kami melakukan penyadaran kepada masyarakat, agar mereka mendapatkan kembali hak-haknya. Hak-hak tersebut pada ujungnya, akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Kedua, dalam bidang spiritual. Kami melakukan pendekatan dengan pendekatan keagamaan. Sebab pendekatan keagamaan ini akan lebih diterima masyarakat Dusun Bugeman.

Cara penyelesaian sengketa dalam pengabdian masyarakat ini diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, serta masing-masing pihak tidak perlu berambisi untuk mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan (*anti violence*). Di samping itu faktor penghambat lain dalam penerapan yang efektif yang cukup signifikan adalah ketidak seimbangan kekuatan diantara para pihak yang bersengketa, sehingga yang terjadi adalah salah satu pihak yang berada dalam posisi yang lemah dan pihak yang lain dalam posisi yang kuat. Seharusnya pihak petani dan pihak pemegang HGU sama-sama dalam posisi tawar yang seimbang agar kondisi saling tergantung.

Lemahnya posisi tawar kelompok petani sangatlah berpengaruh terhadap kondisi perundingan yang ada. Oleh karena itu mutlak perlu dilakukan penguatan organisasi rakyat (*organization framework assessment*) dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan dalam membuat tawaran-tawaran penyelesaian sengketa (*bargaining power*). Sehingga juga dalam proses penyelesaian sengketa tersebut masing-masing pihak merasa terikat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dengan konsisten.

Secara garis besar, pada tahapan advokasi ini, kami melakukan beberapa tahapan, antara lain: pertemuan dengan masyarakat, identifikasi dan strategi advokasi, pengorganisasian petani dan penggalangan sekutu, tekanan dan lobi; serta penyelesaian konflik. Aksi bersama masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat memperoleh kembali *power of management*, *power of ownership* dan *power of utility system* berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Aksi dalam bidang spiritual keagamaan. Kami akan melakukan pendekatan dengan pendekatan keagamaan. Sebab pendekatan keagamaan ini akan lebih diterima masyarakat Dusun Bugeman. Tujuan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan ini agar jamaah shalawatan memiliki pemahaman dan keahlian dalam *tajhizul mayyit*. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan *tajhizul mayyit*, yaitu: tatacara merawat dan memandikan jenazah; tatacara menyolati jenazah; dan tatacara mengubur jenazah

Adapun beberapa saran dan rekomendasi dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pendampingan ini, antara lain: Pertama, PTPN XII harus tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk memperpanjang MoU kemitraan. Kedua, IAI Ibrahimy harus terus mendampingi masyarakat, terutama Jamaah Sholawatan dalam menghadapi perpanjangan MoU kemitraan Ketiga, bagi petani penggarap HGU terutama Jamaah Sholawatan agar berperan aktif dalam program kemitraan dan selalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, terutama mitra yang melakukan pemberdayaan selama ini. []

Daftar Pustaka

- Al Araf dan Awan Puryadi., *Perebutan Kuasa Tanah*. LAPPERA Pustaka Utama, 2002
- Eric R. Wolf., *Perang Petani*. . Yogyakarta: Insist Press, 2004.
- Mubyarto dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan (Kajian Social Ekonomi)*. Yogyakarta: Aditya Media, 1992
- Mulyo. H, *Studi Tentang Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*. Jakarta: ELSAM, 1996.
- Sugianto., *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) Dalam Sengketa Pertanahan (Suatu Pemikiran Awal Tentang Kelayakan Pengembangan MAPS Pertanahan)*. DIKLAT SEMA Fakultas Hukum Brawijaya Malang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Surabaya, 1996.
- Sukardi, Implementasi Metodologi RRA dan PRA untuk Merancang Perubahan Berencana, dalam Moh Ali Aziz (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta, LkiS, 2005
- Suparto Wijoyo. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Of Environmental Dispute)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1999.
- Tim KPA. *Pembaharuan Agraria Adalah Agenda Yang Inklusif Dengan Reformasi Sosial Secara Menyeluruh*. Bandung: KPA, 1998.
- Wardah Hafidz dan Wiladi Budiharga, Model Pemberdayaan Rakyat Berkeadilan Gender, dalam *Panduan Pendidikan Politik Bagi*

Perempuan, Komite Perempuan Pro Demokrasi, Unair Surabaya,
1999

Wijardjo, B. dan Herlambang Perdana., *Reklamasi dan Kedaulatan Rakyat*.
Jakarta: YLBHI-RACA Institute, 2001.

Wijardjo. B, *RUU Perkebunan: Melestarikan Eksploitasi dan
Ketergantungan*. RACA Institute.

Wiradi. G, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta:
Insist, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000.

Rekonstruksi Sosial Keagamaan Korban Bencana Sinabung Pasca Pengungsian, Desa Gung Pinto, Kec. Naman Teran Kabupaten Karo Sumatera utara

**FATIMAH ZUHRAH, SUKIATI, RUSTAM, PARLUHUTAN SIREGAR,
CHUZAIMAH BATUBARA**

UIN Sumatera Utara, Indonesia
fatimahzuhrah@yahoo.com

Pendahuluan

Gunung Sinabung yang dalam bahasa Karo disebut dengan *Deleng Sinabung* adalah salah satu dari dua gunung berapi di dataran Tinggi Tanah Karo.¹ Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dan meletus pada tahun 2010. Kemudian letusan terjadi lagi tahun 2013. kondisi gunung Sinabung yang masih aktif dan terus menerus mengeluarkan lava pijar dan lidah apinya, masyarakat yang sekalipun sudah dipulangkan/kembali ke desanya yang berada di luar radius 5 km tetap saja mengalami perasaan was-was dan khawatir. Gunung Sinabung yang pada dasarnya bagi mereka memberi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber pengetahuan dan penghidupan masyarakat, namun sekaligus menjadi sumber ancaman bahaya.

Lahan-lahan pertanian yang sempat rusak dan dipenuhi debu vulkanik dan tidak adanya lagi perhatian dari petugas penanggulangan bencana menambah kondisi yang memperhatikan masyarakat desa yang telah kembali pasca pengungsian. Keadaan-keadaan di atas pada satu sisi dapat menimbulkan tekanan mental dan spiritual bagi masyarakat, sehingga mempengaruhi pula keberadaan lembaga-lembaga keagamaan dan kondisi sosial ekonomi, yang basisnya adalah ladang dan pertanian namun dengan kondisi alam yang masih mengancam.

¹ Dataran tinggi Tanah Karo memiliki dua gunung Berapi yang cukup besar yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak

Masyarakat Gung Pinto yang menjadi fokus dampingan program pengabdian ini secara geografis berada di kaki Sinabung dan sewaktu-waktu bisa jadi akan kembali menjadi korban bencana letusannya.

Penguatan aspek mental spiritual dan struktur lembaga keagamaan menjadi isu sentral dalam program yang diusulkan ini. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi fokus kegiatan yang dirumuskan dalam tujuan pendampingan sebagai berikut:

1. Penguatan aspek mental spiritual
2. Pemulihan dan restrukturisasi fungsi kemasyarakatan melalui organisasi-organisasi keagamaan dan adat seperti Remaja mesjid, Karang Taruna, serta perwiridan kaum bapak dan ibu.

Alasan Memilih Dampingan

Alasan pemilihan desa Gung Pinto didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, Gung Pinto adalah kampung Muslim yang dikelilingi komunitas non Muslim yang merupakan mayoritas warga Karo. Status sebagai minoritas semakin menambah kerentanan masyarakat Muslim di Gung Pinto, dan semakin menegaskan perlunya program pendampingan dilakukan di desa ini. *Kedua*, berbeda dengan desa-desa yang terletak disepanjang jalan kabupaten yang tetap menjadi target program karena mudahnya akses, desa Gung Pinto tak banyak diintervensi pasca pemulangan warganya dari penampungan. *Ketiga*, pasca pengungsian, kondisi warga Gung Pinto belum mencapai *standard recovery* (kondisi aman dan stabil dari berbagai aspek seperti sebelum terjadi bencana). Aktifitas sosial keagamaan hingga proposal ini ditulis masih belum berjalan normal.

Kondisi Dampingan Sebelum Pendampingan

LP2M UIN Sumatera Utara berkordinasi dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) untuk update perkembangan situasi di Sinabung dan masyarakat yang terkena dampak bencana letusannya. Sejak awal terjadinya bencana Sinabung, PKPA secara aktif bekerja di beberapa pos di penampungan korban bencana.

Pada 17 Februari 2014, sebanyak 551 jiwa atau 146 KK warga desa Gung Pinto bersama 10.032 pengungsi lainnya dikembalikan ke desa asal. Sejak pemulangan warga ke desa asal, PKPA sebagai kolaborator LP2M UIN Sumatera Utara tetap melakukan pendampingan dengan menempatkan dua orang staf lapangan di desa Gung Pinto. Interaksi yang intens dengan penduduk Gung Pinto mengungkapkan beberapa keprihatinan masyarakat

Muslim. Sebagian diantara permasalahan tersebut terkait isu keberagaman yang menjadi fokus dalam usulan program ini.

Pertama, sebagian masyarakat Muslim tidak bisa menerima kenyataan pahit yang menimpa mereka. Bencana alam yang menimbulkan kerugian materi dengan rusaknya tanaman, rumah, dan properti lain membuat mereka mencari-cari apa atau siapa yang harus dipersalahkan. Sebagian hujatan mengarah ke diri sendiri, sebagian kepada alam, dan sebagian lain kepada takdir. Bagi sebagian warga, kekesalan seolah tak berujung. Ini kemudian berimbas negatif pada bagaimana mereka menyikapi dan berbuat dalam aktifitas sosial keagamaan selanjutnya.

Kedua, kegiatan sosial keagamaan belum berjalan seperti sebelumnya. Shalat berjamaah di Masjid Taqwa, satu-satunya masjid yang ada di desa Gung Pinto, belum dimulai. Kondisi fisik masjid juga masih rusak dan sangat berdebu. Majelis taklim yang sebelumnya secara reguler dilakukan secara terpisah di kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, dan kelompok remaja juga masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berjalan lagi

Ketiga, masyarakat dihantui dengan perasaan was-was akan terulangnya letusan Sinabung. Perasaan khawatir ini menimbulkan ketidaktenangan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Perasaan khawatir ini juga dikatakan mereka dapat memicu emosi dan amarah.

Kondisi Dampingan yang Diharapkan

Kordinasi LP2M UIN Sumatera Utara dengan PKPA yang mendampingi warga Gung Pinto dan beberapa desa lainnya mengidentifikasi beberapa harapan masyarakat terkait dimensi keberagaman. Isu keberagaman ini berada diluar cakupan PKPA sebagai lembaga perlindungan anak.

Pertama, warga Muslim Gung Pinto ingin bisa meningkatkan kualitas kesabaran dan kerelaan mereka menerima realita pahit, termasuk kondisi bencana alam yang mereka tak memiliki kontrol terhadapnya. Ini terkait dengan sikap batin yang seolah tak mengakui adanya rencana-rencana Allah, menolak putusanNya.

Kedua, masyarakat ingin kembali menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan memfungsikannya seperti sebelumnya. Kondisi hidup selama beberapa bulan di penampungan mengacaukan fungsi majlis-majlis ta'lim dan ritual sosial keagamaan. Kohesi sosial yang terjalin melalui ritual keagamaan kolektif tidak dapat dipelihara ketika di penampungan.

Ketiga, menjalani hidup dengan lebih tenang. Mereka ingin bisa bekerja dengan tenang, menjalankan ibadah dengan tenang, dan terbebas dari rasa khawatir akan adanya bencana lain yang akan menimpa kehidupan mereka.

Strategi yang Digunakan

Strategi 1: Peningkatan kesadaran (*awareness raising*). Sensitisasi dimaksudkan untuk menggugah kesadaran masyarakat Muslim di Gung Pinto tentang kerentanan relasi sosial keagamaan yang mereka hadapi pasca bencana. Sikap ketergantungan pada bantuan orang lain, oportunistik, putus asa, dan menyalahkan (*scapegoating*) merupakan beberapa kondisi yang bisa menghalangi upaya masyarakat untuk bisa bangkit lagi setelah terpuruk karena bencana.

Strategi 2: Partisipasi kelompok dampingan dan stakeholder. Keterlibatan dampingan dan stakeholder menjadi salah satu kunci keberhasilan dan sustainabilitas aktifitas program ini. Partisipasi dimaksud bukan hanya pada level pemberitahuan (*information*) dan konsultasi. Dampingan juga dilibatkan pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi: pengambilan keputusan (*decision making*) tentang jenis aktifitas program yang dilakukan, serta pada pelaksanaan aktifitas program (*acting together*) dan pada monitoring/ evaluasi.

Kordinasi dengan stakeholder bertujuan untuk mendapatkan informasi apa yang sudah dilakukan orang lain, pengalaman-pengalaman yang dilakukan orang lain, *best practice* atau *lesson learnt* yang diperoleh dari program sebelumnya. Kordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan dan lokasi, serta menghindari kegiatan yang terbukti tidak dibutuhkan oleh sasaran.

Dengan strategi diatas, LP2M UIN Sumatera Utara melakukan beberapa langkah aktifitas program seperti berikut:

1. Pemetaan ulang permasalahan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Tehnik brainstorming dan FGD diterapkan untuk mengumpulkan data yang menegaskan langkah-langkah program selanjutnya
2. Penguatan spiritual melalui pelatihan Rasa Ruhani dan terapi shalat khusu'. Pada tingkat dasar, paket pelatihan rasa ruhani dan terapi shalat khusu' bisa diselesaikan dalam dua hari untuk tiap kelompok. Pelatihan dan terapi ini berdampak positif pada peningkatan ketenangan hati, sikap ikhlas, dan berfikir positif pada apapun yang menimpa diri.

3. Restrukturisasi fungsi lembaga sosial keagamaan: majlis ta'lim laki-laki, majlis ta'lim perempuan, dan remaja masjid. Restrukturisasi ini dimaksudkan tidak sekedar menghidupkan kembali lembaga-lembaga tersebut serta kegiatan-kegiatannya, tapi juga memnberikan pengayaan dan penguatan pada kualitasnya. LP2M juga memfasilitasi terbentuknya link dan jaringan antara lembaga di Gung Pinto dengan lembaga lain yang relevan.

Stakeholders dan Bentuk Keterlibatannya

1. Warga Muslim Gung Pinto. Sebagai target group dan *beneficiary*, warga Gung Pinto terlibat pada tiap level perjalanan program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga refleksi dan evaluasi.
2. Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma) di Gung Pinto dirangkul untuk mendukung program.
3. LP2M UIN Sumatera Utara. Sebagai pengusul program, LP2M memfasilitasi proses pendampingan yang dikembangkan bersama Gung Pinto.
4. SO Internasional. Personel pada lembaga ini adalah trainer rasa ruhani dan terapi shalat khusu', dan dapat bekerja secara *voluntary* dalam program keagamaan.
5. PKPA. Sebagai NGO yang memiliki banyak pengalaman pendampingan pada masyarakat dalam berbagai situasi bencana dan konflik, PKPA tetap menjadi mitra kordinasi LP2M UIN dalam mengembangkan program ini.

Resources yang Sudah Dimiliki

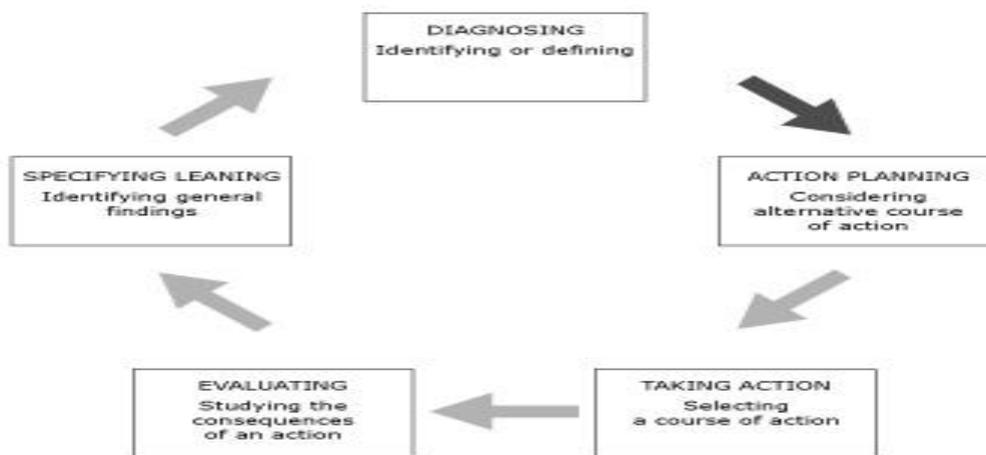
Personel yang dilibatkan LP2M UIN Sumatera Utara dalam program yang diusulkan ini memiliki kapasitas yang dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan pendekatan berbasis masyarakat. Ketua tim, Fatimah Zuhrah, MA, adalah satu-satunya tenaga fungsional peneliti yang ada di UIN Sumatera Utara dan telah mengikuti berbagai peningkatan kapasitas melakukan penelitian lapangan. Dr. Sukiati, MA, adalah alumni McGill University yang berpengalaman dalam banyak sesi pelatihan rasa ruhani dan terapi shalat khusu'. Drs. Parluhutan Siregar, MA adalah peneliti senior yang telah banyak melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.. Rustam, MA adalah alumni Leiden University yang banyak terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pasca tsunami 2004. Chuzaimah Batubara , MA, adalah

alumni McGill University yang berpengalaman dalam banyak sesi pelatihan rasa ruhani dan terapi shalat khusus’

Proses Pendampingan Masyarakat

Sejalan dengan strategi yang direncanakan untuk pelaksanaan program pendampingan penguatan mental spiritual dan lembaga kemasyarakatan masyarakat korban Sinabung di Gung Pinto melalui *Participatory Action Research* (PAR), maka proses pelaksanaan pendampingan menempuh langkah-langkah Siklus PAR yang meliputi *Study and Plan; Action, Collecting Data and Analysis; and Reflection*.

Adapun siklus yang akan ditempuh sebagaimana yang tergambar dalam gambar skema di bawah ini:



Untuk menerapkan langkah-langkah tersebut maka keseluruhan proses akan dilaksanakan dalam tiga langkah, yakni; (1) proses identifikasi Masalah dan Perumusan Pemecahan Masalah (2) menggugah kesadaran (*awareness raising*) (3) membangun komitmen dan kapasitas.

Proses Identifikasi Masalah dan Perumusan Pemecahan Masalah

Kegiatan identifikasi masalah dan perumusan pemecahan masalah dilaksanakan dalam bentuk diskusi brainstorming. Kegiatan yang diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini berjalan cukup baik dalam suasana rileks dan familiar. Hal penting yang perlu dicatat dalam proses identifikasi masalah adalah kecenderungan dalam melihat persoalan sosial-keagamaan yang ada di desa. Sebab dari penggalan informasi yang difasilitasi oleh Tim Peneliti, hampir semua partisipan

mengarahkan pada persoalan yang tidak berkaitan dengan dampak erupsi Gunung Sinabung.

Pada kegiatan penggalian pendapat tentang kegiatan dan langkah-langkah yang penting dilaksanakan dalam rangka rekonstruksi sosio-religius di desa Gung Pinto ini tampaknya terdapat kecenderungan yang kuat untuk menyahuti persoalan-persoalan keagamaan yang lebih menekankan pada penguatan hidup bersama sebagai komunitas muslim minoritas di Kecamatan Namanteran. Karena itu, usul-usul yang disampaikan lebih banyak mengarah pada pemecahan masalah-masalah agama yang bersifat sosial, seperti penyediaan kader yang mampu jadi bilal jenazah, khatib salat Jum'at dan 'Edul Fitri/Adha, guru madrasah dan raudhatul athfal, serta pembangunan masjid yang masih terbengkalai.

Persoalan-persoalan yang diutarakan partisipan tidak secara langsung berkaitan dengan dampak erupsi Gunung Sinabung. Walaupun demikian Tim Peneliti tetap merespon informasi tersebut, sekaligus mencari keterkaitan antara persoalan sosial-keagamaan yang mereka hadapi dengan fakta-fakta lain yang tidak terungkapkan. Fakta-fakta lain dimaksud adalah; (1) kondisi Gunung Sinabung yang langsung mereka saksikan sendiri yang sembarang waktu mengeluarkan abu vulkanik dan lahar yang mengalir ke lereng gunung, suara-suara letupan kecil, bahkan ketinggian gunung yang terus bertambah dari minggu ke minggu. Hal ini, sedikit-banyaknya mempengaruhi mental masyarakat yang hampir setiap saat harus siap eksodus ke tempat yang aman jika letusan Sinabung terjadi cukup dahsyat; dan (2) kualitas panen hasil pertanian masyarakat yang menurun karena diterpa oleh abu vulkanik, sehingga harganya pun turun drastis. Hal ini tentu mempengaruhi kejiwaan masyarakat, karena berkaitan dengan penurunan penghasilan dilihat dari nilai rupiahnya. Dari fakta-fakta nyata dan tersembunyi inilah kemudian Tim Peneliti menyimpulkan, bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Gung Pinto tidak semata-mata masalah lama, melainkan berkaitan juga dengan erupsi Gunung Sinabung.

Tim Peneliti menyadari bahwa usul-usul tersebut, walau tak diungkap secara jelas oleh partisipan brainstorming, berkaitan juga dengan kondisi Sinabung yang belum menunjukkan tanda-tanda berhenti untuk meletus. Kader bilal jenazah dan kader khatib yang mereka usulkan, misalnya, merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat muslim di sana, bukan hanya di desa Gung Pinto, tapi juga di desa-desa sekitarnya yang berpenduduk minoritas muslim. Sebab, bilal jenazah dan khatib ini sering didatangkan dari tempat lain, apalagi di sekitar Gung Pinto yang minoritas

muslim di desanya. Lalu-lintas antar desa bagi bilal jenazah atau khatib tentu tidak mudah dilakukan jika Gunung Sinabung sedang erupsi walau hanya sekedar menebarkan abu vulkanik. Di sinilah titik temu antara tuntutan masyarakat yang minim kader berpendidikan agama di Kecamatan Namanteran dengan kondisi Gunung Sinabung yang terus menghantui kehidupan masyarakat. Atas dasar itulah Tim Peneliti menyepakati usul peserta diskusi untuk melibatkan masyarakat dari desa lain sebagai bagian dari kelompok dampingan.

Menggugah Kesadaran (*Awareness Raising*)

Sesuai dengan identifikasi masalah dan upaya pemecahan masalah yang telah dirumuskan di awal bersama para peserta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di awal merupakan upaya untuk menggugah kesadaran bahwa mereka memerlukan pembinaan dan pendampingan dalam penguatan mental dan spiritual secara individu dan dari aspek penguatan lembaga dari aspek sosialnya.

Rasa was-was terhadap bencana erupsi yang tidak kunjung berhenti, dan khawatir terhadap masa depan mereka yang belum jelas. Dalam hal pelaksanaan ibadah yang sebelumnya lebih semangat dengan banyaknya ceramah di bidang agama oleh ustad-ustad yang datang dari berbagai daerah dan adanya khotib bergilir setiap hari Jumat. Tampaknya kini tidak semeriah dulu lagi Gung Pinto kini juga menunggu harapan kegiatan keberagamaan semakin semangat bila ada khatib yang siap pakai dan bilal mayyit yang lebih banyak jumlahnya. Bilal mayyit yang ada hanya satu orang dan itupun bertugas untuk beberapa desa.

Dalam hal kelembagaan masyarakat memiliki semua lembaga pengajian kaum ibu yang tergabung dalam Serikat Tolong Menolong (STM). Namun, kelembagaan masyarakat ini tidak aktif lagi seperti dulu. Sensitisasi ini menjadi strategi awal yang krusial untuk melangkah ke strategi selanjutnya yaitu membangun komitmen dan kapasitas bertindak lebih profesional.

Kondisi ini memunculkan kesadaran di kalangan masyarakat Gung Pinto bahwa sebenarnya mereka menghadapi masalah dalam banyak hal baik dalam relasi sosial, fungsi-fungsi kelembagaan, kekuatan mental spiritual dan ekonomi.

Membangun Komitmen dan Kapasitas Dampingan

Dalam kegiatan membangun komitmen ini, keterlibatan dampingan menjadi salah satu kunci keberhasilan dan sustainabilitas aktifitas program. Setelah kesadaran masyarakat tergugah tentang banyaknya masalah yang mereka hadapi, maka kesadaran diarahkan pada pentingnya penguatan mental spiritual dan penguatan lembaga maka masyarakat bersama pendamping membuat komitmen untuk melakukan perubahan dalam insitusi masyarakat.

Dampingan juga akan melibatkan masyarakat pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi, pengambilan keputusan (*decision making*) tentang jenis aktifitas program yang akan dilakukan, serta pada pelaksanaan aktifitas program (*acting together*) dan pada monitoring/ evaluasi.

Komitmen dibangun bersama dan disepakati bahwa dalam bidang keagamaan yang menekankan kehidupan bersama disusun berdasarkan hasil dari identifikasi masalah yang telah dirumuskan bersama yaitu; pelatihan bilal mayyit, pelatihan khatib/imam mesjid, pelatihan sholat khushy' dan pelatihan fundraising untuk penguatan lembaga.

Partisipasi pada level pemberitahuan (*information*) dan konsultasi, masyarakat sendiri yang menentukan peserta dan lokasi kegiatan pelatihan. Pendamping menawarkan kepada mereka untuk menentukan narasumber yang mereka ketahui. Sebagaimana dalam kegiatan pelatihan bilal mayyit mereka sendiri yang memilih nara sumber dan pelatih yang mereka kenal sebagai tokoh agama yang mampu di bidang penyelenggaraan Jenazah.

Membangun Kapasitas

Ketika kesadaran mulai terbangun, diperlukan komitmen yang kuat serta kemampuan berbuat yang lebih berkualitas. Pada tataran ini. Ada beberapa hal yang akan dilakukan:

Pelatihan Bilal Mayyit

Kegiatan ini dilakukan di Mesjid Taqwa Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran, dengan narasumber ustaz Drs. H. Adnan Effendi Zainuddin, yang berasal dari Karo, dan merupakan ketua MUI di Kab Karo.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah (bahasa karo), yang oleh narasumber sengaja dilakukan untuk memudahkan narasumber dan audiens untuk memahami materi dan praktek kegiatan ini, dan membuat audiens untuk lebih akrab ke narasumber sehingga lebih berani bertanya dan berdiskusi. Narasumber memulai kegiatan dengan

ceramah mengenai hukum melaksanakan fardhu kifayah (kajian fikihnya), yakni kewajiban memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan.

Sebelum dipraktekkan, ustaz mempertanyakan kepada seluruh peserta, siapa-siapa yang pernah melaksanakan fardhu kifayah, seperti memandikan dan mengkafani.

Kemudian ustaz menjelaskan bahwa fardhu kifayah adalah wajib bagi muslim dan muslimat yang masih hidup diwilayah orang yang meninggal. Fardhu kifayah bagi yang meninggal adalah memandikannya, mengakafani, mensalatkan dan menguburkan. Pada bagian ini banyak pertanyaan dari para peserta, terkait pemahaman dan praktek mereka tentang pelaksanaan fardhu kifayah di kampung mereka.

Para peserta terlihat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mencatat setiap ucapan ustaz, dan menjawab setiap kali ustaz melemparkan pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang muncul dari para peserta, seperti pertanyaan tentang (1) bagaimana cara meletakkan jenazah laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan, (2) Apakah mayat yang memakai gigi palsu ketika meninggal harus dicabut? (3) Bagaimana kalau mayat itu dicium oleh keluarganya yang non muslim, apakah boleh?(4) Bagaimana kalau keluarganya yang non muslim ikut menguburkan.



Gambar: Ustaz Adnan Efendi sedang menjelaskan tatacara mengurus jenazah

Pelatihan imam dan khutbah Jum'at

Kegiatan Pengakderan Khotib Jumat diperuntukkan bagi muslim di kec. Namanteran Kab. Karo, hal ini dikarenakan minimnya kuantitas dan kualitas ustaz dan muballig. Kegiatan ini melibatkan 3 laki- setiap desa, yakni dari desa Gung Pinto, Ndasketi, Kutambelin dan Sukandebi.

Sebelum kegiatan Pengkaderan, tim LP2M UIN SU yang diwakili oleh pembantu di lapangan menseleksi para peserta. Seleksi dilakukan untuk melihat kemampuan para peserta dari segi bacaan quran, salat dan pengetahuan keagamaannya. Dan seleksi juga dilakukan untuk mempersiapkan kader khatib untuk masa mendatang.

Kegiatan dimulai dengan penjelasan mengenai syarat dan rukum khutbah Jumat, kemudian disusul dengan syarat menjadi Imam salat Jumat. Untuk pemantapan teori ustaz memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya terkait pelaksanaan khutbah dan salat Jumat.

Setelah salat Zuhur, kegiatan ini dilanjutkan dengan praktek berkhotbah bagi para peserta, ustaz meminta para peserta untuk maju dan tampil di depan podium, untuk kemudian berkhotbah dengan topik-topik yang beragam dari para peserta.

Sebagian besar peserta sangat tertarik untuk tampil di depan podium, walaupun ada satu dua peserta yang masih malu, dan memilih untuk tidak berkhotbah di depan podium.



Gambar: Salah seorang peserta dari desa Kutambelin sedang praktek khatib dalam sesi pelatihan khatib Jum'at

Pelatihan Salat Khusyu'

Pelatihan ini dilaksanakan di sebuah ruangan di Madrasah Diniyah Awaliyyah (MDA) Gung Pinto. Acara dimulai pukul 10 WIB. Peserta aktif yang terlibat dalam pelatihan penguatan mental spiritual ini sebanyak 20 orang. Seluruhnya perempuan. Dalam pelatihan ini ada tiga bagian yang disampaikan oleh narasumber tentang materi zikir dan sholat yang benar sebagai modal untuk penguatan mental dan spiritual dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Pertama, penguatan spiritual dan sholat yang benar melalui zikir sebagai pintu masuk menuju khusyu'. Kedua, materinya adalah terapi gerakan sholat dan yang ketiga penggabungan antara zikir dan gerakan sholat yang sudah diterapi diperbaiki.

Sebelum masuk kepada materi terapi gerakan sholat peserta diajak melakukan pemanasan (olahraga kecil) untuk melenturkan badan-badan yang masih kaku, sehingga ketika dalam gerakan sholat peserta tidak terkejut atau merasa sakit dalam melakukan terapi gerakan sholat yang berdasarkan hadis-hadis Nabi. Setelah melakukan pemanasan peserta diberikan kesempatan untuk istirahat. Dalam praktek terapi gerakan sholat dimulai dari *takbiratul ihram, bersedekap, rukuk, I'tidal, sujud*, duduk antara dua *sujud*, duduk *tahiyat akhir, salam* dan terakhir bangkit dari duduk *tahiyat awal* untuk melakukan rakaat ketiga. Setelah praktik gerakan per gerakan peserta diminta untuk mengulangi kembali gerakannya masing-masing dari awal hingga akhir yaitu dari takbir hingga salam. Ketika pengulangan ini peserta diperiksa dan diawasi yang belum tepat dalam gerakannya.

Sebagai penutupan peserta diminta untuk mengulang-ngulang latihan tadi dan mempraktekannya dalam sholat, mengamalkan di rumah tentang materi ataupun diskusi yang disampaikan kepada mereka, dan mereka diberikan semangat untuk selalu sabar dan tabah atas bencana Gunung Sinabung yang saat ini terjadi.



Gambar: Fasilitator membimbing peserta dari desa dampingan dan desa tetangga mempraktekkan posisi ruku' pada sesi pelatihan shalat khusus'

Pelatihan Penguatan Lembaga (fundraising)

Dari sesi FGD yang dilakukan pada awal perencanaan penelitian terungkap salah satu masalah yang dihadapi masyarakat terkait pengembangan organisasi sosial kemasyarakatan adalah minimnya dukungan dan sumber daya yang dimiliki untuk merancang dan mengimplementasikan program. Berbagai gagasan sering mengemuka ketika masyarakat bertemu dalam acara formal seremonial atau dalam relasi keseharian di tempat-tempat non formal seperti warung, kedai, dan posko. Namun gagasan-gagasan tersebut menguap begitu saja ketika pertemuan usai. Tidak ada kejelasan siapa yang harus melakukan apa dengan gagasan tersebut, tidak juga ada rencana pasti kemana dan bagaimana proses penggalangan dukungan untuk implementasinya. Secara spesifik, sesi pelatihan ini bertujuan:

1. Membangun pemahaman *Domestic Support and Raising* (DSR).
2. Mengembangkan strategi DSR yang inovatif tentang bagaimana memobilisasi sumber daya (material dan non material) untuk keberlanjutan organisasi.
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan lobby dan jejaring

Pelatihan *fundraising* dihadiri delapan orang yang merupakan *key persons* di komunitas Gung Pinto. Mereka mewakili pemerintahan desa, organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan.

Sharing dan diskusi yang dilakukan mengungkapkan beberapa hal. Pertama, kegagalan mencari dukungan program terkait dengan kepercayaan terhadap lembaga pelaksana. Salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan adalah transparansi, terutama dalam manajemen keuangan lembaga. Transparansi merupakan keharusan meski lembaga bersifat sosial keagamaan dan dalam skala kecil. Publikasi di web, bulletin, atau papan pengumuman yang ada di rumah ibadah misalnya dapat dijadikan alternatif mengungkapkan ke publik tentang penggunaan dana yang diterima. Namun transparansi bukan hanya untuk urusan dana, pelaksanaan program juga wajib transparan dan dipertanggungjawabkan ke publik.

Selain masalah transparansi, berdasarkan pengalaman peserta dan fasilitator, terungkap ada beberapa prasyarat yang juga mempengaruhi kepercayaan ketika menggalang dukungan program, yaitu:

1. Legitimasi
2. Visi/misi yang jelas
3. Struktur dan kapasitas organisasi yang memadai
4. Data dan dokumentasi tentang hasil-hasil yang dicapai
5. Laporan keuangan (audit eksternal)
6. Kepemimpinan yang dihormati
7. Dasar keanggotaan yang kuat



Sesi penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan program lembaga. Fundraising menjadi fokus dalam sharing dan

Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gung Pinto dilaksanakan dengan kegiatan diskusi brainstorming pada akhir program. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi, pendapat dan penilaian dari kelompok dampingan terhadap semua paket kegiatan dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan, hasil yang dicapai, maupun *follow up*-nya. Dari itu diskusi evaluasi diarahkan pada dua sasaran, yaitu; (1) pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kegiatan pembekalan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti LP2M UIN Sumatera Utara, dan (2) informasi tentang hasil kegiatan dan *follow up* yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Kedua jenis sasaran memiliki kaitan erat, karena pada dasarnya pembekalan yang difasilitasi itulah dasar masyarakat untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Bila pembekalan itu cukup feasibel dan mungkin dilakukan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat, tentu saja akan dapat ditindak-lanjuti dengan kegiatan nyata. Hal seperti ini yang ditekankan oleh Tim Peneliti, agar program pemberdayaan dinilai benar-benar berhasil, di mana kader-kader yang diberi pembekalan dapat melanjutkan kegiatan secara berkesinambungan tanpa harus didampingi lagi oleh Tim LP2M UIN Sumatera Utara.

Identifikasi Masalah dan Perumusan Pemecahan Masalah

Kegiatan yang diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini berjalan cukup baik dalam suasana rileks dan familiar. Sebagai kegiatan pertama Tim Peneliti di desa sasaran pengabdian, partisipan cukup antusias baik dalam menerima kehadiran Tim Peneliti maupun dalam memberikan informasi dan pendapat ketika brainstorming berlangsung.

Hal penting yang perlu dicatat dalam proses identifikasi masalah adalah kecenderungan kelompok dampingan dalam melihat persoalan sosial-keagamaan yang ada di desa. Sebab dari penggalian informasi yang difasilitasi oleh Tim Peneliti, hampir semua partisipan mengarahkan persoalan pada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan dampak erupsi Gunung Sinabung. Informasi yang disampaikan lebih pada persoalan komunitas desa yang sejak lama mereka hadapi, sebagai desa muslim di tengah wilayah yang berpenduduk mayoritas non-muslim. Padahal sesungguhnya masyarakat di desa Gung Pinto sedang memendam rasa was-was menyaksikan Gunung Sinabung yang berkesinambungan meluapkan

lahar panas, abu vulkanik, dan jilatan api dari kawahnya. Hal ini dapat dipahami, karena –kalaupun seluruh penduduk desa sempat mengungsi ke Kaban Jahe, namun peristiwa pengungsian itu tidak sampai merusak tatanan sosial dan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Dilihat dari tujuan pokok kegiatan pengabdian ini, tentu saja persoalan-persoalan yang diutarakan tidak secara langsung berkaitan dengan dampak erupsi Gunung Sinabung. Walaupun demikian Tim Peneliti tetap merespon informasi tersebut, sekaligus mencari keterkaitan antara persoalan sosial-keagamaan yang mereka hadapi dengan fakta-fakta lain yang tidak terungkapkan. Fakta-fakta lain dimaksud adalah; (1) kondisi Gunung Sinabung yang langsung mereka saksikan sendiri yang sembarang waktu mengeluarkan abu vulkanik dan lahar yang mengalir ke lereng gunung, suara-suara letupan kecil, bahkan ketinggian gunung yang terus bertambah dari minggu ke minggu. Hal ini, sedikit-banyaknya mempengaruhi mental masyarakat yang hampir setiap saat harus siap eksodus ke tempat yang aman jika letusan Sinabung terjadi cukup dahsyat; dan (2) kualitas panen hasil pertanian masyarakat yang menurun karena diterpa oleh abu vulkanik, sehingga harganya pun turun drastis. Hal ini tentu mempengaruhi kejiwaan masyarakat, karena berkaitan dengan penurunan penghasilan dilihat dari nilai rupiahnya. Dari fakta-fakta real dan tersembunyi inilah kemudian Tim Peneliti menyimpulkan, bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Gung Pinto tidak semata-mata masalah lama, melainkan berkaitan juga dengan erupsi Gunung Sinabung.

Pelatihan Bilal Jenazah

Pelaksanaan pelatihan bilal jenazah yang difasilitasi Tim Peneliti dinilai oleh masyarakat cukup bermanfaat. Dalam evaluasi dan refleksi yang dilaksanakan melalui diskusi brainstroming, wakil dari kelompok dampingan mengungkapkan bahwa penjelasan dan demonstrasi tentang proses penanganan jenazah cukup mudah dipahami, karena Ustadz yang bertindak sebagai tutornya menggunakan bahasa Karo. Dalam kegiatan pelatihan itu tidak ada hambatan komunikasi antara tutor dan peserta pelatihan karena sama-sama menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat. Walau dianggap cukup komunikatif, namun Tim Peneliti yang mengalami kesulitan, karena sama sekali tidak memahami bahasa Karo, yang saat itu digunakan secara dominan.

Selain itu, tentu saja masih terdapat kekurangan dalam kegiatan pelatihan bilal jenazah tersebut. Hal ini disebabkan terbatasnya waktu yang

tersedia (hanya satu hari). Dalam diskusi evaluasi diperoleh keterangan bahwa karena waktu terbatas, tidak banyak kesempatan bagi peserta untuk mempraktekkan apa-apa yang dijelaskan dan didemonstrasikan oleh tutor. Peserta pelatihan justru lebih banyak mendengarkan penjelasan dan menyaksikan demonstrasi daripada berpraktek sendiri di depan tutor. Karena itu tidak semua prosesi penanganan jenazah sudah dapat dilaksanakan sendiri oleh kelompok pendampingan. Salah satu prosesi penanganan jenazah yang masih kurang dipahami oleh peserta pelatihan adalah cara mengukur dan menggunting kain kafan.

Selanjutnya dalam diskusi evaluasi ini Tim Peneliti mengusulkan agar kader bilal jenazah tidak menyerah, karena masih ada cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tim Peneliti mengharapkan kiranya Bilal Jenazah yang sudah berpengalaman dapat melanjutkan pelatihan khusus kepada kader untuk memantapkan keahlian mereka, dan atau paling tidak para Bilal mengikutsertakan mereka pada setiap prosesi penanganan fardhu kifayah bagi muslim yang baru meninggal dunia.

Hal yang menggembirakan dari informasi yang disampaikan dalam diskusi evaluasi tersebut adalah ternyata sudah ada seorang kader (Ibu Chadijah) dari desa Endeskati yang sudah menindaklanjuti kegiatan ini dengan melatih beberapa remaja di desanya tentang cara-cara melaksanakan farhu kifayah bagi orang yang meninggal dunia. Menurut kader tersebut, kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan bertahap mulai dari saat seseorang meninggal, cara memandikan, cara mengkafani sampai dengan pelaksanaan salat jenazah.

Pelatihan Khatib Jum'at

Pelaksanaan pelatihan khatib merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Tim Peneliti. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh calon-calon khatib dari desa Gung Pinto dan desa-desa sekitarnya.

Masyarakat Islam di Kecamatan Namanteran termasuk yang minim pengetahuan agama Islam dan sangat sedikit sumberdaya yang memiliki basic pendidikan Islam yang memadai. Para pemuka agama di sana, umumnya berasal dari luar daerah Karo, sementara penduduk lokal hanya beberapa yang berlatar pendidikan Islam. Berdasarkan kondisi ini, potensi peserta pelatihan juga bukanlah orang-orang yang sudah memiliki dasar pengetahuan agama yang memadai. Karena itu, target pelatihan ini hanya

sebatas mempersiapkan kader yang dapat berdiri di atas mimbar dan mampu membaca rukun-rukun khutbah dalam bahasa Arab serta membaca teks bahasa Indonesia yang sudah tersedia.

Dari itu, proses pelatihan difokuskan untuk menjelaskan rukun khutbah dan hal-hal yang membatalkan khutbah, kemudian dilakukan praktek membaca teks khutbah yang sudah tersedia. Para peserta pelatihan tampaknya cukup antusias mengikuti kegiatan ini, walau di antara mereka masih ada yang kurang lancar membaca rukun-rukun khutbah menggunakan teks aksara Arab. Bahkan ada peserta yang belum berani tampil berpraktek dalam pelatihan tersebut. Walau demikian, Tutor yang diundang untuk membimbing peserta pelatihan menyatakan bahwa secara umum para peserta pelatihan sudah dapat dijadikan sebagai khatib cadangan, kalau sewaktu-waktu khatib senior berhalangan.

Menurut informasi dari peserta yang berasal dari desa Endeskati, kader khatib yang ketika pelatihan tidak berani tampil sudah dapat berperan sebagai khatib Jum'at di masjid yang ada di desanya. Dengan demikian, masyarakat Islam di sana sudah memiliki khatib cadangan, jika khatib senior (yang satu-satunya ada di desa itu) atau khatib dari luar desa berhalangan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan telah ada hasilnya bagi masyarakat.

Bertolak dari kenyataan bahwa para khatib dan calon khatib yang dilatih masih membaca teks dalam berkhutbah, dan sama sekali belum mampu menyusun materi khutbah dengan kemampuan sendiri, Tim Peneliti mengambil inisiatif untuk membekali para khatib dengan memberikan buku "Khutbah Jum'at dan Hari Raya" untuk setiap masjid. Inisiatif tersebut disambut dengan suka-cita oleh peserta diskusi karena buku khutbah serupa dinilai penting untuk menambah buku khutbah yang sudah ada, yang sudah dibaca berulang kali di depan jamaah salat Jum'at.

Penguatan Lembaga Sosial-Keagamaan

Ketika diskusi identifikasi masalah sosial-keagamaan dilaksanakan, Tim Peneliti mendapat penjelasan bahwa institusi sosial-keagamaan masyarakat Islam di desa Gung Pinto dan desa-desa sekitar tergolong sangat tradisional. Untuk menjawab persoalan ini Tim Peneliti memfasilitasi masyarakat dampingan dengan satu kegiatan pelatihan untuk penguatan lembaga yang sudah ada. Pelatihan ini dibimbing seorang tutor dari PKPA dan didampingi oleh anggota Tim Peneliti dari LP2M.

Pelatihan yang diikuti oleh para pengurus organisasi dari Gung Pinto dan desa-desa sekitarnya ini berlangsung satu hari. Materi pelatihan berfokus pada dua hal; (a) penyusunan rencana atau program pengembangan organisasi, dan (b) pengembangan jaringan organisasi ke lembaga-lembaga donor dan organisasi lain di luar desa.

Berdasarkan diskusi evaluasi yang dilaksanakan, peserta diskusi mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut masih terlalu banyak aspek teoritisnya. Dengan kata lain, tidak ada acuan praktis yang dapat diaplikasikan dan tidak jelas apa yang seharusnya segera dilaksanakan. Salah satu peserta pelatihan mengungkapkan dalam diskusi evaluasi, bahwa pelatihan tersebut telah membuka wawasan peserta dalam banyak hal tentang pengembangan organisasi, tetapi kami belum mampu melaksanakannya. Ketika ditanyakan oleh Tim Peneliti; “Apa rencana yang sudah disusun atau kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk penguatan lembaga sosial-keagamaan? Peserta diskusi, yang juga ikut dalam pelatihan, menjawab belum ada, kami belum membuat rencana. Padahal di depan mereka masih ada bangunan masjid yang terbengkalai yang memerlukan perhatian khusus untuk menyelesaikannya.

Mencermati informasi ini, Tim Peneliti kembali mengajak peserta diskusi evaluasi untuk bersama-sama membahas bagaimana mengatur strategi, khususnya dalam pembangunan masjid di desa Gung Pinto. Saran praktis yang diusulkan oleh Tim Peneliti adalah agar panitia pembangunan membuka rekening dan akan disebar permohonan bantuan melalui media sosial. Lalu Tim juga memberikan arahan apa saja yang perlu disampaikan dalam media sosial tersebut. Tim Peneliti siap menyebarkan informasi pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan ada yang berkenan membantu.

Pelatihan Salat Khusyu’

Kegiatan pelatihan salat khusyu’ yang difasilitasi Tim Peneliti ternyata hanya diikuti kaum ibu dari Desa Gug Pinto dan beberapa dari desa lain. Menurut masyarakat muslim di Desa Gung Pinto, para ibu inilah yang layak mengikuti kegiatan pelatihan salat khusyu’, dengan alasan yang kurang jelas, sementara pihak bapak-bapak tidak. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Tim Peneliti, tetapi jawaban yang diperoleh tetap tidak memuaskan. Lalu akhirnya, Tim Peneliti menyadari sendiri karena maksud kegiatan pelatihan salat khusyu’ ini adalah untuk memperkuat batin dan menenangkan jiwa penduduk setempat dalam menghadapi kondisi Gunung Sinabung yang terus mengancam, sementara menurut pihak kaum bapak bahwa yang mengalami

trauma kejiwaan atas keadaan itu adalah kaum ibu saja atau perempuan pada umumnya. Alasan lain yang sedikit terungkap berkaitan dengan ketaatan menjalankan ibadah salat, di mana menurut mereka kaum bapak belum saatnya meningkatkan pelaksanaan salatnya ke arah kekhusukan, sementara hal-hal formal dari kegiatan salat itu belum dikuasai, seperti bacaan yang belum pas dan sebagainya.

Informasi dari ibu-ibu peserta diskusi evaluasi, yang juga peserta pelatihan salat khusyu', pelaksanaan pelatihan tersebut cukup mengena dengan kebutuhan mereka, bukan saja dalam menenangkan batin menghadapi ancaman Gunung Sinabung, tetapi dalam rangka meningkatkan kualitas salat, zikir dan do'a, bahkan juga kesehatan jasmani. Selama ini, pelaksanaan salat hanya sekedar pelunasan kewajiban sebagai muslim, tidak diketahui bagaimana mengambil manfaat dari salat itu untuk kebaikan jasmani dan rohani. Dengan bimbingan salat khusyu' yang diberikan oleh Tim dari Medan, kami kemudian mulai mengetahui bagaimana pentingnya mengatur bacaan dan gerakan salat, dan lebih dari itu kami juga menjadi sadar betapa pentingnya manfaat salat bagi jasmani dan rohani. Menurut kami, jika masih memungkinkan, kegiatan pelatihan salat khusyu' ini perlu dilanjutkan kepada ibu-ibu yang lain dan juga bagi pihak bapak-bapaknya.

Ada beberapa orang dari antara peserta diskusi yang mengungkapkan, bahwa mereka terus mempraktekkan cara salat yang berorientasi khusyu' tersebut pasca pelatihan. Walau tata-cara pelaksanaan salat khusyu' itu belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun mereka mengaku sudah dapat mengambil sebagian manfaatnya, terutama ketika berzikir dan berdoa, dan bahkan untuk kesehatan jasmani. Tentu saja masih perlu latihan dan latihan agar anggota tubuh, hati dan pikiran benar-benar dapat dikonsentrasikan ketika melaksanakan salat.

Ketika Tim Peneliti menanyakan tentang kelanjutan dan kesinambungan latihan salat khusyu' ini. Para peserta masih berharap kelanjutannya yang difasilitasi oleh Tim dari Medan, walaupun paket program ini sudah selesai. Tetapi ketika Tim menegaskan bahwa kegiatan pelatihan salat khusyu' seperti ini dapat dilakukan oleh kader yang sudah mengikuti pelatihan, lalu seorang ibu menyatakan bahwa ia memang sudah coba membimbing beberapa orang dari lingkungan keluarga dan tetangga untuk berlatih melaksanakan salat khusyu'. Dari informasi ini, walau masih dalam tarap permulaan, Tim Peneliti berkesimpulan bahwa pelatihan salat khusyu' yang sudah dilaksanakan akan terus dikembangkan oleh beberapa kader kepada muslim lainnya walau untuk kelompok terbatas. Jika kegiatan

serupa dilaksanakan secara estafet, maka tentu akan lebih banyak masyarakat Muslim di desa Gung Pinto dan desa-desa sekitarnya yang dilatih melaksanakan salat khusyu'.

Simpulan

Umat Islam di Desa Gung Pinto dan desa-desa lain di sekitarnya adalah sebagian dari komunitas muslim minoritas di Kabupaten Karo. Gung Pinto, saebagai satu-satunya desa berpenduduk mayoritas muslim (90%) menjadi sentral kegiatan keagamaan di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Karena itu, Desa Gung Pinto menjadi barometer perkembangan Islam di wilayah ini. Persoalan sosial-keagamaan yang ditemukan Tim Peneliti di Desa Gung Pinto, ternyata tidak semata-mata karena adanya erupsi Gunung Sinabung, tetapi juga menyangkut sejumlah persoalan lama yang belum terselesaikan. Dari diskusi identifikasi masalah yang dilaksanakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, terungkap bahwa aspek keagamaan bukanlah yang utama di desa ini. Mereka menjalankan agama apa adanya tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Di sini tidak ada ustaz yang setiap saat dapat membimbing masyarakat atau menjadi tempat bertanya dalam hal keagamaan, dan tidak ada pula putra-putri mereka yang sekolah di madrasah atau pesantren sampai tingkat aliyah sekalipun.

Orang-orang yang dipercaya menjadi pengelola kegiatan keagamaan jumlahnya terbatas, seperti; satu orang yang mampu jadi khatib, dua orang bilal jenazah (terdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan), dua orang guru madrasah diniyyah atau guru mengaji. Organisasi keagamaan ditata secara tradisional, tanpa dukungan pengetahuan manajemen. Fasilitas yang tersedia hanya sebuah masjid yang berdampingan dengan sebuah bangunan madrasah yang sudah tua, tanpa meja dan kursi. Di desa ini terdapat kelompok perwiridan kaum ibu dan ada juga kaum bapak. Kegiatannya hanya sekali dalam seminggu, yaitu pada Jum'at sore untuk kaum ibu dan Kamis malam untuk kaum bapak. Dalam perwiridan itu mereka membaca surah Yasin, takhtim, tahlil dan doa, tanpa disertai dengan majelis taklim. Kegiatan itu pun tidak berjalan kontiniu, apalagi kelompok kaum bapaknya, yang lebih banyak liburnya dari aktivitasnya. Sayangnya, masyarakat muslim setempat selama ini tidak merasakan adanya sesuatu masalah

Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok dampingan mengusulkan agar kegiatan yang dilaksanakan cukup berfokus pada masalah-masalah agama yang menyangkut kehidupan sosial mereka, seperti pengkaderan Bilal Jenazah, pengkaderan khatib Jum'at, dan penguatan organisasi keagamaan.

Hal terakhir ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan masjid, pengganti yang lama, yang sudah mereka mulai pembangunannya. Dalam kegiatan ini perlu juga melibatkan masyarakat muslim dari desa sekitar, karena mereka juga lebih membutuhkan pengkaderan dan penguatan organisasi keagamaan ini. Kemudian Tim Pendamping mengusulkan agar dilaksanakan juga kegiatan yang dapat membantu agar suasana kejiwaan masyarakat dapat lebih tenang dan sabar dalam menghadapi situasi Gunung Sinabung yang terus mengancam.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan rencana. Penduduk Gung Pinto dan wakil dari desa-desa sekitar juga cukup antusias mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang memadai, Tim Pendamping menghadirkan para pembimbing yang berpengalaman di bidangnya serta memiliki banyak pengalaman bersama masyarakat Karo. Strategi pendampingan lebih berfokus pada praktek dari hal-hal yang bersifat teoritis agar sesuai dengan keadaan masyarakat.

Selama proses kegiatan berlangsung sudah mulai tampak perkembangan baru. Kader Bilal Jenazah yang diikuti 20 orang peserta telah siap untuk mendampingi Bilal yang sudah, demikian juga kader khatib Jum'at, sudah ada yang berani tampil di atas mimbar untuk menggantikan khatib seniornya. Sementara itu, penguatan organisasi keagamaan masih dalam proses pembenahan, terutama yang berkaitan dengan penguatan panitia pembangunan masjid, di mana rencana-rencana praktis sedang dibanahi. Selain itu, kegiatan pelatihan salat khusyu', menurut peserta yang mengikutinya telah memberi warna baru dalam pelaksanaan salat dan zikir mereka. Bahkan ada di antara peserta yang sudah mulai mengajarkannya kepada keluarga dan tetangga.

Harus diakui bahwa paket kegiatan yang dilaksanakan LP2M UIN Sumatera Utara di Desa Gung Pinto belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Hal ini terkait dengan singkatnya masa yang tersedia untuk melaksanakan pendampingan. Walau demikian, karena pola pendampingan lebih fokus pada penyiapan kader, ke depan diharapkan akan ada perubahan dan perbaikan yang cukup menggembirakan. Untuk memastikan hal tersebut dapat terwujud, LP2M akan terus membangun komunikasi dan memberi dorongan kepada para kader agar tetap bekerja menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan di Desa Gung Pinto serta hasil-hasil yang sudah diperoleh, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan;

1. Kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah minoritas Muslim, seperti di Desa Gung Pinto, perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Sebab banyak hal yang menyangkut kehidupan sosial-keagamaan umat Islam di sana yang masih perlu pembenahan dan peningkatan, apalagi dalam situasi menghadapi bencana atau ancaman alam yang tidak bersahabat. Karena itu, Tim LP2M mengusulkan kepada Kementerian Agama agar memberi perhatian khusus kepada komunitas-komunitas Muslim minoritas di pedalaman.
2. Lembaga-lembaga dakwah dan lembaga donor diharapkan dapat mengambil bagian dalam proyek rekonstruksi sosial-keagamaan di desa-desa yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo. Kehadiran dan partisipasi dari lembaga-lembaga ini diperlukan, karena saat ini komunitas-komunitas muslim di sana sedangkan menghadapi dua persoalan besar, yaitu masih kurang terbangunnya iklim keagamaan yang baik dan kerusakan berbagai institusi sosial-keagamaan akibat letusan Gunung Sinabung.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Perguruan Tinggi perlu juga diarahkan untuk membantu masyarakat di daerah muslim minoritas di Tanah Karo. Bentuk-bentuk pengabdian dapat dilakukan dalam berbagai pola dan pendekatan, termasuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Lapangan mahasiswa. Atas dasar itu, diharapkan kepada pimpinan perguruan tinggi yang ada di Medan dan sekitarnya agar kiranya dapat mengarahkan kegiatan pengabdian di Kabupaten Karo.

Peningkatan Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam Al Ma'aarij Desa Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan

SITI NURHAYATI

STAIN Kediri, Indonesia
siti.nurhayatikdr@gmail.com

Abstrak: Pendidikan antikorupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya menangkap para koruptor, maka pendidikan antikorupsi memiliki peran penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya, pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan muatan pendidikan antikorupsi pada anak-anak usia dini di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Diharapkan melalui kegiatan ini akan tertanam nilai dan sikap antikorupsi di kalangan warga madrasah, sehingga ke depan akan muncul generasi-generasi bangsa yang berkepribadian luhur dan bermartabat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *story telling*. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman pada anak-anak usia dini tentang nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi. Intisari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan Sembilan Nilai Antikorupsi. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, diharapkan pemberdayaan sejenis dapat juga dilakukan untuk orang tua/wali di lingkungan LPI Al Ma'aarij sehingga terjadi *balance* dalam pendidikan anak antara di madrasah dan keluarga.

Kata Kunci: Pendidikan, Antikorupsi, Madrasah, *story telling*

Pendahuluan

Kesadaran dunia internasional untuk memerangi korupsi bersama-sama seperti yang dapat dilihat dari sejumlah konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ataupun instrument multilateral lainnya rasanya tidak

berlebihan. Hal ini mengingat korupsi semakin meyakinkan ditempatkan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, menembus batas negara dan berakibat buruk terhadap kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan merusak perekonomian negara.

Indonesia adalah bagian dari perang terhadap korupsi tersebut. Secara normatif, posisi Indonesia yang telah menandatangani *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2006 adalah catatan penting untuk menempatkan Indonesia dalam “peta dunia” pemberantasan korupsi. Sekaligus, hal ini juga penting untuk melihat, bagaimana kondisi korupsi di Indonesia dalam peta global tersebut.¹

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, begitu konstitusi Indonesia menyebutkannya dalam salah satu Pasal 3 UUD 1945. Semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, baik kaya, miskin, lelaki, perempuan, orang biasa, bahkan orang yang mempunyai kedudukan dan pangkat sekalipun. Jadi, ketika pejabat atau penegak hukum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka pejabat atau penegak hukum tersebut harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.² Belakangan ini, begitu banyak sorotan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak aparat hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, misalnya terlibat korupsi atau suap dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

¹ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, n.d., 437–38.

² Oksidelfa Yanto M.H S. H., *Mafia Hukum* (RAIH ASA SUKSES, n.d.), 3.

Berdasarkan data dari *Corruption Perception Index* (CPI), pada tahun 2013 Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara terkorup.³ Hampir seluruh instansi pemerintahan pernah terjerat kasus korupsi. Bahkan instansi penegak hukum pun telah terjerat kasus korupsi seperti kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar), Mahkamah Agung (Hakim Kartini dkk), Kepolisian (Djoko Susilo), Kejaksaan (Sistoyo), dimana instansi tersebut adalah instansi yang dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan keadilan yang sekarang mulai diragukan kinerjanya.

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan negara, khususnya di bidang keuangan negara, karena salah satu atau sekelompok orang saja, negara yang dihuni berjuta-juta penduduk mengalami kerugian yang sangat besar. Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan social, politik dan ekonomi masyarakat, juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa.⁴ Lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya yang terus menerus terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa korupsi tidak bisa dianggap remeh lagi, upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Menurut Romli Atma Sasmita, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan yang lain seperti pencurian, penipuan dan sebagainya. Korupsi telah menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia dan harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak.⁵ Banyak cara yang telah dilakukan dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Seperti dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani korupsi, adanya pengadilan tindak pidana korupsi dan adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang korupsi. Akan tetapi hal tersebut belum mampu menurunkan angka korupsi di Indonesia secara signifikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga KPK dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas KPK adalah untuk

³ "Corruption Perception Index 2013 - Publikasi - Transparency International Indonesia," June 24, 2016, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>.

⁴ Ermansjah DJAJA, "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," 2010.

⁵ H. Romli Atmasasmita, "Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi," 2013.

melakukan: koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta pencegahan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.⁶ Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang dan semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga system pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tetap melekat. Selain itu, dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili perkara korupsi yang diajukan oleh KPK. kelebihan UU KPK adalah ketentuan mengenai hakim *ad hoc* dan batas waktu proses persidangan di setiap tingkatan pengadilan (total 240 hari atau 8 bulan).

Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika madrasah mengambil peran –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan lembaga pencetak pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tidak melewati jalan yang mulus. Di tengah kepedulian dan komitmen kita untuk pemberantasan korupsi, sejumlah pihak yang sangat dirugikan dengan kerja pemberantasan korupsi melawan balik. Berbagai isu dan cara dilakukan, mulai dari yang seolah-olah konstitusional, rekayasa hukum, serangan langsung, dan pembiaran secara politik atas nama tidak ingin intervensi dalam proses hukum. Sebagian besar tertuju pada KPK, dan sebagian lainnya pada masyarakat sipil.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat beragam bentuk pelemahan dan serangan balik KPK tersebut, di antaranya:⁷

1. Wacana pembubaran KPK;
2. Revisi Undang-undang KPK;
3. *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi;

⁶ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 403.

⁷ “Panduan bantuan hukum di Indonesia 2014: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum,” 2014, 44.

4. Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK;
5. Pengepungan kantor KPK;
6. Penyerobotan kasus yang ditangani KPK;
7. Memblokade anggaran pembangunan gedung KPK;
8. Intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dengan KPK;

Sedangkan serangan terhadap masyarakat sipil sering kali ditemukan dalam bentuk kriminalisasi terhadap pelapor dan masyarakat yang kritis terhadap penyelenggaraan negara menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik, serangan langsung berupa pembakaran kantor lembaga antikorupsi di daerah, maupun proses legislasi UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai mengekang kebebasan ekspresi dan ruang partisipasi dalam pemberantasan korupsi.⁸

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD pun meyakini adanya pelemahan sistematis terhadap KPK. Dikatakan, "*Pelemahan KPK itu nyata. Buktinya mereka pinjam tangan MK untuk menderdikan KPK. Sampai hari ini, sudah 14 kali MK diminta untuk membatalkan (UU KPK). Tapi, selama 14 hari itu juga MK menyatakan UU KPK sah, konstitusional, dan harus didukung*".⁹ Bahkan, upaya revisi UU KPK dinilai sebagai salah satu bentuk lain pelemahan terhadap KPK yang diakibatkan gagal upaya *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum saja, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Semua pihak harus ikut terlibat dalam proses pemberantasan korupsi ini. Termasuk di lingkungan lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana, dan terarah. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang memasukkan nilai-nilai Islam baik dalam kurikulum pembelajarannya maupun dalam etika sehari-hari. Untuk itu madrasah harus bisa menjadi model percontohan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, khususnya untuk tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pendidikan.

Keterlibatan lembaga pendidikan – termasuk madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam - dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif lembaga pendidikan Islam diharapkan lebih difokuskan

⁸ *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 443.

⁹ *Ibid.*, 447.

pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif tentunya seluruh warga di lingkungan lembaga pendidikan Islam tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, mereka harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi antikorupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan antikorupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan antikorupsi juga penting guna mencegah aksi korupsi.

Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang antikorupsi. Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Desa pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan ini dia antaranya menaungi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ma'aarij dan Raudhatul Athfal (RA) An Najaah. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tentu keterlibatan lembaga ini dalam mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dinantikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan warga LPI dan mendorong untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kegiatan pendampingan ini berfokus pada peningkatan pendidikan antikorupsi bagi warga di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Al Ma'aarij . Sebagaimana diketahui bahwa korupsi sudah menggurita di berbagai kalangan. Minimal melalui kegiatan pendampingan ini akan mampu meningkatkan wawasan tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak dini maka nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan antikorupsi itu akan lebih mudah ditanamkan dan selanjutnya tercipta budaya hukum antikorupsi.

Berangkat dari hal di atas maka fokus dampungan kegiatan ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga madrasah di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij?
2. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij?

Alasan Memilih Dampungan

Adapun subjek dampungan kegiatan pengabdian masyarakat di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Magetan. Lokasi LPI Al Ma'aarij ini di Dusun Do'an Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Lembaga ini menaungi berbagai bidang pendidikan yang meliputi:

1. Raudhatul Athfal An Najaah
2. Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'aarij
3. Rumah Tahfidz Al Kahfi
4. Bimbingan Belajar *Smart Kids*

Sebagaimana disebutkan bahwa lokasi/subjek dampungan kegiatan pengabdian masyarakat ini di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Magetan. Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan memilih subjek dampungan mengingat LPI Al Ma'aarij bergerak di bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Di samping itu, selama ini pendidikan antikorupsi belum dimasukkan dalam kurikulum madrasah.

Kondisi Dampungan yang Diharapkan

Tujuan yang hendak dicapai dalam program peningkatan pendidikan antikorupsi di LPI Al Ma'aarij adalah untuk:

1. Menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga madrasah di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.
2. Menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari program peningkatan pendidikan antikorupsi di LPI Al Ma'aarij adalah:

1. Tertanamnya nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga madrasah di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.

2. Tumbuhnya kebiasaan perilaku antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij.

Kerangka Teoritik

Korupsi dan Antikorupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul *public judgement* bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”¹⁰ atau “*corruptus*”¹¹. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda) yang turun ke bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan busuk, palsu, dan suap¹². Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam perkembangan semantisnya, kata korupsi diartikan sesuai persepektif yang dipergunakannya. Dalam dunia

¹⁰ *Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia* (Binacipta, 1983).

¹¹ A. Webster Merriam, “Webster’s Students Dictionary,” 1962.

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, n.d., 206.

politik, korupsi sering diartikan sebagai “*abuse of public power*” untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sisi moralitas atau humanitas, korupsi dikonotasikan sebagai *mode of conduct* yang menyimpang dari standar nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kemasyarakatan. dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau kelompok tertentu. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah:¹³

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan tertentu;
3. Berlindung di balik pembenaran hukum;
4. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum;
5. Mengkhianati kepercayaan.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang,

¹³ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antikorupsi (Galangpress Group, 2007).

¹⁴Ibid.

tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁵ Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.¹⁶

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara lebih luas, Kementerian Pendidikan sebagaimana dikutip oleh Wibowo mendefinisikan korupsi sebagai istilah yang mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi, keluarga atau kelompok yang tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, melainkan juga korupsi politik dan administratif.¹⁷ Kartono mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang memanfaatkan wewenang, jabatan, kedudukan dan sumber pemerintah atau negara untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi materi/moneter sering diistilahkan dengan pengambilan barang atau harta milik negara secara tidak jujur dan di luar ketentuan yang diperbolehkan. Dengan demikian, istilah korupsi tidak ada bedanya dengan pencurian dan perampokan yang kerap

¹⁵ Subekti (R.) and R. Tjitrosoedibio, *Kamus hukum* (Pradnja Paramita, 1969).

¹⁶ Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 15.

¹⁷ Agus Wibowo, *Pendidikan antikorupsi di sekolah: strategi internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah* (Pustaka Pelajar, 2013), 18.

¹⁸ Kartini KARTONO, "Patologi sosial/ Kartini Kartono," 2005, 90.

dilakukan oleh para penjahat atau residivis. Korupsi, penipuan, dan pencurian memiliki kesamaan dalam hal pengambilan secara tidak sah, merugikan orang lain, amoral, bertentangan dengan norma agama dan hukum. Hanya saja, korupsi merupakan istilah yang lebih halus dan biasanya dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, pegawai pemerintah, dan orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan. Sedangkan penipuan dan pencurian kerap kali dilakukan oleh para residivis, penjahat, dan orang-orang yang tidak punya kedudukan dan jabatan di institusi atau lembaga pemerintahan.

Semua definisi di atas adalah definisi korupsi yang dapat dengan mudah dijamah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nurul Yakin berpendapat bahwa korupsi lebih luas dari itu. Korupsi adalah semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik secara material maupun non material, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, baik bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak.¹⁹

Antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi yang pada akhirnya dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.²⁰ Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam

¹⁹ Nurul Yaqin, “PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MADRASAH,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 267–286.

²⁰ “Pedomanantikorupsi Madrasah 26JUNI2013 - hdje1391741650.pdf,” June 25, 2016, 6, <https://babel.kemenag.go.id/file/file/IMA/hdje1391741650.pdf>.

tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkau korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa

dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan.²¹

Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.²²

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Jenis-Jenis dan Dampak Negatif Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang yang secara gamblang dijelaskan dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut, tindak pidana korupsi meliputi 30 bentuk/jenis tindak pidana yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:

1. Kerugian negara (2 bentuk dalam 2 pasal);
2. Suap menyuap (12 bentuk dalam 6 pasal);
3. Penggelapan dalam jabatan (5 bentuk dalam 3 pasal);
4. Perbuatan pemerasan (3 bentuk dalam 1 pasal);
5. Perbuatan curang (6 bentuk dalam 2 pasal);
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (1 bentuk dalam 1 pasal); dan

²¹ Yaqin, "PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH," 269.

²² Ibid.

7. Gratifikasi (1 bentuk dalam 1 pasal).²³

Ketujuh klasifikasi tersebut merupakan tindak pidana yang terkait langsung dengan korupsi. Di samping itu, juga ada beberapa tindak pidana lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:²⁴

1. Merintangi pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dalam bidang pendidikan, sebagaimana dikutip Munadi dan Barnawi, Meier menyatakan bahwa bentuk korupsi yang paling umum terjadi di sekolah dapat berupa orang tua disarankan untuk membeli buku atau alat bantu mengajar yang dibuat oleh guru anaknya, orang tua disarankan untuk membayar biaya khusus di sekolah, dan penahanan buku raport siswa bagi yang tidak memberikan sumbangan dana pembangunan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.²⁵

Namun, sebagaimana dijelaskan pada definisi korupsi di atas, pe-nulis berpendapat bahwa korupsi adalah semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik berupa kerugian material maupun non material, dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak. Dengan demikian, jenis korupsi dapat berupa:

1. Datang terlambat ke tempat kerja;
2. Pulang awal dari tempat kerja;
3. Berbohong;
4. Mempersulit orang lain;
5. Memperlambat atau menunda pekerjaan;

²³ Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, 4–5.

²⁴ “Presentasi ‘KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.’” June 25, 2016, 18, <http://slideplayer.info/slide/3657342/>.

²⁵ Muhammad Munadi, *Kebijakan publik di bidang pendidikan* (Ar-Ruzz Media, 2011), 147–48.

6. Memberikan pelayanan yang tidak mengenakan;
7. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
8. *Mark-up* harga;
9. Rekayasa data;
10. Menyontek dan atau membantu contekan saat ujian;
11. Menerima uang pelicin; dan
12. Tindakan atau perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan merugikan orang lain, institusi, ataupun negara kerugian baik secara material maupun non material.²⁶

Sebagai penyakit masyarakat, korupsi memberikan banyak dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mc. Mullan sebagaimana dikutip oleh Wibowo menyebutkan beberapa dampak negatif dari korupsi, diantaranya:²⁷

1. Ketidakefisienan;
2. Ketidakstabilan;
3. Rakyat tidak mempercayai pemerintah;
4. Terjadi pemborosan sumber-sumber dan pemasukan negara;
5. Tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing;
6. Ketidakstabilan politik; dan
7. Pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah, dan tidak represif.

Sedangkan Revida menjelaskan bahwa korupsi mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi, sosial budaya, politik, dan tata administrasi.²⁸ Dalam bidang ekonomi, misalnya dapat menyebabkan larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dalam bidang sosial budaya diantaranya dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Dalam bidang tata politik diantaranya dapat menyebabkan pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan, dan ketidakstabilan politik. Dan dalam bidang tata administrasi diantaranya ketidakefisienan, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif.

²⁶ Yaqin, "PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MADRASAH," 271.

²⁷ Wibowo, *Pendidikan antikorupsi di sekolah*, 26.

²⁸ Yaqin, "PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI MADRASAH," 272.

Model Pendidikan Antikorupsi di Madrasah

Pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan antikorupsi mengambil pengalaman-pengalaman berupa *best practices* masyarakat transparansi internasional dan pengalaman dengan pendidikan P4. Hal yang harus dihindari adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata. Pendidikan antikorupsi harus memberikan *experiential learning*, yang tidak semata mengkondisikan para peserta didik mengetahui, namun harus memberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri.

Salah satu metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Focus Group Discussion* sebagai bentuk partisipasi aktif dari peserta. Tujuan dari *Focus Group Discussion* ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pemilihan metode yang tepat di dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak usia dini. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran materi antikorupsi adalah metode *inquiry*. Metode *inquiry* menekankan pencairan secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai antikorupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini siswa diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap siswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini siswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

Pembahasan/Hasil Dampungan

Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah

Madrasah secara kelembagaan perlu memiliki sifat reaktif dan proaktif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, artinya pendidikan di madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Sifat ini perlu ditumbuhkembangkan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia

(*human resource*) Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan global masa mendatang yang kehadirannya bersifat niscaya. Pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan dan mengembangkan seluruh daya manusia secara terpadu, sehingga diperoleh kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam dinamika global. Di antara upaya yang dilakukan oleh madrasah adalah mengembangkan program pendidikan antikorupsi. Program ini diharapkan dapat membangun karakter siswa untuk senantiasa konsisten dengan perilaku yang semestinya dilakukan.

Agar pendidikan antikorupsi di madrasah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan strategi khusus untuk menopang program yang cukup mulia tersebut. Beberapa strategi yang dapat digunakan diantaranya yaitu; 1) pengintegrasian materi antikorupsi dalam mata pelajaran, 2) pengembangan kegiatan kesiswaan, dan 3) pembiasaan perilaku.²⁹ Ada tiga hal yang dapat dilakukan madrasah untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi. *Pertama*, memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran yang obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. *Ketiga*, membangun integritas yang bukan mensyaratkan kedewasaan semata, tetapi yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah/madrasah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan antikorupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di LPI Al Ma'aarij Magetan dilakukan dengan melalui berbagai tahap. Tahap-tahap tersebut meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rincian program/kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan pada tahap ini diawali dengan adanya sosialisasi tentang arti penting pendidikan antikorupsi. Proses sosialisasi dilakukan kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI)

²⁹ "Microsoft Word - Pedomananti Korupsi Madrasah 26JUNI2013 - hdje1391741650.pdf," 9.

Al Ma'aarij. Hasilnya, terdapat 3 (tiga) format kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) bagi tenaga pendidik;
 - b. Pelatihan *strory telling* bagi pendamping peserta didik;
 - c. Lomba mewarnai untuk anak-anak;
 - d. Dongeng
2. Tahap Pelaksanaan
 3. Tahap Evaluasi

Upaya untuk Menumbuhkan Kebiasaan Perilaku Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di madrasah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penanaman nilai korupsi yang dipandang baru tersebut merupakan misi yang harus diemban madrasah dalam upaya melakukan pencerahan, pembaruan, perubahan kehidupan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan. Antikorupsi di madrasah dapat diterapkan melalui penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, tanggung jawab dengan cara mengintegrasikan tiga domain yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).

Dalam rangka memberikan pemahaman dan menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi ini maka terdapat beberapa hal yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) bagi pendidik

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pendidik di lingkungan LPI Al Ma'aarij tentang pentingnya menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum madrasah. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan antikorupsi untuk anak usia dini pada dasarnya harus didukung oleh sikap orang dewasa di sekitarnya yang juga ikut menjaga 9 (Sembilan) nilai karakter antikorupsi. Nilai-nilai karakter dimaksud adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Melalui nilai-nilai ini anak mempunyai figur yang

bisa ditiru dalam usaha pencegahan tindak korupsi ketika dewasa nanti. Anak adalah peniru ulung, maka dengan memberikan contoh dari sikap dan perilaku yang baik kita setiap hari inilah yang akan memberikan stimulus bagi pembentukan karakter anak. Dengan demikian, anak akan dilatih untuk berani jujur terhadap dirinya sendiri.

Membangun negeri ini untuk bersama-sama membenahi diri tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja, harus ada gerakan bersama untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi dapat teraplikasikan sebagaimana yang diharapkan. Pemberian pendidikan antikorupsi bisa dimulai sejak dini bahkan ketika anak masih duduk di tingkat Raudhatul Athfal (RA) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada usia emas ini, anak akan merekam berbagai informasi di sekitarnya sehingga pada usia dewasa nanti anak memiliki kesiapan dan karakter yang baik. Diharapkan, pada akhirnya dapat tercipta generasi-generasi baru yang jauh lebih baik dan bersih sebagai hasil masuknya nilai-nilai luhur dalam diri setiap cikal anak bangsa, dan muncul dalam sikap dan perilaku keseharian mereka.

2. Pelatihan *story telling* bagi pendamping

Tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah membekali para pendamping – dalam hal ini adalah para pendidik dan sebagian wali murid – tentang efektifitas teknik mendongeng (*story telling*) dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dewasa ini, dongeng sebagai bentuk media komunikasi, alat penyampaian informasi, dan juga sarana hiburan merupakan bagian dari budaya yang kian memudar di masyarakat. Terpinggirnya kegiatan mendongeng ini sangat disayangkan, karena sesungguhnya merupakan sarana mendidik dan menghibur yang mudah, murah, dan bermanfaat.

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan anak adalah moral. Moral merupakan pondasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang memprihatinkan pada kehidupan masyarakat saat sekarang bahwa perbuatan amoral terjadi di mana-mana, seperti: tawuran antar kelompok, korupsi, kekerasan, kurangnya rasa hormat dan penghargaan pada orang lain, mengutamakan kepentingan pribadi dan sebagainya. Salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak dengan metode *story telling*. Melalui metode ini, substansi materi dapat diterima dengan baik. Seiring dengan itu, metode ini dapat meningkatkan moralitas anak usia dini baik dalam kemampuan penalaran moral, tindakan/perilaku moral. Hal ini dikarenakan metode

story telling ini sangat menarik minat anak, gerakannya yang atraktif, dialog bahasanya sangat menarik perhatian anak. Apalagi jika anak belum pernah menerima pengalaman serupa sebelumnya, maka anak-anak lebih konsentrasi dalam menyimak cerita.

3. *Storry Telling Time*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan buku dongeng *Tunas Integritas*. Buku dongeng ini merupakan sebuah bentuk pencegahan (preventif) melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini lembaga pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-kanak (TK). Karena nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak usia dini mengingat perkembangan otak pada anak usia dini mengalami percepatan hingga 80 % dari keseluruhan otak orang dewasa.

Sesi *story telling* pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di LPI Al Ma'aarij Magetan diisi dengan mendongengkan salah satu cerita yang ada di buku dongeng *Tunas Integritas* tersebut. Buku dongeng *Tunas Integritas* memberikan stimulus dalam perkembangan anak, yaitu 1) perkembangan kognitif anak, dimana dapat merangsang imajinasi anak melalui gambar-gambar yang ditampilkan dalam buku dongeng *Tunas Integritas*; 2) perkembangan moral anak, dengan nilai-nilai yang ditanamkan maka akan menambah pengetahuan anak akan nilai moral (*moral knowing*) tersebut; 3) perkembangan sosial dan emosi anak, banyak cerita yang mengajarkan akan pentingnya kepedulian, rasa kasih sayang akan memberikan pengalaman bagi anak untuk berperilaku sesuai dengan kelompok masyarakat; 4) perkembangan bahasa, dengan diceritakannya buku dongeng *Tunas Integritas* maka akan menambah perbendaharaan kosa kata anak. Hal ini akan memberikan rangsangan anak untuk belajar membaca meskipun pada usia dini anak belum diwajibkan untuk belajar membaca, dengan dibacakan buku dongeng akan menjadikan anak gemar membaca.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam buku dongeng *Tunas Integritas* bertujuan untuk menciptakan generasi mendatang yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif. Juga untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Serta bertujuan membiasakan perilaku-perilaku baik sejak dini. Hal tersebut diawali dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang (*pedagogy of love*), dan pembelajaran yang ramah anak, serta nilai-nilai dasar pembentuk karakter anak seperti jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung

jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan Sembilan Nilai Antikorupsi.

4. Kreasi mewarnai bagi anak didik

Kegiatan lain dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi adalah lomba mewarnai untuk anak-anak usia 5-9 tahun. Tema lomba ini adalah “Berani Jujur Itu Hebat”. Tema ini diambil untuk menanamkan salah satu nilai dari Sembilan Nilai Antikorupsi yaitu nilai kejujuran. Pesan yang ingin disampaikan melalui tema ini adalah bahwa setiap manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Menjunjung tinggi kejujuran apapun resikonya adalah perbuatan yang mulia.

Melalui kegiatan ini secara tidak langsung anak telah mempelajari nilai-nilai antikorupsi. Pengamatan dengan indera penglihatan dan gerak motorik anak dalam proses mewarnai tentu akan membekas dalam ingatan anak. Sehingga substansi dari nilai-nilai antikorupsi dapat direkam dengan baik oleh anak.

Disadari oleh semua pihak, bahwa pendidikan antikorupsi di madrasah yang dimaksudkan untuk membentuk siswa berperilaku perilaku terpuji sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku korupsi, memerlukan waktu yang panjang serta komitmen dan dukungan dari semua pihak. Pendidikan antikorupsi adalah suatu hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tetapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan *island of integrity* (daerah percontohan bebas korupsi).

Penutup

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan korupsi. Untuk mewujudkan pendidikan di madrasah harus berorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak

hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan, dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan nilai antikorupsi tidak hanya sampai pengenalan nilai-nilai antikorupsi. Tetapi juga harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai antikorupsi, penghayatan nilai-nilai antikorupsi, dan ke pengamalan nilai-nilai sebagai puncak indikator dari keberhasilan internalisasi nilai antikorupsi dalam jiwa peserta didik. Upaya pendidikan antikorupsi ini sudah banyak dilakukan di sektor pendidikan termasuk di antaranya yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Ma'aarij Magetan walaupun masih sekedar pada tahap transfer pengetahuan. Oleh karena itu, adanya *sustainability* sudah menjadi keniscayaan sehingga pada akhirnya nilai-nilai antikorupsi terinternalisasi dalam diri setiap orang. []

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, H. Romli. "Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi," 2013.
- Ali, Muhammad (1993), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- "Corruption Perception Index 2013 - Publikasi - Transparency International Indonesia," June 24, 2016. <http://www.ti.or.id/index.php/-publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013>.
- DJAJA, Ermansjah. "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," 2010.
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*. Binacipta, 1983.
- KARTONO, Kartini. "Patologi sosial/ Kartini Kartono," 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*, n.d.

- Korupsi, Indonesia Komisi Pemberantasan. *Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Merriam, A. Webster. "Webster's Students Dictionary," 1962.
- M.H, Oksidelfa Yanto, S. H. *Mafia Hukum*. RAIH ASA SUKSES, n.d.
- "Microsoft Word - Pedomananti Korupsi Madrasah 26JUNI2013 - hdje1391741650.pdf," June 25, 2016. <https://babel.kemenag.go.id/-file/file/IMA/hdje1391741650.pdf>.
- Munadi, Muhammad. *Kebijakan publik di bidang pendidikan*. Ar-Ruzz Media, 2011.
- Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, n.d.
- "Panduan bantuan hukum di Indonesia 2014 : pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum," 2014.
- "Presentasi 'KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK,'" June 25, 2016. <http://slideplayer.info/slide/3657342/>.
- (R.), Subekti, and R. Tjitrosoedibio. *Kamus hukum*. Pradnja Paramita, 1969.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Poerwadarminta, S. Wjowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung: Penerbit Hasta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Supandji, Hendraman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan antikorupsi di sekolah: strategi internalisasi pendidikan antikorupsi di sekolah*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Yaqin, Nurul. "PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 267–286.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional**

Re-Perform Intellectual Collective Bourdieu; Cangkir Kamisan Community in Building Creative Economy in Metro Lampung

DHARMA SETYAWAN

STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, Indonesia
dharmasetyawan@rocketmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengungkap peran Komunitas Cangkir Kamisan. Sebuah komunitas yang mengawali kiprahnya dari diskusi bincang pikir (cangkir) di teras rumah warga. Pegiatnya terdiri dari akademisi, aktifis, jurnalis, warga, guru, pengusaha, wiraswasta, dan berbagai komunitas kreatif kota. Komunitas Cangkir Kamisan berusaha membangkitkan peran berbagai entitas di Kota Metro Lampung dengan semangat membangun intelektual kolektif. Propinsi Lampung yang selama ini dikenal dengan berbagai konflik etnis, melalui gerakan intelektual kolektif tersebut mulai menyadari pentingnya membangun kebersamaan. Perubahan banyak terjadi mulai dari mendirikan portal jurnalisme warga pojoksamber.com, Rumah Bersama, lembaga riset Sai Wawai Institute, Penerbitan Buku indie Sai Wawai Publishing, dan Mendirikan Bank Sampah Cangkir Hijau. Selain itu banyak gerakan-gerakan ekonomi kreatif lainnya yang dilakukan oleh komunitas ini. Peneliti bermaksud menelusuri peran Komunitas Cangkir Kamisan menjawab tantangan struktur dalam membangun output komunitas sehingga mampu berkiprah dan berkarya untuk masyarakat. Wacana intelektual kolektif menarik untuk diteliti sebagai bagian dari tanggung jawab kaum intelektual membangun perubahan melalui jalan intelektualisme yaitu pengetahuan. Untuk itu penelitian ini bermaksud meneliti lebih dalam peran Komunitas Cangkir Kamisan dalam membangun ekonomi kreatif di Kota Metro Lampung.

Kata Kunci: Intelektual Kolektif, Komunitas Cangkir Kamisan, Ekonomi Kreatif.

Introduction

Challenges intellectuals in the era of globalization increasingly complex. Discourse on the hegemony of capitalism ¹ for example, more complicate the social movement against the tyranny of large corporations both in the field of politics, economics, media, culture and even in the world of education itself. Ruling elites and businessmen are getting stronger plugging influence as owners of political parties, the media (television, newspapers, online portals) and the natural resources of country. For example, media conglomerate heavily influence the public in the interests of the party which is owned by media owners as well. From the above reality, reflected as it says in the study Altschull's of ownership and control of the media, that "media contents always reflect the interests of those who finance them".²

In the social sciences, especially philosophy and sociology, the frequent of opposition between subjectivism and objectivism are often irreconcilable.³ The dichotomy between subjectivism and objectivism that despite the seemingly contradictory, but both perspectives approach is necessary to find or dialectic interplay between the two. Both are interrelated and influence each other in a complex process to generate social practices.⁴ Social practices not only put the subject on the main role of the formation of the world, but also take into account the context of space and time that lie behind them.⁵ So to be able to dialected to both, Bourdieu formulates the

¹ Capital is derived from the Latin word *caput* meaning "head&" This meaning becomes clear, for example in terms of "per capita income"; - income per head. Also still consistent, when it is used for, for example, capital city - the main town. What to do with "capital"; is another - that we often translate as "capital" It is said that the wealth of ancient Roman population is measured by how many head of cattle he has. The more *caput* her, increasingly prosperous. Not surprisingly, then they "collect" as many *caput*. Now it is clear already, why do we translate capital as "capital"

² Mc Quails, Denis, *McQuail's Mass Communication Theory*, (London: SAGE Publication, 2000), 193.

³ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, (Stanford: Stanford University Press, 1992), 25.

⁴ Bagus Takwin, *Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-Usul Masyarakat, Melampau Oposisi Biner dalam Masyarakat, dalam: Harker dkk (ed), (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), xvii.

⁵ Suma Riella Rusdiarti, *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*, dalam (Basis No. 11-12, Th. 52, November-Desember 2003), 33

concept of habitus, arena, and capital. These three concepts are in one frame named Bourdieu with genetic structuralism.⁶

The fact that is happened, liberal democracy, economic neoliberalism, the incoming foreign culture to colonize the country, reflecting the propaganda of imperialism still keeps going on with a more sophisticated way. Intellectual which is born by the College was eventually increasingly powerless againsts the arrogance of power in the field of political, economic, social, economic and cultural. Correspondingly, science massive liberalization occurs and has the characteristics: First, understand the emergence of secular positivism to the scientific knowledge, technological activity, material civilization, law, and ethics pragmatic individual. Second, scientific knowledge is divided into science specialist, in-depth, technical and separated. Third, science, poritif eliminates the function of the religions in the scientific community.⁷

Mohammad Hatta wrote that an intellectual should have a moral responsibility in every act.⁸ Daniel Dhakidae argued that regarding intellectual discourse, namely, "...the emphasis is given to the production of discourse, the discourse of conflict, changing the discourse, and back to the formation of a new discourse again."⁹ Charles Kurzman and Lynn Owens have such a model approach to look at the position of the intellectual in society. Three of these approaches seek to see intellectuals as a class in society, namely:

The first approach, which puts intellectuals as a class in itself. This approach is commonly referred to as benda-ism refers Julien Benda views on the contradiction between power and truth. According to Benda, intellectuals into the realm of power has hurt the spirit of seeking truth. Thus, it was creating then well-known as" intellectual treason".

The second approach, rooted in the thought of Antonio Gramsci, who puts the intellectual as part of the power for the interests of the general public.

⁶ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), xiii.

⁷ Azim Nanji, *Peta Studi Islam: orientalisme dan arah baru kajian Islam barat*, Cetakan I, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 360-361

⁸ Hatta, Mohammad, 1953, *Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia*, dalam Mahasin, Aswab & Ismed Natsir (eds.), *Cendekiawan dan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1984), 3.

⁹ Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), xxvii-xxviii.

The third approach, seeing that the intellectual potential is not a part of any class¹⁰ However, all three approaches, according to Pierre Bourdieu, he wrote that “it fails to include the point of view from which it speaks and so fails to construct the game as a whole”. The most important task for intellectuals is to preserve the autonomy they have to fight the economic and political intervention. The genuine intellectual is defined by her or his independence from temporal powers, from the interference of economic, and political authority.¹¹

Intellectual autonomy in this case does not necessarily refer to the position of the intellectual debate in the political and scientific domains, but freedom in creating and voicing the interests of marginalized groups.¹²

Bourdieu's thought about intellectual is named as collective intellectual. This idea emerged as the establishment of publishing *Liber : Reveu européenne des livres* and documentation of *Raison de Agir* in early 1999 as the agents form for journalist, and author of the palace as an accomplice neoliberalism. In addition to criticism of the role of intellectuals who support neoliberalism, Bourdieu viewed intellectual encounter difficult choices. Resistance has to be done, since economic and political power has destroyed the world order has affected the social and intellectual autonomy.¹³

The emergence of Cangir Kamisan Community in Metro City becomes such an interesting phenomenon. Starting from a community discussion Kamisan (Friday night) which consists of various backgrounds activists. Talk thought (RSX) a cultural philosophy a discussion coffee with a relaxed but filled with chatter seriously. This community activists ranging from academics, journalists, writers, student activists, businessmen, entrepreneurs, religious leaders, and residents of Metro who join in it. In view of the collective intellectual Bourdieu Pierre, this community brings together diverse of intellectual habitus in building social movements. In a nearly 1 year old, the community has born many activities in building the spirit of multiculturalism and creative economic movement. Regarding to the spirit of tagline “ everyone is a teacher and all places are schools”, This

¹⁰ Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 4-7.

¹¹ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, (Stanford: Stanford University Press, 1992), 56.

¹² Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*., 9.

¹³ Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*, 10

community has been moving a lot of stakeholders with the aim to turn creative cities in Metro. Cangkir Kamisan Community until today has spawned Group Home as the home of various communities in the Metro, citizen journalism portal pojoksamber.com, Cangkir Hijau Waste Bank, the first independent publication in Metro Sai Wawai Publishing and Research Institute Wawai Sai Institute.

The research reveals a collective intellectual role in the thought of Pierre Bourdieu. The great hope of this research is useful for the development of social practices in post-modern society. Cangkir Kamisan Community tries to raise the role of intellectuals in the Metro City since the beginning actively initiated Cangkir Kamisan community. Borrowing a term by Arnold J. Toynbe, that is developing “Creative Minority” This community effort to build the city through empowering its citizens itself.

The community is such an institution or a group of scientists who have chosen science paradigm together and have certain rules. This scientific paradigm into a theoretical framework or way of looking in understanding the nature of which has been used by a group of scientists as a worldview. Scientific communities also have a common language, values, assumptions, goals, norms, and beliefs.¹⁴

Creative Economy, according to report of United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) entitled Creative Economy Report 2008 is “Creative industries can be defined as the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce tangible goods and intangible intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objectives”¹⁵

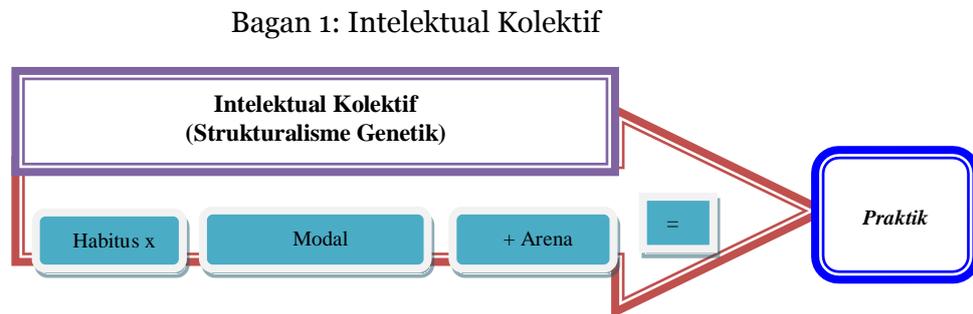
While UNESCO uses the term of Economic Kratif and defines it as, “...those industries that combine the creation, production, commercialization of contents which are intangible and cultural in nature. These contents are typically protected by copyright and they can take the form of goods and services”.¹⁶

¹⁴ Muh Muslih, *Filsafat Ilmu:ajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar,2004), 128-129.

¹⁵ UNCTAD, *Creative Economy Report 2008*, (Geneva: UNCTAD, 2008), 15.

¹⁶ Throsby, D, *The Economics of Cultural Policy*, (Cambridge: University Press, 2010), 89.

The following chart Intellectual process Collective work in view of Bourdieu.¹⁷



Looking at the role of intellectuals in various universities in influencing social practices in the theory of genetic structuralism Bourdieu namely habitus, arena and capital. In this case, the researcher intends to explore the role of Cangkir Kamisan Community address challenges in building a structure that is capable of acting community output and survive in society. Intellectual discourse of collective interest to be examined as part of the responsibilities of intellectuals in this case the Cangkir Kamisan Community to build roads change through intellectualism that is knowledge. With the knowledge of this community are always discussing new ideas and trying to multiculturalism and creative economy in Kota Metro Lampung apply particularly related build mutual reliance. For this study intends to examine more deeply the role of Cangkir Kamisan Community in establishing.

Cangkir Kamisan Community

Cangkir Kamisan Community, the name comes from the acronym “CangKir”; that is, from the word “Talk and Thought”. Philosophically, “CangKir” has the meaning that a single container that can be filled with a variety of water-tea beverages, coffee, milk and others-which also can represent a wide variety of flavors of life. Then the Cangkir Kamisan Community performs routine discussion revolving every Thursday night. Discussions began from isya to finish, and some activists there that lasted until the early hours. After a few months, this community became known as the Cangkir Kamisan Community.¹⁸

¹⁷ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), xiii

¹⁸ Interview with Oki Hajiansyah Wahab, October 3, 2015

The emergence of this community is fronted by Oki Hajiansyah Wahab, Rahmatul Ummah and Dharma Setiawan who agreed to build a community of epistemic (knowledge discussions are ongoing). Oki Hajiansyah Wahab is a member of AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) Bandar Lampung and co-founder of the National Student Front (FMN), a doctoral candidate at the University of Diponegoro (Diponegoro University) who devoted himself as a researcher and activist agrarian advocates for agrarian conflicts Register 45 Mesuji Lampung since 2006. Rahmatul Ummah is a former chairman of the general Election Commission (KPU) Metro 2009-2014, while still a student once the chairman of the Islamic Students Association (HMI) Metro and at the same branch organizations declaratory Indonesian Muslim Student Action Union (KAMMI) in town Metro.¹⁹

While, Dharma Setiawan is a former chairman of KAMMI Metro 2009, alumni of STAIN Jurai Metro Siwo, then continued his Post- Graduate Program at Gadjah Mada University. Then, after graduating from Gadjah Mada University he chose a career as an academic at the Islamic Institute (STAIN) Jurai Siwo Metro. They were brought together in the unity of the idea as a columnist in the local mass media Lampungpost. Their meeting discussed many things, including the anxiety will be the development of the city and the future of the creative minority. “ Including the big dream to build urban civilization, a civilization alternative whose born citizens, priority-equity participation of the instruction-hierarchical, placing higher ‘achievements’ of the ‘pristise’ put the idea of the material of interest.”²⁰

Aforementioned principles such as participation-equality is put in the application of community. For example the tradition of kickback or dues. This tradition laid the development of community self-reliance. Important will be the existence of a tradition in which the community will not only use the facilities and lifted his hands up. But it started to act together in a community urunan commonly refer to it as ‘slamming’.²¹

Method

This paper uses the theory of Pierre Bourdieu Intellectual Collective with ethnographic approach that aims to provide an overview of experience

¹⁹Interview with Oki Hajiansyah Wahab October 3, 2015

²⁰ Interview with Rahmatul Ummah, October 3, 2015

²¹Interview with Rahmatul Ummah, October 3, 2015

cangir Kamisan Community in building Creative Economy. The data used in this study derived from primary data field observations and structured interviews with informants, while secondary data obtained from the data that existed previously in the form of records, papers, documents, reports and other sources related to the research theme , The informants are community activists of Cangkir Kamisan. Data were then analyzed by induction-conceptualization from fact or empirical information (data) to build a conclusion

Building Creative Economy

According to John Howkins is the creative economy is the business idea; It was this business that transforms ideas into products that make money.²² Department of Culture, Media, and Sport (DCMS) United Kingdom (Britain) established the Creative Industries Task Force in 1997. Then, DCMS Creative Industries Task Force (1998) formulated the following definition “Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content”

Creative economy is a development concept based on the capital of creativity that can potentially increase the economic growth. According to President Susilo Bambang Yudhoyono (2007) “ economic wave 4 is a continuation of the third wave of the economic orientation on creativity, culture, and heritage and environment” Previous Alvin Tofler in his book Future Shock (1970) revealed that “human civilization consists of 3 waves; The first wave is the century of agriculture, the second wave was the industrial age and the third wave is the information age”. The shift from Era to Era of Agricultural Industrialization, followed by the information age, along with many new discoveries in the field of information technology and economic globalization, has brought a new civilization for mankind.²³

Creative Economy (EK) according to the First Dictum Presidential Instruction No. 6 of 2009 regarding the development of the Creative

²² Delee, *Magic Of CreativePreneur (Bagaimana Anda Menjadi Inovatif secara ajaib dan menjadi seorang bisnis entrepreneur sukses dalam dunia industri ekonomi kreatif)*, (Jakarta: ABNG Publishing, 2012), 3.

²³Anggraini, Nenny, “*Industri Kreatif*”, Jurnal ekonomi Desember 2008 Volume XIII No. 3, 144-151.

Economy is, “ Economic activity is based on the creativity, skills and individual talents to create the creativity and inventiveness of individuals who have economic value and impact on the welfare of the people of Indonesia.

“Creative industries can be defined as the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce tangible goods and intangible intellectual of artistic services with creative content, economic value and market objectives”.²⁴

While UNESCO uses the term of Economic Kratif and defines it as, “...those industries that combine the creation, production, commercialization of contents which are intangible and cultural in nature. These contents are typically protected by copyright and they can take the form of goods and services”.²⁵

Based on the accounts above it can be concluded that the creative economy is an economic activity that is based on the ideas of creativity, skill and talent to rely on the individual as the main production factor in creating economic value creation and welfare. John Howkins identified about 15 categories segment of the creative economy including business industry media that form the core of copyright patent industry. 15 category segments, among others: (1) Advertising, (2) Architecture, (3) Craft Products, (4) Art (5) Design, (6) Fashion, (7) Movies (including video and DVD), (8) Music, (9) Performing Arts, (10) Book Publishing, (11) Research and Development, (12) Software / Software, (13) Toys and Games, (14) Video Game, (15) TV and Radio.²⁶

Creative economy has become a new force in national development. Tracing its history, in Europe creative industries, also known as the culture industry, began in 1944 popularized in academic circles through criticism Adorno and Horkheimer *The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception* (1944). The culture industry, which turns into cultural industries. Charles Landry late 1980's spawned the term Creative City with his book *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. Creative City is “ the city that

²⁴ UNCTAD, *Creative Economy Report 2008*, (Geneva: UNCTAD, 2008), 15.

²⁵ Throsby, D, *The Economics of Cultural Policy*, (Cambridge: University Press, 2010), 89.

²⁶ Delee, *Magic Of CreativePreneur.*, 7-8.

creates an environment that supports people to think, plan and act with imagination in utilizing the opportunities and problems of cities”

Richard Florida, *The Rise of the Creative Class* describes the creative city is a city that is able to instill the culture and inspiring ‘creative’ in society, and the business was able to support the efforts of ‘creative economy’. ‘Creative’ is such a process, it can not just show up instantly, and the creative process itself can be of a way of seeing, ways of thinking, and acting. Metro has the same potential, seen from a small regional income. The results of the agricultural sector is low compared to other districts. However, with the potential of 14 campuses in the city, the role of the intellectual influence of the creative economy translates into the public domain. And also the use of technology in this city expedite the process. The concept of the creative economy is where science and technology is the main input in stimulating economic development and creating a good economic growth. Science is translated as a result of the role of intellectuals of it.

“Creative economy is an evolving paradigm of pre-capitalist modes of thought, agri-culture (agriculture), the industrial economy and then the information economy later this creative economy. Creative economy based on innovation and creativity strength. Various types of creative economy there are 15 types, and human resources so many myriads Metro hopes the city creative economy develop, especially with regard to industrial-based economy of creativity. Cangir Kamisan community influence in the creative economy in Metro City if calculated mathematically and statistically the impact is not yet visible. But then thinking creative economy and to network began to grow.”²⁷

The development of creative economy that is just beginning in this city (Metro) is an attempt to read the potential then packed with the spirit of community. According to Sutiyo Cangkir Kamisan Community though just a year old, they were much to encourage the development of a creative economy by cooperating with its members in various events. “For example we do not know t-shirts abe first, but then we know fit abe in tandem by comrades community”.²⁸

The academics in the Cangkir Kamisan Community help facilitate the development of creative industries. First, Maternity pojoksamber.com citizen journalism portal is the first step oversee the creative economy. Engaged in

²⁷Interview with Bambang Suhada, Lecture at Universitas Muhammadiyah Metro, October 14, 2015

²⁸ Interview with Sutiyo, Lecture at STISIPOL, November 10, 2015

citizen journalism facilitate the access of developing the potential of the business or advertising that has or has not grown. Second, create an independent publishing and printing Sai Wawai Publishing reinforce synergy creative industries first formed. Third, the Cangkir Hijau Waste Bank as a struggle in the field of environment-based creative economy. Fourth, then continued growth of creative industries in the sector of research (research) to establish Wawai Sai Institute and the Fifth, the development of Metro Photography, music and documentaries.

Portal Online Pojoksamber.com

Creative industries engaged in the advertising sector is the first citizen journalism portal in Lampung. First appeared the portal is not intended as a commercial medium, just as media information and learning or easier-called citizen journalism portal. As disclosed Rahmat as chief editor “Since the beginning, this portal has affirmed itself as a non-mainstream media, media is vibrant and alived by residents. The biggest activity, is turned literate culture and producing new writers in this town”.²⁹

Pojoksamber.com formally was established on October 28, 2014. The establishment of the ideas and creations pojoksamber.com 25 initiator. Each inisiator self-help collect the money each one million rupiah. The money collected can be the initial capital to make the first citizen journalism portal in Metro city and even in Lampung. Some of the names of the founders are as follows; Rahmatul Ummah (Former Commissioner KPU Metro), Fritz Ahmad Nuzir (Lecturer cum Architect), Bambang Suhada (Dean Faculty of Universitas Muhammadiyah Metro), Dharma Setiawan (Lecturer STAIN METRO), Imam Mustafa (Lecturer STAIN METRO), Sutiyo (Lecturer STISIPOL Dharma Discourse Metro), Amri (Lecturer STIT Agus Salim Metro), Rio Benefactor (BMT ADZKIYA), Elly Agustina (Bimbel BROTHERHOOD), Oki Hajiansyah Wahab (Researcher PKKPHAM FH UNILA), HS Tisnanta (Lecturer FH UNILA), Rudy, (Lecturer FH UNILA), Hertanto (Lecturer FISIP UNILA), Hifni Septina Carolina (Teacher), Dwilia Delfi (elementary school teacher), Dyah Widayani (PNS City Metro), Endri Y (Journalist), Welly Alhendri, SE (Self), Achyani Subandi (Lecturer FKIP UMM), Erik Pujianto (Students, activists FosSEI Philanthropy), Rohman Abdul Wahid (Koki), Imroatul Munawaroh (Master MART), Apri Nuzulis

²⁹ Interview with Rahmatul Ummah, October 12, 2015

Tiana (Artist), E.Rudiyanto (Journalist), Amrullah Khusain (Lecturer STAIN Metro)

Pojoksamber.com as citizen journalism portal fell on a youth pledge. It is also a form confirming marker pojoksamber.com alive and young children lived. This activity was warmly greeted residents of Metro views of hundreds of people gathered in Park City Metro. And presenting Kitakuyutshu University professors from Japan, Prof. Bart Dewancker

Picture 1. Prof. Bart Dewancker, Lukman Hakim the Lord mayor of Metro 2010-2015 and students of Muhammadiyah Metro



Source: Individual Collection (2015)

Through the Clinical Program Writing and Writing Campaign Metro is routinely held every month, pojoksamber.com keep moving educate villagers. Non-mainstream news portal (not mainstream) is trying to keep the hegemony of the mainstream media (mainstream). “ If journalists require the public to obtain information, to then be delivered to the public, why do not the people themselves who relayed the information directly to the public”³⁰. Rahmat’s statement reviews the reasons why important pojoksamber.com to be established. Taken from the name of a field in Metro City, pojoksamber.com is a media-based cyber citizen journalism. Pojoksamber.commemberikan priority to news about Metro City. Because of these priorities, pojoksamber.com tagline is “Portalnya Warga Metro”.

³⁰ Interview with Rahmatul Ummah, October 12, 2015

The involvement of citizens is not only as recipients of information. Residents can also play a role as a journalist, to participate actively informing and *pojoksamber.com* be a source of information about the Metro, Lampung, national and even international. Even some of the contributors to utilize a network of Indonesian citizens who are working or studying in overseas countries such as the contributor of Hong Kong, the Netherlands, Japan, Malaysia, Britain, France and others. To meet quality news, information submitted from residents remained edited by a team of editors *pojoksamber.com* professionally.

Researchers noted *pojoksamber.com* purpose as an information medium the citizens of Metro City is trying to foster a culture of writing townspeople Metro, optimizing the potential and creativity of citizens of Metro City, and became a partner of business promotion, services, and education for the city of Metro. To achieve these objectives step *pojoksamber.com* actively conduct various activities. Metro Metro Writing Campaign and Media Literacy, training of citizen journalism, writing contest, to discussions and seminars, routine activities that were realized *Pojoksamber.com* as citizen journalism portal.

As a medium of education is wrapped with technology, can provide access to every citizen to see the development and stimulate creative ideas which continue to be disseminated through the portal. This step is in line with the theory of Daniel L. Pinks with a presentation about the need to be answered in the era of creativity that High Tech in which high concept and high touch.³¹ High tech, defined as the awareness of citizens in an era of creativity that technology is important in fostering ideas that have not appeared though. And are able to penetrate the space of empathy in the interaction of social interaction.

Sai Wawai Publishing

Metro as a city of education, ideally spawned a variety of intellectual work as an integral part of the tradition of the vision of the city carried. The absence of local publishers make works Metro Metro children become stunted. Sai Wawai Publishing present to complete the presence *pojoksamber.com* page, which is actually a citizen media pages to encourage the tradition of writing and reading

³¹ Tim Indonesia Design Power, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, (Jakarta: Departemen perdagangan, 2008), 2

Book Publishing, Sai Wawai Publishing (SWP)³², an independent publication dedicated to support and assist the writers in Metro City. One of the creative industry which is engaged in printing and publishing. SWP is the first publication in Metro City. Established since 13 November 2014. Choosing moving in the book publishing self-publishing, founding SWP aims to help creative writers in Metro City, to publish their work without any restriction.

Rio Dermawan, Director of SWP explains the purpose of the emergence of creative industries. “ To spread and to promote his ideas through books. The idea and the idea should not be stopped in the files that were consumed alone, therefore SWP pushing to be published so that it can become immortal ideas in book form “.³³So, its presence into penggerak change the city towards the city whose citizens continue learning (learning society)

Sai Wawai Publising publishes qualified books is the main goal, but if you see a local resource that is of interest above still utopian. For that Sai Wawai Publising tried to give a new breakthroughs and provide specific direction to the authors of the present knowledge. Sales are not targeted specifically and marketing still turning to local circles.

Sai Wawai Publishing as partnert media support knowledge transfer. Community activists cup Kamisan also believe that every paper has a unique creativity. However, mainstream publishing system that emphasizes circulation (number) sale of books, often become an obstacle to creative writings, to be published as a book. Observing these conditions, Sai Wawai Publishing trying to present as a solution.

Tabel 1. Daftar Buku di terbitkan oleh SWP

Book title	Author	Year	Pictures
Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia	Dr.HS. Tisnanta, et al (PKKPHAM Unila)	November 2014	
Kabut Pendidikan Di Indonesia	Budi Sugandi (mahasiswa S2 MarmaraUniversity, Turkey)	November 2014	

³² Sai Wawai means a good thing, with hopes becoming a publishing that consistently build a favor by fighting Metro writing.

³³ Interview with Rio Dermawan, October 21, 2015

Book title	Author	Year	Pictures
Menulis Asyik	Udo Z Karzi (Jurnalis cum Budayawan Lampung)	Desember 2014	
Dilema Kurikulum Berbasis Rezim	Pelajar Kota Metro	Januari 2015	
Bagaimana Mengelola Pengajaran	Sucipto, M.Pd.I (Dosen STIT Agus Salim)	September 2015	
Filsafat Politik Kenegaraan Bung Hatta	Dr. Mat Jalil, M.Hum	2015	
Gotong Royong Melawan Politik uang	Agus Riyanto dkk	2015	
Dan lainnya			

Sumber: Sai Wawai Publishing (2015)

Sai Wawai Institute

Other Creative Industry research institutes, namely Sai Wawai Institute (SWI), Survey and Research Institute has a tagline for education, economic and public policy. The born of SWI started from anxiety activists discussion on the lack of citizen research, research institute which examines the cultural development of citizens. Work for public interest research especially pencerdasan citizens not money oriented (orientation money). The first work of this institution while doing survey polled about money politics in the election of regional heads the city of Metro.

The survey, in collaboration with the city KPU Metro with six million rupiah. The survey was able to walk with the assistance Populi Center ³⁴ is Nico Harjanto as a free agent due to the intellectual interests of the public. Where there are other institutions that want to work with that much value

³⁴www.populicenter.org

(six million rupiah). But why do we accept, because it departs from the idea Kamisan discussions about money politics.”³⁵

Sai Wawai Institute has the vision and mission of being a credible local research institute and focus on encouraging education, public policy and local economic development.

Picture 2. Nico Harjanto, Ph.D (Direktur Populi Center)



Source: Sai Wawai Institute (2015)

Not only is engaged in the research, other creative fields also become a place of this institution. As place where creative talents community activists come. Make a documentary film “Nomor Piro Wani Piro”, a film narrates the portrait of money politic in Metro. This documentary is a continuation of the survey results SWI. Researchers look a little deeper, no other documentary film project as a form of multiculturalism community activists who have the talent to make a movie.

Cangkir Hijau Waste Bank

Cangkir Hijau Waste Bank, the fourth movement of the creative economy is the response to the problem of garbage in Metro. Garbage is as a classic problem of people tried to be converted into a blessing. Moving with the full limitations, the fourth movement is trodden with optimism, not merely function as a landfill, the members also build awareness of citizens through education-education campaigns and skilled residents to sort trash, both organic and non-organic. Cangkir Hijau Waste Bank is the way to realize the dream of a green city that is friendly, prosperous citizens, and not prone diseases

³⁵ Interview with Diyan Ahmad Saputra, October 22, 2015

Data from the Ministry of Environment in 2012 was recorded on average each person produces two kilograms of garbage per day. That is, if when Indonesia has a population of 250 million, then the garbage that will be generated is 500 tons of garbage in one day. Imagine how much waste that continue to be produced for a month, a year or several years if not matched by a sense of caring for the environment in the management of these problems sampah. Melihat that the initiative to create a bank of garbage based on community empowerment. As disclosed Lukman Hakim as a director of the Waste Bank³⁶.

“Waste Bank which was established as efforts to maintain environmental hygiene as commanded by Islam. Islam also commanded its followers to always keep the balance of nature and do not make mischief on earth. The first Fikih also ordered about cleanliness or ath-Thaharah, meaning that humans are commanded to maintain the cleanliness and purity due in accordance with nature.”

In its management, waste bank is involving the community in the transformation effort and the value of science that seeks to build public awareness of the importance of protecting the environment. Community involvement is an attempt to make the educational process directly so that what is to be delivered can be optimized. In addition to the public, also involving various stake holders to support the movement of the waste bank. Involvement multistake holders including government, private, Baitul mal Wat Tamwil, academics, community, and media.

When launching the first time, the Waste Bank is attended by people with enthusiasm. Looks like the image below, the Mayor of Metro Lukman Hakim officially launch the first existing Waste Bank city of Metro.

Picture 3. Launching Cangkir Hijau Waste Bank and visiting by French



Source: Rahmatul Ummah (2015)

³⁶ Interview with Lukman Hakim, Director of Bank Sampah Cangkir Hijau , October 23, 2015

In the documentation obtained, in addition to Lukman Hakim (Mayor Metro), some academics Metro and Lampung included as Trustees of Green Waste Bank Cups. Bambang Suhada lecturer at the University of Muhammadiyah Metro and M. Akib Lecturer, University of Lampung. Besides dr. Wahdi Siradjudin (Hospital Director AMC Metro) is also a builder and presented in the form of Hospital AMC Motor Waste Bank. And the last is Chusnunia Chalim (Member of Parliament)

After a few months, the impact of the development of firstly Waste Bank in Metro is growing and had several times to visit the location of foreign nationals. And was Consultant Ministry of Public Works and Public Housing Indonesia and France visited Cangir Hijau Waste Bank.³⁷

Metro Photography, Music dan Dokumenter

In addition the Community has also developed the Creative Economy in the form of Photography, Music and Documentary From Kamisan intensive meetings, each community was given a room in accordance with the skills and hobbies. Ranging from music, the community has launched a mini-album which Launching on 16 August. The first mini-album and premiered at the Metro is a collaboration of young kids Metro. The Music Group is the acoustic cups, Hoes Earth and KPJ. The album contains six songs with acoustic music genres like the picture 4.

The album contains songs of social, the first song is #SayangiMetro soundtrack song made for a documentary by the community in cooperation with the Student Documentary Film Study Bego (Be Good) SMA N 1 Metro.

Screamed the song Nature as the outpouring of the environmental damage, Save Moro-Moro songs offerings to konflik register 45 Moro-Moro. Endowments Money is a song sung Boomer Alfi and General Hadi Saputra on request BMT At-Taawun STAIN Jurai Siwo Metro for campaign cash waqf to young. Where are the voices of song that became the soundtrack of the documentary film made by cup Kamisan and Metro Election Commission entitled &“Nomor Piro Wani Piro”. The album is done independently, and each donor receives 10 cd Intersect. The album was launched simultaneously in the agenda of collaborative activities “Tribute To Lukman” an event to commemorate the end of the period of service Lukman Hakim as mayor of Metro

³⁷Pojoksamber.com, <http://www.pojoksamber.com/berita-foto-konsultan-kementrian-pu-dari-perancis-kunjungi-bank-sampah-cangkir-hijau/> , Accessed Oktober 26, 2015

Pictures 4. Activity in Launching Mini Album intersection and Metro Photography exhibition



Source: Documentation (2015)

Besides music, Metro Photography (MP) present a photo exhibition “Metro dalam Lensa”, Zenfonegraphy Community held a photo contest with the theme Explore Metro. As well as launching the album intersection. In addition, several other communities involved. The photo exhibition Sketch sketch of the Community, also accompanied Disc Jockey (DJ) Gaer89, Beat Box, and groups such acoustic acoustic Cakir, Hoes Earth, and KPJ all of whom are local young talents city Metro

Revival youth event is resistance to the politics of money made by the film community TIN (Nomer Piro Wani Piro) touches the youth segment. Various youth communities involved eg acoustics, skate board, stand up comedy, hunting and photo exhibitions, DJ performances, BMX, Parkour, Hip Hop, trace the natural horizon (JCA), community bananas, stand creative economy and more creative other community.

Picture 5. Event Revival Metro Lampung Post and Cd Film Fight Money Politics



Source : Lampung Post (2015)

Conclusion

Collective intellectual is conscious attitude empower all the potential and diversity of the profession to establish cooperation in various fields. Cangkir Kamisan Community built with a spirit of solidarity, egalitarian and responsibilities. Cangkir Kamisan Community routinely discussing every Thursday night after Isha. Community since the earliest built in the spirit of diversity, both organizational background, ideological views, occupation, ethnic and even religious. Campaigners looked multiculturalism is a necessity that became part of a growing community of the cup, so that all community activists willing to let go of ego identity shell

Challenges aside epistemic community discussion is the idea of building a land of ideas towards real practice. Cangkir Kamisan Community with the spirit of “talk thought” trying to establish a collective attitude with various professions to undertake community work. Besides a wide range of professions from faculty, students, painters, artists, journalists, photography, and other professions. This community also consists of many student activists, ranging from students at the University of Muhammadiyah Metro, STAIN Metro, STIT Agus Salim and some creative community became interested discuss and build a movement of collaboration in the work of the creative economy

This study tries to analyze more deeply the role of collective intellectual Cangkir Kamisan Community in building multiculturalism and creative economy. They become more enlightened discussion and slowly but surely the real action of the social movements in society. In practice, this community also floated the multiculturalism in the spirit of harmony. Community since its inception in the wake of the spirit of the differences, both the background of the organization, ideological views, occupation, ethnic and even religious. Campaigners looked multiculturalism is a necessity that became part of the development community pagiat cup so that all communities must release the inherent identity of the individual.

Together begins with building a house that was built with the assistance semnagat rotong by the community activists. It also involves various parties in bringing the house material along with the movement of material alms from the board, wood, sand, cement, nails, asbestos, brick and other materials. Various piha also accounts ranging from academics, student activists, creative community, religious leaders, pastors, priests and other citizens

Cangkir Kamisan Community also move struggle to build a creative economy. First, Maternity pojoksamber.com citizen journalism portal is the first step oversee the creative economy. Engaged in citizen journalism facilitate the access of developing the potential of the business or advertising that has or has not grown. Second, create an independent publishing and printing Sai Wawai Publishing reinforce synergy creative industries first formed. Third, the Cangkir Hijau Waste Bank as a struggle in the field of environment-based creative economy. Fourth, then continued growth of creative industries in the sector of research (research) to establish Sai Wawai Institute and the Fifth, the development of Metro Photography, music and documentaries

Cangkir Kamisan Community is a container together with the evolving social activity. Then this community needs to learn from other communities outside the city Metro. This community had studied with the Bandung Creative City Forum (BCCF) in terms of building a creative city. Then this community need to invite all people of various professions, eg lecturers in Metro City to encourage students to be actively involved in the movement of the city. Learning to perform social work, and work in a variety of ways.

It was also necessary for the Community to encourage other intellectuals to build a collective movement. From this and the movement can make his work as a reflection of the thinking and acting grounded in the social field. And of course inputs berbarti important and much needed Cangkir Kamisan Community itself and especially for bergembangnya knowledge in the social movements. []

Bibliography

- Afiff, Faisal, *Pilar-Pilar Ekonomi Kreatif*, Makalah Rangkaian Kolom Kluster I, BINUS University Jakarta. 2012.
- Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Bourdieu, Pierre, *Arena Produksi Kultural*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- , *The Logic of Practice*, Stanford: Stanford University Press, 1992.
- Delee, *Magic Of CreativePreneur*, Jakarta: ABNG Publishing, 2012.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.

- Haryatmoko, *Sekolah, Alat Reproduksi Kesenjangan Sosial*, dalam *Majalah Basis*, No. 07-08, Tahun ke-57, 2008.
- Hatta, Mohammad, "Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia," in Mahasin, Aswab & Ismed Natsir (eds.), 1984, *Cendekiawan dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1953.
- Kautsar R, Maulana, *Peran Intelektual Di Tengah Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Pandangan Pierre Bourdieu: Suatu Telaah Sosiologi Ilmu*, Skripsi Penerbit, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Koentjaraningrat, *Metode Wawancara, dalam Koentjaraningrat* (ed), *Metode Penelitian Masyarakat*. cet. II., Jakarta: Gramedia, 1991.
- Mc Quails, Denis, *Mass Communication Theory*, London: SAGE Publication, 2000.
- Muslih, Muh, *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Mutahir, Arizal, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- Nanji, Azim, *Peta Studi Islam: orientalisme dan arah baru kajian Islam barat*, Cetakan I, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Nenny, Anggraini, *Industri Kreatif*, *Jurnal ekonomi* Desember 2008 Volume XIII No. 3, 2008.
- Rusdiarti, Suma Riella, *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*, dalam *Basis* No. 11-12, Th.52, November-Desember, 2003.
- Takwin, Bagus, "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-Usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Masyarakat," in Harker dkk (ed), *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*, Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Throsby, D, *The Economics of Cultural Policy*. Cambridge University Press, 2010.
- Tim Indonesia Design Power, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, Jakarta: Departemen perdagangan, 2008.
- UNCTAD. *Creative Economy Report 2008*. Geneva: UNCTAD, 2008.

Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif guna menciptakan Lapangan Kerja dan Mengentaskan Kemiskinan dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Edisi 14, Desember 2014.

Pojoksamber.com, <http://www.pojoksamber.com/berita-foto-konsultan-kementrian-pu-dari-perancis-kunjungi-bank-sampah-cangkir-hijau/>, Accessed Oktober 26, 2015

www.populicenter.org

Interview with Oki Hajiansyah Wahab, Director Pojoksamber.com October 3, 2015

Interview with Rahmatul Ummah, Director SWI October 3, 2015

Interview with Bambang Suhada, Lecture at Universitas Muhammadiyah Metro, October 14, 2015

Interview with Rio Dermawan, October 21, 2015

Interview with Sutiyo, Lecture at STISIPOL, November 10, 2015

Interview with Diyan Ahmad Saputra, October 22, 2015

Interview with Lukman Hakim, Director of Bank Sampah Cangkir Hijau , October 23, 2015

Tajhiz Mayit Training in Lamno Aceh Jaya

FAUZI

Faculty of Ushuluddin and Philosophy, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
fauzisaleh09@gmail.com

Abstract: After the earthquake and tsunami hit Aceh in Desember 2004, it is deemed necessary to improve the community awareness on a wide range of issues, one of which is on *tajhiz mayit* (funeral preparation). The Faculty of Ushuluddin and Philosophy of UIN Ar-Raniry Banda Aceh took part to teach the community in Lamno Aceh Jaya on how to perform one of the *fardh kifayah* activities, the *tajhiz mayit*. The training was conducted due to the lack of experts in the village to perform the *tajhiz mayit*, especially after the tsunami, as many of *teungku* (religious leader in Aceh) had passed away. Lamno was one of the most tsunami-affected areas. The Faculty had an annual program held with a variety of activities including *tajhiz mayit*. In Lamno, the training team focused on the method and the *madhhab* (school of thoughts) used, which was Shafi'i. By doing so, the villagers would focus more on the core (*rukun*) procedures in performing *tajhiz mayit*. Meanwhile, being affected by *dayah* of salafi, the focus on details was related to, for instance, *ie tujoh* (seven types of water for purifying) and *ie sikureung* (nine types of water for purifying). The activities were led by senior lecturers under the coordination of Vice Dean of Academic and Institution Affairs. This was because the villagers tended to believe to the elder people. The program was followed with enthusiasm. For the evaluation, the trainer made the final test to see how well they could perform the *fardh kifayah* as mentioned in the Fiqh of Shafi'i guidance. As a team, we focused on Shafi'i *madhhab* and also *adat* (tradition) in the area as we considered them as sensitive issues. The results of the program showed that the participant could catch the training lesson better and 80% of them could understand it well. As for the feedback, many participants hoped to have another training in the future.

Keywords: Training, *tajhiz mayit*, Aceh, Sholat.

Introduction

The tsunami occurred on December 26, 2004 had changed the social, educational, economic, and cultural conditions, as well as many other aspects in Aceh. The disaster, in particular, had tremendously affected the areas of Meulaboh, Calang, Lamno, among others. The 9.3 scale magnitude earthquake and tsunami hit the coast of the Indonesian island of Sumatera at 7:59 a.m. local time. The devastating tsunami was generated with the wave heights exceeding 20m, inflicting widespread destruction in Indonesia, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, India, and 12 other countries around the Indian Ocean.¹

The tsunami had come as a two-sided coin, carrying a problem and a solution at the same time. The solution was especially related to the economy problem. After the tsunami, there were many aids coming into Aceh to improve the condition of the Acehnese economy. Afterwards, the Acehnese people managed to reach a better economy, more especially in the western area.

It is estimated that over 150,000 people were killed and 500,000 people were displaced by the tsunami.² The tsunami gave a chance for the international community to improve Aceh condition in every sector, politically, socially, and economically. Most people in Aceh and North Sumatra and several regions in Indonesia could feel the shake caused by the massive eruption that occurred at that day. About five minutes later, the tsunami hit the northern part of Aceh, the western part of Aceh, and also North Sumatra. Waves as high as 10 m high and a speed of around 800 km per hour hit the city of Banda Aceh. In some places, the waves went inland approximately 7.5 km from the coastline. Waves as high as 12 m hit

¹ Murat Saatcioglu, Ahmed Ghobarah and Ion Nistor, "Effect of The December 26, 2004 Sumatra Earthquake and Tsunami on Physical Infrastructure", *ISET Journal of Earthquake Technology*, Paper no 457, Vol 42 NO 4, December 2005, p. 79

² Peter Bauman, Gazala and Mengistu Ayalew, "Comparative Analysis of the Impact of Tsunami and Tsunami Interventions on Conflict in Sri Lanka and Aceh/Indonesia, *Executive Summary*, The Mellon MIT Inter-University Program on Non-Governmental Organization and Forced Migration, p. 8

Meulaboh, Calang, and Lamno – cities located in the western part of Aceh.³ Lamno was one of the most affected tsunami areas at that time.

The tsunami-demonstrated opportunities did not necessarily lead to positive outcomes in terms of resolving conflict. In Aceh, the destruction caused by the tsunami and earthquake had an enormous impact. Yet, at the same time, the tsunami had led intellectual and education movements.

The training conducted by the Faculty was related to the implementation of four society basic values: values of religion, values of moral, values of habits, and values of law⁴. The principles of the religion are contained in the book of guidance from Allah (Revelation). It consists of the commandment and prohibitions. This holy book eventually guides a human being to be an *insan kamil* (perfect characterized man) who well relates to Allah, another human being, and the nature.⁵

Due to the earthquake and tsunami, Aceh faced a serious problem in practicing Islam (the religion of the majority of Acehnese). Several mosques were destroyed as well as *meunasah* (small mosques). In addition, a number of *teungku* were died, and also many *tajhiz mayit* executors. In regards of the *tajhiz mayit*, Lamno suffered a big loss. Although *tajhiz mayit* is a *fardh kifayah*, related to social contribution, it is important to the community since many executors had died and there was a lack of successors.

Therefore, the Faculty of Ushuluddin and Philosophy conducted a program empowering the capacity of the community in Lamno, Aceh Jaya. The program was named “*Tajhiz Mayit* Training in Lamno Aceh Jaya”. The program was one of *tridharma pendidikan* (three education pillars) of UIN Ar-Raniry Aceh.

A Brief Overview of Lamno Aceh Jaya

Lamno is a capital of Jaya sub-district where most of the areas were affected by the tsunami. Jaya sub-district is located 80 km from Banda Aceh in Southern Aceh. Lamno is known with its religious tourism as it is related to

³ Premo-chandra Athukorala and Budy P. Resosudarmo, “The Indian Ocean Tsunami: Economic Impact, Disaster Management and Lessons, papers presented at the Asian Economic Panel Conference, Keio University, Tokyo, 6-7 March 2005, p. 11.

⁴ Suratman, MBM Munir and Umi Salamah, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang: Intimedia, 2013), p. 211

⁵ Suratman, MBM Munir and Umi Salamah, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang: Intimedia, 2013), p. 212

the history of the arrival of Islam and Portuguese to Aceh. Gle Jong, one of the villages in Lamno, was where the cemetery of Sultan Ala'addin Riayatsyah was found.⁶ Topographically, Lamno has a good panorama especially along the seashores of Kualadaya, Ujong Sudeun, Babah Ie, and so forth.

The tsunami in 2004 had changed the nature of this sub-district tremendously. The victim in this place reached around 5,906 people (women 3,210 and men 2,696). Many facilities were destructed as well as the fields for work. Only some of the fishing fields such as at villages of Kuala Unga and Cinamprong could be used⁷. In fact, there was also a village vanished such as Ujong Sudeun.

Furthermore, many *teungku* became victims of the disaster. The *teungku* held a number of important roles, one of which was to lead and teach people how to practice the religion properly. As a result of the disaster, many problems in practicing religion arouse which included *tajhiz mayit*.

The practicing took place at Lamno, one of among number of kecamatan (*districts*) in Aceh Jay. The district was among location where tsunami struck and make number of victim. The human resource here was should be upgraded as excess of the disaster. Meanwhile, the participants were twenty people and with variety of their ages. Among them were still young and most were old one.

Reasons to Conduct the Training

The training was included in one of at least five type activities done after the tsunami to upgrade the human resource: psycho-education, psychosocial activities, talking groups, individual and family counseling, and training.⁸

Any human being cannot live without any aid from the others. This is known as *zoon politicon*.⁹ In this regards, anyone should have a responsibility as a member of society to maintain other lives in any sectors, including religion, social, economic etc. Therefore, it is unsurprising that

⁶ WWF , “Rehabilitasi Ekosistem di KEcamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, an Report *Green Coast for Nature and People after the Tsunami*, funded by Oxfam, p.2

⁷ WWF , “Rehabilitasi Ekosistem di KEcamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, an Report *Green Coast for Nature and People after the Tsunami*, funded by Oxfam, p.2

⁸ MSF Research, *Medicins Sans*

⁹ Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, p. 84

anyone would do everything they can to help others as the others might do the same for them. With this in mind, the Faculty held the *tajhiz mayit* training for the community in Lamno.

The Faculty expected that the training, as an academic contribution for the community, would have below results:

First, the funeral activities can be conducted by the community members and need not invite other communities. By doing so, the community can stay humble in spending their money in the death costs.

Second, providing the *tajhiz mayit* skill for the village people in Lamno as it is a *Fardh Kifayah*. The skill was dominantly mastered by several people only, and not inclusive to the people in any village. The people were the *pesantren* student or *teungku* and they would be invited to any village when someone died. Therefore, it was difficult in terms of the time and transportation to facilitate them to the village. Again, it was usually to be financed by the invitatory. Therefore, this program was an alternative to help the villagers managed their funeral affairs in the future.

Third, providing the knowledge on *tajhiz mayit*. The community used to think that this practice was very difficult and could only be understood and practiced by several or a few number of people. So, the training would provide them a new view about *tajhiz mayit* and make them feel that they can do this as well as the others did in the past.

According to Tgk Rasyid Ahmadi, the people who can conduct the *tajhiz mayit* are hard to find. The scarcity of the executors can be seen from one person, out of five villages, who is capable to conduct the *tajhiz mayit*. Therefore, in times of emergency, the religion allows the family to perform the *tajhiz mayit* such as the children etc.¹⁰

Fourth, making optimal the youth potential and improve their capacity to understand and be skillful on what to do toward the death/corpse. Thus, the youth should be well prepared.

Theoretical Review of *Tajhiz Mayit*

The rules of *tajhiz mayit* in the madhhab of Shafi'i followed a strict procedure, as Shafi'i himself had always done when producing a new jurisprudence. The procedure was: first referring to the Quran and Hadith,

¹⁰ Interviewed with Tgk. Rasyid Ahmadi in 19 June 2016 in Banda Aceh

then with *ijma'* (consensus), *qiyas* (analogy), *ijtihad* (personal reasoning), *istihsan* (juristic preference), and *ikhtilaf* (disagreement).¹¹

Washing the Dead

The dying person should be asked to pronounce: *La ilaaha illallaah* before death. The prophet Muhammad peace be upon him said: ask your dying fellows to pronounce: *Laa Ilaaha illallaah*. (Reported by Muslim, Abu Dawood, Al-Trimidhi, al-Nasa'I and Ibn Majah. ¹²

Preparing the dead for burial is a *fardh kifayah* (communal duty), meaning that if some Muslims properly carry out this duty, then the other Muslims are exempt from the responsibility. Preparing the dead for burial consists of the following: bathing the dead, wrapping the body with a shroud, praying for the dead and burying the body. ¹³

A deceased male should be washed by men while a deceased female should be washed by women. Family members who are *mahrms* to each other are also permitted to bathe the other after death. ¹⁴

The *ghusl* (showering) should be done behind the closed door. It is disliked for anyone who is not needed for *ghuls* to be available, even if he/she is a relative of the deceased. Washing the body of the deceased should be in three or more times. The washes should be in *witr* (odd number), and the water in one of the washes should be mixed with a cleansing material such as soap.¹⁵

It is recommended that the body be laid on an elevated platform off of the floor, the body stripped of its clothes and the area between the naval and the knee covered. Those bathing the body should press the abdomen of the deceased to release any impurities. Impurities should be removed and washed off of the body. The person should wrap a cloth around his/her hand to wash the private parts of the dead since touching the private parts is

¹¹ Muhammad ibn Idris al-Shafi'I, *al-Risalah fi Usul al-Fiqh (Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence)*, translated by Majid Khadduri, (t.tp: Kalamullah, 1961), p. 46

¹² Mohammed Baianonie, "The Basic Rules of Islamic Funeral", *paper*, p. 2.

¹³ Mohammed Baianonie, "The Basic Rules of Islamic Funeral", *paper*, p. 2.

¹⁴ Mohammed Baianonie, "The Basic Rules of Islamic Funeral", *paper*, p. 2.

¹⁵ Muhammad Nasruddin al-Bani, *Funeral Regulation in Islam* translated by Yahya Mohhammad al-Husein, p. 10

forbidden. The body is washed three times with water and soap starting with the right side.¹⁶

Kafan (shroud) should be prepared. The person(s) who is washing the dead should wrap a piece of cloth around his hand and wear gloves. It is *mustahba* not to touch the body of the dead barehanded. As for the *awrah*, one must wrap a piece of cloth around his hand before washing it, because touching the private parts of the dead is *haram*.¹⁷

It is obligatory that the body be covered by at least a single shroud; clean, white better, be perfumed, should consist of three pieces for the male and of five pieces for the female.¹⁸

The body of the deceased should be stripped of clothes (gently) but his *awrah* (private parts) should be covered. The stomach of the deceased should be pressed lightly so as to expel any remnants from it. The body should then be washed of all impurities.¹⁹

Funeral Prayer

It is better that those praying divide themselves into three rows facing the *qibla* with the imam in front. The imam should stand at the head of the body if the deceased is a man and middle of the body if she is a woman. If there are more than one body, then they should put one in front of the other, those of the men nearest to the imam and those of the women furthest from him. Having appropriate *neeyat* (intention) in heart, raised the hand in the usual manner and say Allah Akbar, read al-Fatihah at first rakaat, *shalawat* at second, du'a at the third and the forth.²⁰

The funeral prayer is also a collective obligation or *fardh kifayah*. If a miscarried foetus is four months old or more, then it should be washed and funeral prayer offered for it. However, if it is less than four months old, it

¹⁶ Mohammed Baianonie, "The Basic Rules of Islamic Funeral", *paper*, p. 5.

¹⁷ Muhammad Nasruddin al-Bani, *Funeral Regulation in Islam* translated by Yahya Mohhammad al-Husein, p. 12

¹⁸ Mohammed Baianonie, "The Basic Rules of Islamic Funeral", *paper*, p. 6.

¹⁹ Mohammed Baianonie, "The Basic Rules of Islamic Funeral", *paper*, p. 6.

²⁰ *Preparation of The Deceased and Janazah Prayer*, www.islamicity.com

may not be washed, nor may a funeral prayer be offered for it. It should be wrapped in a piece of cloth and buried.²¹

Implementing Tajhiz Mayat based on Shari'ah and 'Adat Preparation of Tools

The first step before coming to Lamno Aceh Jaya, the Faculty provided a number of things related to practicing the *tajhiz mayat* (funeral procession).

For documentation:

- a. Paper, used for documenting; the participants should write on it to record things delivered by the tutor.
- b. White Board, used for writing so it could be seen by all participants.
- c. Marker, used for writing on the board.

For bathing:

- a. A doll, for practice.
- b. Water should be sufficient. Two, four or five cups should be based on the need. The water should be *muthlaq water*.
- c. The cups available are at least three.
- d. The soap should be used for bathing the corpse, added with *on jaloh* and other leaves such *on bada*. These leaves should be pounded or grinded, and later should be mixed. *On jaloh* specifically has much foam and also should be mixed with things with fragrant smell such as *on seuke* leaves, or flower leaves such *seulanga*. All of these should be pounded to become powder, and then poured in water in a bucket. They should be mixed together to give off fragrance. This will be used in *ie sikureung* (nine types of water) in the end processing of bathing).
- e. Banana leaves (*peuleupeuk pisang*) are used for throwing out the *najis* (remnants) of the corpse. It will be positioned under the buttock for the release of the remnants from the stomach.
- f. Cups
- g. One or two sticks of coconut leaves used for cleaning the nail while the dirty position in side.
- h. Soap

²¹ Muhammad Nasruddin al-Bani, *Funeral Regulation in Islam* translated by Yahya Mohhammad al-Husein, p. 16

- i. Cotton used for putting into *qubul* to keep other *najis* out again after bathing is done.

For shroud

- a. A doll, for practice
- b. Shroud
- c. Scissors
- d. Perfume (*kemenyan*, chamfer, *ie bungong*)
- e. A long cloth

For prayer

- a. The box for putting the corpse in
- b. The mat especially leaves, such as banana leaves

Practicing

The practice was guided by a *teungku* (Islamic leader and also lecturer of Ushuluddin and Philosophy Faculty). A *teungku* should have been trusted by the community in Aceh. Therefore, the Faculty chose a lecturer with a *dayah* (classic Islamic boarding school) background. The lecturer, Mr. Abdul Rasyid, has an experience as he is also a *teungku* in his village, other than being a lecturer at the Faculty of Ushuluddin and Philosophy.

First, in each group the participants were limited to ten people for one level. The other level will be in next turn. This first group should prepare pen and paper to write the materials of *tajhiz mayit*. They should write du'a (sublimation) uttered in every step. Next, they should write the steps systematically from how to bath, wrap shroud, and pray before funeral.

The trainer asked the participants to pay attention to the du'a. The du'a had been written by the trainer and copied to be distributed to all of the participants. The du'a were all simple to be uttered and then they performed the *tajhiz mayit* practice.

- a. Bathing

For bathing, at least three persons were needed to hold the corpse. They sat in position of the head, the middle, and the feet of the corpse. The most recommended people to bathe are the immediate family such as the children etc. If not, any person who can be trusted to conceal the *aib* (the flawed or lame) of the corpse is allowed. Bathing should be done in

closed area such as the room to keep the secret of the corpse. The male deceased should be showered by men, and likewise for the female.

The corpse was put laid on the back with the face at the top. The head should be in the eastern direction and the feet in the west (facing the *qibla* direction). Water was poured from the head. After that, the executor should utter the du'a: *saja lon peumano mayet nyo karena Allah Ta'ala* (I bathe the corpse for the sake of Allah).

Before bathing, the executors should bring out all the *najis* or dirt off the body of the corpse, including from *dubul* or *qubul*, nose, under the nail, and earhole. Everything that could prevent or be a barrier to the water spreading evenly in the skin should be eliminated. Then, the executors should scrub the skin of the corpse softly. Bathing should cover all parts of the body and be cleaned completely. First to bathe was the right side, and then, the other side. Afterwards, the water was poured on the whole body.

The next turn was *tathir* (purification) with pouring water. At this step, the white cloth was put into *qubul* so that the executors could see any color remnants out from the stomach. If it appeared to be yellow, they should pour water and clean the body again until nothing came out from the stomach. After it was done, they put cotton into any hole of the corpse.

Then, *ie sikureung*. This was a bucket of water mixed by fragrances such as sandalwood, seulanga flowers, chamfer, etc. It contained approximately nine cups of water. Then, the corpse was positioned at the elevated right side. Here, the executors should pour this mixed water with the cup onto the corpse while saying: *ghufranaka Ya Allah Rabbana wa Ilayka al-Masir* (3 times). The pouring of the water was done three times. Next, they poured the water on the left side up while saying *ghufranaka Ya Allah Rabbana wa Ilayka al-Masir* (3 times). Afterwards, the corpse was laid on the leaf mat, and the executors uttered: *ghufranaka Ya Rahim Rabbana wa Ilayka al-Masir* (3 times). This concluded bathing the corpse.

The next step was *wudu* (ablution). First, the executors took a stick and put cotton on it and then cleaned the teeth of the corpse. They washed the corpse face with *niyyat* (intention), and then followed by the hand, the head and the feet. After *wudu*, they covered the corpse with a long cloth to keep the corpse away from the dirt.

b. Shroud

Shroud should be 80 cm extra-long from the real length of the corpse. It should be easy to be tied, with at least three pieces. If it has small width, two pieces of cloth should be separated into two to make the cloth larger. With three pieces, the cloth should be layered and put in the middle as the shirt. Another thing needed was sarong. It was put from the nail until knee for male and until feet for female. It was used as *serban* for male and *jilbab* for female. Then, 5 ropes were needed. They were used in the hand, the feet and also the head. Another was the big cotton with the fragrance in circle form. The cotton was put on the face.

In this step, the corpse was covered with the shroud from the left tightly while being laid on the floor. The second and third layer would be done in the same position. The position would be better if the head faced the west. Next, the corpse should be tied tightly with the rope wearing the shirt and sarong. Tying should be in the feet, the knee, the shoulder, and the head. All should be in 7 layers. The base was three layers of cloth, and then the shirt and sarong made up five, and *serban* would be six, and the ropes made it seven. One layer to another layer was allowed to connect.

The shroud used consisted of three pieces for male and five pieces for female. The first would be torn as well.

c. Prayer

The imam stood by the head for the male and in the middle for the female.

The funeral prayer consisted of 4 *rakaat* (without ruku' and sujud). This prayer was performed by standing up only, and then starting the takbir (*Allah Akbar*) and uttering al-Fatihah in the first rakaat. Then, the imam read the *al-Fatihah* in the second rakaat. In the third, the imam read the du'a *Allahumma ighfir lah*, and read the du'a *Allahumm la tahrimna ajrah* in the fourth rakaat. The imam to lead the prayer should be *alim* (teungku).

- d. Hole, 1 ¼ height for man, 1.5 height for woman, length and width should be based on the corpse. The corpse should be brought from the feet or from the right of left side. The position of corpse should follow the position in a prayer. In the hole, there was also *Bantal*, the dust put in small sarong. The wood should be in triangle on the corpse. Then, the dust was poured on it slowly.²²

²² Interviewed with A. Rasyid Ahmadi on Monday, 19 Juni 2016

Evaluating

The trainer evaluated the group to see their understanding. He asked them to practice it. The evaluation included, first, whether they memorized the *du'a*. Second, if the participant could cut the cloth and how many parts should be cut. Third, if they knew how to shower the corpse and cover all the body and also, if they could clean the remnants.

Suggestions

The suggestions here were to guide the participants to practice what they have studied. They could see the practice of *tajhiz mayit* when someone died at their village. However, the practice should be performed continuously, otherwise, they would forget the knowledge on the *tajhiz mayit*.

The Community Feedback

Generally, the community appreciated the program. They wanted to practice more since it is an importance to their daily practice. Today, the practice is only exclusively conducted by the *dayah* alumni. However, the problem could be solved appropriately.

According to Damanhuri Basyir, the practice was successful and the participants were very enthusiastic. Many participants asked to redo the practice in the next time to make sure that they were capable of doing it.²³

Juwaini, the program leader, said that *tajhiz mayit* might be a continued program in Lamno. The community appreciated the program because it could improve their capacity as well enhance their skills in their daily life.²⁴

In this case, the writer saw that the program was very useful for today's community. This is because religious activities play an important role in Aceh society life. Thus, the modernity will not disrupt the development of religion in every aspect of life.

²³ Interviewed with Damanhuri Basyhir, Dean of Ushuluddin and Philosophy Faculty, UIN Ar-Raniry Aceh, 17 June 2016.

²⁴ Interviewed with Juwaini, Vice of Dean of Ushuluddin UIN Ar-Raniry Aceh, Relationship Affairs

Society Effect

The most thing of this is to see how to far the society effect after training was held. The participants were very interested with the training. The participants understood the general theories related to *tajhiz mayit* and felt the practice was too difficult as far as they paid attention. The trainer felt what training had succeeded and to the goal. The first term, the training aimed to make the participants understand the point especially the general theories. The training should be continued in the next term. The next term will be focused to practiced by everyone how to perform the *tajhiz*. The training has been executed in the first term by trainer. It aimed to guide them to pay attention how to practice it. By this training, the participants would think and reflect it in their daily life. It was hoped it would make ease to practice in second and third term.

The trainer convinced they had a potency to develop their knowledge and practice in their daily. Life. In this term, not all participants could practice it, it 's just several of them as samples for this. For the second term, it's hope all participants will practice to convince their ability. The way is by making several group with one tutor for each group

Conclusion

The *tajhiz mayit* practice was a demand considering the situation and condition of the people in Lamno Aceh Jaya. In addition, Lamno's economy had been very badly affected after the tsunami. In terms of the *tajhiz mayit* training, the madhhab used was of the Shafi'i.

After the training, the participants and the rest of community were very pleased. The trainer also felt satisfied for their basic level of *tajhiz mayit*. Therefore, it is recommended that they practice *tajhiz mayit* daily, weekly, monthly or annually. In the longer term, the Faculty will hold another similar training according to the demand of the community.

Bibliography

Muhammad ibn Idris al-Shafi'I, *al-Risalah fi Usul al-Fiqh (Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence)*, translated by Majid Khadduri, (t.tp: Kalamullah, 1961)

Muhammad Nasruddin al-Bani, *Funeral Regulation in Islam* translated by Yahya Mohhammad al-Husein

Murat Saatcioglu, Ahmed Ghobarah and Ion Nistor, “Effect of The December 26, 2004 Sumatra Earthquake and Tsunami on Physical Infrastructure”, *ISSET Journal of Earthquake Technologi*, Paper no 457, Vol 42 NO 4, December 2005, p. 79

Peter Bauman, Gazala and Mengistu Ayalew, “Comparative Analysis of the Impact of Tsunami and Tsunami Interventions on Conflict in Sri Lanka and Aceh/Indonesia, *Executive Summary*, The Mellon MIT Inter-University Program on Non-Governmental Organization and Forced Migration

Premo-chandra Athukorala and Budy P. Resosudarmo, “The Indian Ocean Tsunami: Economic Impact, Disaster Management and Lessons, papers presented at the Asian Economic Panel Conference, Keio University, Tokyo, 6-7 March 2005

Suratman, MBM Munir and Umi Salamah, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang: Intimedia, 2013)

WWF , “Rehabilitasi Ekosistem di KEcamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, an Report *Green Coast for Nature and People after the Tsunami*, funded by Oxfam

Pendekatan Etnomatematika dalam Permainan Tradisional Anak di Wilayah Kerapatan Adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi

NUR RUSLIAH

Universitas Negeri Padang
nur.rusliah1979@gmail.com

Abstrak: Belajar matematika cenderung formal dan kaku serta kurang menyenangkan. Disamping itu pemahaman tentang nilai-nilai dalam pembelajaran matematika yang disampaikan para guru belum menyentuh keseluruhan aspek yang mungkin. Terdapat hubungan yang saling asing antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan keseharian siswa setempat, sehingga hal ini menyebabkan matematika sulit dipahami oleh siswa. Etnomatematika merupakan representasi kompleks dan dinamis yang menggambarkan pengaruh kultural penggunaan matematika dalam aplikasinya. Saat ini permainan tradisional mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan teknologi. Padahal, permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang pada hakikatnya merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Terlebih pada wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi yang sangat kental suasana adat budayanya. Penelitian ini bertujuan ingin menggunakan pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan sosial budaya anak. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak “ingkek-ingkek” berhasil membawa materi matematika yaitu materi pengenalan angka, bangun datar dan probabilitas kedalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, serta sesuai kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan tradisional dan Pembelajaran Matematika.

Pendahuluan

Adakalanya matematika sulit dipahami oleh siswa karena proses belajar matematika cenderung formal dan kaku serta kurang menyenangkan. Disamping itu pemahaman tentang nilai-nilai dalam pembelajaran matematika yang disampaikan para guru belum menyentuh keseluruhan aspek yang mungkin. Ada indikasi terdapat hubungan yang saling asing antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan keseharian siswa setempat. Siswa sekolah dasar yang berada fase kongkrit dan masa bermain membutuhkan suatu sentuhan materi matematika yang nyata dan sering dijumpainya serta menyenangkan. Permainan tradisional adalah salah satu aktivitas yang menyenangkan dan hal yang dekat dengan anak-anak dalam hal ini siswa sekolah dasar.

Saat ini permainan tradisional mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan teknologi. Padahal, permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang pada hakikatnya merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Terlebih pada wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi yang sangat kental suasana adat budayanya.

Sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika saat mengajar adalah etnomatematika. Jika kita lihat negara-negara lain, keberhasilan negara Jepang dan Tionghoa dalam pembelajaran matematika karena mereka menggunakan Etnomatematika dalam pembelajaran matematikanya¹.

Dalam kutipan Edy Tandililing, Gardes menyatakan Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh/petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya². Dari definisi seperti ini, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno (etnis) atau suku. Jika ditinjau dari sudut pandang riset maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya (*cultural antropology of mathematics*) dari matematika dan pendidikan matematika.

¹ Hadi Kasmaja. *Sebuah Ide Penelitian Matematika Dalam Perspektif Lokalitas Budaya*. (2013)

² Edy Tandililing. *Pengembangan pembelajaran matematika sekolah dengan pendekatan etnomatematika berbasis budaya lokal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah*. UNTAN (2013)

Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat. Budaya merupakan sistem nilai dan ide yang dihayati oleh sekelompok manusia di suatu lingkungan hidup tertentu dan di suatu kurun tertentu. Kebudayaan diartikan sebagai semua hal yang terkait dengan budaya. Dalam konteks ini tinjauan budaya dilihat dari tiga aspek, yaitu *pertama*, budaya yang universal yaitu berkaitan nilai-nilai universal yang berlaku di mana saja yang berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan atau teknologi. *Kedua*, budaya nasional, yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara nasional. *Ketiga*, budaya lokal yang eksis dalam kehidupan masyarakat setempat³.

Pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai luhur bangsa kita, yang berdampak pada pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai budaya yang luhur. Seperti dalam Al-Qur'an pada surat Yunus ayat 101. Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an membimbing manusia agar selalu memperhatikan dan menelaah alam sekitar, karena dari lingkungan manusia juga bisa belajar dan memperoleh pengetahuan.

Selama ini pemahaman tentang nilai-nilai dalam pembelajaran matematika yang disampaikan para guru belum menyentuh keseluruhan aspek yang mungkin. Menurut Soedjadi yang dikutip oleh Wahyu Fitroh & Nurul Hikmawati matematika dipandang sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam dunia sains saja, sehingga mengabaikan pandangan matematika sebagai kegiatan manusia⁴. Pandangan itu sama sekali tidaklah salah, keduanya benar dan sesuai dengan pertumbuhan matematika itu sendiri.

Pertimbangan lain bahwa matematika yang diperoleh di sekolah tidak cocok dengan cara hidup masyarakat setempat, sehingga matematika sulit dipahami oleh siswa karena ada dua skema yang diperoleh yaitu skema yang diperoleh di lingkungan dan skema yang diperoleh di sekolah. Dalam penelitian Agung Hartoyo, Bishop berpendapat matematika itu pada

³ Astri Wahyuni, Ayu Aji Wedaring, & Budiman Sani. *Peran Etnomatematika Dalam Membangun Karakter Bangsa*. UNY

⁴ Wahyu Fitroh & Nurul Hikmawati. *Identifikasi Pembelajaran Matematika Dalam Tradisi Melemang di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. UNJA (2015)

hakekatnya tumbuh dari keterampilan atau aktivitas lingkungan budaya, dan Pinxten juga mengatakan matematika seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Matematika yang berkembang dalam lingkungan masyarakat, oleh Bishop disebut *ethnomatematics*. “*Ethnomathematics in the elementary classroom is where the teacher and the students value cultures, and cultures are linked to curriculum*” yang dinyatakan oleh Barta & Shockey⁵. Etnomatematika merupakan representasi kompleks dan dinamis yang menggambarkan pengaruh kultural penggunaan matematika dalam aplikasinya.

Matematika bukanlah domain pengetahuan formal yang universal, tetapi merupakan kumpulan representasi dan prosedur simbolik yang terkonstruksi secara kultural dalam kelompok masyarakat tertentu. Ketika pemikiran peserta didik berkembang, mereka menggabungkan representasi dan prosedur ke dalam sistem kognitif mereka. Suatu proses telah terjadi dalam konteks aktivitas yang terkonstruksi secara sosial. Keterampilan matematika yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah tidak terkonstruksi secara logis dan berdasarkan pada struktur kognitif abstrak, melainkan sebagai kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya serta sebagai masukan (budaya) baru dimana aktivitas yang melibatkan bilangan, pola-pola geometri, hitungan dan sebagainya dianggap sebagai aplikasi pengetahuan matematika.

Dengan demikian menjadi hal yang penting untuk memberdayakan masyarakat adat dan pihak sekolah menggunakan “Pendekatan Etnomatematika dalam Permainan Tradisional Anak Di Wilayah Kerapatan Adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan sosial budaya anak di wilayah kerapatan adat Koto Tengah kota Sungai Penuh propinsi Jambi?

Metode Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di wilayah kerapatan adat Koto Tengah termasuk orang tua siswa serta guru sekolah. Metode Kegiatan yang digunakan adalah Demonstrasi permainan tradisional dan Fokus Group

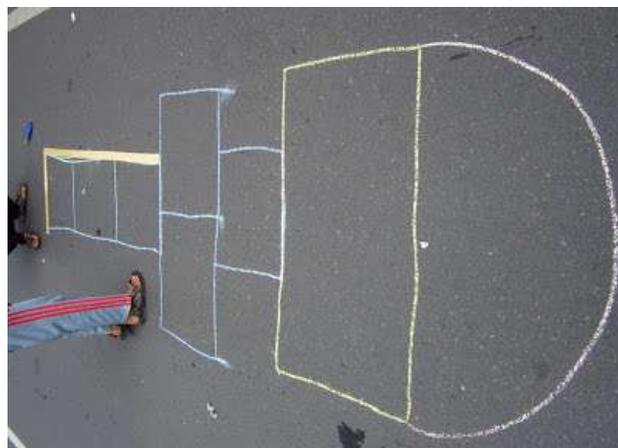
⁵ Agung Hartoyo. *Eksplorasi Matematika pada budaya masyarakat dayak perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Sanggau Kalbar*. UNTAN (2012)

Discussion. Pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan Komunitas Sahabat Matematika beranggotakan mahasiswa-mahasiswi tadrir Matematika STAIN Kerinci.

Diskripsi Permainan Tradisional

Adapun jenis permainan anak di Koto Tengah yang akan dikupas dengan pendekatan etnomatematika adalah permainan ingkek-ingkek. Permainan ini sering disebut dengan engklek, memiliki nama lain yaitu Sunda manda. Engklek adalah salah satu permainan tradisional yang terkenal di Indonesia, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Engklek dapat kita jumpai di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Engklek memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Khusus di Jawa permainan ini disebut Engklek, dan pada umumnya permainan ini banyak dimainkan oleh kaum perempuan. Di beberapa tempat disebut pula dengan nama permainan taplak, terbagi atas taplak meja dan taplak gunung. Ada dugaan bahwa permainan ini berasal dari “Zondag-Mandag” berlatar belakang tentang cerita perebutan sawah yang berasal dari negeri kincir angin yaitu Belanda, versi mereka zondag mandag pun diartikan sebagai Sunday Monday, yang telah menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial Belanda.

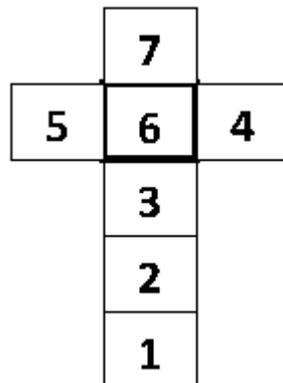
Namun ada seorang sejarawan yang mendeskripsikan bahwa permainan engklek bukanlah berasal dari Belanda, menurut Dr. Smupuck Hur Gronje, permainan engklek adalah sebuah permainan yang berasal dari Hindustan yang kemudian diperkenalkan di Indonesia. Itulah yang menyebabkan engklek terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, meskipun setiap provinsi nya memberikan nama yang berbeda-beda.



Gambar 1. Taplak gunung

Permainan engklek ini sangat digemari oleh para anak-anak. Pemainnya berjumlah dua sampai lima orang. Permainan ini memberikan nilai edukasi dalam hal membangun “rumah”-nya. Atau bisa diartikan sebagai perjuangan seseorang dalam meraih wilayah kekuasaannya. Wilayah yang diperebutkan diraih bukan dengan cara saling menyerang saat di arena permainan, melainkan ada aturan mainnya sendiri. Dan aturan tersebut merupakan kesepakatan masing-masing pemain untuk mendapatkan tempat berpijak.

Sistem permainannya juga sederhana, pada awalnya para pemain menggambar petak-petak engklek atau rumah engklek di atas tanah. Kemudian para pemain diwajibkan memiliki “imat atau gacuk”. Adapun imat atau gacuk itu adalah pecahan genting ataupun keramik yang bentuknya lepes ataupun bisa dari batu tipis yang permukaannya melebar, kenapa harus melebar? Imat atau gacuk yang melebar sangat berguna agar ia tidak mudah lari keluar dari garis petak yang digambarkan saat dilempar, jika imat atau gacuknya bulat maka ia akan sangat mudah menggelinding ke luar garis yang telah ditentukan.



Gambar 2. Taplak meja

Kemudian saat ingin memulai bermain, imat atau gacuk nya dilempar terlebih dahulu ke dalam petak yang telah digambarkan, apabila gacuk yang dilempar melewati garis ketentuan maka pemainnya yang melempar dianggap kalah satu sekali dan harus diganti dengan pemain yang satu lagi, dan apabila gacuk nya tepat berada di dalam petak yang digambarkan maka ketentuan selanjutnya si pemain boleh melanjutkan permainannya, dan petak yang berisi imat atau gacuk tersebut tidak boleh diinjak melainkan harus dilompati satu langkah dan begitu seterusnya. Pemain yang kesempatannya lebih banyak bermain dan tidak salah dalam melemparkan

imat atau gacuk nya, itu berarti ia telah memiliki banyak arena yang telah dimenangkan, dan ia layak dijadikan pemenang. Permainan ini sangat seru dan menyenangkan, karena kita dilatih untuk belajar melempar dengan tepat sasaran, jika gacuk atau imat nya melewati garis tidak tepat di kotaknya maka ia tidak akan bisa menjadi pemenang dalam permainan tersebut.

Secara khusus permainan tradisonal “ingkek-ingkek” di desa koto tengah ada sedikit berbeda dengan permainan engklek. Pertama dari sisi penamaan peralatan permainan, bentuk permainan, aturan permainan dan cara permainan. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan

1. Arena permainan

Arena permainan tradisonal “ingkek-ingkek” ada beberapa macam sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemain, seperti :

a. Lumpak rok

Lumpak rok adalah sebuah zona permainan yang mana arena permainan dibuat seperti rok (pakaian wanita)

b. Lumpak panjang

Lumpak panjang adalah sebuah zona permainan yang mana arena permainan dibuat seperti persegi panjang yang berhimpit terdiri dari 2 kolom, sedangkan baris boleh lebih dari dua.

c. Lumpak tangga

Lumpak tangga adalah sebuah zona permainan yang mana area permainan dibuat seperti tangga.

d. Lumpak lupis

Lumpak lupis adalah sebuah zona permainan yang mana area permainan dibuat seperti lupis (makanan tradisonal nusantara)

2. Gundu

Gundu difungsikan sebagai alat penentu “salah/benar”, “mati/lanjut” pada proses permainan. Batu pipih yang berukuran telapak tangan biasanya dipakai sebagai gundu dalam permainan ini

Bentuk Permainan

1. Berkelompok

Permainan berkelompok terdiri dari 1 orang sebagai ketua tim dan yang lain sebagai anggota tim. Ketua tim bermain hampir sama seperti anggota lain, hanya saja ketua tim mempunyai tugas tambahan sebagai pengumpul gundu anggota nya pada setiap pelemparan gundu di arena.

Jika ketua tim “salah/mati” maka salah satu anggota bisa mengambil alih sebagai ketua tim baru. Permainan berkelompok ini bisa dilakukan oleh 2 atau lebih kelompok.

2. Individu (Tanpa Kelompok)

Permainan individu atau permainan tanpa kelompok ini dilakukan 2 dan 3 orang pemain, dimana individu-individu yang bermain langsung mempunyai tugas seperti ketua tim pada permainan berkelompok.

Aturan Permainan

1. Pada permainan berkelompok, jika ketua tim salah/mati maka anggotanya berhak mengambil alih posisi ketua tim baru.
2. Pada permainan berkelompok ketua tim bertugas sebagai pengumpul gundu dari anggota nya pada tipa pelemparan
3. Dinyatakan kalah/mati jika :
 - a. Gundu yang dilempar jatuh tepat pada garis arena
 - b. Kaki menginjak garis arena
 - c. Gundu jatuh ketanah sebelum proses peleparan
 - d. Melanggar peraturan peraturan tambahan pada permainan (peraturan tambahan dibuat atas persetujuan bersama)

Cara bermain

1. Untuk menentukan siapa atau kelompok siapa yang akan memulai terlebih dahulu permainan maka dilakukan suit, siapa atau kelompok siapa yang menang suit maka berhak untuk memulai permainan. Pada permainan kelompok yang melakukan suit adalah setiap ketua kelompok.
2. Meletakkan gundu pada petakan pijakan awal, baik gundu yang bermain maupun gundu lawan
3. Petakan yang di dalamnya terdapat gundu baik gundu yang bermain maupun gundu lawan tidak boleh untuk dipijak. Jika di pijak maka dinyatakan kalah/mati.
4. Setelah diambil gundu pada petakan awal dan dibawa keluar arena maka gundu tersebut di lempar kembali pada petakan kedua
5. Setelah di lempar pada petakan kedua maka pemain boleh melanjutkan permainan dan mengambil kembali gundu pada petakan kedua dan di bawa kembali keluar arena, untuk dilempar kepada petakan ketiga
6. Setelah di lempar pada petakan ketiga maka pemain boleh melanjutkan permainan dan mengambil kembali gundu pada petakan ketiga dan di bawa kembali keluar arena, untuk dilempar kepada petakan keempat.

7. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga seluruh petakan telah pernah terisi oleh gundu pemain.
8. Setelah semua petakan pada arena sudah pernah diisi oleh gundu pemain, maka pemain melakukan “alih gundu”, sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah permainan. “Alih gundu” adalah sebuah kegiatan dimana pemain meletakkan gundu pada telapak tangannya dan membawa gundu tersebut ke petakan akhir arena, setelah sampai dipetakan akhir arena gundu tersebut dialih atau dipindahkan dari telapak tangan ke punggung tangan dengan cara melambungkan gundu keatas, pada saat gundu dilambungkan maka tangan pemain harus ditelungkupkan sehingga gundu tersebut ditangkap kembali oleh punggung tangan. Alih gundu dilakukan sebanyak 10 hingga 50 kali alih (sesuai dengan kesepakatan bersama).
9. Setelah gundu berada dipunggung tangan maka pemain membawa gundu kembali keluar arena dengan tetap gundu berada dipunggung tangan
10. Jika gundu jatuh maka dinyatakan mati/kalah
11. Setelah gundu berhasil dibawa keluar arena maka pemain berhak mendapatkan hadiah permainan berupa pemilihan “bintang” dengan cara gundu yang terletak di punggung tangan dilempar ke dalam arena, petakan mana yang dituju oleh gundu maka petakan itu disebut “bintang”.
12. Bintang yang dimenangkan oleh pemain, maka pemain lawan tidak mempunyai hak untuk menginjak bintang tersebut selama permainan berlangsung.
13. Pemain yang memperoleh banyak bintang dinyatakan menang.

Manfaat Permainan Engklek :

- o Meningkatkan kemampuan fisik setiap pemainnya, melalui lompat melompat yang dilakukan, jadi dapat melancarkan peredaran darah.
- o Melatih keseimbangan badan, karena engklek hanya dimainkan oleh satu kaki
- o Mengasah kemampuan bersosialisasi seseorang dengan orang lain serta memberikan nilai kebersamaan pada saat permainan dilaksanakan.
- o Memiliki kemampuan untuk berusaha menaati peraturan yang telah menjadi kesepakatan antar para pemainnya.

- Menyongsong kecerdasan logika pada pemainnya, karena dalam permainan ini seseorang juga diajarkan berlatih berhitung dan tahap-tahap yang harus dilewatinya.
- Menjadi lebih kreatif, karena jenis permainan tradisional pada umumnya dibuat langsung oleh para pemainnya langsung, menggunakan barang-barang yang ada di sekitar lingkungannya, kemudian diolah menjadi suatu permainan yang menyenangkan. Hal ini lah yang membuat mereka menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan permainan.

Adapun aspek matematika dalam permainan ini adalah sebagai berikut:

- Pengenalan Angka-angka dan berlatih berhitung.
- Pengenalan bangun datar yang terdapat pada lumpak atau petak-petak engklek atau rumah engklek di atas tanah.
- Konsep probabilitas dalam proses penggunaan guncu/gacuk/imat untuk menentukan “salah/benar” atau “mati/lanjut”.



Gambar 3. Permainan ingkek-ingkek di Koto Tengah

Setelah kegiatan ini dilaksanakan diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Para orang tua memahami pentingnya permainan tradisional dimana tidak hanya melestarikan budaya tetapi sekaligus memuat materi pembelajaran matematika.
2. Guru sekolah merasa terbantu dengan adanya metode permainan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika di sekolah.
3. Anak-anak di wilayah kerapatan adat Koto Tengah menjadi lebih ceria dalam kesaharian dengan mulai digalakkan kegiatan “Rabu Gembira bersama Matematika” dimana kegiatannya berisi kegiatan bermain permainan tradisional dan permainan matematika yang menyenangkan.

4. Pemuda dan Mahasiswa semakin tergerak untuk ikut berpartisipasi menggunakan pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak lainnya serta merasa bangga berbagi kemampuan matematika.

Kesimpulan

1. Pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak “ingkek-ingkek” berhasil membawa materi matematika yaitu materi pengenalan angka, bangun datar dan probabilitas kedalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, serta sesuai kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.
2. Selain itu juga dari kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru sekolah tentang pentingnya pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan sosial budaya anak di wilayah kerapatan adat Koto Tengah kota Sungai Penuh propinsi Jambi.

Daftar Pustaka

- Afifuddin,dkk. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Agung Hartoyo. 2012. *Eksplorasi Matematika pada budaya masyarakat dayak perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Sanggau Kalbar*. UNTAN
- Astri Wahyuni, Ayu Aji Wedaring, & Budiman Sani. *Peran Etnomatematika Dalam Membangun Krakter Bangsa*. UNY
- Departemen Agama RI Jakarta. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Mahkota Surabaya.
- Edy Tandililing. 2013. *Pengembangan pembelajaran matematika sekolah dengan pendekatan etnomatematika berbasis budaya lokal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah*. UNTAN.
- Elly M. Stiadi, Kama Abdul Hakam, & Ridwan Effendi. 2007. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Euis Eti Rohaeti. *Transformasi Budaya Melalui Pembelajaran Matematika Bermakna Di Sekolah*. UPI

- Hadi Kasmaja. 2013. *Sebuah Ide Penelitian Matematika Dalam Perspektif Lokalitas Budaya*.
- Herman Wasito. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Joko Tri Prasetya. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy j. Meleong. 1995 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offest.
- Maximus Tamur. 2012 *Pembelajaran kooperatif Tipe STAD Berbasis Etnomatematika Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis Mahasiswa PGSD*. UPI.
- Moh Nasir. 2015. *metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pedidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offest.
- Wahyu Fitroh & Nurul Hikmawati. 2015. *Indentifikasi Pembelajaran Matematika Dalam Tradisi Melemang di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. UNJA

Pemberdayaan Pengolahan Air Kelapa Secara Partisipatif di Desa Dik Kodik Gapura Timur Melalui Program Pembinaan UMKM KJKS BMT NU Gapura

SRI HANDAYANI, FATATI NURYANA, AINUR RAHMAN HIDAYAT

STAIN Pamekasan, Indonesia
fnuryana@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan hasil peningkatan kreativitas dan pendapatan melalui pemberdayaan pengolahan air kelapa. *Home industry* minyak *klettek* di desa Dik Kodik Gapura Timur menyisakan hasil sampingan yang belum termanfaatkan, yaitu air kelapa yang setiap hari terbuang percuma. CBR ini dilakukan oleh dosen STAIN Pamekasan, Tim ahli pengolahan air kelapa dengan melibatkan BMT NU Gapura Timur Sumenep, pemerintah desa Dik Kodik Gapura Timur Sumenep, BPPOM, dan MUI setempat. Kolaborasi tersebut didasarkan pada pemetaan potensi bahan yang tersedia dan kemitraan kelembagaan. Pihak dosen berperan sebagai fasilitator membantu komunitas *home industry* minyak *klettek* desa Dik Kodik Gapura Timur Sumenep. Tim ahli pengolahan air kelapa berperan sebagai *trainer* yang mengubah bahan dasar tak terpakai menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Tahap berikutnya, BMT NU Gapura Timur Sumenep berperan sebagai *CSR* sekaligus sebagai *sales marketing* bagi komunitas. Pemerintah desa berperan sebagai lembaga formal yang memberi ruang munculnya ekonomi kreatif komunitas. BPPOM dan MUI setempat berperan sebagai lembaga sertifikasi mutu produk komunitas, baik secara medis maupun agamis sebagai tahapan akhir pemberdayaan. Hasil CBR di desa Dik Kodik Gapura Timur Sumenep adalah penambahan *skill* komunitas tentang pengolahan air kelapa berupa produk *Nata de Coco*, pengemasan produk *Nata de Coco* serta ujicoba produk *Nata de Coco* sebelum di *launching* ke masyarakat luas. Komunitas *home industry* minyak *klettek* desa Dik Kodik Gapura Timur Sumenep memanfaatkan produk *Nata de Coco* sebagai produk alternatif sampingan untuk menambah pendapatan. Pengolahan air kelapa yang tak termanfaatkan oleh komunitas menjadi produk *Nata de Coco* berakibat pada peningkatan pendapatan sebesar 40,76%.

Kata kunci: community based research, CSR, na de coco

Pendahuluan

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat yang berdaya, yaitu memiliki kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik-material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.¹Pemberdayaan sangat penting dalam membangun masyarakat untuk bisa mandiri. Kemandirian masyarakat akan membawa kemajuan suatu negara.

Home industry merupakan bagian usaha yang masuk dalam kategori UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam prioritas pembangunan dan kerangka ekonomi makro dilakukan pada koperasi dan UMKM.² *Home industry* sendiri mempunyai peranan dalam pembangunan dan termasuk dalam kategori usaha kreatif, sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan kreativitas. Karakteristik industri kreatif sebagian besar ada pada skala UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).³ Suatu ide yang dikembangkan secara kreatif dan dapat memiliki nilai tambah, baik dari produk yang dihasilkan maupun nilai tambah dari produk sampingan akan membawa perubahan pada tumbuhnya aspek percaya diri masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya pembelajaran yang *sustainable*.

Pembelajaran yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap masyarakat terhadap sesuatu yang memiliki nilai lebih dari usaha yang dilakukan sebelumnya. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan.⁴

Home industry merupakan salah satu usaha yang termasuk dalam kategori UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Prioritas pembangunan di dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan kerangka ekonomi makro

¹ Widjajanti, Kesi, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, 2011, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.15

² Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, www.bappenas.go.id/index.

³ Sulaeman Rahman, *Sumber Pembiayaan Industri Kreatif Untuk Kesejahteraan Bangsa*, dalam buku *Kapita selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 402

⁴ Ibid, widjajanti hlm 16

adalah koperasi dan UMKM.⁵ *Home industry* mempunyai peranan dalam pembangunan yang termasuk dalam kategori usaha kreatif, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan peningkatan kreativitas dan pendapatan. Karakteristik industri kreatif sebagian besar ada pada skala UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).⁶ Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan proses peningkatan *skill* secara mandiri sebagai komunitas mitra pengabdian.⁷

Pengembangan UMKM memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 33.47% terhadap PDB sektor industri. Populasi unit usaha tahun 2010 sebesar 3,8 juta unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebesar 8,75 juta orang dengan nilai produksi sebesar Rp.521 triliun. Sumbangan terhadap pendapatan devisa sebesar US\$ 13.5 Miliar.⁸ Data tersebut telah memperlihatkan dengan jelas peran UMKM dalam penambahan devisa negara sebagai hal yang patut diperhitungkan.

Persaingan antar negara mengenai produk dapat merupakan kendala bagi sektor usaha kecil menengah apalagi dengan adanya ACFTA. Pelaksanaan kesepakatan *Asean China Free Trade Area (ACFTA)* sejak tanggal 1 Januari 2010 secara resmi telah dimulai. Program ACFTA telah membawa perubahan pada 2.528 pos tarif sektor industri manufaktur yang semula tarifnya lima persen pada tahun 2009, kemudian harus berubah menjadi nol persen per 1 Januari 2010.⁹

Program ACFTA dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Kondisi riil yang ada menunjukkan, bahwa daya saing Indonesia dan produk-produknya sangat rendah. *Ranking of the world competitiveness*

⁵ Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, [www.bappenas.go.-idindex](http://www.bappenas.go.id/index).

⁶ Sulaeman Rahman, *Sumber Pembiayaan Industri Kreatif Untuk Kesejahteraan Bangsa, dalam buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 402

⁷ Widjajanti, *Model Pemberdayaan*, hlm. 16

⁸ Buku Petunjuk Teknis Penilaian, Klasifikasi Dan Pembinaan Produk Ovop Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Kementerian Perindustrian 2012, hlm. 3

⁹ Hempri Suyatna, Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA) adalah mahasiswa S3 Sosiologi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dikontak melalui email: hempri@ugm.ac.id

pada tahun 2008 menunjukkan, bahwa negara Indonesia berada di peringkat 51 dari 55 negara¹⁰.

Selama masa pemerintahan Orde Baru telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang menakjubkan. Pencapaian tersebut menggunakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan yang sangat sentralistik dan bersifat *top down*.¹¹ Sistem yang demikian menyebabkan masyarakat khususnya petani atau *home industry* di berbagai daerah sebagai input pembangunan tentulah berkontribusi kecil. Pemecahan persoalan tersebut memerlukan sebuah cara agar rakyat kecil dapat menjadi fokus pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat masyarakat berdaya.

Salah satu penelitian yang berdasar komunitas adalah CBR (*Community based research*), yaitu model penelitian yang memanfaatkan berbagai metodologi penelitian yang teknik-teknik penggaliannya berdasarkan *Co-operative Inquiry*.¹² CBR (*Community based research*) yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai pengolahan air kelapa sebagai hasil sampingan. CBR yang dilakukan ini merupakan pemberdayaan dan pendampingan *home industry* pengolahan air kelapa sebagai hasil sampingan dari minyak *klettek* di desa Dik Kodik Gapura Timur merupakan salah satu solusi mengatasi belum termanfaatkannya air kelapa yang setiap hari dibuang percuma.

Home industry yang berpotensi sebagai UMKM di Desa Dik Kodik adalah *home industry* yang memproduksi minyak *klettek*. Minyak *klettek* merupakan salah satu produk buah kelapa yang dihasilkan di desa Dik Kodik Gapura Timur Sumenep. Pembuatan minyak *klettek* selain menghasilkan produk berupa minyak, juga menghasilkan produk sampingan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah pendapatan, yaitu tempurung kelapa, ampas kelapa parut, air kelapa, sabut buah kelapa¹³.

¹⁰ IbidHempri Suyatna, hlm 2

¹¹ Wignyosoebroto, Soetandyo, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, (Yogyakarta, PT LKIS Pelangi Aksara,2005) hlm 135

¹² John Heron, *Co-operative; Research into the Human Condition* (London; Sage Publication, 1996), 274. Dalam Tim Penyusun CBR UIN Sunan Ampel Surabaya, *Community Based Research sebuah pengantar*(Surabaya; LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm 40.

¹³ *SePET*: dalam bahasa Madura adalah kulit luar dari buah kelapa tetapi bukan batok kelapa.

Semua produk sisa tersebut, kecuali air kelapa pada saat ini telah dimanfaatkan sebagai nilai tambah karena masih bisa dijual untuk menambah pendapatan pengrajin minyak *kletek*. Air kelapa sementara ini belum dimanfaatkan sehingga terbuang percuma, atau terkadang diberikan pada ternak kambing yang dimiliki.¹⁴ Pemberian air kelapa pada ternak dilakukan dengan harapan ternaknya bertambah sehat.¹⁵

Penelitian ini dilakukan dengan mengkolaborasi antara masyarakat *home industry* minyak klettek desa Dik Kodik Gapura Timur Sumenep dengan dosen STAIN Pamekasan, pihak DISNAKER, BMT NU Gapura Timur Sumenep, dan pemerintah desa Dik Kodik Gapura Sumenep. Kegiatan yang dimaksud adalah dengan mentransfer ilmu dan pengalaman secara timbal balik, sehingga masyarakat menjadi lebih menyadari dan dapat menjadi lebih mandiri. Mimpi tersebut hanya bisa diwujudkan melalui kemitraan usaha, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun lembaga keuangan yang mempunyai komitmen dalam memajukan masyarakat.

Penelitian ini berkaitan dengan bidang ekonomi dalam arti sempit, khususnya pemanfaatan air kelapa sebagai produk sampingan yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis dan dilakukan dengan berkolaborasi antara pihak masyarakat *home industry* bersama pihak terkait yang disebutkan di atas. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya yang selayaknya dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui potensi yang ada, sedangkan pihak dosen sebagai fasilitator membantu masyarakat dalam menemukan potensinya. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kemitraan antara Dinas Pertanian, BMT NU Gapura Timur, praktisi, dan masyarakat Dik Kodik.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam CBR ini dengan mengajak masyarakat untuk mengetahui potensi yang sekiranya dapat memberikan nilai ekonomis dan membantu meningkatkan pendapatan. Tim fasilitator masyarakat pada dasarnya berperan dalam pengembangan pembelajaran masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat

¹⁴ Hasil wawancara dengan bu Diniyah pengrajin minyak *klettek* di desa Dik Kodik tanggal 21 maret 2015

¹⁵ Hasil wawancara dengan bu Diniyah pengrajin minyak *klettek* di desa Dik Kodik tanggal 9 Agustus 2015

terhadap berbagai format ekonomi politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog, sehingga memiliki *bargaining position* yang kuat dengan kekuatan lain. Maka dari itu diperlukan suatu strategi tersendiri.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pemetaan kebutuhan dengan silaturahmi, wawancara, FGD (*focus group discussion*) bersama masyarakat di desa Dik Kodik.

Obyek pengabdian yang akan diteliti adalah komunitas masyarakat di desa Dik Kodik yang berkeinginan kuat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, *interview*, observasi, dan FGD (*focus group discussion*) bersama berbagai komunitas masyarakat di desa Dik Kodik Sumenep.

Data yang digunakan untuk melakukan proses pendampingan adalah data primer dan sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi sebagai dasar membuat rumusan jawaban dalam kesimpulan. Data primer diperoleh melalui *interview*, observasi, dan FGD (*focus group discussion*) bersama berbagai komunitas masyarakat desa Dik Kodik Sumenep. Sementara data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan proses pembentukan dan pengembangan kelompok pembuat *Nata de coco* di desa Dik Kodik Sumenep.

Teknik analisis data dilakukan melalui rencana kegiatan dalam empat (4) tahap, antara lain:

1. Rencana program adalah pemetaan potensi lokal yang di *foollow up* dengan diskusi hasil Tim bersama Tim Ahli, Lokakarya penguatan potensi lokal, merumuskan strategi pengembangan kelompok pembuat *Nata de coco*. Hasil rumusan ini disosialisasikan kepada *stakeholder* dan tahap berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan berupa pelatihan yang terfokus kepada peningkatan kemampuan masyarakat dalam membuat *Nata de coco*.
2. Program terfokus kepada peningkatan mutu (*skill*) masyarakat. Beberapa program yang direncanakan adalah :
 - a. Pembinaan tentang manfaat air kelapa (Dinas Pertanian)
 - b. Pelatihan cara pembuatan *Nata de Coco* (Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan LSM Pioner: Pemberdayaan Masyarakat)
 - c. Pembinaan potensi pasar dan cara pemasaran (Dinas Perdagangan)
 - d. Program lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

¹⁶ Ibid

3. Program terfokus kepada upaya penguatan jaringan sosial antara pihak masyarakat dan *stakeholders*, khususnya dengan kalangan dunia usaha demi kelangsungan dan kemajuan masyarakat, sehingga ke depan masyarakat lebih mandiri. Rencana program adalah relasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, pengenalan program (sosialisasi) serta kerjasama dengan pihak BMT NU Gapura untuk produksi *Nata de Coco* secara massal.
4. Terfokus kepada aplikasi aspek manajerial administrasi dan proses pendampingan masyarakat. Program berikutnya adalah praktik pasca pelatihan *Nata de coco*, terbentuknya jaringan pemasaran dan kerjasama dengan pihak BMT melalui proses monitoring dan evaluasi. Program pendampingan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara terus menerus, sehingga setiap hasil atau temuan dalam aplikasi program dapat dijadikan *progress report* untuk menentukan program berikutnya.

Setiap tahapan program sebagai bentuk akuntabilitas publik akan dilakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring secara komprehensif dan merumuskan perencanaan program pada tahun berikutnya antara Tim dengan *stakeholders*. Evaluasi dan Refleksi adalah kegiatan penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi dampak kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama masyarakat, serta keberlanjutan program bagi pelaku *home industry* dalam masyarakat.

Indikator Keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Keluaran (Kualitatif)
 - 1) Meningkatnya pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi partisipatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Dik Kodik;
 - 2) Berkembangnya potensi masyarakat desa Dik Kodik terutama dalam pembuatan *nata de coco* secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;
 - 3) Bertambahnya pengalaman belajar dan bekerja secara langsung dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya secara kolektif.
- b. Keluaran (Kuantitatif)
 - 1) Terbentuknya kelompok pembuat *Nata de coco* di desa Dik Kodik Kabupaten Sumenep
 - 2) Terciptanya saluran distribusi dan pemasaran untuk produk *Nata de coco* yang berlisensi kesehatan (terdaftar di depkes) dan berlabel halal MUI.

c. Pencapaian Keluaran

Kegiatan pembentukan kelompok pembuat *Nata de coco* meliputi: Persiapan berupa kegiatan *need assessment* untuk mempersiapkan proses pendampingan. Pelaksanaan pendampingan untuk mempersiapkan proses terciptanya saluran distribusi dan pemasaran dan penguatannya.

Hasil Penelitian

CBR ini dilakukan dengan menggali menggunakan teknik *daily routines*, kalender musim, analisis kelembagaan, dan diskusi yang diharapkan dapat membuka wawasan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dusun Dik Kodik merupakan lokasi *home industry* pembuatan minyak *klethek*. Sekelompok masyarakat di bagian lain desa Dik Kodik juga memproduksi kopra dari sisa kelapa yang tidak masuk dalam *grade* satu (unggulan). Usaha minyak *klethek* maupun kopra biasanya merupakan *home industry*.

Hasil Pemetaan pendahuluan mengenai produk *home industry* yang ada di desa Dik Kodik melalui wawancara dan *trust building* diketahui, bahwa pembuatan minyak *klettek* selain menghasilkan produk berupa minyak, juga menghasilkan produk sampingan yang masih bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah pendapatan, yaitu tempurung kelapa, ampas kelapa parut, air kelapa, dan sabut buah kelapa. Semua produk sisa tersebut, kecuali air kelapa pada saat ini telah dimanfaatkan sebagai nilai tambah karena masih bisa dijual untuk menambah pendapatan pemilik usaha *home industry* minyak *kletek*. Air kelapa sementara ini belum dimanfaatkan, sehingga terbuang percuma, atau terkadang diberikan pada ternak kambing yang dimiliki.¹⁷

Masyarakat yang dilibatkan dalam penelitian awal tentang potensi air kelapa yang terbuang dalam produksi minyak *klethek* maupun kopra ada empat pelaku *home industry*, yaitu Ibu Zinatun, Ibu Sunayyah, ibu Duyani, dan Ibu Rummyati. Para pelaku *home industry* yang ada di desa Dik Kodik Sumenep secara ekonomis masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hasil produksi minyak *klettek* dan tambahan penghasilan dari berbagai produk sampingan yang telah dimanfaatkan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ditemukan beberapa kasus putus sekolah pada generasi

¹⁷ Hasil wawancara dengan bu Diniyah pengrajin minyak *klettek* di desa Dik Kodik tanggal 21 maret 2015

mudanya. Bantuan yang pernah diterima masyarakat berupa pelatihan membuat VCO (*Virgin Coconut Oil*) ternyata tidak ditindak lanjuti karena tidak ada pasar yang siap menerima.

Fasilitator melakukan tahapan inkulturasi dengan melebur dan membaaur dalam aktivitas ekonomi masyarakat Dik Kodik. Informasi awal yang telah didapat ketika melakukan pemetaan pendahuluan menjadi bahan dasar untuk mengadaptasikan diri dan memotivasi subjek dampingan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitator dalam proses ini juga melakukan proses pendekatan sebagai upaya *trust building*.

Fasilitator dalam tahapan ini ikut serta melihat dan membantu proses produksi minyak *klettek* bersama masyarakat sebagai bentuk mengadaptasikan diri dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain mengadaptasikan diri, proses ini juga merupakan upaya membangun pendekatan sebagai upaya *trust building*. Proses ini juga memberikan kesempatan pada fasilitator untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih mendalam.

Fasilitator juga membagi informasi seputar kegiatan usaha yang dapat dikembangkan masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menambah penghasilan. Hal ini ditujukan untuk memperluas wawasan mereka tentang jenis-jenis usaha yang sedang diminati dan memiliki peluang bagus.

Masyarakat Dik Kodik diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok setelah tahap inkulturasi dilalui. Kelompok yang baik di sini bukan berarti yang memiliki banyak anggota, tetapi lebih mementingkan keterwakilan kepentingan dan pengetahuan. Tujuan membangun kelompok ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan sekaligus sebagai upaya memperkuat ketahanan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi masyarakat ke depan. Dalam tahapan ini tercatat ada 25 anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing beranggotakan 5 orang.

Analisis masalah dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) bersama masyarakat, yaitu diskusi mengenai permasalahan tertentu, seperti pemetaan potensi, hambatan, dan yang terpenting subjek dampingan menyadari, bahwa mereka memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Subjek dampingan dalam FGD diajak untuk mengkaji permasalahannya, mencari penyebab, melihat dampak negatifnya, dan memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri.

Pengamatan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Dik Kodik menunjukkan, bahwa pendapatan dari *home industry* minyak *klettek*

ataupun kopra masih di bawah *standard* yang diharapkan. Masyarakat kemudian diajak melakukan analisis bersama tentang usaha yang sudah mereka jalankan bertahun-tahun.

Salah satu pelaku *home industry* minyak *klettek* terbesar di desa tersebut (keluarga ibu Zinatun) menyatakan, bahwa dalam satu hari produksi dibutuhkan bahan baku 400 butir kelapa. Produksi 400 butir kelapa per hari tergolong besar. Hal itu hanya dapat dilakukan jika dalam prosesnya dibantu dengan mesin sederhana berupa mesin pemeras santan dan pemeras hasil minyak *klettek*. Pelaku usaha tidak pernah kesulitan untuk memperoleh bahan baku secara kontinyu setiap hari, karena desa Dik Kodik adalah desa yang sebagian besar areanya difungsikan sebagai perkebunan kelapa. Bahan baku diperoleh dari pemasok ataupun pasar setempat. Kesulitan justru timbul saat harga kelapa naik, sehingga biaya produksi juga naik sementara hasil produksi tetap.

Masyarakat tidak pernah menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi *minyak klettek*, sehingga mereka tidak pernah tahu secara pasti berapa penghasilan yang diperoleh per bulan atau per hari. Fasilitator bersama masyarakat menganalisis biaya produksi pada usaha pembuatan minyak *klettek* untuk membantu mereka menghitung biaya produksi, mengetahui apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ongkos produksi, dan secara tidak langsung mempertebal keyakinan mereka terhadap potensi yang telah dimiliki, tetapi belum dimaksimalkan.

Analisis biaya produksi *minyak klettek* dengan bahan dasar 400 butir kelapa adalah sebagai berikut: 400 butir kelapa (@ Rp. 1.250;-), tiga orang tenaga kerja (@ Rp. 15.000;-) dan 25 botol bekas (@ Rp. 150;-) sebagai wadah minyak akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 533.750;- per hari. Dari bahan baku tersebut akan dihasilkan minyak *klettek* sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml (@ Rp. 20.000;-); *blettek* sebanyak 16 liter (@ Rp. 12.000;-); ampas kelapa sebanyak 3 gantang (@ Rp. 45.000;-), dan batok kelapa sebanyak 3 karung (@ Rp. 15.000;-). Total produksi adalah sebesar Rp. 612.000, sehingga untuk satu kali proses produksi minyak *klettek* memperoleh total penghasilan sebesar Rp.63.250;- per hari atau Rp.1.581.250;- per bulan.¹⁸

Pendapatan di atas tentu saja masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan empat anggota keluarga. Hasil tersebut belum memperhitungkan biaya yang digunakan untuk pembakaran atau

¹⁸ Ibid.

pemanasan, karena masyarakat menggunakan pelepah kelapa sebagai kayu bakar dan tidak menggunakan gas LPG. Pelaku usaha minyak *klettek* yang tidak memiliki mesin sederhana, tentu saja hasil yang diperoleh lebih kecil lagi.

Proses pemberdayaan dan pendampingan masyarakat secara partisipatif dalam meningkatkan *skill* pengolahan air kelapa, yaitu:

1. FGD dan Pembinaan tentang manfaat air kelapa oleh Dinas Pertanian.
2. Pelatihan cara pembuatan *Nata de coco* yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama praktisi pemberdayaan masyarakat serta komunitas dampingan.
3. Pelatihan pengemasan *Nata de coco* yang juga bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Praktisi Pemberdayaan Masyarakat serta Komunitas dampingan.
4. Uji coba produk dan praktik pemasaran *Nata de coco* yang melibatkan praktisi dan komunitas dampingan.

Langkah-langkah di atas menjadi harapan bagi warga desa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa Dik Kodik.

Pemberdayaan *home industry* pengolahan air kelapa sebagai hasil samping minyak *klettek* di desa Dik Kodik Gapura Timur merupakan salah satu solusi mengatasi belum termanfaatkannya air kelapa yang setiap hari dibuang percuma. Pemberdayaan pengolahan air kelapa menjadi *Nata de coco* akan memberikan nilai tambah ekonomis sangat strategis dan signifikan jika dikembangkan secara berkelanjutan.

Sumber daya alam yang tersedia di desa Dik Kodik ini sangat melimpah. Pelaku usaha *home industry minyak klettek* berjumlah empat orang dengan limbah air kelapa per hari kurang lebih 1000 liter. Selain itu, juga ada 9 *home industry* kopra dengan limbah air kelapa per hari kurang lebih 2000 liter. Peningkatan kemampuan terhadap sumber daya manusia untuk dapat mengolah sumber daya alam yang ada menjadi target utama, sehingga tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dapat tercapai.

Hasil perencanaan aksi selanjutnya diimplementasikan secara simultan dan partisipatif. Aksi yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. FGD dan Pembinaan tentang manfaat air kelapa (Dinas Pertanian)
Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari (26 September 2015) dengan mengundang Petugas Penyuluh Lapangan UPT Dinas Pertanian

Kecamatan Gapura. Petugas tersebut sebagai praktisi lapangan relatif menguasai tentang potensi desa, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia Gapura khususnya di Gapura Timur.

2. Pelatihan cara pembuatan *Nata de coco* (bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama praktisi pemberdayaan masyarakat dan komunitas dampingan).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari (10 – 11 Oktober 2015). Hari pertama Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama praktisi pemberdayaan masyarakat dan komunitas dampingan mempraktikkan cara membuat *Nata de coco*. Kegiatan pada hari kedua adalah pemberian bibit *Nata de coco* terhadap *Nata de coco* yang sudah dibuat sehari sebelumnya.

3. Pelatihan pengemasan *Nata de coco* (bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama praktisi pemberdayaan masyarakat dan komunitas dampingan).

Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam waktu 1 hari (24 Oktober 2015). Kegiatan tersebut diawali dengan praktik cara panen dan membersihkan *Nata de coco*, kemudian hasil yang sudah bersih dipotong-potong dan direndam selama semalam. Kegiatan dilanjutkan dengan praktik memasak *Nata de coco* sesuai dengan rasa yang diinginkan. Kegiatan terakhir dilanjutkan dengan pengemasan menggunakan mesin *cup sealer*.

4. Uji coba produk dan praktik pemasaran *Nata de Coco* (praktisi bersama komunitas dampingan).

Produk yang sudah dihasilkan kemudian diuji coba ke sekolah-sekolah dan kampus. Tujuan uji coba adalah untuk mendapatkan *feed back* dan masukan, sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan sesuai dengan keinginan pasar. Peneliti bersama komunitas dampingan membagi tester *Nata de coco* kepada siswa, mahasiswa, dan dosen untuk memperoleh komentar dan masukan.

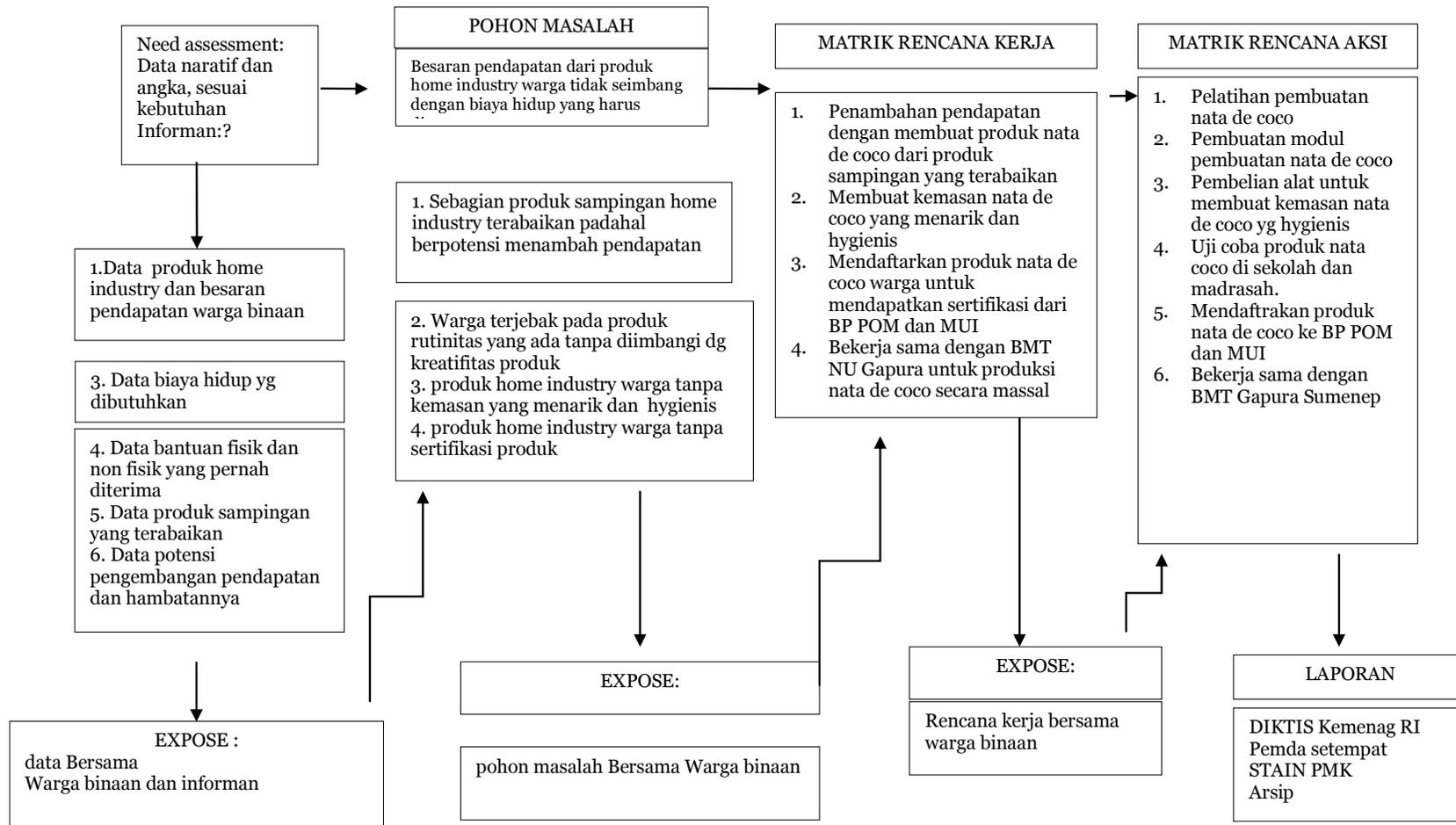
Penyusunan strategi gerakan ini merupakan langkah penting untuk pemecahan masalah. Langkah mudah untuk menyusun strategi tersebut adalah dengan teknik mengelola program yang berbentuk *Logical Framework Approach* (LFA).

Komunitas *home industri Nata de coco* sebelum bersilaturahmi pada dinas kesehatan, MUI setempat, dan BMT NU Gapura telah didampingi secara intensif, sehingga yang bersangkutan mampu mempresentasikan produknya pada khalayak secara meyakinkan. TIM Fasilitator memiliki

program pendampingan tidak hanya membuat modul dan produk *Nata de coco* bersama masyarakat, tetapi juga melatih anggota komunitas agar fasih dan bisa meyakinkan pada khalayak tentang produk yang dihasilkannya.

Mainstream yang kami emban sebagai fasilitator adalah pendampingan komunitas secara tuntas, mulai dari *need assessment* dalam rangka menginternalisasi kepercayaan diri kelompok, pengembangan produk *Nata de coco*, sampai pada peningkatan kemampuan mempresentasikan produk secara meyakinkan pada khalayak. Langkah terakhir yang kami dampingi adalah menyemai bibit kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyempurnakan produk dan *manage marketing* produk secara massal.

Fasilitator menyemai bibit kerjasama dengan BMT NU Gapura dalam rangka produksi massal *Nata de coco*. Komunitas *home industri Nata de coco* yang telah mempersiapkan produk secara sempurna dan dikonsultasikan dengan para ahli dan para anggota komunitas merasa yakin untuk menggandeng BMT NU Gapura dalam memproduksi massal *Nata de coco* tersebut. Pihak BMT NU Gapura secara prinsip tidaklah berkeberatan mengembangkan produk *Nata de coco* tersebut untuk diproduksi secara massal, bahkan juga bersedia membantu karena merupakan bagian dari pengembangan BMT NU Gapura di bidang ekonomi kreatif.



Gambar 1. Logical Framework Approach

Kesediaan BMT NU Gapura tersebut walaupun begitu masih terkendala pada aspek kebijakan intern yang harus dikaji secara mendalam, karena berhubungan dengan kesehatan keuangan secara umum. Aspek kesehatan keuangan masih juga harus ditopang dengan studi kelayakan segmen pasar yang dituju dan kesan negatif yang terlanjur beredar seputar *Nata de coco*. Anggota komunitas *home industry Nata de coco* dan fasilitator yang turut serta mendampingi meletakkan kesediaan tersebut sebagai bagian dari pengembangan program pada tahun berikutnya.

Masyarakat desa Dik Kodik secara umum memang telah terkontaminasi oleh isu-isu produk *Nata de coco* yang bersifat negatif, karena perbuatan beberapa oknum penghasil produk yang sama di tahun sebelumnya. Upaya menggandeng BMT NU Gapura sebenarnya juga bagian dari strategi menghapus secara bertahap isu negatif tersebut, walaupun disadari betul hal itu bukanlah pekerjaan mudah. Fasilitator dan anggota komunitas bersepakat, bahwa isu-isu negatif tersebut akan dilawan dengan merangkul tiga lembaga besar yang berkompeten, yaitu Dinas kesehatan setempat, MUI setempat, dan BMT NU Gapura.

BMT NU Gapura tidak saja berperan sebagai pemilik modal, tetapi juga berperan penting dalam proses pendampingan ekonomi kreatif UMKM yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. BMT NU Gapura merupakan mitra komunitas *home industry* UMKM *Nata de coco* yang juga berkepentingan dalam kesuksesan pengembangan produknya secara meluas. Produk *Nata de coco* yang dikembangkan secara meluas akan terus dikembangkan sampai desa Dik Kodik menjadi sentra produk *Nata de coco*, minimal bagi wilayah di sekitarnya.

Desa Dik Kodik sebagai sentra *Nata de coco* akan menjadi tahapan berikutnya setelah kemitraan dengan BMT NU Gapura berjalan, seperti hubungan Bapak asuh dan Anak asuh. Sentra kulakan *Nata de coco* tidak saja menambah pendapatan setiap pelaku *home industry*, tetapi juga memperluas lapangan kerja berbasis ekonomi kreatif UMKM. Suatu hal yang membanggakan dan melegakan banyak pihak manakala desa Dik Kodik yang dekat dengan tempat wisata pantai lombang bisa mensuplai minuman ringan tempat wisata setempat.

Kepala desa Dik Kodik secara prinsip sangat mendukung upaya pengembangan produk *Nata de coco*, sehingga sangat potensial dikembangkan secara meluas menjadi sentra *Nata de coco*. Dukungan Kepala Desa Dik Kodik merupakan jalan mulus untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumenep. Upaya pember-

dayaan masyarakat marginal melalui ekonomi kreatif UMKM di desa Dik Kodik menjadi sangat bermakna jika ditopang dengan sangat kuat oleh Pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Pemberdayaan masyarakat pada berbagai komunitas, seperti komunitas *home industry* di desa Dik Kodik pada akhirnya tertumpu pada peretasan tata kuasa, tata kelola, dan tata guna. Peretasan tata kuasa berkaitan erat dengan siapa yang menguasai, siapa yang menentukan, bagaimana aturan main, dan ciri-ciri serta nilai penguasaan. Tata kuasa dalam upaya pemberdayaan masyarakat tentu berkaitan dengan tata niaga bahan baku *Nata de coco* dan tata niaga pemasarannya. Tata kuasa juga berkaitan dengan BMT NU Gapura sebagai pemilik modal di satu sisi dan sebagai pendamping komunitas *home industry* di sisi lain.

Tata kelola berkaitan dengan bagaimana sistemnya, bagaimana ciri-ciri individual dan komunal, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung resiko, dan bagaimana ciri-ciri pengelolaan. Tata kelola dalam upaya pemberdayaan masyarakat tentu berkaitan dengan pengembangan produk *Nata de coco* berbasis SDM setempat, potensi yang dimiliki, dan hambatan yang dialami. Kepala desa dan PEMDA kabupaten Sumenep bagaimanapun juga merupakan bagian tak terelakkan dari tata kelola produk *Nata de coco*.

Tata guna berkaitan dengan apakah ada manfaatnya bagi orang banyak dan seberapa besar manfaatnya. Tata guna dalam upaya pemberdayaan masyarakat tentu berkaitan dengan pengembangan kemanfaatan produk *Nata de coco*, baik dalam mengembangkan pendapatan pelaku *home industry*, pengembangan lapangan kerja, dan pengembangan sentra produk *Nata de coco*. Pihak STAIN Pamekasan sebagai wadah TIM fasilitator juga dapat memperoleh manfaat, terutama mahasiswa. Para pemangku kepentingan dan mahasiswa STAIN Pamekasan dapat memfungsikan desa Dik kodik sebagai laboratorium alam pemberdayaan masyarakat marginal secara partisipatif.

Dampak Penelitian

Adapun dampak dari penelitian CBR ini akan memberikan pemahaman wawasan akan potensi yang ada dalam masyarakat. Pemahaman terhadap potensi akan mengakibatkan timbulnya hasrat untuk selalu mengembangkan diri dalam meningkatkan kehidupannya. Pandangan tersebut terlihat dengan antusiasnya masyarakat mengutarakan pendapat, bahwa ada bentuk lain dari pemanfaatan air kelapa selain menjadi *Nata de*

coco. Adanya pemahaman diri terhadap potensinya bisa dijadikan sebagai langkah selanjutnya untuk dapat dilakukan keberlanjutan dari penelitian mendatang, sehingga penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagaimana sebuah kehidupan dan tempat yang termarginalkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui potensi yang masih belum digali dan dimaksimalkan.

Daftar Pustaka

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, www.bappenas.go.id/index.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Kementerian Perindustrian, Buku Petunjuk Teknis Penilaian, Klasifikasi Dan Pembinaan Produk OVOP, 2012

Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Herta Sumarto, Agus, *Jurus Mabuk Membangun Rakyat*, Jakarta, Indeks, 2010

John Heron, Co-operative; Research into the Human Condition (London; Sage Publication, 1996), 274. Dalam Tim Penyusun CBR UIN Sunan Ampel Surabaya, *Community Based Research sebuah pengantar*(Surabaya; LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm 40.

Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2000

Kurniawati, Dwi Pratiwi, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, 2013

LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya : LPM IAIN Sunan Ampel, 2008

Rahman, Sulaeman, *Sumber Pembiayaan Industri Kreatif Untuk Kesejahteraan Bangsa*, dalam buku *Kapita selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

Sagir, Soeharsono, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

Suyatna, Hempri, Reorientasi Kebijakan UMKM di Era *Asia China Free Trade Area* (ACFTA), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Widjajanti, Kesi, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta, PT LKIS Pelangi Aksara, 2005

Optimalisasi Infaq Masjid untuk Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid di Desa Kalipakem Kec. Donomulyo Kab. Malang

NUR FAIZIN MUHITH

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
nurfaizin@gmail.com

Abstrak: Urgensi ekonomi bagi masyarakat merupakan aksioma yang tidak terbantahkan. Pemanfaatan dana infaq masjid umumnya berputar pada operasional masjid saja: kebersihan, listrik, petugas, dan sejenisnya. Dana infaq dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan umat. Tulisan ini adalah hasil penelitian PAR (*Participatory Action Research*) di Desa Kalipakem Kec. Donomulyo Kab. Malang tahun 2015 melalui empat tahapan: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan jeda waktu antara masing-masing tahapan. Penelitian bersama dengan para stakeholder Desa Kalipakem ini menghasilkan perubahan-perubahan yang meliputi: *pertama*, perubahan kesadaran masyarakat tentang besarnya potensi infaq masjid sehingga dapat mengurangi jumlah warga yang bekerja ke luar negeri sebagai indikasi kemiskinan; *kedua*, menguatnya solidaritas, sikap saling tolong menolong, dan semangat bekerjasama dalam mengentas kemiskinan yang terwujud dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak-anak keluarga miskin dan pinjaman produktif kepada setiap warga yang hendak bergabung dalam usaha; *ketiga*, meningkatnya pengetahuan fiqih masjid dan kompetensi pengelolaan infaqnya secara produktif; *keempat*, masyarakat dapat mengontrol secara langsung sekaligus mengantisipasi tindakan eksploitasi dana infaq masjid oleh sebagian oknum.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, masjid, ekonomi.

Pendahuluan

Urgensi ekonomi bagi masyarakat telah menjadi semacam aksioma yang tidak terbantahkan secara sosial. Masyarakat dengan kondisi perekonomian yang mencukupi jauh lebih baik dibandingkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kekurangan. Indonesia, dengan penduduk mayoritas umat Islam, ternyata masih belum dapat melepaskan diri dari

lilitan permasalahan ekonomi ini. Tidak berlebihan jika dalam sebuah haditsnya, Rasulullah Saw jauh-jauh hari telah mewanti bahaya laten dari kondisi kekurangan ekonomi dalam sabdanya yang sangat masyhur yang artinya “kemiskinan itu hampir saja menjelma menjadi kekafiran.” (HR. Imam Al-Baihaqi).

Dewasa ini masjid masih menjadi sentral peribadatan dan kegiatan umat Islam. Masjid menjalankan fungsi *hablun minallah* sekaligus *hablun minannas*.¹ Selain itu, umat Islam patut menyayangkan jika ada potensi dana di dalam masjid, namun tidak dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan. Salah satu potensi dana besar bagi umat Islam adalah dana infaq masjid. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan uang kotak amal masjid menurutnya perlu dimanfaatkan untuk hal-hal produktif.² Selama ini pemanfaatan dana infaq masjid hanya berputar pada operasional masjid saja, untuk biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. Sesungguhnya dana infaq itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal-hal lain. Pendayagunaan lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat, pembelian alat-alat produksi, pemberian beasiswa dan sejenisnya.

Kecamatan Donomulyo merupakan salah satu subyek dampingan unggulan KKM Posdaya berbasis masjid di bawah LP2M UIN Maliki Malang selama beberapa tahun terakhir. Ekonomi masyarakat Donomulyo telah berjalan dengan cukup baik yang terlihat dari *income* dan taraf hidupnya. Dari situ pulalah mereka kemudian dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga. Masyarakat di sana kebanyakan adalah petani musiman (petani padi, tebu, jagung, kelapa, ketela pohon, kedelai). Sebagian diataranya menjadi pegawai Negeri, dan pedagang. Tidak sedikit pula diantaranya yang menjadi TKI ke Luar Negeri (Hongkong, Taiwan, Singapore dan Korea).

Potensi untuk mengembangkan infak di masjid-masjid di kecamatan Donomulyo ini cukup besar karena beberapa alasan, pertama, masyarakat di sana sudah memiliki kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) jamur. Kedua, petani jamur di sana tergolong sukses sekaligus telah memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan bersedekah dan infaknya ketika panen, sehingga terkumpul dana sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap

¹ *Fiqih Masjid* Menjawab Dinamika Permasalahannya, Ramadhon Chotib, DMI Malang, hlmn. viii.

² <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam /13/02/06/mhsdrz-umat-butuh-masjid> , diakses 10 Oktober 2015

kali panen. Ketiga, telah berdiri semacam koperasi syariah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).³ Keberadaan BMT dan potensi masyarakat yang sudah cukup memiliki kesadaran tentang tentang beragam bentuk filantropi Islam di sana mendorong peneliti untuk memperkuat pendanaan infaq di masjid-masjid yang telah menjadi dampingan program Posdaya UIN Malang, melalui salah satu instrument-instrumen filantropi yang ada di dalam Islam. Dengan potensi yang ada di sana, penelitian ini berharap dapat membuka kesadaran yang lebih luas mengenai bentuk filantropi Islam berupa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Kondisi Subyek Dampingan

Masyarakat di lokasi dampingan pada saat ini merupakan masyarakat yang sedang mengembangkan potensi ekonomi mereka melalui kegiatan UMKM. Munculnya beberapa tokoh muda yang menginspirasi masyarakat untuk bangkit mengembangkan bidang-bidang ekonomi yang baru seperti budidaya jamur, ternak lele dan lain sebagainya. Pengembangan sumber pendapatan yang baru merupakan terobosan yang baik untuk mengatasi problem kesuburan tanah persawahan yang tergantung kepada datangnya musim hujan. Kelompok UMKM kreatif ini semakin berkembang dengan jumlah sampai 62 petani jamur dengan mengembangkan pemanfaatan limbah dari media jamur sebagai media ternak cacing, pupuk organik, penanaman pohon naga dan lain sebagainya.

Potensi besar dari masyarakat yang tergolong mampu dan kaya di lokasi binaan menjadi harapan besar untuk mendorong kemajuan masyarakat secara bersama-sama melalui kegiatan di masjid-masjid yang sudah ada seperti sedekah, zakat, wakaf. Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi masyarakat dampingan adalah sebagaimana berikut:

1. Pemahaman yang masih ketinggalan tentang potensi pendanaan melalui masjid-masjid; kebanyakan masih menganggap bahwa masjid hanyalah sebagai tempat sholat dan melakukan jumatatan setiap hari jumat.
2. Secara umum, masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari potensi infak masjid dan pengelolaannya serta manajemennya yang baik dan berkelanjutan.

³ Wawancara dengan Pak Nur Wahid, penggiat Posdaya di Kecamatan Donomulyo pada tanggal 21 Oktober 2015

3. Selain masyarakat yang sudah kaya, masih banyak juga masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan baik secara materi terutama melalui infak masjid yang sudah ada di sana.
4. Masyarakat yang memiliki semangat untuk menumbuhkan potensi ekonomi mereka melalui berbagai usaha baru dan kekurangan pendanaan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh infak masjid di sana.

Sebagai hasil kongkritnya, maka setelah pendampingan melalui program PAR ini selesai dilaksanakan, masyarakat binaan posdaya Donomulyo kabupaten Malang yang telah terbentuk dapat memiliki peran yang signifikan dan aktif dalam mengatasi permasalahan pendanaan untuk semua masyarakat, khususnya yang lemah dan membutuhkan. Hal itu dilakukan melalui gerakan optimalisasi dan pengelolaannya secara profesional. Dengan lebih jelas kondisi dampingan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang urgensi masjid dalam optimalisasi keuangan masyarakat.
2. Masyarakat kaya yang gemar membelanjakan sebagian harta kekayaannya sebagai zakat, wakaf, maupun sedekah.
3. Masyarakat kaya yang terdorong untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan secara materi.
4. Terwujudnya masyarakat yang hidup secara harmonis dengan tanpa kesenjangan ekonomi atau setidaknya kesenjangan yang minimal.

Strategi yang Dilakukan

Strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendanaan berbasis masjid dari para petani jamur adalah strategi dampingan dengan metode PAR (*Participatory Action Research*). Metode ini dilakukan untuk memahami masyarakat secara umum dan khususnya petani jamur tentang hal-hal penting yang meliputi:

1. Beberapa sisi kelemahan yang masih dimiliki BMT, khususnya terkait dengan pendanaan untuk masyarakat miskin yang masih membutuhkan
2. Potensi kekuatan masjid dalam memberikan pendanaan melalui infak bagi kehidupan sosial mereka, khususnya untuk pengelolaan secara produktif.

3. Menumbuhkan keinginan dalam diri masyarakat untuk mengatasi kelemahannya melalui optimalisasi infak di masjid-masjid dan pengelolaan yang profesional
4. Menyusun strategi dan cara untuk memecahkan permasalahan problematika sosial ekonomi yang mereka hadapi
5. Membantu masyarakat mengatasi, memecahkan dan menemukan jalan keluarnya.

Strategi pendampingan dengan metode ini digunakan dengan tujuan menjadikan masyarakat sebagai subyek yang aktif dalam pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh kampus, bukan sebagai obyek yang pasif. Dengan demikian, maka masyarakat sendirilah yang akan memahami, menginginkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya, dalam hal ini terkait optimalisasi pendaan dan ketimpangan sosial ekonomi yang menjadi permasalahan mereka. Posisi peneliti dalam metode ini menempatkan diri hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk membantu dalam mewujudkan cita-citanya dan memberikan jalan keluar serta merumuskan strategi yang dapat digunakan masyarakat untuk menemukan solusi permasalahan mereka.

Langkah-langkah yang ditempuh mencakup empat tahapan. Tahapan-tahapan itu dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Perencanaan (*planning*). Perencanaan ini dilakukan setelah memperhatikan kondisi riil di masyarakat dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui; bagaimana kekuatan (*strengths*) dapat digunakan mengambil peluang (*opportunities*); bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang menjadi penghalang untuk mengambil peluang (*opportunities*); bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*); dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
2. Tindakan (*action*). Setelah perencanaan (*planning*) terlaksana, maka masyarakat akan mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan bersama peneliti pada tahapan sebelumnya. Dalam tahap kedua ini, posisi peneliti adalah hanya sebagai fasilitator.
3. Pengamatan (*observe*). Langkah ini dilakukan untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kelemahan dan kekurangan strategi dan metode yang telah diimplementasikan sebagai solusi menyelesaikan problematika yang terjadi di lapangan.

4. Refleksi (*reflect*). Ketika sudah diketahui kelemahan dan kekurangan strategi yang telah diterapkan maka diperlukan langkah selanjutnya, yaitu refleksi atau perenungan dan evaluasi yang mendalam terhadap kelemahan, kekurangan ataupun keberhasilan strategi dan metode dalam mengatasi problematika masyarakat yang ada. Langkah ini akan menghasilkan kembali *planning* (rencana) lanjutan sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang ada di lapangan sebagaimana terjadi pada tahap yang pertama dalam menyelesaikan permasalahan, baik yang masih belum tuntas atau permasalahan yang baru muncul hingga tercapailah sebuah masyarakat yang sejahtera secara sosial ekonominya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah: tim peneliti yang bertugas sebagai (1) pengumpul data (pengumpulan data-data dan analisis data-data); (2) pembuat desain aksi (mengklasifikasikan permasalahan ekonomi untuk mendesain rencana aksi penguatan infak di masjid-masjid), (3) pelaksana pelatihan dan pendampingan; (4) pelaksana monitoring dan evaluasi; (5) pembuat desain tindak lanjut.

Pihak lain yang terkait dalam kegiatan ini adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka berfungsi sebagai: (1) penyuluh kegiatan bidang keagamaan (membentuk *mindset* masyarakat tentang fiqih modern); (2) pelaksana evaluasi dan monitoring bersama dengan peneliti. Masyarakat, khususnya takmir masjid juga dilibatkan dalam kegiatan penyusunan rencana aksi bersama peneliti.

Proses Pendampingan Di Desa Donomulyo

Proses pendampingan diawali dengan mendatangi dan mengenali lokasi dampingan. Kegiatan ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kelompok dampingan dengan tahap atau kegiatan *need assessment*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang dibutuhkan oleh kelompok dampingan sebagai media atau cara memberdayakan kelompok dampingan tersebut.

Tim peneliti menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan (*income*). Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang pada pasar. Sedangkan pada sektor produksi, zakat akan menyebabkan bertambahnya produktifitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada akan semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak modal yang masuk ke perusahaan

tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang menyebabkan terus menerus produktivitas perusahaan dan modal-modal yang diinvestasikan akan terjamin. Timbulnya peningkatan permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Peningkatan pembelian tersebut tidak terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.⁴

Tim peneliti juga memberikan pengarahannya bahwasanya dana masjid tidak seharusnya hanya untuk perawatan masjid saja, namun juga boleh digunakan untuk optimalisasi masjid dengan usaha produktif. Selanjutnya tim dan pihak-pihak yang terlibat membuat desain atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini, tim peneliti memberikan stimulus *need assessment* dengan menjelaskan persoalan-persoalan ekonomi pada umumnya di Kabupaten Malang, misalnya *income* perkapita masyarakat kab Malang yang masih rendah yaitu hanya Rp. 1.425.000 perbulan per kapita.⁵

Kelompok dampingan yang terlibat kemudian mengutarakan pendapat dan pengetahuan mereka dengan menyebutkan persoalan-persoalan seputar kemiskinan antara lain sebagai berikut:

Pertama, dengan kondisi masyarakat yang semakin maju dan kompleks, masyarakat sebenarnya membutuhkan suatu wadah untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan terutama bagi keluarga muda yang belum mapan secara ekonomi. Hingga kemudian disepakatilah istilah POSDAYA (*Pos Pemberdayaan Keluarga*) sebagai nomenklatur kegiatan tersebut.

Kedua, kelompok dampingan menyebutkan faktor-faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Malang. Misalnya, banyak keluarga yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi disebabkan oleh tidak adanya biaya. Kelompok dampingan memberikan contoh lainnya yaitu terdapat keluarga yang dililit hutang kepada rentenir (bank titil). Masyarakat memiliki persepsi bahwa sudah tidak ada tempat atau lembaga yang peduli terhadap nasib mereka maka apapun yang terjadi mereka tidak peduli dengan resiko adanya hutang ke rentenir.

⁴ Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta,. Raja Grafindo Persada, 2006), hlmn. 126-127.

⁵ Dapat dilihat <http://www.malangkab.go.id/berita-1343.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015

Ketiga, kelompok dampingan menyebutkan faktor-faktor terjadinya kemiskinan juga ada yang disebabkan oleh gaya hidup yang mewah sehingga tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan faktor kemiskinan dikarenakan malas bekerja dan berusaha jumlahnya sangat sedikit.

Setelah berdiskusi yang dikemas dalam bentuk FGD, tim peneliti juga mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang kemudian dibutuhkan untuk mengantisipasi, menyelesaikan, dan memperkuat perekonomian yang berpusat di masjid. Hasilnya kemudian menjadi landasan untuk kegiatan selanjutnya atau tahapan-tahapan berikutnya.

Pelaksanaan Pendampingan

Siklus Pertama:

Pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus pertama dilakukan dalam bentuk diskusi penguatan pemahaman tentang optimalisasi infaq masjid oleh tim peneliti seperti yang telah didiskusikan sebelumnya pada sesi *need assessment*. Peneliti memulai penjelasan dengan menjelaskan secara mikro persoalan yang dihadapi Indonesia yaitu Indonesia dalam beberapa tahun ini dihadapkan pada berbagai rentetan masalah social yang ironisnya kadangkala mengarah pada konflik sosial dan masyarakat dan seringkali berakar pada persoalan ekonomi umat. Dengan demikian pemerataan ekonomi sangat diperlukan demi menekan penyakit-penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan dari akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁶

Selanjutnya tim peneliti memberikan tawaran langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah sosial berbasis ekonomi tersebut. Masalah sosial berbasis ekonomi tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan dengan beberapa cara melalui penguatan keluarga berbasis masjid, antara lain sebagai berikut:

Pertama, mengkaji ulang ajaran Islam tentang ZIS serta potensinya di tengah masyarakat Muslim. Islam punya solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan infak secara produktif. Disebut produktif, karena dana infak digunakan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi

⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlmn. 82-83.

hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam".⁷ Salah satu bentuk infak produktif yang sangat populer dan banyak dikembangkan saat ini adalah *cash wakaf* (wakaf uang tunai).

Sasaran zakat, infaq dan shodaqoh hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: ⁸ (1) memperbaiki taraf hidup. Dengan dana zakat, infaq dan shodaqoh dapat dilakukan berbagai kegiatan baik kegiatan yang bersifat motifasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang *home industry*, atau kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang sebagai modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak dan lain-lain. (2) memberikan pendidikan dan beasiswa. Dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan ada dua cara, pertama, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, baik berupa uang maupun sarana pendidikan. Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu, sehingga ia bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang tertentu. (3) mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran. Sasaran program ini adalah *fuqara'* yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (4) program pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan dengan mendirikan poliklinik. (5) mendirikan panti asuhan atau secara pribadi mengambil anak yatim piatu untuk dididik dalam keluarga mereka. Islam menganjurkan untuk memperlakukan anak yatim. (6) Sarana peribadatan untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, sudah banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau para amil zakat khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, merupakan perkembangan pemikiran atas penafsiran *fi sabilillah* dalam *mustahiq* zakat.⁹

Singkatnya pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dan agar zakat, infaq dan

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani Press, 2002), hlmn. 10-11.

⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005), hlmn. 43-48.

⁹ *Ibid.*

shodaqoh bisa memberikan manfaat yang lebih luas, maka dana zakat bisa diproduktifkan dengan fokus penyaluran kepada empat program besar, yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan, dan program dakwah.¹⁰ Dari uraian tentang konsep pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara produktif tersebut, didapatkan acuan dasar bagaimana seharusnya harta zakat infak sedekah dikelola dan bagaimana seharusnya pengelolaan itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas baik kepada *mustahiq* maupun kepada umat Islam secara keseluruhan.

Dalam siklus pertama ini tim peneliti juga melakukan pengamatan pada seputar sudut pandang dan variasi pola pikir para peserta dalam melihat konsep pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh produktif. Bagaimana mereka memahami cara mengatasi problem yang ada di masyarakat. Bagaimana meminimalisir kemungkinan atau akibat dari kemiskinan. Bagaimana konsep pengelolaan ZIS ideal serta bagaimana cara untuk merealisasikannya di kehidupan nyata.

Beberapa tanggapan dari masyarakat kemudian muncul. Pak Nur Wahid yang juga ketua kelompok petani jamur di desa Donomulyo mengatakan:

“Sebenarnya semangat masyarakat Donomulyo untuk bangkit di bidang ekonomi sangat tinggi, kami menyadari jika musim kemarau tanah di sini tidak bisa ditanami karena tidak ada irigasi, satu-satunya harapan untuk bercocok tanam di sini adalah air hujan. Maka kegiatan ini sangat baik bagi kami, artinya kami memiliki pandangan baru dari aspek konsepsi keilmuan bagaimana dapat menjelaskan dan mengatasi problem kemiskinan dan kekeringan di desa kami. Karena selama ini kami sebenarnya sudah banyak melakukan berbagai terobosan akan tetapi masih bersifat pribadi-pribadi belum terkoordinir dengan baik.”

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Pak Parno yang juga takmir masjid:

“Diskusi ini bagi kami menarik karena kami sebenarnya sudah melakukan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal tetapi selama ini hanya kita berikan secara konsumtif dan tentunya tidak berpengaruh banyak bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian kami

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), hlmn. 20-28.

mendapatkan pencerahan tentang pengelolaan dana ZIS ke depan untuk bisa kita praktikkan.”

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan siklus pertama ini antara lain peserta terlihat masih sedikit malu-malu dalam mengungkapkan pandangan mereka. Untuk mengatasi problem tersebut tim peneliti bersama dengan para peserta kemudian merumuskan kegiatan pada sesi selanjutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan lebih personal sebelum turun lapangan.

Siklus Kedua:

Penguatan pemahaman manajemen pengelolaan infaq produktif. Inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan.¹¹ George R. Terry dalam *Dasar-dasar Manajemen* mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) pengarahan dan pengawasan (*controlling*).¹² Lebih lanjut, lembaga amal zakat dalam menjalankan perannya selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianutnya, Pertama, amanah sebagai kunci kesuksesan organisasi. Kedua, profesional sifat amanah hendaknya dibarengi dengan profesionalitas. Ketiga, transparan, dengan transparansi dalam pengelolaan zakat akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik.¹³ Selain itu, terdapat tiga pokok penting dalam manajemen yaitu: pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai; kedua, tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.¹⁴

Dalam pengelolaan zakat pola manajemen tradisional biasanya dijalankan secara sambilan, dengan menjadikan pengelola zakat hanya berfungsi sebagai kasir dengan tugas membagi-bagi uang. Ciri-ciri

¹¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlmn. 71.

¹² Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2001), hlmn. 3.

¹³ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlmn. 71-72.

¹⁴ M. Manulang, *Dasar Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlmn. 4.

pengelolaan tradisional¹⁵ antara lain: masih berkembang anggapan bahwa zakat merupakan bantuan, maka para pekerja dan pengelolaannya tidak serius; bekerja pada lembaga zakat menjadi pekerjaan seikhlasnya saja; tanpa manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas belaka. Pembagian tugas juga belum sepenuhnya dipahami oleh anggota organisasi; tanpa seleksi sumber daya manusia dalam lembaga pengelola ZIS tidak serius dalam menyeleksi SDM pengelola; bekerja tanpa imbalan, pola pikir ikhlas beramal masih menjadi pedoman bekerja di yayasan sosial seperti lembaga zakat; kreatifitas rendah; tidak ada monitoring dan evaluasi.

Dari manajemen tradisional dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga nirlaba, termasuk lembaga pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang maksimal, manajemen yang buruk, dan etos kerja yang lemah. Masalah-masalah dimaksud seharusnya dapat diatasi secara bertahap dengan merubah cara pandang pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya.¹⁶

Yang mendesak dilakukan adalah pengelolahan dengan manajemen modern agar bisa berkembang dan maju pesat. Manajemen modern menurut James Stoner memiliki langkah-langkah: proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan adalah suatu proses membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan waktu terbagi menjadi tiga tahap, perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sedangkan perencanaan strategis adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi dan kondisi. Jika perencanaan waktu menekankan pada harmonisnya organisasi dalam beradaptasi, maka perencanaan strategis justru dibuat untuk meredam gejolak yang dapat mengguncang harmoni tersebut.

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotannya. Dalam organisasi

¹⁵ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciptat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlmn.11. Lihat juga Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlmn. 72.

¹⁶ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hlmn. 11-20.

terkumpul orang-orang yang beragam latar belakang dan kepentingan, termasuk dalam lembaga pengelola zakat. Idealnya ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka segala ego baik yang bersifat individu maupun golongan harus dijauhkan.

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Komponen yang juga penting dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan dalam lembaga zakat mempunyai dua substansi. Pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap *amil* telah menyatu dalam diri *amil*. Kedua, secara formal lembaga zakat memiliki dewan syariah yang bertugas untuk mengesahkan mengontrol atau menghentikan setiap program yang dibuat lembaga zakat.

Dalam siklus kedua ini, tim peneliti berdiskusi bersama masyarakat untuk mengevaluasi berbagai kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam diskusi tersebut kelompok dampingan menghendaki adanya penguatan dan penambahan informasi seputar pembentukan program optimalisasi infaq masjid yang dikemas dalam wadah posdaya berbasis masjid. Kegiatan itu selanjutnya dilaksanakan di masjid Fafirru Ilallah desa Kalipakem Kecamatan Donomulyo. Ketua Posdaya Kalipakem menuturkan,”

“Informasi seperti ini sangat penting karena kita biasanya mengelola zakat secara musiman yaitu di bulan Ramadhan kita bentuk panitia zakat dan setelah penyaluran zakat selesai panitia bubar dengan sendirinya tidak ada evaluasi dan perbaikan kedepan.”

Siklus Ketiga:

Pemberian pelatihan tentang optimalisasi infaq masjid. Hal ini berdasarkan pada hasil diskusi dan asesment diatas, pada sesi selanjutnya peneliti melakukan pendampingan dalam bentuk pelatihan pemberdayaan infaq masjid Pada sesi ini peneliti menjelaskan bahwa Tujuan utama

dibentuknya Infaq Masjid adalah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya. Karena salah satu tujuan infaq adalah meningkatkan taraf hidup *mustahiq*, dengan demikian umat Islam diharapkan bisa beribadah dengan tenang karena kebutuhan primernya telah tercukupi. Fungsi dari optimalisasi infaq masjid ini yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan syariah. Pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya

Keunikan dari pemberdayaan infaq masjid ini adalah: *pertama*, sumber dana ZIS bersifat milik masjid yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam yang bisa dikelola sebagai lembaga *non profit*, walaupun misalnya menggunakan akad *mudharabah* maupun *murabahah* margin keuntungan bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tetap berada di bawah margin bank. Dengan demikian maka semangat infaq untuk memberdayakan umat bisa benar-benar tercapai. *Kedua*, dengan adanya Infaq Produktif berbasis masjid maka dana Infaq bisa diproduktifkan secara optimal, dengan demikian maka manfaat dari dana infaq tersebut bisa lebih luas dan bisa dirasakan oleh para *mustahiq*. *Ketiga*, transaksi di Infaq Produktif adalah transaksi bebas bunga, karena akad-akad yang digunakan adalah akad-akad bisnis syariah seperti *qardh al-hasan*, *mudharabah*, *murabahah* dan tentu masih ada plot dana untuk kegiatan dan santunan sosial seperti santunan yatim, dhuafa' dan beasiswa bagi mereka. Namun para nasabah diajak membiasakan berinfaq agar hartanya kian berkah. Ternyata dengan pola infak ini yang terjadi justru akumulasi dari infak para nasabah jika dikumpulkan melebihi margin yang ditetapkan oleh Bank. *Keempat*, dengan pemberdayaan infaq masjid untuk hal produktif ini, tidak akan ada yang merasa di *dhalimi* karena transaksi di dalamnya menggunakan akad *mudharabah* yang prinsipnya untung rugi ditanggung bersama, tidak seperti di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, tidak peduli apakah nasabah untung atau rugi tetap dikenakan tanggungan membayar pokok sekaligus bunganya.

Target pemberdayaan pada masyarakat dampingan adalah terbentuknya masyarakat yang mengaplikasikan pemberdayaan infaq masjid untuk hal-hal yang produktif yang bisa diakses oleh seluruh warga Donomulyo untuk menopang pembiayaan usaha mereka. Skema pembentukan infaq masjid ini adalah seluruh anggota petani jamur dan

masyarakat umum baik dari kalangan petani, pedagang, pegawai negeri, perangkat desa menyetorkan dana infaq masjid ke pengurus program infaq masjid, kemudian dana tersebut dikelola dengan manajemen profesional yang didampingi oleh tim peneliti.

Siklus Keempat:

Monitoring dan penguatan penghimpunan dan pendistribusian infaq masjid. Beberapa hal yang perlu dimonitor adalah: cara penghimpunan infaq masjid dilakukan oleh jamaah masjid. Terapat tiga strategi pengumpulan infaq yang diterapkan oleh instansi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yaitu: pembentukan unit pengumpulan ZIS; pembukaan counter penerimaan infaq; pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat yang bersangkutan yang dilayani oleh tenaga-tenaga profesional; pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.¹⁷

Agar dana ZIS yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Distribusi dana ZIS dapat dilakukan dengan dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif. (1) konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari. (2) konsumtif kreatif dengan cara dana zakat dijadikan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya, dibelikan alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan sejenisnya. (3) produktif konvensional, yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi perah atau alat untuk membajak sawah, dan sebagainya. (4) produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil¹⁸

¹⁷ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), hlmn. 33.

¹⁸ *Ibid.*, hlmn. 35.

Status Kepemilikan Harta ZIS

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat merupakan hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu hak Allah SWT. dan zakat merupakan kewajiban khalifah-Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada manusia saja, tetapi Negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak.¹⁹

Menurut mayoritas para ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustahiq*. Menurut Hanafiyah boleh menyelurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.²⁰

Dengan kata lain bahwa pemilik hakiki harta adalah Allah SWT, namun Allah mewakilkan kepemilikan tersebut kepada orang yang ia kehendaki sebagai pemilik harta secara *majaz*. Harta zakat diwajibkan oleh Allah pemilik mutlak kepada pemilik secara majaz yaitu *muzaki* untuk diberikan kepada salah satu, sebagian atau bahkan keseluruhan golongan *mustahiq* yang ada.

Tim peneliti mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi tentang pengumpulan dan pendistribusian harta zakat dan kondisi pengelolaan zakat di tengah masyarakat saat ini. Peneliti menjelaskan bahwa kondisi kehidupan masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan. Di sisi lain, fiqh dituntut untuk bisa menjawab tantangan zaman. Maka muncullah ijtihad para ulama' kontemporer untuk menjawab berbagai persoalan hukum dalam masyarakat dewasa ini.

Kewenangan *tasarruf* atas harta zakat dan kredit harta zakat berada pada orang yang dipercaya oleh *khalifah*. Pihak yang dipercaya sebagai pengelola tidak boleh mendistribusikan harta zakat semauanya sendiri, akan tetapi harus bertindak seperti wali yatim pada harta anak yatim. Seperti yang dilakukan oleh Umar, ia memposisikan diri dari harta yatim sebagai wali yatim, jika ia kaya maka ia menjaga diri, jika ia membutuhkan maka ia

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, jilid I (Kairo: Muassasah al-Risalah, tt), hlmn. 105.

²⁰ Khalid Abd Razaq al-'Ani, *Masharif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nashr wa Tauzi', 1999), hlmn. 157.

memakan secara *ma'ruf*, dan jika ia diberi kemudahan maka ia mengembalikannya.²¹

Menurut imam Malik (w.179 H.) penguasa boleh melakukan ijtihad dalam pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan *mustahiq* atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustahiq*. Karena didasarkan atas penafsiran kata *li* dalam ayat tersebut yang bermakna *manfa'at*. Menurut Didin Hafiduddin jika huruf *lam* diartikan *li al-tamlík*, maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan digunakan semau mereka, dan hal ini kurang mendidik.²² Sejalan dengan pendapat di atas, seorang hakim berhak berijtihad dalam pembagian dan distribusi zakat kepada para *mustahiq* dengan cara mendahulukan satu kelompok dari yang lainnya berdasarkan kebutuhan, kemudian memberikan bagian yang lain pada tahun berikutnya. Jika harta zakat masih tersisa maka boleh diproduktifkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para *mustahiq* secara luas dari pada diberikan secara tunai yang pada tahun berikut keadaannya masih tetap seperti sedia kala.²³

Tujuan utama dari pembagian zakat, infaq dan shodaqoh adalah untuk kemaslahatan *mustahiq* dan memproduktifkan harta zakat pada bidang usaha merupakan *maslahah 'ammah*, maka memproduktifkan harta zakat hukumnya adalah *mubah*. Meyegerakan dalam membayar zakat adalah merupakan kewajiban *muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada penguasa atau penggantinya, setelah itu tanggung jawab sepenuhnya terletak pada penguasa atau penggantinya. Intinya bahwa pendistribusian harta zakat adalah hak *amil* sesuai dengan ijtihadnya. Sementara memproduktifkan harta zakat oleh *amil* diperbolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan para *mustahiq* secara umum.

Adapun hukum mengkreditkan harta zakat, para ulama klasik belum ada yang membahas masalah ini, namun ulama kontemporer membolehkan mengkreditkan harta zakat. Di antara ulama ini adalah: Muhammad Abu Zahrah, Husain Makhluf, Hasan Abd. Rahman, dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka beralasan bahwa hutang yang kembali tersebut berasal dari harta zakat, maka alangkah lebih baik jika harta zakat dikreditkan (dipinjamkan)

²¹ Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Masarif al-Zakat wa Tamlíkuha...* hlmn. 121.

²² Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlmn.135.

²³ Husain 'Ali Muhammad Munazi', dalam *Abhath Nadwah...* hlmn.13.

dengan cara bebas dari riba agar kembali lagi ke Baitul Mal, sehingga orang-orang Islam tidak terjebak dalam praktek riba.²⁴

Pendapat di atas dikuatkan oleh Rofiq Yunus al-Masri bahwa Umar bin Khattab memberi kredit kepada Hindun Binti 'Utbah dari baitul mal sejumlah empat ribu untuk berdagang, Abu Musa al-Ash'ari memberi kredit pada kedua anak Umar bin Khattab untuk berdagang, Zubair bin 'Awam bertransaksi kredit sebagai ganti dari *wadi'ah* untuk berdagang dan membeli rumah, dan di masa Umar bin 'Abd. 'Aziz negara memberikan kredit untuk dikembangkan sampai pada *ahlu dhimmah*.²⁵

Lebih jauh Rafiq Yunus al-Masri memerinci tentang hukum kredit dilihat dari segi orang yang memberi kredit sebagai berikut: *mandub* karena menolong orang yang membutuhkan. Wajib jika orang yang mengajukan kredit terpaksa untuk meminjam demi menutupi kebutuhan hidup dan keluarganya dan orang yang memberikan kredit adalah orang kaya serta mampu menolongnya. *Mubah* jika tidak untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. *Makruh* jika meminjamkan kepada seseorang yang diketahui ada orang lain yang lebih membutuhkan kredit tersebut, atau mengetahui kalau uang tersebut untuk keperluan yang *makruh* seperti berlebih-lebihan. *Haram*, jika ia mengetahui kredit tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang haram seperti minum *khamr*, atau berjudi, atau menyuap.²⁶ Pada prinsipnya meminjamkan harta zakat diperbolehkan agar umat Islam tidak terjebak dalam praktek riba. Hukum meminjamkan itu sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi baik orang yang meminjamkan maupun orang yang pinjam. Hukum ini terbagi menjadi *mandub*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*.

Kesimpulan

Kondisi sosial masyarakat Donomulyo Malang secara umum relatif kondusif sebagai sebuah komunitas pinggiran. Potensi aktifitas keagamaan seperti majelis ta'lim, majelis sholawat, media pendidikan yang banyak terdapat pada masyarakat Donomulyo merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek

²⁴ Khalid Abd. Razaq al-'Ani, *Masarif al-Zakat wa Tamlikuha...* hlmn. 331.

²⁵ Rofiq Yunus al-Masri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlmn. 211.

²⁶ *Ibid*, hlmn. 209-210.

sosial, religi, budaya, pendidikan bahkan ekonomi. Tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan media-media tersebut sebagai medan budaya untuk menanggulangi berbagai permasalahan seputar kemiskinan.

Dalam rangka merubah pola pandang masyarakat bahwa kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat diantara warga sekitar adalah merupakan salah satu tanggung jawab seorang muslim kepada muslim yang lain maka dilakukanlah metode PAR (*participatory action research*). Dengan metode ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka memfasilitasi dan memotivasi agar masyarakat sekitar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kelompok serta problematikanya untuk mengatasi dan meminimalisir kemiskinan yang terjadi.

Adapun hasil perubahan yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) masyarakat dampingan dapat menggali berbagai problem yang mereka hadapi, menyampaikan berbagai pengalaman mereka dalam memberikan wawasan baik sebagai teman, guru, maupun sebagai seorang tetangga. (2) meningkatkan sensitifitas sosial dalam menangkap isu seputar problem ekonomi serta memberikan solusi dan menjadi problem solver baik bagi diri sendiri maupun kepada orang yang melakukan konsultasi serta curhat kepada peserta dampingan. (3) masyarakat dampingan dapat merumuskan berbagai kebutuhan dan penguatan materi sebagai pendamping yang baik di masyarakat. Penguatan tersebut baik dari aspek pengelolaan ZIS maupun berbagai hukum seputar ZIS seperti hukum penghimpunan dan pendistribusian ZIS. (4) masyarakat dampingan mengharapkan kegiatan ini tidak berhenti sampai pada pelatihan dan pembentukan BMT ZIS saja, namun bisa ditindak lanjuti dengan pendampingan hingga menjadi lembaga pengelola ZIS dan BMT yang professional.

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan tim peneliti pada keompok masyarakat Donomulyo, direkomendasikan beberapa hal berikut ini: (1) masyarakat dampingan Desa Kalipakem pada khususnya dan Kecamatan Donomulyo pada umumnya merupakan model yang baik untuk dijadikan percontohan pengembangan masyarakat pedesaan dengan basis filantrophy Islam. (2) kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan lokal yang berkaitan dengan masalah ekonomi harusnya ada upaya pemberdayaan masyarakat berbasis filantrophy Islam. untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kabupaten Malang. (3) Pendampingan berikutnya diharapkan lebih akomodatif dan spesifik pada kelompok binaan masyarakat miskin.[]

Daftar Referensi

- Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta,. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005)
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani Press, 2002)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2005)
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004)
- <http://www.malangkab.go.id/berita-1343.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/13/02/06/mhsdrz-umat-butuh-masjid> , diakses 10 Oktober 2015
- Khalid Abd Razaq al-'Ani, *Masharif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitab wa al Sunnah*, (Oman: Dar Usamah li al-Nashr wa Tauzi', 1999)
- M. Manulang, *Dasar Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008)
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Ramadhon Chotib, *Fiqh Masjid Menjawab Dinamika Permasalahannya*, (DMI Malang, 2009)
- Rofiq Yunus, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2007)
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)

Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2001)

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, tt)

Efektifitas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

IMAM MUSTOFA

STAIN Jurai Siwo Metro, Indonesia
imammustofa472@yahoo.co.id

Abstract: State College for Islamic Studies Jurai Siwo of Metro is such as Islamic College that always try increasing its role in upgrading the welfare of the society through empowerment. The empowerment is done by such an agenda, it is called Community Service Program (KKN) through family empowerment which was done by the students that is under controlled by the central for research and society empowerment (P3M). The program has base as family empowerment has been done for three years, from 2014 till 2016 where the program takes place two times a year. This current study aims to discuss the effectiveness of society empowerment by applying community service program as base family empowerment in Lampung province. The study is important to do as the assesment towards society empowerment program by applying community service program. The paper is based on the data which has been taken from various locations of community service program that spreads out in some districts in Lampung province. Referring to the research, it can be concluded that the realization of society empowerment through community service program which was done by the central for research and society empowerment (P3M) of STAIN Jurai Siwo Metro got supports from the whole academicians and it has seriously been done by students. Yet, it does not run well yet. It can be seen from the establishment of family empowerment program which did not maximally run and use as the central of society empowerment. The uneffectiveness of this empowerment is caused by some factors such as the lack of corporation, the weakness of among lecturers and students understanding about the main concept and application and none of the contiunity in putting down the community service program.

Keywords : effectiveness, empowerment, family empowerment, Posdaya.

Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia masih jauh dari kata ideal, oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkannya. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diterbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 yang berisi program pembangunan yang pro rakyat dengan prioritas penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dengan menjalankan program pemberdayaan masyarakat serta usaha mikro dan kecil. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dengan mengedepankan delapan sasaran dan tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*) utamanya pengentasan kemiskinan untuk berkeadilan, yaitu pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua program pembangunan yang berkeadilan dan prorakyat yaitu keadilan untuk semua terlebih keadilan untuk anak, perempuan, ketenagakerjaan, hukum serta kelompok miskin dan termarginalkan.¹

Pencapaian MDGs yang dibutuhkan kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, swasta sebagai penggerak sektor perekonomian dan masyarakat sebagai pengontrol dan pemerintah sebagai pemberi aspirasi dampak pembangunan.² Untuk merealisasikan kerjasama tersebut maka muncullah sebuah gagasan pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Gagasan ini muncul sebagai respon atas keinginan pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Upaya ini merupakan sumbangan dalam wujud nyata untuk mencapai target pembangunan abad millenium (MDGs) pada tingkat desa dan kelurahan. Pengembangan SDM dan Posdaya yang dilaksanakan tersebut dilakukan melalui kemitraan dengan sekolah SMA, Lembaga Swadaya Masyarakat, mitra kerja lain, dan Pemerintah Daerah.³

¹ L.V. Ratna Devi S., "Upaya Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Pusat Studi Komunikasi dan Kebijakan (PSKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* Vol.1, no. 1 (Maret 2013), 22.

² Abdurrazzak Naufal dan Yatri Indah Kusumastuti, "Evaluasi Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA): Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat," *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. Vol.6, no. 2 (September 2010), 2.

³ *Ibid.*

Usaha menangani masalah kemiskinan melalui pemberdayaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini juga tengah dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro. P3M STAIN Jurai Siwo Metro dengan bekerjasama dengan Yayasan Damandiri mulai tahun 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa tematik Posdaya atau KKN berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). KKN tematik Posdaya ini dilaksanakan di beberapa tempat yang mempunyai daerah rawan kemiskinan baik tingkat desa, dusun, pekon, atau RW. Harapan besar adanya program ini adalah membentuk dan mengembangkan masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera. Ujung tombak dari program ini adalah keluarga dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Posdaya merupakan forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya kesehatan, pendidikan dan wirausaha, agar keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya. Oleh karena itu program advokasi dan pemberdayaan pembangunan yang ditawarkan dalam Posdaya adalah program-program yang mendukung penyegaran fungsi-fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga yang intinya adalah keikutsertaan dalam KB, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang mapan.⁴

KKN tematik Posdaya ini pada dasarnya sudah digagas di STAIN Jurai Siwo Metro sejak tahun 2013, namun dapat dilaksanakan mulai tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai 2016, setidaknya sudah dilaksanakan tiga kali KKN

⁴ Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 7. Lihat juga Pudji Muljono, "The Model of Family Empowerment Program for Community Development in West Java, Indonesia," *Journal of Agricultural Extension and Rural Development* Vol. 3(11), pp. 193-201, (October, 2011): 195.

tematik Posdaya oleh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro di tiga kabupaten berbeda, yaitu kabupaten Lampung Tengah, kabupaten Lampung Timur dan kabupaten Pringsewu.

Tulisan ini mengkaji efektifitas pelaksanaan KKN tematik Posdaya yang dilaksanakan oleh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro di tiga kabupaten, yaitu kabupaten Lampung Selatan, kabupaten Lampung Timur dan kabupaten Pringsewu. Kajian ini merupakan kajian evaluatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga akan diketahui hasil dari sebuah program kerja. Dengan demikian, akan menjadi bahan pertimbangan, apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau belum, pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai atau belum, kalau belum apa yang harus diperbaiki dan dioptimalkan. Selain itu, berdasarkan kajian semacam ini akan diketahui dimana faktor penyebab keefektifan dan ketidakefektifan program KKN tematik Posdaya yang dilaksanakan di STAIN Jurai Siwo di berbagai wilayah di propinsi Lampung.

Konsep Dasar KKN Tematik Posdaya

Konsep Posdaya

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) adalah suatu forum yang dibentuk oleh Yayasan Damandiri guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi Posdaya bukan hanya mampu menyemarakkan kembali budaya gotong-royong dan peduli kepada sesama, tetapi juga mengangkat berbagai potensi yang dimiliki baik sumber daya alam maupun warganya guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Merambahnya Posdaya yang dipimpin oleh Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono ternyata mampu menggerakkan masyarakat menuju kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi lokal yang ada.⁵

Posdaya merupakan pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai kegotongroyongan di masyarakat. Posdaya adalah sebuah gerakan dengan ciri khas “*bottom up programme*”, kemandirian, dan pemanfaatan sumberdaya serta potensi lokal sebagai sumber segala solusi. Pihak “luar” hanya berperan sebagai fasilitator, mediator dan pembangkit

⁵ Nur Cholilah Junita Dalimunthe and Murdianto, “Analisis LKM Posdaya Kenanga Terhadap Tingkat Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Situ Gede,” *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. vol.9, no. no.2 (September 2013): 157.

gagasan.⁶ Kegiatan-kegiatan posdaya dapat berupa: sarasehan, pelatihan membuat kerajinan tangan, pelatihan tentang pendidikan, pembuatan aquaponik, dan lainnya. Misalnya untuk sarasehan, Sedangkan hasil sarasehan bersama warga, disepakati bahwa akan menjalin informasi dan komunikasi antar warga, dan menumbuhkan sikap positif.⁷ Melalui aquaponik, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pembuatan aquaponik serta memperkuat fungsi Posdaya melalui program ekonomi biru/*blue economy*. Konsep ekonomi biru adalah pengembangan ekonomi di bawah langit biru yang dikembangkan hampir tanpa modal, tanpa pengalaman khusus, tetapi dengan kreatifitas memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal tanpa meninggalkan sisa karena bahan baku yang diolah selalu dipergunakan untuk proses produksi berikutnya.⁸

Posdaya juga merupakan forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.⁹ Selain itu, kegiatan Posdaya mengusung kemandirian, pemanfaatan sumber daya serta potensi lokal sebagai solusi.¹⁰ Posdaya mengajarkan masyarakat untuk mandiri, kemandirian pengetahuan yang ditunjukkan melalui kegiatan Posdaya juga dapat mendorong dan menjadi keteladanan bagi anggota keluarga lainnya untuk meningkatkan kualitas diri dan pada akhirnya

⁶ Naufal dan Kusumastuti, "Evaluasi Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA): Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat," 3.

⁷ Rasiman et al., "IbM Pengembangan Potensi Lokal Posdaya Durian Jaya Menuju Desa Wisata di Kelurahan Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang," *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang* Vol.6, no. 2 (September 2015): 6.

⁸ Eko Retno, Suwarno Widodo, dan Muniroh Munawar, "IbM Posdaya Kusuma Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang," *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang* Vol. 5, no. 2 (September 2014): 9.

⁹ Sigit Pamungkas, Amiruddin Saleh, dan Pudji Muljono, "Hubungan Aktivitas Komunikasi dengan Tingkat Keberdayaan Kader Posdaya di Kota dan Kabupaten Bogor," *Jurnal Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor* Vol.11, no. 1 (2013): 1.

¹⁰ Atria Widiana dan Richard W.E. Lumintang, "Kompetensi Pengembangan Kewirausahaan Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor," *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. Vol.9, no. No.1 (2013): 2.

tercapai peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.¹¹ Langkah ini diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga.¹²

Konsep pemberdayaan inilah yang kemudian diadopsi untuk dijadikan basis pengabdian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik pengabdian dosen maupun pengabdian mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata. Istilah yang digunakan untuk KKN berbasis Posdaya adalah KKN tematik Posdaya.

KKN Tematik Posdaya

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bagian dari sistem pendidikan tinggi yang menempatkan mahasiswa di luar kampus agar mahasiswa hidup ditengah-tengah masyarakat bersama masyarakat untuk membantu dan mendampingi masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) lokal dan sumberdaya manusia (SDM) yang ada untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Mengingat potensi dan permasalahan di masyarakat sangat kompleks dan berubah sangat cepat, maka perlu dilakukan KKN yang berbasis *membantu* masyarakat dengan arahan *fungsi keluarga* atau *sasaran Human Development* untuk menghasilkan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* atau *Human Development Index (HDI)* yang tinggi, atau pencapaian tujuan dan sasaran *Millenium Development Index (MDGs)* agar masyarakat bisa melanjutkan kegiatan pembangunan yang terarah. KKN Posdaya diharapkan tidak terpancing pada kegiatan *problem solving* sederhana yang dialami oleh masyarakat setempat. Melalui arahan pementapan fungsi keluarga atau arahan MDGs diharapkan akhirnya masyarakat mampu mengatasi masalah

¹¹ Atria Widiana dan Richard W.E. Lumintang, "Kompetensi Pengembangan Kewirausahaan Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor," *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. Vol.9, no. 2 (2013): 2.

¹² Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 7-8.

sehari-harinya secara mandiri. Oleh karenanya, kegiatan KKN tidak cukup hanya dilakukan sekali kunjungan.¹³

KKN Posdaya merupakan salah satu jenis KKN tematik yang bertujuan membentuk, membina, dan mengembangkan Posdaya sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusi (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) lokal. Dari sudut masyarakat penerima, KKN Tematik Posdaya membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan Lembaga Posdaya di desa atau pedukuhan secara sistematis. Posdaya yang dibentuk merupakan wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan, KB dan kesehatan, dan lingkungan, yang sekaligus merupakan upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pencapaian tujuan dan sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)*.¹⁴

Kegiatan KKN Tematik Posdaya dilaksanakan secara ilmiah, sistematis dengan menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, serta berkesinambungan. Selanjutnya, KKN Tematik Posdaya diarahkan dengan tujuan memperkuat kemampuan keluarga dan masyarakat secara mandiri.¹⁵ Program KKN tematik Posdaya ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa mempelajari dan mengatasi permasalahan keluarga dan penduduk melalui bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat dan lembaga pedesaan lainnya.
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat sesuai arahan pembangunan manusia (*human development*), mencapai target dan sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)*, kompetensi, potensi, sumberdaya dan kemampuan lingkungan dalam wadah kerjasama masyarakat, pemerintah, swasta dan lembaga lainnya.
- c. Menggalang komitmen, kepedulian dan kerjasama berbagai *stakeholders* (Pemda, swasta, LSM dan masyarakat) dalam upaya pengentasan

¹³ Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Pedoman KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2009), 6-7.

¹⁴ *Ibid*, 7-8.

¹⁵ *Ibid*, 7.

kemiskinan, kelaparan, mengatasi permasalahan dan ketidak berdayaan penduduk dan keluarga lainnya.

- d. Membantu mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh mitra kerja pembangunan (Pemda, lembaga swasta dan LSM) dalam perencanaan dan pengelolaan program yang bersiat partisipatif.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang ditekuni.¹⁶

Sementara sasaran KKN tematik Posdaya adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya Posdaya sebagai sarana pemberdayaan keluarga dan penduduk untuk pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan. Sasaran utama pembentukan ini bukan semata-mata dengan tujuan membentuk Posdaya, tetapi dimaksudkan agar keluarga muda, keluarga lansia, kaya dan miskin bisa bersilaturahmi dan saling peduli sesamanya. Jadi sasarannya adalah bahwa Posdaya ini menjadi forum pemberdayaan keluarga muda kurang mampu dan berkembangnya suasana hidup gotong royong di kalangan masyarakat setempat.
- b. Terbentuknya pengurus melalui fasilitasi yang diberikan atau diupayakan oleh mahasiswa dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan lainnya yang ada di sekitar desa.
- c. Tersusunnya rencana program dan kegiatan pembangunan yang kreatif dan inovatif berdasarkan arahan basis human development; atau *Millennium Development Goals (People Centered Development)* melalui pengembangan kemampuan keluarga dan masyarakat dengan mengembangkan program pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, sekaligus mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan potensi, minat masyarakat dan kondisi penduduk sebagai sasaran garapan.
- d. Terlaksananya program Posdaya dengan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- e. Makin mengecilnya jumlah keluarga kurang mampu karena mengikuti proses pemberdayaan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara sempurna.
- f. Meningkatnya kerja sama Perguruan Tinggi dengan Pemda, swasta dan LSM.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, 9.

¹⁷ *Ibid*, 9.

KKN dengan model tematik Posdaya inilah yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro. P3M telah melaksanakan KKN model ini sejak awal tahun 2015.

Teori Pemberdayaan dan Partisipasi Sebagai Landasan Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses yang dijalankan agar seseorang mendapatkan kontrol atas kehidupan mereka.¹⁸ Secara sederhana, pemberdayaan berasal dari kata kerja “memberdayakan” yaitu sebuah sarana yang untuk ‘memungkinkan’ atau untuk ‘mengizinkan’ seseorang untuk berperan aktif yang prakarsai oleh orang lain yang memberdayakan. pemberdayaan merupakan tindakan membangun, mengembangkan, meningkatkan daya melalui kerja sama, berbagi dan bekerja sama. Pemberdayaan adalah proses interaktif berbasis pada sinergis, bukan zero-sum, asumsi kekuasaan; yaitu, proses pemberdayaan perubahan kekuasaan dalam situasi yang bertentangan dengan hanya mendistribusikan.¹⁹

Banyak bukti penelitian yang menunjukkan pentingnya keluarga sebagai lembaga untuk melaksanakan fungsi kegiatan produksi, konsumsi, reproduksi, dan akumulasi fungsi yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi individu dan masyarakat. Jalur kunci untuk fungsi-fungsi ini pada gilirannya sebagai modal pemberdayaan sosial dan ekonomi, termasuk modal keluarga dan ketahanan keluarga.²⁰ Memberdayakan keluarga bukan hanya sekadar solusi instan untuk menyelesaikan problem yang saat ini terjadi. Lebih dari itu, pemberdayaan lebih menekankan prospek keluarga dalam jangka panjang melalui pengembangan keterampilan agar dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Apabila pemberdayaan keluarga meningkat, maka keluarga akan lebih kompeten dan

¹⁸ Guitierrez sebagaimana dikutip oleh Kate Freiberg et.al. “The Parent Empowerment and Efficacy Measure (PEEM): A Tool for Strengthening the Accountability and Effectiveness of Family Support Services” *Australian Social Work*, Volume 67, May (2014), 4.

¹⁹ Vogt dan Murrel sebagaimana dikutip Tristan Claridge, *Designing Social Capital Sensitive Participation Methodologies*, (2014), 25.

²⁰ Zitha Mokomane, *Role of Families in Social and Economic Empowerment of Individuals*, United Nations Expert Group Meeting on “Promoting Empowerment of People in Achieving Poverty Eradication, Social Integration and Full Employment and Decent Work for All”, (New York: 10-12 September 2012), 2

tidak selalu bergantung pada penyedia layanan. Dengan demikian maka pemberdayaankeluarga akan membawa perubahan positif dimana pusat penyelesaian masalah adalah keluarga.²¹

Suharto menyatakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang / kelompok atau komunitas yang rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan, tidak hanya dalam arti kebebasan berekspresi, tapi bebas dari kelaparan, kebodohan dan penderitaan; (b) menjangkau sumber daya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.²²

Pemberdayaan keluarga umumnya terdiri dari tiga level, yaitu 1) keluarga yang merupakan lingkungan primer; 2) sistem pelayanan, yaitu pelayanan yang diberikan penyedia layanan; dan 3) komunitas yaitu lingkaran manajemen yang lebih luas.²³ Dunst et. al, (1994) sebagaimana dikutip Graves dan Shelton menyatakan bahwa konsep pemberdayaan memiliki tiga komponen utama. *Pertama*, ada asumsi yang mendasari bahwa semua orang memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan tersebut. *Kedua*, kesulitan keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka bukan karena ketidakmampuan mereka untuk melakukannya, melainkan, sistem sosial yang tidak mendukung yang tidak memberi peluang bagi keluarga untuk memperoleh atau menunjukkan kompetensi. *Ketiga*, agar pemberdayaan memiliki pengaruh positif pada keluarga, anggota keluarga yang mencoba untuk menerapkan keterampilan dan kompetensi juga harus melihat perubahan sebagai akibat setidaknya sebagai usaha mereka.²⁴

²¹ Kelly N. Graves and Terri L. Shelton, "Family Empowerment as a Mediator between Family-Centered Systems of Care and Changes in Child Functioning: Identifying an Important Mechanism of Change," *Journal of Child & Family Studies*, 16 (4), 556-566, (2007), 557.

²² Suharto E, *Community Development for People Empowerment*, (bandung: Refika Aditama, 2005), 324.

²³ Paul E. Koren et. al. "Measuring Empowerment in Families Whose Children Have Emotional Disabilities A Brief Questionnaire" *Rehabilitation Psychology*, Vol. 37, (1992), 308.

²⁴ Kelly N. Graves and Terri L. Shelton, "Family Empowerment as a Mediator between Family-Centered Systems of Care and Changes in Child Functioning: Identifying an Important Mechanism of Change," *Journal of Child & Family Studies*, 16 (4), 556-566, (2007): 557.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan mereka sebagai partner dalam menjalankan sebuah program. Menurut Stephen Billet, ada beberapa hal penting yang perlu pegangi agar sukses dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu, (1) membangun dan memelihara maksud dan tujuan bersama (2) membangun dan memelihara hubungan dengan partner, (3) Membangun dan memelihara kapasitas program bersama (4) membangun dan memelihara kepemimpinan dan (5) membangun dan memelihara Kepercayaan dan saling percaya.²⁵

Teori Partisipasi

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua istilah yang sangat berkaitan erat. Berkaitan dengan hal ini Hocombe menyatakan bahwa partisipasi dan pemberdayaan tidak terpisahkan, kedua istilah ini berbeda tapi keduanya sangat bergantung pada satu sama lain untuk memberikan arti dan tujuan. Partisipasi merupakan tindakan, atau menjadi bagian dari suatu tindakan seperti proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan mewakili berbagi kontrol, hak dan kemampuan untuk berpartisipasi, untuk mempengaruhi keputusan, seperti pada alokasi sumber daya.²⁶

Para ahli mulai meninggalkan istilah-istilah: “pihak yang terlibat dalam pembangunan“, “pelaku pembangunan”, dan sebagainya. Mereka lebih memilih menggunakan istilah “stakeholders” yang tidak berkonotasi dikotomis tetapi secara menyatu bersama-sama menentukan kebijaksanaan, melaksanakan dan menanggung implikasi hasil pembangunan, baik ataupun buruk. Jika ini menjadi konsensus, tentunya akan mengandung konsekuensi logis bahwa dalam pembangunan di bidang apapun, seluruh pihak berhak dan wajib berpartisipasi, tidak hanya dalam pelaksanaannya, tetapi juga mulai dan inisiatif awal, penelitian dan perencanaan, pengambilan keputusan kebijaksanaan, pengendalian, termasuk menanggung akibat dari suatu pelaksanaan kebijaksanaan bersama tersebut. Paradigma partisipasi seluruh stakeholders tersebut bersama-sama paradigma lainnya, yaitu

²⁵ Stephen Billet et. All. “Collaborative Working and Contested Practices: Forming, Developing and Sustaining Social Partnerships in Education” *Journal of Education Policy*, Vol 22, No. 6, (November 2007): 648-652.

²⁶ Holcombe S., *Managing to Empower: The Grameen Bank's Experience of Poverty Alleviation.* (New Jersey: Zed Books Ltd, 1995), 17. Baca juga Norwegian Agency for Development Cooperation, *Framework for Analysing Participation in Development*, (Oslo: Noraad, 2013), 6.

“pemberdayaan masyarakat” menjadi semacam pemicu bagi timbulnya gairah memformalkan partisipasi di segala aspek pembangunan tersebut dalam proses teknis.²⁷

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalamnya.²⁸ Price dan Mylius menyatakan bahwa partisipasi berarti keterlibatan penerima manfaat dalam perencanaan, desain, implementasi dan pemeliharaan berikutnya dari sebuah pembangunan. Dengan definisi ini berarti bahwa orang yang dimobilisasi, mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.²⁹ Hansen, *et.al* sebagai dikutip Claridge menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses sosial dimana kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan bersama yang tinggal di wilayah geografis diajak secara aktif mengidentifikasi dan mengejar kebutuhan mereka, mengambil keputusan dan menetapkan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan tersebut.³⁰

Berbagai definisi mengenai partisipasi mempunyai kesamaan arti, yaitu mengajak masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan, hal. Hal ini sering disebut sebagai partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai berbagai faktor termasuk lokasi geografis, norma, dan kepentingan. Banyak definisi partisipasi petunjuk pada kontinum partisipasi (lihat bagian tipologi) dan berbagai tingkat keterlibatan masyarakat. Beberapa definisi fokus pada aspek-aspek lain seperti keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pada semua tahap pembangunan; pada hasil; pada pemberdayaan; dan pada peran penting dari kelompok yang kurang beruntung terutama perempuan dan orang miskin.³¹

²⁷ Muhammad Ramlan Salam, “Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Pusat Kota Palu”, dalam *Jurnal Ruang* Volume 2 Nomor 2 (September 2010): 8.

²⁸ Davis Keith, *Human Relation At Work: The Dynamics of Organizational Behavior*, (Japan: Mcgraw-Hill, 2003), 34. Baca juga Ellie Brodie *et. al.*, *Understanding Participation A Literature Review*, (Perth: Institute for Volunteering Research, 2009), 4.

²⁹ Price S, Mylius B, 'Social Analysis and Community Participation' (1991), 6.

³⁰ Tristan Claridge, *Designing Social Capital Sensitive Participation Methodologies*, (2014), 21.

³¹ *Ibid.*

Menurut Ericson sebagaimana dikutip oleh Slamet bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

- a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
- b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
- c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.³²

Menurut Davis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa : (1). Pikiran (*psychological participation*); (2) Tenaga (*physical participation*); (3) Keahlian (*participation with skill*); (4) Barang (*material participation*); (5) Uang (*money participation*).³³

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Pemeberdayaan dan partisipasi akan menjadikan masyarakat sebagai subyek utama pelaksana program. Artinya, mereka diharapkan dapat melaksanakan program secara mandiri setelah diberi pembekana dan pelatihan, sehingga mereka menjadi *problem solver* bagi masalah-masalah yang mereka hadapi, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

³² Slamet Y., *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 89. Baca juga Lince Magriasti, "Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton, "Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah (2011): 235.

³³ Davis Keith, *Human Relation.*, 34.

Menimbang Efektivitas KKN Posdaya

Tahapan Pelaksanaan Program KKN Tematik Posdaya

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: *Pertama*, tahap pendaftaran. Pendaftaran dibuka satu setengah bulan sebelum pemberangkatan. Pendaftaran dilakukan secara *online* kemudian dilanjutkan dengan pemberkasan dan verifikasi berkas oleh panitia. Verifikasi ini perlu untuk mengecek kevalidan data yang digunakan untuk pendaftaran. Mahasiswa yang akan mendaftar untuk menjadi peserta KKN tematik posdaya ini harus memenuhi berbagai persyaratan utama, yaitu: a) Mahasiswa harus sudah lulus 120 SKS mata kuliah; 2) Menyerahkan biodata/transkrip nilai yang dikeluarkan Subbag Akademik dan Kemahasiswaan; 3) Menyerahkan surat pernyataan sehat yang dilampiri dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Kedua, koordinasi pelaksanaan. Koordinasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses persiapan pelaksanaan KKN. Koordinasi ini ada dua tahap, yaitu koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal yaitu koordinasi antara Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) dengan wakil ketua bidang akademik. Selain koordinasi antara Kepala P3M dengan Wakil ketua bidang Akademik, juga dilakukan koordinasi Kepala P3M dan Wakil Ketua bidang satu dengan Ketua STAIN Jurai Siwo Metro. Setelah itu juga ada rapat koordinasi dengan seluruh panitia dan Dosen calon Pembimbing Lapangan. Koordinasi dilakukan dalam rangka menyiapkan langkah-langkah strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan KKN, termasuk pemilihan lokasi KKN. Sementara itu, koordinasi eksternal yaitu koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, pihak kecamatan sampai pihak lurah atau kepala desa yang akan menjadi lokasi KKN. Koordinasi ini selain membicarakan izin lokasi, juga membicarakan mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KKN mahasiswa.

Ketiga, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi biasanya dilaksanakan pada saat rapat koordinasi antara pihak P3M dengan pihak pimpinan STAIN. Ada tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi KKN. *Pertama*, kondisi masyarakat yang akan dijadikan lokasi, yaitu diutamakan masyarakat yang kurang terberdayakan secara sosial dan kurang berperan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. *Kedua*, faktor keamanan. Wilayah propinsi Lampung termasuk zona merah yang rawan akan konflik. Selain

itu, di beberapa kecamatan sangat rawan terjadi tindak kriminal, terutama pembegalan. *Ketiga*, letak geografis. Pemilihan lokasi KKN tematik Posdaya di STAIN Jurai Siwo sangat memperhatikan jarak, jauh dekatnya dari Kota Metro, hal ini karena anggaran pelaksanaan KKN harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan satu tahun sebelumnya.

Keempat pembagian kelompok. Setelah pendaftaran dan penyelesaian berbagai persyaratan, mahasiswa peserta KKN Tematik Posdaya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sesuai dengan jumlah kelurahan atau desa yang akan dijadikan lokasi. Pengelompokan peserta mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu jurusan atau prodi dan dari sisi jenis kelamin. Setiap kelompok terdiri dari mahasiswa dengan latar belakang multi program studi. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan program tidak terjadi tumpang tindih dan agar program yang dilaksanakan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu sesuai dengan latar belakang mahasiswa peserta KKN. Umumnya hanya ada empat latar belakang ilmu, yaitu pendidikan Islam, hukum Islam, ekonomi Islam, dan komunikasi.

Kelima, pembekalan DPL dan mahasiswa peserta. Pembekalan dilaksanakan untuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan pembekalan untuk mahasiswa. Pembekalan ini sangat penting dilaksanakan, karena dengan adanya pembekalan ini para DPL dan mahasiswa mengetahui arti penting KKN Tematik Posdaya, maksud dan tujuannya, mekanisme dan teknis pelaksanaannya. Pembekalan bagi para Dosen Pembimbing Lapangan biasanya disampaikan oleh Tim Posdaya dari yayasan Damandiri Jakarta. Pembekalan DPL dilakukan dengan tujuan agar DPL sebagai ujung tombak pelaksanaan KKN Posdaya dapat dipersiapkan dan mampu membimbing mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan KKN Posdaya. Materi pembekalan bagi para DPL ini meliputi, a) Falsafah (arti, tujuan, sasaran dan manfaat KKN, Posdaya, serta KKN Tematik Posdaya); b) Rencana program dan pengorganisasi Pelaksanaan KKN Tematik; c) Deskripsi tugas dan tata tertib mahasiswa peserta KKN dan DPL; d) Pelaporan dan evaluasi/penilaian peserta KKN dan laporan DPL.

Sementara itu pembekalan untuk mahasiswa diberikan oleh para DPL yang telah mendapatkan pembekalan dari Tim Posdaya Yayasan Damandiri. Materi pembekalan untuk mahasiswa meliputi: a) Falsafah (arti, tujuan, sasaran dan manfaat dari KKN, Posdaya, serta KKN Tematik Posdaya); b) Rencana program dan pengorganisasian KKN Tematik; c) Deskripsi tugas dan tata tertib mahasiswa peserta KKN; d) Pelaporan yang dibuat dan

evaluasi/penilaian peserta KKN; e) *Achievement motivation training*; f) Materi Pembentukan Posdaya.

Keenam, survei lokasi dan identifikasi awal. Pada saat survei ini mereka menemui lurah atau kepala desa dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendiskusikan dan melakukan identifikasi masalah yang ada di desa lokasi. Identifikasi masalah ini sebagai bahan pertimbangan untuk persiapan program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dengan pendampingan dari DPL.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan KKN tematik Posdaya mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro meliputi beberapa kegiatan: *Pertama*, penerjunan mahasiswa peserta KKN. Penerjunan merupakan acara seremonial dalam rangka menyerahkan mahasiswa kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati. Selanjutnya para mahasiswa peserta KKN oleh Bupati diserahkan kepada camat dan diserahkan kepada para lurah atau kepala desa.

Kedua, sosialisasi program posdaya. Pada awal kedatangan mahasiswa di lokasi KKN, para mahasiswa melakukan sosialisasi Posdaya kepada masyarakat dengan difasilitasi pemerintah desa. Sosialisasi ini idealnya menyampaikan mengenai konsep dan teknis pelaksanaan Posdaya, termasuk landasan pelaksanaan program.

Ketiga, observasi lapangan dan identifikasi lanjutan. Observasi lapangan adalah tahapan awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, proses ini dimaksudkan sebagai langkah awal penyusunan program kerja. Lebih dari itu, dari observasi, mahasiswa akan mendapatkan informasi yang spesifik tentang karakteristik desa, topografi daerah, kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat sehingga program kerja yang akan ditawarkan dan dilaksanakan berjalan seiring dengan kondisi lokasi KKN.

Observasi ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dilokasi yang dimaksud, namun proses awal ini juga dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Lapangan yang mendampingi, membimbing serta mengarahkan mahasiswa-mahasiswa peserta KKN. Setelah mengetahui seluk beluk lokasi KKN, tahap selanjutnya yakni mengidentifikasi tujuan serta sasaran dari program yang akan ditawarkan. Hasil pengamatan memainkan peran yang sangat signifikan dalam mencapai target, sasaran dan tujuan dari program kerja.

Keempat, penyusunan program kerja. Penyusunan program kerja dilakukan mahasiswa setelah mengetahui dan melakukan identifikasi awal

terhadap program kerja berbasis posdaya. Pada praktiknya di lapangan mahasiswa merasa kesulitan untuk menyusun program kerja.

Kelima, koordinasi. Kegiatan koordinasi dilakukan dengan beberapa pihak diantaranya, kecamatan, pekon pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan dosen pembimbing. Materi utama dalam koordinasi adalah upaya mendirikan Posdaya, kemudian bagaimana melibatkan pengurus Posdaya untuk ikut serta dalam program kerja yang dibuat.

Keenam, pembentukan Posdaya. Posdaya dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, karena untuk menghindari tumpang tindih dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang sudah ada di desa. Posdaya dibentuk dengan melibatkan para tokoh desa dan tokoh masyarakat. Setelah pembentukan kepengurusan Posdaya di tingkat desa, kepengurusan tersebut dibuatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh camat.

Ketujuh, lokakarya mini. Lokakarya mini ini seharusnya dilaksanakan pada saat pembentukan Posdaya. Namun, pada pelaksanaan KKN tematik Posdaya di STAIN dilaksanakan di akhir penghujung pelaksanaan KKN. Selain itu, lokakarya mini ini hanya dijadikan ajang pameran produk unggulan masing-masing kelompok mahasiswa KKN.

Kedelapan, monitoring. Monitoring dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua STAIN Jurai Siwo Metro dengan berkoordinasi dengan pihak P3M. Evaluasi dilaksanakan 10 hari menjelang penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Evaluasi ditujukan untuk melihat progres pelaksanaan program kerja mahasiswa selama melaksanakan KKN tematik Posdaya.

Kesembilan, pelaporan dan evaluasi. Tahap ini dilaksanakan secara tertulis oleh para mahasiswa. Laporan berupa laporan program kerja mahasiswa selama melaksanakan KKN kepada pihak P3M dengan diketahui oleh masing-masing DPL. Evaluasi dilaksanakan oleh DPL dan juga P3M.

Menimbang Efektifitas Program

Secara konseptual, Steers (1985) sebagaimana dikutip oleh Widyo Subagyo, *et. al.* mengatakan efektivitas menunjuk pada seberapa jauh kegiatan suatu organisasi berhasil mencapai tujuan. Sementara Bernard yang juga dikutip oleh Widyo Subagyo mengatakan tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas dari beberapa konsep efektivitas-efektivitas organisasi. Berpangkal pada derajat keberhasilan mencapai tujuan organisasi

atau mengandung pengertian terjadinya efektivitas atau akibat yang dikehendaki.³⁴

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya yang dilaksanakan oleh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro telah berlangsung sejak awal tahun 2015 yang meliputi tiga kabupaten, yaitu kabupaten Lampung Selatan, kabupaten Lampung Timur dan kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan KKN di tiga wilayah ini dapat diperjelas dengan tabel berikut:³⁵

No	Periode/Tahun	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peserta
1.	I tahun 2015	Lampung Selatan	1.Jatiagun 2. Natar	30	598
2.	II tahun 2015	Lampung Timur	1. Batanghari 2. Pekalongan	22	305
3.	I tahun 2016	Pringsewu	1. Gadingrejo 2. Sukoharjo 3. Banyumas 4. Adiluwih	63	776
Jumlah				115	1679

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2015-2016 STAIN telah melaksanakan KKN di 115 desa dengan jumlah 1679 peserta. Setiap desa umumnya terdiri dari dua kelompok sehingga dapat diketahui bahwa selama periode tersebut sudah ada 230 kelompok mahasiswa KKN tematik Posdaya. Sementara kebijakan yang berlaku bagi mahasiswa peserta adalah bahwa setiap kelompok harus membentuk satu posdaya. Jadi sampai saat ini sudah ada 230 Posdaya yang telah dibentuk oleh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro melalui KKN tematik Posdaya. Namun demikian, nampaknya 230 Posdaya tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan dan target pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga belum tercapai. Hal ini dapat diketahui melalui analisa dari proses pelaksanaan KKN tematik Posdaya tersebut.

³⁴ Widyo Subagyo, *et.al*, “Kemampuan Kader dan Patisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program Posyandu di Karangpucung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas” dalam Jurnal Keperawatan Soedirman (*The Soedirman Journal of Nursing*), Volume 5, No.2, (Juli 2010), 75.

³⁵ Data diperoleh dari Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015 dan tahun 2016.

Pada tahap perencanaan, KKN Tematik Posdaya mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) sebagai *leading sector*-nya telah sesuai dengan tujuan dan target yang dicapai. Namun, pada tahap pelaksanaan, banyak mekanisme yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan observasi dan penelaahan dokumen dapat dijabarkan data sebagai berikut:

Pertama, pada tahap sosialisasi. Pada tahap ini mahasiswa peserta KKN tidak menyampaikan secara tepat kepada masyarakat mengenai program KKN Tematik Posdaya. Mereka tidak menyampaikan apa itu Posdaya, tujuan target dan hal-hal lain yang seharusnya diketahui masyarakat sebagai subyek pemberdayaan secara detail dan komprehensif. Mereka lebih terfokus menyampaikan dasar hukum program Posdaya. Selain itu, pada saat sosialisasi, cara komunikasi dan bahasa yang digunakan terkadang tidak dimengerti oleh masyarakat, sehingga apa yang disampaikan tidak dapat dipahami secara menyeluruh.³⁶ Salah satu kepala desa menuturkan:

“Pada dasarnya mahasiswa KKN telah mendirikan posdaya di desa kami, mereka berinisiatif untuk mengundang masyarakat, kami sebagai perangkat desa memfasilitasi untuk menggunakan surat resmi dari desa. Namun demikian, dalam pelaksanaan sosialisasi, mahasiswa peserta KKN tidak banyak menyinggung gerakan dan program Posdaya. Mereka malah membahas dasar hukum dari posdaya. Akibatnya masyarakat banyak yang belum sepenuhnya memahami. Saya saja baru sedikit faham, baru-baru ini. Dan ini pertama, ide bagus yang dibawa mahasiswa KKN, sebelum-sebelumnya tidak ada program seperti ini.”³⁷

Lebih jauh kepala Desa Bandung Baru menjelaskan:

“Kami tidak mengetahui apakah program Posdaya yang dijalankan mahasiswa KKN sesuai dengan pola yang baku dalam tataran posdaya atau belum. Bagaimana kami mau mengatakan sesuai dengan pola dan sistem, kami ini belum tahu konsep posdaya seperti apa. Coba, jika kami diberi semacam buku acuan dari panitia tentang posdaya, barangkali

³⁶ Wawancara dengan Chandra Arli Yoga, Koordinator Kecamatan Banyumas (KKN Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 24 April 2016. Hal senada juga disampaikan Oleh M. Ali Mahrus, Koordinator Kecamatan Gadingrejo (KKN Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 26 April 2016.

³⁷ Wawancara dengan Ade, Kepala Pekon/Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016.

kami akan pelajari dan bersama-sama mahasiswa membangun posdaya sesuai dengan prosedurnya. Bahkan kami mengetahui konsep Posdaya yang dibawa mahasiswa KKN pada akhir perjalanan KKN.”³⁸

Kekurangmaksimalan sosialisai program Posdaya kepada masyarakat ini karena mahasiswa peserta KKN kurang memahami Program Posdaya yang akan mereka jalakan di lokasi KKN. Banyak mahasiswa yang belum mengerti hakikat, arti dan mekanisme pelaksanaan KKN tematik Posdaya.

Kedua, pada tahap observasi lanjutan dan identifikasi masalah. Pada tahap ini mahasiswa tidak menelisik secara mendalam dengan para tokoh desa, tokoh masyarakat dan pihak terkait, terutama lurah atau kepala desa mengenai permasalahan yang ada di lokasi KKN. Mahasiswa terkesan telah menyimpulkan sendiri masalah yang dihadapi berdasarkan hasil pengamatan mereka. Mereka memang melakukan kroscek dengan para tokoh di lokasi KKN, namun tidak secara mendalam.³⁹

Salah satu kepala desa menyatakan bahwa Program kerja mahasiswa KKN sudah berjalan dengan baik, karena sebelumnya mahasiswa dengan kepala desa duduk bersama untuk mematangkan program kerja, meskipun bidang-bidang garapan seperti ekonomi, kesehatan, keagamaan dan lingkungan belum sepenuhnya disentuh secara merata, tapi ini merupakan awal dari kemajuan.⁴⁰ Akibatnya, program yang dibuat terkadang tidak *match* dengan permasalahan yang ada. Terlebih ada *frame* bahwa mahasiswa harus menjalankan program kerja individu sesuai dengan jurusan dan program studi mereka, sehingga program yang dibuat bukan diorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat, akan tetapi diorientasikan penyelesaian program kerja peserta KKN.

Ketiga, pada tahap pelaksanaan program kerja, karena kekurangpahaman peserta KKN terhadap konsep dan teknis pelaksanaan KKN tematik Posdaya, program yang dijalankan tidak sesuai dengan konsep Posdaya sebagaimana mestinya. Program KKN tematik Posdaya seharusnya

³⁸ Wawancara dengan Alit Harto Pratomo, Kepala Pekon/Kepala Desa Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016.

³⁹ Wawancara dengan Eka Oktalia Indah Koordinator Kecamatan Banyumas (KKN Posdaya Periode II tahun 2015) pada tanggal Maret 2015.

⁴⁰ Wawancara dengan Ade, Kepala Pekon/Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016.

menjalankan program-program sebagai berikut: (1) Pelatihan Pengurus, (2) Musyawarah di wilayah Posdaya, biasanya di desa atau kelurahan, (3) Pendampingan dan Pembinaan, (3) Konsultasi dengan berbagai pihak, (4) Membangun Jejaring program, (5) Mengembangkan program secara bertahap.⁴¹

Mahasiswa memang mendirikan Posdaya di setiap desa, namun dari lima program kerja pokok di atas, tidak semua dijalankan oleh mahasiswa peserta KKN STAIN Jurai Siwo Metro. Setelah Posdaya berdiri tidak dilakukan pelatihan dan pengkaderan pengurus, musyawarah rutin, pendampingan dan pembinaan konsultasi dan membangun jejaring dengan berbagai pihak. Mereka hanya fokus dalam pembinaan pendidikan dan keagamaan. Kesuksesan program kerja dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kurang maksimalnya program kerja bidang lainnya ini diakui oleh para kepala desa. Salah satu kepala desa menyatakan:

“Saya sangat mengapresiasi peran mahasiswa KKN STAIN Metro dalam membangun masyarakat di desa kami. Mereka membawa ilmu dan wawasan yang diberikan kepada masyarakat di desa kami, terutama dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, mereka telah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai pendampingan belajar anak-anak. Anak-anak yang tadinya tidak ada wadah belajar, kini mereka belajar bersama-sama di PKBM tersebut. Dalam bidang keagamaan mahasiswa telah menjalankan program dalam bidang keagamaan secara baik, mereka membentuk kelompok pengajian, mengisi ceramah, membentuk kepengurusan Taman Pendidikan al-Quran (TPQ). Namun demikian, mereka belum mampu menjalankan pada bidang-bidang yang lain, seperti bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan dan seterusnya.”⁴²

Keempat, pada tahap pelaksanaan lokakarya mini. Loka karya mini dipahami mahasiswa sebagai ajang pameran produk. Pada tahap ini mahasiswa peserta KKN hanya memamerkan produk-produk buatan masing-masing desa yang pada dasarnya sudah ada sebelum mahasiswa melaksanakan KKN. Selain itu, pameran dan pemasaran tidak menjangkau

⁴¹ Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Pedoman KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2009), 25-27.

⁴² Wawancara dengan Alit Harto Pratomo, Kepala Pekon/Kepala Desa Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016.

pasar yang lebih luas, namun hanya terbatas pada wilayah masing-masing kecamatan.

Lokakarya mini seharusnya menjadi ajang pembahasan program kerja yang bersama seluruh anggota keluarga lain dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Posdaya. Partisipasi setiap keluarga dalam Lokakarya Mini Posdaya merupakan awal dari dorongan partisipasi yang dinamis. Sarasehan dilakukan dengan mengundang kepala keluarga, penduduk dan tokoh masyarakat setempat untuk mendengarkan program kerja yang sudah disusun. Rencana kerja ini disajikan oleh calon Ketua Posdaya di desa/pedukuhan dengan melibatkan pengurus/kader Posdaya lainnya, Bidan Desa dan aparat Desa serta keluarga yang menjadi sasaran prioritas. Dari hasil Lokakarya Mini dilakukan penyempurnaan kegiatan menjadi Program Kerja Posdaya Difinitif.⁴³

Mahasiswa peserta KKN memahami bahwa Lokakarya mini merupakan tahap terakhir pelaksanaan KKN tematik Posdaya, oleh karena itu ajang ini mereka jadikan untuk memamerkan produk-produk unggulan masing-masing desa wilayah Posdaya. Padahal tidak demikian. Lokakarya mini merupakan tahapan awal pelaksanaan KKN tematik Posdaya yang kegiatannya berisi (1) Paparan Rencana Program oleh Penyaji/Calon Ketua Posdaya/Mahasiswa (2) menggali Masukan/Saran dari Tokoh/Ketua Lembaga/Kader (3) mengakomodir tanggapan/Pertanyaan dan masukan/saran dari para peserta (4) Jawaban Penyaji dan Catatan Perbaikan Rencana Kerja (5) Pemilihan Calon Pengurus atau Formatur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan KKN tematik Posdaya yang diselenggarakan oleh para mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro belum berjalan efektif dan sesuai dengan Konsep Posdaya. Mahasiswa masih menjadi center program dan belum mampu menjadikan subyek dampingan sebagai sosok yang berdaya. Mahasiswa masih menjadi pemegang kendali program sehingga pada saat mereka meninggalkan lokasi KKN, program-program yang dibuat tidak dapat dilanjutkan. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya pengkaderan melalui pelatihan bagi para pengurus Posdaya yang telah dibentuk. Tujuan-tujuan dan target KKN tematik Posdaya banyak yang tidak tercapai, seperti menggalang komitmen, kepedulian dan kerjasama berbagai *stakeholders* (Pemda, swasta, LSM dan masyarakat) dalam upaya pengentasan

⁴³ Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Pedoman KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2009), 30-31.

kemiskinan, kelaparan, mengatasi permasalahan dan ketidak berdayaan penduduk dan keluarga lainnya. Tujuan untuk membantu mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh mitra kerja pembangunan (Pemda, lembaga swasta dan LSM) dalam perencanaan dan pengelolaan program yang bersiat partisipatif juga belum tercapai.

Berdasarkan peninjauan di berbagai wilayah eks lokasi KKN tematik Posdaya, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Pringsewu, Posdaya yang telah dibentuk oleh mahasiswa tidak berjalan.⁴⁴ Peran dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan program Posdaya belum maksimal. Masyarakat masih menjadi obyek program KKN, bukan sebagai subyek yang berpartisipasi aktif dan diberdayakan. Hal ini berarti pemberdayaan keluarga melalui Posdaya belum tercapai. Masyarakat belum terberdayakan dengan baik. Karakteristik masyarakat terberdayakan belum terpenuhi, yaitu yang meliputi (a) mereka mampu mengetahui dan memahami potensi mereka; (b) mampu merencanakan (untuk mengantisipasi perubahan kondisi masa depan), dan mengarahkan diri mereka sendiri; (c) mereka memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dan bekerja sama yang saling menguntungkan ke "posisi tawar" yang memadai; (d) bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.⁴⁵

Tujuan KKN tematik Posdaya yang ditetapkan oleh P3M STAIN Jurai siwo Metro belum tercapai. Secara ideal, tujuan KKN tematik Posdaya di STAIN Jurai Siwo Metro adalah:

1. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan masyarakat di lokasi KKN.
2. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai MODIN-AKSI (motivator, dinamisator, akselerator, dan sumber informasi) dalam kegiatan pembangunan di lokasi KKN.

⁴⁴ Penulis beberapa kali melakukan observasi di tiga wilayah tersebut, pada bulan Agustus 201, September 2015 dan bulan Februari dan April 2016.

⁴⁵ Sumarjo dan Saharuddin, *Participatory Methods for Community Development*, (Bogor: Department of Socio-Economic, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University, 2004), 215.

3. Meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak warga masyarakat dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya serta kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan di lokasi KKN.
4. Terbentuknya kader-kader dalam masyarakat khususnya di lokasi KKN sehingga dapat mendorong dinamika kehidupan masyarakat yang positif dalam pencapaian pembangunan daerah di lokasi KKN.
5. Memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi Kabupaten Pringsewu untuk model perencanaan pembangunan ekonomi di lokasi KKN.
6. Membantu pemerintah daerah Pringsewu dalam mempercepat peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*).
7. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi Perguruan Tinggi untuk bekerjasama dengan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya dalam pembangunan masyarakat. Disamping itu juga Kuliah Kerja Nyata dapat memberi masukan bagi pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di lokasi KKN.⁴⁶

Berdasarkan penggalan data dari lapangan, kekurangefektifan KKN tematik Posdaya yang dilaksanakan oleh mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Pertama, DPL dan mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami konsep dan teknis pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan panitia KKN, pihak DPL dan para mahasiswa peserta KKN, ternyata mayoritas mereka belum memahami secara komprehensif mengenai konsep dan teknis pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Memang ada beberapa yang memahami secara baik, namun belum dapat melaksanakannya secara baik pada tataran teknis. Eko Setiawan, sebagai panitia inti menyatakan bahwa mayoritas DPL dan mahasiswa belum memahami secara mendalam tentang KKN tematik Posdaya, dan implikasinya adalah mahasiswa tidak dapat menjalankan program kerja sesuai dengan konsep Posdaya. Lebih dari itu, hal ini mengakibatkan tidak efektifnya KKN tematik Posdaya di STAIN Jurai Siwo Metro yang sudah

⁴⁶ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Kuliah Kerja Nyata STAIN Jurai Siwo Metro Periode I Tahun 2016*, (Metro: P3M STAIN Jusi, 2016), 6-7.

dijalankan sejak tahun 2015 dan membentuk lebih dari 200-an Posdaya.⁴⁷ Hal senada juga disampaikan oleh para koordinator kecamatan. Minimnya pengetahuan mahasiswa tentang KKN Posdaya mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal, sehingga Posdaya yang ideal, yang memberdayakan dan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek pemberdayaan tidak tercapai.⁴⁸

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pembekalan dan pelatihan secara intensif perlu diberikan kepada para calon DPL KKN tematik Posdaya. Karena tanpa adanya pengetahuan yang mendalam mengenai KKN model ini oleh para DPL, maka secara otomatis mahasiswa yang dibekali dan berkoordinasi dengan DPL tidak akan dapat menjalankan program kerja KKN tematik Posdaya secara ideal.

Kedua, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pada tahapan-tagapan perencanaan dan pelaksanaan, sosialisasi mengenai program KKN tematik Posdaya tidak dilaksanakan secara maksimal, baik oleh panitia, DPL maupun oleh mahasiswa. Akibatnya, pihak-pihak terkait seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan tokoh-tokoh yang ada di lokasi KKN tidak mengerti dengan jelas mengenai program KKN tematik Posdaya tersebut. Bahkan, banyak kepala desa yang mengetahui program Posdaya di saat menjelang kepulangan atau penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Mereka menyatakan bahwa perlu usaha serius dari panitia, DPL dan mahasiswa untuk mematangkan konsep KKN tematik Posdaya dan mensosialisasikannya kepada pihak pemerintah daerah, pihak kecamatan, pihak desa dan para tokoh di lokasi KKN.⁴⁹

Ketiga, tidak adanya kontinuitas dan sustainabilitas. Kebijakan jangka waktu Program KKN yang berlaku di STAIN Jurai Siwo Metro adalah

⁴⁷ Wawancara dengan Eko Setiawan, anggota panitia inti KKN tematik Posdaya STAIN Jurai Siwo Metro, wawancara dilakukan pada tanggal 27 April 2016. Trisna Dinillah, Dosen Pembimbing Lapangan, Wawancara pada 28 April 2016.

⁴⁸ Wawancara dengan Nyanuar Algiovan, Koordinator Kecamatan Adiluwih (KKN Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 24 April 2016; M. Ali Mahrus, Koordinator Kecamatan Gadingrejo (KKN Posdaya Periode I tahun 2016) wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2016.

⁴⁹ Wawancara dengan Ade, Kepala Pekon/Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016; Wawancara dengan Alit Harto Pratomo, Kepala Pekon/Kepala Desa Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016.

selama 40 hari. Karena belum memahami konsep Posdaya, waktu ini tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Umumnya mahasiswa membentuk Posdaya sudah menjelang penarikan peserta dari lokasi. Akibatnya, Posdaya yang dibentuk belum sempat menjalankan program kerja. Akhirnya Posdaya yang dibentuk ada namun tidak menjalankan program. Sementara kebijakan KKN yang berlaku di STAIN Jurai Siwo Metro selama ini lokasi KKN selalu berpindah-pindah, sehingga Posdaya yang telah dibentuk tidak terbina secara kontinyu. Pada dasarnya pemerintah desa mengharapkan bila program Posdaya dapat berlanjut dengan mahasiswa KKN berikutnya. Berdirinya Posdaya harus dilanjutkan, harus ada pendampingan, kaderisasi, dan perhatian. Karena Posdaya yang dibentuk masih baru, bila hanya dibentuk dan belum ada kaderisasi dan pembinaan, yang terjadi para pengurus dan anggota bingung mau melakukan apa dengan Posdaya.⁵⁰ Para pemerintah desa berharap bila KKN tidak hanya selama 40 hari, tapi bila lebih lama, dua sampai tiga bulan.⁵¹

Keempat, adanya paradigma bahwa tujuan akhir KKN adalah membentuk Posdaya. Sebagian besar mahasiswa belum memahami dengan baik mengenai konsep dan teknis pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Bila ada pun, itu jumlahnya sangat sedikit dan parahnya, mereka beranggapan bahwa tujuan akhir KKN model ini adalah terbentuknya kepengurusan Posdaya di setiap desa lokasi KKN.⁵² Mereka belum memahami bahwa Posdaya adalah sebagai sarana saja yang tujuan akhirnya adalah mememberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Akibat pemahaman ini, program kerja yang dilaksanakan masih berorientasi program kerja dan kegiatan individual sebagai kegiatan formal menggugurkan kewajiban. Begitu juga, mereka juga memahami bahwa pembentukan Posdaya hanya dijadikan kegiatan formal untuk menggugurkan kewajiban peserta KKN tematik Posdaya.

⁵⁰ Wawancara dengan Ade, Camat Batanghari, (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode II tahun 2015) pada tanggal 16 Juni 2016.

⁵¹ Wawancara dengan Alit Harto Pratomo, Kepala Pekon/Kepala Desa Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu (Lokasi KKN tematik Posdaya Periode I tahun 2016) pada tanggal 16 Juni 2016.

⁵² Wawancara dengan para Koodinator kecamatan KKN di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 April 2016.

Penutup

KKN tematik Posdaya mempunyai tujuan yang sangat ideal dalam rangka pembangunan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Konsep pemberdayaan keluarga yang berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan keagamaan bila direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara baik, maka masyarakat akan mandiri dan mampu mendayagunakan kemampuan serta potensi mereka sehingga tidak selalu mengandalkan bantuan orang lain atau pusat-pusat layanan. Hanya saja, KKN tematik Posdaya yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro tidak berjalan secara maksimal, sehingga tidak efektif, tujuan dan target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang mendalamnya pemahaman panitia, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terhadap konsep dan teknis pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Oleh karena itu, perlu pematangan dan pemahaman konsep serta teknis pelaksanaan yang baik oleh panitia, DPL dan mahasiswa, sehingga mereka dapat mentransfer konsep-konsep Posdaya kepada para pihak terkait, terutama pihak pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintah desa serta tokoh-tokoh di lokasi KKN. Bila hal ini dilakukan, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami secara utuh dan komprehensif mengenai konsep, teknis Posdaya serta program kerja mahasiswa dalam KKN tematik Posdaya. Tahapan-tahapan pelaksanaan program kerja akan dapat terlaksana secara baik dan semua pihak dapat berpartisipasi secara maksimal, sehingga tujuan dan target KKN tematik Posdaya akan tercapai secara maksimal. Masyarakat akan berdaya, mandiri sehingga dapat meraih kesejahteraan. []

Daftar Pustaka

- Billet, Stephen et. all. 2007. "Collaborative Working and Contested Practices: forming. Developing and Sustaining Social Partnerships in Education" *Journal of Education Policy*. Vol 22. No. 6. (November): 648-652.
- Brodie, Ellie et. al. 2009. *Understanding Participation A Literature Review*. Perth: Institute for Volunteering Research.
- Claridge, Tristan. *Designing Social Capital Sensitive Participation Methodologies*. 2014.
- Dalimunthe, Nur Cholilah Junita and Murdianto. 2013 "Analisis LKM Posdaya Kenanga Terhadap Tingkat Pendapatan Pelaku Usaha Mikro

- Di Kelurahan Situ Gede.” *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. vol.9. No. No.2 (September). 156-171.
- E., Suharto. 2005. *Community Development for People Empowerment*. (Bandung: Refika Aditama.
- Freiberg, Kate *et.al.* 2014. “The Parent Empowerment and Efficacy Measure (PEEM): A Tool for Strengthening the Accountability and Effectiveness of Family Support Services”. *Australian Social Work*, Volume 67, (May), 4. 405-418.
- Graves, Kelly N. and Terri L. Shelton. 2007. “Family Empowerment as a Mediator between Family-Centered Systems of Care and Changes in Child Functioning: Identifying an Important Mechanism of Change.” *Journal of Child & Family Studies*. 16 (4). 556-566.
- Graves., Kelly N. and Terri L. Shelton. 2007. “Family Empowerment as a Mediator between Family-Centered Systems of Care and Changes in Child Functioning: Identifying an Important Mechanism of Change.” *Journal of Child & Family Studies*. 16 (4). 556-566.
- Keith, Davis. 2003. *Human Relation At Work: The Dynamics of Organizational Behavior*. Japan: Mcgraw-Hill.
- Koren, Paul E. *at. al.* 1992. ”Measuring Empowerment in Families Whose Children Have Emotional Disabilities A Brief Questionnaire” *Rehabilitation Psychology*. Vol. 37, (1992), 305-321.
- Magriasti, Lince, “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton. “*Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah (2011): 232-258*.
- Mokomane, Zitha. 2012. *Role of Families in Social and Economic Empowerment of Individuals*, United Nations Expert Group Meeting on “Promoting Empowerment of People in Achieving Poverty Eradication, Social Integration and Full Employment and Decent Work for All”, New York: 10-12 September.
- Muljono, Pudji. 2011 “The Model of Family Empowerment Program for Community Development in West Java. Indonesia.” *Journal of Agricultural Extension and Rural Development* Vol. 3(11). pp. 193-201. (October).

- Naufal dan Kusumastuti. "Evaluasi Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA): Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya. Kecamatan Bogor Barat. Kota Bogor. Jawa Barat."
- Naufal, Abdurrazzak dan Yatri Indah Kusumastuti. 2010 "Evaluasi Program Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA): Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya. Kecamatan Bogor Barat. Kota Bogor. Jawa Barat." *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. Vol.6. No. 2 (September). 1-16.
- Norwegian Agency for Development Cooperation. 2013. *Framework for Analysing Participation in Development*. Oslo: Noraad.
- Pamungkas, Sigit., Amiruddin Saleh, dan Pudji Muljono. 2013. "Hubungan Aktivitas Komunikasi dengan Tingkat Keberdayaan Kader Posdaya di Kota dan Kabupaten Bogor." *Jurnal Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor* Vol.11. No. 1. (1-9)
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro. 2015. *Pedoman Kuliah Kerja Nyata STAIN Jurai Siwo Metro Periode I tahun 2016*. Metro: P3M STAIN Jusi.
- , 2015. *Pedoman Kuliah Kerja Nyata STAIN Jurai Siwo Metro Periode II tahun 2016*. Metro: P3M STAIN Jusi.
- , 2016. *Pedoman Kuliah Kerja Nyata STAIN Jurai Siwo Metro Periode I tahun 2016*. Metro: P3M STAIN Jusi.
- Rasiman et. al., 2015 "IbM Pengembangan Potensi Lokal Posdaya Durian Jaya Menuju Desa Wisata di Kelurahan Bubakan. Kec. Mijen. Kota Semarang." *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang* Vol.6. No. 2 (September).
- Retno, Eko et.all., 2014 "IbM Posdaya Kusuma Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang." *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang* Vol. 5. No. 2 (September). 21-32
- S., Holcombe. 1995. *'Managing to Empower: The Grameen Bank's Experience of Poverty Alleviation.'* New Jersey: Zed Books Ltd.

- Salam, Muhammad Ramlan. 2010. "Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Pusat Kota Palu". dalam *Jurnal Ruang*. Vol. 2 No. 2 (September): 8-23.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Subagyo, Widyono *et.al.* 2010. "Kemampuan Kader dan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program Posyandu di Karangpucung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas" dalam *Jurnal Keperawatan Soedirman* (The Soedirman Journal of Nursing). Volume 5. No.2. (Juli): 74-79.
- Sumarjo dan Saharuddin. 2004. *Participatory Methods for Community Development*. (Bogor: Department of Socio-Economic. Faculty of Agriculture. Bogor Agricultural University.
- Suyono, Haryono dan Rohadi Haryanto. 2009. *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widyana, Atria dan Richard W.E. Lumintang. 2013. "Kompetensi Pengembangan Kewirausahaan Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor." *Jurnal Penyuluhan Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor*. Vol.9. No. 2. 1-9.

Toward a Pesantren of Self-Sufficient in Energy by Improvement of Cow Cattle Results through a Balanced Ration and Utilizing Biogas of Cow Dung

MUHAMMAD WAKHID MUSTHOFA

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
mwakhid_m@yahoo.com

Abstract: The community outreach programs discussed in this paper is focused to the effort to realize a self-sufficient pesantren in energy and food needs, especially the needs of fuel for cooking and the needs of electricity for lighting by using cow dung to be processed into biogas. This program was implemented in the Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga which is located in the hamlet of Jomblangan Bantul, Special Region of Yogyakarta who have bussines in the field of dairy farms and agriculture. Biogas produced from waste will also be utilized to provide an organic fertilizer that will be beneficial for farming. So a sustainable synergies between the boarding schools with its business will be realized. Strategies to improve cow cattle results refer to the research results of the National Academy of Science. That is the population of cows are divided into three groups: heifer, 3 – 4 parent for the first month after childbirth and the bull. Then for each group, balanced rations are formulated between rice straw, combines fine bran, coconut shell, elephant grass and cassavas. Whereas to carry out the road-map utilization of cow dung, the following things are done: 1) outreach to the citizens of the pesantren to socialize the utilization of cow dung as biogas and organic fertilizer as well as solid or liquid, 2) coordination with the pesantren for arrangement of cages and construction of biogas installations from cow dung, 3) construction system of biogas installations, and 4) carry out three kinds of outreach, namely the outreach of use and utilization of biogas for cooking and illumination, outreach of biogas installation system maintenance management, and outreach about the making and marketing of organic fertilizer and medicinal insect exterminator. The result of the above strategies are proven can reduce the pesantren spending in terms of cooking and electricity costs and increase the pesantren revenues of cows fattening.

Keywords: Pesantren of Self-Sufficient in Energy, Balanced Ration, Biogas.

Introduction

The community services program presented in this paper is addressed to the pesantren (*islamic boarding school*) who has an entrepreneurial in the field of dairy farms and agriculture. The purpose of this service program is to realize an independent pesantren in sufficing its energy and food needs, especially the needs of fuel for cooking and electricity for lighting by using cow dung to be processed into biogas. Biogas produced from the dung will also be utilized to provide an organic fertilizer that will be beneficial for farming. So, there is a sustainable synergies between the pesantren and its dairy farms and agriculture businesses.

The subject of this outreach program is The Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga which is located in the hamlet of Jomblangan Banguntapan Bantul, Yogyakarta Special Region. According to the data on population of Bantul Regency, the pesantren is located at the area of under developed region with the majority of its citizens still belongs to a poor family (Widati, 2015). Here we describe the reason to select the Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga as the subject of this program.

1. The pesantren has an adequate resources that consist of 32 cows and agricultural land.
2. The cow cage is located in the one complex with the pesantren. So, if the installation of biogas system is made in this place, then gas will be easily transmitted into all of pesantren area to be used as cooking fuel and lighting.
3. The pesantren has long been engaged in dairy farms and agriculture but they have some difficulties to develop their programs. This is because the human resources are still full of limitations.
4. The pesantren has had a business relationship to sell the cows and their agricultural products.
5. The availability of land for the installation of biogas which the land has belong to the pesantren. This wide land is very suitable to build biogas installation system, as well as fixed or floating system.
6. The layout of fields and orchards which is adjacent to the biogas installation system supporting the biogas waste processing results in the form of organic fertilizer is easily distributed.

Description of Pesantren's Condition

To get a description of the problems faced by The Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga, some preliminary research were done. They

were survey to the location, interview with the chairman and members of the pesantren, and doing a comparative study to another pesantren in the Kweni hamlet that have successfully implemented a biogas installations system. Whitin these preliminary research and survey we found the following facts.

1. The growth of the cows are not optimal due to the given ration is still traditional (only the rice straw) and not pay attention to a balanced nutrient supplementation. As a result the weight of the cows is not ideal and imposes the decline of the selling value.
2. The pesantren needs a considerable cost to buy LPG for cooking the students food and to pay the electric bill to PLN. According to the obtained data, the pesantren must pay an average of Rp. 6,000,000.0 per month to buy LPG and Rp 1,550,000.0 per month to pay the electric bill. On the other hand, the pesantren income was minimal because only relying on funds from donors.
3. The occupants of the pesantren do not have any knowledge about the composition of a balanced ration for cows and cow manure utilization for biogas.
4. The agricultural production is less than they expected because of the difficulty in providing fertilizers. This condition will disrupt the growth process of the rice plant which will result a minimum grade in some agricultural products that is far from their expected target.
5. The environment and land are dirty because cow dung. Besides the unpleasant smell, the presence of cow dung also pollutes the soil, wastes the scene, and could be a disease factor.

Aims of the Program

According to the community problem mapping in The Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga, this community outreach program is expected to improve the community pesantren social life with the following details:

1. Increasing the revenue sources for the pesantren by improving the productivity of cow reproduction and its weight through the granting of a balanced ration.
2. Embodying the pesantren of self-sufficient in energy by utilising cow dung to be processed into biogas as a source of cooking fuel. The biogas will replace LPG and electric generators (for lighting) and its waste will be processed into organic fertilizers for agricultural crops.

3. Increasing the capabilities and knowledge of the pesantren residents professionally and efficiently in utilization techniques of biogas and balanced rations.
4. Increasing the quality and quantity of community agricultural products through the utilization of organic fertilizer from cow dung
5. Increasing the quality of soil that has been contaminated by the manure.
6. Creating a clean, health and comfort environment that is free from pollution of cow dung.

Strategies

Based on some various problems found during the survey, then we formulated it in order to draw up solution steps according to the achievements of the expected conditions. We presume that the Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga problems are quite complex, so it need a phasing to solve. Another thing that is not less important and indispensable is the role of the community itself.

Therefore, we draft a roadmap to overcome the problems and its sustainability until the pesantren can reach its ability to solve the problems in their own environment (as shown in Figure 1).

According to the above road-map, basically there are two clusters of strategy to realize the pesantren self-suffivient in food and energy. The first cluster is a strategy for increasing the yield cow cattle through the granting of a balanced ration as nutrient supplementation and the second cluster is the utilization of cow dung as biogas and solid or liquid organic fertilizer.

To implement the strategy for increasing yield cow cattle, according to the research of the National Academy of Science (Hui and Sherkat 2005, Brus 2015) the population of cows in the pesantren are divided into three groups: heifer, lactation cow: 3 – 4 parent for the first month after childbirth and the bull. Following is the granting of a balanced ration strategies set out in the framework of the improvement of cow cattle results for each group.

The nutrient substances need of heifer of 300 kg body weight (BW) and with its expected gaining weight (EGW) 500 g per day are presented in Table 1 below (Reddy and Sivakumar, 2015).

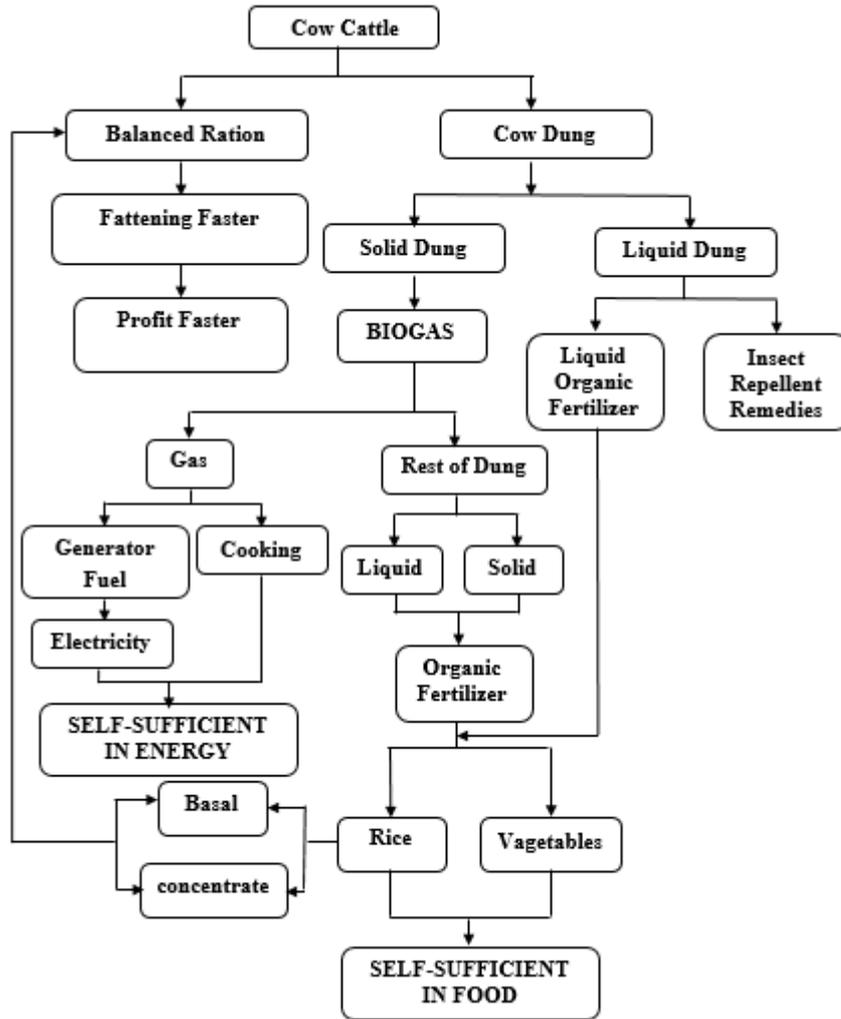


Figure 1. Optimization Road-Map of Cows Cattle

Table 1. Nutrient substances needs for heifer BW 300 kg EGW 500 g/day

Body Weight (kg)	EGW (kg/day)	BK (kg)	TDN (kg)	PK (g)	Ca (g)	P (g)
300	0.5	7.1	3.8	423	14	14

According to Table 1 and by assuming the consumption of rice straw is restricted to 1.33% body weight, using the method of Pearson squares (Bactawar, 2005) gained the nutrient substances needs that are presented in Table 2 below.

Table 2. Composition of the balanced nutrient substances for heifer

Items	BK (kg)	TDN (kg)	DP (kg)	Ca	P
Rice Straw	4.00	2.40	96	8	3
Fine Bran	2.06	1.25	130	14	31
Coconut Shell	1.05	0.82	209	3	7

Total	7.11	4.47	435	25	41
Needs	7.10	3.80	423	14	14

Next, a lactation cow requires a higher food substances because of lactation. The balanced ration needs for this group are presented in Table 3 below.

Table 3. Nutrient substances need for lactation cow

Items	BK (kg)	TDN (kg)	PK (g)	Ca (g)	P (g)
Nutrient need for lactation cow	8.1	4.5	505	24	24

According to Table 3 and using the method of Pearson squares (Bactawar, 2005), the nutrient substances needs for lactation cow are presented in Table 4 below.

Table 4. Composition of the balanced nutrient substances for lactation cow

Items	BK (kg)	PK (kg)	TDN (kg)	Ca	P
Elephant Grass	70	482	3.5	41.3	20.3
Coconut Shell	1.1	238	0.726	0.88	7.37
Total	8.1	720	4.23	42.2	27.7
Needs	8.1	721	4.5	24	24

For the bulls, according to the research of the National Academy of Science (Hui and Sherkat 2005, Brus 2015), its balanced ration needs are obtained in Table 5 below.

Table 5. Nutrient substance needs for bull

Items	BK (kg)	TDN (kg)	PK (g)	Ca (g)	P (g)
Nutrient needs	7.6	5.2	535	21	18

According to Table 5 and by the assumptions that the consumption of rice straw are restricted to 1.33% of the body weight, using the method of squares Pearson gained nutrient substances needs that are presented in Table 6 below.

Table 6. Composition of the balanced nutrient substances for bull

Items	BK (kg)	TDN (kg)	DP (g)	Ca	P
Rice Straw	1.80	1.06	40	3.78	1.44
Fine Bran	3.14	1.90	200	20	50
Coconut Shell	1.44	0.95	310	4.32	9.65
Cassavas	1.22	0.84	20	1.22	0.49
Total	7.60	4.75	570	29.32	61.58
Needs	7.60	5.20	535	21	18

To carry out the road-map utilization of cow dung, the first thing to do is to educate the pesantren residents to promote the use of cow dung as biogas and organic fertilizer either solid or liquid. The second step is the coordination with pesantren residents for cage arrangement and construction of the biogas installation. As it goes, the third step is to prepare tools and materials for the construction of biogas installations that directly followed by the fourth step that is the construction of a biogas installation system. The fifth step of this service program is doing some counselings. There are three kinds of counselings related to biogas given to the community and especially the residents of pesantren, they are (Putro, 2007):

1. technical education about the use and utilization of biogas for cooking,
2. technical education about the care management of biogas installations system,
3. technical education about manufacturing and marketing of organic fertilizers and insecticides.

Counseling to pesantren residents on the use of cow dung as biogas is expected to open the community horizons about the alternative sources of fuel besides oil (kerosene). Coordination with the residents is done in order to rise up a community participation to solve their fuel problem. The materials include things that need to be prepared to build the biogas installation systems. Some equipments and materials were prepared by the pesantren with the guidance of us. Similarly, the construction of a biogas installation system was carried out by them. After the installation is completed, some counselings were given by the experts from Faculty of Science and Technology UIN Sunan Kalijaga.

Here is a map-solving concept together with the sustainability and autonomy of community to be able to solve problems in their own environment (as shown in Figure 2 and Figure 3).

Steps in the Utilization of Cow Dung

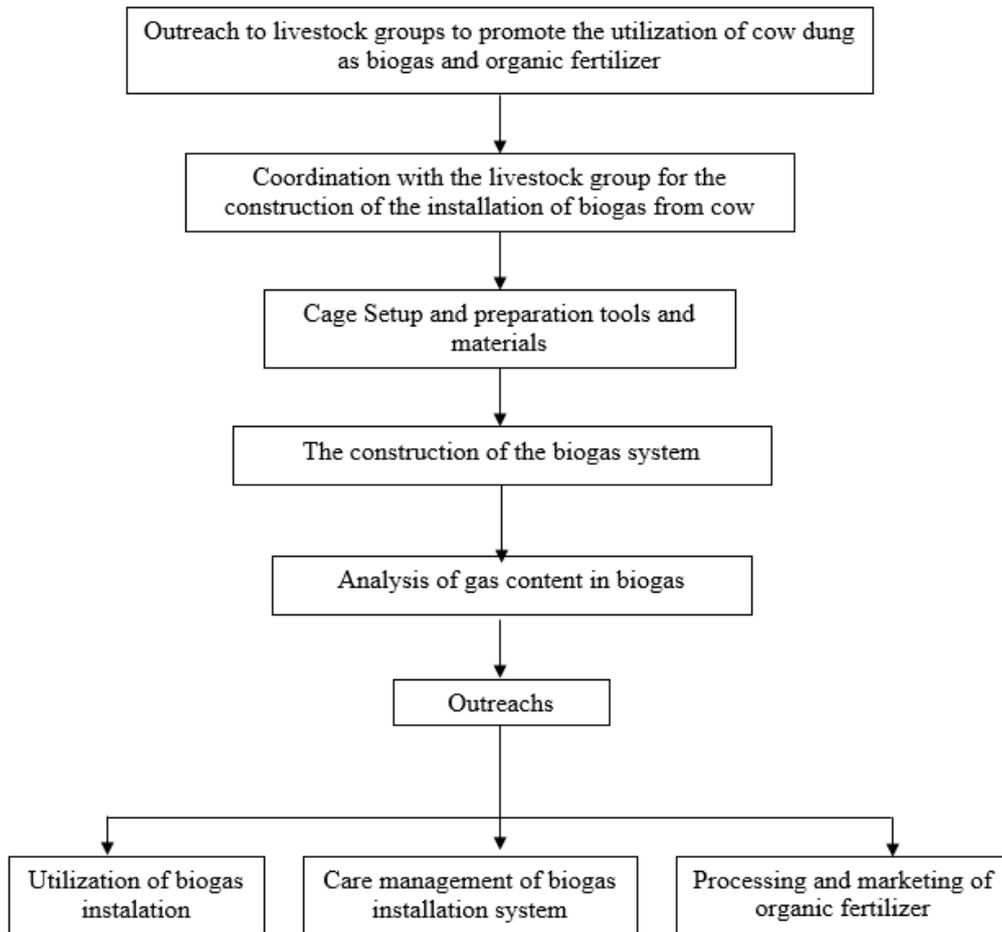


Figure 2. Map of-Concept Service Program

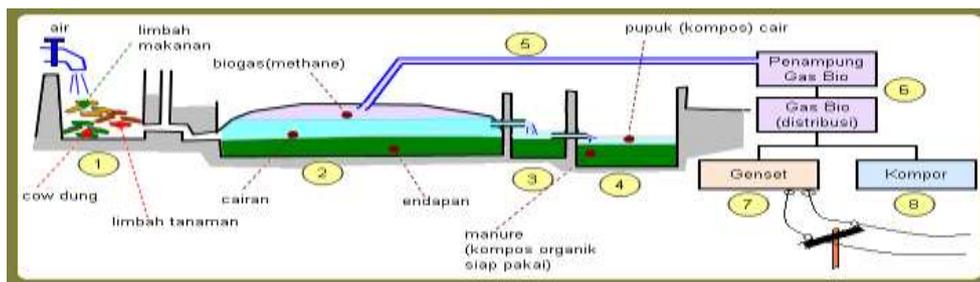


Figure 3. Sketch from the Installation Specifications and Biogas

Description:

1	Mixing tubs (Feed)	5	Biogas Pipes
2	Digester	6	Biogas Reservoir (Methane)
3	Control Tube	7	Genset (generator)
4	Typical analysis for digester effluent storage tubs containing ready-made organic compost	8	Gas Stove

Discussion of Needs Fulfillment Analysis

The analysis of energy fulfillment needs from biogas program for lighting and cooking fuel can be explained as follows.

Electrical supply energy from Biogas

The resulting energy from biogas

The combustion resulted from 1 cubic feet of biogas is equivalent to 0.028 m³. Supplying this mass into the generator of electricity will be generated electrical power of 6 kWh/m³. Furthermore, 1 kilogram of cow dung is equivalent to 0.031 m³, where 1 m³ of cow dung can produce 0.28 m³ of gas. So, 0.031 m³ of cow dung will produces

0.031 x 0.036 m³ gas = 0.00116 m³ of gas.

It can be concluded that 1 kilogram of cow dung was able to produce 0.00116 m³ of gas.

So the electrical energy produced by 1 kilogram of cow dung is

$$\frac{0.00116}{0.028} \times 6 \text{ kWh} = 0.239 \text{ kWh}.$$

According to the existing data, 1 cow produces 10-30 kilograms per day or around 20 kilograms per day. So from 1 cow, it will generated an electric power by 20 x 0.239 kWh = 4.78 kWh. The illustration of energy produced above is that from 1 cow, it could turn the lamp of 20 watts for 10 hours. Therefore the electrical power generated by

32 cows is 32 x 4.78 kWh = 153.28 kWh.

Needs of electricity per day in the pesantren

The Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga has 25 rooms with size 10 x 5 m². Based on the survey, the average for each room there are:

- 2 lamps 20 watts to the inside of room,
- 2 lamps 10 watt for terrace,
- 1 10 watt power lights for the bathroom,
- 1 fan 20 watt,
- 1 television 14 inch 50 watts.

Thus, the total power required perroom is 140 watts. So if it is assumed the equipments are turned on for 12 hours per day, then in one day, the total electrical power needed by the pesantren is

25 x 140 watts x 2 hours = 49 000 watts or 49 kWh

(equivalent to the power generated by the 11 cows). Thus it can be concluded that the electrical energy required by the pesantren can be met by the biogas generated from cow dung.

Fuel supply for cooking

The resulting energy from biogas

Based on the data it is retrieved that 1 cow was able to produce 0.28 m³ gas per day that equivalent to 1.90 kg of liquefied petroleum gas. This amounts is sufficient for 10 people cooking needs per day. So if the pesantren has 32 cows then it will generate
 $32 \times 1.90 \text{ kg} = 60.8 \text{ kilograms}$
of liquefied petroleum gas per day.

Needs of fuel for cooking per day

The Entrepreneurial Pesantren of Sunan Kalijaga had 100 students who became residents of psantren. Based on the above data were obtained that the need every 10 person is 2.4 kilograms of liquefied petroleum gas, so for 100 people it needed 38 kilograms of liquefied petroleum gas per day (the equivalent of gas produced by the 20 cows). Thus it can be concluded that the fuel for cooking required by the pesantren can be met by the biogas generated from cow dung.

Based on the above data, the pesantren needs of electricity and fuel to cook can be fulfilled by the 32 cows, with 11 cows to fulfill the needs of electrical energy and 20 cows to fulfill the needs of fuel for cooking.

Conclusion

This community service program has been successfully as expected. That is increasing the pesantren income resulted from fattening cattle and reducing the pesantren spending in terms of cooking fuel and electricity through the utilization of biogas. The knowledge and experience of the pesantren inhabitants also significantly increases. However, this program has not been loading utilization of biogas waste as organic fertilizer. So the program can still be followed by optimizing it.[]

References

Bactawar, Basil. *Balancing Ration for Beef Using Pearson Square Method*, Union County Extension Director and Agent, 2005.

- Brus, M., Pazek, K., Rozman, C., and Janzekovic M. *The Feeding Ration Optimisation Model For Simental Bulls*, DAAAM International Scientific Book, 2015.
- Hui, Y.H and Sherkat, Frank. *Handbook of Food Science, Technology, and Engineering - 4 Volume Set*, CRC Press, 2005.
- Widati, Sri Surya. *Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul DIY tahun 2014*, Pemda Bantul, 2015.
- Putro, Sartono. “Penerapan Instalasi Sederhana Pengolahan Kotoran Sapi Menjadi Energi Biogas di Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.” *WARTA* 10, no. 2 (September 2007): 178 – 188.
- Reddy, Bandugula Venkata and Sivakumar, Allur S. “Beef Quality Traits of Heifer in Comparison with Steer, Bull and Cow at Various Feeding Environments.” *Animal Science Journal* 86, no. 1 (January 2015): 1 – 16.

University-Community Engagement as a Mode of Knowledge Production in Indonesian Islamic Higher Education: Philosophical, Methodological, Policy Considerations

SULAIMAN MAPPIASSE

IAIN Manado, Indonesia
sulaiman.mappiasse@iain-manado.ac.id

Abstract: Arguing that a policy is not a copy-paste like enterprise, this paper is going to consider philosophical, methodological, and policy challenges that might be encountered by the Indonesian Islamic Higher Education (IIHE) in pursuing university-community engagement as well as possible solutions that could be proposed. Knowledge production in the IIHE is mainly sought in a disciplinary mode regulated by values, norms, and methods generated deductively from the divined resources, especially Qur'an and the prophetic traditions (*Sunnah*). This mode of knowledge production is influential enough in informing the way many scholars within this system perceive and approach knowledge and its production. They tend to deal with issues and problems from religiously loaded perspective. Instead of pondering what and how things operate, they are often tempted to see things from what they should be and how they should be. Consequently, they are most likely to face difficulties in discovering facts, leading to parochial knowledge. On the other hands, those who are less disposed to this mode, especially disciplinary experts in non-religious sciences, tend to see knowledge production as neutral activities. Both sides nevertheless have less cognitive and cultural competence to develop transdisciplinary exchanges in a distributed knowledge society.

Keywords: Islamic higher education, university-community engagement, Indonesia, knowledge management

Introduction

Recently, there has been a new movement to adopt university-community engagement in Indonesian Islamic higher education (IIHE),

especially in state funded institutions under the Ministry of Religious Affairs. It coincides with the vision of transforming IIHE to become World Class Universities or Research Universities. In order to realize this goal, ongoing discussions and conversations between IIHE and other foreign universities in Canada and Australia (Diktis 2014, 2015) has been pursued. This engagement may come in various forms, and one of them is the engagement of the university research center and civil society to co-produce knowledge (Onyx 2008).

It should be, however, bored in mind that university-community engagement needs a particular cultural and organizational infrastructure that differs from place to place or time to time. Knowledge production in the IIHE is mainly sought in a disciplinary mode regulated by values, norms, and methods generated deductively from the divined resources, especially Qur'an and the prophetic traditions (*Sunnah*). This mode of knowledge production is influential enough in informing the way many scholars within this system perceive and approach knowledge and its production. They tend to deal with issues and problems from religiously loaded perspective. Instead of pondering what and how things operate, they are often tempted to see things from what they should be and how they should be. Consequently, they are most likely to face difficulties in discovering facts, leading to parochial knowledge. On the other hands, those who are less disposed to this mode, especially disciplinary experts in non-religious sciences, tend to see knowledge production as a neutral or free value activities. Both sides nevertheless have less cognitive and cultural competence to develop trans disciplinary exchanges in a distributed knowledge society.

The existing IIHE's knowledge culture seems to contradict the value of the university-community engagement by which knowledge production is conceived as a human collective effort in which all parties, formal and informal, are expected to contribute to the knowledge production process beyond religious values, disciplinary and localized boundaries.

Arguing that a policy is not a copy-paste like enterprise, this paper is going to consider philosophical, methodological, and policy challenges that might be encountered by the IIHE in pursuing university-community engagement in the context of knowledge society (see Välimaa and Hoffman 2008) as well as possible solutions that could be proposed. The focus is the existing challenges around the issue of religious text incorporation in knowledge production, and the epistemological dichotomy between so called religious and non-religious knowledge. This paper argues, first, that the issue

is not the incorporation of Qur'an and *Sunnah* in IIHE's tradition of knowledge production; it is the way people treat them in the process of knowledge production. Even though religious texts are part of people's religiosity, it is feasible to treat them as a common platform for human knowledge production. Secondly, real people integration and interconnectivity are far more needed in IIHE, rather than epistemological integration and interconnectivity, by restructuring IIHE in a form that can help them to become actors and collaborators in a knowledge production and distribution.

By doing so, IIHE may survive and not to be marginalized in the current arena of higher education internationalization. It should reconsider and strengthen its philosophical configuration in a way that enables it to perceive knowledge production as an objectively contested area. Within this contested area, it has to demonstrate its unique scientific paradigm. Simultaneously, it has to show that this uniqueness will enable it to collaborate better with other knowledge producers effectively.

In the last decade, there has been a trend of integrated-interconnected science paradigm along with the transformation of several Islamic colleges or institutes to become universities. This effort is claimed to be a solution for the problem of historical and ongoing dichotomy between science and religion (Ichwan and Muttaqin 2013) within IIHE. This however has not significantly changed the culture and structure of knowledge production within the IIHE system. The character of knowledge production remains very disciplinary and dichotomous. Interdisciplinary claim is more about rhetoric than reality. This disciplinary issue is even deeper when the religious and non-religious science dichotomy is taken into consideration.

Furthermore, the emergence of knowledge economy introduces a new challenge for IIHE. They are expected to produce knowledge that is valorized in economy society. It should be admitted that knowledge generated in IIHE has lower comparative advantage in knowledge economy. Producing knowledge in more collaborative and trans disciplinary fashion may allow them to produce knowledge that is valued and needed by the society. Problem based knowledge may contribute to the lessening of disciplinary knowledge boundaries. Engaging different parties to negotiate and renegotiate what knowledge can be accepted, and how it should be produced may bring about knowledge that serves the common betterment of humanity. It is however not clear how this engagement model will be implemented in the Indonesian Islamic higher education. This transformation is nevertheless urgently

needed in order to save IIHE from marginalization in knowledge society (Scott 1997).

Knowledge Production in Knowledge Society

The increased resource scarcity and competition offer an impetus for nations to make universities as centers of excellence and innovation in order to become competitive in internationalization arena. On other side, people incline to have less trust on expert knowledge (Beck 1992). In this context, theorists talk about Mode 1, 2, and 3 of knowledge production. In Mode 1, knowledge is produced in compliance with values, norms, methods that are considered legitimate in the community of scientists. Knowledge is monopolized by expert communities. In Mode 2, knowledge production becomes distributive, transient, trans disciplinary, socially accountable, reflexive, localized, heterogeneous, applicative, and collaborative (Gibbons et al. 1994, Onyx 2008). Lastly, in Mode 3, the heterogeneous mode of production is considered insufficient to enhance competitiveness. Knowledge production requires higher learning processes and dynamics to achieve higher intelligence, efficiency, and effectiveness. Within this system, the top-down and bottom-up processes are allowed to flourish (Carayannis and Campbell 2012).

Currently, research activities are characterized by “the steering of research priorities”, “the commercialization of research” and “the accountability of science”. Knowledge produced out of these activities are considered as private goods that are traded in the market like other commodities. Knowledge increasingly becomes the locus of contestation involving various parties. Before it is confirmed as official knowledge, it should be negotiated and renegotiated until it meets the interests of all actors concerned (Nowotny, Scott, and Gibbons 2003, 181, Gallopín et al. 2001).

Scott (1997) argues that university could be a marginal institution in the future. The transformation of knowledge production, from disciplinary mode to trans disciplinary mode that demands higher social accountability and reflexivity, leads to the need to transform university from its disciplinary structure. University cannot anymore confine itself in a disciplinary boundary because knowledge production has been distributed to novel places and agents. University is not the only place where the production occurs. Civil organizations, corporates, consultancies, and other forms of associations have their own system of knowledge production. Universities have to produce a new kind of experts and scientists, who are able to collaborate with other

knowledge producers. Research and teaching are not anymore in their monopoly. Both activities may happen outside and without universities (Gibbons 1998).

We learned that universities had proved themselves as producers of knowledge in a disciplinary structure. When knowledge becomes widely distributed, however, universities cannot remain anymore as the producers only. They also have to become the knowledge assemblers. They have to produce “knowledge workers” who are “problem solvers, and problem brokers” (Gibbons 1998, 6) in order to be able to handle problems that are most likely multidimensional and require practical solutions. The significance of knowledge is not based on how sound the theory it adheres to, but on how capable it is to solve practical problems.

Against backdrop of increased resource scarcity and distributed mode of knowledge production, the notion of the university-community engagement gains its significance.

University-Community Engagement

The trend of university-community engagement in the last two decades should be understood in the context of declining state financial support for higher education as well as the declining social mission of higher education over economic benefits. In the industrial society, knowledge production and economy is not directly linked. Now, in post-industrial society, knowledge is directly linked to economy (Weerts 2014, Biesta 2007).

Carnegie Foundation defines university-community engagement as “the collaboration between institutions of higher education and their larger communities (local, regional/state, national, global) for the mutually beneficial exchange of knowledge and resources in a context of partnership and reciprocity” (Driscoll 2008, 39). This definition emphasizes the presence of mutual benefits coming out of the engagement. This differs from the existing practices where universities often engage in community-based collaboration without necessarily bringing about such mutual benefits.

Within the process of university-community engagement, universities can claim their significant role in knowledge production without undermining the role of other parties outside. In knowledge production, university research centers can play various role, such as collaborator, mediator, and independent critical analyst (Onyx 2008).

College in America is used be defined as a community of learning where strictness and collegiality is combined to produce the “whole man-his body and soul as well as his intellect” is nurtured to become citizens that have quality of “unity, gentility, and public services”. In the later development, as college mission was expanded to research as well as teaching, beyond character building, as a place to seek “all knowledge into a unified whole”, colleges became universities. At that time, boundaries between disciplines did not exist as they are today. A Harvard graduate (class of 1825) wrote, “There is one truth, even as one God”. In Colombia University, on a domed building erected in the first decade of the 20th century, inscription reads, “Erected for the Students that Religion and Learning May Go Hand in Hand and Character Grow with Knowledge” (Delbanco 2012, 38, 40, 79).

Colleges and universities in Indonesia, of course, have their own social history and localized cultural meaning. Altabach (1989), nevertheless, argues that initially Asian universities, including Indonesia, take the Western model of education system. In the later development, they became Asian as much as Western. Following the globalization characterized with increased connectivity and collaboration, they tend to converge with the Western model. In fact, the ongoing change and transformation within the IIHE demonstrate how Islamic higher education system, part of the Indonesian tertiary education, evolves, even involves in global education contestation.

In the last three decades, academic discussions have been occupied by topics around top-research universities. World ranking institutions publish their annual reports to expose the standing of universities across the globe. Universities are racing to become top-research universities. Altabach and Salmi explain that there are three main factors mainly attributed to identify top-research universities: “a high concentration of talent”, “abundant resources”, and “favorable governance features” (p. 3).

Internationalization of higher education has been a trend, not only in English speaking countries, but also in non-English speaking countries; most of them are developing countries. In the former, internationalization operates as selling education to buying countries, mostly Asia and Latin American. In the later, it operates as selling education to the privileged citizens. Internationalization of higher education offers more benefits and control to developed English-speaking countries. Money making is the main driving force of internationalization as well as the growing demand for it. Multinational arrangements characterized with inequality in benefit and

control are undertaken to facilitate internationalization (Altabach and Knight 2007).

In such a structure of university arrangement, community engagement is promoted in order to participate in knowledge production. Community can be defined as territory and neighborhood or the nature of human relations. Human relations are more likely to be associated with interests (McMillan and Chavis 1986). In a community, activities and interactions occur by which human products are generated, including knowledge (Jonassen 1960). Freilich (1963) in his classical study argues that community has an operational definition that represents people who are interconnected through various centers where information is distributed. Simply put, community is individuals or groups of citizens drawn together by identities, interests, and locations (Bowen, Newenham-Kahindi, and Herremans 2010).

In knowledge economy, universities by and large have redefined their relations to community or society. Universities initially perceived themselves as independent producers of knowledge. Nowadays, they deal with community as partners to co-produce knowledge. However, this knowledge production is defined in economic terms. Therefore, many view that universities in knowledge economy have abandoned their historical and social mission. In order to redirect this ongoing orientation, according to Biesta (2007), universities should rethink about their civic role. Universities should work to create knowledge democracy rather than knowledge economy.

The declining support of the state to higher education in some countries is sometimes understood as a consequence of the fact that universities do not demonstrate enough evidence that they are addressing societal needs, such as crimes, poverty, and unemployment. Weerts (2014) argues, however, that the relationship between engagement and state financial support is not as simple as it is because state support for higher education is always embedded in wider political and economic contexts in which the support of politicians from different parties is not easy to predict. Weerts (2014) suggests that what determines whether a university will engage with community or seek for a state financial support through community engagement is its dependency on resources.

In a context of firm-community engagement, Bowen, Newenham-Kahindi, and Herremans (2010) argue that basically the character of firm-community engagement may come in three main forms: transactional, transitional, and transformational. The return of this engagement however

tends to be long-termed legitimacy for parties involved. The same might be true for universities, especially research universities.

Fitzgerald suggests (2012) that in order to support a successful community engagement, it is important to include mentoring, awareness-raising, and supportive university infrastructure. In university-community engagement, university should value research, knowledge integration, knowledge application through community, and teaching.

Research in the United States shows that research universities are slower in implementing university-community engagement due to its size and decentralized system, and due to narrowly defined scholarship. Weerts and Sandmann (2010) suggest that inclusive governing structure, mission, history, and location of institution to the community are important factors that should be considered when university-community engagement is to be taken into a policy measure. In the process, universities should be able to inclusively share resources and voices with community. Actors involved do not only need to bring their academic expertise, but also their social skills to integrate with the community.

Although it is clear that university-community engagement should be able to bring mutual benefits from reciprocal processes undergone, it is not always easy to define the success of a project. It is therefore very important for universities and communities to define their reference of indicators from the beginning. Hart and Northmore (2010, 8) propose indicators of a successful engagement: “public access to facilities, public access to knowledge, student engagement, faculty engagement, widening participation, encouraging economic regeneration and enterprise in social engagement (equalities an diversity), institutional relationship and partnership building”.

The rise of university-community engagement phenomenon led to the emergence of scholarship of engagement (McNall et al. 2009). Then, how the Indonesian Islamic higher education fits into this relatively new scholarship?

Indonesian Islamic Higher Education as a Knowledge Producer in Knowledge Society

Compared to non-Islamic institutions, Indonesian Islamic higher education has a unique standing as a knowledge-producer. It has to meet three main goals. First, it has to represent Islam as one of the world religions. In order to realize this goal, IIHE has to demonstrate its commitment to Islamic identities, values and norms. Second, it has to serve the interest of

Indonesia as a country. In order to achieve this goal, IIHE has to put priority on national interests in producing knowledge. Third, it has to contribute to the advancement of knowledge and technology for the betterment of humanity as a whole. In many occasions, it is not always easy to reconcile these goals.

Similar dilemmatic situation was described by Welch (2012b) in relation to the effort of the Indonesian universities to become a knowledge hub in the Asian region. He suggested three important factors that constrained such an effort: (a) the competing presence of regional and trans-regional elements; (b) the Indonesia's engagement with China; and (c) issues of state capacity, corruption, and poor quality. Similarly, Indonesian effort to attract international students, especially those from Muslim countries met unexpected results. Indonesian Islamic higher education has lower level of development and lower ability to deliver international programs in English compared to Malaysian higher education (Welch 2012a).

I argue that in order for IIHE to survive and not to be marginalized in the current arena of higher education internationalization, it should reconsider and strengthen its philosophical configuration in a way that enables it to perceive knowledge production as an objectively contested area. Within this contested area, it has to demonstrate its unique scientific paradigm. At the same time, it has to show that this uniqueness will enable it better to collaborate with other knowledge producers effectively.

Philosophical Configuration

Within Islamic education, the ontological assumption is based on the view of the totality of reality, both physical and metaphysical. Reality comes from One Allah the Almighty. This ontological assumption is then translated into a unique epistemological mode in which divined and humanistic resources of knowledge are held together in knowledge seeking activities. Based on this assumption, Al-Attas (1993) criticized the stand of several Muslim thinkers in Indonesia and Malaysia who were, according to him, influenced by the Western secularism and secularization. For him, many of those Muslim leaders did not understand the underlying philosophy of both Western and Islamic worldview. From this point, he proposed the de-westernization of knowledge to be a solution for the Muslim underdevelopment. The vision of truth and reality, for him, should be built upon revealed knowledge and belief.

Similarly, Sardar (2006) proposed an alternative way of knowing shaped by Islamic norms and values. Such a project, according to him, should start from a way of knowing that would lead to answers that would be different from non-Muslim understanding. For Faruqi (1989), this project should be led by capable Muslim intellectuals who are knowledgeable about Islamic principles, values as well as modern sciences.

Within the Islamic higher education in Indonesia, in order to solve knowledge dichotomy between the Islamic and the non-Islamic, and between the Islamic and the Western knowledge, there have been efforts of knowledge integration. These efforts are described in various terms and metaphors, such as Spider Web introduced by Amin Abdullah in Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga in Yogyakarta, the Tree of Knowledge by Imam Suprayogo in Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim in Malang, East Java, and Indonesian Islam in Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah in Jakarta. Other Islamic state universities are trying to coin their terms or metaphors to deliver their knowledge integration projects (Darda 2015, UIN SUSKA Riau 2015, Ichwan and Muttaqin 2013).

IIHE in Distributed Knowledge Society

Indonesian Islamic higher education institutions, as other Indonesian universities, tend to isolate people from community. Individuals work separately, and ideas remain theoretical. Topics taught are mostly social sciences and humanities with religious emphasis. Departments are classified based on disciplinary fields in which structured communications and interactions across disciplines do not exist at the institution level. Trans disciplinary contacts happen according to individual or group initiatives.

Nowadays, we live in a so-called distributed knowledge society. In knowledge society, education is considered as a key to prosperity so that competitive advantage of each nation is defined based on their national education quality, determined according to the international standards. In this society, the distinction between formal and ordinary knowledge has become blurred and fuzzy. Knowledge is defined as an ability to act, and its production and reproduction has not anymore followed a clear-cut procedure where higher education is privileged to produce it. Knowledge production is transferred to industrial laboratories, think-tanks, or consultants. Knowledge is transferred through its applicability (technological, market, organizational, and personal knowledge). Knowledge is distributed to wider society. Society become more reflexive, constantly questioning and evaluating why people are

doing what they are doing. The boundary between university and society has demarcated through contract-research. The state retreated from becoming the main financier of higher education (Weert 1999).

What could the Indonesian Islamic higher education do to survive marginalization in this ecological environment?

Discussion

When it comes to the university-community engagement as a mode of knowledge production, IIHE has to navigate through philosophical and policy challenges.

Philosophical Considerations

The project of integrated and interconnected science within the Islamic world in general and within the IIHE in particular is built upon the assumption of binary relation between religion and science. Such assumption is problematic because it confirms the presence of knowledge duality (divine knowledge and humanistic knowledge) in order to disconfirm it. As a result, it carries around the message of disintegration and disconnectivity in knowledge production. The second problem is that it places so much emphasis on knowledge integration and interconnectivity, rather than on knower or people integration and interconnectivity. Knowledge in human reality does not exist outside ourselves so that it should be talked about within the context of human interactions and experiences.

It is understandable that such a perspective occurred within the Islamic education system. It is not difficult to see its root in Islamic literature, both classical and modern. When they talk about the resource of knowledge, they mainly divide it into the divine text (*naql*) and the reason (*'aql*). Based on the assumption that every knowledge that human beings can produce comes from human experiences; then, it is humanistic, I argue that such a dichotomous division in scientific knowledge or ordinary knowledge does not exist in principle. All forms of sciences are the manifestation of human creativities and creativities, including those based on religious texts so-called religious knowledge.

On the first order, Qur'an and the prophetic traditions (Sunnah) are not the basis or sources of our knowledge in parallel to reason, as we in fact initially should employ reason to accept or to reject them. Therefore, reason on the first order is the source of our knowledge. Both Qur'an and the

prophetic traditions are data given to us to be observed and experienced as we observe and experience other available data in natural and social world. Muslims acceptance of both Qur'an and Sunnah as valid knowledge and information is not directly on the basis of their reason, but on their acceptance of the Prophet Muhammad (Peace be Upon Him) testimony that Qur'an and Sunnah are the teaching of Allah the Almighty. We, Muslims, accept this testimony based on our reasoning that with all challenges that the Prophet has addressed to the nation of human and jinni, and until today none has succeeded to overthrow them, it is then logically necessary to be accepted that the Prophet testimony is valid.

Muslims' acceptance of the Qur'an and Sunnah on the first order then is not directly based on logical reasoning, and perceptual capacity towards the contents of them. But, it is through their logical acceptance of the Prophet testimony. The same is partly true for our acceptance of natural and social facts. We are told that they exist. Based on this others' testimony, on the second order, we approach them using our intellectual and perceptual capacity to generate ordinary or scientific knowledge. Therefore, on the second order, Qur'an and prophetic traditions are commensurable to social and natural facts. They are all data available to be explored scientifically using our intellectual and perceptual capacity. As a result, everyone who operates their methodological approaches on Qur'an and prophetic traditions should be accessible to testability as scientists do in social and natural knowledge production.

Found on this argument, the operationalization of knowledge integration and interconnectivity, even idea and concept of knowledge integration and interconnectivity that is based on the dichotomous assumption of the scientific knowledge, is questionable both epistemologically and methodologically.

Epistemologically, it confuses the position of Qur'an and Sunnah as part of data making up the body of human knowledge. In addition, it is counterproductive because rather than reduces the ontological and epistemological tension between what is so-called religious and non-religious science, it intensifies it.

Methodologically, posting Qur'an and Sunnah as the main basis and resource of knowledge can complicate human knowledge enterprise. It is not because they directly prohibit it. Rather, it is the way we treat them and deal with them in the enterprise that causes such complication.

All statements in Qur'an and Sunnah are normative-idealistic because they are religious texts that have a mission to invite and call for human beings to comply with certain norms and teachings. Whereas knowledge seeking is an action of discovering, explaining and understanding facts as they are, including religious texts, not as they should. In other words, Qur'an and Sunnah should be treated and dealt with alongside with all God's creatures as open data available for human beings to produce knowledge. All knowledge then become the product of human experiences that stem from the interaction between human beings as knowing subject and data as known objects, including Qur'an and Sunnah. Therefore, the only scientific knowledge exists is the knowledge of human beings. Contradiction and dichotomy, usually expressed as the contradiction between religion and science or between religious and non-religious knowledge, never exists. What exists is the contradiction or dichotomy of human experiences. There is no such a science of religion versus a science of nature or society. It is only science on or about religion, nature, and society. When we talk about natural or social science, we actually talk about our intelligible experiences of the nature and society. The same should be true for science on religious texts. It is our intelligible experiences of religious texts.

I agree with people saying that research on religion is not commensurable to research in natural and social science because in religion people tend to have full "involvement" and "unreserved commitment" (Abdullah 2013, 16, Barbour 2000). But it does not mean research on religion cannot be done because each scientific enterprises consists somehow of personal involvement or unreserved commitment. And, if we are a serious observer, it is our duty to manage it so that it will not interfere with our scientific conclusions. It is a challenge that encounters each researcher in order to warrant the testability of their scientific inferences.

Methodological Consideration

From this point, the second argument becomes important: it is not knowledge that is to be integrated; rather it is knowledge seekers that are to be integrated. Each knowledge seeker has a unique experience of knowledge production, leading to differences and contradictions in knowledge production and product. Differences and contradictions are not the problem. Instead, they are structural resources that may enable or disable the advancement of knowledge. The outcome is dependent on how knowledge workers interact within and without higher education institutions. In other

words, increased collaborative and lived interactions among knowledge seekers or workers are needed. The solution is not to unify knowledge, but to communicate knowledge. The dichotomy or contradiction that is usually expressed as a serious problem is actually signs of failure to communicate expectations and meanings. The notion of “intersubjective testability” (Barbour 2000, Abdullah 2013) can only be applied when knowledge seekers and workers consciously interact in collaborative knowledge productions.

Abdullah (2013) vividly describes patterns of relationship between religious and non-religious knowledge using the Spider Web as a metaphor. He illustrates that each discipline is actively and dynamically integrated and interconnected to each other. Within the Web, many dotted holes characterize the patterns of relationships among them, indicating existing disciplinary, spatial and temporal boundaries differentiating one form of knowledge from another. It represents differentiated experiences across disciplines, time, and place.

It is argued that this description put emphasis on knowledge as a product of individual or group knowledge seekers. They may be imagined to work in isolation to produce scientific enterprises that are likely to be integrated and interconnected.

As I stated that it is not knowledge that is to be integrated; rather it is knowledge seekers that are to be integrated. Knowledge or science as human experiences across time and place does not require integration or interconnectivity. Claims to knowledge integration and interconnectivity presume the existing of dominating force that demand involuntary submission from knowledge product that denies it. Efforts to integrate and interconnect knowledge may lead to the emergence of dominant knowledge that often causes the intensity of truth claims.

Policy Consideration

Our methodological argument leads to the third argument. Many unresolved scientific and cultural communications within the IIHE embodied in what is so-called knowledge dichotomy are generated more by the failure of language transferability, rather than by knowledge contradictions. Each disciplinary knowledge has developed its own vocabularies, causing the difficulties of integrating and interconnecting to each other. Vocabularies that they develop and refine within their scientific circles define their scope of understanding and interactions. Consequently, out of this condition, parochial knowledge paradigm is developed and embodied in disconnected

units of expert enclaves. Even more challenging, the existing structure of most colleges and universities is congruent with this form of disintegration and disconnectivity. Ironically, the more we talk about interdisciplinary, transdisciplinary, integration, and interconnectivity, the further we compartmentalize our universities.

If we are serious about university-community engagement as a mode of knowledge production, we have to become more realistic in our approach to knowledge. Our ongoing discussions of knowledge integration and interconnectivity within IIHE should be translated in a more systematic way. It should be translated into our norms and values in doing sciences, regulating the nature of interactions among knowledge communities.

If we are serious about it, we have to radically transform our universities to become the real gathering of all knowledge and its workers. We have to abandon the existing structure of our universities that isolate knowledge workers from each other. We may begin by establishing a Faculty of Transdisciplinary where knowledge workers can collaborate institutionally to develop a new science that comes out of new shared experiences. Al-Azhar University in Cairo has a Faculty of *Dirasaat Islamiyyah* (Islamic Studies) in which students and teachers are expected to master different branches of Islamic sciences. The proposed Faculty of Transdisciplinary may take after this model in a more radical way by which students and teachers from all fields of studies are lively integrated and interconnected. They do not talk about integrated-interconnected knowledge and science, but they live and experience it. This structure of university is expected to produce a new kind of scientists. Scientists who can communicate and apply their expertise with confidence without feeling the presence of obligation to integrate and interconnect the disintegrated and the disconnected. In addition, this will produce knowledge workers who are more capable of solving multidimensional problems. This new kind of knowledge workers are desperately needed in the current knowledge society. Furthermore, they are the ones who are capable to bridge university and community with their academic and social skills in knowledge production.

I understand that this is a Utopian, but this is one of the viable ways to escape from knowledge marginalization and disintegration that denies our ontological belief on the totality of reality, and our epistemological belief on the plurality of experiences and methods.

Finally, it should be bored in mind that university-community engagement is a locus of contestation. It is not a neutral zone where everyone

comes to contribute voluntarily. This reality leads to our fourth argument. Knowledge production should be based on an ethically sound political foundation, by which knowledge becomes a medium for enabling the disable and freeing the unfree (Apple). Therefore, university-community engagement should be developed as a smart coalition rather than dependency or survival strategy. A strong coalition for human betterment.

A commitment to a non-dominant knowledge is particularly important if university-community engagement will be allowed to serve human betterment. A non-dominant knowledge is a transformational knowledge that draw university, community, and government to lead social change through long-term negotiations by which interests are shared democratically. While university can play its role as an independent critical institutions, state and community can provide sufficient political and financial support in knowledge production. Each party should be voluntarily aware why and how they contribute to the knowledge production. It is possible also that the community members, both as individual and groups, become independent critical entities.

It is worthy to note that the distributed nature of knowledge does not only occurs within secular knowledge society, it is also happening in religious knowledge society. Nowadays, people learn and share religious knowledge through cyber and social media penetrating our traditional physical and cultural boundaries. People can learn religious contents without meeting a traditional teacher. People are autonomous and reflexive. They are able to learn outside and without authorized educational institutions. Religious learning centers are not anymore the monopoly of traditional teachers and institutions, including universities. People are thinking in an instrumental and applicative way. Norms and values underlying what they learn from various resources are not so much as important as what they can do with it in their practicality.

Within this environment, using university-community engagement as a mode of knowledge production, IIHE should define their roles and expand their boundaries to include community in order to facilitate engagement.

Conclusion

University-community engagement is one of the ways to produce transformational knowledge within the Indonesian Islamic Higher Education. In order to achieve this goal, knowledge workers within this

system should be able to: (1) redefine the role of Qur'an and Sunnah in their scientific enterprise so that both can become enabling, rather than constraining resources, for their contribution to scientific communities; (2) develop a new scientific paradigm that enables knowledge seekers and workers within this system to communicate and collaborate in an institutionalized fashion; (3) establish a common language that strongly represents this new scientific paradigm; and (4) demonstrate a strong commitment to develop scientific enterprise for the betterment of humanity as a whole. []

References

- Abdullah, M. Amin. 2013. *Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Intergrasi-Interkoneksi Keilmuan*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islamic and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Altabach, Philip G., and Jane Knight. 2007. "The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities." *Journal of Studies in International Education* no. 11:290-305.
- Altabach, Philip G., and Jamil Salmi. 2011. *The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Altbach, Philip G. 1989. "Twisted Roots: The Western Impact on Asian Higher Education." *Higher Education* no. 18 (1):9-29.
- Apple, Michael. 2012. *Can Education Change Society?* New York: Routledge.
- Barbour, Ian G. 2000. *When Science Meets Religion*. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: SAGE Publications.
- Biesta, Gert. 2007. "Towards the knowledge democracy? Knowledge production and the civic role of the university." *Stud Philos Educ* no. 26:467-479.
- Bowen, Frances, Aloysius Newenham-Kahindi, and Irene Herremans. 2010. "When Suits Meet Roots: The Antecedents and Consequences of

- Community Engagement Strategy." *Journal of Business Ethics* no. 95:297-318.
- Carayannis, Elias G., and David F. J. Campbell. 2012. *Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st-Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development*. New York: Springer.
- Darda, Abu. 2015. "Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia." *Jurnal At-Ta'dib* no. 10 (1):34-46.
- Delbanco, Andrew. 2012. *College: What it was, Is, and Should be*. Princeton: Princeton University Press.
- Diktis. 2016. *Dari Workshop SILE-Project: University-Community Engagement sebagai Model* (April 7). Diktis Kemenag RI 2014 [cited June 11 2016]. Available from <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/-index.php?berita=detil&jenis=news...>
- Diktis. 2016. *Laporan dari Sydney: Menggali Pengetahuan Community Engagement untuk Tradisi Akademik* (November 12). Diktis, Kemenag RI 2015 [cited June 12 2016].
- Driscoll, Amy. 2008. "Carnegie's Community-Engagement Classification: Intentions and Insights." *Change: The Magazine of Higher Learning* no. 40 (1):38-41.
- Faruqi, Ismail. 1989. *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Fitzgerald, Glynis A. 2012. "Engaging Faculty In Community Engagement." *Journal of College Teaching & Learning* no. 9 (2):101-106.
- Freilich, Morris. 1963. "Toward an operational definition of community." *Rural Sociology* no. 28 (2):117-.
- Gallopin, Gilberto C., Silvio Funtowicz, Martin O'Connor, and Jerry Ravetz. 2001. "Science for the twenty-first century: From social contract to the scientific core." *International Journal Social Science* no. 168:219–229.
- Gibbons, Michael. 1998. Higher education relevance in the 21st century. In *The United Nations Educational, Social, and Cultural Organization World Conference on Higher Education*. Paris: World Bank.

- Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, and Martin Trow, eds. 1994. *The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies*. Los Angeles: SAGE.
- Hart, Angie, and Simon Northmore. 2010. "Auditing and Evaluating University–Community Engagement: Lessons from a UK Case Study." *Higher Education Quarterly* no. n.p (n.i):1-25.
- Ichwan, Moch Nur, and Ahmad Muttaqin, eds. 2013. *Islam, Agama-Agama, Dan Nilai Kemanusiaan: Festschrift Untuk M. Amin Abdullah*. 1 ed. Yogyakarta, Indonesia: CISForm.
- Jonassen, Christen T. 1960. "Toward an operational definition of community welfare." *Social Problems* no. 8 (2):112-118.
- McMillan, David W., and David M. Chavis. 1986. "Sense of Community: A Definition and Theory." *Journal of Community Psychology* no. 14:6-23.
- McNall, Miles, Celeste Sturdevant Reed, Robert Brown, and Angela Allen. 2009. "Brokering Community-University Engagement." *Innov High Educ* no. 33:317-331.
- Nowotny, Helga, Peter Scott, and Michael Gibbons. 2003. "Introduction: 'Mode 2' Revisited: The New Production of Knowledge." *Minerva* no. 41 (3):179-194.
- Onyx, Jenny. 2008. "University-Community Engagement: What does it mean?" *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement* no. 1:90-106.
- Sardar, Ziauddin. 2006. *How do you know? Reading Ziauddin Sardar on Islam, Science and Cultural Relations*. London: Pluto Press.
- Scott, Peter. 1997. "The changing role of the university in the production of new knowledge." *Tertiary Education and Management* no. 3 (1):5-14.
- UIN SUSKA Riau. 2016. *Focus Group Discussion Himpun 35 Makalah Dudukkan Konsep Integrasi Keilmuan Versi UIN Suska Riau - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. UIN SUSKA Riau 2015 [cited June 14 2016]. Available from <http://uin-suska.ac.id/2015/09/23/focus-group-discussion->

himpun-35-makalah-dudukkan-konsep-integrasi-keilmuan-versi-uin-suska-riau/.

- Välilmaa, Jussi, and David Hoffman. 2008. "Knowledge Society Discourse and Higher Education." *Higher Education* no. 56 (3):265-285. doi: 10.1007/s10734-008-9123-7.
- Weert, Egbert de. 1999. "Contours of the emergent knowledge society: Theoretical debate and implications for higher education research." *Higher Education* no. 38:49-69.
- Weerts, David J. 2014. "State Funding and the Engaged University: Understanding Community Engagement and State Appropriations for Higher Education." *The Review of Higher Education* no. 38 (1):133-169.
- Weerts, David J., and Lorilee R. Sandmann. 2010. "Community Engagement and Boundary-Spanning Roles at Research Universities." *The Journal of Higher Education* no. 81 (6):632-657.
- Welch, Anthony. 2012a. "Seek knowledge throughout the world? Mobility in islamic higher education." *Research in Comparative and International Education* no. 7 (1):70-80.
- Welch, Anthony R. 2012b. "The limits of regionalism in Indonesian higher education." *Asian Education and Development Studies* no. 1 (1):24-42.

Penyelamatan Akidah *Huffadz* Daerah Terluar melalui Bimbingan Agama dan Mental di Sumatera Barat

AZIZA MERIA

IAIN Imam Bonjol Padang
azizameria2015@yahoo.com

Abstrak: Pengabdian dilatarbelakangi oleh kondisi pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan muslimah Tubeked yang sangat minim, padahal mereka tinggal di daerah yang penduduknya keseluruhan muslim. Identitas kemusliman terlihat dari keyakinan yang di peluk, tanpa tahu, paham, dan mengamalkan ajaran yang diyakini. Akan tetapi kondisi pulau Tubeked yang merupakan salah satu kepulauan terisolir, marginal dan terluar di Kepulauan Mentawai, membuat muslimah tertinggal di bidang, keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan politik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemberdayaan muslimah Tubeked salah satunya di bidang keagamaan sebagai fokus kegiatan pengabdian ini. Pemberdayaan melalui pembinaan peningkatan kualitas keagamaan sangat urgen dilakukan mengingat muslimah Tubeked merupakan *mukallaf* yang harus menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Muslimah Tubeked memiliki peran yang sangat besar dalam melahirkan dan mendidik anak anak sebagai generasi Islam yang taat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Pembinaan keagamaan dilakukan berdasarkan masalah, kebutuhan, potensi, dan peluang dari muslimah Tubeked, dengan melibatkan semua pihak, muslimah, lembaga sosial keagamaan, adat, dan pemerintah duduk bersama untuk berpartisipasi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sehingga masalah muslimah Tubeked di bidang keagamaan dapat teratasi. Pembinaan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan fikih wanita.

Kata kunci: Hafidz, PAR, bimbingan mental.

Pendahuluan

Sumatera Barat secara geografisnya terbagi dua bentuk, yaitu daratan dan kepulauan. Daratan tergabung dalam pulau Sumatera, sedangkan kepulauan terletak di pantai sebelah Barat Sumatera atau menyebar di

Samudera Hindia. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari adat istiadat, budaya, bahasa, sosial, bahkan mayoritas agama. Dilihat dari segi agama, mayoritas penduduk di daratan mayoritas beragama Islam, sedangkan di kepulauan mayoritas non muslim.

Daerah kepulauan di Sumatera Barat sebagian besar bahkan hampir keseluruhan di bawah teritorial Kabupaten Mentawai. Di kalangan nasional bahkan internasional, Mentawai terkenal karena daerah tersebut terletak di patahan semangka, yaitu daerah yang di bawahnya merupakan pertemuan lempeng Asia dan Australia, sehingga sangat berpotensi gempa dan tsunami. Gempa dan tsunami terakhir terjadi pada tahun 2011, dimana gempa berkekuatan 7,9 *likert* meluluh lantakkan pulau-pulau yang berada di daerah utara kepulauan. Gempa ini mengakibatkan kondisi masyarakat di kepulauan Pagai Utara, Sikakap, Sikerei dan Tubekep menjadi lemah di ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan dan mental.

Dampak tsunami khusus di bidang keagamaan dan mental Islam, masyarakat mengalami degradasi akidah, yaitu pendangkalan akidah, ketaatan menjalankan agama dan merosotnya akhlak. Pendangkalan akidah terlihat semakin kurangnya keyakinan masyarakat akan takdir Tuhan, melanggar halal dan haram dalam perbuatan dan makanan, semakin kaburnya batasan toleransi dengan agama lain seperti ikut merayakan hari natal, memakan babi dan anjing.

Kondisi seperti di atas, sebenarnya sudah disadari oleh beberapa ormas Islam yang berasal dari daratan (pusat semua ormas Islam di Sumatera Barat berada di daerah daratan), dan membuat beberapa program¹ dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam di Mentawai. Akan tetapi usaha tersebut tidak begitu membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan²:

1. Program yang dilakukan tidak merupakan program yang berkesinambungan
2. Pendanaan yang tidak begitu besar, sehingga program putus di jalan³

¹ Buya Muslim, Pengurus Muhammadiyah Sumatera Barat, *Wawancara*, 18 November 2014 di Mesjid Taqwa Padang. Program meliputi: pengiriman Da'i dan pembimbing agama, tabligh akbar, gerakan sosial agama masyarakat dan sebagainya.

² Syafrizal, Da'i Kepulauan Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2015 di rumahnya Pulau Sikakap Mentawai.

³ Yang lebih mencengangkan adalah bahwa Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Mentawai tidak memiliki anggaran dana bagi pembinaan *muallaf*. Beni Malwa, Pegawai

3. Pendapatan dan ekonomi pengelola program tidak diperhatikan lembaga
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk mau ditugaskan ke Mentawai
5. Anggapan masyarakat Mentawai bahwa agama bukanlah sesuatu yang sakral dan prinsip dalam hidup
6. Pemuka agama yang menetap di Mentawai saling curiga dan sibuk mengurus hal-hal yang bersifat *khilafiyah* dalam pemahaman agama
7. Ketiadaan program pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas keagamaan dan mental umat Islam
8. Hampir keseluruhan pemimpin dan pembuat kebijakan pemerintah daerah dari golongan non-muslim, sehingga beberapa kebijakan yang ada sangat merugikan umat Islam. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi pesimis dan apatis dengan keagamaan dan mental mereka. Sehingga menimbulkan sikap pragmatis, apapun dilakukan asal menguntungkan pada kehidupan duniawi mereka.

Pragmatisisme menjadi paham dan menjadi ciri khas penduduk asli Mentawai, baik beragama Islam maupun non-muslim. Bagi non-muslim, asalkan anak mereka di bawa ke luar pulau untuk bersekolah walaupun nantinya pindah agama, maka mereka akan mengizinkan. Tujuan mereka agar anak-anak mereka bisa bersekolah walaupun harus masuk Islam bagi mereka tidak menjadi masalah.⁴

Faktanya di kepulauan Mentawai, anak-anak yang berasal dari non-muslim, masuk Islam dan diberikan beasiswa untuk bersekolah di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren cukup banyak. Besar di kepulauan membuat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan memiliki ingatan yang kuat, sehingga mereka sangat cepat dalam menghafal al-Quran. Di antara mereka menyebar di beberapa pesantren di Sumatera Barat dan Jawa seperti Tawalib, Candung, Parabek, an-Nur, Darussalam, Diniyyah Putri, Darussalam Gontor, dan lainnya. Kebanyakan mereka diberikan beasiswa oleh pesantren setempat, sehingga sekolah dan biaya hidup mereka gratis⁵.

Kementerian Agama Sumatera Barat bagian PEN AIS, *Wawancara*, 1 April 2015 di Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat.

⁴ Riswandi, ketua Da'i Kepulauan Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2013, di Panti Asuhan Darul Ulum Sikakap Mentawai.

⁵ Ngena Ibara, Pegawai Pemerintah Kabupaten Mentawai dan Alumni Pesantren Darussalam Gontor, *Wawancara*, 28 Maret 2015 di Padang via Telepon.

Anak-anak mendapatkan pengajaran agama Islam sama halnya dengan santriwati yang lain, bahkan di antara mereka banyak yang berprestasi dan menjadi *huffadz al-Quran* (walaupun belum mencapai hafalan 30 juz). Dari data yang didapatkan, terdapat 139 santri Mentawai yang menimba ilmu di beberapa pesantren di Sumatera Barat dan Jawa. Kebanyakan santri rata-rata memiliki hafalan lebih dari satu juz. Sedangkan anak-anak Mentawai yang telah menjalani pendidikan di pesantren menurut data dari ketua da'i Kepulauan Sikakap, terdapat sekitar 70-an lebih kurang.⁶

Permasalahannya adalah sebagian besar anak yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren atau lembaga keagamaan dan mental *huffadz* tersebut, ketika kembali ke kampung mereka juga kembali ke agama asalnya atau menjadi murtad. Secara kuantitas, ada sekitar 40-an yang kembali ke agama asli mereka.⁷ Apabila dilihat secara komprehensif, pemurtadan disebabkan:

1. Tekanan ekonomi dan keluarga, sedangkan mereka tidak memiliki keterampilan hidup untuk mandiri dan masih labilnya keagamaan dan mental mereka dikarenakan rata-rata mereka berusia remaja akhir
2. Belum berkesinambungan program pembinaan akidah, keagamaan dan mental, dan keterampilan pasca pendidikan pesantren oleh lembaga yang mengirim dan memberikan beasiswa
3. Pendanaan yang minim, sehingga program pembinaan terputus di jalan
4. Kementerian Agama tidak memiliki dana berkenaan dengan pembinaan mu'allaf
5. Kurangnya perhatian pemerintah daerah bahkan kondisi ini seolah-olah memang diciptakan agar anak-anak muslim kembali ke agama aslinya atau murtad
6. Tidak adanya lembaga yang khusus untuk mem-*follow-up* pembinaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas, dampak positif kajian atau pendampingan terhadap para *huffadz* muda di Kepulauan Mentawai sangat penting dan harus dilakukan serta dijadikan fokus pengabdian, alasannya adalah:

⁶ Iswandi, Ketua Da'i Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2015 di Panti Asuhan Darul Ulum Sikakap

⁷ Iswandi, Ketua Da'i Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2015 di Panti Asuhan Darul Ulum Sikakap

1. Para *huffadz* sebagai kader dan generasi muda yang akan membangun umat Islam Mentawai ke depan
2. Apabila mereka tidak mendapatkan penguatan akidah, maka keyakinan dan kepercayaan umat Islam kepada mereka akan tergerus sehingga pembangunan umat Islam di Mentawai akan terkendala
3. Diharapkan terbentuknya lembaga khusus menangani pembinaan dan penguatan keagamaan dan mental *huffadz*.

Tim pengabdian melihat harus dicari solusi dari akar yang menjadi masalah *huffadz*, yaitu masalah dalam upaya mempertahankan hidup, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan menciptakan keagamaan dan mental yang stabil. Hal ini perlu dilakukan agar *huffadz* memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri dan memiliki ketahanan keagamaan dan mental yang kuat dalam memegang teguh agamanya.

Sedangkan dampak negatif apabila pengabdian tidak dilakukan, maka generasi muda Islam di Mentawai atau para *huffadz* muda lambat laun akan hilang karena mereka kembali ke agama aslinya. Dampak besarnya adalah syiar Islam di Kepulauan Mentawai akan redup bahkan hilang. Ditambah lagi, *huffadz* merupakan sosok yang diharapkan mampu memahami al-Quran secara *syumul* (komprehensif), dengan menghafal dan memahami al-Quran secara *syumul* maka akan timbul cara pandang yang positif dalam menjalankan syariat agama dalam masyarakat.

Identifikasi Masalah

Survey sebelumnya menunjukkan bahwa masalah yang dialami *huffadz* muda Mentawai saat ini adalah dalam kondisi:

- a. Pengetahuan akidah yang cukup belum menjadikan pemahaman dan kekuatan untuk mempertahankannya dengan baik. Para *huffadz*, masih memiliki keagamaan dan mental yang labil dan minim keterampilan untuk mempertahankan hidup dan akidahnya.
- b. Ketidakberdayaan sebagai dampak dari tekanan keyakinan, ekonomi, dan kehidupan sosial yang kuat dari keluarga yang masih menganut agama asli, mengakibatkan akidah mereka lemah sehingga mereka memilih untuk *convert*.
- c. Kemampuan akademik dan intelektual yang cukup baik, menjadi potensi untuk para *huffadz* memiliki keterampilan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatan keagamaan dan mental yang lebih baik.

- d. Berusia 16-25 tahun dan dianggap usia yang masih labil. Mereka menjadi *muallaf* ketika mereka di bawa ke luar Mentawai untuk menempuh pendidikan.
- e. Kondisi dampingan yang membutuhkan pembinaan sebagai bentuk solusi dari permasalahan mereka, baik itu dari pihak swasta, pemerintah atau lembaga baru yang khusus menangani mereka.

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan akidah yang cukup belum menjadikan pemahaman dan kekuatan untuk mempertahankannya dengan baik. Para *huffadz*, masih memiliki keagamaan dan mental yang labil dan minim keterampilan untuk mempertahankan hidup dan akidahnya.
- b. Ketidakberdayaan sebagai dampak dari tekanan keyakinan, ekonomi, dan kehidupan sosial yang kuat dari keluarga yang masih menganut agama asli, mengakibatkan akidah mereka lemah sehingga mereka memilih untuk *convert*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam pengabdian masyarakat adalah bagaimana menyelamatkan akidah daerah terluar melalui bimbingan keagamaan dan mental di Sumatera Barat?

Tujuan dan Manfaat Pengabdian

Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk menyelamatkan akidah *huffadz* daerah terluar melalui bimbingan keagamaan dan mental di Sumatera Barat. Bimbingan difokuskan pada menumbuhkan sifat positif, menghilangkan sikap pesimis dan takut, serta pengetahuan dan pemahaman agama.

Pengabdian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, pengabdian ini akan menghasilkan konsep keilmuan tentang penyelamatan akidah dan karakteristik *huffadz* di daerah terluar. Secara praktis bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pembinaan *huffadz* di Sumatera Barat.

Landasan Teori

Akidah dan *Huffadz*

Akidah bentuk masdar dari kata “*aqoda, ya’qidu, aqdan, aqidatan*” yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan tokoh. Sedangkan secara teknis akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga yang dimaksud akidah adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul dalam hati. Syekh Hasan al-Banna menyatakan akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keragu-raguan.⁸

Fungsi dan peranan akidah dalam kehidupan manusia antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir, karena sejak lahir manusia telah memiliki potensi keberagamaan (fitrah). *Kedua*, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Akidah memberikan jawaban yang pasti sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi. *Ketiga*, memberikan pedoman hidup yang pasti.

Penghafal al-Quran (*Hafizd al-Quran*)

Hafizd atau *huffadz* (jamak) adalah istilah atau gelar yang diberikan kepada mereka yang mampu menghafal *al-Qur’an*, kitab suci agama *Islam*.⁹ Kegiatan mereka disebut dengan *tahfidz* al-Quran terdiri dari dua kata yaitu *tahfidz* dan al-Quran. Kata *tahfidz* merupakan bentuk *masdar ghoir mim* dari kata *حَفَظَ - يُحَفِّظُ - تَحْفِيزًا* yang mempunyai arti menghafalkan.

Pengertian al-Quran secara etimologi bentuknya *isim masdar*, diambil dari kata *قَرَأَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً وَقِرَاءَاتًا* yang merupakan sinonim dengan kata *قِرَاءَةٌ*, sesuai dengan wajan *فَعْلَانٌ* sebagaimana kata *عُفْرَانٌ* dan kata *شُكْرَانٌ* mengandung arti yaitu bacaan atau kumpulan. Sedangkan secara terminologi al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai *mukjizat* yang tertulis dalam lembaran-lembaran, yang diriwayatkan secara mutawattir, dan membacanya merupakan ibadah. Setelah melihat pengertian *tahfidz/menghafal* dan al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa menghafal al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Saw di luar kepala

⁸ Hasan al-Banna, *Akidah Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1983), h. 9

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hafiz>, diunduh tanggal 12 Januari 2015

agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.

Menurut Imam Nawawi hukum menghafal al-Quran adalah *fardu kifayah*¹⁰. Termasuk hukumnya *fardu kifayah*, ilmu-ilmu syara' yang mesti diperoleh oleh seorang muslim untuk menegakkan agamanya seperti menghafal al-Quran:

1. Mempunyai niat yang benar dan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah
2. Senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah untuk supaya diberikan kemudahan dalam menghafal al-Quran.¹¹
3. Perbanyak istigfar/minta ampunan kepada Allah
4. Sabar dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menghafal al-Quran
5. Meluangkan waktu untuk menghafal al-Quran
6. Buatlah jadwal harian untuk menambah hafalan dan mengulangnya
7. Dianjurkan menghafal al-Quran itu pada waktu-waktu yang banyak keutamaannya atau dalam shalat-shalat sunnah seperti pada malam hari dan setelah shubuh
8. Ketika menghafal ini hendaklah suaranya dikeraskan, jangan sampai membacanya dalam hati atau pelan-pelan
9. Membacanya dengan bacaan *tartil*, jangan tergesa-gesa. Hal itu juga dapat mempengaruhi kuatnya hafalan, semakin dia cepat membacanya semakin cepat juga dia lupa tetapi kalau dia membacanya dengan *tartil* maka hafalannya itu akan sulit untuk hilangnya.

Huffadz memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di dalam Islam, hal ini terlihat dari keutamaan orang yang menghafal al-Quran yaitu:

1. Orang yang hafal al-Quran itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu.¹²

¹⁰ Yang dimaksud dengan *fardu kifayah* yaitu kewajiban yang ditujukan kepada semua *mukallaf* atau sebahagian dari mereka yang apabila diantara mereka (cukup sebagiannya saja) melaksanakannya maka akan menggugurkan dosa yang lainnya (yang tidak melaksanakan) dan apabila tidak ada seorangpun yang melaksanakan kewajiban tersebut maka dosanya ditanggung bersama. Untuk menjadi seorang *huffadz*, ada beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya :

¹¹ Ibnu Abbas pernah berkata:” kalau lah tidak Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk dapat membaca Al-Qur’an dan menghafalnya niscaya manusia tidak akan mampu untuk membaca dan menghafalnya”. Dan ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

(القمر : ١٧) (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُكْرِمٍ

¹² Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48-49:

2. Hafal al-Quran menjadi sumber keselamatan dunia dan akhirat.¹³
3. Orang hafal al-Quran akan selamat dari api neraka.¹⁴
4. Orang yang hafal al-Quran itu berada di barisan paling depan/paling dahulu di dunia dan akhirat.¹⁵
5. Orang yang hafal al-Quran itu memperoleh derajat tinggi di surga.¹⁶
6. Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang yang membaca, menghafal dan mengamalkannya.¹⁷
7. Orang yang hafal al-Quran akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan, dan kedua orang tuanya dipakaikan pakaian yang tidak ada di dunia.
8. Orang yang hafal al-Quran menikah tanpa maskawin (maskawinnya al-Quran).
9. Menolong ilmu dengan menghafalnya.
10. Hafal al-Quran akan menguatkan ingatan.
11. Orang yang hafal al-Quran dapat dibedakan dari Akhlak dan budi pekertinya.
12. Hafal al-Quran dapat meluruskan lidah, membuat lidah fasih dalam berbicara.
13. Menghafal al-Quran itu meneladani Rasulullah SAW.
14. Meneladani Ulama salaf.
15. Hafalan al-Quran akan memberikan kemudahan bagi semua orang.
16. Orang yang hafal al-Quran akan diberikan kemudahan untuk mencapai kesuksesan oleh Allah SWT.

¹³ Hadits Nabi menjelaskan:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((مَنْ حَفَظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ)) . في رواية : ((من آخر سورة الكهف))

¹⁴ Sebagaimana hadits Nabi:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْرَتَكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ) : رواه أحمد . ويقول أبو أمامة (لَوْ جَعَلَ الْقُرْآنَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ .

¹⁵ Sebagaimana hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

(عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنْ اللَّهُ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

¹⁶ Sesuai hadits Nabi SAW.:

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَأْ وَأَرَقْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي)) : عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ((الدُّنْيَا ، فَإِنْ مَنَزَلَتْكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا

¹⁷ Sebagaimana hadits Nabi:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ .

17. Orang yang hafal al-Quran itu termasuk *Ahlullah*
18. Orang yang hafal al-Quran itu berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah.
19. Tidak dikatakan iri kepada orang yang hafal al-Quran, akan tetapi *ghibtoh*.
20. Orang yang hafal dan mempelajari al-Quran itu lebih baik dari perhiasan dunia.
21. Orang yang hafal al-Quran yaitu orang yang paling banyak membaca al-Quran, maka otomatis banyak pahala yang ia peroleh.
22. Orang yang hafal al-Quran selalu membacanya setiap saat.
23. Orang yang hafal al-Quran tidak akan kesulitan untuk berbicara, berceramah dan belajar.

Bimbingan Mental

Istilah bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *guidance*, *guide* berarti *showing away* (menunjukkan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun), *giving instruction* (mengesahkan), dan *giving advice* (memberikan nasehat).¹⁸ Dari beberapa arti bimbingan di atas, diketahui bahwa bimbingan merupakan, proses pemberian bantuan pada seseorang, yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga individu dapat memahami, dan sanggup memimpin dan mengarahkan dirinya sendiri.

Bimbingan ditinjau dari pengertian di atas, menunjuk pada dua hal, yang satu sama lainnya dapat berdiri sendiri yaitu:¹⁹ *Pertama*, memberikan informasi. Bimbingan berarti, memberikan dan menyajikan informasi, bahkan nasehat pada seseorang atau sekelompok orang, sehingga ia bisa membuat keputusan dan pilihan sendiri. *Kedua*, menuntun atau mengarahkan ke arah suatu tujuan.

Sedangkan bimbingan secara istilah, banyak dikemukakan para ahli di antaranya, Ester D. Crow dan Alice, menurut mereka, bimbingan merupakan bantuan yang dapat diberikan oleh pribadi yang terdidik dan terlatih, kepada setiap individu yang usianya tidak ditentukan, untuk dapat menjalani

¹⁸ W. S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 1982), h. 18

¹⁹ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 63-64

kegiatan hidup, mengembangkan sudut pandangannya, mengambil keputusannya sendiri, dan menanggung bebannya sendiri.²⁰

Sedangkan pendapat lain menyatakan, bimbingan merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain, dalam menentukan pilihan, penyesuaian, dan pemecahan masalah, sehingga bimbingan dapat meningkatkan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas dirinya.²¹ Kemudian M. Surya mengemukakan, bimbingan adalah, proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis, dari pembimbing kepada yang dibimbing, agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri, penerimaan diri, penyesuaian diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal, dan penyesuaian diri dengan lingkungan.²²

Dari beberapa pengertian bimbingan di atas, terlihat bahwa pengertian yang dikemukakan, baru sebatas bimbingan dalam arti yang luas, yang bisa digunakan dalam setiap kegiatan, seperti bimbingan perkawinan, bimbingan remaja, bimbingan kesehatan, dan juga bimbingan dalam proses pendidikan. Secara khusus, bimbingan dalam proses pendidikan adalah, bimbingan yang menunjukkan sebagai salah satu kegiatan, atau metode dalam pendidikan. Bimbingan adalah, proses pemberian bantuan kepada siswa, dan seorang pembimbing (guru), agar ia sebagai pribadi memiliki pemahaman yang benar akan diri pribadinya, dan dunia sekitarnya, mengambil keputusan untuk melangkah maju secara optimal, dalam perkembangannya, dan dapat menolong dirinya sendiri, menghadapi serta memecahkan masalah-masalahnya. Dan bertujuan untuk tercapainya penyesuaian diri yang sehat, dan demi memajukan kesejahteraan mentalnya.²³

Tujuan bimbingan yang lebih umum, dikemukakan oleh Slameto. *Pertama*, untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan. *Kedua*, untuk dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. *Ketiga*, dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. *Keempat*, dapat

²⁰ Lester D. Crow dan Alice Grow, *an Introduction to Guidance, Principle, and Practice*, (New York: America Book CO, 1963), h. 14

²¹ Arthur J. Jones, *Principle of Guidance*, (Tokyo: Mc Graw-Hill-Book Company, 1963), Cet. Ke-V, h. 3

²² I. Jumbuh dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1975)

²³ Slameto, *Bimbingan di Sekolah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 2

mengarahkan diri sendiri. *Kelima*, perwujudan diri sendiri.²⁴ Mengenai fungsi-fungsi ini pun berbeda. Slameto mengemukakan ada 11 fungsi bimbingan di antaranya: fungsi penangkapan, pencegahan, penyaluran, pengembangan, penyesuaian, pengarahan, informatif, pemecahan, pemeliharaan dan peningkatan.

Hubungan bimbingan dengan agama terlihat dari landasan keilmuan bimbingan, yaitu landasan religius. Landasan religius bagi layanan bimbingan menekankan pada 3 hal, yaitu: *Pertama*, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan. *Kedua*, setiap yang mendorong perkembangan dan perikehidupan manusia, berjalan kearah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. *Ketiga*, upaya meneguhkan kehidupan beragama, untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu.²⁵ Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bimbingan merupakan kegiatan yang membantu individu, untuk mengembangkan potensi dan dimensi kemanusiaan, kesusilaan, dan keberagamannya.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa bimbingan merupakan salah satu cara mengembangkan dimensi keberagamaan manusia, melalui bimbingan, maka manusia dapat mengembangkan dirinya, sehingga manusia bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam pendidikan Islam, tujuan penciptaan manusia adalah, manusia sebagai hamba Allah SWT, dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat ayat 56, dan surat al-Baqarah ayat 30.

Implikasi dari tugas penciptaan manusia dalam pendidikan Islam adalah, manusia memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penciptaannya tersebut. Sebagai hamba Allah, manusia harus mampu melaksanakan perintah dan larangan Allah. Untuk itu, manusia harus mengetahui ajaran dan aturan-aturan hidup berdasarkan agama. Pengetahuan tentang ajaran dan aturan agama tersebut, tidak akan didapatkan tanpa bantuan pendidikan. Begitu juga sebagai khalifah Allah SWT, manusia harus mampu mengembangkan potensi dan dimensi yang dimilikinya, dengan fungsi dan posisi yang demikian, maka manusia

²⁴ Slameto, *op. cit.*, h. 10-12

²⁵ Prayitno dan Emran Amti, *op. cit.*, h. 148

merupakan makhluk *teo-antroposentris* yang berdimensi ganda, maksudnya memiliki jasmani dan rohani yang diciptakan secara serasi dan seimbang.²⁶

Mental berasal dari bahasa latin yaitu *mens, mentis*, yang artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat.²⁷ Di dalam pengertian lain, mental adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia, bukan tubuh dan tenaga, tidak berbentuk tapi hasilnya dapat dirasakan, dihayati, dan dilihat melalui pola pikir tingkah laku, sikap, dan watak manusia.²⁸ Pengertian di atas diperkuat oleh Zakiah Daradjat yang mengatakan, bahwa mental sering digunakan sebagai ganti dari kata *personality* (kepribadian). Mental merupakan unsur dalam jiwa yang melingkupi pikiran, emosi, sikap, dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya, akan menentukan corak tingkah laku, cara menghadapi sesuatu yang menekan perasaan, mengecewakan atau mengembirakan, dan lain sebagainya.²⁹ Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa mental merupakan satu hal yang terdapat dalam tubuh manusia selain jasad dan tenaga, seperti pikiran, sikap, watak, emosi, rohani, jiwa dan lain sebagainya, yang dapat dirasa, dipahami, dihayati, serta diketahui hasilnya melalui gejala-gejala yang tercermin di dalam tingkah laku, akhlak, dan pola pikirnya.

Orang yang sehat mental adalah, orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁰ *Pertama*, memiliki sikap kepribadian terhadap diri sendiri dalam artian ia mengenal dirinya dengan baik. *Kedua*, memiliki pertumbuhan, perkembangan dan perwujudan diri. *Ketiga*, memiliki identitas diri, yang meliputi keseimbangan jiwa dan tahan terhadap tekanan-tekanan kejiwaan yang dihadapi. *Keempat*, memiliki otonomi diri yang mencakup unsur-unsur kelakuan-kelakuan bebas. *Kelima*, memiliki persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta kepekaan sosial. *Keenam*, memiliki kemampuan menguasai lingkungan, dan berinteraksi dengan lingkungan tersebut.

²⁶ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 72

²⁷ Kartini Kartono, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 3

²⁸ Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 963

²⁹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 38-39

³⁰ Marie Johada, *Current Concepts of Positive Mental Health*, (New York: Basic Books, 1958), h. 23

Yahya Jaya menambahkan, bahwa kesehatan mental dalam Islam dikenal dengan *tazkiyat al-nafs*. Istilah ini dikemukakan oleh al-Gazali, ia mengartikan *tazkiyat al-nafs* ini dengan ilmu tentang penyakit jiwa dan sebab-sebabnya, serta pembinaan, dan pengembangan hidup manusia. Dalam pengertian ini, kesehatan mental al-Gazali tidak hanya terbatas konsepnya pada gangguan dan penyakit kejiwaan, serta perawatan dan pengobatannya, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan kejiwaan manusia setinggi mungkin, sesuai dengan tujuan penciptaannya.³¹ Tegasnya, kesehatan mental dalam Islam, identik dengan ibadah yang semata-mata bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah dan agamanya, untuk mendapatkan jiwa yang tenang, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Fajr ayat 27-30.

Apabila dihubungkan pendidikan dan bimbingan dengan kesehatan mental, akan membentuk suatu korelasi yang erat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kesehatan mental dilihat dari segi konsepsi manusia, merupakan kondisi manusia yang mampu dan seimbang. Maksudnya adalah, seimbang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya. Terbentuknya kesehatan mental, merupakan salah satu tujuan dari pendidikan dan bimbingan. Pendidikan merupakan sebuah wadah, untuk mengembangkan potensi fisik dan rohani manusia, yang salah satu bentuk kegiatannya adalah bimbingan. Bagaimanapun terciptanya kondisi kesehatan mental bagi manusia, merupakan tujuan pokok dari pendidikan dan bimbingan, yaitu berkembangnya potensi fisik, mental dan spiritual, sesuai dengan kemampuan individu secara utuh, berimbang dan optimal.

Jadi, dapat disimpulkan kesehatan mental merupakan tujuan utama dari bimbingan. Bimbingan mental merupakan wahana bimbingan, pembinaan dan penggabungan etika, moral, kehidupan mental spiritual atau kepribadian dan kondisi kesehatan mental orang yang beragama.³² Jadi, inti dari bimbingan dan kesehatan mental adalah, kesehatan mental merupakan tujuan dari kegiatan bimbingan, tanpa adanya bimbingan, maka kondisi fisik dan kesehatan mental individu tidak akan terwujud.

Masyarakat dan Daerah Terluar

Istilah masyarakat terluar di Negara Indonesia, tidak terlepas dari istilah pulau-pulau terluar bagi wilayah suatu negara kepulauan. Bahwa

³¹ Yahya Jaya, *Psikoterapi Agama Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), h. 54

³² Yahya Jaya, *op. cit.*, h. 126

negara kepulauan berdasarkan pasal 46 (a) UNCLOS 1982 adalah negara yang wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan yang kemudian dijelaskan secara mendetail dalam huruf (b) adalah kesatuan dari gugusan pulau (termasuk bagian pulau seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi), perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan wujud alamiah lainnya yang membentuk suatu kesatuan geografi, ekonomi, politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian. Adapun Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan maka dalam menentukan luas laut teritorialnya Indonesia menerapkan cara penarikan garis pangkal lurus kepulauan yang berupa garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau dan karang kering terluar dari wilayah negara tersebut. Sedangkan secara kemasyarakatan, masyarakat yang mendiami pulau terluar dinamakan dengan masyarakat terluar.

Indonesia Maritime Magazine edisi Juni 2011 bahwa setidaknya ada 3 (tiga) kepentingan di laut yang seharusnya disadari dan ditetapkan secara tegas. *Pertama*, adalah bagaimana mengamankan dan mempertahankan laut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang memiliki level benefisiensi yang tinggi yang harus dikawal dan jaga bersama. *Kedua*, adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia. *Ketiga*, adalah bagaimana memanfaatkan laut untuk kepentingan bangsa Indonesia dari sisi ekonomi dan kesejahteraan, bukan hanya melihat pemanfaatan terhadap isi lautnya tapi juga sebagai wadah dan posisi silang. Ketidakseriusan dan ketidakmengertian pemerintah dan masyarakat akan berbagai kepentingan Indonesia di laut inilah yang menimbulkan pengabaian pemerintah terhadap pulau-pulau terluar seperti dimuat dalam *Indonesia Maritime Magazine* edisi Mei 2011. *Pertama*, adalah masalah aksesibilitas dan jaringan transportasi. Pulau terluar atau biasa juga disebut dengan pulau terdepan cenderung terpencil sehingga akses dan mobilitas masyarakat terhambat. *Kedua* yaitu masalah kepemilikan. Keterbatasan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan pra-sarana yang menunjang masyarakat setempat secara tidak langsung telah menghambat pendirian bangunan yang akan menandakan kepemilikan Indonesia atas bangunan tersebut. *Ketiga*, adalah masalah ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan.

Penjelasan di atas menekankan pada permasalahan yang terdapat pada masyarakat terluar dari segi pembangunan dan ekonomi. Akan tetapi permasalahan yang dialami oleh masyarakat terluar ternyata sangat kompleks, mulai dari masalah pendidikan, sosial, hukum, bahkan agama.

permasalahan agama masyarakat merupakan permasalahan sensitif akan tetapi sangat urgen karena menyangkut norma-norma yang mengatur masyarakat.

Metode Pengabdian

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). *action research* adalah proses spiral yang meliputi perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yang cermat, kemudian pelaksanaan tindakan dilanjutkan penemuan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan, serta penemuan makna baru dari pengalaman sosial. Pada penelitian ini sekaligus dilakukan pengembangan masyarakat tipe *help self* yaitu lebih mementingkan proses, lambat pada pembangunan fisik, dan berkesinambungan. Pada dasarnya setiap masyarakat punya potensi diri dan mampu berkembang dengan kekuatan sendiri.³³

Pendekatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *partisipatif*.³⁴ dan *mezzo* yaitu kegiatan yang dilakukan pada dampingan sebagai media intervensi pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, keberanian, dan kemauan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.³⁵ Alur aktivitas program *action research* adalah *cyclical*, berupa siklus kegiatan yang berulang dan berkesinambungan. Siklus kegiatannya terdiri dari *mapping*, penyusunan rencana tindak, pelaksanaan rencana tindak, monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk selanjutnya dipetakan kembali dan kemudian dilakukan penyusunan ulang rencana tindak (*replan*), implementasi, monitoring dan evaluasi, dan terus kembali berulang.

Setiap selesai satu tahapan kegiatan, sesuai dengan prinsip dasar riset aksi, dilakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing tahapan. Oleh karena itu, program tindak lanjut dari riset ini pada dasarnya merupakan aktivitas pengulangan dari kegiatan refleksi-pemetaan ulang penyusunan rencana tindak pelaksanaan rencana tindak,

³³ Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125-126

³⁴ Pendekatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat. *Ibid*.

³⁵ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 99. Lihat juga Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiakto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 161.

dan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, ada beberapa penekanan yang akan dilakukan, yakni:

- a. Peningkatan keyakinan akidah Islamiah *huffadz*.
- b. Peningkatan pemahaman keagamaan *huffadz*.
- c. Peningkatan pengamalan ibadah *huffadz*.
- d. Penguatan mental *huffadz*.
- e. Penguatan *networking* dan aliansi strategis antar *huffadz* Mentawai.

Program yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini di antaranya:

1. Desain *Participatory Action Research*

Program penguatan akidah *huffadz* Mentawai ini hakikatnya adalah sebuah "riset aksi". Oleh karena itu, pelaksanaannya secara umum mengelaborasi konsep *Participatory Action Research* (PAR)³⁶ dengan berbagai modifikasi³⁷. Sesuai dengan prinsip *emancipatory research* dan *collaborative resources* yang menjadi bagian penting dari ciri sebuah riset aksi, maka dalam pelaksanaan program penguatan akidah *huffadz* Mentawai ini, mereka berperan sebagai *main actor*. Sedangkan peneliti sekedar "pendamping" yang semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi *stakeholders* muslim minoritas memetakan dan merumuskan masalah, membuat rencana tindak, melaksanakan program kegiatan, memantau dan mengevaluasi setiap proses implementasi program.

Pada setiap tahapan dan proses tersebut, peneliti juga berusaha membangun suasana dan menciptakan iklim yang kondusif, memberi berbagai masukan (*input*), meningkatkan *capacity*, membuka akses ke berbagai *networking*, peluang, dan kesempatan (*opportunities*) yang ada di luar komunitas *huffadz* Mentawai.

³⁶ PAR merupakan pendekatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Kurt Lewin, yang berguna bagi mereka yang ingin memahami perubahan, inovasi, dan perbaikan organisasi dengan cara menggabungkan teori dan praktik. Tim Penyusunan CBR UIN Sunan Ampel, *Community Based Research*, (Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel, 2015), h. 22

³⁷ Program pengabdian ini merupakan program pemberdayaan masyarakat bidang keagamaan, karena pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi masalah mereka sendiri. Rianingsih Djohani (edtr), *Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*, (Bandung: Studio Driya Media, 1996), h. 5.

2. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PAR

Dalam pelaksanaan *Participatory Action Research* (PAR), ada beberapa tahapan yang dilalui seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Siklus *Participatory Action Research*



- a. Tahap persiapan sosial/awal
Pada tahap persiapan sosial ini, peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan kelompok sosial masyarakat
- b. Identifikasi Data dan Fakta Sosial
Mengamati dan mengidentifikasi realitas sosial, biasanya muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat menurut *Freire* fase ini dikenal dengan kodifikasi
- c. Analisa Sosial
Tahap ini merupakan tahap mendiskusikan atau mengurai realitas sosial atau dekodifikasi. Tujuannya untuk menemukan isu sentral masalah. Mempertanyakan terus menerus, mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan-hubungan antar kelompok sosial yang ada. Menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat tersebut
- d. Perumusan Masalah Sosial
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, fase ini merupakan fase perumusan masalah sosial yang berkembang terutama masalah muslim minoritas
- e. Mengorganisir gagasan
Gagasan-gagasan yang muncul diorganisir guna mencari peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah

dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat dimasa lalu (keberhasilan dan kegagalannya)

f. Merumuskan rencana

Fase ini merupakan kegiatan merumuskan rencana tindakan strategis yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan menyangkut apa, kapan, di mana dan siapa serta bagaimana. Perumusan strategi ditentukan berdasarkan inisiatif dari pihak *huffadz* dan kemudian dirumuskan bersama dengan peneliti.

g. Pengorganisasian sumber daya

Melihat strategi yang akan dilakukan maka perlu ditentukan dan diidentifikasi siapa yang harus diajak bekerjasama dan siapa yang akan menghambat. Tujuan dari proses identifikasi potensi ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah di miliki oleh *huffadz* Mentawai. dan usaha apa yang paling memiliki potensi untuk nantinya dikembangkan. Metode yang digunakan adalah teknik *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, baik secara individu maupun secara berkelompok

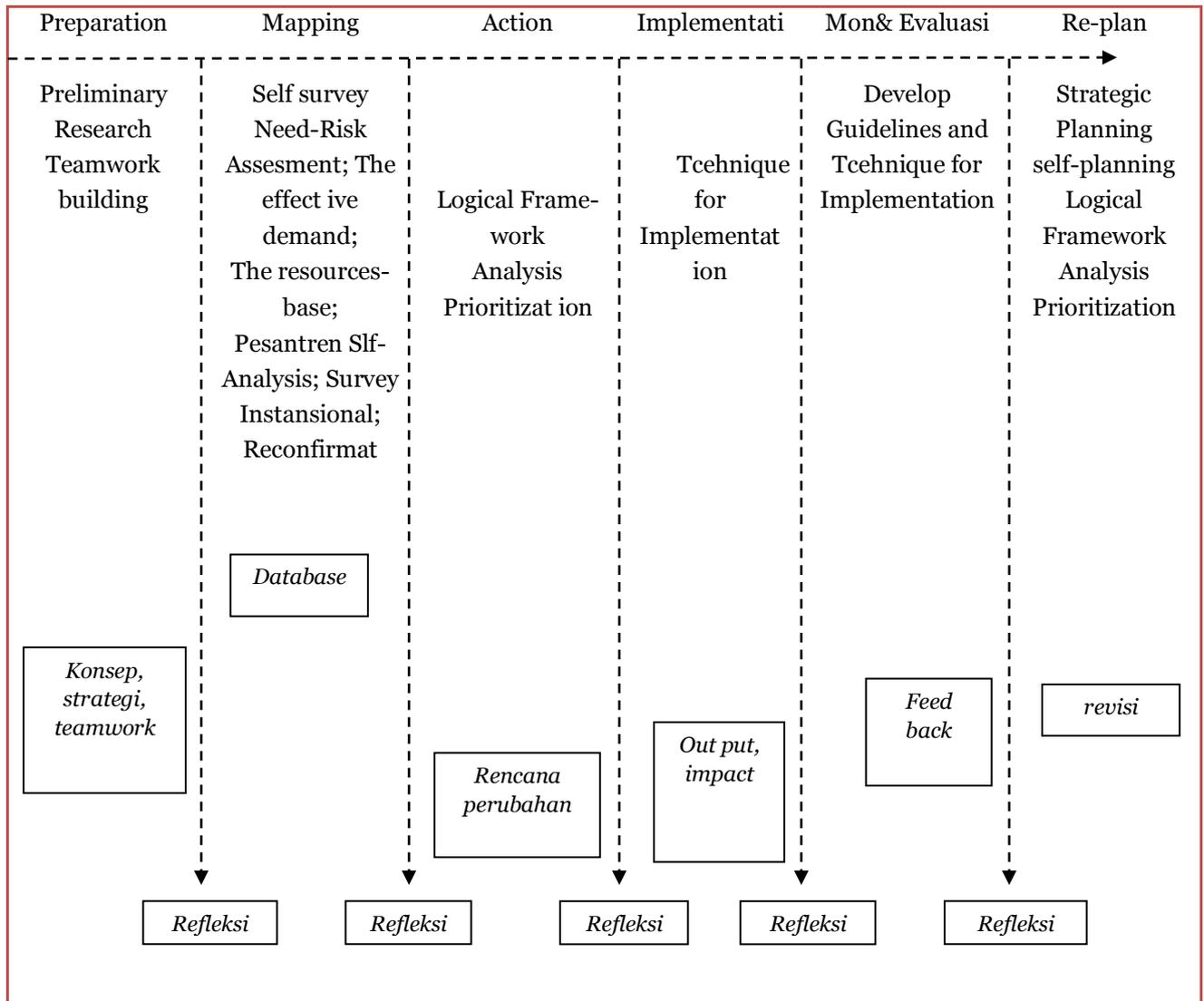
h. Aksi Untuk Perubahan

i. Observasi Evaluasi

Tahap ini dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

j. Refleksi

Gambar 2. Diagram Alur Aktivitas *Participatory Action Research*



Sumber Data

Sumber data dalam kegiatan pengabdian ini didapatkan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian, di antaranya: penyuluh Agama Mentawai, tokoh agama setempat, pimpinan adat, pimpinan pemerintahan, dan komunitas *huffadz* Mentawai..

Teknik Penetapan Responden

Penetapan responden atau komunitas dalam kegiatan ini adalah tim pengabdian dan pihak terkait mencoba untuk mendata seluruh *huffadz* yang berada di daerah Tuapejat, dari pendataan terkumpul 49 nama. Setelah itu, dengan bantuan anggota tim yang berada di Tuapejat, nama-nama *huffadz* dihubungi untuk meminta kesediaan mereka ikut serta dalam kegiatan pembinaan. Dari 49 nama yang dihubungi, yang bersedia untuk di bina sebanyak 36 nama. Alasan mereka tidak bersedia adalah, jauhnya transportasi ke tempat pembinaan, tidak mau meninggalkan pekerjaan rutin mereka, alasan keluarga dan sebagainya. Mereka yang tidak bersedia, rata-rata adalah yang sudah berkeluarga. Secara penelitian teknik yang digunakan dalam menetapkan responden adalah *total sampling*.

Teknik Analisa Data

Data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dengan teknik:

1. Pohon analisis masalah dan pohon analisis tujuan. Analisis dilakukan bersama-sama dengan komunitas, peneliti berfungsi sebagai fasilitator. Pelaksanaannya diawali dengan diskusikan bersama masyarakat, masalah apa yang ingin diselesaikan. Tentukan masalah utama, yang menurut masyarakat perlu diselesaikan. Dimulai dari batang, diskusikan mengenai penyebab-penyebab.
2. Selanjutnya menggunakan matrik analisis partisipasi dan rencana aksi bersama masyarakat. Proses analisis dan pengolahan data ini dilakukan dengan prinsip *partisipatif*, *fathnership*, *perluasan jaringan*. Dengan diskusi diharapkan dapat disadari permasalahan yang dihadapi oleh dampingan, hingga akhirnya nanti dapat dirumuskan aksi yang akan dilaksanakan.

Hasil Pengabdian

Tahapan Kegiatan Pembinaan siklus pertama

- a. Tahapan Pertama (observasi awal)

Kegiatan awal dilakukan, 6-10 Februari 2015, dilakukan kunjungan awal kepada masyarakat daerah setempat untuk memperoleh gambaran masalah dan komunitas yang perlu pendampingan berkenaan dengan pembinaan keislaman, dan mengidentifikasi bentuk permasalahannya. Setelah itu komunikasi tentang permasalahan yang akan diangkat pada kegiatan pengabdian ini intens dilakukan melalui media telepon,

mengingat lokasi yang jauh dari domisili tim pengabdian (12 jam dengan menggunakan kapal). Wawancara melalui telepon dilakukan untuk menggali informasi secara detail sehingga perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Berdasarkan observasi awal, selanjutnya dilakukan pemetaan kebutuhan *huffadz* dalam menguatkan akidah *huffadz* melalui kegiatan pembinaan melalui bimbingan keagamaan.

b. Tahapan Kedua (Pemetaan Kegiatan)

Agar kegiatan ini terlaksana dengan lancar, selanjutnya pemetaan kegiatan, untuk menentukan kegiatan pendampingan apa yang akan dilakukan. Perumusan kegiatan pendampingan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu rancangan awal tanggal 12 Agustus 2015 dalam bentuk kegiatan FGD. Untuk kesempurnaan pemetaan kegiatan dilakukan penyempurnaan proposal tanggal 16 September 2015. Berdasarkan hasil FGD pertama dilakukan penyempurnaan proposal (FGD kedua) tanggal 21 September 2015.

c. Tahapan Ketiga (Pelaksanaan)

Pada tahap ini dilakukan penguatan akidah *huffadz* melalui bimbingan keagamaan dengan dua tahap. Tahap pertama, dilakukan pada 6-8 Oktober 2015, penguatan akidah *huffadz* melalui pemberian materi keagamaan dan latihan pengamalan keagamaan untuk mengidentifikasi kemampuan, masalah, dan peluang para *huffadz* dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan. Pemberian materi dan bimbingan keagamaan dilakukan oleh 4 orang nara sumber : Mustaqiem (ketua MUI Mentawai), Syamsir (dosen IAIN), Riri Fitria (dosen), dan Erizal Ilyas (Ketua DDI PKS Sumatra Barat). Secara khusus tahapan pengabdian memuat kegiatan dan materi:

- a) Memberikan pengetahuan, pemahaman dan penguatan akidah dikaitkan dengan budaya lokal.
- b) Penguatan dan pengamalan ibadah sehari hari melalui bimbingan ibadah praktis yang benar.
- c) Pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya akidah yang kuat dalam hidup berdasarkan hadis Nabi
- d) Kisah kisah sahabat dalam mempertahankan keyakinannya.
- e) *Tahsin al-Quran*.
- f) Motivasi dan penguatan dakwah *fardhiyah* dan *jamaah*.

d. Tahapan *Monev* (monitoring dan evaluasi)

Monitoring dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2015, pada tahap monitoring ini dilakukan pengumpulan data tentang respon peserta terhadap kegiatan yang dilakukan. Tanggal 12 Oktober 2015 mendata jumlah peserta yang merasa mengalami perubahan terhadap keyakinan dan pengamalan ajaran Islam. Berdasarkan pertemuan ini diperoleh informasi tentang:

- a) Terdapat perubahan penguatan akidah dari yang sebelumnya.
- b) Adanya perbaikan pengamalan ibadah sehari-hari.
- c) Berbagai permasalahan yang masih ada dari dalam diri *huffadz* dalam rangka penguatan akidah mereka.
- d) Permasalahan yang dialami dan bentuk pelemahan akidah dari lingkungan *huffadz*.
- e) Cara untuk *survive* dalam kehidupan, khususnya masalah ekonomi dan dalam hal mempertahankan akidahnya.

Tahap Kegiatan Siklus kedua

Berdasarkan evaluasi pada siklus pertama, maka masih terdapat masalah yang dialami oleh *huffadz* dalam menguatkan akidah mereka. Masalah yang dialami oleh *huffadz* secara garis besar adalah: *Pertama*, adanya kebingungan antara akidah yang bercampur baur dengan budaya masyarakat, dan sulit dihindari. *Kedua*, pengamalan ibadah dan pengetahuan agama yang masih belum memadai. *Ketiga*, keragu-raguan untuk mempertahankan hidup di masyarakat dengan memegang akidah Islam.

Masih ditemukannya permasalahan *huffadz* dalam menguatkan akidah mereka, dan pembinaan agama yang belum tuntas. Untuk itu, perlu dilakukannya siklus kedua sebagai program penguatan akidah *huffadz* menggunakan bimbingan keagamaan. Kegiatan ini dengan beberapa tahapan:

a. Tahap perencanaan

Pada siklus kedua ini direncanakan pemberian bimbingan agama dengan memberikan topik dan pengamalan yang berbeda dari sebelumnya. Walaupun begitu, pada waktu pelaksanaannya tidak menghilangkan bimbingan sebelumnya, tapi pada siklus ini bersifat menambah dan menguatkan. Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka bimbingan lebih menekankan pada penguatan akidah dan mental.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan pada Desember 2015. Dengan peserta yang sama, maka bimbingan keagamaan secara materi melanjutkan materi bimbingan sebelumnya, ditambahkan dengan materi dan pemateri berbeda. Pematerinya adalah : Ngena Ibara (ulama dan pegawai Pemkab), Armen (ketua Muhammadiyah Mentawai), Aziza Meria (dosen), dan Mujammaul Khair (Kmeneag Mentawai). Materinya : a). Strategi pertahanan hidup dan akidah di tengah masyarakat non muslim .b). Pentingnya pendidikan dan pendidikan Islam. c). Pengamalan ibadah/simulasi mental . d). Motivasi dalam mempertahankan akidah. e). Simulasi mental/pembinaan akidah lanjutan.

c. Tahap observasi

Setelah diberikan pembinaan dan bimbingan, dilakukan observasi atau pengamatan terhadap perubahan komunitas. Observasi dilakukan oleh ustadz setempat yang membantu kegiatan ini. Bagi peserta dari pesantren setempat, maka pengabdian meminta bantuan observasi pada Pembina asramanya.

Setelah beberapa waktu tim pengabdian meminta bentuk perubahan yang terjadi pada komunitas beberapa perubahan yang cukup terlihat pada komunitas adalah:

1. Lebih disiplin dalam menjalankan ibadah sehari hari.
2. Pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap akidah semakin bertambah, bahkan mereka cukup baik dalam menjelaskan beserta contoh.
3. Mulai percaya diri ditengah tengah masyarakat beda agama.
4. Semakin baik dan benar dalam bacaan, pemahaman, dan hafalan al-Quran
5. Mendisiplinkan diri dengan hafalan mereka.
6. Adanya *positive thinking* terhadap diri dan agama, sehingga keyakinan mereka kepada Allah SWT semakin kuat.

d. Tahap refleksi

Setelah dilakukan observasi, tim pengabdian dan pemateri, observer melakukan refleksi terhadap kegiatan pengabdian ini. Dari hasil refleksi kami, didapatkan :

1. Walaupun terdapat perubahan pada komunitas, program penguatan akidah melalui bimbingan keagamaan dan mental harus tetap dilakukan secara *continue*. Alasannya adalah situasi dan kondisi, lingkungan, dan diri komunitas bisa saja merubah keyakinan mereka.

Apalagi sebagaimana Allah berfirman “*al-imaan yazizz wa yankus*” iman dapat bertambah dan berkurang. Oleh sebab itu perlu pengawasan dan bimbingan dari berbagai pihak yang berkompeten di bidang ini.

2. Adanya bimbingan, pembinaan, pengawasan, penguatan, dan pendampingan berbagai pihak sehingga keimanan dan akidah *huffadz* semakin baik.
3. Adanya anggaran dana dalam dalam kegiatan penguatan akidah *huffadz* melalui bimbingan agama dan mental. Karena program tidak akan jalan apabila tidak didukung oleh dana. Dana bisa dari anggaran Kemenag Kabupaten Mentawai, lembaga sosial keagamaan, donator dan sebagainya.
4. Perlu adanya program pendampingan di luar program ini yaitu program penguatan ekonomi *huffadz*. Dengan adanya program ekonomi, maka para *huffadz* akan mampu *survive* hidup, sehingga mereka mampu hidup mandiri. Apabila ekonomi mereka bergantung pada keluarga atau masyarakat non muslim, maka hidup mereka akan ditekan, yang nantinya dapat berdampak pada akidah mereka.

Analisa Hasil Pengabdian

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, maka analisa dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Pemetaan masalah dan kebutuhan *huffadz* adalah kemampuan mereka untuk menjaga dan mengamalkan pengetahuan, pemahaman, dan ajaran Islam yang didapat sebelumnya. Bimbingan agama dan akidah merupakan salah satu usaha menyelamatkan akidah.
- b. Keyakinan yang melemah akibat tekanan lingkungan sekelilingnya, dengan adanya bimbingan mental akan timbul kepercayaan diri dan kemampuan menghadapi tekanan tersebut.
- c. Faktor ekonomi dan tidak adanya keterampilan sebagai modal hidup menjadikan mereka mudah terpengaruh. Pelatihan mental dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat diperlukan mereka.
- d. Kegiatan penguatan akidah dalam pelaksanaannya harus melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Karena bukan saja bimbingan agama dan mental, dampingan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat lemahnya ekonomi salah satu penyebab kekufuran.

Penutup

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan akidah *huffadz* melalui bimbingan keagamaan dan mental di Kabupaten Mentawai dilakukan menjadi dua siklus. Siklus pertama menekankan pada bimbingan agama dan mental. Siklus kedua lebih menekankan pada bimbingan mental dalam menghadapi masalah demi menyelamatkan akidah mereka.

Pembinaan mental dan keagamaan sangat urgen dilakukan kepada *huffadz* Mentawai dalam rangka menyelamatkan akidah mereka. Permasalahan yang dialami pada dasarnya adalah permasalahan kemampuan mempertahankan agama atau akidah serta kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan keluarga dan lingkungan. Dengan kondisi *huffadz*, seharusnya pemberdayaan ekonomi berupa keterampilan hidup sangat dibutuhkan, agar mereka mampu secara ekonomi untuk *survive*.

Rekomendasi

- a. Program bimbingan agama dan mental kepada muslim daerah terluar Mentawai khususnya pada komunitas *huffadz*, harus selalu dilakukan oleh Kementerian Agama dan lembaga sosial keagamaan.
- b. Lembaga ekonomi pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat melakukan dampingan ekonomi keterampilan dan, agar para *huffadz* dapat *survive* dan mandiri secara ekonomi.
- c. Adanya tindakan dari pemerintah setempat dalam melindungi dan mengayomi *huffadz* sehingga mereka dapat hidup tenang tanpa tekanan.
- d. Para *huffadz* agar lebih meningkatkan keberdayaan diri dengan cara lebih mendalami ajaran agama, bermental kuat dan positif, serta memiliki tekad dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Daftar Pustaka

- al-Banna, Hasan, *Akidah Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983
- Crow, Lester D. dan Alice Grow, *an Introduction to Guidance, Principle, and Practice*, New York: America Book CO, 1963
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982

Djohani, Rianingsih, (edtr), *Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*, Bandung: Studio Driya Media, 1996

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hafiz>, diunduh tanggal 12 Januari 2015

Ibara, Ngena, Pegawai Pemerintahan Kabupaten Mentawai dan Alumni Pesantren Darussalam Gontor, *Wawancara*, 28 Maret 2015 di Padang via Telepon.

J. Jones, Arthur, *Principle of Guidance*, Tokyo: Mc Graw-Hill-Book Company, 1963, Cet. Ke-V

Jaya, Yahya, *Psikoterapi Agama Islam*, Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999

Johada, Marie, *Current Concepts of Positive Mental Health*, New York: Basic Books, 1958

Jumhur, I. dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV. Ilmu, 1975

Kartono, Kartini, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Malwa, Beni, Pegawai Kementerian Agama Sumatera Barat bagian PEN AIS, *Wawancara*, 1 April 2015 di Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiakto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013

Nizar, Samsul, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Riswandi, ketua Da'i Kepulauan Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2013, di Panti Asuhan Darul Ulum Sikakap Mentawai.

Riswandi, Ketua Da'i Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2015 di Panti Asuhan Darul Ulum Sikakap

Riswandi, Ketua Da'i Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2015 di Panti Asuhan Darul Ulum Sikakap

Slameto, *Bimbingan di Sekolah*, Jakarta: Bina Aksara, 1988

Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Soleh, Chabib, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung: Fokusmedia, 2014

Sukardi, Dewa Ketut, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983

Syafrizal, Da'i Kepulauan Sikakap, *Wawancara*, 8 Februari 2015 di rumahnya Pulau Sikakap Mentawai.

Tim Penyusunan CBR UIN Sunan Ampel, *Community Based Reasearch*, Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel, 2015

Winkel, W. S, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 1982

Pengembangan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Islam Serta Penguatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI) di Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat

GUSTINA

IAIN Batusangkar, Indonesia
gustinastainbsk@yahoo.co.id

Abstrak: Kebijakan pemerintah yang menetapkan satu Desa satu PAUD merupakan langkah strategis dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak usia dini melalui lembaga pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk pengembangan lembaga PAUDI di berbagai daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan atas dasar swadaya masyarakat. Di antara upaya itu adalah; membentuk satu PAUD satu desa, menyediakan tenaga pengajar yang kompeten, media pembelajaran dan Alat Permainan Edukatif (APE), serta sarana dan prasarana belajar lainnya. Program ini merupakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pendampingan bagi pendidik Anak Usia Dini (AUD) untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik profesional serta memperkuat kelembagaan PAUDI menjadi lebih bermutu dalam pengelolaannya. Kegiatan ini dimulai dengan *need assessment* (studi kebutuhan), pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Tahap pendampingan dilakukan dengan metode *workshop* pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) dan pengelolaan lembaga. Temuan kegiatan ini di antaranya sebanyak 94% pendidik AUD di Kabupaten Tanah Datar belum terampil membuat Alat Permainan Edukatif (APE), serta sebanyak 90% lembaga PAUDI belum memiliki kelengkapan sarana pembelajaran. Kegiatan dampingan ini menjangkau sebanyak 158 lembaga PAUDI dan 165 pendidik yang terdapat di 6 kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar. Keterampilan yang diperoleh oleh peserta adalah mampu merancang Alat Permainan Edukatif (APE) yang berasal dari bahan-bahan sederhana dengan harga yang sangat terjangkau.

Kata Kunci: PAUD, anak usia dini, alat peraga edukatif

Pendahuluan

Komitmen dunia tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah ditunjukkan oleh banyak Negara di antaranya; Komitmen Jomtien, Thailand (1990) yang menegaskan “pendidikan untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajal”. Deklarasi Dakar, Sinegal, (2000) “ memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini secara komprehensif terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung”, dan deklarasi “a Word fit for Children” New York (2002), “promosi hidup sehat, peyediaan pendidikan yang berkualitas; perlindungan terhadap perlakuan salah/aniaya, eksploitasi, kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS”.

Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan satu Desa satu PAUD dalam rangka memberikan akses pendidikan yang merata bagi anak usia dini. Berbagai aturan juga disiapkan di antaranya; (1) inpres tentang Gerakan Nasional Percepatan Perluasan Layanan PAUD/ PAUDISASI; (2) Permendiknas tentang Renstra Pembinaan PAUD/ *Grand Design* PAUD; (3) Permendiknas tentang Pendirian dan Perizinan Satuan PAUD; (4) Permendiknas tentang Penyelenggaraan Program PAUD; (5) Permendiknas tentang SPM Pembinaan PAUD; (6) Pedoman Kemitraan PAUD; (7) Panduan/ Juknis Layanan PAUD Terpadu; dan (8) Panduan/ Juknis tentang Pembinaan Gugus PAUD.

Lahirnya UU No. 23 tahun 2003 melalui pasal 28 tentang perlindungan anak juga merupakan indikator kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini. Masa usia dini merupakan masa emas bagi perkembangan anak, karena pada fase ini sangat menentukan bagi perkembangan anak hingga ia memasuki masa dewasa. Pendidikan pada usia dini berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak sekaligus berfungsi mengoptimalkan pengembangan otak. Pendidikan untuk anak usia dini dapat diartikan secara luas yang mencakup seluruh proses stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan.

Meskipun berbagai kebijakan dan aturan telah dikeluarkan serta anggaran, dan berbagai bantuan telah ditingkatkan setiap tahun, namun kondisi dan mutu PAUD belum sesuai dengan harapan. Berbagai kondisi dan permasalahan yang ditemukan di antaranya adalah; (1) proses pembelajaran masih didominasi pengajaran baca-tulis-hitung (calistung), belum

sepenuhnya melalui bermain; (2) kompetensi pendidik masih rendah: pelatihan pendidik PAUD baru menjangkau 118.018 orang (29,32%); (3) kualifikasi pendidik PAUD belum memadai (S.1/D.4 baru sekitar 15.7%); (4) mutu lembaga PAUD masih rendah; dan (5) kondisi sarana dan prasarana sebagian besar PAUD masih memprihatinkan (Data Ditjend PAUDNI PNFI Kemendikbud 2014). Permasalahan-permasalahan tersebut juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Pada hal sebetulnya Kabupaten Tanah Datar mempunyai aset yang sangat prospektif untuk pengembangan lembaga PAUD yaitu keberadaan Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar, namun sinergi antar berbagai lembaga tersebut belum berfungsi secara maksimal.

Pengembangan kompetensi pendidik dan penguatan lembaga PAUD merupakan kegiatan penting dan strategis dalam upaya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara optimal melalui pendidikan non formal. Dengan kegiatan ini, akan terwujud '*menjemput yang tertinggal dan mengasah yang potensial*', artinya kegiatan ini mendatangkan banyak manfaat, di antaranya;

Pertama, pendidikan anak usia dini melalui lembaga PAUD merupakan sarana awal yang terprogram dalam pembentukan karakter anak usia dini di samping pendidikan dalam keluarga; *Kedua*, meningkatnya kompetensi pendidik dan penguatan lembaga PAUD berbasis Islam merupakan langkah strategis dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada anak melalui Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) serta satuan PAUD sejenis. *Ketiga*, sebagai upaya penguatan lembaga dan peningkatan kompetensi pendidik PAUD di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data yang Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa secara umum setiap Kecamatan sudah memiliki lembaga PAUD dengan jumlah yang sangat bervariasi, namun belum setiap jorong memiliki lembaga PAUD. Secara lebih rinci jumlah lembaga PAUD dan kondisi peserta didik PAUD untuk masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi Lembaga PAUD di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah Siswa KB	Jumlah Siswa TPA	Jumlah Siswa SPS	PAUD Terakreditasi
1	Kec. X Koto	12	168	23	0	0
2	Kec. Batipuh	20	100	0	220	0

No	Nama Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah Siswa KB	Jumlah Siswa TPA	Jumlah Siswa SPS	PAUD Terakreditasi
3	Kec. Batipuh Selatan	15	62	20	241	0
4	Kec. Pariangan	18	168	32	197	0
5	Kec. Rambatan	24	338	0	144	0
6	Kec. Lima Kaum	16	164	132	107	0
7	Kec. Tanjung Emas	20	382	25	105	1
8	Kec. Padang Ganting	9	0	0	257	0
9	Kec. Lintau Buo	13	86	10	188	0
10	Kec. Lintau Buo Utara	24	103	0	316	0
11	Kec. Sungayang	12	183	18	89	0
12	Kec. Sungai Tarab	20	247	11	49	0
13	Kec. Salimpaung	12	53	0	203	0
14	Kec. Tanjung Baru	18	27	0	424	0
Jumlah		234	2081	229	2540	1

Keterangan/ Sumber: Data Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar 20 Desember 2014.

Dilihat dari tenaga pendidik PAUD yang tersedia pada masing-masing lembaga PAUD dengan jumlah dan latar belakang yang bervariasi, sebagian besar adalah tamatan SLTA. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Kecamatan	Jml PAUD	Pendidikan Terakhir				Sebaran Pendidik			Jumlah
			SM A	Diploma	Sarjana	Proses ke D3/S1	KB	TPA	SPS	
1	X Koto	9	9	5	6	5	24	1	0	25
2	Batipuh	16	38	5	4	6	15	7	31	46
3	Batipuh Selatan	13	19	2	12	8	8	0	35	43
4	Pariangan	17	23	11	7	6	20	3	24	47
5	Rambatan	21	25	14	7	13	37	0	22	59
6	Lima Kaum	14	24	10	13	8	55	0	0	55
7	Tanjung Emas	21	59	8	9	0	54	7	15	76
8	Padang Ganting	9	17	2	2	4	0	0	25	25
9	Lintau Buo	12	0	28	0	10	25	11	2	38
10	Lintau Buo Utara	28	36	9	7	5	13	18	26	57
11	Sungayang	12	22	6	6	3	18	4	6	37
12	Sungai Tarab	17	19	7	12	9	44	1	2	47
13	Salimpaung	12	8	9	10	6	3	0	30	33
14	Tanjung Baru	17	36	11	1	0	3	0	45	48

No	Nama Kecamatan	Jml PAUD	Pendidikan Terakhir				Sebaran Pendidik			Jumlah
			SM A	Diploma	Sarjana	Proses ke D3/S1	KB	TPA	SPS	
	Jumlah									

Keterangan/ Sumber: *Data Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar 02 Maret 2015.

Kondisi ideal yang diharapkan pada lembaga PAUD di Kabupaten Tanah Datar ialah; (1) meningkatkannya pengetahuan dan keterampilan SDM pendidik PAUD, (2) meningkatnya motivasi dan stimulasi penyelenggaraan PAUD berbasis Islam, (3) bertambahnya keterampilan dan pengalaman guru PAUD dalam menggunakan APE dengan pendekatan Islami, (4) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik PAUD, (5) terbentuknya rintisan PAUD baru terutama bagi desa yang belum memiliki lembaga PAUD, (6) tersedianya media pembelajaran dalam bentuk Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD, (7) terwujudnya rintisan dan gagasan program percepatan kesetaraan S.1 PAUD, (8) terjalinnya kerjasama antara IAIN Batusangkar dengan Pemerintah Daerah Tanah Datar dalam rangka menyiapkan pendidikan akademik dan profesi guru PAUD, (9) dan dalam jangka panjang diharapkan adanya pembinaan akreditasi lembaga PAUD dan pengembangan model PAUD berbasis Islam.

Pengertian PAUD

Usia lahir hingga memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan, di masa ini diletakkannya dasar-dasar kemampuan fisik, bahasa, sosio-emosional, konsep diri, nilai, moral, dan nilai agama (Mansur, 2007: 18). Oleh karena itu lembaga pendidikan untuk anak usia dini mutlak diperlukan demi memfasilitasi perkembangan tersebut.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 14). Tujuan PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak menjadi manusia seutuhnya, memiliki kepribadian, nilai, moral, dan keterampilan (Suyanto, 2005: 5).

Lebih lanjut, pengertian anak usia dini mencakup beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Kelompok manusia yang berusia 0 – 6 tahun (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas)
- b. Kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Artinya, memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik (kinestetik), seluruh potensi kecerdasan (daya pikir, seni, emosi, spiritual, sosio emosional, sikap dan perilaku, kecintaan pada alam, bahasa dan komunikasi) yang khas sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui anak tersebut.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, dan nonfisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (UU No. 20 tahun 2003, Sisdiknas). Adapun upaya yang dilakukan mencakup stimulasi intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, dan penyediaan kesempatan-kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan belajar secara aktif. Orientasi pembelajaran anak usia dini adalah mengembangkan potensi dan kemampuan dasar, mengembangkan sikap dan minat belajar, dan membangun dasar kepribadian yang positif (Isjoni, 2010: 62).

Berdasarkan keunikan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu : (1) masa bayi, usia lahir–12 bulan; (2) masa toddler (batita), usia 1–3 tahun; (3) masa prasekolah, usia 3– 6 tahun. Secara umum tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan tinjauan aspek didaktis psikologis tujuan pendidikan di pendidikan anak usia dini yang utama adalah :

- a. Menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri (self help), yaitu mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri seperti mampu merawat dan menjaga kondisi fisiknya, mampu mengendalikan emosinya dan mampu membangun hubungan dengan orang lain.
- b. Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (*learning how to learn*). Hal ini sesuai dengan perkembangan paradigma baru

dunia pendidikan melalui empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together* yang dalam implementasinya di pendidikan anak usia dini dilakukan melalui pendekatan *learning by playing*, belajar yang menyenangkan (*joyful learning*) serta menumbuh kembangkan keterampilan hidup (*life skills*) sederhana sedini mungkin.

Bermain dan Belajar

Tujuan dari program kegiatan bermain adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan kreatifitas/daya cipta yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Untuk itu strategi pembelajaran bagi anak usia dini lebih beorientasi pada :

- a. tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentangan usia anak;
- b. materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak (DAP = Developmentally Appropriate Practice);
- c. metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta menyenangkan;
- d. media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman dan menimbulkan ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi;
- e. evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah assessment melalui observasi partisipasif terhadap apa yang dilihat, didengar dan diperbuat oleh anak (Direktorat PADU.2002).

Bermain merupakan proses eksplorasi diri anak, oleh karena itu guru hendaknya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan imajinasinya secara kreatif. Program kegiatan bermain pada pendidikan anak usia dini memiliki sejumlah fungsi, yaitu : (a) untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya; (b) mengenalkan anak dengan dunia sekitar; (c) mengembangkan sosialisasi anak; (d) mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak; dan (e) memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya (Sutrisno & Sudarto, 2005: 89-90).

Tujuan dan Fungsi PAUD

Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu :

- a. fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri;
- b. fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dimana ia berada;
- c. fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak;
- d. fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya;
- e. fungsi ekonomik, pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya (Direktorat PADU.2002).

Pembelajaran pendidikan anak usia dini didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada kebutuhan anak
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik dan sosio emosional. Dengan demikian berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan dengan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara integratif dan holistik.
- b. Belajar melalui bermain atau bermain sambil belajar.
Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan menggunakan strategi, metode, materi/bahan dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan,

- memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya.
- c. Kreatif dan Inovatif
Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru.
 - d. Lingkungan yang kondusif
Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.
 - e. Menggunakan pembelajaran terpadu
Model pembelajaran terpadu berdasarkan tema yang menarik dan dapat membangkitkan minat anak-anak (*centers of interest*). Hal ini dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas sehingga pembelajaran menjadi mudah dan bermakna bagi anak.
 - f. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup
Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri, mampu bersosialisasi dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.
 - g. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar
Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. (Departemen pendidikan Nasional 2007 : 4-5).

Model Pembelajaran BCCT

Pembelajaran anak usia dini saat ini menggunakan pendekatan *Beyond Centers and Circle Time* (BCCT) atau sering diartikan sebagai pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak. Pendekatan *Beyond Centers and Circle Time* (BCCT) merupakan pendekatan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik oleh *Creative Center for Childhood Research and Training* (CCCRT) di Florida USA, dan dilaksanakan di Creative Pre School Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun untuk anak dengan kebutuhan khusus.

BCCT merupakan pengembangan dari pendekatan Montessori, HighScope, dan Reggio Emilio. Pendekatan ini bertujuan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak, agar kecerdasannya dapat berkembang secara optimal, maka otak anak perlu dirangsang untuk terus berfikir secara aktif dengan menggali pengalamannya sendiri (bukan sekedar mencontoh atau menghafal). Pendekatan ini memandang bermain merupakan wahana yang paling tepat dan satu-satunya wahana pembelajaran anak, karena disamping menyenangkan, bermain dalam setting pendidikan dapat menjadi wahana untuk berfikir aktif, kreatif dan inovatif.

Proses pembelajaran BCCT berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan (scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak, yaitu : (1) pijakan lingkungan main; (2) pijakan sebelum main; (3) pijakan selama main; dan (4) pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak yang diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu bermain sensormotorik/-fungsional, bermain peran dan bermain pembangunan. Saat lingkaran adalah saat ketika pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. (Depdiknas 2007 : 2-3)

Prinsip pembelajaran dengan pendekatan BCCT antara lain : 1) keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan pada teori dan pengalaman empirik; 2) setiap proses pembelajaran ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak (kecerdasan jamak) melalui bermain terencana dan terarah serta dukungan pendidik dalam bentuk pijakan-pijakan; 3) menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif dan terus berfikir dengan menggali pengalamannya sendiri; 4) menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajarannya; 5) mensyaratkan pendidik dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan sebelum menerapkan pendekatan ini; 6) melibatkan orangtua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di rumah. (Departemen Pendidikan Nasional 2007 : 5-6).

Metode dan Strategi yang Digunakan

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian tindakan kemitraan (*collaborative action research*), yaitu suatu bentuk kegiatan yang bersifat reflektif oleh sekelompok orang melalui kerja sama dan kerja bersama (Madya, 2011: 51-54). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik dan penguatan lembaga pendidikan anak usia dini Islam, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki kondisi di mana praktek-praktek layanan PAUD tersebut dilaksanakan.

Strategi yang dilakukan adalah diawali dengan menghimpun data tentang kondisi objektif dan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dengan melakukan diskusi tim ahli dengan pendekatan FGD (*Focus Group Discussion*) dan melakukan pendampingan untuk mengatasi berbagai persoalan kompetensi pendidik dan penguatan lembaga PAUD berbasis Islam di Kabupaten Tanah Datar.

Adapun pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ini adalah:

1. Dosen Bimbingan dan Konseling (BK), Dosen Psikologi, dan Dosen PGRA STAIN Batusangkar sebagai TIM profesional dalam memberikan pembekalan materi sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan lembaga PAUD di Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah/ Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Pendidikan tingkat Kecamatan dalam rangka menuntaskan satu Desa satu PAUD dan kerjasama program konversi S.1 bagi pendidik PAUD dengan Program Studi PGRA/ IPAUDI Jurusan Tarbiyah STAIN Batusangkar.
3. Penyuluh Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.
4. Organisasi mitra PAUD dan Profesi PAUD.

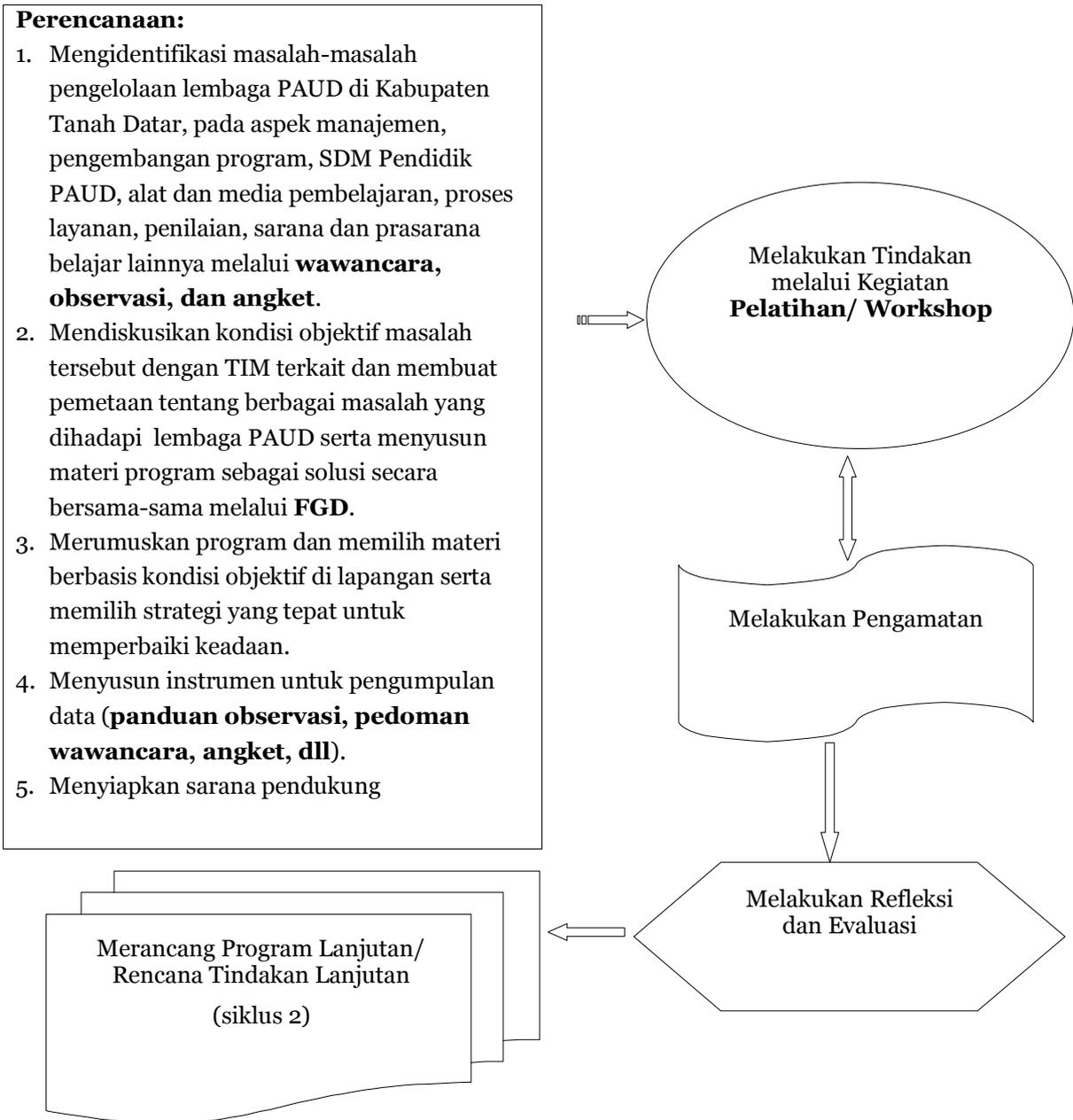
Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan lembaga PAUD di Kabupaten Tanah Datar, baik pada aspek manajemen, pengembangan program, SDM pendidik PAUD, media pembelajaran, proses layanan, penilaian, sarana dan prasarana, dan lainnya melalui wawancara, observasi, dan kuesioner.
2. Mendiskusikan kondisi objektif masalah tersebut dengan tim ahli/pakar terkait dan membuat pemetaan tentang berbagai masalah yang dihadapi

lembaga PAUD serta menyusun materi program sebagai solusi secara bersama - sama melalui *FGD*.

3. Merumuskan program dan memilih materi berbasis data kondisi objektif di lapangan serta memilih strategi yang tepat untuk memperbaiki keadaan.
4. Melaksanakan dampingan dan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan atau *workshop*.
5. Melakukan pengamatan dan pendampingan terhadap proses dan ketercapaian target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru PAUD dalam layanannya dengan dukungan observasi, catatan lapangan, dan portofolio.
6. Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang disertai dengan ketersediaan format evaluasi untuk akuntabilitas data hasil evaluasi pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan panduan observasi dan portofolio.

Secara operasional, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan divisualisasikan dalam bagan di bawah ini.



Bagan: Langkah-Langkah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian

Hasil Dan Pembahasan Ruang Lingkup Dampingan

Kegiatan dampingan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi (1) kegiatan pembekalan bagi pendidik anak usia dini (AUD) se-Kabupaten Tanah Datar di IAIN Batusangkar yang diikuti oleh perwakilan gugus PAUD pada setiap kecamatan, dan (2) pendampingan bagi gugus-

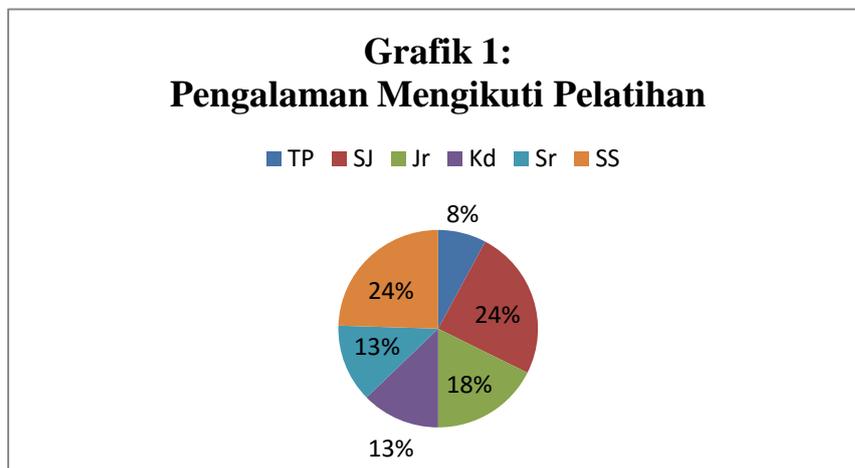
gugus PAUD kecamatan. Adapun gugus PAUD yang menerima dampingan adalah gugus PAUD kecamatan Rambatan, kecamatan Salimpaung, kecamatan Tanjung Emas, kecamatan Padang Ganting, kecamatan Lima Kaum, dan gugus Raudhatul Athfal se-Kabupaten Tanah Datar.

Apabila dilihat dari segi jumlah lembaga PAUD dan pendidik AUD yang menerima dampingan maka terdapat sebanyak 158 lembaga PAUD dan sebanyak 165 pendidik PAUD yang telah menerima pendampingan di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Ditinjau dari penyebaran daerah yang bisa di dampingi, maka terdapat 6 (enam) wilayah kecamatan yang menerima pendampingan.

Kondisi Objektif Dampingan

a. Pengalaman Mengikuti Dampingan/ Pelatihan

Pengalaman peserta dampingan dalam mengikuti pelatihan sejenis adalah sebanyak 8% peserta belum pernah mengikuti pelatihan atau dampingan serupa. Kemudian sebanyak 24% sangat jarang mendapatkan pelatihan, selain itu pada kategori jarang ada sebanyak 18%, pada kategori kadang-kadang dan sering masing-masing 13%, dan sisanya sebanyak 24% lainnya sudah sangat berpengalaman mengikuti pelatihan dari berbagai program lainnya. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

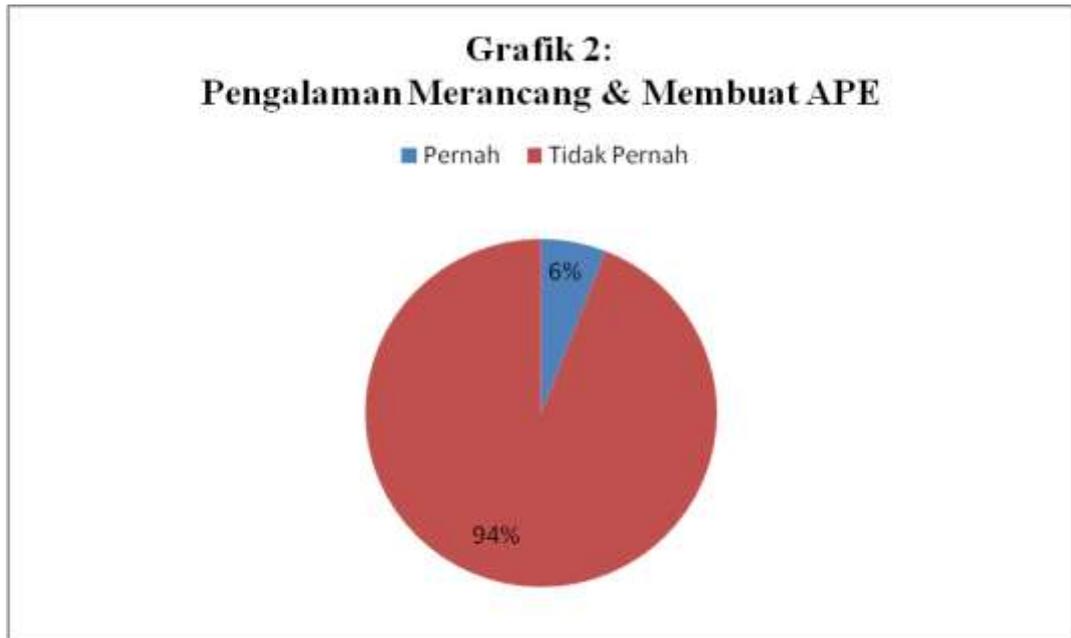


Keterangan:

- TP : Tidak Pernah
- Sj : Sangat Jarang
- Jr : Jarang
- Kd : Kadang-Kadang
- Sr : Sering
- SS : Sangat Sering

b. Pengalaman Merancang dan Membuat Alat Permainan Edukatif

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner, maka didapatkan data bahwa sebagian besar atau sebanyak 94% pendidik AUD yang menjadi subjek dampingan belum pernah merancang dan membuat alat permainan edukatif (APE), dan hanya 6% yang sudah pernah melakukannya. Secara rinci dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini;



Kondisi ini bisa menjadi sumber masalah dilapangan karena para pendidiknya hanya mengandalkan barang-barang yang sudah dibuat dipabrik-pabrik. Padahal ada banyak kendala dan kekurangan dalam pengadaan barang-barang tersebut terutama masalah biaya. Selain itu, tidak semua alat permainan buatan pabrik yang aman untuk bermain bagi anak didik seperti mengandung racun atau bahan berbahaya lainnya.

c. Kelengkapan Sarana Pembelajaran

Pada aspek kelengkapan sarana pembelajaran di lembaga PAUD diperoleh data sebahai berikut;



Data tersebut menunjukkan adanya kekurangan yang hampir pada seluruh lembaga PAUD yang menjadi dampingan pada aspek sarana pembelajaran yaitu 90 %. Selibhnya ada sebanyak 4% lembaga yang sama sekali tidak memiliki kelengkapan sarana pembelajaran, dan hanya 6% lembaga PAUD yang sudah memiliki kelengkapan. Hal ini tampaknya berbanding lurus dengan pengalaman para pendidik lembaga PAUD seperti data sebelumnya di mana mereka mayoritas belum bisa berinisiatif secara mandiri mengembangkan alat-alat permainan edukatif.

Pembekalan bagi Pendidik AUD

Program pendampingan diawali dengan pelaksanaan pembekalan bagi perwakilan gugus-gugus kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pembekalan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh orang) peserta yang bertempat di auditorium STAIN Batusangkar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 Oktober 2015.

Kegiatan pembekalan ini mengusung tema “pengembangan pembelajaran sentra dan alat permainan edukatif (APE) berbasis *creative learning*”. Adapun materi-materi yang diberikan pada hari pertama adalah (1) Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam, (2) Konseling dengan Pendekatan Ekologis dalam Pembinaan Anak Usia Dini, dan (3) *Workshop* Pengembangan Pembelajaran Sentra. Sedangkan pada hari kedua diberikan materi tentang (1) *Workshop* Seni Menggambar Kreatif, (2) *Workshop*

Pengembangan Alat Permainan Edukatif, dan (3) *Workshop* program dan mekanisme dampingan ke lapangan.

Pada kegiatan pembekalan selama dua hari, peserta diberikan materi-materi yang sifatnya wawasan atau teoritis dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam sesi *workshop*. Setelah itu, bersama tim pengabdian kepada masyarakat merumuskan metode dan teknis dampingan ke lapangan sehingga program tersebut bisa dirasakan secara lebih luas, terutama bagi pendidik PAUD yang jarang mendapat latihan.

Fasilitas yang disediakan oleh tim dampingan untuk keperluan *workshop* adalah alat-alat atau bahan yang bisa dibuat berbagai alat permainan edukatif namun mudah diperoleh dan harganya murah. Hal itu bertujuan untuk memudahkan peserta dalam mengembangkan hasil latihannya di lembaga PAUD masing-masing.

Evaluasi pada akhir kegiatan tersebut menunjukkan bahwa para peserta merasakan manfaat yang begitu besar karena mampu melahirkan karya berupa alat-alat permainan edukatif yang dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan harga yang terjangkau. Berdasarkan keterangan peserta, mereka belum pernah memperoleh latihan sebaik kegiatan yang mereka ikuti bersama tim pengabdian kepada masyarakat ini. Setelah itu, masing-masing perwakilan diminta merumuskan program yang akan dikembangkan di gugus PAUD masing-masing. Program tersebut kemudian dilaksanakan berdasarkan pengalaman yang telah didapatkannya sehingga ilmu dan pengalaman tersebut bisa dibagi kepada rekan sejawat lainnya. Kemudian Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) membantu dan mendukung dengan melakukan dampingan ke lapangan.

Pelaksanaan Program Dampingan

Kegiatan dampingan dilaksanakan di lima gugus, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Dampingan di Kecamatan Rambatan

Kegiatan dampingan di kecamatan Rambatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015 yang bertempat di aula kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan kecamatan Rambatan. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang pendidik AUD yang berasal dari 26 (dua puluh enam) lembaga PAUD.

Kegiatan ini berlangsung mulai dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib. Adapun rancangan program yang disusun oleh Tim bersama pengurus gugus PAUD kecamatan rambatan adalah pelatihan

dalam pengembangan pembelajaran sentra dan alat permainan edukatif (APE).

Kegiatan diawali dengan sesi diskusi dan refleksi dengan topik “Motivasi Kerja; Pendidik sebagai Khalifah fil Ardh”. Setelah sesi diskusi yang menggugah motivasi para peserta, dilanjutkan dengan sesi *workshop* dalam pengembangan pembelajaran sentra dan alat permainan edukatif (APE) yang telah dipersiapkan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan sehingga diakhir kegiatan mereka mampu menghasilkan karya berupa alat-alat peraga pendidikan seperti sempoa, papan perasaan, batik kertas, dan lain sebagainya yang langsung bisa dipakai di lembaga masing-masing.

2. Dampingan di Kecamatan Salimpaung

Kegiatan dampingan di kecamatan Salimpaung dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015 yang bertempat di aula TK Mutiara Bangsa Sumanik, Kecamatan Salimpaung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 15 (lima belas) orang peserta yang berasal dari 14 (empat belas) lembaga PAUD. Adapun program yang dirancang oleh gugus PAUD tersebut bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah pendampingan dan pelatihan dalam metode pembelajaran Seni Menggambar Kreatif.

Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib yang dipandu oleh pakar seni rupa dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada kegiatan tersebut, seluruh fasilitas pelatihan disediakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan hasil karya peserta juga menjadi milik mereka untuk digunakan di lembaga masing-masing.

Hasil evaluasi diakhir kegiatan menunjukkan kesan yang sangat baik pada peserta karena selama ini peserta belum mampu memberikan pembelajaran menggambar secara aik kepada anak didiknya. Selain itu, para peserta belum pernah mendapatkan dampingan yang serupa sehingga hal ini betul-betul baru baginya.

3. Dampingan di Kecamatan Tanjung Emas

Kegiatan dampingan di Kecamatan Tanjung Emas dilaksanakan pada tanggal 3 November 2015 yang bertempat di aula kantor Wali Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas. Kegiatan tersebut diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) peserta yang berasal dari 33 (tiga puluh tiga) lembaga

PAUD. Adapun program yang dirancang oleh gugus PAUD Kecamatan Tanjung Emas bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah pendampingan dalam pengembangan pembelajaran sentra dan alat permainan edukatif (APE).

Kegiatan diawali dengan pengarahan mengenai mekanisme dampingan oleh ketua Tim Pengabdian. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 wib. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Adapun hasil karya yang diciptakan oleh peserta adalah berupa alat-alat permainan edukatif (APE) seperti sempoa, papan perasaan, batik kertas, plestisin, dan lain sebagainya yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah harganya. Tujuannya adalah para peserta mampu secara mandiri mengembangkan hasil pelatihannya tanpa terkendala oleh biaya.

Hasil evaluasi kegiatan tersebut menunjukkan adanya kepuasan peserta atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain itu, mayoritas peserta belum pernah mendapatkan pelatihan serupa dan betul-betul pengalaman baru bagi mereka.

4. Dampingan di Kecamatan Padang Ganting

Kegiatan dampingan di kecamatan Padang Ganting dilaksanakan pada tanggal 7 November 2015 yang bertempat di Raudhatul Athfal (RA) Tuan Kadhi I, Kecamatan Padang Ganting. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta yang berasal dari 19 (sembilan belas) lembaga PAUD. Adapun program yang dirancang oleh gugus PAUD Kecamatan Padang Ganting bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah pendampingan dalam pengembangan pembelajaran sentra dan alat permainan edukatif (APE).

Kegiatan diawali dengan pengarahan mengenai mekanisme dampingan oleh ketua Tim Pengabdian. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 wib. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Adapun hasil karya yang diciptakan oleh peserta adalah berupa alat-alat permainan edukatif (APE) seperti sempoa, papan perasaan, batik kertas, plestisin, dan lain sebagainya yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah harganya. Tujuannya adalah para peserta mampu secara mandiri mengembangkan hasil pelatihannya tanpa terkendala oleh biaya.

Hasil evaluasi kegiatan tersebut menunjukkan adanya kepuasan peserta atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain itu, mayoritas

peserta belum pernah mendapatkan pelatihan serupa dan betul-betul pengalaman baru bagi mereka.

5. Dampingian bagi Gugus Raudhatul Athfal Tanah Datar

Kegiatan dampingian bagi gugus Raudhatul Athfal (RA) Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan pada tanggal 8 November 2015 yang bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan itu diikuti oleh sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pendidik Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan diawali dengan pengarahan mengenai mekanisme dampingian oleh ketua Tim Pengabdian. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 wib. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Adapun hasil karya yang diciptakan oleh peserta adalah berupa alat-alat permainan edukatif (APE) seperti sempoa, papan perasaan, batik kertas, plestisin, dan lain sebagainya yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah harganya. Tujuannya adalah para peserta mampu secara mandiri mengembangkan hasil pelatihannya tanpa terkendala oleh biaya.

Hasil evaluasi kegiatan tersebut menunjukkan adanya kepuasan peserta atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain itu, mayoritas peserta belum pernah mendapatkan pelatihan serupa dan betul-betul pengalaman baru bagi mereka.

6. Dampingian di Kecamatan Lima Kaum

Kegiatan dampingian di kecamatan Lima Kaum dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 yang bertempat di TK Harapan Ibu Lima Kaum, Batusangkar. Jumlah peserta yang terlibat pada kegiatan dampingian ini adalah sebanyak 18 (delapan belas) orang yang berasal dari 17 (tujuh belas) lembaga PAUD.

Kegiatan diawali dengan pengarahan mengenai mekanisme dampingian oleh ketua Tim Pengabdian. Setelah itu peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 wib. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Adapun hasil karya yang diciptakan oleh peserta adalah berupa alat-alat permainan edukatif (APE) seperti sempoa, papan perasaan, batik kertas, plestisin, dan lain sebagainya yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah harganya. Tujuannya adalah para peserta mampu secara mandiri mengembangkan hasil pelatihannya tanpa terkendala oleh biaya.

Hasil evaluasi kegiatan tersebut menunjukkan adanya kepuasan peserta atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Selain itu, mayoritas peserta belum pernah mendapatkan pelatihan serupa dan betul-betul pengalaman baru bagi mereka.

Hasil atau Dampak Program Dampungan

Hasil atau dampak program dampungan dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif dan aspek keterampilan. Pada aspek kognitif, para peserta yang menjadi dampungan memperoleh berbagai pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak khususnya pada aspek karakteristik anak usia dini, perkembangan sensori dan motorik anak, serta pola komunikasi yang perlu dijalin dalam proses pendidikan pada usia dini.

Pada aspek perkembangan anak, para pendidik juga dibekali dengan pengetahuan tentang pola integrasi nilai-nilai agama dan moral pada setiap pembelajaran di lembaga PAUD. Hal ini diharapkan akan melekat pada anak didik dan menjadi karakter yang tertanam dalam dirinya.

Selain aspek pengetahuan, para pendidik di lembaga PAUD dibekali dengan berbagai keterampilan yang bisa dikembangkan secara mandiri di lembaga masing-masing dalam hal melengkapi sarana pembelajaran yang bersumber dari bahan-bahan yang mudah didapat. Meskipun bahan-bahan tersebut murah dan mudah didapat, namun aspek pembelajarannya sama sekali tidak kurang dari fasilitas yang harganya mahal. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian para pendidik AUD dalam melengkapi segala kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi sehingga anak didik bisa belajar secara optimal.

Dampak dari kegiatan ini sudah sangat dirasakan yaitu dengan kemampuan sendiri dan sumber daya yang relatif terbatas para peserta mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif berupa alat-alat permainan edukatif yang bermutu. Bahan-bahan seperti kertas karton, tepung, minyak goreng, kelereng, dan bahan sederhana lainnya mampu dibentuk menjadi sebuah alat permainan edukatif yang bermutu. Hasil inilah yang kemudian ditransfer kepada guru-guru PAUD sejawat lainnya di lembaga masing-masing, sehingga para guru tidak lagi merasa kekurangan sarana pembelajaran.

Program pendampungan ini telah mampu menjangkau sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) orang pendidik AUD yang berasal dari 158 (seratus lima puluh delapan) lembaga PAUD di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Dari segi penyebaran wilayah, pendampungan ini meliputi wilayah

kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Tanjung Emas, dan kecamatan Padang Ganting.

Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dampingan, didapatkan data tentang kepuasan peserta penerima dampingan sebagai berikut;



Berdasarkan data tersebut, para peserta benar-benar merasa puas dan merasakan kebermanfaatannya dari program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Sebanyak 90% peserta merasa sangat puas dan 10% lainnya merasa puas. Tingkat kepuasan yang seperti ini menunjukkan bahwa penyusunan program pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi lapangan juga menunjukkan masih minimnya dukungan yang diberikan pemerintah maupun swasta terhadap peningkatan kompetensi pendidik di lembaga PAUD, padahal PAUD adalah lembaga yang sangat penting bagi tumbuh kembang fisik maupun mental anak. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang sama seperti pendidik lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik AUD.

Disisi lain, tingkat kualifikasi pendidikan pendidik AUD masih tergolong belum memadai pada umumnya. Di mana diharapkan para pendidik adalah berijazah minimal Sarjana di bidangnya, kenyataan yang ada

di Kabupaten Tanah Datar adalah mayoritas Pendidik AUD belum Sarjana terutama di bidang pendidikan usia dini.

Kesimpulan

Kegiatan pengembangan kompetensi pendidik anak usia dini masih rendah, yaitu sebanyak 8% peserta belum pernah mengikuti pelatihan atau dampingan serupa. Kemudian sebanyak 24% sangat jarang mendapatkan pelatihan, selain itu pada kategori jarang ada sebanyak 18%, pada kategori kadang-kadang dan sering masing-masing 13%, dan sisanya sebanyak 24% lainnya sudah sangat berpengalaman mengikuti pelatihan dari berbagai program lainnya. Meskipun pengalaman pelatihan sudah cukup memadai (lebih dari 50%), namun mayoritas pendidik anak usia dini belum memiliki keterampilan untuk membuat Alat Permainan Edukatif (APE), yaitu sebanyak 94%.

Kondisi saat ini menunjukkan adanya kekurangan yang hampir pada seluruh lembaga PAUD yang menjadi subjek dampingan pada aspek sarana pembelajaran yaitu 90%. Selebihnya ada sebanyak 4% lembaga yang sama sekali tidak memiliki kelengkapan sarana pembelajaran, dan hanya 6% lembaga PAUD yang sudah memiliki kelengkapan. Melalui program dampingan ini, para peserta mendapatkan pengalaman dalam merancang dan membuat berbagai macam alat permainan edukatif (APE) yang berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dengan harga ekonomis sehingga mampu menutupi kekurangan fasilitas di lembaga masing-masing.

Ditinjau dari segi kepuasan peserta yang menjadi dampingan, didapatkan data bahwa sebanyak 90% peserta merasa sangat puas dan 10 % lainnya merasa puas. Tingkat kepuasan yang seperti ini menunjukkan bahwa penyusunan program pengabdian kepada masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Pembangunan lembaga PAUD tampak belum merata dan masih terpusat di perkotaan. Sehingga sering terjadi penumpukan anak didik pada salah satu lembaga yang dianggap punya kelengkapan fasilitas. Oleh karena itu penting untuk mengontrol pembangunan yang merata serta partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

Depdiknas. 2003. *Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.

----- . 2005. *Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas RI.

Isjoni. 2010. *Model Pembelajaran Anak Usia Dini*. Bandung: Alfabeta.

Mansur, 2007. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Madya, Suwarsih. 2011. *Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, Slamet. 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

Sutrisno dan Hary Soedarto Harjono, 2005. *Pengenalan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Sumber Belajar Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

Pengembangan *Softskill* dalam Bisnis Syariah bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

IKA YUNIA FAUZIA

Magister Manajemen STIE Perbanas Surabaya, Indonesia
ika.yunia@perbanas.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pengembangan softskill dalam bisnis syariah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang diawali dengan kemitraan kampus STIE Perbanas Surabaya dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Pengembangan tersebut terkait dengan aspek pemasaran, keuangan dan termasuk di dalamnya adalah pengembangan bisnis syariah. Pengembangan softskill pelatihan bisnis syariah ini menasar para pengusaha UMKM di kawasan Sidoarjo yang dipayungi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo. Salah satu organisasi bisnis yang telah mendapatkan pelatihan softskill tentang bisnis syariah adalah Humaira Muslimah Community (HMC) yang mana mayoritas pesertanya adalah muslimah dan ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis sesuai dengan passion masing-masing. Softskill pelatihan yang ditawarkan disini mencakup prinsip-prinsip dan etos kerja dalam bisnis syariah, larangan dalam bisnis syariah, tehnik pengambilan laba dalam bisnis syariah, manajemen pemasaran dalam bisnis syariah dan aspek zakat, infak, shadaqah dan wakaf dalam bisnis syariah.

Kata kunci: UMKM, ekonomi syariah, softskill, business start up.

Pendahuluan

Pengembangan *softskill* seringkali dilakukan oleh banyak kalangan untuk membangun dan membentuk mental dan etos kerja para usahawan mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut seringkali dilakukan oleh beberapa institusi, khususnya departemen koperasi, UMKM dan perindustrian yang ingin membesarkan mereka yang baru berada di posisi *start up*. Pembinaan terhadap wirausahawan dan pebisnis yang tergabung dalam UMKM tersebut dikarenakan banyaknya usahawan pemula yang

masih dalam tataran coba-coba dan mereka tidak mempunyai pengetahuan ataupun *network* yang baik dalam bisnis. Sehingga ibarat ayam yang bertelur, maka telur tersebut akan cepat pecah dan sangat rentan, sehingga proses penetasan telur tersebut haruslah dijaga dengan baik. Setelah telur menetas, maka telur kecil haruslah diajari untuk hidup menjadi ayam sehingga bisa bertelur kembali. Analogi tersebut sangat cocok jika dikembalikan kepada pelaku bisnis UMKM, yang mana mereka sangat memerlukan pembinaan, pendampingan dan juga pengenalan akses terhadap pemasaran yang bisa membesarkan mereka. Sehingga nantinya mereka bisa berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan cara membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar mereka.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya yang merupakan mitra masyarakat berusaha untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pelaku bisnis UMKM baik melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen koperasi, manajemen produksi dan lain sebagainya. Pembinaan tersebut telah menghasilkan output yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, dengan menggerakkan dosen dan mahasiswanya, STIE Perbanas Surabaya telah memberikan *hardskill* dan juga *softskill* yang bermanfaat bagi pengembangan masing-masing pelaku usaha bisnis. Bantuan langsung yang berupa peralatan sederhana misalnya komputer untuk pendirian koperasi dan juga alat pengepres produksi untuk *packaging* suatu produk seringkali diberikan kepada para pelaku UMKM agar usaha mereka bisa maju dan bersaing di pasaran. Adapun pelatihan *softskill* diberikan agar pelaku UMKM bisa memiliki *skill* yang baik dalam usaha mereka, melalui pengenalan dan penerapan prinsip dan tata cara manajemen keuangan, pemasaran, produksi dan lain sebagainya.

Termasuk dalam pelatihan bagi pengembangan *softskill* para pelaku UMKM adalah pelatihan bisnis syariah. Pelatihan ini diharapkan bisa mencetak para usahawan yang handal, sehingga mereka bisa bersaing di kancah global. Dengan mengusung *syariah value* mereka diharapkan bisa menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat, setelah mereka mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Hal tersebut merupakan output yang diharapkan dari pengembangan *softskill* ini, karena yang membedakan antara bisnis syariah dan non-syariah adalah *attitude* dasarnya. Dan juga landasan yang menjadi motivasi dan niatnya.

Kemitraan STIE Perbanas Surabaya Dengan Pelaku Bisnis dan Perbankan

STIE Perbanas Surabaya merupakan lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Jawa Timur, dan berdiri pada tahun 1970. Dengan berbagai kerja keras yang dilakukan oleh civitas akademik di dalamnya, pada Januari 2006 STIE Perbanas Surabaya telah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000 dan tiga tahun kemudian diperbarui dengan ISO 9001:2008 pada Maret 2009. Pada tahun 2008-2009 STIE Perbanas Surabaya mendapat tiga penghargaan dari Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sebagai 5 besar Perguruan Tinggi Unggulan di Jawa Timur untuk kelompok non-Universitas; Penghargaan untuk Tata Kelola Manajemen Perguruan Tinggi dan; Penghargaan untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. STIE Perbanas Surabaya pada tahun 2016 ini memperoleh “Anugerah Kampus Unggul Kartika” dari Kopertis Wilayah VII karena telah menjadi kampus unggul sejak tahun 2011 sampai sekarang.¹ Pada tahun 2013 STIE Perbanas Surabaya juga meraih anugerah Indonesia *Best University* dalam kategori *Private University*, yang diberikan oleh *Mix Marketing Communications Magazine* berdasarkan survey kepada siswa SMA di lima kota besar Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan).²

STIE Perbanas Surabaya telah mendapatkan pengakuan nasional karena telah memperoleh berbagai macam hibah dari Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI), di antaranya Hibah *Semi-Que* (2003-2004), Hibah K3 (2007), PHK A3 (2007-2009), Hibah K1 (2008), Hibah Coop (2008-2009), PHKI (2009-2011), Hibah Program Mahasiswa Wirausaha (2009), dan Hibah Asosiasi Profesi Mahasiswa (2009). Dengan Hibah K3, STIE Perbanas Surabaya memiliki akses untuk bergabung dalam jaringan *Inherent (Indonesian Higher Education Network)* yang dikelola Dikti sehingga dapat menyelenggarakan dan terlibat dalam *video conference* dengan 283 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2005 para staf pengajar sudah aktif dalam forum-forum internasional seperti SEAAIR (*South East Asian Association for Institutional Research*) dan ASAIHL (*Association of South East Asian Institutions of Higher Learning*). Terkait dengan kepercayaan lembaga internasional di bidang pendidikan, STIE

¹ www.perbanas.ac.id. Diakses pada tanggal 13 Juni 2016 (pukul 06.00 wib)

² <http://news.okezone.com/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2016 (pukul 06.10 wib)

Perbanas Surabaya telah memperoleh tenaga pengajar *volunteer* dari *Volunteer Service Overseas* dari Inggris (1999) dan *Australian Business Volunteer* (2008). Pada tahun 2008 STIE Perbanas Surabaya dipercaya menjadi *independent operator* (pengelola) kegiatan *International Award for Young People* (IAYP) yang secara sentral dikelola oleh *Duke of Edinburgh's Award* di Inggris yang memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang konsisten dalam melakukan kegiatan olahraga, pengabdian masyarakat, peningkatan keterampilan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan.³

Selain itu kepercayaan juga diberikan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pihak perbankan untuk memperoleh sertifikasi manajemen risiko bank. Kepercayaan untuk menyelenggarakan pelatihan juga diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan pada 9 Juli 2009 untuk memberikan pelatihan kepada para manajer koperasi jasa keuangan di Jawa Timur untuk memperoleh sertifikasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat telah banyak dilakukan oleh para dosen STIE Perbanas Surabaya, kegiatan tersebut selalu diadakan di setiap pergantian semester beriringan dengan kegiatan penelitian. Pengabdian masyarakat disupport oleh Pusat Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (PPPM) STIE Perbanas Surabaya dan juga Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI). Salah satu contoh bentuk pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen STIE Perbanas Surabaya adalah "IbM Pedagang Pasar Pucang Surabaya: Pemberdayaan Koperasi Pasar Tradisional dan Aliansi Pedagang Bagi Peningkatan Daya Saing Dengan Pasar Modern."⁴ Terdapat dua mitra dalam kegiatan IbM ini, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Praja Tulada dan Aliansi Peguyuban Pedagang Pasar Surabaya (AP3S). Koperasi tersebut didirikan oleh para pedagang tradisional dan AP3S merupakan wadah perkumpulan para pedagang tradisional. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengembangan kedua mitra di atas meliputi pengembangan *softskill* dan *hardskill*. Pengembangan *softskill* yang mencakup bantuan penetapan mekanisme simpan pinjam dan

³ https://id.wikipedia.org/wiki/STIE_Perbanas_Surabaya diakses pada tanggal 13 Juni 2016 (pukul 06.30 wib)

⁴ Burhanudin, et.al, *IbM Pedagang Pasar Pucang Surabaya: Pemberdayaan Koperasi Pasar Tradisional dan Aliansi Pedagang Bagi Peningkatan Daya Saing Dengan Pasar Modern*, dalam *Laporan Hasil Penelitian Program IPTEKS Bagi Masyarakat* (Surabaya: STIE Perbanas, 2010), 1-25.

pengembangan koperasi; bantuan pembagian peran pengurus aliansi dagang, pengurus koperasi, dalam rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar; bantuan penetapan mekanisme simpan pinjam dan pengembangan koperasi pedagang; bantuan review atas proses awal pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi pedagang; bantuan pembuatan neraca awal koperasi pedagang guna mengetahui posisi keuangan. Adapun pengembangan *hardskill* yang dilakukan oleh tim dari STIE Perbanas Surabaya mencakup bantuan non tunai berupa perangkat komputer dan perangkat lunak lainnya dari tim IBM STIE Perbanas Surabaya.⁵ Bantuan ini dilandasi oleh keinginan sebagian besar para pedagang untuk melepaskan diri dari jeratan berbagai macam bentuk lembaga yang memberikan pinjaman dengan mengenakan bunga sebesar 40% pertahun. Dengan adanya kemitraan dari STIE Perbanas kepada para pedagang, maka *softskill* tentang pengelolaan keuangan dan koperasi bisa dilakukan secara mandiri, dan ini tentunya bisa melepaskan para pedagang dari berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Bentuk lainya dari pengabdian kepada masyarakat adalah IBM PKK Desa Bluru Kidul Diversifikasi Olahan Kupang yang dilakukan oleh Farid, Titis dan Putri (2015). Pengabdian kepada masyarakat ini seiring dengan keinginan ketua PKK di Desa Bluru Kidul yang ingin mencanangkan program kreasi makanan dari Kupang. Hal ini diharapkan nantinya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mereka bisa lebih bisa diberdayakan, karena mayoritas dari penduduk desa tersebut selalu bersinggungan dengan sumber daya yang ada (kupang). Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah olahan kupang yang hanya monoton untuk beberapa jenis makanan saja, maka dari itu tim pengabdian masyarakat dari STIE Perbanas Surabaya ini berusaha untuk membantu masyarakat di Desa Bluru Kidul untuk bisa menghasilkan output yang layak jual, berupa difersifikasi olahan kupang.⁶ Pengabdian masyarakat lainnya yang juga dilakukan oleh dosen STIE Perbanas Surabaya, yaitu menyasar mitra dari para guru SMU/SMK di Surabaya. Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Almilia dan Dewi (2013) dengan judul “Guru SMU/SMK Bidang Ekonomi: Guru Melek Teknologi Informasi dan Menulis.” Bentuk IPTEKS yang ditransfer kepada mitra dalam pengabdian masyarakat kali ini adalah beberapa value tantang belajar mengajar yang disampaikan kepada para guru

⁵ Ibid, 7-15

⁶ Muhammad Farid, et.al. IBM PKK Desa Bluru Kidul Diversifikasi Olahan Kupang, dalam *Laporan Akhir IBM PKK* (Surabaya: STIE Perbanas, 2015), 1-50.

SMU/SMK ekonomi. Gambaran dari beberapa materinya adalah, Perubahan pola pikir (*mindset*) tugas mengajar; Strategi pengajaran di dalam kelas; Kompetensi teknologi multimedia; Pelatihan menulis; Manfaat blog; Desain blog; Mengubah tampilan blog dan; Mampu menambahkan plugin. Adapun IPTEKS yang telah ditransfer kepada mitra (para guru) adalah, Metoda Pembelajaran Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti: *flash*, dan *hyperlink* pada *powerpoint*); Ketrampilan menulis karya ilmiah; Metoda Pembelajaran berbasis web dengan pemanfaatan blog, karena pemanfaatan blog akan membuat siswa SMU/SMK semakin tertarik untuk mengikuti semua pembelajaran.⁷

Beberapa bentuk kemitraan STIE Perbanas Surabaya dengan masyarakat juga telah dilakukan oleh para mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya, melalui Program Kreativitas Mahasiswa. Di antara pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa STIE Perbanas Surarabaya adalah “Pemanfaatan dan Pengemasan Buah Kelapa Menjadi Minyak Goreng Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.”⁸ Dalam kesempatan kali ini, mahasiswa STIE Perbanas Surabaya bekerjasama dengan para aparat desa tersebut untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Dengan bekerja sama dengan dosen STIE Perbanas Surabaya yang kompeten dalam bidang pemasaran dan juga bekerjasama dengan beberapa narasumber ahli dalam pembuatan minyak goreng yang berbahan kelapa.

***Softskill* Pelatihan Bisnis Syariah Untuk Mencetak Usahawan Muslim yang Handal**

Beberapa kajian tentang bisnis syariah telah banyak dilakukan oleh berbagai macam kalangan. Mulai akademisi bisnis syariah sampai dengan praktisi bisnis mulai menggali konsep yang ada dalam bisnis syariah. Akan tetapi sayangnya kajian tersebut hanya terbatas pada tataran konsep dan teori saja, yang disimpan dalam berbagai referensi dan diajarkan di dalam

⁷ Luciana Spica Almilia dan Nurul Hasanah Uswati, Guru SMU/SMK Bidang Ekonomi: Guru Melek Teknologi Informasi dan Menulis, dalam *Usulan Program IPTEKS Bagi Masyarakat (IbM)*, (Surabaya: STIE Perbanas, 2013), 1-17.

⁸ Minarsih, et.al., Pemanfaatan dan Pengemasan Buah Kelapa Menjadi Minyak Goreng Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dalam *Laporan Akhir Program Kreatifitas Mahasiswa* (Surabaya: STIE Perbanas, 2008), 1-20.

kampus-kampus untuk mahasiswa yang *concern* mendalami materi-materi tentang ekonomi dan bisnis Islam. Adapun untuk kalangan pegiat bisnis yang ada di lapangan, mereka belum tersentuh dengan baik oleh wawasan-wawasan tentang bisnis syariah.

Jika ditelisik lebih dalam lagi, sebenarnya ajaran dalam bisnis syariah merupakan sebuah amunisi untuk memotivasi semua kalangan agar terus bergiat dalam berwirausaha. Bisnis merupakan urat nadi dalam Islam, sehingga tidak mengherankan apabila ada sebuah hadis –yang maknanya menyatakan bahwa “*Sembilan dari sepuluh pintu rejeki adalah berbisnis*”. Pernyataan tentang pentingnya sebuah bisnis juga bisa dilihat dari adanya konsep *maqashid syariah*, di mana seseorang tidak akan bisa beragama dengan baik sebelum terjaga jiwanya, akalunya, keturunannya dan hartanya. Penjagaan semua hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika seseorang mencapai derajat “sejahtera”. Dan hal ini bisa ditempuh dengan jalan berbisnis. Misalnya simak saja sebuah hadis⁹ -yang maknanya- “*Dan hampir-hampir kemiskinan menjadikan –seseorang- kufur*”.

Sebenarnya ada satu trend yang menarik untuk bisa memotivasi lebih dalam para pelaku bisnis tersebut. Jika pelaku bisnis tersebut adalah muslim, maka pengembangan dari hadis tentang jargon-jargon dalam bisnis syariah akan sangat memotivasi pelaku usaha bisnis. Begitu juga kaitannya dengan sebuah teori dalam bisnis syariah, yaitu berbisnis untuk memenuhi kebutuhan pokok itu wajib, maka dengan menyatakan kewajiban berbisnis kebutuhan pokok akan berimplikasi pada adanya etos kerja yang baik. Ketika seseorang beriman dengan baik, maka tidak hanya cukup di masjid saja, karena lebih dari itu, melakukan suatu bisnis untuk men-*supply* kebutuhan pokok dalam masyarakat merupakan hal yang wajib (*fardhu kifayah*) dan merupakan bentuk keimanan seseorang kepada Tuhannya.¹⁰ Beberapa teori-teori dalam bisnis syariah mayoritas berisikan tentang motivasi kerja, bekerja dengan cara yang baik, menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan rekan kerja dengan cara menghindari larangan-larangan dalam bisnis, bagaimana menekankan keberhasilan dalam bisnis, dan juga bagaimana bisa memberdayakan masyarakat lewat ajaran tentang zakat, infak, shadaqah dan

⁹ Walaupun beberapa kalangan menyebutkan hadis ini dhaif, akan tetapi hadis tentang motivasi dan fadhilah tetap bisa diamalkan walaupun dhaif. Hal ini berbeda ketika berbicara tentang ibadah, maka harus mengacu kepada hadis yang shahih.

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah* (Jakarta: Prenada, 2014), **205**.

wakaf. Fauzia (2013) menyatakan bahwa apabila aspek-aspek positif dalam bisnis Islam bisa diimplementasikan dengan baik, maka akan bisa menimbulkan kepercayaan yang sarat dengan nilai ibadah.¹¹

Pengembangan *soft skill* bisnis syariah yang dikembangkan oleh dosen STIE Perbanas Surabaya dalam pembinaan *skill* bisnis syariah di kalangan UMKM, meliputi bahasan-bahasan tentang prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, yang mencakup bahasan tentang etos kerja. Bisnis syariah selalu mengacu kepada sebuah bangunan pondasi yang berkaitan dengan bangunan *tawhid*, *syariah* dan *akhlaq*. Bangunan tauhid menjadi landasan terkuat seseorang ketika mengepakkan sayapnya dalam bisnis syariah. Melalui *tawhid rububiyah*, *tauhid uluhiyyah* dan *tawhid asma'* seorang pebisnis syariah dituntut untuk memperbaiki niat masing-masing. Adapun syariah banyak mempengaruhi seorang pebisnis dari aspek hukumnya. Kata syariah di sini hanyalah dibatasi oleh hukum-hukum yang terkait dengan beberapa larangan dalam bisnis. *Maqashid* dari larangan itu sendiri adalah untuk menjauhkan manusia dari segala kerusakan dan menghindari adanya keuntungan yang diterima oleh salah satu pihak saja. Kaitannya dengan prinsip mekanisme bisnis dalam syariah selalu saja mengacu kepada satu kaidah fikih yang berbunyi "*al-Aslu fi al-Muamalah al-Ibahah Illa an Yadulla Dalilun Ala Tahrimiha*," yaitu asal dari suatu kegiatan muamalah (yang berhubungan dengan interaksi antara manusia) itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Adapun aspek *akhlak* dalam bisnis merupakan satu hal yang nampak di permukaan, maka dari itu dalam bisnis syariah, *akhlak* haruslah ditampilkan di permukaan. Agar senantiasa memberikan kesan yang baik terhadap mitra bisnisnya, dan juga bisa menghasilkan suatu kemaslahatan dan keberkahan dalam bisnis.

Untuk aspek yang kedua yaitu berbagai macam larangan dalam bisnis syariah, yang ketika larangan tersebut ditarik menjadi satu tujuan, kenapa ada larangan-larangan dalam bisnis syariah, maka akan nampak jelas bahwa larangan yang ada merupakan suatu pencegahan terhadap suatu kemungkinan yaitu terjadinya kecurangan dan kerusakan dalam suatu bisnis. Beberapa larangan dalam bisnis syariah mencakup: *pertama*: larangan *maysir* (judi), yaitu larangan atas transaksi yang mengandung tingkat spekulasi yang sangat tinggi dan tidak rasional; *kedua*, larangan *gharar*, yang merupakan larangan terjadinya transaksi yang tidak mempunyai kejelasan di beberapa pihak; *ketiga*, larangan *riba*, yaitu sebuah larangan

¹¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada, 2013), **178**.

atas transaksi yang mengandung unsur riba; *ke-empat*, larangan *mudhtar*, yaitu sebuah larangan atas transaksi yang mengandung unsur bahaya dan membahayakan orang lain; *ke-lima*, larangan *ikrah*, yaitu sebuah larangan atas transaksi yang bersifat paksaan kepada orang lain, karena bisa menghilangkan keihlasan dari salah satu pelaku transaksi; *ke-enam*, larangan *najsy*, yaitu sebuah aktifitas perikayasaan *demand* yang akan menimbulkan permintaan palsu dan merugikan calon konsumen; *ketujuh*, larangan *ghabn*, yaitu adanya satu penipuan dalam sebuah transaksi; *ke-delapan*, larangan *ghisy*, yaitu adanya suatu kecurangan dalam sebuah transaksi; *ke-sembilan*, larangan *ihtikar*, yaitu sebuah penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan stok barang (*monopoly's rent seeking*); *ke-sepuluh*, larangan *tadlis*, yang berarti hampir sama dengan *ghabn*, yaitu penipuan.

Adapun materi ketiga yang termasuk dalam pengembangan *softskill* bisnis syariah bagi para wirausahawan muslim adalah tehnik pengambilan laba dalam bisnis syariah. Tehnik pengambilan laba sebenarnya ada tiga kategori: *pertama*, 5-7% pendapat Imam al-Ghazali lebih tepat untuk pebisnis yang berada di posisi distributor, agen ataupun pemasok; *kedua*, sepertiga atau lebih (pendapat Wahbah al-Zuhayli) lebih tepat untuk para pengecer ataupun para reseller yang menjual barang mereka kepada *end user*; *ketiga*, 100% (berdasarkan Hadith tentang wakalah pembelian domba yang dilakukan oleh Hakim bin Hazm dan di hadith lainnya dilakukan oleh Urwah bin Abi al-Jad al-Baruqy). Prosentase ini cocok diimplementasikan oleh mereka yang menjual barang dengan cita rasa tinggi dan diferensiasi yang berbeda dengan stok barang umumnya, ataupun mereka yang menyajikan barang dengan memasukkan unsur skill dan lain sebagainya.

Adapun materi ke-empat dalam pengembangan *softskill* dalam bisnis syariah ini adalah manajemen pemasaran syariah, yang mengusung konsep teistis (*rabbaniyah*), universal (*alamiyyah*), moderat (*wasatiyyah* dan *tawazun*), adil (*adalah*), dan beberapa konsep yang lainnya. Manajemen pemasaran dalam bisnis syariah juga harus diikuti dengan manajemen keuangan yang baik, melalui pembenahan akuntansi dan juga kerapihan faktor-faktor yang ada. Sehingga suatu bisnis akan terhindar dari kecurangan yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak yang memungkinkan mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan tersebut.

Adapun materi yang kelima dalam pengembangan *softskill* bisnis syariah adalah implementasi zakat, infak, shadaqah dan wakaf dalam bisnis syariah yang biasa disingkat dengan ZISWAF. Seorang pebisnis yang besar,

bertanggung jawab untuk membesarkan masyarakat sekitarnya. Melalui *amal shaleh* yang harus dikeluarkan olehnya, dengan zakat maka ia akan mencetak calon *demand* baru yang akan bisa meningkatkan pendapatannya dan juga pendapatan para pedagang lainnya. Dengan *infak* seorang pengusaha akan bisa membantu dan memberdayakan ekonomi masyarakat yang lemah. Dengan *shadaqah* seorang pengusaha bisa melayani dengan baik pelanggannya, karena sikap ramah tamah, kesabaran dalam pelayanan, bantuan-bantuan kecil terhadap pelanggan yang kekurangan merupakan ranah *shadaqah*. Begitu juga *shadaqah* bisa menjadikan lingkungan sekitar bisa lebih loyal terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh seorang pebisnis. Dan terakhir adalah wakaf yang juga harus selalu dikeluarkan oleh seorang wirausahawan. Terlebih apabila seorang pebisnis atau wirausahawan tersebut seringkali memakai fasilitas publik dan ia sangat berkecukupan dan mempunyai dana yang lebih untuk ikut membenahi dan membangun fasilitas publik misalnya akses jalan raya dan sebagainya. Maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk wakaf yang sangat baik dan tentunya mempunyai efek ganda yang bisa memajukan usahanya.

Pelatihan Bisnis Syariah di Humaira Muslimah Community

Humaira Muslimah Community adalah sebuah organisasi yang di dalamnya berkumpul para pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka di setiap bulannya mengadakan pertemuan yang mengagendakan berbagai macam pelatihan bisnis untuk meningkatkan *skill* anggota mereka masing-masing. Pada awalnya mereka juga ingin mengadakan pelatihan bisnis syariah, akan tetapi hal tersebut terkendala satu masalah, yaitu terbatasnya SDM pelatih bisnis syariah. Peluang ini kemudian dibaca oleh salah seorang dosen dari STIE Perbanas Surabaya, dan kemudian digagas rancangan tentang pelatihan bisnis syariah. Pelatihan ini bermuatan materi-materi dalam bisnis syariah, antara lain prinsip-prinsip bisnis syariah, larangan dalam bisnis syariah yang bermuara pada kerusakan, teknik pengambilan laba dalam bisnis syariah, manajemen pemasaran dalam bisnis syariah dan zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf dalam bisnis syariah. Pelatihan akan langsung disertai dengan klinik

usaha bisnis untuk masing-masing materi, sehingga tujuan dari pelatihan ini bisa tercapai.¹²

Kaitannya dengan UMKM di Sidoarjo, ada satu komunitas ibu-ibu rumah tangga yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka biasa mengadakan even bazar, pelatihan-pelatihan ketrampilan bisnis, dan lain sebagainya untuk mengembangkan sumberdaya yang ada. Organisasi dengan nama “Humaira Muslimah Community” ini juga bergabung dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang berada di Juanda untuk mendukung segala bentuk acara yang akan dilakukan oleh mereka. Baru-baru ini mereka juga mencari berbagai macam dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mengirim produk beberapa anggota mereka ke Malaysia, agar dipasarkan di sana.¹³ Mereka memiliki agenda bulanan untuk mendukung program yang akan mereka jalankan. Sebagian besar dari program mereka adalah fokus pada pengembangan Usaha Mikro ataupun Kecil yang dimiliki oleh anggota mereka. Mereka memiliki latar belakang yang sama, yaitu ibu rumah tangga yang pada awalnya memiliki bisnis, dan kemudian bersinergi untuk melakukan pembelajaran. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan di setiap pertemuan mereka, misalnya yang sudah terlaksana adalah pelatihan tehnik lukis untuk produk fashion, pelatihan sulam, dan lain sebagainya. Para anggota mereka sebagian besar berasal dari Sidoarjo, Surabaya dan juga ada sebagian kecil yang berasal dari Blitar, Kediri dan kota lainnya. Anggota mereka yang berasal dari luar kota Sidoarjo dan Surabaya juga memiliki loyalitas yang tinggi, hal ini terbukti ketika mereka mengadakan acara rutin bulanan, maka anggota dari luar kota tersebut selalu bersedia untuk datang.¹⁴ Mereka yang mayoritas muslimah, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya Bu Ayu ketua HMC adalah pemilik bisnis yang bergerak di bidang fashion merupakan lulusan S1 dari sebuah perguruan tinggi dan bersuamikan pengusaha asal India yang berdomisili di Indonesia dan sesekali pulang ke Singapura.¹⁵ Wakil ketuanya, Bu Lely yang merupakan lulusan S1 Hukum merupakan istri dari pengusaha percetakan dan mempunyai bisnis di bidang

¹² Ika Yunia Fauzia, Pelatihan Bisnis Syariah Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Humaira Muslimah Community, dalam *Usulan Hibah Internal Pengabdian Masyarakat* (Surabaya: STIE Perbanas, 2016), iv.

¹³ Ibid, 2.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nenny (pengurus HMC), 5 April 2016

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Lely (wakil ketua HMC), 5 April 2016

fashion.¹⁶ Mereka anggota HMC adalah pelaku Usaha kecil dan Mikro akan yang rata-rata lulusan S1 dari berbagai macam bidang ilmu, akan tetapi mereka tidak mengetahui tentang bisnis syariah.¹⁷

HMC merupakan komunitas Muslimah yang berisi para pelaku usaha yang bersifat profit dan sosial, yang memiliki visi mempertemukan pelaku usaha muslimah agar bisa bersama-sama berbagi ilmu dan belajar bersama. Adapun misi dari HMC adalah mendapatkan manfaat dari pertemuan dan mendapatkan jaringan (*network*) dan pada akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses dengan ilmu atau pengalaman yang di dapat dari komunitas HMC. Motto yang dijadikan pijakan dalam HMC adalah bersama, berbagi, Berjaya. Salah satu dari aturan yang diberlakukan dalam organisasi ini adalah dalam setiap pertemuan rutin bulanan, disarankan bagi para anggotanya untuk membawa produk usaha yang bisa dijual dan kartu nama untuk mempromosikan usaha mereka.¹⁸

Pelatihan bisnis syariah ini mampu mengembangkan *softskill* bagi pengembangan bisnis HMC dengan mentransfer banyak muatan-muatan syariah yang bermuara pada integritas dan kompetensi. Output yang dihasilkan adalah sebuah bentuk riil, yaitu kemajuan sebuah bisnis yang membawa kemajuan bagi masyarakat, karena materi yang terkandung dalam bisnis syariah termasuk di dalamnya adalah manajemen pemasaran dan zakat infak shadaqah dan wakaf yang sangat berkaitan dengan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Penanaman *softskill* tentang bisnis syariah ini tidak hanya berhenti pada penambahan value bisnis bagi anggota HMC saja, karena STIE Perbanas Surabaya juga berkonsentrasi pada pengembangan *softskill* pelatihan bisnis syariah bagi pelaku UMKM lainnya. Maka dari itu langkah awal dari tahapan sosialisasi pelatihan bisnis syariah adalah pembuatan modul pelatihan bisnis syariah yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan pelaku bisnis khususnya.

Penutup

Pengembangan *softskill* bagi pelaku bisnis syariah harus selalu dikembangkan dengan baik. Melalui beberapa pelatihan-pelatihan massal yang diharapkan bisa menghasilkan output, yaitu pebisnis handal yang bisa

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Lely (wakil ketua HMC), 23 Maret 2016

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rahayu (wakil ketua HMC), 6 April 2016

¹⁸ Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Humaira Muslimah Community.

memberdayakan masyarakat. STIE Perbanas sebagai mitra bagi masyarakat berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, dengan cara melakukan motivasi kepada para dosennya yang mempunyai *skill* tentang bisnis syariah untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang bisnis syariah kepada masyarakat. Melalui program-program hibah pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal. Diharapkan nantinya juga akan tercipta modul tentang pelatihan bisnis syariah yang bisa dimanfaatkan oleh khayalak ramai. Sehingga masyarakat akan lebih teredukasi lagi, dan mereka bisa berbisnis dengan baik karena mempunyai *awareness* dalam berbisnis syariah yang relative tinggi. []

Daftar Pustaka

- Almilia. Luciana Spica, dan N. H. Uswati. 2013. Guru SMU/SMK Bidang Ekonomi: Guru Melek Teknologi Informasi dan Menulis, dalam *Usulan Program IPTEKS Bagi Masyarakat (IbM)*. Surabaya: STIE Perbanas.
- Burhanudin, et.al. 2010. IbM Pedagang Pasar Pucang Surabaya: Pemberdayaan Koperasi Pasar Tradisional dan Aliansi Pedagang Bagi Peningkatan Daya Saing Dengan Pasar Modern, dalam *Laporan Hasil Penelitian Program IPTEKS Bagi Masyarakat*. Surabaya: STIE Perbanas.
- Farid. Muhammad. et.al. 2015. IbM PKK Desa Bluru Kidul Diversifikasi Olahan Kupang, dalam *Laporan Akhir IbM PKK*. Surabaya: STIE Perbanas.
- Fauzia, Ika Yunia. 2016. Pelatihan Bisnis Syariah Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Humaira Muslimah Community, dalam *Usulan Hibah Internal Pengabdian Masyarakat*. Surabaya: STIE Perbanas.
- _____. 2014. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah*. Jakarta: Prenada.
- _____. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada.
- <http://news.okezone.com/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2016 (pukul 06.10 wib)
- https://id.wikipedia.org/wiki/STIE_Perbanas_Surabaya diakses pada tanggal 13 Juni 2016 (pukul 06.30 wib)

Minarsih, et.al., 2008. Pemanfaatan dan Pengemasan Buah Kelapa Menjadi Minyak Goreng Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dalam *Laporan Akhir Program Kreatifitas Mahasiswa*. Surabaya: STIE Perbanas.

www.perbanas.ac.id. Diakses pada tanggal 13 Juni 2016 (pukul 06.00 wib)

Wawancara dengan Ibu Nenny (pengurus HMC), 5 April 2016

Wawancara dengan Ibu Lely (wakil ketua HMC), 5 April 2016 dan 23 Maret 2016.

Wawancara dengan Ibu Rahayu (wakil ketua HMC), 6 April 2016

Lampiran-Lampiran

Foto-Foto Pameran yang diadakan oleh Humaira Muslimah Community



Foto-Foto Kegiatan Humaira Muslimah Community



Community Engagement Waste Management dengan Activated Carbon (Nano Porus Materials), Bioarang dan Kompos; Mengatasi Pengelolaan Sampah dengan Bioarang, Activated Carbon dan Kompos bagi Masyarakat Desa Parit dan Kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muara Jambi

SUMARTO

STAI Ma'arif Kota Jambi, Indonesia
sumarto.manajemeno@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti yang kita bayangkan. Sampah banyak dijumpai dimana-mana tanpa adanya pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah dengan activated carbon (*porus materials*), bioarang dan kompos bukanlah suatu yang baru, tetapi jarang dilakukan oleh setiap rumah tangga yang mana setiap harinya mengeluarkan sampah sebanyak 2 Kg/ hari atau bahkan lebih. Untuk itu perlu pengetahuan dan praktek bagaimana caranya membuat activated carbon yang berfungsi untuk menyerap bakteri/kotoran dalam air sehingga bisa digunakan untuk air minum. Mengelola sampah pekarangan rumah tangga untuk membuat bioarang sebagai salah satu alternatif sumber energi. STAI Ma'arif Kota Jambi sebagai Institusi Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjadi tanggung jawab yang besar bagi civitas akademika STAI Ma'arif untuk membentuk Community Engagement menerapkan waste management dengan activated carbon (*porus materials*), bioarang dan kompos melalui pembinaan kelompok-kelompok rumah tangga di Desa Parit dan Kebun IX, memberikan pencerahan melalui sosialisasi dan praktek langsung di tengah masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dengan baik.

Kata Kunci: Community Engagement, activated carbon (*porus materials*), bioarang dan kompos.

Pendahuluan

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.¹ Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.²

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.³

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Pengelolaan Sampah⁴ adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup. 2005.

² Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

³ Daryanto dan Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Gava Media, 1999).

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup. 2007.

Sementara itu Radyastuti dalam Suprihatin menyatakan bahwa Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.⁵

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Ada dua proses pembuangan akhir, yakni: *open dumping* (penimbunan secara terbuka) dan *sanitary landfill* (pembuangan secara sehat). Pada sistem *open dumping*, sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup, sedangkan pada cara *sanitary landfill*, sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Dalam Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) disebut bahwa proses *sanitary landfill* (pembuangan secara sehat) adalah pembuangan sampah yang didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah.⁶

Metode *sanitary landfill* ini merupakan salah satu metoda pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA (Tempat Pembuanagan Akhir). Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi sistem saluran leachate yang berfungsi sebagai saluran limbah cair sampah atau ke lingkungan. Pada metode *sanitary landfill* tersebut juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah.

Defenisi manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju diungkapkan oleh Tchobanoglous. Merupakan gabungan dari kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan,

⁵ Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Gava Media, 1999).

⁶ JICA. *Statistik Persampahan Indonesia*. 2008.

pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi dan mempertimbangan lingkungan yang juga responsif terhadap kondisi masyarakat yang ada.⁷

Dalam kenyataannya, pengelolaan pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti yang kita bayangkan. Sampah banyak dijumpai dimana-mana tanpa adanya pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Sampah sering menjadi barang tidak berarti bagi manusia, sehingga menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah. Orang sering membuang sampah sembarangan, seolah-olah mereka tidak memiliki salah apapun. Padahal membuang sampah merupakan perbuatan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.

Pengelolaan sampah dengan activated carbon (*porus materials*), bioarang dan kompos bukanlah suatu yang baru, tetapi jarang dilakukan oleh setiap rumah tangga yang mana setiap harinya mengeluarkan sampah sebanyak 2 Kg/ hari atau bahkan lebih. Tidak hanya sampah rumah tangga yang menjadi permasalahan tetapi sampah dari rumah makan, perkantoran, sekolah, kampus, perusahaan dan lain sebagainya. Berapa ton sampah/ hari untuk tingkat wilayah pedesaan menjadi problem yang besar apabila tidak ditangani secara baik dan benar.

Desa Parit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi adalah daerah dengan penduduk yang bermata pencaharian berkebun sawit, kelapa dan pedagang. STAI Ma'arif Kota Jambi sebagai Institusi Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjadi tanggung jawab yang besar bagi civitas akademika STAI Ma'arif untuk menerapkan waste management dengan activated carbon (*porus materials*), bioarang dan kompos melalui pembinaan kelompok-kelompok rumah tangga di Desa Parit dan Kebun IX, memberikan pencerahan melalui sosialisasi dan praktek langsung di tengah masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dengan baik.

Bila dibandingkan secara umum Kota Jambi Produksi sampah di Kota Jambi berasal dari berbagai sumber mencapai 200 sampai 300 ton perhari.

⁷ Tchobanoglous, G., H. Theisen, dan S.A.Vigil. *Integrated solid waste management. Engineering principles and management issues* (McGraw Hill International Editions, New York), 1993.

Saat ini TPA Talang Gulo tak lagi mampu menampung sampah kiriman dari berbagai Kota Jambi ini. Pemerintah Kota Jambi diminta agar menambah TPA yang baru. Banyaknya jenis macam sampah di Kota Jambi yang berasal dari bedengan, pabrik, industri dan juga sampah dari pedagang perumahan, warga masyarakat. Jumlahnya yang tidak sedikit membutuhkan tempat penampungan yang memadai. Lebih parahya lagi ada sebagian masyarakat yang membuang sampah dengan seenaknya saja. Tanpa disadari itu akan menyebabkan masalah dan mendatangkan berbagi macam penyakit serta mencemari lingkungan.

Tingginya penumpukan sampah membuat sebagian besar warga membuang sampah ke sungai dan got. Kondisi demikian membuat sebagian besar wilayah pusat Kota Jambi sering dilanda banjir. Untuk mengatasi kekurangan armada pengangkutan sampah, pihaknya menambah belasan gerobak motor, yang sering dioperasikan hingga larut malam. Gerobak ini untuk mengatasi penumpukan sampah di permukiman warga yang hanya bisa dilalui kendaraan kecil.

Desa Parit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi daerah yang susah air bersih, jangankan untuk air bersih mendapatkan galian sumur untuk keperluan air juga susah karena banyak juga air yang sudah terkontaminasi dengan sampah-sampah dan limbah masyarakat yang ada. Masyarakat Desa Prit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Kebanyakan membeli air minum galon setiap harinya untuk keperluan minum dan memasak, karena air galian sumur terkadang kurang baik digunakan. Pembelian air minum galon pastinya menambah beban ekonomi bagi setiap rumah tangga dengan pendapatan/ bulan yang dapat dikategorikan ekonomi menengah ke bawah.

Untuk itu perlunya pengetahuan dan praktek bagaimana caranya membuat activated carbon yang berfungsi untuk menyerap bakteri/ kotoran dalam air sehingga bisa digunakan untuk air minum. Mengelola sampah pekarangan rumah tangga untuk membuat bioarang sebagai salah satu alternatif sumber energi. Tidak hanya bioarang sampah dari pepohonan seperti daun, ranting pohon bisa juga digunakan untuk pupuk kompos, sangat penting untuk penyuburan tanah. Salah satu teknologi pembuatan pupuk organik yang telah dikembangkan dan disosialisasikan oleh Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian⁸ adalah teknologi *fine*

⁸ IPPTP. *Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Pupuk Organik*, Jakarta: Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. 2000.

compost. Pada dasarnya, teknologi ini ditujukan untuk mempercepat proses pembuatan kompos (matang dalam waktu 3 minggu), dan sekaligus meningkatkan kualitas kompos yang dihasilkan.

Masyarakat Desa Prit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi mayoritas berkebun. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan di masyarakat sebagai bentuk action plan dari kegiatan Short Course Community Outreach (SCCO) di India. Judul penelitian (action plan) ini adalah Waste Management dengan Activated Carbon (*Nano Porus Materials*), Bioarang Dan Kompos (*Upaya Mengatasi Pengelolaan Sampah dengan Bioarang, Activated Carbon dan Kompos bagi Masyarakat Desa Parit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi*).

Permasalahan

1. Mengapa masyarakat Desa Prit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi mengalami masalah dengan sampah rumah tangga, sumber energi bahan bakar untuk memasak dan penyediaan air bersih?
2. Bagaimana penerapan waste management dengan activated carbon (nano porus) sebagai penyerap bakteri kotoran dalam air, pembuatan sumber energi alternatif dari bioarang dan kompos untuk penyuburan tanaman?

Tujuan dan Manfaat Action Plan

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Prit dan Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi mengalami masalah dengan sampah rumah tangga, sumber energi bahan bakar untuk memasak dan penyediaan air bersih.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan waste management dengan activated carbon (nano porus) sebagai penyerap bakteri kotoran dalam air, pembuatan sumber energi alternatif dari bioarang dan kompos untuk penyuburan tanaman.

Kajian Terdahulu

1. Penjelasan Hasil Penelitian yang sudah dilakukan, dijelaskan oleh Dr. Vipin Kumar Saini tentang Nanoporus Materials (Kegiatan SCCO 2015). Membuat Activated Carbon (Nanoporus) dengan sabuk-sabuk kelapa tanpa harus membeli di Toko dengan harga mahal yang fungsinya untuk

menyerap bakteri kotoran dalam air. Selain activated carbon, drum bekas sebagai alat pemasak bisa juga memasak kotoran dari pepohonan seperti ranting pohon, tempurung dapat juga digunakan untuk bioarang. Kotoran pepohonan seperti dedaunan, rerumputan yang dikumpul kemudian disiram setiap hari dengan air bisa menjakdi pupuk kompos sederhana dan murah.

2. Penelitian dari Dwina Archenita, Jajang Atmaja, Hartati Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Kampus Limau Manis Padang dengan judul Pengelolaan Limbah Daun Kering sebagai Briket untuk Alternatif Pengganti Bahan Bakar Minyak 2010. Hasil Penelitian Hasil uji coba yang telah dilakukan mendapatkan suatu bahan bakar alternatif yaitu briket bioarang. Briket bioarang adalah gumpalan-gumpalan atau batangan-batangan yang terbuat dari bioarang (bahan lunak). Bioarang merupakan arang (salah satu jenis bahan bakar) yang dibuat dari aneka macam hayati atau biomassa, misalnya kayu, ranting, daun-daunan, rumput, jerami, kertas, ataupun limbah pertanian lainnya yang dapat dikarbonisasi. Bioarang ini dapat digunakan melalui proses pengolahan, salah satunya menjadi briket bioarang. Bioarang sebenarnya termasuk bahan lunak yang dengan proses tertentu diolah menjadi bahan arang keras dengan bentuk tertentu. Kualitas bioarang ini tidak kalah dari bahan bakar jenis arang lainnya. Pembuatan briket dari limbah pertanian dapat dilakukan dengan menambah bahan perekat, dimana bahan baku diarangkan terlebih dahulu kemudian ditumbuk, dicampur perekat, dicetak dengan sistim hidrolis maupun manual dan selanjutnya dikeringkan. Pembuatan briket ini telah pernah diujicobakan pada masyarakat di daerah Jorong Kubang Pipik Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan daerah Air Paku Kelurahan Sungai Sapih Kota Padang. Dari hasil kegiatan ini masyarakat terlihat sangat antusias sekali untuk mencoba membuatnya dan setelah diuji, briket tersebut berhasil dapat dibakar dan mutunya cukup baik.
3. Penelitian dari Roni M. Naatonis dengan Judul Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kampung Nelayan Oesapa Kupang Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang 2010. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat kampung nelayan terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam pelaksanaan teknik operasional pengelolaan sampah adanya kerjasama dari masyarakat

kampung nelayan dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan terutama lingkungan rumah tangga sendiri yang terdiri dari: pelayanan pewadahan sampah individu, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan sendiri ke TPS. Keinginan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh karena adanya inisiatif atas kesadaran sendiri dengan dorongan hati nurani sendiri dan sosialisasi yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, sehingga keinginan mereka merupakan perwujudan kebersamaan yang merupakan kondisi sosial budaya masyarakat. Pada subsistem pewadahan, sebagian besar masyarakat kampung nelayan (26,92%) sudah mempunyai pewadahan, namun belum memisahkan sampah menurut jenisnya. Sedangkan sistem pengumpulan yang dilakukan petugas kebersihan masih kurang karena 73,08% masyarakat kampung nelayan menyatakan kurang puas. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi berupa penyuluhan maupun pelatihan dan masukan kepada pemerintah Kota Kupang tentang penyediaan dan pengelolaan sampah rumah tangga di Kampung Nelayan.

4. Penelitian dari Sulistyowati dengan judul Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan di lokasi TPA sampah Ngronggo di Kelurahan Kumpulrejo Kota Salatiga, dengan ruang lingkup masalah dampak lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan aspek dampak lingkungan bidang sosial budaya. Variabel penelitian meliputi aspek sosial pengelolaan TPA, AMDAL, tanggapan dan peran serta masyarakat yang dianalisis dari aspek sosial dan hukum. Kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngronggo semula menggunakan sistem open dumping, kemudian setelah dilakukan studi AMDAL sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 menggunakan sistem sanitary landfill, walaupun penerapannya belum sempurna. Peran serta masyarakat sehubungan dengan AMDAL kegiatan TPA Ngronggo terlihat pada kesempatan usaha di TPA. Pemerintah Kota Salatiga secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekitar TPA Ngronggo baik pada bidang hukum kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, dan agraria.

Landasan Teori

Waste Management (Pengelolaan Sampah)

Sampah merupakan hal yang tak asing bagi semua orang. Baik secara sadar ataupun tidak sadar setiap hari kita menghasilkan berbagai macam jenis sampah. Sampah rumah tangga adalah salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh setiap orang. Sampah seharusnya dimanfaatkan, diolah dikelola sesuai dengan prosedur 3R atau Reduce (mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah), Reuse (menggunakan kembali barang yang biasa dibuang), dan Recycle (mendaur ulang sampah).

Sampah menurut asal zat yang dikandungnya, secara garis besar sampah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya plastik, kertas, kaca, kaleng, dan besi. Sampah anorganik banyak yang sulit hancur dan sulit diolah. Untuk mengolah sampah ini memerlukan biaya dan teknologi tinggi. Kedua, dilihat dari sumbernya; sampah ini bisa dibedakan menjadi tiga macam, yakni sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sampah industri, meliputi buangan hasil proses industri, dan sampah makhluk hidup adalah jenis benda buangan dari makhluk hidup. Sampah anorganik yang terbagi menjadi sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah makhluk hidup. Intensitas pencemarannya sangat tinggi dan selanjutnya menimbulkan kerugian untuk masyarakat, sampah rumah tangga misalnya setiap hari kita diposisikan sebagai produsen sampah yang senantiasa memproduksi sampah terus-menerus.

Manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju diungkapkan oleh Tchobanoglous. Merupakan gabungan dari kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi dan mempertimbangan lingkungan yang juga responsif terhadap kondisi masyarakat yang ada.⁹

Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut John D Millet, manajemen ialah suatu proses pengarahan dan

⁹ Tchobanoglous, G., H. Theisen, dan S.A.Vigil. *Integrated solid waste management. Engineering principles and management issues* (McGraw Hill International Editions, New York), 1993.

pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal yang mencapai tujuan yang diharapkan. James F. Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan atau mempekerjakan orang lain.

Dari beberapa definisi tersebut bisa dipetakan kepada tiga hal, yaitu; Pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan bahwa manajemen memerlukan ilmu pengetahuan. Kedua, manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni atau keterampilan memanej. Ketiga, manajemen sebagai profesi, bahwa manajer yang profesional yang bisa memanej secara efektif dan efisien.

Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (*Al-Idarah*) ialah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Pertama (ال تخطيط) atau *planning* yaitu perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan dengan menggunakan metode tertentu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas. (HR. Thabrani).” Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam Q.S: Al-Insyirah; 7-8.

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan *itqan*, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah SWT. Kedua, (ال تنظيم) atau *organization* merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. (al Qur’an Surat Ali Imran ayat 103).

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatupadulah dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita

dalam satu payung organisasi dimaksud. Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah. 286.

Kerja yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam berkarya. Di samping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat *statement* yang terkenal yaitu (بِ نِظَامِ الْبَاطِلِ يَغْلِبُ بِهِ نِظَامُ الْبِرِّ الْحَقِّ) Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.

Statement Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal. Ketiga, (الْمُنَسَقِ) atau *coordination*, upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan *planning* dengan mengharapkan tujuan yang diharapkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah. 208.

Apabila manusia ingin mendapat predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman bila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai *planning* dan aturan-aturan yang mengikat bagi manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan adanya kordinasi yang baik dan efektif sehingga akan mencapai kepada tujuan ideal. Cobaan dan kendala merupakan keniscayaan, namun dengan manusia tenggelam dalam lautan Islam (kedamaian, kerjasama dan hal-hal baik lainnya) akan terlepas dari kendala-kendala yang siap mengancam.

Keempat, (الرَّقَابَةِ) atau *controlling*, pengamatan dan penelitian terhadap jalannya *planning*. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah SWT berfirman Qur'an Surat Ash-Shoff: 1 dan Qur'an Surat At-Tahrim: 6.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga pertama-tama dapat dikelola dengan cara dipilah. Pemilahan yang dimaksud adalah kegiatan mengelompokkan sampah menjadi sedikitnya lima jenis sampah yang terdiri atas: a) sampah yang mengandung bahan berbahaya; b) sampah yang mudah

terurai; c) sampah yang dapat digunakan kembali; d) sampah yang dapat didaur ulang; dan 5) sampah lainnya.¹⁰

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan bertumpu pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran.¹¹

Sampah yang sering dihasilkan oleh rumah tangga berupa sampah sisa makanan, sampah kertas, sampah botol bekas, sampah kemasan, dan sampah plastik. Berdasarkan sifatnya, sampah sisa makanan dan sampah kertas dapat digolongkan menjadi sampah organik karena sampah-sampah tersebut dapat terdegradasi secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan sampah seperti botol bekas, kemasan, dan plastik adalah sampah yang sulit terurai secara alami sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat didegradasi.

Sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹²

Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sebagai bahan kajian secara umum pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia telah mengakibatkan terbentuknya sampah kota yang lebih beragam. Khususnya limbah jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meningkat dua kali lipat dalam satu dekade. Timbulan limbah B3 pada tahun 1990 di Indonesia adalah 4.3 juta ton. Jumlah ini meningkat menjadi 8.8 juta ton pada tahun 1998. Diperkirakan lebih dari 75% limbah B3 berasal dari industri manufaktur, 5-10% dari rumah tangga, dan sisanya dari sumber-sumber lain. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya gangguan lingkungan, yang belum terpantau dengan baik. Dikhawatirkan beban pencemaran oleh limbah B3 akan meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2010, terutama dari jenis limbah logam berat dan toksikan organik non-*biodegradable* yang dapat terbioakumulasi di lingkungan hidup.¹³

Pada saat ini, 40% produk plastik dunia digunakan untuk bahan pengemas. Sebagai akibatnya, jutaan ton plastik dibuang sebagai sampah setiap harinya. Data di negara maju menunjukkan setiap orang membuang 398 kg sampah plastik setiap tahunnya.¹⁴

Meskipun jumlah sampah plastik hanya meliputi 12% saja dari sampah kota, akibat berat jenisnya yang rendah, volumenya membutuhkan ruang sebesar 25-35% lebih banyak dari volume total sampah. Akibatnya, apabila komponen sampah plastik terus meningkat jumlahnya, kebutuhan lahan TPA akan lebih meningkat pula. Hasil analisis komposisi deposit sampah pada sembilan lokasi sampling di TPA Keputih, yang telah dihentikan operasinya pada tahun 2001, menunjukkan kandungan plastik yang cukup tinggi, yaitu antara 14,3-33,5%, dengan rata-rata 23,5%.¹⁵

¹³ Anonymous, 1997. *Natural resource aspects of sustainable development in Indonesia*. Agenda 21. www.un.org. 8 November 2016.

¹⁴ Majid, M.I.A. *Restricting the use of plastic packaging*. PRN 8099. *Professional Bulletin of the National Poison Centre*, Malaysia. 2007.

¹⁵ Trihadiningrum, Y., S, Syahrial, D.A. Mardhiani, A. Moesriati, A. Damayanti, Soedjono, 2005. *Preliminary evaluation on the management of a closed municipal solid waste disposal site in Surabaya City, Indonesia*. Proc. The 7th Symposium on Academic Network for Environmental Safety and Waste Management CSR and Education of Environmental Health and Safety. Tokyo, 19-21 September 2005.

Selain melalui proses anaerobik, sampah makanan dan sampah biomassa lainnya dapat pula dikonversi menjadi *biofuel* alkohol, melalui proses hidrolisis dan fermentasi. Bentuk *energy recovery* lainnya adalah pengubahan energi dari panas yang timbul pada proses insinerasi sampah, menjadi energi listrik. Belakangan ini, energi dari briket sampah, yang lazim disebut *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang populer di Amerika Serikat pada tahun 1970-an mulai dikembangkan kembali (Ramasamy, 2006). Bentuk terbaru RDF adalah *Process Engineered Fuel* (PEF), yang dibuat dari sampah plastik dan kertas.¹⁶

Penerapan konsep penanganan sampah yang berbasis pada aktivitas pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu berakar pada pola reduksi di sumber, di mana dilakukan pemisahan terhadap komponen yang masih dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali secara langsung. Pada tingkat global, reduksi timbulan seluruh komponen sampah kota dilakukan melalui program pendidikan dan pembuatan kompos pada skala rumah tangga. Di kalangan masyarakat Eropa (EC), misalnya, penanganan sampah kota telah ditetapkan sebagai berikut: 55% didaur-ulang dan dikompos, 35% dimusnahkan di insinerator, dan 10% dibuang ke *landfill*. Pembuatan kompos pada skala rumah tangga dinilai sebagai upaya yang paling strategis dan berwawasan ekologis untuk mengubah sampah basah menjadi produk yang bermanfaat.¹⁷

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Aboejoewono (1985) dalam Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai ialah (a) pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu; (b) pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat

¹⁶ Toinezyk, L. *Engineered fuel, renewable fuel of the future?* American Plastics Council, Arlington. 2006.

¹⁷ Majid, M.I.A. *Restricting the use of plastic packaging. PRN 8099. Professional Bulletin of the National Poison Centre, Malaysia.* 2007.

pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA); (c) pembuangan akhir, di mana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Menurut Yolarita (2011), paradigma baru dalam pengelolaan sampah lebih menekankan pada pengurangan sampah dari sumber untuk mengurangi jumlah timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Maka dari itu, prinsip 3R sejalan dengan pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya. Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Prinsip pertama adalah *reduce* atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.
2. Prinsip kedua adalah *reuse* yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian *reuse* akan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.
3. Prinsip ke tiga adalah *recycle* yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah dikumpulkan, ditampung di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan akhirnya dibuang ke tempat penampungan akhir (TPA). Pola operasional konvensional ini dapat menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di

rumah tangga, TPS dan TPA. Oleh karena itu, prinsip 3R yang diterapkan langsung mulai dari sumber sampah menjadi sangat penting karena dapat membantu mempermudah proses pengelolaan sampah. Pemilahan sampah yang dilakukan sebagai bagian dari penerapan 3R akan mempermudah teknik pengolahan sampah selanjutnya. Kegiatan pemilahan sampah memiliki keuntungan yaitu efisiensi sampah menjadi bentuk baru yang lebih bermanfaat. Keuntungan lain dari kegiatan ini adalah dapat memangkas biaya petugas dan transportasi pengangkut sampah serta mengurangi beban TPA dalam menampung sampah (Yolarita 2011).

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata. Partisipasi juga berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban bagi setiap orang (Tjokroamidjojo 1990 *dalam* Manurung 2008). Koentjaraningrat (1991) berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah dan tujuan pembangunan, yang ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat.

Wibisono (1989) *dalam* Alfiandra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan.

Menurut Walgito (1999) dalam Alfiandra (2009), partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Hubungan tersebut terdapat di antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil.

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai (Yolarita 2011). Candra (2012) mengungkapkan bahwa konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan mengelola sampah, tetapi juga ikut serta menjadi anggota organisasi yang berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Yuliasuti *et al.* (2013) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa partisipasi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan partisipasi tidak langsung ini adalah keterlibatan masyarakat dalam masalah keuangan, yaitu partisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan melalui dinas terkait yang secara langsung memberikan pelayanan dalam kebersihan. Dalam penelitian Manurung (2008), salah satu bentuk partisipasi terhadap pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari kesediaan membayar (*willingness to pay*) untuk peningkatan fasilitas pengelolaan sampah agar kebersihan dan kualitas lingkungan tetap terjaga.

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengelola sampah menjadi suatu benda lain yang memiliki manfaat. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun materi. Partisipasi merupakan modal yang penting bagi program pengelolaan sampah untuk dapat berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah rumah tangga yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat, terutama di perkotaan. Partisipasi yang dilakukan

masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh dan Mulyadi *et al.* (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal.

2. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Berdasarkan hasil penelitian Riswan *et al.* (2011), pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

3. Persepsi

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2005) menunjukkan bahwa semakin baik persepsi ibu-ibu rumah tangga terhadap kebersihan lingkungan, maka semakin baik partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian Manurung (2008) juga menunjukkan hasil yang sama, siswa yang memiliki persepsi bahwa lingkungan bersih merupakan hal yang penting akan cenderung berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hapsari (2012) mengenai persepsi dan partisipasi menunjukkan bahwa persepsi memiliki hubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat.

4. Pendapatan

Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional, seperti contohnya dalam pengangkutan sampah menuju TPA untuk diolah. Begitu pula dengan pelayanan lainnya

untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian Yuliasuti *et al.* (2011) menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan sampah.

5. Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat

Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan oleh setiap individu agar masalah mengenai sampah dapat diatasi mulai dari akarnya, yaitu sumber penghasil sampah. Selain itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dengan pengawasan tindakan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi *et al.* (2010) membuktikan bahwa peran serta pemerintah daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan sampah di Kota Tembilahan. Selain itu, penelitian Yolarita (2011) juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan informasi dan motivasi dalam menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah.

6. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Contohnya adalah tong sampah yang memisahkan sampah organik dan sampah nonorganik ataupun fasilitas pengangkutan sampah rutin oleh petugas. Penelitian yang dilakukan oleh Yolarita (2011) menunjukkan bahwa minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang membuat partisipasi masyarakat kurang.

Di antara berbagai faktor yang telah dijelaskan, penelitian ini memusatkan perhatian pada faktor persepsi. Masih terdapat keraguan pada faktor tersebut karena penelitian yang dilakukan oleh Budiman *et al.* (2013) menunjukkan bahwa persepsi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat membuktikan hal tersebut.

Selain itu, pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang akan melakukan kegiatan. Kondisi tersebut terdiri dari kondisi fisiologis (keadaan fisik, panca indera, kesehatan) dan kondisi psikologis, di mana persepsi memainkan peranan penting dalam menentukan kondisi psikologis (Sunaryo 2004). Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa partisipasi akan sulit tercipta ketika kondisi psikologis individu dalam hal ini persepsinya terhadap suatu kegiatan tidak dalam kondisi yang baik. Persepsi menjadi sesuatu yang melandasi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor internal maupun eksternal individu akan terlebih dahulu mempengaruhi persepsi, sebelum akhirnya memunculkan partisipasi terhadap suatu kegiatan. Dengan begitu, faktor internal dan eksternal individu berhubungan secara langsung dengan persepsi dan berhubungan secara tidak langsung dengan partisipasi. Penjelasan mengenai persepsi akan dibahas lebih dalam pada subbab berikut.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungannya dengan objek stimulus. Dengan demikian persepsi merupakan gambaran arti atau interpretasi yang bersifat subjektif, artinya persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan. Dalam kamus psikologi persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungannya dengan menggunakan indera yang dimilikinya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut (Dali 1982 dalam Hermawan 2005).

Persepsi yang dihasilkan setiap orang dapat berbeda untuk stimuli yang sama. Menurut Sarwono (1995), perbedaan persepsi dapat terjadi karena ada lima faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah budaya, status sosial ekonomi, usia, agama, dan interaksi antara peran gender, desa/kota, dan suku. Selanjutnya Krech

dan Cruthefield *dalam* Rakhmat (1996) menjelaskan bahwa perbedaan persepsi bisa terjadi karena terdapat empat prinsip dasar dalam proses pembentukan persepsi, yaitu:

1. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli yang diterima. Artinya seseorang akan memberikan sesuatu arti tertentu terhadap stimulus yang dihadapinya, walaupun arti dan maksud stimulus tidak sesuai dengan arti persepsi orang tersebut
2. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, di mana seseorang dalam mempersepsikan suatu stimulus melalui proses pemilihan
3. Persepsi yang selalu diorganisasikan dan diberi arti memiliki suatu medan kesadaran yang memberi struktur terhadap gambaran yang muncul kemudian. Di samping itu, keadaan lingkungan sosial seseorang akan mempengaruhi proses pembentukan persepsi
4. Persepsi ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya melalui pembauran

Sugihartono *et al.* (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Dalam persepsi manusia, terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau buruk. Persepsi positif maupun persepsi negatif akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Sarwono 1999). Sarwono menjelaskan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, seperti jenis kelamin, perbedaan generasi (usia), tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan di luar yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti lingkungan sosial budaya, interaksi antar individu, dan media komunikasi di mana seseorang memperoleh informasi tentang sesuatu.

Menurut Manurung (2008), persepsi adalah suatu pandangan yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek, gejala maupun peristiwa, yang dilakukan individu yang bersangkutan secara sengaja dengan cara

menghubungkan objek, gejala atau peristiwa tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, sistem kepercayaan, adat istiadat yang dimilikinya. Menurut Asngari (1984) *dalam* Harihanto (2001), persepsi seseorang terhadap lingkungannya merupakan faktor penting karena akan berlanjut dalam menentukan tindakan individu tersebut. Persepsi yang benar terhadap suatu obyek diperlukan, karena persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku.

Tinjauan terhadap konsep persepsi, khususnya untuk objek-objek lingkungan dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu (1) melalui pendekatan konvensional dan (2) pendekatan ekologis terhadap lingkungan. Menurut Backler *dalam* Abdurachman (1988), hubungan manusia dengan lingkungan merupakan titik tolak dan merupakan sumber informasi sehingga individu menjadi seorang pengambil keputusan. Keputusan inilah yang pada akhirnya menentukan tindakan dari seorang individu terhadap lingkungannya. Berasal dari pemahaman ini, Hermawan (2005) mendefinisikan persepsi terhadap lingkungan sebagai gambaran, pemahaman atau pandangan individu dalam memelihara kebersihan lingkungan yang berkenaan dengan segenap unsur yang terdapat dalam lingkungan, khususnya yang menyangkut limbah rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah merupakan pandangan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, yang kemudian mendorong perilaku masyarakat dalam mengelola sampah agar kebersihan lingkungan dapat terus terjaga. Persepsi masyarakat menjadi salah satu penentu tingkat partisipasi masyarakat karena persepsi merupakan proses psikologis yang tidak terlepas dari diri masing-masing individu yang berfungsi membentuk sikap dan menentukan keputusan untuk bertindak. Apabila persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah baik, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat berasal dari dalam diri individu dan hubungannya dengan lingkungan di mana ia tinggal. Faktor yang berasal dari dalam individu berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola sampah, sedangkan pengalaman adalah apa yang pernah di alami pada masa lalu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti proses pembelajaran cara-cara mengolah sampah pada suatu penyuluhan ataupun praktik pengelolaan sampah yang sudah pernah

dilakukan oleh masyarakat. Faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu berupa hubungan individu tersebut terhadap lingkungan sosialnya, dalam hal ini berupa pemerintah/tokoh masyarakat yang berperan untuk menyebarkan informasi mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga memberi pengaruh kepada persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Bioarang (Alternatif Sumber Energi)

Kegiatan yang dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, memanfaatkan ranting pohon, dedaunan dan tempurung kelapa yang dimasak dalam drum bekas sehingga menghasilkan bioarang. Bahan baku yang disiapkan adalah sampah daun-daun kering dari pohon. Bahan tersebut dikumpulkan dan dibersihkan dari material-material yang tidak berguna seperti batu serta material logam lainnya.

Proses Karbonisasi Untuk mengarangkan bahan, dapat menggunakan drum bekas yang telah bersih. Ukuran drum minimal adalah tinggi 85 cm dengan diameter 55 cm. Drum tersebut terlebih dahulu diberi lubang-lubang kecil dengan paku pada bagian dasar agar tetap ada udara yang masuk ke dalam drum, atau bisa juga dibuat lubang pada bagian tengah alas drum (diameter lubang 25 cm). Selanjutnya seluruh bahan dimasukkan ke dalam drum dan api dinyalakan.

Activated Carbon (Nano Porus) Air Bersih

Definisi arang aktif (*activated carbon*) berdasarkan pada pola strukturnya adalah suatu bahan yang berupa karbon amorf yang sebagian besar terdiri dari karbon bebas serta memiliki permukaan dalam sehingga memiliki daya serap yang tinggi. Pada proses industri arang aktif digunakan sebagai bahan pembantu dan dalam kehidupan sehari-hari. Arang aktif semakin meningkat kebutuhannya baik didalam maupun luar negeri. Arang aktif memegang peranan yang sangat penting baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan pembantu pada proses industri dalam meningkatkan kualitas atau mutu produk yang dihasilkan. Banyaknya bermunculan proses industri didalam dan diluar negeri semakin banyak pula kebutuhan arang aktif, untuk itu semakin banyak peluang untuk memproduksi dan memasarkan arang aktif.

Permintaan yang sangat besar, baik domestik maupun internasional, maka tingkat persaingan dalam memproduksi arang aktif juga semakin membaik. Kompetisi pasar saat ini telah didukung dengan dikeluarkannya

Standard Industri Indonesia (SII) yang mencakup persyaratan-persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas produk arang aktif. Produksi arang aktif di Indonesia masih banyak dijumpai industri arang aktif secara tradisional, proses sangat sederhana atau disebut proses bergantian (*batch process*) dalam scale produces yang sangat kecil. Dan rendahnya kualitas, disebabkan oleh investasi Dan teknologi proses yang terbatas, namun pasar masih tetap menyerap produk tersebut. Bahan baku (*raw materials*) untuk memproduksi arang aktif di Indonesia tersedia sangat melimpah dan dapat diperbaharui (*renewable*), berupa limbah serbuk gergaji, limbah potongan-potongan kayu, limbah industri CPO kelapa sawit, tempurung kelapa, tanaman kayu hutan, aspal muda (*bitumen*) dan lain-lain.

Karbon aktif adalah salah produk yang bernilai ekonomis tinggi . Pembuatan karbon aktif belum banyak dilakukan padahal potensi bahan baku yang banyak dinegara kita. Tempurung kelapa sebagai bahan baku karbon aktif sangat besar, terlebih potensi pasar yang cukup menjanjikan. Karbon aktif adalah nama dagang untuk arang yang mempunyai porositas tinggi, dibuat dari bahan baku yang mengandung zat arang. Memiliki permukaan dalam besar mencapai 400-1600 m²/g karbon aktif dan memiliki volume pori-pori besar lebih dari 30 cm³/100 g. Pada dasarnya karbon aktif dapat dibuat dari semua bahan yang mengandung karbon. Pemilihan tempurung kelapa sebagai bahan baku karbon aktif atas dasar kualitas yang dihasilkan lebih baik dari bahan lain.

Proses Pembuatan Karbon Aktif dari bahan baku tempurung kelapa terbagi menjadi dua tahapan utama yaitu: Proses pembuatan arang dari tempurung Kelapa (karbonisasi) dan Proses pembuatan karbon aktif dari arang (aktivasi). Dalam tahap karbonisasi, tempurung kelapa dipanaskan tanpa udara dan tanpa penambahan zat kimia. Tujuan karbonisasi adalah untuk menghilangkan zat terbang. Proses karbonisasi dilakukan pada temperature 400-600 °C. Hasil karbonisasi adalah arang yang mempunyai kapasitas penyerapan rendah. Untuk mendapat karbon aktif dengan penyerapan yang tinggi maka harus dilakukan aktivasi terhadap arang hasil karbonisasi. Proses aktivasi dilakukan dengan tujuan membuka dan menambah pori-pori pada karbon aktif. Bertambahnya jumlah pori-pori pada karbon aktif akan meningkatkan luas permukaan karbon aktif yang mengakibatkan kapasitas penyerapannya menjadi bertambah besar. Proses aktivasi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu teknik aktivasi fisik dan teknik aktivasi kimia. Proses aktivasi fisik dilakukan dengan cara mengalirkan gas pengaktif melewati tumpukan arang tempurung kelapa hasil

karbonisasi yang berada dalam suatu tungku. Aktivasi kimia dilakukan dengan menambahkan bahan baku dengan zat kimia tertentu pada saat karbonisasi. Ada tiga jenis karbon aktif yang terbuat dari tempurung kelapa yang banyak dipasaran yaitu:

1. Bentuk serbuk. Karbon aktif berbentuk serbuk dengan ukuran lebih kecil dari 0,18 mm. Terutama digunakan dalam aplikasi fasa cair dan gas. Digunakan pada industry pengolahan air minum, industry farmasi, terutama untuk pemurnian monosodium glutamate, bahan tambahan makanan, penghilang warna asam furan, pengolahn pemurnian jus buah, penghalus gula, pemurnian asam sitrtat, asam tartarikk, pemurnian glukosa dan pengolahan zat pewarna kadar tinggi.
2. Bentuk Granular. Karbon aktif bentuk granular/tidak beraturan dengan ukuran 0,2 -5 mm. Jenis ini umumnya digunakan dalam aplikasi fasa cair dan gas. Beberapa aplikasi dari jenis ini digunakan untuk: pemurnian emas, pengolahan air, air limbah dan air tanah, pemurni pelarut dan penghilang bau busuk.
3. Bentuk Pellet. Karbon aktif berbentuk pellet dengan diameter 0,8-5 mm. Kegunaan utamanya adalah untuk aplikasi fasa gas karena mempunyai tekanan rendah, kekuatan mekanik tinggi dan kadar abu rendah. Digunakan untuk pemurnian udara, control emisi, tromol otomotif, penghilangbau kotoran dan pengontrol emisi pada gas buang.

Pembuatan activated karbon (nano porus) sama dengan membuat bioarang perbedaanya adalah bahan yang dimasukkan ke dalam drum bukan dedaunan, ranting pohon atau tempurung kelapa yang dimasukkan adalah sabuk kelapa (coconut husk) yang mana setelah dimasak kemudian menajdi seperti serbuk arang kemudian dimasukkan ke dalam kain yang memiliki lubang-lubang penyarigan, dimasukkan ke dalam air kotor, maka activated carbon akan berfungsi menyerap kototran dalam air sehingga air menjadi lebih bersih, apabila penyaringan terus dilakukan makan air tersebut dapat di minum sebagai kebutuhan sehari-hari.

Kompos

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami

penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan.

Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata persentase bahan organik sampah mencapai $\pm 80\%$, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Kompos sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat semakin tingginya jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menyebabkan terjadinya polusi bau dan lepasnya gas metana ke udara. DKI Jakarta menghasilkan 6000 ton sampah setiap harinya, di mana sekitar 65%-nya adalah sampah organik. Dan dari jumlah tersebut, 1400 ton dihasilkan oleh seluruh pasar yang ada di Jakarta, di mana 95%-nya adalah sampah organik. Melihat besarnya sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat, terlihat potensi untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Rohendi, 2005).

Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi pengomposan. Baik pengomposan dengan teknologi sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. Pada prinsipnya pengembangan teknologi pengomposan didasarkan pada proses penguraian bahan organik yang terjadi secara alami. Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi pengomposan saat ini menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah organik, seperti untuk mengatasi masalah sampah di kota-kota besar, limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan.¹⁸

Teknologi pengomposan sampah sangat beragam, baik secara aerobik maupun anaerobik, dengan atau tanpa aktivator pengomposan. Aktivator pengomposan yang sudah banyak beredar antara lain: PROMI (Promoting Microbes), OrgaDec, SuperDec, ActiComp, BioPos, EM4, Green Phoskko

¹⁸ Lilis Sulistyorini, *Pengelolaan Sampah dengan Cara Menjadikannya Kompos (Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1)*, 2005. hal. 77-84.

Organic Decomposer dan SUPERFARM (Effective Microorganism) atau menggunakan cacing guna mendapatkan kompos (vermicompost). Setiap aktivator memiliki keunggulan sendiri-sendiri.

Pengomposan secara aerobik paling banyak digunakan, karena mudah dan murah untuk dilakukan, serta tidak membutuhkan kontrol proses yang terlalu sulit. Dekomposisi bahan dilakukan oleh mikroorganisme di dalam bahan itu sendiri dengan bantuan udara. Sedangkan pengomposan secara anaerobik memanfaatkan mikroorganisme yang tidak membutuhkan udara dalam mendegradasi bahan organik.

Hasil akhir dari pengomposan ini merupakan bahan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan tanah-tanah pertanian di Indonesia, sebagai upaya untuk memperbaiki sifat kimia, fisika dan biologi tanah, sehingga produksi tanaman menjadi lebih tinggi. Kompos yang dihasilkan dari pengomposan sampah dapat digunakan untuk menguatkan struktur lahan kritis, menggemburkan kembali tanah pertanian, menggemburkan kembali tanah petamanan, sebagai bahan penutup sampah di TPA, reklamasi pantai pasca penambangan, dan sebagai media tanaman, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bahan baku pengomposan adalah semua material yang mengandung karbon dan nitrogen, seperti kotoran hewan, sampah hijauan, sampah kota, lumpur cair dan limbah industri pertanian. Berikut disajikan bahan-bahan yang umum dijadikan bahan baku pengomposan. Jenis-jenis kompos yaitu:

1. Kompos cacing (*vermicompost*), yaitu kompos yang terbuat dari bahan organik yang dicerna oleh cacing. Yang menjadi pupuk adalah kotoran cacing tersebut.
2. Kompos bagase, yaitu pupuk yang terbuat dari ampas tebu sisa penggilingan tebu di pabrik gula.
3. Kompos bokashi.

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari

tanah. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.¹⁹

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, seperti menjadikan hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek: Aspek Ekonomi: Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, Mengurangi volume/ukuran limbah dan Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya

Aspek Lingkungan yaitu Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah, Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Aspek bagi tanah/tanaman: Meningkatkan kesuburan tanah, Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, Meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, Meningkatkan aktivitas mikroba tanah, Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen), Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman dan Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah.

Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah di antaranya merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan menahan air. Peran bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitrogen dan transfer hara tertentu seperti N, P, dan S. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga memengaruhi serapan hara oleh tanaman (Gaur, 1980).

Beberapa studi telah dilakukan terkait manfaat kompos bagi tanah dan pertumbuhan tanaman. Penelitian Abdurohim, 2008, menunjukkan bahwa kompos memberikan peningkatan kadar Kalium pada tanah lebih tinggi dari pada kalium yang disediakan pupuk NPK, namun kadar fosfor tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan NPK. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman yang ditelitinya ketika itu, caisin (*Brassica oleracea*), menjadi lebih baik dibandingkan dengan NPK.

¹⁹ I Wayan Suarna. *Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan Dan Perdesaan*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, Pertemuan Ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, 3-6 September 2008.

Hasil penelitian Handayani, 2009, berdasarkan hasil uji Duncan, pupuk cacing (*vermicompost*) memberikan hasil pertumbuhan yang terbaik pada pertumbuhan bibit Salam (*Eugenia polyantha* Wight) pada media tanam *subsoil*. Indikatornya terdapat pada diameter batang, dan sebagainya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penambahan pupuk anorganik tidak memberikan efek apapun pada pertumbuhan bibit, mengingat media tanam *subsoil* merupakan media tanam dengan pH yang rendah sehingga penyerapan hara tidak optimal. Pemberian kompos akan menambah bahan organik tanah sehingga meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan memengaruhi serapan hara oleh tanah, walau tanah dalam keadaan masam.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor menyebutkan bahwa kompos bagase (kompos yang dibuat dari ampas tebu) yang diaplikasikan pada tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L) meningkatkan penyerapan nitrogen secara signifikan setelah tiga bulan pengaplikasian dibandingkan dengan yang tanpa kompos, namun tidak ada peningkatan yang berarti terhadap penyerapan fosfor, kalium, dan sulfur. Penggunaan kompos bagase dengan pupuk anorganik secara bersamaan tidak meningkatkan laju pertumbuhan, tinggi, dan diameter dari batang, namun diperkirakan dapat meningkatkan rendemen gula dalam tebu.

Dasar-dasar Pengomposan Bahan-bahan yang Dapat Dikomposkan. Pada dasarnya semua bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan, misalnya: limbah organik rumah tangga, sampah-sampah organik pasar/kota, kertas, kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri, limbah pabrik kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dll. Bahan organik yang sulit untuk dikomposkan antara lain: tulang, tanduk, dan rambut. Bahan yang paling baik menurut ukuran waktu, untuk dibuat menjadi kompos dinilai dari rasio karbon dan nitrogen di dalam bahan / material organik seperti limbah pertanian: ampas tebu dan kotoran ternak serta tersebut di atas. Bahan organik yang telah disusun oleh Sinaga dkk. (2010) dari berbagai campuran dengan nilai rasio C/N = 35,68 dan kondisi kandungan airnya 50,37%, waktu dekomposisi diperoleh terpendek 28 hari dibanding lainnya.

Proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan mentah dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan kompos

akan meningkat dengan cepat. Demikian pula akan diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat hingga di atas 50° - 70° C. Suhu akan tetap tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO₂, uap air dan panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan kompleks liat humus. Selama proses pengomposan akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30 – 40% dari volume/bobot awal bahan.

Skema Proses Pengomposan Aerobik. Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan oksigen) atau anaerobik (tidak ada oksigen). Proses yang dijelaskan sebelumnya adalah proses aerobik, dimana mikroba menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang disebut proses anaerobik. Namun, proses ini tidak diinginkan, karena selama proses pengomposan akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Proses anaerobik akan menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap, seperti: asam-asam organik (asam asetat, asam butirat, asam valerat, putrecine), amonia, dan H₂S.

Faktor yang memengaruhi proses Pengomposan. Setiap organisme pendegradasi bahan organik membutuhkan kondisi lingkungan dan bahan yang berbeda-beda. Apabila kondisinya sesuai, maka dekomposer tersebut akan bekerja giat untuk mendekomposisi limbah padat organik. Apabila kondisinya kurang sesuai atau tidak sesuai, maka organisme tersebut akan dorman, pindah ke tempat lain, atau bahkan mati. Menciptakan kondisi yang optimum untuk proses pengomposan sangat menentukan keberhasilan proses pengomposan itu sendiri.

Strategi Mempercepat Proses Pengomposan Pengomposan dapat dipercepat dengan beberapa strategi. Secara umum strategi untuk mempercepat proses pengomposan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Manipulasi kondisi/faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pengomposan, Menambahkan Organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan: mikroba pendegradasi bahan organik dan vermikompos (cacing) dan Menggabungkan strategi pertama dan kedua.

Hal sederhana yang dilakukan dalam pengomposan adalah membuat tempat sampah yang berjaring-jaring, sampahnya harus organik yaitu sampah dari pepohonan dan rerumputan, sampah yang dikumpul kemudian setiap hari di siram agar semakin cepat untuk larut atau ditambah mikroba juga boleh untuk mempercepat peleburan dedaunan dengan tanah. Kompos ini sederhana dan murah dilakukan serta manfaatnya bagi lingkungan alam sangat baik terutama untuk penyuburan tanah perkebunan. []

Daftar Pustaka

- Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gava Media, 1999.
- Anonymous, 1997. *Natural resource aspects of sustainable development in Indonesia*. Agenda 21. www.un.org. 8 November 2016.
- Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Daryanto dan Agung Suprihatin, Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gava Media, 1999.
- I Wayan Suarna. *Model Penanggulangan Masalah Sampah Perkotaan Dan Perdesaan*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, Pertemuan Ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, 3-6 September 2008.
- IPPTP. *Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Pupuk Organik*, Jakarta: Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. 2000.
- JICA. *Statistik Persampahan Indonesia*. 2008.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2007.
- Lilis Sulistyorini, *Pengelolaan Sampah dengan Cara Menjadikannya Kompos (Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1)*, 2005.
- Majid, M.I.A. *Restricting the use of plastic packaging. PRN 8099. Professional Bulletin of the National Poison Centre*, Malaysia. 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.
- Tchobanoglous, G., H. Theisen, dan S.A.Vigil. *Integrated solid waste management. Engineering principles and management issues* (McGraw Hill International Editions, New York), 1993.

Tchobanoglous, G., H. Theisen, dan S.A.Vigil. *Integrated solid waste management. Engineering principles and management issues* (McGraw Hill International Editions, New York), 1993.

Toinezyk, L. *Engineered fuel, renewable fuel of the future?* American Plastics Council, Arlington. 2006.

Trihadiningrum, Y., S, Syahrial, D.A. Mardhiani, A. Moesriati, A. Damayanti, Soedjono, 2005. *Preliminary evaluation on the management of a closed municipal solid waste disposal site in Surabaya City, Indonesia*. Proc. The 7th Symposium on Academic Network for Environmental Safety and Waste Management CSR and Education of Environmental Health and Safety. Tokyo, 19-21 September 2005.

Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) pada ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) di Kota Kediri

**FARTIKA IFRIQIA, PRIMA AYU RIZQI MAHANANI,
RATNA SA'IDAH, IBRAHIM BIN SA'ID**

STAIN Kediri, Indonesia
kalmanfartika@gmail.com

Abstrak: Pada tahun 2013, jumlah penderita anak-anak, remaja dan mahasiswa di Kota Kediri yang terkena HIV/AIDS naik tiga kali lipat lebih dibanding tahun sebelumnya. Pendidikan kecakapan hidup melalui pemberdayaan komunitas merupakan salah satu konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas ODHA di Kota Kediri menggunakan pendekatan Community Based Research melalui tahapan diagnose, rencana tindakan, tindakan, evaluasi. Metode yang digunakan adalah focus group discussion, ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan praktek. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup meliputi penyampaian nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai sosial, dan pelatihan keterampilan (membuat aksesoris, tempat hantaran, dan seni kulit telur). Program pada komunitas ODHA di Kota Kediri dapat meningkatkan pengetahuan, spiritual, keterampilan yang menghasilkan produk siap jual, sehingga mereka lebih percaya diri menatap kehidupan, mandiri, sejahtera, dan religious.

Kata kunci: Pendidikan kecakapan hidup, Komunitas ODHA, Community Based Research

Pendahuluan

Arus globalisasi telah memasuki semua sendi kehidupan di Indonesia. Perubahan-perubahan gaya hidup telah membentuk tipe manusia dengan gaya hidup modern yang telah membawa remaja dan orang-orang dewasa menuju kehidupan yang konsumtif dan memasuki pergaulan bebas. Masuknya globalisasi membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang berpengaruh pada bergesernya nilai dan norma yang semula

bersifat tradisional ke arah nilai-nilai yang dianggap modern. Dampak tersebut juga menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, salah satunya adalah HIV/AIDS.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan saat ini sudah menjadi epidemi global.¹ AIDS pertama kali dilaporkan di Los Angeles, Amerika Serikat, oleh Gottlieb dan teman-teman pada bulan Juni, 1981. Kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan tahun 1987 di Bali yaitu seorang turis asing, sedangkan kasus kedua dan ketiga juga turis asing yang meninggal di Jakarta pada tahun 1987. Kasus AIDS tahun 2014 terdapat 501.400 kasus HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS sudah terdapat di 32 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Penderita ditemukan terbanyak pada usia produktif, yaitu 15-29 tahun (usia remaja masuk di dalamnya).

Kota Kediri yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur juga mendapati warganya terkena HIV/AIDS. Pada tahun 2013, sejumlah anak-anak, remaja dan mahasiswa di Kota Kediri yang terkena HIV/AIDS naik tiga kali lipat lebih dibanding tahun 2012². Berdasarkan data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kota Kediri tahun 2014 terdapat 141 orang yang terkena HIV/AIDS, dengan perincian 98 orang terinfeksi HIV, dan 43 orang terkena AIDS, 89 orang laki-laki dan 52 orang perempuan, dari usia 0-4 tahun hingga > 60 tahun, dan penyandang terbanyak adalah usia 25 – 54 tahun sejumlah 115 orang, sedangkan kasus HIV/AIDS berdasarkan profesi terbanyak adalah 35 orang berprofesi wirausaha, dan 35 orang adalah ibu rumah tangga.³

Bila melihat data di atas, maka epidemi global HIV/AIDS juga berdampak pada kelompok usia kerja. Stigmatisasi sosial dan diskriminasi masyarakat karena kurang pemahannya masyarakat terkait HIV/AIDS. Keadaan ini pula mengubah orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS, menghancurkan prospek kerja dan karier, serta menghambat akses ke layanan kesehatan dan sosial lainnya. Penderita di Indonesia kebanyakan bekerja di sektor formal maupun informal. Mereka sangat bergantung pada pekerjaan tersebut untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarga. Bagi

¹ Klatt EC. *Pathology of AIDS. Version 18* (USA: Florida State University, College of Medicine; 2007).

² Jawa Pos, 20 Maret 2014, hal. 25.

³ Data statistik Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kota Kediri tahun 2015.

ODHA yang membuka statusnya di keluarga, lingkungan sekitar, maupun tempat kerjanya acapkali mengalami karantina, pengucilan, bahkan mengakibatkan dikeluarkan (PHK) dari tempat kerja, sehingga kehilangan pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan kaum ODHA sulit untuk bertahan hidup, karena selain melawan penyakitnya, rentan stress, putus asa dalam menghadapi diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan HIV/AIDS dalam keluarga juga berdampak buruk terhadap kualitas hidup, sehingga mereka enggan bergabung dengan kelompok masyarakat lain.⁴ Saat ODHA mengalami stigmatisasi sosial dan kondisinya tersebut, satu-satunya pilihan untuk memperoleh penghasilan adalah memulai usaha kecil secara mandiri.

Komunitas ODHA di Kota Kediri, antara lain Galery, Icis, Setulus Kasih, dan lain-lain. Banyak ODHA di Kota Kediri juga mendapat kesulitan dalam ekonomi, akibat membuka status sebagai penyandang HIV/AIDS, seperti di PHK, dikucilkan oleh masyarakat sekitar kediamannya. Komunitas ODHA Kota Kediri juga rutin mengadakan pertemuan setiap bulan. Akan tetapi pertemuan tersebut hanya berupa penyuluhan kesehatan dan pendampingan psikologis, seperti yang telah diungkapkan Heri bahwa “Selama ini setiap pertemuan maupun pelatihan tidak pernah dimulai dengan siraman rohani. Padahal 95% anggotanya beragama Islam. Mereka juga sangat rentan stress dan rasa putus asa.”⁵ Permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif melalui strategi dan program yang terpadu agar dapat memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Dukungan untuk memulai usaha sendiri merupakan strategi penting untuk meringankan berbagai beban masalah yang dialami ODHA dan anggota keluarga mereka. Hal ini pun dapat meningkatkan kelangsungan hidup mereka, serta memungkinkan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan dengan adanya perolehan pendapatan. Oleh sebab itu, atas keprihatinan yang menerpa penyandang ODHA, maka diperlukan sejumlah pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*) dengan cara antara lain 1) mengidentifikasi pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*) berdasarkan kemampuan peserta agar terwujudnya hasil, 2) mempersiapkan bahan untuk kegiatan pelatihan, 3) mempelajari, mengolah bahan menjadi

⁴ Toha Muhaimin. Kualitas Hidup Anak Remaja pada Keluarga dengan HIV/AIDS di Indonesia *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 5, No. 3, Desember 2010*, hal 131 - 138.

⁵ Wawancara. Heri, Wakil Ketua KPAD Kota Kediri. Kediri, 2 April 2015.

kreasi, mengemas hasil untuk siap dijual. Pendampingan komunitas ODHA di Kota Kediri melalui pendidikan kecakapan hidup ini, diharapkan mereka dapat hidup mandiri dan religius. Pendampingan ini juga sebagai salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kajian Teori

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan merupakan bagian dari aspek kehidupan yang harus dan pasti dijalani oleh semua manusia sejak kelahirannya, selama masa pertumbuhan dan perkembangannya sepanjang hayat. Bagaimana pun sederhananya kehidupan suatu masyarakat di dalamnya pasti terjadi proses pendidikan. Pendidikan berjalan pada setiap saat dan pada segala tempat. Setiap orang dari kanak-kanak hingga tua mengalami proses pendidikan melalui apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. Walaupun tidak ada pendidikan yang sengaja diberikan, secara alamiah setiap orang akan terus belajar dari lingkungannya.

Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia paripurna, yaitu membentuk peserta didik mempunyai sikap profesional, dewasa secara spiritual, emosional, intelektual, dan sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedang UU No: 20 Th 2003 Bab II Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik. Apabila dikaitkan dengan kecakapan hidup, maka pendidikan sebagai sistem yang pada dasarnya merupakan sistematisasi dari proses perolehan pengalaman.

Istilah kecakapan hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) lebih luas dari sekedar keterampilan bekerja, apalagi sekedar keterampilan manual. Jelaslah

bahwa yang perlu dibangun dalam pendidikan tidak hanya kemampuan akademis atau vokasional, tetapi justru lebih ditekankan pada sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan standar norma tertinggi. Oleh karena itu, secara filosofis pendidikan diartikan sebagai proses pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik, pengalaman belajar tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga siap digunakan untuk memecahkan problema dalam kehidupan yang dihadapi. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat mengilhami seseorang ketika menghadapi problema dalam kehidupan sesungguhnya.

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa yang akan datang, karena kecakapan hidup merupakan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia, serta mampu memecahkan persoalan hidup dan kehidupan tanpa adanya tekanan.⁶

Tahun 2001 Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan konsep pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*), yaitu suatu pendidikan yang dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, keberanian menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Pendidikan yang dapat disinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. Dengan bekal kecakapan hidup tersebut, diharapkan para lulusan akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari dan menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya.⁷

Indrajati Sidi menyatakan kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu menghadapi problema hidup dan

⁶ Syarifatul Marwiyah. Konsep Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup. *Jurnal Falasifa*. Vol. 3, No. 1, Maret tahun 2012, online, diunduh 31 Desember 2015, h. 82.

⁷ Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas, *Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Melalui Penguatan Kursus Dan Kelembagaan PNF* (Jakarta: Depdiknas, 2002)

kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya.⁸ Kendall dan Marzano menegaskan bahwa kecakapan hidup (*life skills*) telah menjadi salah satu hal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, termasuk peserta didik, agar mereka mampu berperan aktif dalam lapangan kerja yang ada serta mampu berkembang.⁹

Membangun kecakapan hidup seseorang adalah membangun sikap dan perilaku seseorang. Pada prinsipnya pengembangan kecakapan hidup adalah bagaimana seseorang dapat mengaktifkan dan menggerakkan semua nilai-nilai positif dan kompetensi yang dimiliki secara maksimal untuk diimplementasikan dalam mempertahankan hidup sehari-hari.¹⁰ Yang menjadi sasaran kecakapan hidup dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 2.1 *The Targeting Life skills Model*¹¹

Dari gambar ini, pada prinsipnya ada empat komponen pokok yang menjadi target pengembangan kecakapan hidup, yaitu daya pikir yang mencakup aspek kecakapan mengelola dan berpikir; perasaan yang terkait dengan kecakapan membangun hubungan dan mengembangkan perhatian

⁸ Indrajati Sidi. *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) melalui Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Based Education-BBE)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

⁹ John S Kendall dan Robert J. Marzano. *Content Knowledge: A Compendium of Standards and Benchmarks for K-12* (Colorado: Education Aurora, 1997)

¹⁰ Muhti, Senowarsito, Listyaning S. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Melalui *Child Friendly Teaching Model (Cftm)* Sebagai Dasar Membangun Karakter Siswa

¹¹ Hendricks, P. 1998. *Developing Youth Curriculum Using the Targeting Life Skills Model*. dalam <http://www.extension.iastate.edu/4h/explore/lifeskills.htm>, 2010

kepada orang lain; kecakapan yang menggerakkan kemampuan dalam bekerja dan belajar atau menolong orang lain; dan kesehatan mencakup kecakapan untuk bertahan hidup dan pengakuan terhadap eksistensi diri dalam lingkungannya.

Indikator-indikator yang terkandung dalam *life skills* tersebut secara konseptual dikelompokkan : (1) Kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skills*), (2) Kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*) atau kecakapan akademik (*academic skills*), (3) Kecakapan sosial (*social skills*), (4) Kecakapan vokasional (*vocational skills*) sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*specific skills*) atau keterampilan teknis (*technical skills*). Jacques Delor berpendapat pada dasarnya program *life skills* ini berpegang pada empat pilar pembelajaran yaitu *learning to know* (belajar untuk memperoleh pengetahuan), *learning to do* (belajar untuk dapat berbuat/bekerja), *learning to be* (belajar untuk menjadi orang yang berguna), *learning to live together* (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain).¹²

Indrajati Sidi menyatakan kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, dan dapat dipilih menjadi lima, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri (*self awarness*), yang juga disebut kemampuan personal (*personal skill*), (2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), (3) kecakapan sosial (*social skill*), (4) kecakapan akademik (*academic skill*), dan (5) kecakapan vokasional (*vocational skill*). Tiga kecakapan yang pertama dinamakan *General Life Skill* (GLS), sedangkan dua kecakapan yang terakhir disebut *Specific Life Skill* (SLS). Di dalam kehidupan nyata, antara GLS dan SLS, antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan akademis, kecakapan vokasional tidak berfungsi secara berpisah-pisah, atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi hanya peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional dan intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut di atas.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan

¹² Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. (Jakarta: Dirjen PLSP, 2003).

kemauan menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Jadi tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah mengfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Dengan demikian kecakapan hidup dapat dikatakan sebagai sebuah kemampuan membangun sikap, mental, dan kompetensi yang positif guna menghadapi realitas kehidupan.

ODHA dan HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.¹³ AIDS singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*¹⁴ merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia, karena virus HIV. Tubuh manusia mempunyai sel darah putih yang disebut sel CD4+. Fungsi CD4+ merupakan pengatur kegiatan kekebalan tubuh. Sel ini merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, dan jika jumlahnya berkurang, sistem tersebut menjadi terlalu lemah untuk melawan infeksi. Jumlah CD4+ dapat diukur melalui tes darah khusus. Jumlah normal pada orang sehat berkisar antara 500 sampai 1.500. Setelah terinfeksi HIV, jumlah ini biasanya turun terus.¹⁵

HIV ini merusak sistem kekebalan tubuh manusia karena merusak sel darah putih atau HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Tergantung ada atau tidaknya kuman yang harus dihancurkan, HIV yang masuk ke dalam tubuh menulari sel itu, dan kemudian menjadikannya tempat untuk membuat miliaran virus, ketika proses tersebut selesai, tiruan HIV itu meninggalkan sel dan masuk ke CD4+ yang lain. Sel yang ditinggalkan menjadi rusak, jika sel ini hancur, maka sistem kekebalan tubuh akan kehilangan kemampuan untuk melindungi tubuh manusia dari berbagai penyakit. Setelah perjalanan awal infeksi oleh HIV, penggandaan virus sangat cepat, ini berarti virus yang ada di dalam darah atau yang disebut *virus load* menjadi sangat tinggi, yang akan mengakibatkan defisiensi

¹³ Spritia. *Hidup dengan HIV/AIDS* (Jakarta: Yayasan Spiritia, 2009), h. 7.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 11.

kekebalan tubuh. Jadi AIDS muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh selama lima hingga sepuluh tahun. Sampai saat ini, penyakit HIV/AIDS belum dapat disembuhkan dan belum ditemukan obatnya. Kalau pun ada itu hanya menghentikan atau memperlambat perkembangan virusnya saja.

ODHA adalah singkatan dari Orang Dengan HIV/AIDS, sebagai pengganti istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa orang tersebut sudah secara positif didiagnosa terinfeksi HIV.¹⁶ Pada dasarnya, pencegahan positif bertujuan untuk memotong rantai penularan HIV dan meningkatkan mutu hidup ODHA. Pencegahan positif didukung oleh banyak pihak di seluruh dunia, baik oleh organisasi ODHA maupun oleh organisasi pemerintah dan LSM yang bekerja dibidang AIDS. Namun belum ada kesepakatan yang luas mengenai definisi pencegahan positif, setiap orang, komunitas maupun negara bisa membuat definisi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sendiri. Dengan demikian, inti pemahaman pencegahan positif diartikan sebagai upaya menyatukan pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan agar kesehatan dan mutu hidup ODHA menjadi lebih baik. Upaya-upaya pemberdayaan ODHA yang bertujuan untuk meningkatkan harga diri, kepercayaan diri dan kemampuan serta diimplementasikan di dalam suatu kerangka etis yang menghargai hak dan kebutuhan ODHA dan pasangannya. Tiga pilar pencegahan positif adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Meningkatkan mutu hidup ODHA
- b. Menjaga diri untuk tidak tertular HIV maupun infeksi lain dari orang lain
- c. Menjaga diri untuk tidak menularkan HIV kepada orang lain

Staretegi Pengabdian Masyarakat

1. *Menentukan lokasi.* Pengabdian ini mengambil lokasi di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur.
2. *Khalayak sasaran.* adalah salah satu komunitas ODHA di Kota Kediri, baik laki-laki maupun perempuan, yang diikuti oleh 20 orang dari berbagai kalangan, antara lain ibu rumah tangga, pekerja, mantan pegawai (di PHK), dan lain-lain.
3. *Tujuan kegiatan.* Pemberdayaan komunitas ODHA melalui pendidikan kecakapan hidup :

¹⁶ Yayasan Spiritia. *Pedoman dan Modul Pencegahan Positif* (Jakarta: The AIDS, 2012)

¹⁷ *Ibid.*

- a. Keberadaan komunitas ODHA tetap hidup tanpa mengalami kemunduran meskipun mendapat diskriminasi dari masyarakat.
 - b. Mendampingi komunitas dalam menjalankan fungsi dan peranan untuk meningkatkan keterampilan kecakapan hidupnya.
 - c. Mewujudkan komunitas ODHA menuju kemandirian, sejahtera dan religius.
4. Pendekatan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan CBR. Menurut Israel dkk,¹⁸ ada beberapa prinsip dalam menyelenggarakan CBR, yaitu
- a. Masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan identitas.
 - b. Berdasarkan kekuatan dan sumber daya di dalam masyarakat.
 - c. Memfasilitasi kemitraan kolaboratif yang menjunjung nilai kesetaraan dalam setiap tahap.
 - d. Mendorong terjadinya proses co-learning (belajar bersama) dan pengembangan kapasitas semua mitra
 - e. Memadukan dan mendapatkan keseimbangan antara pengembangan pengetahuan dan tindakan untuk saling memberikan manfaat
 - f. Menggunakan proses daur ulang untuk refleksi.
 - g. Menangani isu-isu lokal mendesak yang dihadapi oleh masyarakat dari berbagai perspektif.
 - h. Diseminasi hasil penelitian kepada semua mitra dan berbagi kesempatan untuk mendesiminasikan ke berbagai media publik.
 - i. Diorientasikan jangka panjang dan merawat komitmen untuk keberlanjutan.
5. Strategi kegiatan. Untuk mencapai strategi yang diharapkan, maka pengabdian ini melaksanakan:
- a. Membuat hirarki analisis tujuan.
 - b. Membuat analisis masalah
 - c. Menentukan visi, target, treatment, dan produk yang dihasilkan.
 - d. Menggunakan pendekatan *Community Based Research* (CBR) yang melalui tahapan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Melakukan diagnosa (*diagnosing*), yaitu melaksanakan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan, cara yang ditempuh dengan mengadakan diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara.

¹⁸ LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, *Community Based Research: Sebuah Pengantar* (Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel, 2015), h. 48-51

- b. Membuat rencana tindakan (*action planning*). Tim Pengabdian Masyarakat dan komunitas ODHA bersama-sama memahami pokok masalah yang ada kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tindakan dilaksanakan menyesuaikan dengan sumber daya yang ada.
 - c. Melakukan tindakan (*action taking*). Tim Pengabdian Masyarakat dan komunitas ODHA bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Tim dan anggota komunitas menentukan tempat dan waktu pelaksanaan.
 - d. Melakukan evaluasi (*evaluating*), Setelah masa implementasi (*action taking*), maka Tim Pengabdian Masyarakat dan komunitas ODHA yang mengikuti kegiatan tersebut melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi (pelatihan)
6. Kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan metode dalam bentuk pelatihan keterampilan melalui ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan praktek.
 - a. Ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara umum tentang pembuatan aksesoris, pembuatan tempat hantaran, dan seni kulit telur, dan pemasaran produk yang dihasilkan.
 - b. Demonstrasi digunakan untuk memberikan keterampilan langsung dalam pembuatan aksesoris (peralatan yang diperlukan, bahan baku kain dan pita, processing hingga barang siap jual), pembuatan tempat hantaran (peralatan yang diperlukan, bahan baku dari limbah kardus minuman, processing hingga siap jual), pembuatan seni kulit telur (peralatan yang diperlukan, bahan baku dari limbah cangkang kulit telur, processing hingga produk siap jual)
 7. Tanya jawab digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi oleh kedua metode diatas.
 8. Pelatihan yang ditujukan kepada komunitas ODHA dengan melibatkan seluruh peserta pelatihan.
 9. Melaksanakan pameran hasil karya peserta pelatihan dengan mengundang pula para stakeholder, antara lain Pemerintah Kota Kediri (Dinas Sosial), KPAD Kota Kediri, Ormas, dan Radar Kediri.
 10. Relevansi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bagi komunitas ODHA di Kota Kediri diharapkan:
 - a. Membangun kelompok ODHA sesuai dengan minat dan kemampuan yang berkelanjutan.
 - b. Mengembangkan kesadaran kolektif melalui pendidikan keagamaan

dan keterampilan.

- c. Membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama. dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan baik dalam bidang produksi, pemasaran, dan teknologi

Dengan demikian, kegiatan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Pengabdian pada Masyarakat pada komunitas ODHA di Kota Kediri akan menambah nilai-nilai keagamaan, keimanan, pengetahuan, keterampilan, dan jaringan ekonomi, sehingga dapat menambah penghasilan, hidup mandiri yang sejahtera dan religius.

Simpulan

Tim Pengabdian kepada Masyarakat telah melaksanakan berbagai pendampingan dalam meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*) komunitas ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Kota Kediri antara lain:

1. *Personal skills* : penyampaian nilai-nilai agama Islam; *thinking skills* : pendidikan kesehatan dalam perspektif Islam; *social skills* : penyampaian nilai-nilai social; *vocational skills* : mengadakan Pelatihan Membuat Aksesoris, Pelatihan Membuat Tempat Hantaran, Pelatihan Seni Kulit telur
2. Tanggapan peserta pelatihan dalam mengikuti kegiatan ini sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran selama kegiatan berlangsung sangat antusias mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan. Hasil pelatihan telah menambah pengetahuan dan pengalaman dan sampai dengan sekarang sehingga menambah penghasilan.
3. Pemberdayaan komunitas ODHA melalui pendidikan kecakapan hidup merupakan salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan komunitas ODHA di Kota Kediri menuju kemandirian, sejahtera dan religius.[]

Daftar Pustaka

- Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas. *Kebijakan Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Melalui Penguatan Kursus Dan Kelembagaan PNF*. Jakarta: Depdiknas, 2002.
- Djoerban, Zubairi. *Membedik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA*. Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Hendricks, P. *Developing Youth Curriculum Using the Targeting Life Skills Model*. dalam <http://www.extension.iastate.edu/4h/explore/life-skills.htm>, 2010.
- Kendall, John S dan Robert J. Marzano. *Content Knowledge: A Compendium of Standards and Benchmarkes for K-12*. Colorado: Education Aurora, 1997.
- Klatt, E. C.. *Pathology of AIDS*. Version 18. USA: Florida State University, College of Medicine, 2007.
- Laurence J. 2006. *Hepatitis A and B Virus Immunization in HIV Infected Persons*. AIDS Reader.
- LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, *Community Based Research: Sebuah Pengantar*. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel, 2015.
- Muhdi, Senowarsito, Listyaning S. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Melalui *Child Friendly Teaching Model (Cftm)* Sebagai Dasar Membangun Karakter Siswa. ipi7012.pdf. diunduh tanggal 1 Januari 2016.
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Memulai Bisnis Sendiri Bagi Kelompok Rentan, Email: Jakarta@ilo.org , Website: www.ilo.org/-jakarta.
- Pardita, Dewa Putu Yudi. Analisis Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Penderita Hiv Aids Di Kota Denpasar. *Tesis on line*. Denpasar : Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2014.
- Prapti Karomah, Marwati dan Kapti Asiatun Kesiapan Masyarakat Code Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Dengan Memanfaatkan Limbah Industri Sebagai Cinderamata Khas Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*, No. 2, Desember 2007, h. 16-23

- Sarikusuma, Hasna, Nur Hasanah□, dan Ika Herani. Konsep diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang menerima label negatif dan diskriminasi dari lingkungan social. *Psikologia-online*, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 29-40
- Sidi, Indrajati. *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) melalui Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Based Education-BBE)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Syarifatul Marwiyah, Konsep Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup, *Jurnal Falasifa*. Vol. 3 , No. 1 Maret 2012, h. 75-97
- Toha Muhaimin. Kualitas Hidup Anak Remaja pada Keluarga dengan HIV/AIDS di Indonesia *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 5, No. 3, Desember 2010, hal 131 - 138.
- UNAIDS. *The Impact of AIDS on People and Societies*. Report on The Global AIDS Epidemic, 2006
- Yayasan Spiritia *Pedoman dan Modul Pencegahan Positif*. Jakarta: The AIDS, 2012.
- Yayasan Spritia. *Hidup dengan HIV/AIDS*. Jakarta: Yayasan Spiritia, 2009.

English Training for the Productive Age Society in Janggalan, Kudus

MUH SHOFIYUDDIN

Islamic University of Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, Indonesia
shofiyandida12@gmail.com

Abstract: In facing globalization and ASEAN Economic Community, English is urgent to be used in working necessity in Indonesia. That's why the writer tried to find the way how to help people in meeting this urgency. Then the writer hold such effective English course for those who are in 18-25 years old in Janggalan Kota Kudus. The course is aimed at: (1) providing English training to the people concerned to meet the demands of employment; (2) helping to improve human resources in Janggalan; (3) driving the spirit of productive age community in Janggalan to work harder; (4) starting English training implementation for free in Janggalan, and (5) being a community engagement program. The course's learning process is by using 30% speaking, 30% writing, 20% listening and 20% reading with 50% English language using in teaching. This program has been proved quite effective. The participants who were almost totally unable to understand and use English, at the end they could obtain an average score of 66.33. Although it is not too high, it shows conclusion that they are capable enough to understand and use English after joining the program. This program is very useful to help people in productive working age to master English in order to get a proper job so as to help the government in reducing unemployments.

Keywords: Community engagement, English course, productive age society.

Introduction

The use of English today is not a language of a trend or just an additional language, but at this point English has become the most important language of the world. It become a necessity that cannot be separated from almost all citizens over the world, especially Indonesian. The importance of English is proven by the use of English as a compulsory subject in Indonesia

and used in national examination¹. Besides, Baswedan² stated “*penguasaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris sudah menjadi suatu hal penting dan keharusan dimiliki para siswa untuk bisa bersaing mendapatkan pekerjaan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.*” The statement says that English that must be mastered by every person in Indonesia.

In the globalization era, Indonesian must interact to other citizens in direct or indirect communication, especially in dealing with MEA (ASEAN Economic Community). Consciously or unconsciously, nearly 100% of them use English to interact among citizens from different countries. In addition, mostly all products, technology, information, and everything coming from abroad also facilities offered by citizens from other country use English.

In fact, nowadays English has been absolutely one of the requirements of jobs. It is proved that English has been used by all companies, government agencies or private institutions, or even entrepreneurs both home and abroad as a condition to fulfill the jobs offered. Baswedan³ expressed “*Era global termasuk di MEA menjadikan penguasaan bahasa asing menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki siswa sebagai calon pekerja atau pengusaha. Tanpa keterampilan bahasa itu dipastikan akan sulit bersaing*”. It is like what the writer has found 30 samples of jobs taken randomly from some media on internet as survey, the list factually showed that the whole companies or agencies offered job vacancies for people in the productive age work who master the English language both from undergraduate program and senior high. It is also proven by Abdullah⁴. He is a citizen graduated from high school. When he applied for a job in one of major companies in Kudus, he was interviewed in English, then he was rejected because of being not able to answer the questions given to him and could not interact in English even though the terms of acceptance had been acceptable. Similarly, it illustrates that currently English has become a real necessity that must be mastered by

¹Muh Shofiyuddin. “*Improving Speaking Skill of the Tenth Grade Students of MAN I Kudus in Academic Year 2020/1011 by Using Dubbing and Role-Play.*” (SPd Thesis, Muria Kudus University, 2011), 1.

² Achmad Fauzi,, “Mendikbud: Penguasaan Bahasa Asing Jadi Keharusan Siswa,” *Indonesian Times*, January, 10, 2015, accessed June 26, 2016, <http://wartaekonomi.co.id/berita41-782/mendikbud-penguasaan-bahasa-asing-jadi-keharusan-siswa.html>

³Fauzi, “Mendikbud: Penguasaan Bahasa Asing Jadi Keharusan Siswa.”

⁴ One of Janggalan people in productive age.

everyone who wants to work in a company or agency although they are only able to use receptive English.

On the other hand, there are many people or companies in Indonesia or abroad use English as a daily spoken language. The demands of corporate management that requires every worker must master English properly and correctly, either in writing or speaking. Thus, we should be able to socialize on the application of English to public in order to live in Indonesia, especially in the productive working age. 18-25 years old are the ages of productive community; and be used as minimum and maximum thresholds in terms of jobs in reality often offered. However there are still many of them are unemployed around us. It is not absolutely because they are too lazy to find a job or do not want to work, but they do not get the job or are rejected. The difficulty of selection in getting a job could be because the majority of them cannot meet the entry requirements requested by a company or a related agency. One of them is being able to use English. Sometimes they want to learn English by following a course, but we do know that the cost of the course is now very high. Then what can we do? They are in the middle or lower of economic level.

By these realities in life and our minds, an engagement program of community in the form of "English training for people in the productive age" is potential to address the problems that they experience, by giving them skills and English competence to the people in productive age of work for free. It will help them solve their problems to get more chances on getting job. So that they will get a better job and will not become unemployed again. Furthermore, it is also expected to help the government to reduce the amount of unemployment that has proliferated in our country. In this case the writer chose community of Janggalan Kudus as the objects.

Statements of the Problem

Based on the background, the problems of this community engagement program are:

1. Is an English training program able to help people in productive age of Janggalan village master English?
2. How can an English training program help people in productive age of Janggalan master English?

Objectives of the Program

The goals to be achieved in this community engagement program through a free course are:

1. To know whether an English training program able to help people in productive age of Janggalan village master English?
2. To know how an English training program help people in productive age of Janggalan master English?

Benefits of the Program

Training activities by community engagement entitled "English Training for the Productive Age Society in Janggalan Kota Kudus" is expected to generate productive working age of Janggalan people for being eligible to get a job, in which majority of jobs using English as the main requirement. Through this activity, people can acquire skills and abilities to communicate by using English, so that it can help them as a basic capital to get a job.

This activity is also expected to give a recommendation to the government of Kudus particularly, to conduct similar activities in places that are still vulnerable to unemployment. It is as efforts to tackle unemployment and to reduce its amount that is increasingly growing in our country. Furthermore, this activity is expected to be continued after this program ends.

Besides, the benefits of this program are:

1. For Janggalan Government; to help improving the community resources available for work in Janggalan in order to find employment, thereby helping to reduce unemployment in the village Janggalan Kota Kudus; and to initiate the implementation of free English training for productive age people in Janggalan.
2. For the Community; providing a free English training for the people; and being able to help people acquire knowledge, skills, and English skills so that they have a basic capital, more opportunities and easier to be accepted in an institution or company.
3. For institutions and companies; to be able to help preparing qualified workers who are able to speak in English.

Review to Related Literature

Community Engagement

Community engagement is an activity undertaken to assist communities to develop or increase the development, independence and the ability of people's performance in order to improve the welfare and the nation. As stated in Permendikbud number 49 of 2014 "*Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*"⁵. Noor⁶ also said "*Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.*" In this case, community engagement activities deemed necessary to be done to help people of Janggalan Kota Kudus improve English proficiency in order to enhance the resources and the welfare of the people's concerned.

Community in Productive Age of Work

Productive is the resulting in or providing a large amount or supply of something⁷. Meaningly, productive age is the age when a person is able to work and produce something. So the definition of "persons in productive age" is people who are in the age having ability to produce. In this case the point meant is jobs. In the labor law number 13 In 2003, they were classified as workers, in the age between 15 years to 64 years.

It can be concluded that people in the productive age of work are people who are in the age between 15 to 64 years who are able to work and produce something. In this community engagement activity, the author chose people in the age of 18 to 25 as a trainee by those ages which become the minimum and the maximum of most jobs offered by companies or agencies.

⁵Permendikbud. No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

⁶ Muhibbin, "Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangannya Dalam Otonomi Daerah (Alternatif Melalui KKNT)" *Indonesian times*, November 1, 2010, accessed June 26, 2016, <http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=23&page=1>

⁷ Cambridge English Dictionary & Thesaurus, accessed June 25, 2016. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/productive>

English Teaching

Traditionally, teaching is defined as showing or helping someone to learn how to do something, giving instructions, guiding in the study of something, providing with knowledge, causing to know or to understand⁸. No definition is very simple and does not regard the role of learner who is learning.

The purpose of English Learning in Indonesia as noted in *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22/ 2006* about Content Standard of Elementary and Intermediate level is to make the students develop the four language competence (reading, writing, listening and speaking). It is in order to make them literate and communicative in certain level of literacy⁹.

Dixson¹⁰ notes at an International Seminar organized by UNESCO (United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization) to discuss the teaching of modern languages, the general principles were subscribed to by the majority of the delegates. Further he mentioned principles as follows:

1. The approach – to the teaching of all foreign languages – should be primarily oral.
2. Active methods of teaching should be used as far as possible.
3. The greatest possible use of the foreign tongue should be made in the classroom.
4. The difficulties of the foreign tongue in the matter of pronunciation, vocabulary, and grammar should be carefully graded for presentations.
5. The teaching of a language should be considered most as the imparting of a skill than as the provision of information about the forms of the language.

It means that in teaching English, the teacher has to consider about: oral activity that is more emphasized than writing activity in learning English, active learning, classroom activity, attention of pronunciation,

⁸ H. Douglas Brown. *Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Second Edition. (San Francisco: Longman, 2001), 7.

⁹ Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

¹⁰ Robert J. Dixson. *Practical Guide to the Teaching of English as a Foreign Language*. (New York: Regents Publishing Company. Inc., 1960), 5.

grammar, and vocabulary, and the enhancement of the four language competence. Thus, in this program, the participants did not only learn about written language but also spoken language by practicing in the learning process. Beside, spoken was used around 50% in the process.

Implementation and Results

The Timeline of Program Implementation

This community engagement program is implemented within a period of three months. Before implementing the program, it was preceded by a survey realized two weeks before the day of training. It was intended to determine the number of citizens who needed English skills and ability training to follow the training. The survey was conducted by logging the number of people who are in the productive age of work and where the average economic ranking was. Besides, it included data collection about the work of the majority of the community. After conducting the training, it was completed with reporting and submission of recommendations to the government within two weeks after the training is completed.

Schedule of the Program Activities

Schedule of the program activities are as follows:

No	Agenda	Time Schedule															
		1st Month				2nd Month				3rd Month				4th Month			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Preparation + Survey	■	■														
2.	Publication	■	■														
3.	Learning Process			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Evaluation																
5.	Reporting + Recomendation														■	■	■

The Target of the Community Engagement

The chosen community for this community engagement program by English training was people in the productive age of work of Janggalan Kota Kudus who were productive and still in searching jobs. Productive age of work here means 18-25 years old. Those ages are ages which are most often required to fill job offered in the companies or agencies. On the other hand

they are the people who are still vulnerable to unemployment, because they cannot meet the requirements which are something of jobs offered, in this case should be able to use English.

Besides, the majority of the community are in the middle-ranking economy on the day of conducting this program, so they could not acquire English skills through a course, because the cost of the course was getting higher.

Kudus is a small town that is so productive, in the sense that it has become part of the industrial city in Indonesia, it is proven many big and small companies in Kudus. Then, English has become a necessity in getting a job in Kudus particularly and the whole parts of Indonesia generally.

The reason for selecting the object and the target number was based on the state of human resources, economic, and also based on the consideration of the allocation of funds. The people selected was assumed to be more in need of English to find employment.

In this case, the writer chose Janggalan Kota Kudus as an object to carry out the community engagement program in the hope that this activity would be able to help the community concern particularly to meet the demands of jobs. It was done so that they would get more value and competent in using English as well as get a better chance to be able to work in a company or agency.

Implementation of the Program

In this community engagement program, the writer decided to use the naturalistic approach, which according to Lindeman¹¹ is “Adult education will become an agency of progress if its short-term goal of self-improvement can be made compatible with a long-term, experimental but resolute policy of changing the social order”. Thus, adult learning techniques is learning how to make learning processes in tune with the real life. The activity was carried out with the shape of fun activities.

1. Meeting Agenda in the Activity

This English language training activities was carried out in the form of a training activity of English for people in productive age of Janggalan Kota Kudus. The program covered the following agendas:

¹¹ Edward C. Lindeman, *What is adult education?* Unpublished manuscript, (New York: Columbia University, Butler Library Lindeman Archive, 1925).

- Deliberating preparation and implementing publication
- Opening ceremony
- Learning activities
- Closing Ceremony
- Reporting and Submission of Recommendations.

2. *Activities the Implemented in the Program*

The activities carried out under this program entirely with details of activities as follows:

- a. Agenda : Deliberating preparation and implementing publication
- Place : Janggalan hall Kota Kudus
- Time : 2 weeks before training
- Activity : Deliberating and Publishing Brochures
- Participants : Janggalan People
- Guest : Local government and socialite of Janggalan
- Total : 40 people
- Result : the government and people Janggalan people support the implementation of community engagement by English training for people in productive age in Janggalan Kota Kudus.
- : the government and Janggalan people wanted to help to distribute and to share the brochure.



Pictures 1. Opening ceremony.

- b. Agenda : Opening Ceremony
- Place : a house of Janggalan people
- Activity : Ceremonial
- Time : before the training process started
- Participants : Janggalan people
- Guest : Local government and socialite of Janggalan

- Result : opening formally the training activity.
- c. Agenda : Learning process
 Place : a house of Janggalan people
 Activity : Learning
 Time : 3 months (3 times in 1 week)
 Participants : 29 people (in and around Janggalan)
 Result : the participants could follow the learning process and were able to use spoken and written English.
- d. Agenda : Closing Ceremony
 Place : a house of Janggalan people
 Activity : Ceremonial
 Time : the last meeting of learning process
 Participants : Janggalan people
 Guest : Local government and socialite of Janggalan
 Result : Learning process was formally ended
- e. Agenda : Reporting and Submitting Recommendations
 Place : Sending it to DIKTI then Delivering it to Janggalan local government
 Time : After the community engagement program.

Results of the Program

As the formulations of the problem in the program are " Is an English training program able to help people in productive age of Janggalan village master English?" and "How can an English training program help people in productive age of Janggalan master English?" to meet the demands of field that the majority of job vacancies use English as the main condition for being accepted in companies or agencies. It is the hope that Janggalan people would be able to get more values and competences in using English as well as to get a better chance to be able to work in a company or agency. In this case, it was particularly at the time of interview. On the implementation of the program followed by Janggalan people in the productive age of work. The number of participants on the implementation of this program previously was 50 participants, but in fact learning interest of people in the productive

age is different from people in school ages. Then, a result showed that this program could only be attended by 29 people.



Picture 2. Preparation activities with the socialite and local government

In applying this community engagement program by English training to people, the writer used a course activity as a means to help the Janggalan people in the productive age. The technique used in the learning process tended to use collaborative learning. The writer assumed that collaborative learning is a great way for the training program. In the end, the program could run in accordance with the previous plans of methods, techniques, and schedule. This program has produced some of the community in the productive age of work to be able to use and understand English in the form of conversations and written. It is shown by the practice and exam form of Writing, Listening, Reading, and Speaking applied in the end of the learning activities.

The meeting of learning program was held three times a week, on Monday, Tuesday, and Wednesday evening that had 2 hours for each meeting as the appointment in the preparatory meetings. Besides, collaborative learning technique was applied in the learning process as being planned earlier. The process of delivering the material in the first month used 30% English. In the second part, materials delivery increased by 50% to try to use English in the learning process. Alhamdulillah, on this stage the participants could absorb what was presented in the learning. Then in the third month, the levels of using English in the delivery of materials increased to 85%. At first, the participants had a little trouble in understanding the material presented. But by the time goes away, eventually they can catch what was explained to them in the learning process. In addition they must have tried to speak and to ask to use English as in the implementation of classroom lesson. While, the classroom was set as English area, where both the participants and

the teachers must have used English in communication, at least while in the classroom. The writer also wrote "No English No Service" in the classroom, as they would get punishment like memorizing irregular verbs, explaining a material (which they can), and singing a song (English song) if they were deliberately not to use English in class or during the learning.



Picture 3. The photo was taken when the participants were giving speech.

The implementation of this program has been implemented 100%. There were some materials that need to be added, namely passive voice, conditional sentence and wishes. In addition, the agenda of the speech program was attended by an English native speaker from American named "Mark Sullivan" for two (2) meetings while he lived in Kudus for several weeks. That happened purposively to give more spirit to the participants in practice by talking directly to English native. So that participants want to practice their English speaking in their daily lives. In the meeting, Mark Sullivan also helped the writer to convey materials and provide motivation more to the participants to keep the spirit in participating in the training program and want to practice it outside the meeting so that they can improve their English language skills more effectively. This program provided certificates to the participants, along with a use-value as a measurement of basic ability for participants to speak English. In addition, the certificate can also be used as a supporting material at the time of applying for jobs for the participants.

Based on the point of this program, it was an activity program to provide English provision to community in the productive age of work, especially in the field of speaking. That is because now a lot of companies require applicants who master English. Similarly, the evidence is proven by the interview. Kudus today is frequently visited by foreigners, then even if only as a shopkeeper or cashier they are expected to be able to speak English

even though by basic English. Especially for those who want to go abroad and work in a big city such as Jakarta, Surabaya, etc. The program was also intended to encourage and to give stimulus to the participants to learn and improve their English so that human resources in villages, in Janggalan Kota Kudus especially and in our country generally can be increased and better. Certificates given to the participants were only as a benchmark for their abilities. That was because the cost was not adequate for the manufacture of an official certificate (with permission). At least they were getting supplies in English, and if they wanted to get official certificates, they can easily follow a program of an official agency of English because they have got the skills in the program.



Picture 4. Mark (an American) help the writer to convey the materials and give more motivation to the participants to practice English.

The Presented Materials

As being mentioned above that the activities of this program would be implemented for 3 months with the frequency of meetings, 3 times in one week that lasted 2 hours in one meeting. The composition in learning used: 30% speaking, 30% writing, 20% listening and 20% reading with the delivery of an average of 50% in English. while the material presented is: introduction, greeting, giving and asking direction, description, expression, giving opinion, retelling story, free conversation, dialogue, speech and discussion, part of speech, tenses, modal auxiliary, gerund, preference, tag question, direct-indirect, relative pronouns, writing a letter, listening music, listening cassettes dialog, watching movies, reading text, as the materials are basic materials and principal in the mastery of the English language. Meanwhile, in the training process, as being noted earlier, that every meeting was divided into two parts, the main class and tutorial class.

In accordance with agreement of the schedule, the activities in the learning process in the community engagement program "English Training for The Productive Age Society in Janggalan Kota Kudus" are as follows:

Table 1. The Daily Class Schedule of the Program

Meeting	Main class (1)	Tutorial class(2)
1	Making Rules + Alphabet	Introduction + Greeting + Asking Situation
2	The parts of speech = Noun + Adjective	Practice
3	Pronoun + Preposition	Giving and asking Direction
4	Verb + Adverb	Practice
5	Conjunction + Interjection	Memorizing Some Verbs and Expressions
6	Tenses = Simple Present + Simple Past	Retelling Story 1
7	Present Continuous + Past Continuous	Writing Evaluation
8	Present Perfect + Past Perfect	Colors
9	Present Perfect Cont + Past Perfect Cont	Memorizing Some Verbs and Expressions
10	Simple Future + Past Future	Number = Cardinal + Ordinal
11	Future Cont + Past Future Cont	Listening 1
12	Future Perfect + Past Future Perfect	Number = Mathematic
13	Future Perfect Cont + Past Future Perfect Cont	Free Conversation
14	Evaluation of Tenses	Memorizing Some Verbs and Expressions
15	Reading a Text	Retelling Story 2
16	Modal Auxiliary	Writing Evaluation
17	W H Questions	Date + Month + Day
18	Question Tag	Memorizing Some Verbs and Expressions
19	Gerund	Time
20	Reading a Text	Listening 2
21	Writing a Letter	Describing People and Others
22	Preference	Giving + Asking Opinion

Meeting	Main class (1)	Tutorial class(2)
23	Conditional sentence	Tell me about your dream!
24	Reported Speech I	Memorizing Some Verbs and Expressions
25	Reading a text	Retelling Story 3
26	Reported Speech II	Writing Evaluation
27	Relative Pronoun	Dialog
28	Passive Voice	Whishes
29	Writing a Letter	Memorizing Some Verbs and Expressions
30	Evaluation	Evaluation
31	Evaluation	Evaluation
32	Evaluation	Evaluation
33	Evaluation	Evaluation

Program Implementation Phase

This community engagement program was implemented by the total overall time for 4 months, which was divided into preparation and surveying, publications and collecting data, implementation of learning, program evaluation, and reporting. Specifically for the implementation of training, it took 3 months.

1. Preparation and survey

This stage was done on 10 days of the beginning of the first month on the implementation of this community engagement programs in order to determine the condition and the situation of the target and the adjustment program implementation. In preparation activities and the survey, the writer had been getting rave reviews from the village government and local people. The government and people there supported this activity by helping the preparations the writer needed; they also helped the writer in the stage of collecting data collection as required.

2. Publications and Data Collection

Publication was carried out at the same time as the preparation and survey. On the implementation of publication, the writer invited 30 Janggalan people (candidates or targets), the government, and some of the Janggalan socialite. This activity was done in order to determine who participated in these activities with number of them.

Before conducting the program, the writer needed to collect data of people who will attend the training program. This was done by using the primary data and interviews to the headman and socialite in Janggalan. From all the data that had been collected from the number of residents

who were in the productive age, the results of the data collection were taken to the publication for registration. Number of the community related to the entire village area, Janggalan. After that, there were only 30 people of candidates who wanted to join the training program. However, there was one of them, who resigned. It was probably due to the interest and enthusiasm for learning of productive age population working less than the community at school age.

3. Implementation of Training Programs

The program was carried out after preparation, surveys, publications, as well as the determination of the participants. Learning program started by the event of opening ceremony in the middle of the first month. On this occasion was attended by the village chief and his staff, people around the implementation place, and participants of the program. In the opening ceremony the writer conveyed some information, i.e. about the program objectives, frequency and timing of the training program, the materials to be delivered, and the technique of delivery. Then, this agenda was followed by the implementation of the program in the next meeting until the middle of the last month.

In the implementation of the program, the learning activities were conducted for three months carried out with a frequency of 3 times a week that lasted for two hours. Each meeting consisted of the main class for 75 minutes which contained materials subject, on the main points of English as the use of grammar, arranging of correct sentences, and others, and tutorial classes (additional class) for 45 minutes with evaluations in it consisting of writing in the form of questions and composing, reading a provided text, free conversation with a way to practice speaking in front of the classroom by delivering speech or talk to the other participants, either listening used tapes of conversations, music, or using video.

4. Analysis of Program Success

From a description and note of the results the writer made above, it can be said that the ability to use English, especially, the community of the village in productive age of work could be improved through the process of giving the course. Moreover, the provision of free courses due to the economic level of the community and their lack of interest need encouragement from the outside.

From the implementation of training programs, it was found some results from the program. Some data collection and analysis were conducted to determine the success and the benefits derived from the

English training on community engagement program to the community in productive age of work in Janggalan. The results of collecting data from this program were taken from the participants. The analysis was done by the recapitulation of the attendance lists. Since it was considered that the activity of a participant could be seen from the discipline of the person, and the activeness of the participant or the object was very influential in the success to be able to master and use the English language were delivered. In addition, the object of the activity was also good or bad effect the results of the training that the writer carried out.



Picture 5. These pictures show about the condition of learning process.

Activeness analysis of participants was not only done through the attendance list, but was also done through the activity during learning activities. It was applied during the learning process.

In the final stages of collecting the data, collecting data was done through evaluation tested to the participants who performed well through writing and practical skills such as interview, retelling stories or speaking, listening and reading. It was in which performed well at the end of the learning activities as well as on evaluations conducted several times during training and learning took place. The recapitulation of the values as follows:

Table 3. Recapitulation of Evaluation of Learning Result in English Training for Age Productive People of Janggalan Kota Kudus

No	Initial	Test i	Test ii	Test iii	Test iv	Test v	Test vi	Test vii	Total	Avg
1	ASB	75	75	65	85	74	79	80	533	76.14
2	SA	83	67	77	78	75	60	67	507	72.43
3	NK	80	76	76	76	82	76	78	544	77.71

No	Initial	Test i	Test ii	Test iii	Test iv	Test v	Test vi	Test vii	Total	Avg
4	KAN	65	65	62	64	71	58	72	457	65.29
5	KAD	60	60	67	65	58	64	65	439	62.71
6	AL	70	72	60	74	65	63	70	474	67.71
7	RC	73	75	70	73	68	80	78	517	73.86
8	AK	80	62	55	64	72	65	58	456	65.14
9	SH	92	83	80	80	75	78	84	572	81.71
10	NU	70	65	67	72	68	70	75	487	69.57
11	MAM	69	55	59	60	63	57	62	425	60.71
12	JW	71	64	70	75	68	74	70	492	70.29
13	AT	67	56	69	70	70	67	63	462	66.00
14	AH	55	47	77	58	55	63	56	411	58.71
15	NS	50	45	55	48	53	47	60	358	51.14
16	LMD	61	56	68	67	70	72	61	455	65.00
17	MCU	52	49	55	54	47	50	62	369	52.71
18	AN	50	47	67	65	60	65	63	417	59.57
19	SA	70	67	60	72	68	73	69	479	68.43
20	SI	60	53	77	65	66	59	60	440	62.86
21	AI	71	62	64	70	67	60	65	459	65.57
22	MR	70	60	72	73	65	66	60	466	66.57
23	AF	75	68	70	76	73	69	75	506	72.29
24	ZCN	60	59	55	58	65	64	58	419	59.86
25	EFK	61	58	70	65	65	63	60	442	63.14
26	NF	65	59	65	50	62	70	65	436	62.29
27	MUA	71	70	71	75	70	82	84	523	74.71
28	K	70	67	69	70	74	68	71	489	69.86
29	AM	93	85	82	83	80	86	85	594	84.86
		I	II							
TOTAL		1,989	1,827	1,954	1985	1949	1948	1976		
AVERAGE		68.59	63.00	67.38	68.45	67.21	67.17	68.14		

The application of this learning program was attended by 29 people. In the first month only 24% of participants had little basic proficiency in English while the rest had not been basic English or commonly said as starting from zero.

In the second month, all participants experienced a slight increase from the original only 24% of all participants were able to understand and use basic English to 40% were on a good level in terms of eligibility and master the material presented. While 32% were on moderate level which means they could follow and understand the material presented,

though not so good. Then, 28% remained on less levels meaningfully that they were not so able to understand and follow the learning program.

In the third month or last month, participants on good level of the previous 40% of all participants increased into 48%. Then the participants were on a moderate level were in 36%, and the rest or 16% remained on a less level. These rates illustrate that learning activities can be followed by most of the participants.

5. Evaluation

The evaluation was conducted within the learning programs as well as at the end of the program. In the evaluations having been conducted, it states that the implementation of the learning program on English skills and mastery for the community or participants always increased from the beginning until the end of the implementation. Even though there were still some who had not been able to follow the training materials properly, as described above.

In carrying out this training, the writer had a problem. It was the interest in learning of the community in productive age or the participants were in getting ups and downs. So the writer had a little confusion on deciding of the participants.

Conclusion

After the writer observed an increase of English competence and skills of Janggalan people in the productive age through a course or training and got the final result of the participants' exercise during English training, it can be concluded as follows:

1. English language training to people in the productive age of work of Janggalan Kota Kudus can help such communities to improve their ability to use English.
2. English training to people in productive age of work can be done through intensive course.
3. English competences they got can help them as a foundation in searching a job, in which so far have been a lot of jobs using English as necessity to be accepted in a company or agency.
4. These activities can help the government to improve human resources.

Daftar Pustaka

- Brown, H. Douglas. *Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Second Edition. San Francisco: Longman, 2001.
- Cambridge English Dictionary & Thesaurus, accessed june 25, 2016. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/productive>.
- Dixson, Robert J. *Practical Guide to the Teaching of English as a Foreign Language*. New York: Regents Publishing Company. Inc, 1960.
- Eduard C. Lindeman. *What is adult education?*. New York: Unpublished manuscript, Columbia University, Butler Library Lindeman Archive, 1925.
- Fauzi Achmad. "Mendikbud: Penguasaan Bahasa Asing Jadi Keharusan Siswa," *Indonesian Times*, January, 10, 2015, accessed June 26, 2016, <http://wartaekonomi.co.id/berita41782/mendikbud-penguasaan-bahasa-asing-jadi-keharusan-siswa.html>
- Noor Muhibbin, "Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangannya Dalam Otonomi Daerah (Alternatif Melalui KKNT)" *Indonesian times*, November 1, 2010. accessed june 26, 2016. <http://muhibbinnoor-walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=23&page=1>
- Permendikbud. Nomor. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Shofiyuddin Muh. "Improving Speaking Skill of the Tenth Grade Students of Man I Kudus in Academic Year 2020/1011 by Using Dubbing and Role-Play. Kudus." SPd Thesis, Muria Kudus University, 2011.

Pengembangan Intervensi Konseling untuk Pencegahan Aksi Bunuh Diri Berbasis Psikologi dan Budaya Lokal; Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pencegahan Aksi Bunuh Diri di Kabupaten Tanah Datar

ARDIMEN

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batusangkar, Sumatera Barat
ardimenbsk@yahoo.com

Abstrak: Kasus bunuh diri semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat terdapat 16 kasus bunuh diri selama tahun 2014 dan hingga Maret 2015 sudah tercatat sebanyak 5 kasus bunuh diri. Untuk itu diperlukan suatu program pendampingan bagi masyarakat dalam bentuk *Participatory Action Research (PAR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab bunuh diri adalah frustrasi karena masalah keluarga, memburuknya komunikasi antara orang tua dengan anak, masalah hubungan pertemanan di antaranya kecewa karena putus pacar, dililit masalah ekonomi, putus asa menghadapi kehidupan, stress yang memuncak, dan ketidakmampuan mengatasi masalah serta kurangnya kepedulian masyarakat terutama tetangga. Kegiatan pengabdian masyarakat ini, *pertama*, telah mampu meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat terutama ninik mamak dan pemerintah nagari untuk meningkatkan partisipasinya dalam mendeteksi gejala dan melakukan kontrol sosial dan kepedulian antar sesama untuk pencegahan aksi bunuh diri. *Kedua*, dapat memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi masalah. *Ketiga*, telah membantu masyarakat untuk mengurangi perilaku-perilaku anti sosial dan berubah menjadi perilaku pro sosial yang peduli. *Keempat*, mampu meningkatkan peran struktur masyarakat nagari/desa, tokoh, dan perangkat sosial lainnya dalam memberi dukungan sosial kepada masyarakat. *Kelima*, dapat meningkatkan peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan bunuh diri.

Kata kunci: Konseling, Aksi Bunuh Diri, Psikologi, Sosio-Kultural, PAR.

Pendahuluan

Kehidupan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang wajib untuk dijaga. Islam mengharamkan perbuatan bunuh diri. “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar.” (QS. Al-An‘am: 151). “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa’:29-30).

Fenomena bunuh diri akhir-akhir ini semakin meresahkan, di mana seolah-olah peristiwa tersebut saling tular-menular. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu terjadi perbuatan bunuh diri oleh anggota kepolisian di Aceh dan Sulawesi. Selain itu, di daerah Jawa Tengah terjadi aksi bunuh diri satu keluarga, serta semakin meningkatnya aksi bunuh diri di kalangan remaja atau pelajar.

Menurut WHO, angka bunuh diri itu cenderung meningkat dengan semakin bertambahnya usia (WHO, 2000). Ada berbagai teori dan asumsi yang bisa dikedepankan dalam menganalisis hal ini, misalnya semakin bertambah usia maka semakin bertambah pula insiden-insiden yang merupakan faktor risiko aksi bunuh diri (Bridge, 2006). Faktor risiko merujuk pada segala sesuatu atau kondisi tertentu yang bisa menjadi pencetus perbuatan bunuh diri, misalnya gangguan suasana perasaan, stress, depresi, perasaan malu yang berlebihan, merasa diri tak berharga, putus asa, hingga masalah ekonomi. Di sisi lain, secara psikologis remaja yang berasal dari keluarga bercerai jauh lebih mungkin mengalami masalah emosi seperti kesepian, namun belum tentu mempunyai risiko munculnya ide bunuh diri. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dewi dan Hamidah, (2013:24-33) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kesepian dengan ide bunuh diri pada remaja dengan orang tua yang bercerai.

Bunuh diri disebut juga dengan *suicidality*, di mana istilah tersebut digunakan untuk menyebut semua perilaku dan pikiran terkait bunuh diri pada spektrum risiko bunuh diri, yang bergerak mulai dari pikiran-pikiran pasif tentang kematian di salah satu ekstrim sampai tindakan bunuh diri di ekstrim yang lain (Geldard, 2012: 145-146). Oleh karena itu, bunuh diri yang dimaksud tidak hanya terbatas pada tindakan bunuh diri saja, namun termasuk di dalamnya niat dan pikiran bunuh diri serta perbuatan menganiaya diri sendiri.

Remaja laki-laki melakukan bunuh diri sebanyak dua hingga lima kali lebih banyak dari pada remaja perempuan (WHO, 2002). Selain itu, usaha bunuh diri jauh lebih banyak dilakukan oleh remaja perempuan dibanding remaja laki-laki (Bridge dalam Geldard, 2012: 126). Oleh karena itu, dalam hal ini sebetulnya usaha bunuh diri jauh lebih banyak dari pada peristiwa bunuh diri tersebut, hal itu khususnya terjadi pada remaja perempuan.

Ada berbagai kemungkinan yang sebagai penyebab bunuh diri atau *suicidal*, misalnya semakin meningkatnya kemampuan kognitif untuk merencanakan bunuh diri, semakin mudahnya akses ke sarana bunuh diri, dan di sisi lain semakin lemahnya pengawasan orang tua maupun masyarakat. Selain itu, tekanan perasaan dari berbagai faktor yang secara terus menerus tidak teratasi bisa berujung pada niat dan aksi bunuh diri.

Kejadian bunuh diri sebenarnya terjadi melalui tahapan yang cukup panjang namun biasanya tidak terdeteksi oleh orang lain. Carr (2012: 135) menjelaskan bahwa pada tahap awal bunuh diri adalah adanya niat dan ide untuk bunuh diri. Niat dan ide tersebut semakin lama akan semakin kuat hingga terjadi tindakan final. Selain itu, ketersediaan akses untuk memfasilitasi bunuh diri sangat mudah seperti memakai senjata tajam, gantung diri, meminum racun, atau melompat/terjun dari ketinggian. Semua hal itu sangat mudah diakses oleh siapa pun.

Di Kabupaten Tanah Datar sendiri, tempat penelitian dan pengabdian ini dilaksanakan, angka bunuh diri melambung sangat tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 hingga 2013 terhitung hanya satu kejadian bunuh diri setiap tahunnya, namun pada tahun 2014 perbuatan bunuh diri terjadi sebanyak 16 kasus (<http://www.harianhaluan.com>, diakses Desember 2014). Korban bervariasi baik dari segi usia maupun jenis kelamin, di antaranya siswa tingkat SLTP, SLTA, dan masyarakat umum. Sedangkan pada tahun 2015 ini, hingga bulan April sudah tercatat 5 kasus bunuh diri (<http://www.harianhaluan.com>, diakses Maret 2015). Hal ini merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada umumnya karena belum pernah terjadi sebelumnya.

Berikut data korban bunuh diri yang di daerah Kabupaten Tanah Datar yang dihimpun dari berbagai sumber.

Tabel 1. Data Kejadian Bunuh Diri di Kab. Tanah Datar tahun 2014 hingga 2015

No	Bulan	Nama	Usia	Alamat
1	Februari 2014	LM	25	Sungayang
2	Februari 2014	RNA	15	SMP 2 Batusangkar
3	Februari 2014	M	14	MTsN Batusangkar
4	Maret 2014	M	80	Tanjung Emas
5	Maret 2014	N	47	Pasie Laweh
6	Maret 2014	RN	20	Saruaso
7	April 2014	MK	73	Saruaso
8	Mei 2014	ST	33	Lintau
9	Juni 2014	MT	19	Batusangkar
10	Juni 2014	SKF	22	Batusangkar
11	Juni 2014	CAP	30	Batusangkar
12	Juli 2014	AP	16	Batusangkar
13	September 2014	LH	32	Batusangkar
14	Oktober 2014	KIP	60	Batusangkar
15	Oktober 2014	PK	55	Batusangkar
16	November 2014	DM	34	Batusangkar
17	Januari 2015	DK	50	Batusangkar
18	Januari 2015	ZF	35	Batusangkar
19	Februari 2015	AM	18	Batusangkar
20	Februari 2015	WH	45	Batusangkar
21	Maret 2015	IL	33	Batusangkar

Diolah dari berbagai sumber: (www.harianhaluan.com, padangekspres.com, infosumbar.net, Dinas Sosial Tanah Datar).

Atas dasar itulah dilakukan sebuah penelitian sekaligus pengabdian bagi masyarakat di kawasan Tanah Datar dengan tujuan utamanya adalah menganalisis faktor penyebab bunuh diri serta mengembangkan intervensi untuk pencegahannya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk *Participatory Action Research* dengan judul “Pengembangan Intervensi Konseling untuk Pencegahan Aksi Bunuh Diri Berbasis Psikologi dan Budaya Lokal”.

Budaya dan kearifan lokal akan menjadi pilar utama untuk mereduksi aksi bunuh diri, karena dalam lingkup tersebut adanya para tokoh adat, niniak mamak, para cendikiawan, da'i, dan bundo kanduang yang berpotensi memberikan pembinaan secara efektif. Para tokoh masyarakat tersebut akan dibekali oleh para pakar dibidang konseling, psikologi, sosiologi, dan pakar dibidang fiqh tentang berbagai pendekatan dalam mendampingi masyarakat

yang berisiko melakukan tindakan bunuh diri. Selain itu, berbagai pihak yang terkait atau *stake holder* akan dioptimalkan peranannya untuk menunjang kesuksesan kegiatan tersebut seperti organisasi sosial masyarakat (Yayasan, LSM, dan Ormas).

Di antara alasan memilih dampingan adalah, kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang sangat religius, menjunjung kearifan lokal dengan nuansa keislaman yang amat kental. Tingginya angka bunuh diri di kalangan masyarakat termasuk remaja telah menyebabkan kegelisahan, oleh karena itu mesti dicarikan solusinya secara tepat. Adapun permasalahan yang mengemuka di antaranya: (1) semakin tingginya angka bunuh diri di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Datar, (2) belum diketahuinya penyebab aksi bunuh diri tersebut secara empiris, (3) belum ada metode yang tepat untuk mendeteksi adanya gejala bunuh diri pada seseorang, (4) meningkatnya kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan trauma, dan (5) belum adanya intervensi yang teruji untuk mereduksi potensi aksi bunuh diri.

Masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada umumnya merupakan warga asli keturunan Minangkabau dengan tingkat pendidikan yang cukup bervariasi, artinya jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA hampir sama dengan jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi. Keluarga dengan taraf ekonomi rendah masih lebih banyak dari pada keluarga yang taraf perekonomiannya kuat. Kelemahan perekonomian sering berdampak pada keputusan untuk meninggalkan kampung atau merantau ke wilayah lain dengan harapan perbaikan ekonomi.

Maraknya aksi bunuh diri membuat masyarakat menjadi resah. Saat ini belum ada data akurat yang bisa dipahami sebagai penyebab bunuh diri di Tanah Datar. Selain itu belum ada suatu bentuk upaya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk mengantisipasi potensi bunuh diri berikutnya. Secara umum, berbagai potensi masalah yang bisa berakibat pada aksi bunuh diri pada masyarakat yang akan menjadi dampingan dalam pengabdian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) kepedulian terhadap sesama masyarakat sudah semakin berkurang, (2) semakin meningkatkan perilaku-perilaku anti sosial, (3) kurang berfungsinya struktur masyarakat di tingkat nagari/desa sehingga abai terhadap masalah sosial di sekitarnya, (4) kurangnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat, (5) banyaknya terjadi berbagai krisis dalam keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan terlalu dini, dan (6) masih rendahnya kesadaran

tokoh masyarakat akan banyaknya potensi masalah yang berakibat pada aksi bunuh diri.

Melalui kegiatan dampingan berbasis PAR ini, diharapkan terjadinya perubahan positif, di antaranya adalah: *Pertama*, meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat terutama ninik mamak dan pemerintah nagari tentang psikologi bunuh diri untuk meningkatkan partisipasi semua pihak tersebut dalam mendeteksi gejala dan mampu menjadi kekuatan kontrol sosial melalui membangun hubungan baik antar sesama, sehingga dapat memberi dukungan sosial satu sama lainnya.

Kedua, memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi masalah, atau yang dalam istilah psikologi disebut resiliensi. Masyarakat yang dimaksud adalah semua lapisan (remaja, dewasa, orang tua) mengingat ± 20 korban bunuh diri dalam 15 bulan terakhir ini di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari remaja, dewasa, orang tua, pelajar, lulusan SLTA, dan ibu rumah tangga. *Ketiga*, semakin berkurangnya perilaku-perilaku anti sosial dan berubah menjadi perilaku pro sosial. *Keempat*, meningkatnya peran struktur masyarakat nagari/desa, tokoh, dan perangkat sosial lainnya dalam memberi dukungan sosial dan *kelima*, meningkatnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan bunuh diri.

Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan penelitian aksi partisipatoris yang dilaksanakan dengan strategi penelitian tindakan. PAR merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang merupakan subjek dampingan. Konsep partisipatoris ini dikembangkan dari asumsi dasar bahwa tidak ada penelitian sosial yang dapat mendatangkan perbaikan kondisi sosial yang ada, selama peneliti menempatkan dirinya sebagai pakar yang berdiri di luar kondisi sosial yang diteliti dan memperlakukan masyarakat yang diteliti sebagai objek yang hanya menjalani kenyataan sosial yang ada secara pasif. Keyakinan ini diperkuat oleh Madya, (2011: 69) yang menegaskan bahwa, ... orang yang akan melakukan tindakan harus juga terlibat dalam proses penelitian dari awal. Dengan demikian mereka itu tidak hanya dapat menyadari perlunya melaksanakan program tindakan tertentu, tetapi secara jiwa raga akan terlibat dalam program tindakan tersebut..

Strategi yang dilakukan adalah dimulai dengan mengumpulkan data tentang kondisi objektif tentang apa, mengapa, dan bagaimana perbuatan bunuh diri bisa terjadi. Data-data tersebut dihimpun dari berbagai sumber yaitu tokoh masyarakat, pemerintah, remaja/ siswa, sekolah, pendidik, dan lingkungan keluarga dan teman dekat dari korban bunuh diri selama 15 bulan terakhir di Kabupaten Tanah Datar.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (a) mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya bunuh diri, (b) elakukan FGD dengan tokoh masyarakat, pemerintah (terutama dinas sosial), KUA, dan *stake holder* lainnya terkait permasalahan bunuh diri di kalangan masyarakat, (c) mendiskusikan rancangan program dampingan sebagai intervensi yang cocok dengan permasalahan yang ada, (d) menyiapkan sarana dan pra sarana pendukung, (e) melakukan tindakan/ intervensi untuk mereduksi niat atau potensi bunuh diri, dan (f) membentuk pusat-pusat konseling di daerah dampingan yaitu pada 8 kecamatan yang menjadi prioritas.

Realisasi penyelenggaraan program *Partisipatory Action Research* (PAR) ini akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung, di antaranya adalah: (1) akademisi dan praktisi yang berprofesi sebagai konselor, psikolog, sosiolog, dan tokoh masyarakat atau adat sebagai tim pelaksana pendampingan terhadap subjek dampingan, (2) akademisi dan praktisi bidang fiqh yang berperan memberikan pembekalan terkait dengan ajaran agama Islam tentang larangan bunuh diri, (3) pemerintah daerah dan kementerian agama kabupaten Tanah Datar dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan program.

Sumber daya (*resources*) yang dimiliki saat ini di lokasi dampingan adalah antara lain: (1) tenaga ahli dan praktisi yang berprofesi sebagai konselor, psikolog, serta ahli dalam bidang fiqh, dan (2) tenaga pendidik di satuan pendidikan yang akan menjadi subjek dampingan, serta (3) orangtua dan pemuka masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah ini.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Objektif Subjek Dampingan

Untuk memperoleh kondisi subjek dampingan yang diharapkan maka perlu dilakukan berbagai strategi yang sudah dirancang dalam memperoleh hasil yang memuaskan. Di antara kondisi dampingan yang diharapkan adalah: *Pertama*, meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat terutama

ninik mamak dan pemerintah nagari tentang psikologi bunuh diri untuk meningkatkan partisipasi semua pihak tersebut dalam mendeteksi gejala dan mampu menjadi kekuatan kontrol sosial melalui membangun hubungan baik antar sesama, sehingga dapat memberi dukungan sosial satu sama lainnya.

Kedua, memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi masalah, atau yang dalam istilah psikologi disebut resiliensi. *Ketiga*, semakin berkurangnya perilaku-perilaku anti sosial dan berubah menjadi perilaku pro sosial. *Keempat*, meningkatnya peran struktur masyarakat nagari/desa, tokoh, dan perangkat sosial lainnya dalam memberi dukungan sosial. *Kelima*, meningkatnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan bunuh diri.

Kondisi masyarakat di subjek dampingan akhir-akhir ini di mana sebanyak 20 orang korban bunuh diri dalam 15 bulan terakhir di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari remaja, dewasa, orang tua, pelajar, lulusan SLTA, dan ibu rumah tangga. Kondisi tersebut membuat kegelisahan dan keprihatinan anggota masyarakat terutama masyarakat di tempat kejadian.

Identifikasi Faktor Penyebab Bunuh Diri

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan anggota keluarga dan masyarakat di sekitar kejadian aksi bunuh diri, ditemukan bahwa beberapa faktor penyebab bunuh diri adalah frustrasi karena masalah keluarga, memburuknya komunikasi antara orang tua dengan anak, masalah hubungan pertemanan di antaranya kecewa karena putus pacar, dililit masalah ekonomi, putus asa menghadapi kehidupan, stress yang memuncak, dan ketidakmampuan mengatasi masalah.

Kurangnya kepedulian msyarakat terutama tetangga semakin menambah deretan panjang dan semakin tingginya resiko bunuh diri. Perlu juga diwaspadai berita-berita tentang bunuh diri yang tersebar secara luas karena 'penelitian baru-baru ini juga menyatakan bahwa bunuh diri yang dipublikasikan secara luas akan menyebabkan kecenderungan bunuh diri yang laten pada anak muda' (Dusek dalam Geldard, 2011: 99). Untuk ini semakin disadari oleh masyarakat bahwa sangat diperlukan kewaspadaan semua pihak baik anggota keluarga, tetangga maupun anggota masyarakat terhadap kecenderungan atau tanda-tanda awal masalah psikologis dan masalah lainnya yang dapat menjadi pemicu munculnya aksi bunuh diri. Oleh sebab itu, para orang tua, ninik mamak, dan pemuka masyarakat perlu mempunyai kemampuan dasar untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal psikosis yang terjadi di lingkungan masing-masing. Atau paling tidak perlu

menjalin komunikasi yang proaktif pada setiap anggota keluarga dan masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pembekalan Relawan Pendamping untuk Subjek Dampungan

Pembekalan relawan pendamping untuk mendampingi subjek dampungan sebagai kekuatan untuk bersinergi oleh TIM pengabdian kepada masyarakat Diktis Kemenag RI tahun 2015 dalam rangka pencegahan aksi bunuh diri di Kabupaten Tanah Datar terutama daerah yang dijadikan subjek dampungan.

Pembekalan ini dilakukan selama dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2015 yang bertempat di Gedung K Lantai 4 Ruang Pertemuan Dosen STAIN Batusangkar. Peserta pembekalan yang dijadikan relawan pendamping pencegahan aksi bunuh diri di Kabupaten Tanah Datar adalah unsur Ninik mamak dan aparat pemerintahan Nagari/ Desa utusan Nagari dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4. Sebaran/ Asal Daerah Relawan Pendamping dalam Pembekalan Pencegahan Aksi Bunuh Diri

No.	Nama Utusan/ Kecamatan	Jumlah Peserta
1	Kecamatan Lima Kaum	10 orang
2	Kecamatan Sungai Tarab	5 orang
3	Kecamatan Rambatan	9 orang
4	Kecamatan Tanjung Emas	3 orang
5	Kecamatan Sungayang	5 orang
6	Kecamatan Pariangan	5 orang
7	Kecamatan Lintau Buo	3 orang
	Jumlah Peserta	40 orang

Peserta pembekalan yang dipersiapkan sebagai relawan pencegahan aksi bunuh diri di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 40 orang yang tersebar atas tujuh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Pembekalan tersebut diikuti oleh peserta selama dua hari dengan berbagai materi tentang psikologi bunuh diri dan pendekatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan aksi bunuh diri.

Materi pertama adalah tentang konseling dengan pendekatan sufistik yang disampaikan oleh Dr. H. Kasmuri, MA. Di antara inti sari dari materi tersebut adalah: anggota masyarakat perlu menyadari dan memantapkan pemahaman tentang hakikat dan pondasi ajaran Islam terutama tentang: (1)

perlu pemantapan dalam masalah akidah (benar-benar yakin akan keberadaan Allah swt), (2) memberikan kesadaran kepada anggota masyarakat terhadap tujuan manusia diutus ke dunia, (3) memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa harus tegar dalam menghadapi ujian (manusia hadir ke dunia ini untuk diuji), (4) memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dunia ini adalah pinjaman, dan (5) memberikan kesadaran supaya senantiasa berserah diri kepada Allah swt.

Selanjutnya di antara terapi yang perlu dilakukan secara intensif adalah: (1) terapi dengan membaca al-qur'an, (2) terapi dengan shalat malam, (3) terapi dengan puasa, (4) terapi dengan bergaul dengan orang shaleh, dan (5) terapi dengan zikir dan muhasabah.

Materi ke dua adalah tentang perspektif sosiologi dan budaya dalam upaya refungsionalisasi peran Ninik Mamak di Minangkabau yang disampaikan oleh Prof. Dr. Firman, MS., Kons. (Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP)). Intisari dari materi ini adalah: *Pertama*, terjadinya perubahan sosial dan budaya di masyarakat di mana perubahan masyarakat dengan suatu pola dan gaya perjalanan kehidupan masyarakatnya. *Kedua*, posisi dan peran Penghulu (Ninik Mamak) adalah pengendali, pengarah, pengawas, pelindung terhadap anak kemenakan serta tempat penegak aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan yang dipimpin pangulu, "Tampuak tangkai didalam suku nan mahitam mamutiahkan tibo dibiang kamancabiak tibo digantiang kama mutuuh". *Ketiga*, Ninik mamak merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Pangulu terdiri dari beberapa kepala suku atau pangulu suku atau kaum tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito (pergi tempat bertanya dan pulang tempat berberita)."

Keempat, di antara perubahan sosial yang terjadi di Lingkungan Masyarakat Minangkabau adalah: (1) menguatnya hubungan suami istri dan hubungan bapak dengan anaknya, (2) peran mamak jadi formalitas, (3) rumah gadang sudah mulai ditinggalkan, (4) keluarga inti semakin menonjoldan tidak jarang mengabaikan aspek-aspek adat minangkabau, (5) sengketa pemilikan harta pusaka, tanah yang ada sudah beralih fungsi, (6) semakin berkembangnya sifat individual dan renggangnya hubungan sosial serta kesenjangan sosial terjadi, (7) kerusakan alam: perambahan dan pembakaran hutan, perburuan liar tidak terkendali, (8) pergeseran nilai, di antaranya: (a) berkurangnya masyarakat beribadah ke surau/mesjid, (b)

memudarnya peran bundo kanduang di Minang adalah karena pengaruh kehidupan barat yang menjadikan wanita berkedudukan sama dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan, (c) kaum laki-laki di Minang lebih suka duduk-duduk di warung sambil bermain kartu hingga berjudi sehingga kurang perhatian thd keluarga, dan (d) bergesernya peran adat basandi sarak, syarak basandi kitabullah.

Dalam rangka refungsionalisasi peran dan fungsi Ninik Mamak perlu dilakukan upaya penguatan: (1) lembaga pernikahan melalui konseling perkawinan dalam proses sosialisasi ABS SBK dengan melibatkan Ninik Mamak, sebagai prasyarat utama memasuki jenjang perkawinan, (2) kesadaran kolektif nagari, jorong, suku/kaum dengan organisasi ekonomi produktif, seperti koperasi, julo-julo, dll, (3) keluarga inti melalui konseling keluarga dalam proses sosialisasi ABS dan SBK, (4) peningkatan wawasan/keterampilan konseling dan psikologis Ninik Mamak dalam pemahaman serta penyelesaian ABS dan SBK, (5) surau/mesjid sebagai pusat kebudayaan dalam perbaikan ekonomi serta proses sosialisasi ABS SBK, dengan kegiatan produktif antara lain : koperasi, kleksi perpustakaan dan fasilitas internet, bimbingan belajar, bahasa arab/Inggris dll, serta (6) pendampingan KAN/LKAAM melalui pembentukan lembaga konseling dalam sosialisasi serta penyelesaian permasalahan ABS SBK

Beberapa masukan dan rekomendasi dari kajian ini adalah: *Pertama*, realitas yang ditemukan yaitu kehilangan fungsi peran yang disebabkan oleh perubahan sosial budaya. Pertanyaan: (1) kembali ke nagari sesuai dengan harapan dan ideal ada peningkatan peran yaitu dengan peningkatan kapasitas pemangku kebijakan pemangku di nagari. Hal apa yang harus dilakukan di nagari sebagai wali nagari untuk kembali ke nagari. Fungsi-fungsi apa yang relevan dilakukan ninik mamak di nagari dewasa ini. (2) langkah-langkah kongkrit dalam langkah cepat yang harus dilakukan di nagari sehingga perubahan sosial budaya tidak menghilangkan nilai-nilai budaya itu, (3) khusus pada IAIN perlu ada keberlanjutan. Perlu ada evaluasi ke depan. Bidang pengabdian masyarakat yang ada di IAIN perlu diberlanjutkan.

Kedua, kondisi lapangan ditemukan sebagai kenyataan yang dialami anak-anak sampai ke orang tua. Pertanyaan : (1) adanya globalisasi terjadi bagi generasi muda dan tua. Melalui pendidikan dari tingkat SD sampai SMP perlu ide-ide ini perlu dimiliki anak-anak. KAN ditugaskan untuk melawan harus yang da sehingga budaya kita tidak dicemari dari budaya lain. Sdh berbagai hal dilakukan untuk mengatasi dampak negatif perubahan sosial

budaya. (2) Di lapangan ditemukan di lapau sebagai budaya minangkabau. Lapau banyak digunakan untuk kegiatan yang mudarat. Dewasa ini untuk melakukan kegiatan tergantung oleh pendanaan karena tidak cukup, diharapkan kegiatan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat meningkatkan dana untuk kegiatan di KAN itu. Untuk itu diperlukan program di tingkat kabupaten untuk membuat buku. Dengan kegiatan ini diharapkan dilanjutkan

Materi pembekalan berikutnya adalah masalah-masalah di masyarakat yang disampaikan oleh Dra. Hj. Mursyidah (Kepala P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar. Materi ke empat adalah tentang psikologi bunuh diri disampaikan oleh Dra. Desmita, M.Si., (Dosen Psikologi IAIN Batusangkar) dan Faktor-faktor penyebab bunuh diri disampaikan oleh Dra. Fadhilah Syafwar, M.Pd (Dosen Psikologi IAIN Batusangkar). Materi selanjutnya adalah tentang konseling dengan pendekatan ekologis disampaikan oleh Ardimen, M.Pd., Kons. (Dosen BK IAIN Batusangkar sekaligus sebagai anggota TIM Pengabdian kepada Masyarakat). Materi teknik-teknik dasar konseling disampaikan oleh Dasril, M.Pd. (Dosen BK IAIN Batusangkar). Materi model-model konseling disampaikan oleh Dr. Masril, M.Pd., Kons. dan Darimis, M.Pd. (Dosen BK IAIN Batusangkar).

Kegiatan FGD dengan Subjek Dampingan

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan pada sesi terakhir dari dua hari proses pembekalan pendampingan pencegahan bunuh diri. Dalam *Focus Group Discussion* para relawan pendampingan mengungkapkan apresiasinya kepada IAIN Batusangkar dan Kementerian Agama Republik Indonesia atas inisiatif dilaksanakannya acara ini. Para relawan pendampingan mengemukakan bahwa materi pembekalan yang mereka terima selama dua hari dari para pemateri adalah penting dan sangat bermanfaat baginya untuk memahami aspek psikologis dan sosial masyarakat. Para relawan pendampingan dapat memahami penyebab dan pemicu orang bunuh diri. Mereka mengerti apa yang harus dilakukan untuk mencegah orang bunuh diri karena itu adalah dosa besar.

Para relawan pendampingan yang terdiri dari pemuka masyarakat (ninik mamak, tokoh masyarakat, aparat pemerintah nagari/ jorong, dan pemuda) yang sehari-hari tingkat kepedulian sosialnya tinggi, waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk mengurus kegiatan masyarakat, menyampaikan bahwa saat ini masalah sosial banyak sekali. Masalah-masalah tersebut sangat memprihatinkan. Masalah bukan hanya bunuh diri,

tetapi lebih luas dari itu, yaitu penggunaan obat-obat terlarang, dan pergaulan bebas. Di tempat-tempat tertentu kita menyaksikan ada banyak anak-anak muda, remaja, berkumpul mengkonsumsi obat-obat terlarang. Karena itu melalui wadah pembekalan ini para relawan pendamping menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui IAIN Batusangkar yang telah memprakarsai kegiatan ini. Harapan para relawan adalah kegiatan yang sama tidak terbatas hanya untuk ini saja, melainkan juga diberikan secara lebih luas kepada tokoh-tokoh masyarakat, ninik mamak, dan pemuda secara lebih luas, agar jaringan pendampingan bisa lebih luas ke pelosok-pelosok kampung, anak keponakan, dan generasi muda yang mungkin membutuhkan bantuan.

Dampak Pembekalan terhadap Relawan Pendamping Pencegahan Aksi Bunuh Diri

Selain untuk mengetahui dampak pembekalan, *Focus Group Discussion* juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi ide, gagasan, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan para relawan pendamping untuk menindaklanjuti hasil pembekalan. Beragam ide dan gagasan yang mengemuka dari para peserta relawan pendampingan yang terdiri dari para pemuka masyarakat (ninik mamak, pemuda, dan pemerintahan nagari/jorong yang memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap masalah-masalah sosial), mulai dari bagaimana menerapkan pencegahan bunuh diri, mensosialisasikan hasil pembekalan, memperbanyak jumlah relawan, sampai pada dari mana biaya pelaksanaan pembekalan lebih lanjut terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang belum mendapat pembekalan. Ide ataupun gagasan yang lahir dari para relawan pendampingan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama; para relawan merasa terpenggil untuk semakin peduli masalah masyarakat, terutama yang memiliki niat untuk bunuh diri, dan menerapkan materi pembekalan jika ditemukan gejala-gejala tersebut, meskipun mereka masih belum percaya diri untuk melakukan tindakan sendiri. Mereka juga berharap agar kegiatan yang sama juga diberikan untuk para tokoh masyarakat, ninik mamak dan pemuda lainnya yang belum mendapat kesempatan untuk pembekalan ini. Alasan mereka adalah karena nagari-nagari wilayahnya luas dan terdiri dari beberapa jorong, yang setiap jorong memiliki struktur pemerintahan sendiri. Sedangkan yang mengikuti pembekalan saat ini hanya tiga orang dari setiap nagari. Jumlah tersebut belum mewakili setiap jorong.

Kedua; para relawan menyatakan akan memberi tahukan hasil pembekalan ini kepada wali nagari sebagai kepala pemerintahan di nagari serta pimpinan adat di nagari seperti kepala KAN (Kerapatan Adat Nagari) untuk dilakukan pembekalan lebih lanjut di tingkat nagari masing-masing. Selanjutnya para relawan pendampingan merencanakan untuk mensosialisasikan acara pembekalan ini kepada semua lapisan masyarakat agar jangan membiarkan begitu saja jika ada di antara warga masyarakat yang mengalami masalah, seperti pertengkaran, perceraian, tindakan bullying, dan sebagainya yang dapat memicu bunuh diri seperti yang sudah banyak terjadi. Sosialisasi akan dilakukan melalui pendekatan adat dan agama kepada jamaah wirid pengajian di masjid, remaja masjid, karang taruna, dan TPSA. Termasuk melaksanakan tablig akbar di masjid nagari.

Ketiga; para relawan mengharapkan agar permasalahan yang ditangani di masyarakat bukan hanya soal bunuh diri, melainkan juga masalah-masalah lain yang banyak terjadi di kalangan remaja, yaitu penggunaan obat-obat terlarang. *Keempat*; kendala yang akan dialami para relawan pendampingan untuk mengangkat acara serupa di masyarakat adalah masalah dana, karena sulitnya sumber dana di nagari.

Pemberdayaan Subjek Dampingan oleh Relawan Pendamping

Tiga sampai enam minggu setelah pembekalan pendampingan, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui sejauhmana pengaplikasian rencana dari para relawan pendamping di nagari mereka masing-masing. Antara lain dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke Jorong Tanjung Nagari Sungayang, Nagari Balimbing, Parambahan, dan Limo Kaum. Semua relawan yang dikunjungi mengemukakan bahwa mereka telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, seperti melaporkan rencana kegiatan ke wali nagari dan KAN.

Di antara hasil monitoring dan evaluasi yang memuaskan hati adalah keberhasilan salah seorang relawan pendampingan bernama Fadril untuk mencegah salah seorang warganya yang akan melakukan bunuh diri, dipicu oleh hubungannya yang tidak harmonis dengan istri. Diperoleh informasi bahwa istrinya sudah sejak lama tidak peduli dengannya, dan sampai pada akhirnya istrinya menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Segala sesuatu peralatan untuk bunuh diri sudah disiapkannya, namun karena ada yang melihat, maka dilakukan pencegahan. Setelah itu, karena masyarakat sudah mengetahui bahwa Fadril salah seorang relawan pendampingan yang telah dilatih untuk menenangkan pelaku, maka akhirnya fadril diminta masyarakat

untuk menangani pelaku. Selain sebagai relawan pendampingan, Fadril di pemerintahan desa juga menjabat sebagai Wali Jorong/ desa di Jorong Tanjung) Nagari Sungayang. Fadril mendampingi pelaku dengan sungguh-sungguh.

Kesungguhan Fadril untuk membantu pelaku terlebih lagi didorong oleh rasa malu kalau tidak berhasil memulihkan psikologis korban normal kembali. “Batapa malunya saya karena sudah memiliki sertifikat sebagai relawan pendampingan pencegahan bunuh diri kalau terjadi lagi peristiwa bunuh diri di jorong saya ini” kata Fadril saat ditemui di kantornya di Jorong Tanjung tanggal 7 Desember 2015 yang lalu. Menurut Fadril, ia siang malam mengawasi pelaku, sampai akhirnya pelaku menyadari bahwa tindakannya itu tidak sepatutnya. Setelah berbincang cukup lama antara Fadril dan pelaku, akhirnya pelaku bertekad untuk tidak akan melakukan bunuh diri. Mencermati kondisi psikologis pelaku dan akibat konflik dengan istrinya, ada seorang donatur yang bersedia memberikan modal usaha bagi pelaku sebesar Rp 1.500.000,-. Uang tersebut dijadikan pelaku sebagai modal berjualan barang pecah-belah. Karena pelaku juga memiliki kendaraan bermotor roda dua, maka pelaku memilih kegiatan untuk berdagang keliling menggunakan kendaraan roda dua.

Relawan pendamping lain dari tokoh pemuda juga dari Nagari Sungayang bernama Fadli, bentuk tindak lanjut yang dilakukannya adalah mensosialisasikan hasil pembekalan kepada anggota Karang Taruna dan TPSA. Fadli sudah mendiskusikan rencana pembekalan untuk para remaja dan pemuda yang tergabung dalam kedua organisasi tersebut. Hal itu dilakukan Fadli karena beberapa bulan sebelum pembekalan telah terjadi peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh seorang laki-laki usia 50-an yang secara ekonomi mapan, namun karena persoalan konflik rumah tangga, istri minta cerai, akhirnya suami bunuh diri.

Monitoring dan evaluasi serta pendampingan juga dilakukan di Nagari Parambahan dan Limo Kaum. Para relawan pendamping pencegahan aksi bunuh diri di kedua Nagari tersebut melakukan upaya untuk mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepedulian pada siapa saja yang mengalami konflik di antara anggota keluarga, memburuknya komunikasi antara orang tua dengan anak, masalah dalam kelompok sebaya dan lainnya agar melaporkan ke para relawan. Komunikasi dan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai tempat di antaranya adalah, masjid, mushalla, warung, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Upaya tersebut

dilakukan sebagai langkah awal dan antisipatif terhadap timbulnya masalah lanjutan yang rentan terhadap resiko bunuh diri. Karena Geldard dan Geldard, (2011: 99) menegaskan bahwa sering kali tindakan bunuh diri terkait dengan beberapa persoalan sebagai berikut: (1) masalah keluarga, terutama masalah-masalah yang mengancam stabilitas keluarga, (2) memburuknya secara serius komunikasi antara orang tua dan putra putri remaja mereka, (3) masalah hubungan pertemanan, (4) tidak memiliki teman sama sekali dan tidak menjadi bagian dari kelompok apa pun, dan (5) ketidakmampuan untuk menjadi seperti apa yang diharapkan orang tua atau orang lain.

Beberapa hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan yang dilakukan oleh relawan pendamping menunjukkan bahwa semakin tingginya kepekaan dan kepedulian masyarakat yang terlatih dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat terbukti merupakan strategi yang jitu dalam membantu masyarakat untuk meringankan dan mengatasi masalah masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan aksi bunuh diri dan sebagainya.

Gambaran Bunuh Diri Setelah Kegiatan Dampingan

Sebagaimana digambarkan bahwa dari Februari 2014 sampai Maret 2015 ada sebanyak 20 orang yang mengakhiri hidupnya secara tragis dengan bunuh diri. Selama Januari sampai Juni 2015 saja ada enam orang yang bunuh diri. Namun setelah pelaksanaan pembekalan relawan pendampingan hanya ada satu orang yang bunuh diri, yaitu seorang laki-laki umur 38 tahun, gara-gara lahan parkir yang sudah dikuasainya sejak lama direbut orang lain. Tidak terima lahan parkir yang menjadi sumber penghasilannya direbut orang lain, laki-laki tersebut melampiaskan kemarahan dan kekecewaannya pada dirinya sendiri dengan cara gantung diri di rumahnya. Juga diperoleh informasi bahwa korban adalah juga mengalami kelainan mental. Itulah peristiwa bunuh diri terakhir di Kabupaten Tanah Datar, yang sejak tahun 2014 rata-rata 1 orang tiap tiga minggu terjadi kasus bunuh diri.

Secara teoritis, seandainya tidak dilakukan pembekalan, tentu tidak ada yang mahir untuk melakukan pencegahan seperti layanan konseling yang dilakukan oleh relawan pendampingan yang bernama Fadril. Melalui layanan konseling Fadril bisa melakukan konseling kepada pelaku dan berhasil meningkatkan kesadaran dirinya sehingga mengurungkan niatnya untuk bunuh diri.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat disarikan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di antaranya adalah: *Pertama*, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat terutama ninik mamak dan pemerintah nagari tentang psikologi bunuh diri untuk meningkatkan partisipasinya dalam mendeteksi gejala dan melakukan kontrol sosial dan kepedulian antar sesama untuk pencegahan aksi bunuh diri.

Kedua, kegiatan pendampingan dapat memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi masalah dan membantu sesama dalam mengatasi masalah masyarakat. *Ketiga*, kegiatan pendampingan yang dilakukan telah membantu masyarakat untuk semakin berkurangnya perilaku-perilaku anti sosial dan berubah menjadi perilaku pro sosial yang peduli. *Keempat*, kegiatan pendampingan ini telah mampu meningkatkan peran struktur masyarakat nagari/desa, tokoh, dan perangkat sosial lainnya dalam memberi dukungan sosial kepada masyarakat. *Kelima*, kegiatan pendampingan ini dapat meningkatkan peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan bunuh diri.

Agar program pengabdian kepada masyarakat ini berkelanjutan dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, maka beberapa saran perlu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak terutama. *Pertama*, kepada Kementerian Agama RI dan jajarannya serta Pimpinan IAIN Batusangkar diharapkan untuk tetap memberikan perhatian dan dukungan bagi penguatan ketahanan masyarakat dengan program-program unggulan terutama program pengabdian kepada masyarakat dalam menghadapi masalah secara integral dalam berbagai perspektif Agama Islam, psikologi, dan budaya.

Kedua, dosen-dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya dosen IAIN Batusangkar perlu membentuk dan mengaktifkan kelompok-kelompok kajian dalam mengidentifikasi dan menyikapi berbagai persoalan di masyarakat terutama dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu dan kajian.

Ketiga, pemerintah daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke Nagari perlu bersinergi dalam menyikapi berbagai ekonomi, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat serta membantu mengatasi berbagai persoalan di masyarakat. *Keempat*, tokoh-tokoh masyarakat khususnya Ninik mamak dan lembaga sosial masyarakat perlu sensitif dan aktif

menyikapi fenomena dan perubahan sosial di masyarakat. Kelima, para orang tua harus meningkatkan kepedulian dan kontrolnya terhadap anak dan anggota keluarganya.[]

Daftar Pustaka

- Dewi, L.A.K. dan Hamidah, 2013. Hubungan antara Kesepian dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja dengan Orang Tua yang Bercerai. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol 02, No. 03, Desember 2013.
- Geldard, K. dan Geldard, D. 2011. *Konseling Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geldard, Kathryn (Ed). 2012. *Konseling Remaja; Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*. Terjemahan oleh Soetjipto, dkk. 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://www.harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/34252-kasus-bunuh-diri-sudah-sangat-memprihatinkan>. Diakses Desember 2014.
- <http://www.harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/39137-kasus-bunuh-diri-di-tanah-datar-butuh-perhatian-serius>. Diakses Maret 2015.
- <http://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/hingga-16-september-sudah-15-warga-tanah-datar-bunuh-diri/>. Diakses Maret 2015.
- Madya, S., 2011. *Penelitian Tindakan (Action Research): Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

Pembinaan Karyawati untuk Mengembangkan *Spiritual Quetiont* Melalui Implementasi Program Tahsin, Tafsir Dan Tahfidz Al Quran Berbasis Masjid di KPP Pratama Bojonegoro

EVITA YULIATUL WAHIDAH

STIT Muhammadiyah Bojonegoro
evitayuliatulwahidah.21@gmail.com

Abstrak: tulisan ini ingin menggambarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa pembinaan kepada karyawati KPP Pratama untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Kegiatan pembinaan karyawati KPP Pratama ini dikemas dengan berbasis masjid, karena masjid bagi umat Islam merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dengan kehidupan dengan mengimplementasikan program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran. Pembinaan ini dirancang dengan metode harfiah, shoutiyah, maqthoiyah, kalimah, jumlah, dan jama'iyah dalam mengimplementasikan program tahsin dan didukung strategi yang bisa meningkatkan program tahfidz, yakni: Ikhlas, memperbaiki ucapan dan bacaan, menentukan presentase hafalan setiap hari, jangan melampaui kurukulum harian hingga bagus hafalannya secara sempurna, menggunakan satu jenis mushaf, memahami ayat-ayat yang dihafalnya, menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan surat setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya, mengulang dan memperdengarkan hafalannya secara rutin, dan memperhatikan ayat-ayat yang serupa. Sedangkan materinya meliputi makhorijul huruf, sifatul huruf, ilmu tajwid, tanda waqof dan washol serta al ayaat almutasibahat. Secara empiris, pembinaan karyawati KPP Pratama Bojonegoro membawa dampak perubahan yang signifikan dalam peningkatan kecerdasan spiritual. Dengan melalui proses pembelajaran Al Quran sebagai materi utama dengan program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran, pembinaan ini juga mampu memakmurkan masjid Al Hidayah di KPP Pratama Bojonegoro.

Keyword: Spiritual Quetiont, Masjid, Tahsin, Tafsir, Tahfidz.

Pendahuluan

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan suatu media untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat, dimana Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar warga masyarakat mampu menghadapi tantangan lebih jauh ke depan di era globalisasi.

Kegiatan Program Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penting bagi STIT Muhammadiyah Bojonegoro sebagai salah satu perguruan tinggi Islam, pengabdian masyarakat merupakan salah satu komponen dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Karena itu, selain mengajar, dosen wajib pula melakukan pengabdian masyarakat baik untuk mengembangkan maupun menerapkan ilmu pengetahuan.

Untuk mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu diadakan pembinaan kepada karyawati KPP Pratama dengan berbasis masjid untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Hal ini di maksudkan karena, kecerdasan spiritual atau Spiritual Quotient (SQ) merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna atau *value*, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

Prinsip pertama kecerdasan spiritual adalah kesadaran bahwa diri sendiri merupakan sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Jika tidak ada yang meragukan dalam perkara ini, maka seyogyanya seseorang akan bangga dan kagum terhadap diri sendiri, juga kepada orang lain. Semua orang lebih berharga, lebih bernilai, langka, dan terkira dibanding batu permata yang paling mahal dan paling langka.

SQ memfasilitasi suatu dialog antara akal dan emosi, antara pikiran dan tubuh. SQ menyediakan titik tumpu bagi pertumbuhan dan perubahan. SQ juga menyediakan pusat pemberi makna yang aktif dan menyatu bagi diri. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara utuh.

Spiritual Quotient (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan Intellectual Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita. Diibaratkan sebagai gunung es, SQ adalah salah satu kecerdasan bawaan manusia sebagai anugerah Tuhan di samping PQ (Kecerdasan Fisik), IQ (Kecerdasan

Intelektual), dan EQ (Kecerdasan Emosional), kemudian keempat kecerdasan SEIP-Q tersebut membentuk sistem akhlaq manusia.

Kegiatan pembinaan karyawati KPP Pratama ini dikemas dengan berbasis masjid. Karena masjid bagi umat Islam merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dengan kehidupan. Masjid bukan hanya sebagai simbol Islam, tetapi sesungguhnya merupakan sarana untuk mewujudkan kemajuan peradaban, kemasyarakatan, dan kerukunan umat.

Pembinaan Karyawati KPP Pratama Bojonegoro yang ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual ini mengimplementasikan program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran. Tahsin Al Quran merupakan tuntutan agar dalam membaca al Quran harus benar dan tepat sesuai dengan kaidah demi terjaganya orisinalitas praktik tilawah sesuai dengan sunnah Rasulullah saw, para sahabat dan pengikut sunnahnya yang setia.

Urgensi Membaca Al Quran dapat diungkapkan melalui beberapa alasan sebagai berikut; Eksistensi seseorang dalam keislamannya menuntut yang bersangkutan untuk melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh Islam itu sendiri demi kemaslahatan dirinya baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat yang merupakan bagian dari keyakinannya. Dasar semua pelaksanaan perbuatan itu adalah perintah yakni perintah Allah swt yang telah menetapkan Islam sebagai satu-satunya agama yang lurus dan diterima disisi-Nya. Itulah yang disebut dengan ibadah. Agar ibadah tersebut diterima pula di sisi-Nya maka, ibadah tersebut harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntutan dan tuntunan-Nya. Menyempurnakan bacaan al Quran merupakan bagian dari sekian amal bernilai ibadah yang diperitahkan-Nya sebagaimana dalam QS. Al-Muzzammil : 4 dan QS. Al Baqarah : 121.

Menurut QS. Al Baqarah : 121, pelaksanaan membaca al Quran dengan menerapkan prinsip 'haqqa tilawah' yakni membaca dengan sebenar-benar bacaan sebagaimana ketika ia diturunkan merupakan refleksi dari keimanan terhadap Kitab yang diturunkan oleh-Nya. Bahkan jika tidak melaksanakannya maka akan terancam dengan kerugian dan kebinasaan abadi di akhirat nanti. Dengan demikian semangat untuk mempelajari al Quran dan menyempurnakan bacaannya merupakan bukti kejujuran berimanan kepada kitab-Nya.

Allah swt menjelaskan dalam QS. Al-Kahfi : 1, tentang dua nikmat terbesar yang telah diturunkan mendampingi kehidupan manusia yaitu diturunkannya Al Quran dan diutusny Rasulullah saw. Surat tersebut diawali dengan lafazh 'alhamdulillah' untuk mengingatkannya. Lafazh

tersebut telah dikenal sebagai ungkapan kesyukuran akan karunia dan nikmat terbesar dari Allah swt yang diturunkan kepada kehidupan manusia. Di dalam al Quran hanya ada 5 surat saja yang diawali dengan lafazh tersebut mengisyaratkan tentang nikmat Allah yang terbesar itu. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah swt dengan kedua nikmat tersebut, maka setiap muslim dituntut untuk senantiasa menjadikan dirinya agar semakin dekat dengan al Quran dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Yakni membaca, mendengar, menghafal dan mengamalkan isinya setiap hari. Taqwa adalah target penghambaan setiap muslim kepada Rabbnya. Allah swt berfirman dalam QS. Al Baqarah : 21, yang artinya : Wahai manusia sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alasan setiap muslim untuk mencapai takwa adalah agar menjadi hamba yang diperhatikan oleh Allah swt di akhirat nanti (QS. 49 : 13), agar terhindar dari ancaman Allah swt (QS. 19 : 71-72) dan agar menjadi manusia yang pantas mendapatkan janji-Nya yaitu Surga Jannatunna'im (QS. 3: 133). Apabila diperhatikan pada QS. Ali Imran : 133, orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga kepadanya disebut dengan 'muttaqin'. Secara bahasa, kata tersebut merupakan sebutan pelaku yang mengindikasikan amal-amal yang dikandung oleh kata kerjanya telah menjadi kebiasaan atau profesi. Salah satu profesi takwa adalah berinteraksi dengan al Quran sebagaimana diindikasikan melalui QS. Al Baqarah : 2. Ayat tersebut menegaskan tentang korelasi yang sangat kuat antara sifat muttaqin dengan ciri utamanya adalah persahabatan dengan al Quran yang diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun.

Dalam pembinaan ini menghindarkan diri dari kesalahan kesalahan dalam pembacaan Al Quran. Dalam ilmu tajwid, kesalahan dalam membaca al Quran ada 2. Yaitu yang disebut dengan 'Lahn Jaliyy' dan 'Lahn Khafiyy'. Lahn Jaliyy adalah kesalahan yang tergolong fatal jika dilakukan oleh pembaca al Quran bahkan kesengajaannya menjerumuskannya pada amaliah yang haram seperti tertukarnya huruf-huruf yang dibaca, baris atau harakat yang berubah karena kurangnya sikap kehati-hatian pembacanya. Sedangkan Lahn Khafiyy adalah kesalahan yang tergolong ringan seperti tidak menyempurnakan kaidah panjang sebagaimana yang diminta atau tidak menahan dengungan 'ghunnah' sebagaimana kaidahnya. Kesalahan ini walaupun tergolong ringan, tetapi telah mencemari keindahan al Quran dari segi bacaannya jika tidak diindahkannya oleh para pembacanya. Dengan mempelajari tahsin al Quran, maka setiap pembaca telah membangun

kepedulian untuk mengenali jenis-jenis kesalahan ini dan menghindarinya, maka selamatlah ia dari kesalahan tersebut. Selain itu menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah pada surat al-Mujadalah ayat 11.¹

Dari latar belakang inilah yang mendasari diadakan pengabdian masyarakat dengan mengadakan pembinaan karyawati di Masjid Al Hidayah KPP Pratama Bojonegoro untuk mengembangkan spiritual quotient melalui implementasi tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran. Sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan spiritual quotient melalui implementasi program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran dengan melakukan pembinaan karyawati di Masjid Al Hidayah KPP Pratama Bojonegoro. Program ini sendiri bertujuan untuk memberikan pembinaan karyawati di Masjid Al Hidayah KPP Pratama Bojonegoro untuk mengembangkan spiritual quotient melalui implementasi program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran.

Deskripsi Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pembinaan karyawati KPP Pratama Bojonegoro. Sehubungan dengan tugas yang diemban sebagai karyawati pajak, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka sisi lain perlu adanya peningkatan nilai-nilai religius untuk memperkuat diri dalam dalam mengemban tugas tersebut. Terlebih jabaran dalam menyelenggarakan fungsinya, yakni: perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Ditengah-tengah tugas inilah disediakan waktu tersendiri, untuk mengembangkan spiritual quotient karyawati melalui implementasi program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran. Kegiatan ini berbasis masjid dengan maksud memakmurkan masjid Al Hidayah KPP Pratama Bojonegoro. Karena masjid diharapkan mampu memberikan ketenangan dan ketenteraman pada pengunjung dan

¹ Al-'Aliyy, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 435

lingkungannya. Masjid Al Hidayah dipersiapkan untuk dapat dituntut berfungsi membina umat, yang memiliki sarana yang tepat, menyenangkan dan menarik umat, khususnya para karyawan KPP Pratama untuk melaksanakan peribadatan. Masjid Al Hidayah dibangun berasaskan taqwa. Maka jadilah masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu menyucikan jiwa dan raga. Menjadi tempat yang memberikan arti tujuan hidup dan cara-cara meraihnya. Menjadi tempat yang mendahulukan praktek kerja nyata sebelum teori. Sebuah masjid yang telah mengangkat esensi kemanusiaan manusia sebagai hamba terbaik di muka bumi. Yang lebih strategis lagi, masjid Al Hidayah dijadikan pusat pengembangan karyawan dimana setiap hari karyawan berjumpa dan melaksanakan ibadah, menimba ilmu tentang berbagai hal, prinsip-prinsip keberagamaan, juga ayat-ayat Qur'an ditengah-tengah kesibukannya dalam mengemban amanah negara.

Kegiatan utama dalam pembinaan di masjid ini adalah mempelajari Al Quran dengan program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran. Tahsin dalam tilawah Al Quran merupakan tuntutan agar dalam membaca al Quran harus benar dan tepat sesuai dengan kaidah demi terjaganya orisinalitas praktik tilawah sesuai dengan sunnah Rasulullah saw, para sahabat dan pengikut sunnahnya yang setia.

Tahsin menurut bahasa berasal dari 'hassana-yuhassinu' yang artinya membaguskan. Kata ini sering digunakan sebagai sinonim dari kata tajwid yang berasal dari 'jawwada-yujawwidu' apabila ditinjau dari segi bahasa. Oleh karena itu, pendefinisian tahsin menurut istilah disamakan dengan pendefinisian tajwid.

Tahsin atau tajwid adalah "mengeluarkan setiap huruf-huruf al Quran dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya." Atau dengan kata lain menyempurnakan semua hal yang berkaitan dengan kesempurnaan pengucapan huruf-huruf al Quran dari aspek sifat-sifatnya yang senantiasa melekat padanya dan menyempurnakan pengucapan hukum hubungan antara satu huruf dengan yang lainnya seperti idzhar, idgham, ikhfa dan sebagainya.

Urgensi Tahsin dalam Membaca Al Quran dapat diungkapkan melalui beberapa alasan sebagai berikut :

1. Perintah Allah swt.

Eksistensi seseorang dalam keislamannya menuntut yang bersangkutan untuk melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh Islam itu sendiri demi kemaslahatan dirinya baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat yang merupakan bagian dari

keyakinannya. Dasar semua pelaksanaan perbuatan itu adalah perintah yakni perintah Allah swt yang telah menetapkan Islam sebagai satu-satunya agama yang lurus dan diterima disisi-Nya. Itulah yang disebut dengan ibadah. Agar ibadah tersebut diterima pula di sisi-Nya maka, ibadah tersebut harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntutan dan tuntunan-Nya. Menyempurnakan bacaan al Quran merupakan bagian dari sekian amal bernilai ibadah yang diperitahkan-Nya sebagaimana dalam QS. Al-Muzzammil : 4 dan QS. Al Baqarah : 121.

2. Refleksi keimanan

Menurut QS. Al Baqarah : 121, pelaksanaan membaca al Quran dengan menerapkan prinsip 'haqqa tilawah' yakni membaca dengan sebenar-benar bacaan sebagaimana ketika ia diturunkan merupakan refleksi dari keimanan terhadap Kitab yang diturunkan oleh-Nya. Bahkan jika tidak melaksanakannya maka akan terancam dengan kerugian dan kebinasaan abadi di akhirat nanti. Dengan demikian semangat untuk mempelajari al Quran dan menyempurnakan bacaannya merupakan bukti kejujuran berimanan kepada kitab-Nya.

3. Bukti Tanda Kesyukuran

Allah swt menjelaskan dalam QS. Al-Kahfi : 1, tentang dua nikmat terbesar yang telah diturunkan mendampingi kehidupan manusia yaitu diturunkannya Al Quran dan diutusny Rasulullah saw. Surat tersebut diawali dengan lafazh 'alhamdulillah' untuk mengingatkannya. Lafazh tersebut telah dikenal sebagai ungkapan kesyukuran akan karunia dan nikmat terbesar dari Allah swt yang diturunkan kepada kehidupan manusia. Di dalam al Quran hanya ada 5 surat saja yang diawali dengan lafazh tersebut mengisyaratkan tentang nikmat Allah yang terbesar itu. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah swt dengan kedua nikmat tersebut, maka setiap muslim dituntut untuk senantiasa menjadikan dirinya agar semakin dekat dengan al Quran dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Yakni membaca, mendengar, menghafal dan mengamalkan isinya setiap hari.

4. Membiasakan profesi Takwa

Takwa adalah target penghambaan setiap muslim kepada Rabbnya. Allah swt berfirman dalam QS. Al Baqarah : 21, yang artinya : Wahai manusia sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian

dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alasan setiap muslim untuk mencapai takwa adalah agar menjadi hamba yang diperhatikan oleh Allah swt di akhirat nanti (QS. 49: 13), agar terhindar dari ancaman Allah swt (QS. 19 : 71-72) dan agar menjadi manusia yang pantas mendapatkan janji-Nya yaitu Surga Jannatunna'im (QS. 3: 133). Apabila diperhatikan pada QS. Ali Imran : 133, orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga kepadanya disebut dengan 'muttaqin'. Secara bahasa, kata tersebut merupakan sebutan pelaku yang mengindikasikan amal-amal yang dikandung oleh kata kerjanya telah menjadi kebiasaan atau profesi. Salah satu profesi takwa adalah berinteraksi dengan al Quran sebagaimana diindikasikan melalui QS. Al Baqarah : 2. Ayat tersebut menegaskan tentang korelasi yang sangat kuat antara sifat muttaqin dengan ciri utamanya adalah persahabatan dengan al Quran yang diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun.

5. Menghindarkan diri dari Kesalahan

Dalam ilmu tajwid, kesalahan dalam membaca al Quran ada 2. Yaitu yang disebut dengan 'Lahn Jaliyy' dan 'Lahn Khafiyy'. Lahn Jaliyy adalah kesalahan yang tergolong fatal jika dilakukan oleh pembaca al Quran bahkan kesengajaannya menjerumuskannya pada amaliah yang haram seperti tertukarnya huruf-huruf yang dibaca, baris atau harakat yang berubah karena kurangnya sikap kehati-hatian pembacanya. Sedangkan Lahn Khafiyy adalah kesalahan yang tergolong ringan seperti tidak menyempurnakan kaidah panjang sebagaimana yang diminta atau tidak menahan dengungan 'ghunnah' sebagaimana kaidahnya. Kesalahan ini walaupun tergolong ringan, tetapi telah mencemari keindahan al Quran dari segi bacaannya jika tidak diindahkannya oleh para pembacanya. Dengan mempelajari tahsin al Quran, maka setiap pembaca telah membangun kepedulian untuk mengenali jenis-jenis kesalahan ini dan menghindarinya, maka selamatlah ia dari kesalahan tersebut.

Tahfidz yang berarti menghafal, menghafal dari kata dasar hafal yang dari bahasa arab *hafidza - yahfadzu - hifdzan*, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa.² Menurut Abdul Aziz Abdul Ra'uf definisi menghafal adalah "proses mengulang sesuatu, baik dengan membaca atau

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (:Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007), hal. 105

mendengar”. Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti menjadi hafal.”³

Menghafal Al-Qur’an merupakan harta simpanan yang sangat berharga yang diperebutkan oleh orang yang bersungguh-sungguh. Hal ini karena Al-Qur’an adalah kalam Allah yang bisa menjadi syafa’at bagi pembacanya kelak dihari kiamat. Menghafal Al-Qur’an untuk memperoleh keutamaan-keutamaannya memiliki berbagai cara yang beragam.

Memperbincangkan tentang tafsir, tafsir berasal dari bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian.. *Tafsir dapat juga diartikan al-idlah wa al-tabyin*, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata ‘Tafsir’ sejajar dengan timbangan (wazan) kata *tafil*, diambil dari kata *al-fasr* yang berarti *al-bayan* (penjelasan) dan *al-kasyf* yang berarti membuka atau menyingkap, dan dapat pula diambil dari kata *al-tafsarah*, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui penyakit.⁴

Dalam Alquran, kata “tafsir” diartikan sebagai “penjelasan”, hal ini sesuai dengan lafal tafsir yang terulang hanya satu kali, yakni dalam QS. Al-Furqan[25]: 33 “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya”.

Menurut Al-Jurjani bahwa Tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjukkan kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas.

Menurut Imam Al-Zarqani bahwa *tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Alquran* baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.

Menurut Al-Maturidi bahwa tafsir merupakan penjelasan yang pasti dari maksud satu lafal dengan persaksian bahwa Allah bermaksud demikian dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti melalui para periwayat yang adil dan jujur.

Menurut Az-Zarkasyi bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah (Alquran) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum

³Abdul Aziz Abdul Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur’an Da’iyah* (:Markaz Quran, 1427 H), hal. 49

⁴ Rifat Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 139-140

serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

Tafsir diambil dari riwayat dan dirayat, yakni ilmu lughat, nahwu, sharaf, ilmu balaghah, ushul fiqh dan dari ilmu asbabin nuzul, serta nasikh mansukh.

Pada kegiatan pembinaan karyawati KPP Pratama ini, tujuan dari mempelajari tafsir, ialah :memahamkan makna –makna Al- Qur’an, hukum-hukumnya, hikmat-hikmatnya, akhlaq-akhlaqnya, dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan demikian nyatalah bahwa, faidah yang kita dapati dalam mempelajari tafsir ialah : “terpelihara dari salah dalam memahami Al-Qur’an”

Sedangkan maksud yang diharap dari mempelajarinya, ialah : “mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Qur’an, hukum-hukumnya dengan cara yang tepat”.

Secara umum tafsir dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tafsir bil ma’tsur dan tafsir bir ro’yi. Tafsir yang diterapkan dalam kajian keislaman di KPP Pratama, yakni *Tafsir bil ma’tsur*. *Tafsir bil ma’tsur* adalah *tafsir yang berlandaskan naqli yang shahih*, dengan cara menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an atau dengan sunnah, yang merupakan penjelas kitabullah. Atau dengan perkataan para sahabat yang merupakan orang-orang yang paling tahu tentang kitabullah, atau dengan perkataan tabi’in yang belajar tafsir dari para sahabat.

Cara tafsir bil ma’tsur adalah dengan memakai atsar-atsar yang menjelaskan tentang makna suatu ayat, dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak ada faedahnya, selama tidak ada riwayat yang shohih tentang itu.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Wajib diketahui bahwa nabi telah menjelaskan makna-makna Al-Qur’an kepada para sahabat sebagaimana telah menjelaskan lafadz-lafadznya kepada mereka. Karena firman Allah”.dan “agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah dirurunkan kepada mereka” (QS. An-Nahl: 44) mencakup penjelasan lafadz-lafadz dan makna.

Tafsir bil ma’tsur adalah yang wajib diikuti dan diambil. Karena terjaga dari penyelewengan makna kitabullah. Ibnu Jarir berkata, “*Ahli tafsir yang paling tepat mencapai kebenaran adalah yang palingjelas hujjahnya terhadap sesuatu yang dia tafsirkan dengan dikembalikan tafsirnya kepada Rasulullah dengan khabar-khabar yang tsabit dari beliau dan tidak keluar dari perkataan salaf*”.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Dan kita mengetahui bahwa Al-Qur’an telah dibaca oleh para sahabat, tabi’in dan orang-rang yang

mengikuti mereka. Dan bahwa mereka paling tahu tentang kebenaran yang dibebankan Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikannya”.

Metode dan Strategi

Metode atau cara sangat penting dalam mencapai keberhasilan menghafal, karena berhasil tidaknya suatu tujuan ditentukan oleh metode yang merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Lebih jauh lagi *Peter R. Senn* mengemukakan, “metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.”⁵

Berikut ini secara terperinci metode membaca dan menghafal Al-Qur’an yang diterapkan dalam pembinaan karyawan KPP Pratama Bojonegoro:

Metode membaca Al-Qur’an

Dalam membaca Al-Qur’an terhadap metode belajar yang sangat variatif karena belajar Al-Qur’an bukan sekedar mengenal huruf-huruf Arab beserta (*syakal*) yang menyertainya, akan tetapi juga mengenalkan segala aspek yang terkait dengannya. Hal itu dikarenakan membaca Al-Qur’an yang terdiri dari 30 juz memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang telah ada sejak diturunkan dengan demikian, Al-Qur’an dapat dibaca sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang berlaku. Untuk tujuan tersebut, maka diharapkan tersedianya materi-materi yang dapat memenuhi kebutuhan itu, yaitu materi yang komprehensif yang mampu mewakili seluruh jumlah ayat yang ada dalam Al-Qur’an. Sehingga karyawan selesai mempelajari materi-materi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa karyawan dapat membaca seluruh ayat-ayat Al-Qur’an dengan baik dan benar.

Khusus dalam materi pembelajaran baca Al-Qur’an, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok besar, yaitu (1) Pengenalan huruf hijaiyyah dan makhrajnya, (2) Pemarkah (Al-asykaal), (3) huruf-huruf bersambung, (4) tajwid dan bagiannya, (5) Ghraaib (bacaan yang tidak sama dengan kaidah secara umum).

Menurut Samsul Ulum dalam pengajaran membaca Al-Qur’an terdapat beberapa metode yang dapat dilaksanakan dalam proses pengajaran membaca bagi pemula. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan

⁵ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Erlangga, 1995), hal. 20

dan kekurangan, metode tersebut antara lain yaitu:

1. Metode *Harfiyah*

Metode ini disebut juga metode *hijaiyah* atau *alfabaiyah* atau *abajadiyah*. Dalam pelaksanaannya, pembina mengajarkan pengajaran huruf hijaiyah satu persatu. Disini seorang karyawati membaca huruf dengan melihat teks/ huruf tertulis dalam buku. Selain itu, karyawati membaca potongan-potongan kata.

2. Metode *Shoutiyah*

Metode ini terdapat kesamaan dengan metode *harfiyah* dalam hal tahapan yang dilakukan, yaitu mengajarkan potongan-potongan kata atau kalimat namun dapat perbedaan yang menonjol yaitu: dalam metode *harfiyah* pembina dituntut untuk menjelaskan nama, misalkan huruf *shod*, maka pembina harus memberitahukan bahwa huruf itu adalah *shod*, berbeda dengan *shoutiyah*, yaitu pembina ketika berhadapan dengan huruf *shod* dia mengajarkan bunyi yang disandang huruf tersebut yaitu *sha*, bukan mengajarkan hurufnya.

3. Metode *Maqthaiyah*

Metode ini merupakan metode yang dalam memulai mengajarkan membaca diawali dari potongan-potongan kata, kemudian dengan kata dilanjutkan dengan kata-kata yang ditulis dari potongan kata tersebut. Dalam mengajarkan membaca, harus didahului dengan huruf-huruf yang mengandung mad. Mula-mula karyawati dikenalkan *alif*, *wawu*, dan *ya'*, kemudian di kenalkan dengan pada kata seperti *saa*, *sii*, *suu*, (terdapat bacaan *mad*), kemudian dengan potongan kata tersebut dirangkai dengan potongan kata yang lain, seperti *saro*, *siiri*, *saari*, *siiroo*, *siisrii*, dan seterusnya. Terkadang menggunakan metode ini lebih baik dari metode *harfiyah* atau metode *shoutiyah*, karena metode *maqthaiyah* dimulai dari seperangkat potongan kata, bukan satu huruf atau satu suara.

4. Metode *Kalimah*

Kalimah berasal dari bahasa Arab yang yang berarti kata. Disebut metode kalimah karena ketika karyawati belajar membaca mula-mula langsung dikenalkan dengan bentuk kata. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis huruf-huruf yang terdapat pada kata-kata tersebut. Metode ini kebalikan dengan metode metode *harfiyah* dan metode *shoutiyah* yang mengawali dari huruf atau bunyi kemudian beralih kepada mengajarkan kata. Dalam pelaksanaannya, pembina menunjukkan sebuah kata dengan konsep yang sudah sesuai, kemudian pembina menggunakan kata tersebut nenerpa kali setelah itu diikuti karyawati. Setelah itu

karyawati menunjukkan yang karyawatiya berupaya mengenalnya atau membacanya. Setelah karyawati tersebut mampu membaca kata, kemudian pembina mengajak untuk menganalisis huruf-huruf yang ada pada kata-kata tersebut.

5. *Metode Jumlah*

Kata *jumlah* berasal dari bahasa Arab berarti kalimat. Mengajarkan membaca dengan metode ini adalah dengan cara pembina menunjukkan sebuah kalimat singkat pada sebuah kartu dengan cara dituliskan dipapan tulis, kemudian pembina mengucapkan kalimat tersebut dan setelah itu diulang oleh karyawati beberapa kali. Setelah itu, karyawati menambahkan satu kata pada kalimat tersebut lalu membacanya dan ditirukan lagi oleh karyawati, seperti: Dzahaba al-walad, dzahaba al-walad. Kemudian dua kalimat tersebut dibandingkan agar karyawati mengenal kata-kata yang sama dan kata yang tidak sama. Apabila karyawati telah membandingkan, maka karyawati mengajak untuk menganalisis kata yang ada sehingga sampai pada huruf-hurufnya. Dari sinilah dapat diketahui bahwa metode jumlah dimulai dari kalimat, kemudian kata, sampai pada hurufnya.

6. *Metode Jama'iyah*

Jamaiyah berarti keseluruhan, metode *jama'iyah* berarti menggunakan metode yang telah ada, kemudian menggunakan sesuai dengan kebutuhan karena setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Karena itu, yang lebih tepat adalah menggunakan seluruh metode yang ada tanpa harus terpaksa pada satu metode saja.⁶

Sedangkan menurut Sa'dulloh macam-macam metode menghafal adalah sebagai berikut :

1. *Bi al-Nadzar*, Yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dihafal dengan melihat mushaf secara berulang-ulang.
2. *Tahfidz*, Yaitu menghafal sedikit demi sedikit Al-Qur'an yang telah dibaca secara berulang-ulang tersebut.
3. *Talaqqi*, Yaitu menyetorkan atau mendengarkan hafalan yang baru dihafal kepada seorang karyawati.
4. *Takrir*, Yaitu mengulang hafalan atau menyima'kan hafalan yang pernah dihafalkan/sudah disima'kan kepada karyawati.

⁶ M.Samsul Ulum, *Menangkap Cahaya Al-Qur'an*, (Malang:UIN Malang Press, 2007), hal.82-85

5. *Tasmi'*, Yaitu mendengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada perseorangan maupun kepada jamaah.⁷

Pada prinsipnya semua metode di atas baik semua untuk dijadikan pedoman menghafal Al-Qur'an, baik salah satu diantaranya, atau dipakai semua sebagai alternatif atau selingan dari mengerjakan suatu pekerjaan yang terkesan monoton, sehingga dengan demikian akan menghilangkan kejenuhan dalam proses menghafal Al-Qur'an.

Ada beberapa metode penting yang menunjang dan mengerakan karyawati untuk menghafal Al-Qur'an yakni antara lain:

1. Mengikatnya dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sebagai teladan.

Sesungguhnya dengan mengikat karyawati dengan kepribadian nabi Muhammad SAW. Dan berupaya meneladaninya serta menanamkan kecintaan kepadanya di dalam hatinya termasuk media paling penting yang bisa mendorong seorang karyawati untuk berbuat dan mengerahkan segala upayanya.

2. Pujian

Pujian memberikan pengaruh yang efektif didalam jiwa. Ia bisa menghidupkan persaan-persaan mati yang tertidur, meninggalakan kesan yang baik, menanamkan kecintaan dalam hati, dan membangkitkan kesadaran diri, ia juga mendorong seorang yang dipuji itu pada suatu perbuatan dengan penuh keseriusan dan rasa santai pada saat bersamaan.⁸

3. Kompetisi

Kompetisi bisa mengerakan karyawati potensi-potensi karyawati yang tersembunyi yang tidak bisa di ketahui pada waktu-waktu biasa. Potensi-potensi dalam diri karyawati itu muncul ketika diletakkan dalam kompetisi yang intens dengan orang lain.

4. Pemecahan problem

Masa-masa kemalasan dan keengganan terkadang datang kepada seorang karyawati yang rajin. Hal itu mungkin karena masalah yang meninmpnya. Sehingga, setiap masalah yang terjadi harus di

⁷ Sa'dulloh, S. Q., *9 Cara Praktis Mengafal Al-Qur'an* (Jakarta :Gema Insani Press, 2013), hal. 52-54

⁸ Ahmad Salim Badwilan, *Panduan Cepat Menghafal Al-Qur'an*,(Yogyakarta: Diva Press, 2009) hal 177-178

pecahkan agar ia bisa tetap kembali kepada aktifitasnya tersebut.

5. Pemenuhan kecenderungan dan perwujudan keinginan

Terkadang seorang karyawan mengerahkan upaya yang besar, mewujudkan suatu yang besar dalam pandangannya, dan merasa ia telah memberikan sesuatu yang bernilai kepada keluarga dan karyawatnya ketika ia memenuhi keinginan-keinginan mereka seperti hafalan dan keunggulan, sehingga ia menunggu mereka memberikan kompensasi sesuatu yang sama dengan memenuhi kecenderungan-kecenderungannya serta mewujudkan keinginannya.⁹

Strategi Menghafal Al-Qur'an

Untuk membantu mempermudah membentuk kesan dalam ingatan terhadap ayat-ayat yang dihafal, maka diperlukan strategi menghafal yang baik. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam menghafal Al-Qur'an, yaitu:

1. Ikhlas. Kita wajib mengikhlaskan niat, memperbaiki tujuan, dan menjadikan menghafalan Al-Qur'an hanya karena Allah SWT.
2. Memperbaiki ucapan dan bacaan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara belajar langsung dari seorang qori' yang bagus atau menghafal yang sempurna.
3. Menentukan presentase hafalan setiap hari. Seseorang yang ingin menghafal Al-Qur'an harus mampu menentukan batasan hafalan yang disanggupinya setiap hari dan harus dilakukan secara istiqomah.
4. Jangan melampaui kurikulum harian hingga bagus hafalannya secara sempurna. Tujuannya adalah agar hafalan menjadi mantap dalam ingatan.
5. Menggunakan satu jenis mushaf. Alasannya adalah karena manusia mengingat dengan melihat, sebagaimana ia juga mengingat dengan mendengar. Selain itu gambaran ayat, juga posisinya dalam mushaf bisa melekat dalam pikiran. Apabila menghafal berganti-ganti mushaf, maka hafalannya akan kacau dan sangat sulit menghafalnya.
6. Memahami ayat-ayat yang dihafalnya. Seorang menghafal harus membaca tafsir ayat-ayat yang dihafal dan mengetahui aspek keterkaitan antara sebagian ayat dengan ayat yang lainnya. Semua itu bisa mempermudah menghafalan ayat.
7. Menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan surat setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya.

⁹ *Ibid*, hal. 184

8. Mengulang dan memperdengarkan hafalannya secara rutin. Wajib mengulang dan memperdengarkan hafalannya kepada orang lain, sebagai media untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan sebagai peringatan yang terus-menerus terhadap pikiran dan hafalannya.
9. Memperhatikan ayat-ayat yang serupa. Dengan memberi perhatian khusus terhadap ayat-ayat yang mengandung keserupaan (*mutasyabihat*). Maka hafalannya akan cepat menjadi bagus.

Strategi di atas juga berfungsi untuk meningkatkan mutu atau kualitas hafalan Al-Qur'an. Dengan strategi menghafal yang baik dalam proses pembelajaran menghafal Al-Qur'an maka tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur'an tercapai.

Sedangkan dalam pembinaan Al Quran bidang Ilmu tafsir, yang merupakan ilmu yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya dan luas cakupannya. Paling mulia, karena kemuliaan sebuah ilmu itu berkaitan dengan materi yang dipelajarinya, sedangkan ruang lingkup pembahasan ilmu tafsir berkaitan dengan Kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang haq dan bathil. Dikatakan paling luas cakupannya, karena seorang ahli tafsir membahas berbagai macam disiplin ilmu, dia terkadang membahas akidah, fikih, dan akhlak. Di samping itu, tidak mungkin seseorang dapat memetik pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an, kecuali dengan mengetahui makna-maknanya.

Metode yang diterapkan diantaranya:

1. Metode *Tahlili* (analitik)

Metode tahlili adalah metode tafsir Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan mengurai berbagai sisinya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al Qur'an. Metode ini merupakan metode yang paling tua dan sering digunakan.

Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al Qur'an. Dia menjelaskan kosa kata dan lafazh, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur I'jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat yaitu hukum fiqh, dalil syar'I, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya.

2. Metode *Ijmali* (global)

Metode ini berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan

bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh karyawati KPP Pratama Bojonegoro.

3. Metode *Muqarran*

Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadits, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir, dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari obyek yang diperbandingkan itu.

Materi

No	Tahsin	Tafsir	Tahfidz
1	Makorijul Huruf	Surat Al-Fatihah	Juz 30 (surat pendek)
2	Sifat-sifat huruf	Surat Al-Baqoroh	Surat-surat pilihan
3	Materi Tajwid	Surat Pendek	(Yasin, AlMulk)
4	Tanda waqof dan washol	Surat surat pilihan	(Al Waqiah)

Waktu dan Tempat

Kegiatan pembinaan karyawati KPP Pratama ini dilaksanakan pada waktu jam istirahat mulai pukul 12.00-13.30 WIB, setiap hari Kamis, bertempat utama di Masjid Al Hidayah KPP Pratama Bojonegoro, sebagai pusat kegiatan kerohanian. Namun tidak menutup kemungkinan hari bisa berubah hari Rabu atau Jum'at jika hari Kamis ada halangan, hari libur nasional dan kegiatan kantor yang lebih urgen seperti visitasi, rapat dan lain-lain. Jika bertepatan hari Jum'at maka kegiatan pembinaan dilaksanakan di Aula KPP Pratama Bojonegoro, dikarenakan berbenturan dengan masjid digunakan sholat Jum'at berjamaah.

Sarana dan Prasarana

Masjid dan mushaf Al Quran sebagai sarana utama, dengan didukung prasarana pelengkap baik meja kursi jika di aula, proyektor LCD, Buku tafsir, dan buku-buku lain sebagai pelengkap materi. Kegiatan pembinaan ini berbasis masjid, sehingga sarana utama adalah masjid.

Masjid adalah simbol keislaman. Ia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam, karena masjid merupakan bentuk ketundukan umat kepada Allah swt. Kata masjid terulang dua puluh delapan kali dalam

Alquran. Secara bahasa masjid berasal dari kata *sajada-sujud* artinya patuh; taat; tunduk dengan penuh hormat. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi, atau bersujud ini adalah bentuk lahiriyah yang paling nyata dari makna-makna tersebut. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk shalat dinamai masjid, “tempat bersujud”.

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum Muslim. Tapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakikat masjid menjadi tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah swt. Alquran menegaskan: “*Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah*”. (QS. Al-Jinn {72}: 18)

Rasulullah saw. bersabda: “*Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri*”. (HR Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah)

Tampaknya masjid bukan sekadar tempat sujud dan sarana penyucian atau bertayamum (wudhu dengan debu suci). Masjid adalah tempat Muslim bertolak, sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh dalam ketaatan kepada Allah swt. Masjid sebagai institusi kaum muslimin, merupakan indikator bagi muslim paripurna (*Insan Kamil*). Dengan predikat ini, umat muslim harus bisa memaksimalkan keberadaan masjid sebagai pusat aktivitas yang menawarkan kegiatan-kegiatan alternatif dalam berdakwah.¹⁰

Masjid dimasa kini memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam,¹¹ beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, *sebagai tempat beribadah*, Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, *Sebagai tempat menuntut ilmu*. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardlu ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid.

¹⁰ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta : Al qalam, 2009), hal. 44.

¹¹ Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, (Yogyakarta : Cahaya Hikmah, 1997), hal. 10.

Ketiga, *Sebagai tempat pembinaan jamaah*, Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, Masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Tamir Masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imanyah dan dawah islamiyahnya. Sehingga Masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh.

Keempat, *Sebagai pusat dawah dan kebudayaan Islam*, Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarkan dakwah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid, berperan sebagai sentra aktivitas dawah dan kebudayaan.

Kelima, *Sebagai pusat kaderisasi umat*, Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan umat, Masjid memerlukan aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara istiqamah dan berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di Masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Di antaranya dengan Taman Pendidikan Al Quraan (TPA), Remaja Masjid maupun Tamir Masjid beserta kegiatannya.

Keenam, *Sebagai basis Kebangkitan Umat Islam*. Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam percaturan peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai-nilai agamanya. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Setelah itu dicoba untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan riil umat. Menafasi kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai Islam. Proses islamisasi dalam segala aspek kehidupan secara arif bijaksana digulirkan.

Ketujuh, *Umat Islam berusaha untuk bangkit*. Kebangkitan ini memerlukan peran Masjid sebagai basis perjuangan. Kebangkitan berawal dari Masjid menuju masyarakat secara luas. Karena itu upaya aktualisasi fungsi dan peran Masjid pada abad lima belas Hijriyah adalah sangat mendesak (urgent) dilakukan umat Islam.

Atas dasar itulah kegiatan pembinaan ini dibasiskan di masjid Al Hidayah untuk memanifestasikan peningkatan kecerdasan spiritual bagi karyawati KPP Pratama Bojonegoro.

Dampak bagi Kecerdasan Spiritual

Dilandasi dengan beberapa hal dari masing-masing karyawati KPP Pratama Bojonegoro, yakni:

1. Keinginan yang tulus dan niat yang kuat untuk menghafal Al-Qur'an
2. Mempelajari aturan-aturan membaca Al-Qur'an di bawah bimbingan pembina yang mempelajari dan mengetahui dengan baik aturan aturan tersebut.
3. Terus bertekad memiliki keyakinan untuk menghafal Al-Qur'an setiap hari, yaitu dengan menjadikan hafalan sebagai wirid harian, dan disetorkan setiap pekan..
4. Mengulang hafalan yang telah dilakukan sebelum melanjutkan hafalan selanjutnya disertai dengan kesinambungan.
5. Niat dalam menghafal dan mendalalami selayaknya di niatkan demi mencari ridlo Allah SWT bukan untuk tujuan dunia.
6. Mengerjakan apa yang ada dalam Al-Qur'an, baik urusan-urusan kecil maupun yang besar dalam kehidupan.
7. Ketika Allah SWT memberi petunjuk kepada kita untuk kita, maka kita wajib mengajarkannya kepada orang lain.

Dengan semangat diatas dan keistiqomahan mengikuti kegiatan pembinaan sesuai jadwal, kegiatan pembinaan ini membawa dampak positif perubahan yang signifikan. Meliputi: variasi kemampuan dalam membaca Al Quran, dari ada yang belum mampu membaca secara benar dari aspek makhoriul huruf dan sifat-sifat huruf mampu mengenal dan menerapkan secara benar. Dari yang awal kegiatan pembinaan masih terbata-bata hingga lancar membaca sesuai dengan tajwid dan hukum washol serta waqofnya. Antusiasme karyawati yang ditunjukkan dalam keistiqomahan kehadiran serta peningkatan-peningkatan dalam kelancaran dan konsisten dalam penerapan tajwidnya juga dalam membaca Al ayat Al Ghoribaat. Selain itu semangat meningkat pada level mempelajari makna, terjemahan, tafsir serta hafalan pada surat-surat pendek dan surat-surat pilihan. Dari perubahan dan peningkatan yang signifikan inilah, kegiatan pembinaan ini mampu meningkatkan kecerdasan spiritual yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan ini.

Menurut Munandir kecerdasan spritual tersusun dalam dua kata yaitu "kecerdasan" dan "spiritual". Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang menuntut kemampuan fikiran. Berbagai batasan-batasan yang dikemukakan

oleh para ahli didasarkan pada teorinya masing-masing. Selanjutnya Munandir menyebutkan bahwa *Intelegence* dapat pula diartikan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan abstraksi-abstraksi, kemampuan mempelajari sesuatu, kemampuan menangani situasi-situasi baru. Kata '*spirit*' berasal dari kata benda bahasa latin '*spiritus*' yang berarti napas dan kata kerja '*spirare*' yang berarti untuk berkapas. Melihat asalnya, untuk hidup adalah untuk bernapas, dan memiliki napas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibanding hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Spiritualitas menunjukkan berbagai kata kunci yang dapat dipertimbangkan: makna (*meaning*), nilai-nilai (*values*), transendensi (*transcendence*), bersambung (*conneting*), dan menjadi (*becoming*). Makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada suatu tujuan. Nilai-nilai adalah kepercayaan, standar dan etika yang dihargai. Transendensi merupakan pengalaman, kesadaran dan penghargaan terhadap dimensi transendental terhadap kehidupan di atas diri seseorang. Bersambung adalah meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan dan alam. Menjadi adalah membuka kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seseorang dan bagaimana seseorang mengetahui.¹²

Dalam pengertian yang luas, spiritualitas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara. Di dalamnya mungkin terdapat kepercayaan terhadap kekuatan supernatural seperti dalam agama, tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. Spiritual adalah memiliki arah tujuan, yang secara terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta, dan menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari indra, perasaan, dan pikiran. Spiritualitas memiliki dua proses, pertama, proses ke atas, yang

¹² Hasan, Ali B. Purwakania. *Psikologi Perkembangan Islam (Menyingkap Ruang Kehidupan Manusia dari Pra Kelahiran hingga Pasca Kematian)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal :288-289.

merupakan tumbuhnya kekuatan internal yang mengubah hubungan seseorang dengan Tuhan. Kedua, proses ke bawah yang ditandai dengan peningkatan realitas fisik seseorang akibat perubahan internal.¹³

Spiritual Quotient atau kecerdasan spiritual merupakan temuan mutakhir secara ilmiah yang pertama kali digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, masing-masing dari Harvard University dan Oxford University melalui serangkaian penelitian yang sangat komprehensif. Dalam bukunya berjudul *Spiritual Intelligence: the Ultimate Intelligence*, Danah Zohar dan Ian Marshall menjelaskan bahwa SQ adalah inti dari segala *Intelligence*. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan orang lain.¹⁴ Dengan adanya kecerdasan ini, akan membawa seorang untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Karena adanya kepercayaan di dalam dirinya, dan juga bisa melihat apa potensi dalam dirinya. Karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan juga ada kekurangan. Intinya, bagaimana kita bisa melihat hal itu. Kecerdasan spiritual membawa seseorang untuk mendapat menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, dan tentu saja dengan Sang Maha Pencipta.

SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan Intelligent Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita, karena SQ merupakan landasan dan sumber dari kecerdasan yang lain.

Kecerdasan spiritual adalah potensi dari dimensi non-material atau roh manusia.¹⁵ Potensi tersebut seperti intan yang belum terasah yang dimiliki oleh semua orang. Selanjutnya, tugas setiap oranglah untuk mengenali potensi masing-masing sekaligus menggosoknya hingga berkilau dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan abadi.

Spiritualitas, dalam pengertian yang luas, merupakan hal yang

¹³ Ibid, hal: 289-290.

¹⁴ Zohar, Danah, dan Marshall, Ian. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*, (Jakarta: Pustaka Mizan, 2001), hal : 4

¹⁵ Khavari, Khalil A, *Spiritual Intelligence (A Practical Guide to Personal Happiness)*, (Canada: White Mountain Publications , 2000), hal: 20

berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia, sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kecerdasan spiritual adalah kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan ia dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup, karena merasa sebagai bagian dari keseluruhan. Sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki.

Mengukur Kecerdasan Spiritual

Individu yang cerdas secara spiritual melihat kehidupan ini lebih agung dan sakral, menjalaninya sebagai sebuah panggilan (vocation) untuk melakukan sesuatu yang unik, menemukan ekstase-ekstase kehidupannya dari pelayanan kepada gagasan-gagasan yang bukan pemuasan diri sendiri, melainkan kepada tujuan luhur dan agung, yang bahkan sering keluar dari dunia ini, bersifat abadi dan eksatologis. Kehidupan menjadi lebih sebagai instrument ketimbang tujuan akhir.

Sepadan dengan pandangan Zohar dalam mengidentifikasi sepuluh kriteria kecerdasan Spiritual seseorang, kegiatan pembinaan ini hasilnya juga tercermin dengan beberapa item, yaitu:

1. Kesadaran Diri
2. Spontanitas, termotivasi secara internal
3. Melihat kehidupan dari visi dan berdasarakan nilai-nilai fundamental
4. Holistik, melihat sistem dan universalitas
5. Kasih sayang (rasa berkomunitas, rasa mengikuti aliran kehidupan)
6. Menghargai keragaman
7. Mandiri, teguh melawan mayoritas
8. Mempertanyakan secara mendasar
9. Menata kembali dalam gambaran besar
10. Teguh dalam kesulitan

Ciri-ciri dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dalam diri karyawan KPP Pratama Bojonegoro (walaupun tidak mutlak sepenuhnya) adalah sebagai berikut:

¹⁶ Hasan Abdul Wahid, *SQ Nabi : Aplikasi Strategi dan Model Kecerdasan Spiritual Rosululloh di masa kini*, (Jogjakarta : IrcisoD, 2006), hal: 289

1. Kemampuan bersifat fleksibel
2. Tingkat kesadaran diri yang tinggi
3. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan
4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit
5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai
6. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu
7. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal
8. Kecenderungan nyata untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana” jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar.
9. Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai bidang mandiri, yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.

Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual

Berlandaskan pada aspek-aspek kecerdasan prespektif Khavari, ada beberapa aspek yang menjadi dasar kecerdasan spiritual karyawati KPP Pratama Bojonegoro, yaitu:

1. Sudut pandang spiritual-keagamaan, artinya semakin harmonis relasi spiritual-keagamaan karyawati kehadiran Tuhan, semakin tinggi pula tingkat dan kualitas kecerdasan spiritualnya.
2. Sudut pandang relasi sosial-keagamaan, artinya kecerdasan spiritual direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial.
3. Sudut pandang etika sosial. Semakin beradab etika sosial manusia semakin berkualitas kecerdasan spiritualnya.

Hal inilah sebagai wujud dari implementasi kegiatan pembinaan karyawati KPP Pratama Bojonegoro dengan Masjid Al Hidayah sebagai basisnya untuk mengembangkan spiritual quotient melalui program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran.

Penutup

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, baik yang bersifat diskriptif maupun yang bersifat empiris praktis, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pembinaan ini dirancang dengan metode harfiah, shoutiyah, maqthoiyah, kalimah, jumlah, dan jama'iyah dalam mengimplementasikan program tahsin dan didukung strategi yang bisa meningkatkan program tahfidz. Yakni: Ikhlas, memperbaiki ucapan dan

bacaan, menentukan presentase hafalan setiap hari, jangan melampaui kurukulum harian hingga bagus hafalannya secara sempurna, menggunakan satu jenis mushaf, memahami ayat-ayat yang dihafalnya, menghafal urutan-urutan ayat yang dihafalnya dalam satu kesatuan surat setelah benar-benar hafal ayat-ayatnya, mengulang dan memperdengarkan hafalannya secara rutin, dan memperhatikan ayat-ayat yang serupa. Strategi tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu atau kualitas hafalan Al-Qur'an. Dengan strategi menghafal yang baik dalam proses pembelajaran menghafal Al-Qur'an maka tujuan pembelajaran menghafal Al-Qur'an tercapai. Metode tafsir yang digunakan adalah metode *Tahlili* (analitik), metode *ijmali* dan metode *muqorron*. Sedangkan materinya meliputi makhorijul huruf, sifatul huruf, ilmu tajwid, tanda waqof dan washol serta al ayaat almutasibahat.

Pembinaan karyawati KPP Pratama Bojonegoro membawa dampak perubahan dalam peningkatan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang dimiliki setiap karyawati untuk dapat memberikan makna, nilai dan tujuan dalam hidupnya serta meningkatkan motivasi dalam bekerja sehingga selalu bersemangat karena tidak didasarkan rasa keterpaksaan melainkan karena ibadah yang hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada sang pencipta. Karyawati memiliki kecerdasan spiritual yang dalam hidupnya bersikap jujur, penuh energi, memiliki motivasi yang tinggi, spontan, tidak penuh curiga, terbuka menerima hal-hal baru, senang belajar, mudah memaafkan, tidak mendendam, berani mencoba hal-hal baru serta tidak mudah putus asa jika mengalami atau menghadapi kegagalan dalam kehidupan berkeluarga dan berorganisasi serta bekerja. Cara mengasah Kecerdasan Spiritual dengan melalui proses pebelajaran Al Quran sebagai materi utama dengan program tahsin, tafsir dan tahfidz Al Quran. Kegiatan pembinaan ini mampu memakmurkan masjid Al Hidayah di KPP Pratama Bojonegoro yang signifikan dengan kebutuhan masa kini yakni memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam. Selain untuk menjalankan ibadah kepada Allah swt, terutama salat berjamaah, juga optimalisasi fungsi masjid, baik pada tingkat intensifikasi maupun ekstensifikasi, pada gilirannya dapat bermanfaat bagi pembinaan masyarakat, terutama pembinaan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual karyawati KPP Pratama Bojonegoro.[]

Daftar Pustaka

- Al-'Aliyy, 2000. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Abdullah, Supriyanto. 1997. *Peran dan Fungsi Masjid*, Yogyakarta : Cahaya Hikmah.
- Aziz, Abdul, Abdul Rauf. 1427 H .*Kiat Sukses Menjadi Hafizh Qur'an Da'iyah*, Markaz Quran.
- Hasan, Ali B. Purwakania. 2006. *Psikologi Perkembangan Islam (Menyingkap Ruang Kehidupan Manusia dari Pra Kelahiran hingga Pasca Kematian)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan, Abdul Wahid. 2006. *SQ Nabi : Aplikasi Strategi dan Model Kecerdasan Spiritual Rosululloh di masa kini*, Jogjakarta : IrcisoD.
- Khavari, Khalil A. 2000. *Spiritual Intelligence (A Practictical Guide to PersonalHappiness)*, Canada: White Mountain Publications.
- Qomar, Mujamil. 1995. *Epistomologi Pendidikan Islam*, Jakarta : Erlangga.
- Salim, Ahmad, Badwilan. 2009. *Panduan Cepat Menghafal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Diva Press.
- Sa'dulloh, S. Q. 2013, *9 Cara Praktis Mengafal Al-Qur'an*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Syauqi, Rifat, Nawawi. 1992. *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ulum, M.Samsul. 2007. *Menangkap Cahaya Al-Qur'an*, Malang:UIN Malang Press.
- Yani, Ahmad. 2009. *Panduan Memakmurkan Masjid*, Jakarta : Al qalam.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Kamus Arab-Indonesia*, : Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Zohar, Danah, dan Marshall, Ian. 2001. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*, Jakarta: Pustaka Mizan.

Perempuan Peladang, dari Perempuan Terkebelakang menuju Perempuan Berkembang; Pemberdayaan Berbasis Riset pada Perempuan Peladang di pinggir hutan Rimbo Air Karuah Lambah Tabiang- Bukit Talang- Limo Koto Kec. Bonjol Kab. Pasaman

MUHIDDINUR KAMAL

IAIN Bukittinggi, Indonesia
muhiddinurkamal@gmail.com

Abstrak: Komunitas Masyarakat pinggir hutan, merupakan salah satu bentuk komunitas kehidupan masyarakat yang termarginalkan di Indonesia. Marginalisasi masyarakat pinggir hutan ini bukan tanpa suatu alasan. Kondisi ini disebabkan oleh basis ekonomi dan pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, serta jauh dari informasi dan teknologi pertanian. Masyarakat Lambah Tabiang-Bukit Talang, salah satu masyarakat pinggir hutan yang ada di kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Sumber kehidupan bagi masyarakat ini adalah peladang di hutan dan juga mengolah lahan pertanian. Lokasi Peladangan yang jauh dari pemukiman menjadikan mereka sebagai masyarakat peladang yang jauh dari informasi, dan komunikasi. Kondisi kehidupan mereka di atas sangat mengkuatirkan bagi perkembangan sosial ekonomi serta keagamaan Hal demikian juga berdampak buruk bagi perkembangan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Anak-anak telah putus sekolah, dan sebagian kecil hanya tamat SD. Jika terus dibiarkan maka akan menjadi mata rantai kemiskinan yang berkesinambungan. Oleh karena itu pengabdian berupa pembinaan sosial keagamaan bagi masyarakat pinggir hutan khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) bagi perempuan masyarakat pinggir hutan Rimbo Air Karuah Lambah Tabiang-Bukit Talang jorong Batu Badinding dilaksanakan dengan harapan agar mereka keluar dari belenggu kebodohan dan ketertinggalan teknologi yang mengakibatkan terbelenggu kemiskinan.

Kata kunci: Komunitas, hutan, perempuan, ladang.

Pendahuluan

Kemiskinan dan ketertinggalan pada masyarakat pinggir hutan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Keinginan menanggulangi kemiskinan di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada periode 1980-an, pemerintah sudah pernah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan yaitu, *pertama*, mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah kemiskinan, dan *kedua*, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.¹

Penanggulangan kemiskinan nampaknya sampai sekarang belum mencapai hasil yang diharapkan. Kemiskinan masih terlihat di mana-mana dan penurunan yang signifikan belum terasa bahkan isu-isu ketimpangan sosial makin membengkak. Kesenjangan dan diskriminasi akses juga terjadi sebagai masalah krusial.² Rendahnya pendidikan dan pengetahuan dengan cara pertanian tradisional yang dikuasai dan diterapkan secara turun temurun oleh satu komunitas masyarakat menjadi salah satu penyebab ketertinggalan masyarakat pinggir atau masyarakat di sekitar hutan.

Kegiatan perladangan dan pengolahan lahan pertanian masyarakat sekitar pinggir hutan secara umum, terkait erat dengan kondisi alam setempat. Kegiatan para peladang dan jenis kegiatan yang dilakukan seperti bercocok tanam hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar. Walaupun terkadang mereka berladang dilahan yang subur namun karena berbagai keterbatasan seperti teknologi dan informasi, umumnya mereka secara ekonomi tetap pada kelompok miskin dan termarginalkan.

Masyarakat Lambah Tabiang-Bukit Talang merupakan salah satu masyarakat pinggir hutan yang ada di kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Sumber kehidupan bagi masyarakat ini adalah peladang di hutan *Rimba Air Karuah* dan juga mengolah lahan pertanian. Lokasi Peladangan yang jauh dari pemukiman dengan jarak sekitar delapan (8) kilometer dari

¹ Roesmidi dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Sumedang: Alqaprint Press, 2008),99

² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jokjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 21.

perkampungan menjadikan mereka sebagai masyarakat peladang yang hidup mengisi waktu di peladangan yang jauh dari informasi, dan komunikasi. Walaupun mereka memiliki rumah di perkampungan penduduk, namun karena jarak yang cukup jauh menyebabkan mereka lebih banyak menghabiskan waktu tinggal di ladang dengan membangun pondok di perladangan. Umumnya mereka hanya sekali seminggu ke perkampungan untuk menjual hasil ladang pada hari kamis dan sekaligus melaksanakan shalat jum'at bagi laki-laki. Pada sore hari jum'at mereka sudah kembali lokasi perladangan di hutan dan kembali lagi ke perkampungan setelah seminggu kemudian.

Peladangan di hutan *Rimbo Air Karuah* oleh masyarakat Lambah Tabiang-Bukit Talang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, justru peladangan Rimba ini di lakukan oleh kebanyakan perempuan. Keberadaan perempuan-perempuan tangguh dalam menopang hidup ekonomi keluarga sungguh sangat terasa, karena sebagian besar para peladang justru para perempuan. Para perempuan menghabiskan waktu mereka di peladangan hutan *Rimbo Air Karuah* karena tuntutan ekonomi keluarga. Mereka umumnya dari keluarga ekonomi lemah dan para janda-janda sebagai tulang punggung keluarga.

Disamping lemah dalam bidang teknologi pertanian tepat guna yang mengakibatkan rendahnya pendapatan (ekonomi), kehidupan sosial keagamaan komunitas masyarakat pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang juga mengkuatirkan, terutama bagi perkembangan sosial, pendidikan serta kehidupan masa depan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh kegiatan orang tua di peladangan menyebabkan perhatian terhadap pendidikan dan keagamaan anak-anak terabaikan. Hal ini jika terus berlanjut maka akan menjadi mata rantai kemiskinan yang selalu sambung menyambung dan akan menjadi suatu lingkaran kemelaratan. Kondisi kehidupan mereka di atas sangat mengkuatirkan bagi perkembangan sosial ekonomi serta keagamaan kehidupan mereka. Kondisi kehidupan yang sulit menyebabkan diantara mereka banyak yang buta aksara dan juga buta aksara Al Qur'an.

Masyarakat pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang maka akan dapat dianggap berdaya bila mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan serta penguasaan cara pertanian

yang mengandalkan pengetahuan turun temurun yang sangat konvensional dan jauh dari teknologi tepat guna menjadi salah satu penyebab ketertinggalan masyarakat pinggir atau masyarakat di sekitar hutan. Para peladang di *Rimbo Air Karuah* Lambah Tabiang-Bukit Talang umumnya terkendala dalam penerapan teknologi tepat guna disebabkan oleh beberapa faktor seperti sosiologis, teknologi dan ekonomi.

Oleh karena itu program pembinaan sosial keagamaan bagi masyarakat pinggir hutan khususnya pendidikan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi perempuan masyarakat pinggir hutan *Rimbo Air Karuah* di Lambah Tabiang- Bukit Talang jorong Batu Badinding perlu untuk dilaksanakan dengan harapan agar mereka keluar dari belenggu kebodohan dan ketertinggalan teknologi yang mengakibatkan terbelenggu kemiskinan.

Potensi

Perempuan Peladang di *Rimbo Air Karuah* yang mendiami pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang walaupun memiliki segudang permasalahan baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya yang menyebabkan mereka terkebelakang dari masyarakat lain di sekitar mereka namun mereka juga memiliki potensi-potensi yang butuh untuk dikembangkan. Secara umum, potensi-potensi tersebut dapat diuraikan berikut ini:

1. Secara ekonomis sebenarnya mereka memiliki potensi untuk hidup yang lebih baik mengingat lahan hutan perladangan *Rimba Air Karuah* cukup subur dan baik sekali untuk dijadikan perladangan.
2. Secara Agama sebenarnya mereka memiliki potensi untuk hidup secara religius mengingat mereka pada dasarnya secara penganut Islam yang sudah turun temurun.
3. Secara kultural sebenarnya mereka memiliki untuk hidup lebih maju dan berbudaya karena mereka ditopang oleh adat istiadat Minangkabau yang berfalsafah *Adat Bersendi Syara ' , syara' bersendi kitabullah*.
4. Secara sosiologis sebenarnya mereka memiliki potensi untuk hidup lebih kompak dan kuat karena mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi.

Signifikansi

Pemberdayaan perempuan peladang ini bertujuan untuk pembinaan masyarakat pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang khususnya peningkatan SDM perempuan agar mereka terlepas dari kemiskinan dan ketertinggalan yang menyebabkan mereka termarginalkan ditengah-tengah

hingar bingar kehidupan masyarakat Indonesia. Marjinalisasi ini semakin terasa ketika kehidupan mereka yang semakin jauh tertinggal baik ekonomi, pendidikan, sosial keagamaan maupun teknologi tepat guna.

Oleh karena itu tuntutan pembinaan terhadap komunitas masyarakat pinggir hutan khususnya peningkatan SDM perempuan peladang di Lambah Tabiang-Bukit Talang Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman perlu mendapat perhatian yang serius. Ada beberapa alasan mengapa pembinaan itu perlu segera dilakukan. *Pertama*, Marjinalisasi yang terjadi terhadap komunitas masyarakat pinggir hutan merupakan akibat dari pembangunan yang mengabaikan dan kurang menyentuh bagi masyarakat tersebut. *Kedua*, Pembinaan pada komunitas masyarakat pinggir hutan dapat menjalin dan menjaga hubungan kesetaraan pada pergaulan antar warga masyarakat serta memberi ruang bagi masyarakat pinggir hutan untuk ikut menikmati kemajuan ekonomi dan budaya.

Kajian Kepustakaan

Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari "*empowerment*" mengandung dua pengertian: *a. to give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/ kemampuan atau memungkinkan untuk, *b. to give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Berdasarkan hal di atas maka pengertian pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih daya, yang merupakan makna kecenderungan primer. Kedua, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memnyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.³

Sementara itu, Abu Huraerah, menjelaskan bahwa pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*", secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam pemberian atau peningkatan "kekuasaan"

³ Onny S Priyono dan A.M.W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 56-57.

(*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*).⁴

Sementara Swift dan Levin yang di kutip oleh Edi Suharto, mengatakan pemberdayaan menunjuk pada usaha "*reallocation of power*" melalui pengubahan struktur sosial. Sedangkan Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (*berkuasa atas*) kehidupannya.⁵ Konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep: kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

Dari pendapat di atas pada intinya pemberdayaan diartikan sebagai mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, sumber-sumber keuangan. Bila ekonomi rumah tangga tersebut meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat atau dengan kata lain ada peningkatan kekuatan sosial.

Menurut Wasistiono pemberdayaan dibedakan menjadi empat macam dilihat dari sasaran ruang lingkupnya, yaitu sebagai berikut.

1. Pemberdayaan pada individu anggota organisasi anggota masyarakat;
2. Pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat
3. Pemberdayaan pada organisasi; dan
4. Pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan⁶

Robert Chambers, merupakan salah seorang ahli yang pemikiran dan penelitiannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Chambers yang dikutip oleh Kartasmita menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep

⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 82

⁵ Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: LSPSTKS, 1997), 2

⁶ Wasistiono, *Pemberdayaan Aparatur Daerah*, (Bandung: Abdi Praja, 1998), 46

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" Konsep ini lebih semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau lebih menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. yang pemikirannya akhir-akhir ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan masa lalu.⁷

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah alat untuk mencapai tujuan (*mean of an end*), untuk memperkuat kapasitas organisasi/kelompok mereka agar mampu mengubah keadaan saat ini, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat.

Isu utama tentang pemberdayaan dalam pembangunan menurut Chambers yang di kutip oleh Roesmidi dan Riza Risyanti, adalah menyampaikan konsep "perangkap *deprivasi*" (*concept of deprivation trap*) yang menganalisis penyebab kemiskinan sebagai kompleksitas serta hubungan sebab akibat yang saling berkaitan dan ketidakberdayaan (*power lessenes*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*). Ada keterkaitan antara ketidak berdayaan dengan dimensi perangkap yang lain.⁸

Situasi ketidakberdayaan dapat diatasi dengan "*enabling and powering the poor*" yang merupakan upaya penting karena kemiskinan bukan merupakan kondisi alamiah semata-mata melainkan suatu proses pengingkaran pemberdayaan secara sosial, ekonomi dan politik (*social, economic and political disempowerment*).

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang

⁷ Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 1996), 10

⁸ Roesmidi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang, Alqaprint, 2008), 11

lebih besar.⁹ Namun demikian, untuk memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi), agar mereka menjadi lebih berdaya.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial-ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "power" (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut: *Learning by doing, Problem solving, Self-evaluation, Self-development and coordination, Self-selection, Self-decisim. (self-confidence) (self-decisim)*. Enam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding sendirinya (*snow ball*).

Menurut Sunyoto Usman, yang dikutip oleh Abu Huraerah menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai.¹⁰

Masyarakat dalam proses ini dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal dibutuhkan sehingga memperoleh hasil optimal. Dengan kata prinsip yang dikedepankan dalam proses pemberdayaan adalah memberi peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemauan, pengetahuan, dan kemampuannya.

Kartasmita, memberikan pandangan bahwa memberdayakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 86

¹⁰ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 87

dan keterbelakangan.¹¹ Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan Pendapat Azis yang dikutip oleh Abu Huraerah, merinci tahapan-tahapan yang seharusnya dalam melakukan pemberdayaan. *Pertama*, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. *Kedua*, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (*partisipatif*). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga periodik (terus-menerus). *Ketiga*, menentukan skala prioritas masalah dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. *Keempat*, mencari penyelesaian masalah sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan *sosio-kultural* yang ada dalam masyarakat. *Kelima*, melaksanakan tindakan nyata menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. *Keenam*, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalannya.¹² Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dubois dan Miley dalam Abu Hurairah (2008: 93), memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang: Merefleksikan respon empati; Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), Menghargai perbedaan dan keunikan individu; Menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
2. Membangun komunikasi yang: Menghormati martabat dan harga diri klien; Mempertimbangkan keragaman individu; Berfokus pada klien; Menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang meliputi: Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; Menghargai hak-hak klien; Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

¹¹ Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 1996), 11-12

¹² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 88

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: Ketaatan terhadap kode etik profesi; Keterlibatan dalam pengembangan profesional; riset, dan perumusan kebijakan; Penterjemahan kesulitan-kesulitan ke dalam isu-isu public, Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan

Pemberdayaan Perempuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, di mana dinyatakan bahwa tujuannya untuk mencapai kedudukan setara (*equal status*) perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan, dan penikmat di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga dinyatakan untuk memberdayakan (*empower*), perempuan dan laki-laki perlu kerja sama sebagai mitra setara, dan memberi inspirasi kepada suatu generasi baru kaum perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian

Pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam pembangunan (*women in development/WID*) disebut oleh Moser ada lima cara: Pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*); Pendekatan keadilan (*the equity approach*); Pendekatan pengentasan kemiskinan (*the anti poverty approach*) Pendekatan efisiensi (*the efficiency approach*); Pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*)

Pendekatan kelima yaitu pendekatan pemberdayaan, menekankan pada fakta bahwa perempuan mengalami penekanan yang berbeda menurut bangsa, kelas sosial sejarah penjajahan kolonial, dan kedudukannya dalam orde ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian perempuan tetap harus menantang struktur dan situasi yang menekannya secara bersama pada tingkatan yang berbeda. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya bagi wanita untuk meningkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan akan merupakan kehilangan bagi lelaki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*), dan kuatan dalam dirinya (*internal strength*).

Pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna

perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut, yaitu perjuangan wanita.

Definisi-definisi tersebut mencerminkan bahwa proses pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologi, sosial budaya, ekonomi dan politik yang berkaitan erat satu sama, karena dengan adanya jaringan kerja sama di antaranya yang saling memberdayakan dapat tercipta transformasi sosial di mana ada penekanan dan pembedaan terhadap kaum perempuan.

Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual atau kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan sesama perempuan dalam kelompok atau organisasi, khususnya organisasi perempuan. Sedangkan strategi pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar dengan lelaki menggunakan pendekatan dua arah wanita dan pria yang saling menghormati sebagai manusia (*human being*), saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian.

Metode dan Pendekatan

Pengabdian masyarakat menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dampungan kegiatan pengabdian masyarakat adalah masyarakat: 1). Masyarakat pedesaan, 2). Kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah. 3) Individu dan kelompok

Metode yang dipakai dalam pemberdayaan perempuan peladang masyarakat pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman mengambil rinsip-prinsip kerja dari model Riset Aksi (*Action Research Methode*). Metode ini dianggap tepat dalam memberdayakan komunitas masyarakat peladang. *Pertama*, karena komunitas masyarakat pinggir hutan merupakan kelompok *powerless* yang memerlukan keberpihakan dalam melakukan keberpihakan. *Kedua*, riset aksi digunakan yang dilengkapi dengan kegiatan pendampingan dan ini merupakan instrumen yang tepat, guna menghilangkan kesadaran semu terhadap kemapanan sementara yang

ada pada kelompok masyarakat lemah dan memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai modal bisa bangkit dari ketidakberdayaan tersebut.

Pendekatan-pendekatan yang lebih praktis sifatnya sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakat pinggir hutan. Beberapa pendekatan yang akan dipakai antara lain

1. *Partisipasi*, pendekatan partisipasi tidak hanya berarti mobilisasi tetapi juga hak keterlibatan dalam mekanisme kontrol dan memperoleh akses dari berbagai stakeholder dalam pemberdayaan komunitas pinggir hutan di Lambah Tabiang- Bukit Talang Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.
2. *Partnership*, membangun kemitraan (*partnership building*) merupakan salah satu pendekatan yang sangat efektif diterapkan ke dalam program-program yang sifatnya multi stakeholder dan melingkupi aspek yang cukup luas. Sasaran dari partnership adalah membangun keterbukaan, juga membangun kontrol bersama, yang diharapkan mampu menumbuhkan *trust* bersama dari pihak-pihak yang terkait dalam program ini antara lain: lembaga adat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
3. *Networking* (jaringan kerja) sangat bermanfaat untuk membangun semangat visi gerakan bersama. Kerjasama diantara masyarakat peladang dapat berfungsi sebagai advokasi kekuatan-kekuatan diluar komunitas peladang. Sementara kerjasama vertical antara komunitas peladang dengan institusi supra komunitas dapat memperkuat terjadinya akses informasi dan teknologi.
4. *Process Oriented* (Menghargai Proses), pendekatan yang mencurahkan perhatian pada process oriented ditujukan untuk mempersiapkan secara sungguh-sungguh pemberdayaan komunitas peladang yang berbasis pada kemampuan yang dimiliki oleh komunitas bersangkutan. Menghargai proses merupakan suatu strategi pemberdayaan yang sungguh dimulai dari bawah, sekaligus menyiapkan orientasi pondasi yang kokoh bagi komunitas untuk selalu memperjuangkan "*diri mereka*" sendiri. Orientasi semacam ini sangat penting untuk menumbuhkan kemandirian setelah program ini secara formal selesai

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang Jorong Batu Badinding Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

1. *Need Assisment*, sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan merumuskan bentuk-bentuk penguatan komunitas peladang. *Need Assisment*, di lapangan dilakukan untuk mempetakan performance komunitas peladang baik mengenai marjinalisasi, relasi komunitas dengan institusi-institusi supra komunitas, kondisi perekonomian, dll.
2. Merumuskan *Stratetic Planing*, pemberdayaan komunitas peladang di Lambah Tabiang-Bukit Talang Jorong Batu Badinding Kecamatan Bonjol. Kegiatan dari tahap ini antara lain menganalisa hasil-hasil temuan dari *need assisrment* kemudian mendialogkannya dengan berbagai pihak melalui serangkaian diskusi.
3. Assistensi Kelompok perempuan dalam peningkatan SDM pada masyarakat pinggir hutan melalui pelatihan. Assistensi ini termasuk pula pendampingan yang dilakukan oleh asisten lokal.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Alam dan Kondisi Sosial Masyarakat

Letak perkampungan Lambah Tabiang-Bukit Talang dapat di lihat dari dua sudut pandang. Dari sudut kultural dan sudut teritorial. Dari sudut kultural, Lambah Tabiang-Bukit Talang termasuk dalam masyarakat adat Minangkabau, dan jika di lihat dari teritorial administratif pemerintahan, perkampungan Lambah Tabiang-Bukit Talang merupakan salah satu perkampungan yang termasuk dalam jorong Batu Badinding selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Lambah Tabiang-Bukit Talang sebuah perkampungan yang terletak di lembah dan juga di atas bukit yang banyak ditumbuhi pohon Talang (*bamboo*), maka masyarakat memberinya nama dengan Lambah Tabiang-Bukit Talang yang berarti kampung yang terletak di di atas bukit. Salah satu tebing bukit itu merupakan di jadikan jalan bagi masyarakat untuk menuju peladangan masyarakat ke hutan rimba.

Sebagian masyarakat kampung Lambah Tabiang-Bukit Talang pergi merantau. Dan sebagian yang lain masih tetap bertahan di kampung. Ada beberapa rumah di tinggal tanpa penghuni. Faktor kondisi alam yang sempit dan berbukit serta sulitnya kehidupan di peladangan menjadi penyebab alasan mereka untuk merantau.

Kajian Pemberdayaan

1. Pengkajian Alur Sejarah (*Timeline*) Sebagai Modal Membangun Kesadaran Perempuan Peladang Untuk Keluar dari keterbelakangan

Permasalahan terbesar bagi perempuan peladang di Peladangan *Rimbo Air Karuah* adalah masalah keterbelakangan dari masyarakat lainnya di kecamatan Bonjol. Keterbelakangan mereka dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Kesulitan selama ini dalam memberdayakan sekaligus mengeluarkan mereka dari belenggu keterbelakangan adalah kesadaran yang sangat rendah untuk keluar dari keterbelakangan. Maka solusi dari permasalahan di atas adalah dengan jalan pengkajian terhadap sejarah mereka dengan diskusi dengan tetua adat (nini mamak). Hasil diskusi yang dilakukan secara partisipatif dapat mengungkap bahwa pada dasarnya mereka adalah keturunan dari pejuang-pejuang penentang penjajah Belanda pada masa lalu. Ketidakmauan untuk tunduk kepada pemerintah Belanda menyebabkan mereka melakukan migrasi sampai akhirnya mereka sampai di Bukit Talang. Secara ringkas alur sejarah (*timeline*) masyarakat pinggir hutan Bukit Talang dapat diungkap sebagai berikut.

Migrasi masyarakat Agam yang menjadi cikal bakal Masyarakat Lambah Tabiang Bukit Talang diperkirakan berkisar sekitar tahun 1837 M. Perkiraan ini berdasarkan keterangan dari nini mamak yang menjelaskan bahwa penyebab migrasi nenek mereka dahulu ke daerah Limo Koto Kecamatan Bonjol adalah sebagai dampak dari kekalahan pasukan Paderi dengan pihak Belanda.

Lebih mendalam dijelaskan bahwa dahulunya nenek moyang mereka adalah pasukan perang yang tergabung dalam kelompok kaum paderi (kebenaran ini belum dibuktikan sejarah tapi masih dalam penajakan). Keterangan di atas cukup memungkinkan karena dampak dari kekalahan kaum paderi dengan Belanda di atas akhirnya Belanda menduduki Agam. Merasa tidak menyukai dan tidak mau takluk kepada Belanda, mereka menyusuri arah ke utara dan akhirnya mereka sampai pada suatu tempat yang bernama *Mansang*. Di daerah *Rimbo Mansang* ini mereka bermukim hingga akhirnya mereka dijemput oleh penghulu kaum (Datuk) yang ada di nagari Limo Koto waktu itu untuk tinggal bersama di daerah Limo dengan diberi ulayat (daerah) Mansang dan perkampungan Lambah Tabiang-Bukit Talang yang ada sekarang. Sejak

saat itulah mereka menjadi warga masyarakat Batu Badinding Limo Koto Kumpulan Kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman.

Pengkajian sejarah (*timeline*) yang dilakukan sebagai pintu masuk bagi penyadaran mereka dari keterbelakangan. Dengan pengkajian sejarah asal usul mereka maka dapat menumbuhkan kesadaran mereka untuk bangkit dari keterpurukan karena nenek moyang merupakan pasukan perang paderi dan orang-orang yang tangguh di zamannya.

2. Rabithah Wirid Yasin Perempuan: Kearifan Lokal Yang Masih Bertahan sebagai Sarana Pemberdayaan Bagi Perempuan Peladang.

Pada waktu lalu, sulitnya mengumpulkan masyarakat peladang untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan, apakah kegiatan itu berupa kegiatan PKK, Posyandu, dan sebagainya yang ada di perkampungan karena kesadaran yang rendah untuk berubah. Berbagai program yang dilakukan seringkali kandas karena perempuan peladang memandangnya suatu yang kurang menarik bagi mereka. Berdasarkan permasalahan di atas maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kultural. Dengan pendekatan ini diharapkan mereka dapat meluangkan waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan di perkampungan Lambah Tabiang-Bukit Talang.

Rabithah Wirid Yasin menjadi sarana bagi mengumpulkan masyarakat peladang. Dengan adanya kelompok wirid yasin akan dapat memudahkan dalam mengumpulkan masyarakat untuk menerima berbagai informasi dan kegiatan. Hal ini dimungkinkan karena biasanya masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ternyata pendekatan kultural melalui wirid yasin dapat untuk menjadi sarana melakukan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Program Pemberdayaan Bagi Perempuan Peladang

1. Pemberdayaan Bidang Pendidikan: Pelatihan singkat cara cepat Baca Tulis Alqur'an bagi Perempuan Peladang

Permasalahan keterbelakangan bagi perempuan peladang Hutan *Rimbo Air Karuah* di Lambah Tabiang-Bukit Talang adalah kurangnya akses mereka dengan berbagai kegiatan perempuan yang ada di desa. Informasi dan pembinaan perempuan pedesaan umumnya melalui kegiatan "*Rabithah Wirid Yasin*" (RAWIYA). Rabithah Wirid Yasin ini sebagai sarana bagi pendidikan bagi perempuan pedesaan yang ada di kecamatan Bonjol dan kabupaten Pasaman pada umumnya. Dalam kegiatan tidak hanya kegiatan pembacaan surat yasin tetapi banyak

kegiatan-kegiatan perempuan lainnya seperti demo masak, penyuluhan-penyuluhan dari berbagai lembaga-lembaga masyarakat ataupun pihak pemerintahan.

Keterbatasan kemampuan membaca Al-Qur'an bagi perempuan peladang di atas menyebabkan mereka merasa rendah diri (*minder*) untuk mengikuti kegiatan RAWIYA ataupun pengajian-pengajian gabungan yang ada di mesjid-mesjid yang ada di nagari. Keterbatasan kemampuan dalam membaca Al-Qur'an ini menyebabkan sebagian besar dari mereka jarang mengikuti kegiatan-kegiatan perempuan pedesaan yang ada di jorong atau di Nagari mereka seperti kelompok wirid yasin gabungan yang ada di jorong-jorong (desa-desa) atau di nagari-nagari.

Kegiatan pengentasan buta aksara Al Qur'an dengan pelatihan singkat cara cepat baca tulis Al Qur'an bagi perempuan peladang menjadi urgen sehingga setelah mereka mampu baca tulis Al Qur'an akan menjadi pintu pembuka bagi mereka mengikuti kegiatan di Rabithah Wirid Yasin (RAWIYA) bersama dengan perempuan desa lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Roesmidi dan Riza Ristianti menjelaskan bahwa pemberdayaan harus dimulai dari diri masing-masing di mana pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan psikologi, budaya, ekonomi dan politik. Pada umumnya profil wanita di pedesaan adalah miskin, dibebani berbagai jenis pekerjaan, buta aksara, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Secara kuantitatif jumlah wanita buta aksara makin berkurang. Usaha pemberantasan buta aksara baik di tingkat nasional maupun internasional telah dilakukan dan pendidikan dasar merupakan prasyarat bagi pembangunan.¹³

2. Pemberdayaan Ekonomi: Pembentukan kegiatan Tabungan berbasis Surau bagi Perempuan Peladang

Perempuan Peladang yang tinggal di pinggir hutan di perkampungan Lambah Tabing- Bukit Talang umumnya masyarakat dalam kategori ekonomi lemah dengan penghasilan dari hasil peladangan di *rimbo Air Karuah*. Sebagian besar para perempuan menjadi perempuan peladang dan buruh tani baik di ladang maupun di sawah-sawah masyarakat. Rendahnya ekonomi menyebabkan mereka sering mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi sesaat dengan melakukan

¹³ Roesmidi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang, Alqaprint, 2008), 132

pinjaman. Hal ini tentunya menyebabkan mereka dililit hutang dari waktu ke waktu. Penghasilan kerja keras mereka di peladanganpun kadang-kadang hampir tidak mereka nikmati ketika panen karena harus membayar hutang.

Masyarakat pinggir hutan, umumnya mereka terjerat hutang untuk memenuhi kebutuhan modal untuk bibit sewaktu akan memulai penanaman lahan peladangan. Selain itu, mereka juga dililit hutang ketika akan menghadapi lebaran (Idul fitri). Bagi mereka hari raya Idul fitri merupakan suatu hari kebahagiaan dengan berbagai perlengkapan dan pernak-pernik hari raya seperti baju baru, kue lebaran dan yang yang mesti ada adalah daging untuk rendang. Sesusah apapun mereka namun pada hari raya mesti ada daging rendang di rumah, meskipun mereka harus membayar dengan uang setelah hasil panen.

Dengan terungkapnya pokok permasalahan yang menyebabkan mereka terjerat hutang sebagaimana hal di atas maka salah satu program kegiatan yang dilakukan adalah membentuk tabungan masyarakat peladang yang berbasis surau. Maksudnya pada setiap kegiatan baik berupa wirid yasin, pengajian atau kegiatan lainnya di surau maka disaat yang sama dibuka kegiatan simpan masyarakat yang terutama digunakan bagi modal bibit dan untuk biaya berlebaran. Dengan kegiatan tabungan, masyarakat tidak lagi terjerat tengkulak.

3. Pemberdayaan Sosial Politik: Pembentukan Kelompok Tani Perempuan “*Sakinah*” bagi Perempuan Peladang

Pembentukan kelompok tani perempuan peladang pada masyarakat pinggir hutan di perkampungan Lambah Tabiang-Bukit Talang, merupakan wadah dalam peningkatan SDM perempuan peladang. Hal ini sangat penting, mengingat belum adanya wadah perkumpulan yang terorganisir bagi para perempuan peladang yang umumnya sebagai peladang di hutan rimba “*Air Karuah*” dalam bentuk kelompok tani.

Pentingnya pengorganisasian dalam bentuk kelompok tani (kelompok peladang) bagi perempuan pada masyarakat pinggir hutan di perkampungan Bukit Talang, mengingat karena organisasi merupakan suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan menetapkan wewenang secara efektif yang didedikasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut terutama dalam kegiatan perladangan bagi perempuan pinggir hutan.

Dengan adanya organisasi kelompok tani “*Sakinah*” ini, maka proses pekerjaan akan diatur dan dibagikan diantara para anggota-anggota organisasi sehingga tujuan akan dapat dicapai secara efisien.

Suatu pengorganisasian akan membentuk suatu rangkaian kegiatan atau suatu proses yang mewujudkan agar semua unit dan personal berfungsi dalam melaksanakan tugas pokok, khususnya yang terdapat dalam perencanaan yang dibuat.

Adapun tujuan pembentukan organisasi kelompok tani *Sakinah* bagi perempuan peladang pada masyarakat pinggir hutan di perkampungan Lambah Tabiang-Bukit Talang adalah:

- a. Agar seluruh pekerjaan perladangan yang akan dilaksanakan baik kelompok kerja atau individu mempunyai tanggung jawab.
- b. Agar adanya tanggung jawab masing-masing individu kepada setiap kelompok kerjanya.
- c. Agar setiap komponen masyarakat dapat menciptakan lingkungan kerja yang sesuai kondisi dan menyenangkan.
- d. Adanya tindakan pembagian kerja dan tanggung jawab kepada anggota dalam mencapai tujuan secara efisien.
- e. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bertujuan agar tercipta satu kerjasama sesama petani/peladang.
- f. Agar para petani/ peladang dapat berbagi pengalaman dan saling bertukar informasi.

Pembentukan kelompok tani bagi perempuan peladang Hutan *Rimbo Air Karuah* di Lambah Tabiang-Bukit Talang juga bertujuan diharapkan para peladang dapat meningkatkan wawasan tentang pertanian melalui berbagi informasi sesama anggota dan juga meningkatkan hubungan silaturahmi mereka secara teratur dan terorganisir dan pada akhirnya mengantar mereka kepada suatu pola yang sedemikian rupa, sehingga para anggota di dalamnya dapat bekerja sama dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penutup

Kegiatan pemberdayaan perempuan peladang hutan *Rimbo Air Karuah* pada masyarakat pinggir hutan di Lambah Tabiang-Bukit Talang BATU badinding nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman telah memberi dampak yang cukup berarti bagi kemajuan dan

perkembangan masyarakat setempat terutama bagi perempuannya peladang, hal ini dapat di lihat dari beberapa hal antara lain:

1. Muncul dan tumbuhnya keinginan perempuan peladang untuk mau berkumpul bersama dalam melakukan berbagai kegiatan sebagai jendela untuk membuka cakrawala
2. Dengan telah adanya keinginan masyarakat untuk berkumpul dan berpartisipasi maka mempermudah dan membuka jalan bagi memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membentuk kelompok tani sebagai wadah berkumpul bagi mereka sehingga mereka dapat bertukar pikiran dan pengalaman mengenai usaha pertanian/peladangan mereka.
3. Sebagai tindak lanjutnya masyarakat juga telah mempunyai kesadaran untuk membuat tabungan masyarakat yang dinamakan “Tabungan surau” untuk modal pembeli bibit pertanian dan juga tabungan bagi menanggulangi biaya keperluan lebaran sehingga diharapkan mereka tidak lagi terjebak tengkulak.
4. Dengan adanya pelatihan baca tulis Al-Qur'an diharapkan mereka bisa lancar dalam membaca Al-Qur'an sehingga mereka tidak lagi merasa rendah diri (*minder*) untuk mengikuti kegiatan wirid yasin gabungan yang ada di jorong (desa) ataupun di nagari (gabungan beberapa desa) yang ada di tempat mereka. Mereka juga tidak merasa rendah diri (*minder*) untuk mengikuti kelompok pengajian gabungan yang ada di jorong (desa) mereka. []

Daftar Pustaka

- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008),
- Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 1996), 11-12
- Priyono, S Onny dan A.M.W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996),
- Roesmidi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang, Alqaprint, 2008),
- Suharto, Edi *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: LSPSTKS, 1997),

Usman, Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Wasistiono, *Pemberdayaan Aparatur Daerah*, (Bandung: Abdi Praja, 1998)

Pemberdayaan Muslimah Minoritas melalui Pembinaan Peningkatan Kualitas Keagamaan di Kepulauan Mentawai

LUKMANUL HAKIM

IAIN Imam Bonjol Padang
luqman_az01@yahoo.com

Pendahuluan

Mentawai¹ merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang mendapatkan musibah berupa gempa dan tsunami pada tahun 2011 yang meluluhlantakkan pulau-pulau yang berada di sebelah utara Kepulauan Mentawai, di antaranya kepulauan Pagai Utara, Sikakap, Sikerei, dan Tubekep². Muslim Mentawai merupakan minoritas, karena muslim berjumlah 20% dari penduduk Mentawai.

Tubekep merupakan salah satu Pulau Sikakap, pulau terpencil yang penduduknya 100% muslim. Akses ke Tubekep dari pusat kota memakan waktu 20 jam dengan menggunakan transportasi resmi. Dengan pompong atau sampan menggunakan waktu 8 jam. Dibuktikan tidak adanya akses jalan darat, penerangan, fasilitas umum pemerintah, dan sebagainya, sedangkan sarana pendidikan seperti sekolah hanya terdiri dari satu kelas yang layak pakai. Hal ini mengakibatkan muslimah Tubeket menjadi golongan marjinal yang memiliki tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, moral, keagamaan, dan ekonomi cenderung rendah.

Di bidang keagamaan, walaupun mereka muslim akan tetapi pengetahuan, pemahaman dan pengamalan beragama mereka sangatlah rendah. Kebanyakan kaum muslimah tidak mengetahui tentang ibadah

¹ Lebih lanjut lihat Kabar Net Word Press.com/2010/II/08/Kepulauan Mentawai.

² Tubekep merupakan sebuah pulau yang dihuni oleh komunitas muslim. Pada saat terjadinya tsunami, seluruh penghuni pulau selamat, akan tetapi harta benda mereka tidak ada yang selamat. Uniknya lagi, satu-satunya mesjid yang ada di pulau tersebut, tidak rusak sedikitpun. Iswandi, Ulama Tubeket, *Wawancara*, Padang, Februari 2013.

praktis, puasa, konsep rumah tangga yang Islami, akhlak yang baik, pergaulan yang Islami, dan sebagainya. Dari data yang didapatkan, ketika pemerintah menyebarkan penyuluh agama ke daerah-daerah pinggiran, Tubekep jarang mendapatkan penyuluh agama yang lama menetap di daerah mereka. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan bimbingan yang serius untuk menangani masalah keberagaman ini. Salah satu penyebabnya adalah muslimah Tubeket rata-rata mereka tidak memiliki pendidikan, oleh sebab itu sebagian besar mereka tidak pandai berhitung, dan tulis baca, sehingga untuk mendalami agama secara mandiri sulit dilakukan.

Oleh sebab itu, program dampingan pemberdayaan muslimah minoritas sangat urgen dan dibutuhkan perempuan Tubeket. Dampak positif dari dampingan ini adalah, dapat menjadi solusi yang tepat bagi pemberdayaan perempuan marjinal di sektor keberagaman, mental, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Sebagaimana dengan komitmen pemerintah dengan *Millineum Development Goals* (MDGs).³ Yaitu berusaha untuk memberdayakan kaum perempuan melalui pendidikan, peningkatan peran dalam masyarakat, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Dengan adanya dampingan dalam pembinaan keberagaman yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh instansi terkait dan putra daerah, maka diharapkan muslimah Mentawai dapat berperan lebih dalam kehidupan perekonomian mereka dan peningkatan kualitas kehidupan mental dan agama mereka. Program ini bukan saja bertujuan untuk memberdayakan kaum muslimah minoritas, akan tetapi juga menjadi program dakwah pada daerah terisolir, karena kegiatan ini juga merupakan program peningkatan kualitas keberagaman.

Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah kegiatan pengabdian adalah bagaimana memberdayakan muslimah minoritas Mentawai khususnya Muslimah Tubekep melalui pembinaan peningkatan kualitas keagamaan? Sedangkan batasan masalah pengabdian adalah: Bagaimana pembinaan akidah, ibadah, akhlak dan fikih wanita muslimah minoritas Tubekep di Mentawai?

³ Totol Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Afabeta, 2015), h. 1

Tujuan dan Manfaat Pengabdian

Tujuan pengabdian masyarakat adalah untuk peningkatan kualitas keagamaan muslimah Tubekep melalui pembinaan keagamaan. Sehingga mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan di bidang akidah, ibadah, akhlak dan fikih wanita.

Manfaat pengabdian ini terlihat dampak teoritis dan praktis. Manfaat teoritis pengabdian ini adalah terciptanya konsep, kaidah, prinsip, dan pengetahuan tentang strategi, metode, dan pola komunikasi dalam peningkatan kualitas keagamaan dengan wanita suku terasing dalam hal ini muslimah Mentawai. Sedangkan manfaat praktis pengabdian ini akan dirasakan manfaatnya oleh komunitas muslimah Tubekep Mentawai itu sendiri yaitu, peningkatan kualitas akidah, ibadah, akhlak dan fikih wanita.

Kerangka Teori

Masyarakat Suku Terasing

Masyarakat suku terasing merupakan salah satu bentuk masyarakat asli Indonesia. Mereka hidup di tempat-tempat terpencil dan pedalaman sehingga sangat sulit disentuh pembangunan. Dilihat dari pengertian masyarakat suku terasing yang dipelopori Depsos, masyarakat suku terasing adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, sosial, dan budaya, mendiami suatu kawasan yang terpencil, terpencar, serta sulit dijangkau atau berpindah-pindah, ataupun yang hidup mengembara di kawasan laut. Mereka sulit mewujudkan interaksi sosial dengan masyarakat yang lebih modern⁴ Masyarakat suku terasing atau yang sering disebut sebagai masyarakat primitif, merupakan kelompok masyarakat berlevel paling rendah. Secara bahasa primitif (*prima*, *primair* atau *primus*) artinya pertama, satu atau asli.⁵

Ciri-ciri dan sifat masyarakat suku terasing adalah: a. *Isalement*/terisolasi. b. Hidup menggantungkan diri dengan alam. c. Masyarakat lebih bersifat konservatif. d. Kurang diferensiasi. Ciri di atas sejalan dengan ciri-ciri atau karakter dengan masyarakat primitif di antaranya: *Pertama*, adanya rasa solidaritas yang besar. *Kedua*, uniformitas anggota besar. *Ketiga*, hak milik perseorangan tidak nampak. *Keempat*, nilai benda duniawi mempunyai arti magis. Hal ini menyebabkan masyarakat

⁴ www. Depsos.go.id.Edisi 2

⁵ www. Library.ohio.edu/Indopobs/1996/01/13/003.html

suku terasing juga digolongkan pada masyarakat primitif. Ada 370 suku atau sub suku yang dikategorikan oleh Depsos sebagai masyarakat suku terasing yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah suku Mentawai.⁶

Peningkatan Kualitas Kegamaan

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan cita-cita dari pembangunan agama. Pembangunan agama di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kualitas kehidupan beragama yang belum memadai. Ajaran agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kesimpulannya pembangunan Indonesia tidak akan berhasil apabila manusia Indonesia tanpa terkecuali memiliki kualitas keberagamaan yang baik. Agama merupakan modal spiritual dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat karena berfungsi sebagai: meningkatkan etos kerja, memberikan jiwa dalam pemberian bantuan, memberikan arah pembangunan, dan pelindung dari penyimpangan.⁷

Kualitas keberagamaan seseorang bukanlah hal yang mudah untuk diukur, karena agama adalah masalah keyakinan yang abstrak. Apalagi bila dikaitkan dengan konsep agama yang abstrak pula. Oleh sebab itu seseorang yang disebut memiliki kualitas keberagamaan yang baik, apabila dirinya memiliki kematangan beragama. Seperti perkembangan-perkembangan jiwa beragama remaja dan dewasa di antaranya:

a. Perkembangan keagamaan remaja

Perkembangan agama pada remaja terlihat pada: *pertama*, sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya agama yang ajarannya kurang konservatif-dogmatis dan agak liberal akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. *Kedua*, perkembangan perasaan, perasaan sosial, etis dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Kehidupan religius akan cenderung mendorong dirinya lebih dekat ke arah hidup yang religius. *Ketiga*, perkembangan sosial, dalam kehidupan beragama mereka timbul

⁶ ([http//18, Wikipedia, org/ wiki/ masyarakat terasing yang semakin termaginalkan](http://18, Wikipedia, org/ wiki/ masyarakat terasing yang semakin termaginalkan))

⁷ Isbandi Ruminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2013), h. 264

konflik antara pertimbangan moral dan material. *Keempat*, perkembangan moral, para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang terlihat pada para remaja mencakup: (a) *Self directive* ta'at terhadap agama; (b) *Adaptive* mengikuti situasi lingkungan; (c) *Submissive* keraguan terhadap ajaran agama; (d) *Unadjusted* 'belum meyakini kebenaran ajaran agama; (e) *Deviant* menolak dasar agama.

Pandangan remaja tentang ibadah diungkapkan sebagai berikut: (a) Mereka sembahyang karena mereka yakin Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa mereka; (b) Sembahyang dapat menolong mereka meredakan kesusahan yang mereka derita; (c) Sembahyang menyebabkan mereka menjadi senang sesudah menunaikannya; (d) Sembahyang meningkatkan tanggung jawab dan tuntutan sebagai anggota masyarakat; (e) Sembahyang merupakan kebiasaan yang mengandung arti penting.

b. Perkembangan agama pada dewasa

Sedangkan keagamaan pada orang dewasa mulai stabil, hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu:

- 1) Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
- 2) Cenderung bersifat realistik, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku.
- 3) Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan.
- 4) Tingkat keta'atan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup.
- 5) Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas.
- 6) Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan nurani juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani.
- 7) Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.
- 8) Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial keagamaan sudah berkembang.

Untuk menjadikan manusia memiliki kematangan beragama, maka dalam Islam ciri-ciri manusia yang memiliki kematangan beragama sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman ketauhidan yang baik.
2. Selalu tunduk dan taat pada perintah Allah, dalam hal ini ta'at menjalankan ibadah.
3. Memiliki akhlak yang baik sebagai buah iman dan ibadah yang dilakukan.

Berdasarkan ciri-ciri manusia yang matang beragama terlihat indikasi bahwa manusia yang kualitas keberagamaannya baik di dalam Islam apabila manusia itu memiliki kematangan beragama. Tujuan beragama dalam Islam adalah *insan kamil*, *insan kamil* pun memiliki ciri yang sama dengan kematangan beragama, yaitu memiliki keimanan dan ketauhidan yang kuat, selalu tunduk dan ta'at akan perintah Allah, terakhir memiliki tingkah laku yang luhur sesuai dengan nilai-nilai ilahi.

Bila dikorelasikan dengan pelayanan agama, maka manusia menjadi *insan kamil* karena dua faktor: *Pertama* berasal dari dalam dirinya yaitu fitrah beragama. *Kedua* adalah berasal dari luar diri seperti bimbingan, pendidikan, layanan agama, dan sebagainya. Sekaitan dengan kualitas keberagamaan suku terasing, apabila layanan keagamaan dilakukan secara maksimal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, maka cepat atau lambat kematangan beragama mereka akan tercapai sehingga mereka memiliki kualitas keagamaan yang baik.

Pemberdayaan Perempuan

Kata "*empowerment*" dan "*empower*" diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian yaitu: pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*, dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.⁸

Memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap

⁸ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung : Fokusmedia, 2014), h. 17

kemiskinan dan keterbelakangan Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang merasa dirugikan. Hal ini dilihat dari perspektik HAM dan keadilan sosial.⁹

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Pengembangan masyarakat tersebut biasa dikenal dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Ada beberapa definisi mengenai konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.¹⁰ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi, di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana, perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, (terj) *Community Development : Based Alternative in an Age of Globalisation* , (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2008), h. 130

¹⁰ Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Ide pemikiran tentang bahasan pemberdayaan masyarakat berangkat pada keberadaan manusia sebagai sebuah sumber daya. Aspek dari sumber daya manusia yaitu pertama sumber daya dan manusia. Menurut Ndraha (2003:184) Sumber daya bermakna sebagai kekayaan suatu bangsa yang menjadi modal bagi kejayaan masa depan. Sedangkan nilai sumber daya menurut Menurut Ndraha (2003:184) sebagai kekuatan pengikat, penggerak atau pola perilaku suatu masyarakat menjadi sebuah bangsa yang harus terus menerus dipelihara.

Sumber daya Manusia menurut Yusuf Suit dan Almasdi (1995:32) adalah sebagai kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Dengan demikian sumber daya manusia harus selalu dikembangkan menuju kepada kehidupan manusia yang kualitas yang diharapkan sesuai dengan taraf perkembangan zaman dimana manusia itu hidup.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.¹¹

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Teknik analisis pemberdayaan atau teknik analisis Longwe sering dipakai untuk peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya dalam pembangunan. Sara H. Longwe mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan Kerangka Kemampuan Perempuan. Metode Sara H. Longwe mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isu gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi

¹¹ Budhy Novian, *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, 2010.

kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender¹². Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini adalah (1) tingkat kesejahteraan, (2) tingkat akses (terhadap sumberdaya dan manfaat), (3) tingkat kesadaran, (4) tingkat partisipasi aktif (dalam pengambilan keputusan), dan (5) tingkat penguasaan (kontrol). Pemahaman akses (peluang) dan kontrol (penguasaan) disini perlu tegas dibedakan. Akses (peluang) yang dimaksud di sini adalah kesempatan untuk menggunakan sumberdaya ataupun hasilnya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut, sedangkan kontrol (penguasaan) diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai akses terhadap sumberdaya tertentu, belum tentu selalu mempunyai kontrol atas sumberdaya tersebut, dan sebaliknya.

Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) menginginkan perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan nonmateri yang penting dan pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun di antara masyarakat¹³. Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki-laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan.

Strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasikan kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Menurut Suyanto dan Susanti dalam Daulay (2006) bahwa yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi

¹² Jang A. Muttalib, *Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita*, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara UPW, 1993.

¹³ Harmona Daulay, *Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Geding Johor*, Medan. Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September 2006.

arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting¹⁴.

Mengukur keberhasilan program pembangunan menurut perspektif gender, tidak hanya dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi lebih kepada sejauhmana program mampu memberdayakan perempuan. Dalam mengukur pengaruh sebuah kebijakan, dan atau program pembangunan terhadap masyarakat menurut perspektif gender. Moser mengemukakan dua konsep penting, yakni pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender. Pemberdayaan perempuan berdasarkan analisis gender adalah membuat perempuan berdaya dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Analisis kebutuhan praktis dan strategis berguna untuk menyusun suatu perencanaan ataupun mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan ataupun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Suatu program pembangunan yang berwawasan gender seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi ataupun memperhatikan kebutuhan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan *Gender and Development*, kebutuhan komunitas tersebut dibedakan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan baik bersifat praktis maupun strategis. Kebutuhan praktis berkaitan dengan kondisi (misalnya: kondisi hidup yang tidak memadai, kurangnya sumberdaya seperti pangan, air, kesehatan, pendidikan anak, pendapatan, dll), sedangkan kebutuhan strategis berkaitan dengan posisi (misalnya: posisi yang ter subordinasi dalam komunitas atau keluarga). Kebutuhan strategis biasanya berkaitan dengan perbaikan posisi perempuan (misalnya memberdayakan perempuan agar memperoleh kesempatan lebih besar terhadap akses sumberdaya, partisipasi yang seimbang dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan) memerlukan jangka waktu relatif lebih panjang.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang ideologi *patriarkhi* yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan). Pendekatan pemberdayaan memberi

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

kemungkinan bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun informasi, sehingga proses pemberdayaan harus mempersiapkan semua struktur dan sumber kekuasaan.

Secara umum sasaran dari program pemberdayaan perempuan, *pertama* adalah meningkatnya kualitas sumber daya perempuan di berbagai kegiatan sektor dan subsektor serta lembaga dan nonlembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme atau keahlian kaum perempuan. *Kedua*, mewujudkan kepekaan, kepedulian gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender. Kemudian sasaran yang *ketiga* yaitu mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Metode Penelitian

Jenis dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). *action research* adalah proses spiral yang meliputi perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yang cermat, kemudian pelaksanaan tindakan dilanjutkan penemuan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan, serta penemuan makna baru dari pengalaman sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aktif, adanya komunikasi dua arah dalam perencanaan yang berbentuk kegiatan kunjungan.¹⁶

Alur aktivitas program *action research* adalah *cyclical*, berupa siklus kegiatan yang berulang dan berkesinambungan. Dalam konteks program *action research* ini, siklus kegiatannya terdiri dari kegiatan (*mapping*), penyusunan rencana tindak (*action planning*), pelaksanaan rencana tindak (*implementation*), monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk selanjutnya dipetakan kembali dan kemudian dilakukan penyusunan ulang rencana tindak (*replan*), implementasi, monitoring dan evaluasi, dan terus kembali berulang.

¹⁶ Soetomo, *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 449-450

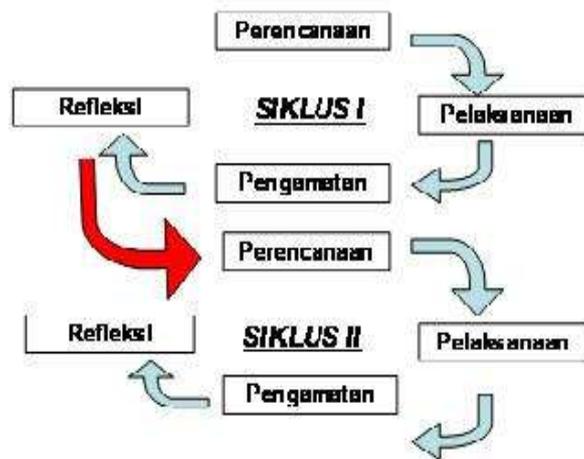
a. Desain *Participatory Action Research*

Program pemberdayaan muslim minoritas ini hakikatnya adalah sebuah "riset aksi". Oleh karena itu, pelaksanaannya secara umum mengelaborasi konsep *Participatory Action Research* (PAR) dengan berbagai modifikasi. Sesuai dengan prinsip *emancipatory research* dan *collaborative resources* yang menjadi bagian penting dari ciri sebuah riset aksi, maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan muslim minoritas ini, mereka berperan sebagai *main actor*. Sedangkan peneliti sekedar "pendamping" yang semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi *stakeholders* muslim minoritas memetakan dan merumuskan masalah, membuat rencana tindak, melaksanakan program kegiatan, memantau dan mengevaluasi setiap proses implementasi program.

b. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PAR

Dalam pelaksanaan *Participatory Action Research* (PAR), ada beberapa tahapan yang dilalui seperti pada gambar berikut:

Gambar I: Siklus Participatory Action Research



- 1) Tahap persiapan sosial/awal
- 2) Identifikasi Data dan Fakta Sosial
- 3) Analisa Sosial
- 4) Perumusan Masalah Sosial
- 5) Mengorganisir gagasan
- 6) Merumuskan rencana

- 7) Pengorganisasian sumber daya. Metode yang digunakan adalah teknik *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara, baik secara individu maupun secara berkelompok
- 8) Aksi Untuk Perubahan.
- 9) Observasi Evaluasi
- 10) Refleksi

Sumber Data

Sumber data dalam kegiatan pengabdian ini didapatkan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian, di antaranya: Penyuluh Agama Mentawai, Pimpinan agama di masyarakat, Pimpinan adat, Pimpinan pemerintahan, Dampingan dalam hal ini komunitas muslimah, Relawan Dompot Dhuafa Singgalang

Jumlah Sampel

Sampel dalam kegiatan pengabdian ini adalah komunitas muslimah Tubekep itu sendiri. Alasan muslimah Tubekep yang berjumlah 129 orang dan 82 orang sebagai sampel adalah: a. Tubekep disebut sebagai kampung Islam. b. Komunitas muslimah Tubekep sebagian besar tidak tahu sama sekali tentang ajaran agama, karena ke-Islaman mereka berasal dari turun temurun. c. Latar belakang pendidikan mereka sangat rendah, 88 % mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan 78% buta huruf.¹⁷ d. Miskin ekonomi, sosial, dan pemahaman agama menjadikan mereka menjadi objek penipuan kaum laki-laki.¹⁸ Untuk itu dampingan ini kami bagi menjadi beberapa kelompok dampingan berdasarkan kemampuan mereka dalam penguasaan ajaran Islam. Kemampuan terlihat dari aspek akidah (82 orang menilai kurang), ibadah (3 sedang dan 79 kurang), dan akhlak (12 sedang dan 70 kurang).¹⁹

¹⁷ Ngena Ibara, Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, *Wawancara Pribadi*, di Kantor, Senin 16 Mei 2014

¹⁸ Data diambil dari Kepala Desa 2013. Jumlah berdasarkan yang menetap di kampung saat dampingan.

¹⁹ Data didapatkan dari angket yang diberikan dan tes kemampuan pemahaman muslimah Tubekep terhadap ajaran Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pengabdian ini mengacu pada metodologi penelitian PAR secara umum. Teknik-tekniknya adalah :1. Teknik *transek*²⁰. 2. Wawancara mendalam kepada pihak terkait. 3. *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi kelompok terfokus yang melibatkan muslimah Tubekep Mentawai, Kepala Desa, pada FGD ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai harapan masa depan, solusi bersama untuk mengatasi masalah keluarga muslimah Tubekep Mentawai.

Metode Analisa Data

Data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dengan teknik: 1. Pohon analisis masalah dan pohon analisis tujuan. 2. Selanjutnya menggunakan matrik analisis partisipasi dan rencana aksi bersama masyarakat. Proses analisis dan pengolahan data ini dilakukan dengan prinsip *partisipatif, fathnership, perluasan jaringan*.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Muslimah Tubeket

Muslimah Tubeket hidup di sebuah kampung yang terdapat di Pulau Tubekep Kabupaten Mentawai. Secara geografis daerah Tubekep sangatlah jauh dari pusat kota kecamatan karena berada di tengah samudra Hindia yang hanya dapat ditempuh melalui jalan laut. Kondisi sosial muslimah merupakan bagian dari penduduk asli Mentawai yang sangat sederhana kehidupan sosial budayanya.²¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Duyvendak yang mengemukakan ciri-ciri dari masyarakat suku terasing di antaranya: terisolasi dari dunia luar, tidak suka menerima perubahan, tergantung pada alam, statis dan tradisional.²² Sistem perkawinan di Tubekep sangat dianjurkan menikah dengan pasangan se-kampung atau se-suku, dengan beberapa keluarga yang tinggal se-rumah kisaran 4-5 keluarga. Di Mentawai, umumnya yang berkewajiban mencari nafkah adalah kaum wanita. Hal inilah salah satu penyebab muslimah Mentawai ketinggalan dari pengetahuan karena sibuknya mengurus keluarga dan mencari nafkah.

²⁰ *Transek* (Penelusuran Desa) merupakan teknik yang digunakan bersama masyarakat dalam melakukan pengamatan langsung kondisi lingkungan.

²¹ Panji Masyarakat, 1993 h.27

²² Duyvendak, 1955, h. 31

Kondisi pendidikan muslimah mereka sangat rendah, ini dibuktikan dengan minimnya fasilitas pendidikan seperti sekolah, kelompok belajar, dan lembaga pendidikan lainnya. Di Tubekep hanya ada satu Sekolah Dasar itupun hanya terdiri dari satu ruangan kelas yang layak. Sebagian besar muslimah Tubekep buta huruf, karena setiap penduduk yang kami wawancarai mereka tidak tau tulis baca. Dari 82 muslimah dewasa di kampung tersebut, hanya 6 orang yang bisa tulis baca.

Kondisi ekonomi muslimah tubeket adalah golongan miskin, karena lokasi mereka dipedalaman, maka pencarian mereka dari hasil hutan, hasil laut dan sungai, dan sedikit yang bercocok tanam dan berladang. Kemiskinan masyarakat Tubekep ditambah lagi dengan biaya hidup yang sangat mahal. Harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Sedangkan kondisi kepercayaan/-keagamaan muslimah yang 100 % mereka memeluk agama Islam. Islam yang dianut hanya sekedar agama tanpa tau ajaran Islam itu sendiri.

Kegiatan Dampingan Pengabdian

Sebelum kegiatan dampingan dilakukan, terlebih dahulu tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan terlebih dahulu, yaitu: 1. Melakukan diskusi internal atau kelompok kecil dalam hal pemetaan masalah dan kebutuhan muslimah Tubekep. Hasil pemetaan masalah di antaranya: muslimah Tubekep mengalami kesulitan akses pendidikan, ekonomi, kesehatan, fasilitas umum, dan sosial dikarenakan terisolir, sehingga kondisi mereka miskin, buta huruf, pengamalan agama rendah, dan termaginalkan. Struktur organisasi sosial dan ekonomi yang sangat memberatkan posisi wanita di Mentawai. Wanita sebagai penanggungjawab nafkah keluarga, akan tetapi tidak memiliki peran dan kekuatan dalam menentukan, memilih, dan membuat keputusan. 2. Setelah melakukan diskusi kelompok kecil, tim pengabdian, pemuka masyarakat dan tim dari Dompot Du'afa Singgalang melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan muslimah, memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan kepada komunitas agar tidak salah sasaran terakhir mensosialisasikan program yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini, dilakukan dalam dua siklus. Tujuannya adalah agar pemberdayaan yang dilakukan lebih terarah, detail, dan benar-benar dapat membantu pemberdayaan muslimah di bidang peningkatan keagamaan. Alasan yang lain adalah kondisi muslimah yang masih sangat rendah tentang pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Penjelasan siklus kegiatannya:

1. Siklus pertama berupa kegiatan pemetaan dan identifikasi masalah dampingan, yang terdiri dari kegiatan: 1. Perencanaan kegiatan awal untuk memberikan muslimah pengetahuan agama dasar dan alat untuk mengetahui ajaran Islam secara mandiri. Bentuknya : *Pertama* secara individu atau kelompok kecil diajarkan tentang bagaimana membaca al-Qur'an secara praktis. *Kedua*, pengajian bersama tentang masalah ke-Islaman dan kewanitaan secara umum, disertai dengan tanya jawab. *Ketiga*, dilakukannya konseling kelompok untuk menggali permasalahan yang dialami wanita secara umum. Untuk materi pengajian dan konseling kelompok di antaranya: akidah Islamiyah, ibadah praktis, akhlak, halal dan haram dalam Islam, dan fikih wanita. 2. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 14-19 November 2013. Kegiatan pengajaran agama dilakukan di sela-sela kegiatan harian mereka. Seperti belajar membaca al-Qur'an dan pengetahuan agama lainnya. Sedangkan pengajian atau pelajaran agama secara kolektif dilakukan di Mesjid (walaupun tidak layak di sebut Mesjid), sesudah Shalat Magrib menjelang Isa. Materi pengajian melingkupi: akidah, ibadah praktis, akhlak, fikih wanita. 3. Pengamatan, ditekankan pada alur kegiatan apakah sesuai dengan yang direncanakan, pengamatan terhadap pemberian materi, dan yang lebih penting adalah pengamatan terhadap respon dan perubahan komunitas kearah yang lebih baik. Selama kegiatan, didapatkan antusias dan responsif yang positif dari muslimah. Keinginan mereka untuk belajar tinggi, akan tetapi kemampuan intelektual mereka yang rendah sehingga sulit bagi mereka untuk menguasai yang diajarkan. 4. Refleksi, kegiatan ini adalah diskusi tentang pelaksanaan program yang telah dilakukan, pencapaian program, perubahan komunitas, dan memetakan kembali masalah yang didapati setelah dilakukan program. Diskusi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang terlibat, selanjutnya diidentifikasi hasil evaluasi sebagai bahan masukan untuk siklus pendampingan berikutnya.

2. Siklus kedua berupa kegiatan aksi terdiri dari : 1. Perencanaan. Hasil siklus pertama bahwa muslimah Tubekep kurang mengetahui isi dan ajaran Islam secara umum, dan ajaran Islam berkenaan dengan muslimah khususnya. Untuk itu, kegiatan selanjutnya direncanakan untuk memberikan muslimah pengetahuan agama dasar dan alat untuk mengetahui ajaran Islam secara mandiri dan individual : *pertama* konseling untuk mengetahui kesulitan dan kendala mereka dalam meningkatkan kualitas keberagamaan mereka. *Kedua*, pengajian tentang

masalah ke-Islaman dan kewanitaan secara umum, disertai dengan tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan keagamaan mereka yang paling urgen, yang mempengaruhi sehingga pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan agama mereka memburuk. *Ketiga*, konseling untuk menggali permasalahan yang dialami wanita secara umum. Tim pengabdian, menyiapkan waktu secara pribadi dan sebanyak-banyaknya dalam beberapa hari untuk menangani masalah berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan mereka sebagai isteri, ibu, anggota masyarakat, dan muslimah. Untuk materi pengajian dan konseling individu di antaranya: akidah Islamiyah, ibadah praktis, akhlak, halal dan haram dalam Islam, dan fikih wanita. 2. Pelaksanaan dampingan pada siklus kedua ini dilakukan pada tanggal 16-19 November 2013. Materi pengajian sama dengan materi pada siklus pertama. 3. Pengamatan, selama kegiatan siklus kedua, didapatkan antusias dan responsif yang positif dari muslimah. Dibuktikan dalam setiap kegiatan, kehadiran mereka yang lengkap, baik dipengajian malam dan belajar al-Qur'an secara individu. Kegiatan yang dilakukan secara individual ini, lebih efektif dan mengena, karena mereka tidak malu-malu lagi dalam belajar al-Qur'an, bertanya tentang agama, dan *sharing* permasalahan hidup mereka dan bagaimana solusinya dalam agama. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, respon dan antusias mereka tidak diiringi dengan perubahan yang signifikan. 4. Refleksi, merupakan diskusi terakhir tentang hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan, sehingga diketahui tentang kondisi komunitas saat itu, pencapaian program, faktor-faktor pendukung dan penghalang pelaksanaan program, perubahan keagamaan komunitas dan memetakan kembali masalah baru yang didapati setelah dilakukan program.

Hasil Kegiatan Dampingan

1. Pembinaan akidah.

Pembinaan akidah yang menitikberatkan pada aspek pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap rukun iman. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang didapatkan dari 82 muslimah Tubekep, dalam table 6.

Berdasarkan tabel tersebut (tabel 6), diketahui bahwa materi akidah merupakan materi yang susah untuk mereka ketahui dan pahami. Akidah merupakan aspek dalam Islam yang bersifat abstrak, susah dipahami secara logika. Kondisi muslimah yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan sama sekali membuat mereka susah

memahami materi akidah. Setelah dilakukan pembinaan, maka aspek akidah sulit mereka pahami dan yakini, dibuktikan setelah dilakukan evaluasi banyak yang masih dalam kondisi tidak tahu dan paham sama sekali.

Tabel 6. Pengetahuan dan Pemahaman Akidah Muslimah Tubekep Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Dampingan

No	Aspek Akidah	Sebelum				Sesudah			
		baik	sedang	Kurang	Tidak tau	baik	sedang	Kurang	Tidak tau
1	Iman kepada Allah			12	70		12	34	36
2	Iman pada malaikat			3	79		8	12	62
3	Iman pada Kitab/al-Quran			6	76		8	26	48
4	Iman pada nabi/rasul			6	76		12	26	44
5	Iman pada hari kiamat			2	80		4	14	64
6	Iman pada qada dan qadar.			2	80		4	22	56
7	Kewajiban pada Allah			14	68		14	41	27
8	Hak manusia dari Allah			8	74		19	38	25

*Data sebelum tindakan merupakan data yang didapatkan dari pemetaan lanjutan, yaitu kondisi akidah muslimah Tubekep.

2. Pembinaan ibadah

Pembinaan ibadah yang dilakukan selama dampingan dilakukan dengan dua siklus, yaitu dampingan secara kelompok dan individual. Pengetahuan tentang ibadah lebih banyak dilakukan secara kelompok, sedang bimbingan tentang tata cara ibadah lebih banyak dilakukan melalui bimbingan individual. Kondisi muslimah sebelum dilakukannya dampingan adalah:

Tabel 8. Pengetahuan, Pemahaman dan Pengamalan Ibadah Muslimah Tubekep Sebelum dan sesudah Dilakukan Dampingan

No	Aspek Ibadah	Sebelum				Sesudah			
		Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu	Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu
1	Konsep bersuci	-	-	4	78	-	26	34	22
2	Tata cara berwudu	-	1	11	70	19	19	44	0

No	Aspek Ibadah	Sebelum				Sesudah			
		Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu	Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu
3	Tata cara mandi wajib	-	-	3	79	6	30	26	20
4	Tata cara tayamum	-	-	-	82	-	-	78	4
5	Konsep dasar salat	-	2	7	73	2	23	32	25
6	Bacaan salat	-	2	5	75	2	18	61	1
7	Tata cara salat	-	2	12	68	13	23	41	5
8	Salat sunnah	-	1	3	78	1	9	8	64
9	Konsep dasar puasa	-	2	2	78	2	8	32	40
10	Melaksanakan puasa	-	7	23	52	-	7	23	52
11	Mengamalkan puasa badal	-	-	1	81	-	-	1	81
12	Konsep dasar zakat	-	-	2	80	-	8	47	27
13	Zakat fitrah	-	8	6	68	-	8	6	68
14	Zakat harta	-	-	-	82	-	-	-	82
15	Sedekah/ infak	-	8	6	68	-	8	6	68
16	Ikonsep dasar haji/umrah	-	-	-	82	-	26	34	22
17	Melaksanakan haji/umrah	-	-	-	82	19	19	44	0
18	Doa dan zikir harian	-	3	7	72	6	30	26	20

Data pada kolom sebelum adalah data sebelum dilakukan pembinaan.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan, dari aspek ibadah mengalami perubahan yang cukup walaupun itu dari segi pengetahuan. Aspek pengamalan ibadah ada yang bisa langsung dipraktekkan sehingga dapat diukur penguasaan mereka terhadap materi yang diberikan seperti tata cara wudhu, tayamum, shalat, dan membaca al-Qur'an. Akan tetapi amalan ibadah yang lain seperti puasa, zakat, sedekah, dan haji, materi yang diberikan penguasaannya berdasarkan pengetahuan saja, dikarenakan kondisi dan waktu pengamalan dilakukan pada kondisi dan waktu waktu tertentu.

3. Pembinaan akhlak

Pembinaan akhlak yang dilakukan lebih banyak pada pengetahuan disertai harapan dan tuntutan untuk dilaksanakan oleh dampingan. Indikasi bahwa mereka menguasai materi yang diberikan baru sebatas mereka mengetahui akhlak yang harus melakukan dan akhlak yang tidak boleh mereka lakukan dan hindari. Perubahan yang dialami oleh muslimah Tubekep dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 10. Pengetahuan, Pemahaman dan Pengamalan Akhlak Muslimah Tubekep Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Pembinaan

No	Aspek Akhlak	Sebelum				Sesudah			
		Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu	Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu
1	Konsep dasar akhlak	-	3	23	58	3	23	58	-
2	Macam macam akhlak	-	3	16	63	3	16	63	-
3	Konsep akhlak mahmudah	-	5	11	66	5	11	66	-
4	Bentuk bentuk perbuatan akhlak mahmudah	6	4	11	61	10	34	38	-
5	Pengamalan akhlak mahmudah	6	16	60	-	6	16	60	-
6	Konsep akhlak mazmumah	-	4	12	66	16	44	32	-
7	Bentuk bentuk perbuatan akhlak mazmumah	6	9	17	50	18	44	30	-
8	Prilaku akhlak mazmumah	-	-	82	-	-	-	82	-
9	Faktor faktor yang memotivasi perbuatan akhlak mahmudah	-	-	13	71	4	39	39	
10	Faktor faktor yang mendorong	-	-	13	71	4	42	36	

	akhlak mazmumah								
11	Akibat perbuatan baik	-	-	45	37	40	24	18	
12	Akibat perbuatan buruk	-	-	47	35	40	24	18	

Data pada kolom sebelum adalah data sebelum dilakukan dampingan.

Tabel di atas, menggambarkan adanya perubahan sebelum dan sesudah dilakukan dampingan pada muslimah Tubekep. Amalan akhlak yang merupakan faktor penentu perubahan komunitas, tidak terlalu bisa dilihat karena waktu pengabdian dan pergaulan tim pengabdian dengan muslimah sangat terbatas. Oleh sebab itu, pada tabel amalan akhlak setelah dilakukan pembinaan, tidak ada perubahan secara kuantitatif

4. Pembinaan fikih wanita

Pembinaan fikih wanita adalah materi yang sangat penting dan sesuai dengan karakteristik komunitas yaitu wanita. Amalan-amalan dalam ibadah pada aspek-aspek tertentu membedakan amalan wanita dengan laki-laki. Penyebabnya secara fisik, emosional, peran, hak dan kewajiban wanita berbeda dengan laki-laki. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi perbedaan amalan agama seperti puasa, shalat, haji, dan sebagainya. Contohnya saja dalam ibadah shalat, wanita pada kondisi tertentu malah diharamkan shalat, yaitu ketika mereka sedang haid. Tabel di bawah akan menggambarkan kondisi muslimah Tubekep yaitu:

Tabel 12. Pengetahuan, Pemahaman, dan Pengamalan Fikih Wanita Muslimah Tubekep Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pembinaan

No	Aspek Fikih Wanita	Sebelum				Sesudah			
		Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu	Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu
1	Konsep pertumbuhan fisik wanita	-	-	6	76	2	18	32	
2	Konsep perkembangan emosional wanita	-	-	2	80	2	13	25	
3	Konsep perkembangan	-	-	1	81	5	19	49	

No	Aspek Fikih Wanita	Sebelum				Sesudah			
		Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu	Baik	Sedang	Kurang	Tidak Tahu
	sosial wanita								
4	Darah yang keluar dari rahim wanita	-	-	19	63	18	23	40	1
5	Konsep bersuci bagi wanita	-	-	2	80	15	24	42	1
6	Tata cara bersuci	-	-	4	78	9	34	39	-
7	Kewajiban sebagai muslimah	-	7	13	62	13	42	27	-
8	Hak sebagai muslimah	-	-	6	76	10	19	53	-
9	Kewajiban sebagai seorang istri	-	17	21	44	10	20	53	-
10	Hak sebagai seorang istri	-	-	23	59	10	20	53	-
11	Kewajiban sebagai seorang ibu	-	16	23	43	23	33	26	-
12	Hak sebagai seorang ibu	-	-	12	70	23	33	26	-
13	Kewajiban sebagai warga masyarakat	-	2	13	67	12	37	33	-
14	Hak sebagai warga masyarakat	-	1	6	75	12	37	33	-
15	Konsep aurat wanita	-	7	8	67	12	19	39	12
16	Menutup aurat keseharian	-	7	23	52	14	23	45	-
17	Menutup aurat apabila berpergian	-	13	14	55	17	27	36	2

Pada saat dilakukan dampingan, banyak hal yang ditanyakan dan dikemukakan muslimah Tubekep berkenaan masalah mereka sebagai wanita, mulai dari masalah pengamalan ibadah, masalah keluarga,

masalah mendidik anak, masalah eksistensi mereka di masyarakat. Melalui kegiatan dampingan ini dapat diidentifikasi permasalahan muslimah Tubekep yang berbeda dari muslimah di daerah lain. Seperti beban mereka yang berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Kemudian hidup di daerah terpencil, jauh dari semua fasilitas umum menjadikan mereka hidup dalam kondisi miskin, bodoh, angka kematian ibu dan anak cukup tinggi, dan sebagainya.

Walapun perubahan tidak banyak bernilai baik, tetapi dengan mereka mengetahui dan sedikit paham tentang pertumbuhan fisik, perkembangan, hak dan kewajiban mereka, sudah mencukupi untuk mereka menjalani hidup sebagai wanita ke depan. Hal yang terpenting adalah adanya kesadaran tentang diri, tahu hak dan kewajiban mereka sebagai wanita di rumah tangga dan di masyarakat, itu merupakan perubahan yang cukup baik.

Analisa Kegiatan Dampingan Keseluruhan

1. Pembinaan akidah

Pembinaan akidah yang dilakukan cukup membawa perubahan walaupun tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan. Akidah memang aspek yang sulit untuk dibina apabila tidak didukung dengan kemauan, kemampuan, dan motivasi muslimah. Mereka cukup memiliki kemauan dan motivasi untuk belajar dan dibimbing, akan tetapi faktor kemampuan intelegensia untuk mencerna materi bimbingan sangat susah bagi mereka. Penyebabnya adalah mereka memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, banyak dari mereka tidak pernah sekolah, tidak bisa tulis baca, komunikasi yang sangat terbatas, dan sebagainya.

2. Pembinaan Ibadah

Berkenaan dengan pembinaan ibadah yang dilakukan, kegiatan ini juga memiliki kendala sama halnya dengan kendala pada pembinaan akidah. Kendala pada pembinaan ibadah lebih terlihat pada praktek baca al-Qur'an, bacaan shalat, doa dan zikir terkendala pada Bahasa Arab yang digunakan membuat mereka sangat sulit untuk menguasainya. Akan tetapi, ibadah merupakan pengamalan ibadah yang dapat dipelajari karena berbentuk prilaku, kata-kata, dapat dilihat, dirasa dan didengar.

Data yang dikemukakan tentang kondisi muslimah Tubekep sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan, cukup berhasil. Dibuktikan

dengan perkembangan yang signifikan, apabila sebelumnya banyak dari aspek ibadah ini yang tidak diketahui, tetapi setelah dilakukannya pembinaan mereka sudah mengetahui, paham dan dapat mengamalkan ibadah dalam Islam, walaupun masih banyak kesalahan, tetapi rata-rata mereka sudah mengetahui tentang ibadah yang terdapat dalam agama Islam.

3. Pembinaan akhlak

Pembinaan akhlak yang dilakukan dalam pedampingan muslimah Tubekep, lebih banyak dilakukan secara teoritis, karena pembinaan tingkah laku merupakan pembiasaan yang menggunakan waktu relatif lama. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pembinaan akhlak, karena pembinaan yang tim pengabdian lakukan tidak bisa dengan waktu yang lama. Di samping itu kendala yang sama dengan pembinaan akidah dan ibadah juga dialami dalam pembinaan akhlak. Faktor yang menjadikan muslimah Tubekep mampu menguasai materi pembinaan akhlak adalah, konsep akhlak dalam Islam hampir tidak ada yang bertentangan dengan apa yang telah mereka lakukan sehari-hari.

4. Pembinaan Fikih Wanita

Pembinaan fikih wanita merupakan pembinaan yang paling penting dilakukan, rata-rata mereka tidak mengetahui sama sekali hal-hal yang berkaitan dengan fikih wanita, padahal pengetahuan dan pemahaman terhadap fikih wanita sangat menentukan pada keyakinan akidah, diterima atau tidaknya amalan ibadah mereka, serta bagaimana sikap dan tingkah laku mereka sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat.

Kendala yang mereka alami sehingga mereka tidak tahu, adalah, karena mereka belum pernah didatangi oleh dai perempuan yang menetap di kampung mereka. Adapun dai perempuan yang datang kepada mereka, hanya datang beberapa jam, kemudian tidak menyinggung tentang fikih wanita.

Kesimpulan

Berdasarkan rancangan program melalui FGD dan pelaksanaan kegiatan, serta perubahan yang terjadi pada komunitas, maka kesimpulan pengabdian ini adalah:

1. Pada siklus pertama dampingan dilakukan, metode yang dilakukan dalam memberdayakan muslimah Tubekep melalui pembinaan agama adalah dengan metode kelompok. Materi yang diberikan meliputi materi akidah, ibadah, baca al-Qur'an, akhlak, dan fikih wanita. Didapatkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman muslimah terhadap Islam, walaupun belum signifikan, disebabkan mereka masih merasa malu satu sama lainnya dalam mengungkapkan pertanyaan apabila materi belum diketahui dan dipahami, atau berdiskusi.
2. Pada siklus kedua, metode yang digunakan adalah metode pembinaan dan konseling keagamaan individual.. Pada metode ini pembinaan diberikan sesuai dengan kebutuhan komunitas secara individual. Secara umum materi telah diberikan pada siklus pertama. Siklus kedua lebih bersifat pendalaman berdasarkan kebutuhan dan kemampuan komunitas secara individu. Pada siklus ini, masalah lebih terbuka dikemukakan muslimah, bukan saja masalah keagamaan yang umum mereka alami, tetapi sampai masalah pribadi yang minta dicarikan solusinya secara keagamaan. Pada siklus ini baru terjadi peningkatan hasil pembinaan.
3. Faktor faktor yang menyebabkan adanya perubahan muslimah dalam kegiatan dampingan ini adalah antusias dan respon muslimah yang ingin mendalami agama melalui kegiatan pengabdian ini. Rasa antusias mereka karena kampung mereka jarang didatangi oleh da'i, dikarenakan lokasi yang terpencil.
4. Faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan pembinaan ini adalah, latar belakang pendidikan muslimah yang sangat rendah, banyak yang buta huruf, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, daerah yang sangat terpencil, jauh dari fasilitas umum, pengaruh adat dan agama lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta selama ini mereka menganggap agama hanya formalitas saja.

Dari kesimpulan tersebut, diharapkan pemberdayaan melalui pembinaan keagamaan muslimah minoritas Tubekep ini, perlu dilakukan secara berkelanjutan, serius, dan terencana dengan melibatkan pihak-pihak seperti Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Mentawai, Perguruan

Tinggi, organisasi sosial dan keagamaan. Banyak sekali permasalahan muslimah Tubekep yang harus ditangani, agar muslimah Tubekep tidak menjadi komunitas yang lemah, miskin, bodoh, tidak berdaya, sehingga menjadi beban pembangunan nantinya. Pemberdayaan muslimah Tubekep diharapkan tidak sebatas pembinaan agama saja, tapi diharapkan juga pembinaan di bidang keterampilan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. []

Daftar Pustaka

Adi, Isbandi Ruminto, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013

A. Muttalib, Jang, *Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita*, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. *Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan*. Kantor Menteri Negara UPW, 1993

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

_____, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Data diambil dari Kepala Desa 2013. Jumlah berdasarkan yang menetap di kampung saat dampungan.

Data didapatkan dari angket yang diberikan dan tes kemampuan pemahaman muslimah Tubekep terhadap ajaran Islam.

Daulay, Harmona, *Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedung Johor, Medan*. *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume I Nomor I, September 2006.

Duyvendak, 1955

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2001, Jilid I

Hajar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

[http://18, Wikipedia, org/ wiki/ masyarakat terasing yang semakin termaginalkan](http://18.Wikipedia.org/wiki/masyarakat_terasing_yang_semakin_termaginalkan)

Ife, Jim dan Frank Tesoriero, (terj) *Community Development : Based Alternative in an Age of Globalisation*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Ibara, Ngena, Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, *Wawancara Pribadi*, di Kantor, Senin 16 Mei 2014
- Iswandi, Ulama Tubeket, *Wawancara*, Padang, Februari 2013.
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999
- Kabar Net Word Press.com/2010/II/08/Kepulauan Mentawai.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Mardikanto, Totol dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2015
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Muttalib, Jang A., *Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara UPW*, 1993.
- Nanang, Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Novian, Budhy, *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988
- Ngena Ibara, Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, *Wawancara Pribadi*, di Kantor, Senin 16 Mei 2014
- Panji Masyarakat, 1993
- Soetomo, *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Soleh, Chabib, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung: Fokusmedia, 2014
- Tan, Mely G., *Perempuan dan Pemberdayaan*, Makalah dalam Kongres Ikatan Sosiologi Indonesia, Ujung Pandang, 1995.
- Wikipedia Islam di Sumatera Barat: [id.wikipedia.org/wiki/Islam di Sumatera Barat](http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Sumatera_Barat).
- www.Depsos.go.id. Edisi 2

[www. Library.ohio.edu/Indopobs/1996/01/13/003.html](http://www.Library.ohio.edu/Indopobs/1996/01/13/003.html)

Yusuf, Muri, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, Padang: FIP, 1997

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian*, Diktat Perkuliahan Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Semester Genap TA 2001-2002